



PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2023

Tentang

**RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 - 2026**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023 2026, yang selanjutnya disebut RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional.

Pasal 2

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 3

Maksud penetapan RAD TPB adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2023–2026.

Pasal 4

Dalam penetapan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional.

Pasal 5

Tujuan penetapan RAD TPB adalah sebagai pedoman dalam:

- a. menetapkan arah kebijakan umum, strategi dan program serta kegiatan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan selama 5 (lima) tahun ke depan agar target capaian TPB yang diharapkan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan
- b. penyusunan dan pelaksanaan RKPD.

Pasal 6

- (1) RAD TPB memuat komitmen Pemerintah Daerah, kondisi capaian dan tantangan, target dan arah kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai ukuran pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2023-2026.

Pasal 7

- (1) RAD TPB disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I memuat pendahuluan

Bab II memuat kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB

Bab III memuat target dan arah kebijakan pencapaian TPB

Bab IV memuat pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Bab V memuat penutup

- (2) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan RAD TPB kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional setiap tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Oktober 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 32 TAHUN 2023

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN
2023-2026.

**RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2023-2026**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD	I-1
1.2. Komitmen Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs)	I-26
1.3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs	I-90
1.4. Pembiayaan TPB/SDGs	I-90
1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs	I-91
1.6. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB	I-92
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs	
2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	II-3
2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	II-20
2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	II-30
2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	II-39
2.5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	II-47
2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	II-52
2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern.	II-57
2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	II-60
2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	II-67
2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	II-71
2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	II-75
2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	II-83
2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	II-89
2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	II-92
2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	II-96
2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh	II-100

2.17.	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	II-105
2.18.	Tantangan dan Kendala Pelaksanaan TPB/SDGs	II-122
BAB III	TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs	III-1
3.1.	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	III-13
3.2.	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	III-32
3.3.	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	III-46
3.4.	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	III-57
3.5.	Tujuan 5 Kesetaraan Gender	III-67
3.6.	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	III-74
3.7.	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	III-78
3.8.	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	III-82
3.9.	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	III-88
3.10.	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	III-94
3.11.	Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	III-99
3.12.	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	III-106
3.13.	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	III-113
3.14.	Tujuan 14 Ekosistem Lautan	III-118
3.15.	Tujuan 15 Ekosistem Daratan	III-124
3.16.	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	III-129
3.17.	Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	III-147
BAB IV	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	IV-1
4.1.	Tujuan Pemantauan dan Evaluasi	IV-1
4.2.	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	IV-1
4.3.	Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS	IV-3
4.4.	Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi	IV-10
BAB V	PENUTUP	V-1
LAMPIRAN		
1.	Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
2.	Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota	
3.	Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselaran dan Sinergi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	I-7
Tabel 1.2	Pemetaan Indikator Kunci SDGs dalam Peta Jalan SDGs Indonesia di Provinsi Sumatera Barat	I-23
Tabel 1.3	Komitmen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terhadap pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	I-28
Tabel 2.1	Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	II-2
Tabel 2.2	Capaian Tujuan 1 di Provinsi Sumatera Barat	II-5
Tabel 2.3	Capaian Tujuan 2 di Provinsi Sumatera Barat	II-21
Tabel 2.4	Capaian Tujuan 3 di Provinsi Sumatera Barat	II-31
Tabel 2.5	Capaian Tujuan 4 di Provinsi Sumatera Barat	II-40
Tabel 2.6	Capaian Tujuan 5 di Provinsi Sumatera Barat	II-48
Tabel 2.7	Capaian Tujuan 6 di Provinsi Sumatera Barat	II-53
Tabel 2.8	Capaian Tujuan 7 di Provinsi Sumatera Barat	II-58
Tabel 2.9	Capaian Tujuan 8 di Provinsi Sumatera Barat	II-61
Tabel 2.10	Capaian Tujuan 9 di Provinsi Sumatera Barat	II-68
Tabel 2.11	Capaian Tujuan 10 di Provinsi Sumatera Barat	II-72
Tabel 2.12	Capaian Tujuan 11 di Provinsi Sumatera Barat	II-76
Tabel 2.13	Capaian Tujuan 12 di Provinsi Sumatera Barat	II-84
Tabel 2.14	Capaian Tujuan 13 di Provinsi Sumatera Barat	II-90
Tabel 2.15	Capaian Tujuan 14 di Provinsi Sumatera Barat	II-93
Tabel 2.16	Capaian Tujuan 15 di Provinsi Sumatera Barat	II-97
Tabel 2.17	Capaian Tujuan 16 di Provinsi Sumatera Barat	II-101
Tabel 2.18	Capaian Tujuan 17 di Provinsi Sumatera Barat	II-116
Tabel 3.1	Jumlah Indikator TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026	III-11
Tabel 3.2	Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	III-21
Tabel 3.3	Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	III-38

Tabel 3.4	Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	III-51
Tabel 3.5	Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	III-62
Tabel 3.6	Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesenjangan Gender	III-71
Tabel 3.7	Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.	III-76
Tabel 3.8	Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau.	III-80
Tabel 3.9	Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	III-84
Tabel 3.10	Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	III-91
Tabel 3.11	Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan...	III-97
Tabel 3.12	Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	III-101
Tabel 3.13	Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	III-109
Tabel 3.14	Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	III-116
Tabel 3.15	Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan	III-120
Tabel 3.16	Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan	III-127
Tabel 3.17	Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	III-138
Tabel 3.18	Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	III-150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	4 Pilar TPB/SDGs	I-3
Gambar 1.2	Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan	I-4
Gambar 1.3	Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2020-2024, dan TPB/SDGs	I-5
Gambar 1.4	TPB/SDGs sebagai instrumen utama transformasi ekonomi Indonesia	I-6
Gambar 2.1	Persentase Capaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat	II-3
Gambar 2.2	Persentase Capaian Tujuan 1 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-4
Gambar 2.3	Persentase Capaian Tujuan 2 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-20
Gambar 2.4	Persentase Capaian Tujuan 3 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-30
Gambar 2.5	Persentase Capaian Tujuan 4 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-39
Gambar 2.6	Persentase Capaian Tujuan 5 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-47
Gambar 2.7	Persentase Capaian Tujuan 6 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-52
Gambar 2.8	Persentase Capaian Tujuan 7 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-57
Gambar 2.9	Persentase Capaian Tujuan 8 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-60
Gambar 2.10	Persentase Capaian Tujuan 9 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-67
Gambar 2.11	Persentase Capaian Tujuan 10 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-71
Gambar 2.12	Persentase Capaian Tujuan 11 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-75
Gambar 2.13	Persentase Capaian Tujuan 12 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-83
Gambar 2.14	Persentase Capaian Tujuan 13 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-89
Gambar 2.15	Persentase Capaian Tujuan 14 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-92

Gambar 2.16	Persentase Capaian Tujuan 15 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-96
Gambar 2.17	Persentase Capaian Tujuan 16 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-100
Gambar 2.18	Persentase Capaian Tujuan 17 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". TPB terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan TPB/SDGs, meliputi:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi setiap tujuan di atas, menggunakan metadata indikator TPB/SDGs. Pada setiap TPB terdapat indikator yang menjadi alat ukur pencapaian TPB. Metadata indikator tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar SDGs, yang terdiri atas pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan ekonomi, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pengertian masing-masing pilar SDGs, yaitu:

- a. **Pembangunan Sosial SDGs** adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
- b. **Pembangunan Lingkungan SDGs** adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
- c. **Pembangunan Ekonomi SDGs** adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.
- d. **Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs** adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Adapun pengelompokan 17 tujuan pada masing-masing pilar disajikan pada gambar di bawah:

Gambar 1.1
4 Pilar TPB/SDGs



Sumber: diolah dari Metadata Indikator, Bappenas, 2020

Di tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam rangka pencapaian sasaran nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *jo* Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB.

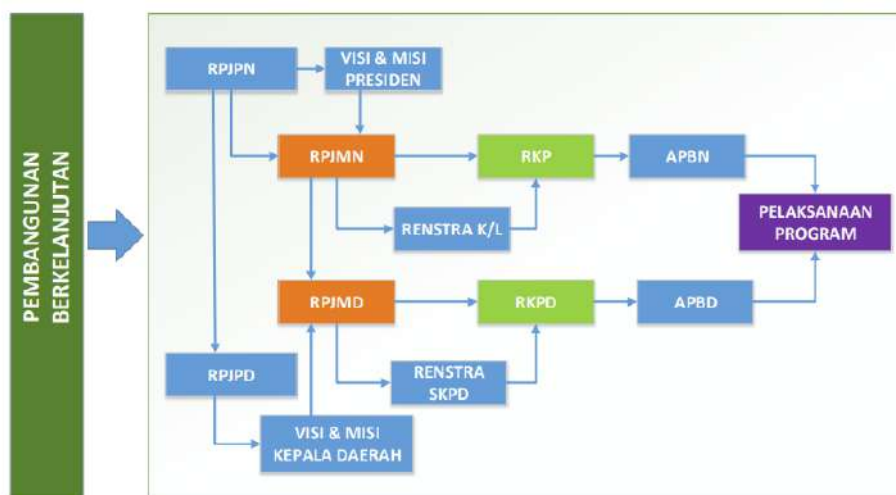
Rencana Aksi Nasional TPB (RAN TPB) adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional. Perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian TPB secara nasional juga didukung oleh tingkat daerah. Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah juga diminta menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan Bersama Bupati/Wali Kota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Rencana Aksi Daerah TPB (RAD TPB) adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai

kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam Nawacita, RPJMN dan RPJMD dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Hal ini juga telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan pencapaian TPB/SDGs dan indikator-indikator yang sudah tercapai, belum tercapai atau membutuhkan upaya lebih dalam pencapaiannya. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah yang didalamnya juga memuat kebijakan dan program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran tahun dalam bentuk RKPD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada berikut.

Gambar 1.2
Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam
Dokumen Perencanaan Pembangunan



Sumber: Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB Edisi II, Bappenas

a. Keselarasan SDGs Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024

Pengarusutamaan target-target TPB/SDGs dalam RPJMN berperan dalam upaya melokalkan pelaksanaan TPB/SDGs sampai dengan tingkat daerah. Dalam RPJMN 2020-2024, sebanyak 124 dari total 169 target TPB/SDGs telah diarusutamakan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. Jumlah ini meningkat dibandingkan target yang diarusutamakan dalam RPJMN 2015-2019 sebanyak 94 target. Dengan diarusutamakannya

target TPB/SDGs ke dalam RPJMN maka program dan kegiatan yang terkait pencapaian SDGs beserta alokasi anggarannya dielaborasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya. Selanjutnya, target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan selaras dengan TPB/SDGs menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan nonpemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs. Dengan demikian, target-target SDGs secara bertahap dapat dicapai hingga tahun 2030.

Gambar 1.3
Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2020-2024, dan TPB/SDGs



Sumber: Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs Tahun 2021-2024

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak triwulan pertama tahun 2020 menyebabkan tekanan besar terhadap sistem kesehatan, perekonomian, dan kondisi sosial masyarakat. Pandemi juga berdampak pada berbagai kemajuan pencapaian sasaran dan target TPB/SDGs. Kondisi ini mendorong Pemerintah melakukan orientasi baru untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan mengejar gap sasaran RPJMN termasuk di dalamnya target-target TPB/SDGs, serta agar visi Indonesia Maju dapat dicapai tepat waktu. Untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan dan berketahanan, Pemerintah menyiapkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan mengusung prinsip keselarasan *green recovery* dan *green economy* yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan TPB/SDGs, pemerintah menyusun enam strategi besar redesain transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19 sebagai "game changer" menuju Indonesia Maju di tahun 2045.

Gambar 1.4
TPB/SDGs sebagai instrumen utama transformasi ekonomi Indonesia



b. Keselarasan SDGs Terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Agenda pembangunan lima tahunan Provinsi Sumatera Barat tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2021, merupakan penjabaran operasional dari Sasaran pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024. Penyusunan RPJMD didasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang merupakan hasil dari Pilkada serentak pada Desember Tahun 2020, serta memuat tujuan, sasaran, strategi pembangunan dan arah kebijakan umum, prioritas pembangunan dan program pembangunan serta Perangkat Daerah serta lintas Perangkat Daerah yang akan melaksanakan program pembangunan dimaksud. Selain itu, RPJMD Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan 25 (dua puluh lima) Program Unggulan yang target serta kinerjanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah memperhatikan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Barat, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang diperoleh dari rangkaian tahapan yang dilaksanakan seperti konsultasi publik dan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Musrenbang. Implementasi pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Oleh sebab itu, dokumen RPJMD ini menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di

jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta juga menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan termasuk lembaga non pemerintah/*non state actor* dalam bersinergi mewujudkan visi dan misi pembangunan di Sumatera Barat.

RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *jo* Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RAD TPB/SDGs ini menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kab/Kota se-Sumatera Barat.

Walaupun dari sisi waktu RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 telah ditetapkan lebih dahulu daripada penetapan RAD TPB, namun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), di Provinsi Sumatera Barat telah diarusutamakan dalam RPJMD 2021-2026. Berdasarkan hasil mapping terhadap tujuan SDGs dengan misi, tujuan, sasaran pembangunan dan indikator sasaran pembanguann yang telah tertuang dalam RPJMD 2021-2026, maka seluruh tujuan SDGs/TPB telah selaras dengan sasaran pembangunan di Sumatera Barat hingga 2026, sebagaimana terlibat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Keselarasan dan Sinergi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan				
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing				
Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	1. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizii yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 2. Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
		2. Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	1. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 2. Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 5. Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
		3. Meningkatnya kualitas Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	1. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
			2. Harapan Lama Sekolah	1. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
		4. Meningkatnya daya saing masyarakat	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas (Sakernas BPS)	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah				
Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	1. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 2. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				4. Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
		2. Meningkatkan Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	1. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 2. Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
		3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan keluarga	1. Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 3. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 4. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 5. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 6. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	1. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 2. Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				3. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 4. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 5. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 6. Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				
Meningkatkan kesejahteraan petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	1. Meningkatkan pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	1. Nilai Tukar Petani (NTP)	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			2. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			3. Pendapatan pembudidaya ikan	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 5. Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
			4. Pendapatan nelayan	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 4. Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
			5. Pendapatan Peternak	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			6. Peningkatan Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
		2. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan	Indeks ketahanan Pangan	1. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 5. Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
		3. Meningkatkan pendapatan Petani Hutan	Peningkatan pendapatan petani hutan	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 4. Tujuan 15. Melindungi merestorasi dan meningkatkan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
Misi 4 : meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital				
Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing -	1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	1. Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 4. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 5. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 6. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
		2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 5. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 6. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
		3. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	1. Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 5. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			2. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
		4. Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 4. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 5. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 6. Tujuan 15. Melindungi merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
		5. Meningkatkan pertumbuhan investasi	Persentase peningkatan Investasi di provinsi	1. Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua 2. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 3. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh,

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 4. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 5. Tujuan 15. Melindungi merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
		6. Meningkatkan peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	1. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 2. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 3. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 5. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 5 : meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan				
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 5. Tujuan 15. Melindungi merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan,

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				serta menghentikan kehilangan keanejaragaman hayati 6. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
		2. Meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi ekraf pada PDRB	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 4. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 5. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 6. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 6 : meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan				
Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Indeks Kinerja Infrastruktur	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Rasio konektivitas	1. Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua 2. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 4. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
			Kemantapan Jalan	1. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 2. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 4. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
		2. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 2. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 3. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 4. Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
		3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua 2. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 3. Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 4. Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 5. Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan 6. Tujuan 15. Melindungi merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
		4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	1. Akses air minum	1. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 2. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
			2. Akses sanitasi layak	1. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 2. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
			3. Presentase bangunan strategis terbangun	1. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				2. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 3. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
			4. Peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	1. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
			5. Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	1. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
			6. Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	1. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
		5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	1. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 2. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 4. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
Misi 7 : mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Indeks reformasi birokrasi	1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai Evaluasi SAKIP	1. Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan 2. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
			2. Nilai EPPD	1. Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan 2. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
			3. Opini laporan keuangan	1. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 2. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
			4. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	1. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 2. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
		2. Meningkatkan kapabilitas birokrasi	1. Indeks SPBE	1. Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan 2. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
			2. Indeks Profesionalitas ASN	1. Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
		3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks persepsi kualitas pelayanan	1. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 2. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 3. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 4. Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

Berdasarkan tabel data maka diperoleh informasi bahwa 17 tujuan SDGs telah termuat dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2021-2026. Keselarasan dan sinergi ini perlu terus dijaga dalam penyusunan dokumen RKPd dan RPJMD serta menjadi acuan dan *supplement* dalam penyusunan RPJPD 2025-2025 sehingga diharapkan pada tahun 2030

seluruh tujuan, target, dan indikator TPB/SDGs yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden dapat selalu terakomodir dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah selanjutnya dan tentunya juga dapat terkawal dan tercapai sebagaimana yang dicita-citakan.

Menilik kepada banyaknya indikator SDGs yang belum tercapai dan/atau belum tersedia datanya, maka dirasa perlu untuk memetakan kembali indikator SDGs yang relevan dan sesuai dengan isu dan permasalahan daerah. Pada tahun 2020 Bappenas telah menyusun dokumen Peta Jalan SDGs Indonesia 2030 yang berisi permasalahan dan proyeksi dari indikator utama dari setiap tujuan dalam TPB, termasuk juga kebijakan progresif dalam mencapai target-target TPB. Dari 288 indikator SDGs, hanya 60 indikator yang masuk dalam Peta Jalan SDGs Indonesia yang dinilai memiliki korelasi kuat dengan isu dan permasalahan yang ada di Indonesia untuk setiap tujuan dalam TPB.

Dalam rangka penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026, seyogyanya konsep ini perlu diadaptasi. Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjawab tantangan pembangunan, baik pembangunan bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola diantaranya dengan memfokuskan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs periode 2022-2026 pada sejumlah target dan indikator yang relevan dengan sasaran pembangunan daerah serta memberikan dampak yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan masa kini dan masa yang akan datang.

Penyusunan dokumen ini seyogyanya dititikberatkan pada 60 indikator yang ada di dalam Peta Jalan SDGs Indonesia. Secara terperinci, 60 indikator dalam Peta Jalan SDGs Indonesia tersebut adalah:

1. SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
 - a. 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
2. SDGs 2: Tanpa Kelaparan
 - a. 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
 - b. 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang/berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan (*Food Insecurity Experiences Scale*)
 - c. 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek/sangat pendek) pada balita
 - d. 2.2.2* Prevalensi wasting (kurus/sangat kurus) pada balita
 - e. 2.3.1* Nilai tambah pertanian per tenaga kerja di sektor pertanian
3. SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 - a. 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
 - b. 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup
 - c. 3.2.2* Angka Kematian Anak (AKN) per 1.000 kelahiran hidup
 - d. 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
 - e. 3.3.1 Angka Infeksi Baru HIV per 1.000 Populasi tidak terinfeksi HIV
 - f. 3.3.2.(a) Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk
 - g. 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai status eliminasi malaria

- h. 3.4.1.(a) Persentase merokok pada pemuda (usia ≤ 18 tahun)
 - i. 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk dewasa (usia ≥ 18 tahun)
 - j. 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
 - k. 3.7.2.(a) Angka Total Fertilitas (TFR)
 - l. 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4. SDGs 4: Pendidikan Berkualitas
- a. 4.1.1* Proporsi anak-anak pada: (a) kelas 4 (empat) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika
 - b. 4.1.1* Proporsi remaja pada: (a) kelas 9 (sembilan) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika
 - c. 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat
 - d. 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat
 - e. 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - f. 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat
 - g. 4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
 - h. 4.5.1* Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat & (2) SMP/MTs/ sederajat
 - i. 4.5.1* Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat & (4) Perguruan Tinggi
 - j. 4.5.1* Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di tingkat (1) SD/MI/ sederajat, (2) SMP/MTs/ sederajat, (3) SMA/SMK/MA/ sederajat, dan (4) Perguruan Tinggi
 - k. 4.c.1* Persentase guru yang bersertifikat pendidik – (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB)
5. SDGs 5: Kesetaraan Gender
- a. 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun & 18 tahun
 - b. 5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun
 - c. 5.6.1.(a) Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi
6. SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak
- a. 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak
 - b. 6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak
7. SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau
- a. 7.1.1.(a) Konsumsi Listrik per Kapita
 - b. 7.2.1* Bauran Energi Terbarukan
 - c. 7.3.1* Intensitas Energi Primer

8. SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 - a. 8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB Riil per Kapita
 - b. 8.3.1.(c) Persentase Askes UMKM ke Layanan Keuangan
 - c. 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka
 - d. 8.9.1.(a) Jumlah Wisatawan Mancanegara
9. SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
 - a. 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB
 - b. 9.2.2* Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur
 - c. 9.5.1* Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDB
 - d. 9.c.1* Proporsi Penduduk yang Terlayani *Mobile Broadband*
10. SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan
 - a. 10.1.1* Koefisien Gini
11. SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
 - a. 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
12. SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
 - a. 12.5.1* Produksi Sampah
13. SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim
 - a. 13.2.1.(b) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca
 - b. 13.2.1.(c) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
14. SDGs 14: Ekosistem Lautan
 - a. 14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
 - b. 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan
15. SDGs 15: Ekosistem Daratan
 - a. 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan
 - b. 15.3.1.(a) Proporsi hutan terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan
16. SDGs 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
 - a. 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi
 - b. 16.7.2* Indeks Demokrasi Indonesia
 - c. 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
17. SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
 - a. 17.1.1.(a) Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB
 - b. 17.8.1* Proporsi Individu yang Menggunakan Internet
 - c. 17.11.1.(a) Pertumbuhan Produk Ekspor Non-Migas

Dari 60 indikator yang menjadi penekanan dalam Peta Jalan SDGs Indonesia, sebagian besar indikator dapat langsung diadaptasi sebagai indikator utama dalam RAD

SDGs. Namun ada beberapa indikator yang memerlukan penyesuaian, mungkin karena tidak relevan dengan kondisi lokal, sehingga perlu dicari indikator lain yang lebih relevan sebagai proksi terhadap indikator tersebut. Berikut ditampilkan indikator yang relevan untuk Provinsi Sumatera Barat dari 60 indikator yang ada.

Tabel 1.2
Pemetaan Indikator Kunci SDGs dalam Peta Jalan SDGs Indonesia di Provinsi Sumatera Barat

No.	TPB/SDGs	Indikator dalam Peta Jalan SDGs	Indikator dalam RAD TPB/SDGs	Ket	Ketersediaan Data	Sumber Data
1	Tanpa Kemiskinan	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Sama	Ada	KLHS
2	Tanpa Kelaparan	2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Sama	Tidak ada	KLHS
		2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang/berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan (<i>Food Insecurity Experiences Scale</i>)	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang/berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan (<i>Food Insecurity Experiences Scale</i>)	Sama	Ada	KLHS
		2.2.1* Prevalensi stunting (pendek/sangat pendek) pada balita	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek/sangat pendek) pada balita	Sama	Ada	KLHS
		2.2.2* Prevalensi wasting (kurus/sangat kurus) pada balita	2.2.2* Prevalensi wasting (kurus/sangat kurus) pada balita	Sama	Ada	KLHS
		2.3.1* Nilai tambah pertanian per tenaga kerja di sektor pertanian	2.3.1* Nilai tambah pertanian per tenaga kerja di sektor pertanian	Sama	Ada	KLHS
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Sama	Ada	KLHS
		3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Sama	Ada	KLHS
		3.2.2* Angka Kematian Anak (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	3.2.2* Angka Kematian Anak (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Sama	Ada	KLHS
		3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Sama	Ada	KLHS
		3.3.1 Angka Infeksi Baru HIV per 1.000 Populasi tidak terinfeksi HIV	3.3.1 Angka Infeksi Baru HIV per 1.000 Populasi tidak terinfeksi HIV	Sama	Ada	KLHS
		3.3.2.(a) Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk	3.3.2.(a) Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk	Sama	Ada	KLHS
		3.3.3.(a) Jumlah kab/kota yang mencapai status eliminasi malaria	3.3.3.(a) Jumlah kab/kota yang mencapai status eliminasi malaria	Sama	Ada	KLHS
		3.4.1.(a) Persentase merokok pada pemuda (usia ≤18 tahun)	3.4.1.(a) Persentase merokok pada pemuda (usia ≤18 tahun)	Sama	Tidak ada	KLHS
		3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk dewasa (usia ≥ 18 th)	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk dewasa (usia ≥ 18 th)	Sama	Ada	BPS
		3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Sama	Ada	KLHS
		3.7.2.(a) Angka Total Fertilitas (TFR)	3.7.2.(a) Angka Total Fertilitas (TFR)	Sama	Ada	BPS/BKKBN
		3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Sama	Ada	BPS

No.	TPB/SDGs	Indikator dalam Peta Jalan SDGs	Indikator dalam RAD TPB/SDGs	Ket	Ketersediaan Data	Sumber Data
4	Pendidikan Berkualitas	4.1.1* Proporsi anak-anak pada: (a) kelas 4 (empat) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika		Tidak Relevan		
		4.1.1* Proporsi remaja pada: (a) kelas 9 (sembilan) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika		Tidak Relevan		
		4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat		Tidak Relevan		
		4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat		Tidak Relevan		
		4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Tidak Relevan		
		4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat	4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat	Sama	Ada	KLHS
		4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi		Tidak Relevan		
		4.5.1* Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat & (2) SMP/MTs/ sederajat		Tidak Relevan		
		4.5.1* Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat & (4) Perguruan Tinggi	4.5.1* Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat	Modifikasi	Ada	KLHS
5	Kesejahteraan Gender	4.c.1* Persentase guru yang bersertifikat pendidik – (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB)	4.c.1* Persentase guru yang bersertifikat pendidik – (SMA, SMK, dan PLB)	Modifikasi	Ada	KLHS/BPS
		5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun & 18 tahun	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun	Modifikasi	Ada	BPS
		5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	5.3.1.(a) Rata-rata usia kawin pertama perempuan	Modifikasi	Ada	BPS
		5.6.1.(a) Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi	5.6.1.(a) Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi	Sama	Ada	KLHS
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	Sama	Ada	BPS
		6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	Sama	Ada	BPS
7	Energi Bersih dan Terjangkau	7.1.1.(a) Konsumsi Listrik per Kapita	7.1.1.(a) Konsumsi Listrik per Kapita	Sama	Ada	BPS
		7.2.1* Bauran Energi Terbarukan	7.2.1* Bauran Energi Terbarukan	Sama	Tidak ada	
		7.3.1* Intensitas Energi Primer	7.3.1* Intensitas Energi Primer	Sama	Tidak ada	
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB Riil per Kapita	8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB Riil per Kapita	Sama	Ada	KLHS/BPS
		8.3.1.(c) Persentase Askes UMKM ke Layanan Keuangan	8.3.1.(c) Persentase jumlah kredit UMKM terhadap total kredit	Modifikasi	Ada	BPS
		8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka	8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka	Sama	Ada	BPS

No.	TPB/SDGs	Indikator dalam Peta Jalan SDGs	Indikator dalam RAD TPB/SDGs	Ket	Ketersediaan Data	Sumber Data
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	8.9.1.(a) Jumlah Wisatawan Mancanegara	8.9.1.(a) Jumlah Wisatawan Mancanegara	Sama	Ada	BPS
		9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDRB	Sama	Ada	BPS
		9.2.2* Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur	9.2.2* Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur	Sama	Ada	BPS
		9.5.1* Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDB	9.5.1* Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDRB	Modifikasi	Ada	KLHS
		9.c.1* Proporsi Penduduk yang Terlayani Mobile Broadband	9.c.1* Proporsi Penduduk yang mengakses internet	Modifikasi	Ada	BPS
10	Berkurangnya Kesenjangan	10.1.1* Koefisien Gini	10.1.1* Koefisien Gini	Sama	Ada	BPS
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Sama	Ada	BPS
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	12.5.1* Produksi Sampah	12.5.1* Produksi Sampah	Sama	Ada	BPS
13	Penanganan Perubahan Iklim	13.2.1.(b) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	13.2.1.(b) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Sama	Tidak ada	
		13.2.1.(c) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	13.2.1.(c) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Sama	Tidak ada	
14	Ekosistem Lautan	14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Sama	Tidak ada	
		14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan	14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Sama	Tidak ada	
15	Ekosistem Daratan	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan	Sama	Ada	KLHS
		15.3.1.(a) Proporsi hutan terdegradasi terhadap luas lahan	15.3.1.(a) Proporsi hutan terdegradasi terhadap luas lahan	Sama	Ada	KLHS
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi	Sama	Ada	KLHS
		16.7.2* Indeks Demokrasi Indonesia	16.7.2* Indeks Demokrasi Indonesia	Tidak Relevan		
		16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Sama	Ada	BPS
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.1.1.(a) Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	17.1.1.(a) Rasio Penerimaan Pajak (PAD) terhadap PDRB	Modifikasi	Ada	BPS
		17.8.1* Proporsi Individu yang Menggunakan Internet	17.8.1* Proporsi Individu yang Menggunakan Internet	Sama	Ada	BPS
		17.11.1.(a) Pertumbuhan Produk Ekspor Non-Migas	17.11.1.(a) Pertumbuhan Produk Ekspor Non-Migas	Sama	Ada	BPS

Secara rinci target dan indikator focus RAD TPB/SDGs Sumatera Barat 2022-2026 dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.

1.2. Komitmen Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan TPB/SDGs diwujudkan dengan melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, melakukan pemetaan ketersediaan data SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk proksi, melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator TPB/SDGs, mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia, dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *jo* Peraturan Presiden Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan. Kedua Peraturan Presiden tersebut menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memimpin sendiri pelaksanaan TPB/SDGs sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana dan secara spesifik juga diamanatkan akan dalam penyusunan, pelaksanaann, serta pengendalian dan evaluasi untuk mengoptimalkan peran koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan melibatkan semua pihak baik parlemen, ormas dan media, filantropi dan bisnis, pakar dan akademisi untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak, serta menggunakan kelembagaan yang ada agar dapat langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional. Kementerian PPN/BAPPENAS akan telah mengkoordinasikan penyusunan Peta Jalan TPB/SDGs sebagai dokumen tahapan strategi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs untuk tahun 2016-2030, penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang merupakan dokumen lima tahunan dari pelaksanaan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan TPB/SDGs di tingkat daerah.

Komitmen yang sama diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-94-2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGS) Tahun 2022-2026 dan Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/02/II/SK/Bappeda-2022 tentang Pembentukan Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Sumatera Barat 2022-2026.

Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan TPB/SDGs tersebut, mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya sangat penting bagi rakyat di Provinsi Sumatera Barat yang terefleksi dari sinergitas antara RPJMD dengan

TPB/SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi Provinsi Sumatera Barat bagi Indonesia dan selanjutnya bagi komunitas global. Lebih lanjut, TPB/SDGs juga menjadi 27 esehatan²⁷ untuk peningkatan kerja sama baik tingkat 27 eseh, regional, dan secara lebih luas kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai perwujudan Indonesia yang telah termasuk dalam kategori *lower-middle income country* atau negara berpenghasilan menengah bawah.

Sejalan dengan pencapaian masing-masing Indikator pada setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 tidak hanya selaras namun juga sebagian besar indikator-indikator kinerja dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 berkorelasi positif dan mendukung pencapaian TPB. Hal ini tentu merupakan bukti nyata bahwa pembangunan di Sumatera Barat telah sepenuhnya mengarusutamakan TPB/SDGs sebagai bagian dari aksi dan hasil pelaksanaan pembangunan. Adapun bentuk komitmen tersebut dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3

Komitmen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terhadap pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN				
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.				
1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim.				
	RPJMD - Tingkat Kemiskinan (%)	Indikator Makro	%	
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.				
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.				
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	
1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.				
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.				
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	
	RPJMD - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	DINAS SOSIAL

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - APK SLB	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Jumlah Anak yang difasilitasi perlindungan sosial (dalam pengangkatan anak)	Indikator Program	orang	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Atas (SMA)	Indikator Progul	persen	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Indikator Progul	persen	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3	Indikator Progul	orang	DINAS PENDIDIKAN
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.				
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.				
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.				
1.4.1* Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.				
	RPJMD - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Makro	IPM	
	RPJMD - b.Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	
	RPJMD - c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	
	RPJMD - Indeks Pembangunan manusia (IPM)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Angka Harapan Hidup (AHH)	IKU	Tahun	
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	
	RPJMD - Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	DINAS PERHUBUNGAN
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD – Rasio Elektrifikasi	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Terminal Provinsi yang tersedia > Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PERHUBUNGAN
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	lokasi	DINAS PARIWISATA
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	lokasi	DINAS PARIWISATA
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	lokasi	DINAS PARIWISATA
1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.				
	RPJMD - Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	IKD	%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	RPJMD - Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	Indikator Program	%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.				
1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	Indikator Program	%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL
1.5.2* Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.				
1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana				
	RPJMD - Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase penanganan pra bencana	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.				
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	IKU	Rp. Juta	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	
	RPJMD - Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	IKU	%	
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	
	RPJMD - Kontribusi Ekonomi Digital (%)	IKU	%	
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	RPJMD - Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	IKD	BUMD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	RPJMD - Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	IKD	Nagari/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	RPJMD - Persentase Koperasi yang berkualitas	IKD	%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	RPJMD - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	IKD	%	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	RPJMD - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Indikator Program	hektar	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Indikator Program	Sentra	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang	DINAS KEHUTANAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang	DINAS SOSIAL
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang	DINAS KEBUDAYAAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang	DINAS PANGAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Progul - Persentase peningkatan usaha pasca panen pengolahan hasil > Luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat (Ha)	Indikator Progul	Ha	DINAS KEHUTANAN
1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.				
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.				
1.b.1 Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.				
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN				
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.				
2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).				
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	DINAS PANGAN
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	DINAS PANGAN
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	DINAS PANGAN
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	DINAS PANGAN
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.				
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	DINAS PANGAN
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	DINAS PANGAN
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	DINAS PANGAN
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	DINAS PANGAN
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.				
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.				
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.				
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).				
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	DINAS PANGAN
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	DINAS PANGAN
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	Indikator Program	%	DINAS PANGAN
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	DINAS PANGAN
	RPJMD - Tingkat konsumsi ikan	Indikator Program	Kg/kap/th	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.2.3* Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.				
2.3.1* Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan				
2.3.1 (a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan				
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	
2.3.2* Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.				
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan Yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.				
02.04.01 Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.				
2.4.1(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.				
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.				
2.5.1* Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.				
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa Sawit yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kopi yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Karet yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Gambir yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Padi yang diadakan	Indikator Progul	ton	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jagung yang diadakan	Indikator Progul	ton	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cabe yang diadakan	Indikator Progul	gram	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Bawang Merah yang diadakan	Indikator Progul	kg	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Manggis yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jeruk yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Alpukat yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Durian yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Pala yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kayu Manis yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cengkeh yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Tembakau yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jahe yang diadakan	Indikator Progul	kg	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kunyit yang diadakan	Indikator Progul	kg	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Lengkuas/Laos yang diadakan	Indikator Progul	kg	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Urusan Kelautan dan Perikanan > Bibit rumput laut	Indikator Progul	kg	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.5.2* Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.				
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.				
2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.				
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.a.2* Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.				
2.b.1* Subsidi ekspor pertanian.				
2.c Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.				
2.c.1* Indikator anomali harga pangan.				
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA				
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.				
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.				
3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.				
3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.				
3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.				
	RPJMD - Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	DINAS KESEHATAN
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.				
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
3.3.3.[a] Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.				
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan
3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
3.3.5.[a] Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
3.3.5.[b] Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.				
3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.				
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.				
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.				
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
03.04.02 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.				
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.				
03.05.01 Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.				
3.5.1(a) Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis				
3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.				
3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir.				
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.				
03.06.01 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.				
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.				
3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.				
	RPJMD - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.7.2.[a] Total Fertility Rate (TFR).				
	RPJMD - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.				
3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan esensial.				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Indikator Program	Orang	DINAS KESEHATAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
3.8.1.[a Unmet Need Pelayanan Kesehatan.				
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	DINAS PERHUBUNGAN
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.8.2* Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.				
3.8.2.[a Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).				
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.				
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ?15 tahun.				
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.				
3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.				
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Pertama	Indikator Progul	persen	DINAS KESEHATAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Kedua	Indikator Progul	persen	DINAS KESEHATAN
	Progul - Persentase masyarakat yang telah divaksin menuju Herd Immunity	Indikator Progul	persen	DINAS KESEHATAN
3.b.2* Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.				
	RPJMD - Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.				
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.				
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA				
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.				
04.01.01 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.				
4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.				
4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.				
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
4.1.2.[a] Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.				
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.				
4.2.1* Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.				
4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.				
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.				
4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.				
	RPJMD - Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang	DINAS KEHUTANAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator Progul	orang	DINAS PARIWISATA
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang	DINAS SOSIAL
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang	DINAS KEBUDAYAAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang	DINAS PANGAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.3.1.[a] Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).				
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.				
04.04.01 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).				
4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).				
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.				
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.				
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.				
04.06.01 Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.				
	RPJMD - Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.				
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.				
4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).				
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
4.a.1.[a] Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.				
4.b.1* Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.				
4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.				
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN				
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.				
5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.				
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.				
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.				
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.				
	RPJMD - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	IKD	Usia	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
05.03.02 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.				
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.				
05.04.01 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.				
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.				
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.				
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.				
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil revidi dari konferensi- konferensi tersebut.				
5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.				
5.6.2* Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.				
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.				
5.a.1* (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.				
5.a.2* Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.				
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.				
5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.				
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang- undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.				
5.c.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.				
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	IKD	Kabupaten/Kota	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	IKD	Predikat	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA				
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.				
6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.				
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
6.2 . Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.				
6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.				
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
6.3 . Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.				
06.03.01 Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman				
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
06.03.02 Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.				
6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku				
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku				
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.4 . Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.				
06.04.01 Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.				
06.04.02 Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediaannya.				
6.4.2.(a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya				
6.4.2.(b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya				
6.5 . Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.				
6.5.1* Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).				
	RPJMD - Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Indikator Program	%	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
6.5.2* Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.				
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	IKD	%	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Indikator Program	%	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
6.6 . Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.				
6.6.1* Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.				
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA				
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.				
7.1.1* Rasio elektrifikasi.				
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD – Rasio Elektrifikasi	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita.				
07.01.02 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.				
7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.				
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga.				
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.				
7.2.1* Bauran energi terbarukan.				
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.				
7.3.1* Intensitas energi primer.				
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih				
7.a.1 Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.				
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang				
7.b.1* Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TUJUAN 8. MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA				
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.				
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.				
	RPJMD - Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indikator Makro	%	
8.1.1.(a) PDB per kapita.				
	RPJMD - PDRB (ADHK) Per Kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	
	RPJMD - PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.				
8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa				
8.10.1.(a) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.				
	Progul - Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.				
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.				
8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin				
8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan				
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.				
08.04.01 Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.				
8.4.1.(a) Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan				
08.04.02 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).				
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.				
8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.				
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.				
	RPJMD - Tingkat pengangguran terbuka (%)	Indikator Makro	%	
8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran.				
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).				
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.				
08.07.01 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.8 Melindungi hak- hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, Dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.				
08.08.01 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.				
8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.				
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	RPJMD - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	IKD	%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
08.08.02 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.				
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.				
8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.				
	RPJMD - Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	IKU	%	
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.				
	RPJMD - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	IKD	%	DINAS PARIWISATA

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Indikator Program	%	DINAS PARIWISATA
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.				
	RPJMD - Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	IKD	%	DINAS PARIWISATA
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Indikator Program	%	DINAS PARIWISATA
8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.				
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI				
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.				
9.1.1* Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.				
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	DINAS PERHUBUNGAN
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.				
	RPJMD - Kemantapan Jalan (%)	IKU	%	
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol.				
9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api.				
9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.				
9.1.2.(a) Jumlah bandara.				
9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan.				
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan	DINAS PERHUBUNGAN
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut	DINAS PERHUBUNGAN
9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan	DINAS PERHUBUNGAN
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut	DINAS PERHUBUNGAN
9.2 Mempromosikan dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.				
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.				
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.				
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.				
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.				
9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.				
	RPJMD - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	IKU	%	
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	
	RPJMD - Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp)	IKD	Rp. Triliun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.				
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.				
9.4.1* Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.				
9.4.1.(a) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.				
9.4.1.(b) Intensitas emisi sektor industri.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.				
9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.				
9.5.2* Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.				
9.5.2.(a) Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).				
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA				
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.				
10.1.1* Rasio Gini.				
	RPJMD - Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indikator Makro	Indeks	
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.				
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	
10.1.1.(b) Jumlah desa tertinggal.				
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri.				
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.1.1.(d) Jumlah daerah tertinggal.				
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.				
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.				
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.				
10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.				
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.				
10.03.01 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.				
10.3.1.(a) Indeks Kebebasan.				
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.				
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.				
10.04.01 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.				
10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.				
10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.				
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10.04.02 Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.				
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.				
10.05.01 Financial Soundness Indicator.				
10.5.1.(a) Indikator Kesehatan Perbankan.				
10.7 . Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.				
10.07.01 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.				
10.07.02 Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migrasi yang baik.				
	RPJMD - Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar yang mendapatkan penanganan	Indikator Program	orang	DINAS SOSIAL
10.7.2.(a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.				
10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.				
10.07.03 Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.				
10.07.04 Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.				
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
11.01.01 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.				
11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau				
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	IKD	%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
11.2 . Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.				
11.02.01 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas				
11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik				
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	DINAS PERHUBUNGAN
11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum				
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	DINAS PERHUBUNGAN
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.				
11.03.01 Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk				
11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk				
11.03.02 Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis				
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.				
11.04.01 Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)				
11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)				
	RPJMD - d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Indikator Makro	Ribu	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.				
11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang				
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.05.02 Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar				
11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB				
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.				
11.06.01 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota				
11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya				
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.6.1.(b) Persentase sampah nasional yang terkelola				
11.06.02 Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
11.6.2.(a) Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10				
11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara				
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.				
11.07.01 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.				
11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua				
11.07.02 Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
11.7.2.(a) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
11.a.1 Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.				
11.a.1.(a) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS				
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.				
11.b.1* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana				
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.				
11.c.1 -				
11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN				
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.				
12.1.1* Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan				
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.				
12.03.01 (a)? Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b)? Indeks sampah makanan (Food waste index)				
12.3.1.(a) Persentase sisa makanan				
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah nagari/desa yang melaksanakan budidaya maggot	Indikator Progul	nagari/desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.				
12.4.1* Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.				
12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri				
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.4.1.(b) Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline				
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.4.2* (a)? Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)? Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.				
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.				
12.05.01 Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang				
12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.				
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek- praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.				
12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya				
12.6.1(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.				
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional				
12.7.1* Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi				
12.7.1(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah				
12.7.1(b) Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa				
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.				
12.08.01 Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.				
12.8.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup				
12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.				
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
12.a Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.				
12.a.1* Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)				
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.				
12.b.1 Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan				
12.b.1(a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development				
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA				
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara				
13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030				
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	DINAS SOSIAL
13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional				
13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications				
13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun				
13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)				
13.2.2.(b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)				
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim				
13.03.01 Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.				
13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup				
TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi				
14.01.01 (a)? Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)? kepadatan sampah plastik terapung				
14.1.1.(a) Presentase penurunan sampah terbuang ke laut				
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif				
14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov	IKD	Ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Indikator Program	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan tangkap	Indikator Program	ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Indikator Program	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya	Indikator Program	ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya laut	Indikator Program	ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	Indikator Program	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Indikator Program	ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14.2.1.(a) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan				
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia				
14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut				
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)				
14.06.01 Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)				
14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha				
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	IKD	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Indikator Program	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara				
14.07.01 Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)				
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar				
14.b.1* Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil				
14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan				
14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi				
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari The future we want				
14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)				
TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUSAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI				
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.				
15.1.1* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan				
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	DINAS KEHUTANAN
15.01.02 Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya				
15.1.2.(a) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)				
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	DINAS KEHUTANAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.				
15.02.01 Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari				
15.2.1.(a) Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju				
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Indikator Program	unit	DINAS KEHUTANAN
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi				
15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan				
	RPJMD - Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	IKD	%	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	IKD	%	DINAS KEHUTANAN
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.				
15.4.1* Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi				
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	DINAS KEHUTANAN
15.4.2* Indeks tutupan hijau pegunungan				
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	DINAS KEHUTANAN
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal				
15.07.01 Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan illegal				
15.7.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL				
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan				
15.09.01 (a)? Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan				
(b)? integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi				
15.9.1.(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis				
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	DINAS KEHUTANAN
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.				
16.01.01 Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.				
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.				
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.01.02 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.				
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.				
	RPJMD - Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	IKD	Kasus	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.01.03 Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.				
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.				
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Indikator Program	nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.				
16.10.01 Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
16.10.1.(a) Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.				
16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).				
16.10.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.				
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif				
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
16.10.2.(b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.				
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.				
16.02.01 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir				
16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.02.03 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.				
16.03.01 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi				
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	BIRO HUKUM
16.3.1.(c) Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.				
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	BIRO HUKUM
16.03.02 Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.				
16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.				
16.03.03 Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.				
16.3.3 (a) Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)				
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.				
16.05.01 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.				
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).				
16.05.02 Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.				
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.				
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.				
16.6.1.(a) Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.				
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ? B				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Nilai SAKIP (predikat)	IKU	Predikat	
	RPJMD - Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	IKD	Perangkat Daerah	BIRO ORGANISASI
	RPJMD - Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Indikator Program	Perangkat Daerah	BIRO ORGANISASI
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ? B				
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	
16.06.02 Proporsi penduduk yang puas terhadap				
16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.				
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.				
16.07.01 Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.				
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).				
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).				
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.07.02 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.				
16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi				
16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan				
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.7.2.(c) Indeks Kesetaraan				
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.				
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.				
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Indikator Program	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.				
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun				
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.				
16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.				
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.				
16.b.1 Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.				
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.				
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.				
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.				
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.				
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.				
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.				
17.10.01 Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).				
17.10.1(a) Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati				
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.				
17.11.01 Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.				
17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas				
	RPJMD - Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp	IKD	Rp. Juta	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	RPJMD - Nilai ekspor	Indikator Program	juta US\$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.				
17.16.01 Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.				
17.17.01 Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).				
17.17.1.(a) Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.				
17.17.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).				
17.17.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.				
17.18.01 Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs				
17.18.1.(a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.				
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
17.18.1.(b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.				
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
17.18.2* Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.				
17.18.3* Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.				
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto,dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.				
17.19.01 Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.				
17.19.1.(a) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.				
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
17.19.1.(b) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.				
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
17.19.02 Proporsi negara yang a)? melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	b)? mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.			
	17.19.2 (a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.			
	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).			
	17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.			
	17.03.01 Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.			
	17.03.02 Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.			
	17.3.2.(a) Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.			
	17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.			
	17.06.01 Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya			
	17.6.1.(a) Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga			
	17.6.1.(b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)			
	17.8 Mengoperasional- isasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangu- nan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkat- kan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khu- susnya teknologi informasi dan komunikasi.			
	17.8.1* Persentase pengguna internet			

Komitmen untuk mencapai TPB/SDGs tidak hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saja, namun hal yang sama juga dimiliki dan berkontribusikan oleh platform Non-State Actor di Sumatera Barat baik organisasi masyarakat, akademisi, filantropi, pelaku usaha, serta media. Berikut terdapat beberapa contoh NSA yang berkomitmen dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disamping juga masih terdapat banyak NSA lainnya yang telah terbukti berkomitmen berkontribusi secara positif dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat.

Pada penanganan isu-isu gender terutama pada pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak-hak anak terdapat beberapa NSA yang memiliki kepedulian yang cukup tinggi serta konsisten dalam pelaksanaannya, antara lain Lembaga Women's Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan yang merupakan lembaga pemberi layanan bagi perempuan korban kekerasan. Lembaga ini sudah berdiri sejak tahun 1999 yang bertujuan agar terpenuhinya hak asasi perempuan (khususnya perempuan korban kekerasan) dalam mendapatkan keadilan, perlindungan dan pemulihan. Selama kurun waktu 1999 sampai dengan saat ini, WCC Nurani Perempuan secara konsisten melakukan kegiatan layanan bagi perempuan korban kekerasan, melakukan kegiatan pendidikan untuk pencegahan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta melakukan advokasi dalam penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Selain itu WCC Nurani Perempuan juga berkontribusi dalam melakukan pemberdayaan pengetahuan dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang kemudian focus WCC Nurani Perempuan semakin berkembang dengan turut berkontribusi pada penurunan angka stunting, pengurangan angka kelahiran dan pendidikan seksualitas, semua isu ini sangat berkaitan erat untuk mengurangi angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Sejalan dengan WCC Nurasi Perempuan, terdapat Lembaga Pengkajian Dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) yang merupakan NSA yang fokus pada isu-isu terkait dengan perempuan yang menitikberatkan komitmennya pada penguatan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan melalui empat isu dan program utama yakni penguatan ekonomi, advokasi kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan gizi, partisipasi dan keterwakilan perempuan serta pengurangan risiko bencana serta adaptasi perubahan iklim.

Komunitas Langkah Kami untuk Kita (LKUK) juga merupakan NSA yang focus pada isu-isu kesetaraan gender dan pembangunan. Lembaga ini mengawali focus program kerjanya berdasarkan hasil wawancara dan riset dengan berbagai LSM terutama terkait permasalahan kesetaraan gender di Sumatera Barat dan LKUK memilih untuk fokus berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dan anak dengan melakukan beberapa program berupa literasi digital untuk perempuan dan remaja di Kelurahan Tarantang, Baringin dan Batu Gadang; pengajaran Bahasa Inggris untuk anak-anak kelompok perempuan

Tarantang, Baringin dan Batu Gadang; pelatihan persiapan memasuki dunia kerja untuk remaja perempuan; pengajaran Bahasa Inggris untuk anak-anak di Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, serta peningkatan kesadaran publik (raising awareness) dengan melakukan edukasi melalui webinar, sosial media dan forum diskusi. Dalam pelaksanaan program, LKUK bekerja sama dengan organisasi/ LSM dan komunitas lain di Sumatera Barat seperti dengan Pambangkik Batang Tarandam (PBT) dan Kelompok Perempuan Nusantara Kelurahan Batu Gadang, Tarantang dan Baringin, serta dengan Forum Indonesia Muda (FIM) Padang, Dampak Sosial Indonesia dan Sakato Community Hub. Untuk rencana program hingga tahun 2026, LKUK berkomitmen untuk memperluas kontribusinya dalam pembangunan terutama pada pemuda atau remaja perempuan terkait kesehatan reproduksi dan peningkatan keterampilan soft dan hard skill untuk meningkatkan kemampuan bersaing di dunia kerja, peningkatan kemandirian ekonomi untuk kelompok perempuan dan kelas-kelas Bahasa Inggris bagi anak-anak kurang mampu di kota Padang.

Dalam hal tumbuh kembang anak serta isu-isu gender dalam pembangunan di Sumatera Barat juga terdapat Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Daerah Sumatera Barat, yang berkomitmen penuh mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Menyusui adalah langkah pertama yang penting dalam perjalanan anak menuju masa depan yang sehat. Tetapi sebagai dasar untuk kesehatan dan kesejahteraan anak di masa depan, menyusui juga merupakan elemen penting dari upaya pembangunan di seluruh dunia untuk menciptakan bumi yang lebih sehat, sejahtera, dan berkelanjutan. Menyusui adalah langkah praktis yang paling mudah dan murah untuk melindungi kelangsungan hidup dan kesehatan bayi dan perempuan, sehingga menyusui adalah bagian utama dan sangat terkait dengan banyak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Komitmen ini ditunjukkan dengan konsistensi AIMI Sumatera Barat dalam mendukung, mempromosikan dan melindungi menyusui dan pemberian makan bayi dan anak (PMBA) untuk semua kalangan dan bukan hanya ke kelompok ibu dan sektor kesehatan saja. Sebagai organisasi nirlaba AIMI Sumatera Barat secara rutin telah menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya Kelas Edukasi Menyusui, Kelas Edukasi Makanan Pendamping ASI (MPASI), Layanan Konseling Menyusui 1 on 1, Debur Emas (Pendampingan Kelompok Ibu untuk Generasi Emas) yang dikhususkan untuk ibu menengah kebawah dengan pembelajaran yang disesuaikan, Perayaan Pekan Menyusui yang berkolaborasi dengan organisasi lintas profesi, Dukungan Menyusui dan PMBA di Daerah Bencana Alam di Sumatera Barat, Pelatihan Konseling menyusui (PKM) Modul 40 Jam WHO/UNICEF, Sosialisasi dan Advokasi ke berbagai kalangan melalui program AIMI Goes to Office dan AIMI Goes to Community, juga Workshop Ustadz Ustadzah, dan GO GINA (Gerakan Optimalisasi Gizi Anak) untuk perubahan perilaku dan intervensi gizi pada anak stunting. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang, dengan menyesuaikan kondisi dan lokasi yang berdampak bagi Sumatera Barat.

Dalam upaya menghilangkan diskriminasi pada penyandang disabilitas maka terdapat beberapa NSA yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam hal ini antara lain yakni Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatina) Sumatera Barat yang merupakan NSA yang tumbuh dari kelompok masyarakat yang masih termarginalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta masih mengalami diskriminasi di berbagai bidang kehidupan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Gerkatina adalah fokus dalam pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas, menghilangkan segala bentuk hambatan maupun perlakuan diskriminasi serta melakukan pemberdayaan Disabilitas untuk mencapai kehidupan sejahtera dan bebas dari segala perlakuan diskriminatif.

Sejalan dengan Gerkatina, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (*HWDI Sumatera Barat*) adalah organisasi Perempuan yang pengurus dan anggotanya mayoritas adalah perempuan dengan berbagai ragam jenis kecatatan yang dimilikinya. Beberapa Langkah konkret yang dilakukan oleh HWDI yakni meningkatkan akses penyandang disabilitas agar masuk dalam pendataan DTKS sehingga dapat tercatat sebagai penerima manfaat dari program pemerintah. Selain itu HWDI sebagai lembaga yang fokus tentang isu perempuan disabilitas agar perempuan-perempuan disabilitas tersebut tidak tertinggal dan mampu mandiri baik secara ekonomi dan sosial karena stigma masyarakat yang masih berasumsi bahwa disabilitas harus dikasihani dan sulit untuk diberdayakan.

Dalam upaya mitigasi resiko dan penanganan bencana di Sumatera Barat, terdapat salah satu NSA yang memiliki komitmen dalam hal ini antara lain yakni Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Sumatera Barat yang memiliki komitmen bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk berkontribusi secara aktif serta bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).

FRPB Sumatera Barat juga turut serta mendorong pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada setiap sektor pembangunan di Provinsi Sumatera Barat, membangun data base upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dan turut serta melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, FRPB Sumatera Barat juga memiliki fungsi sebagai wadah fasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada sektor pembangunan di Sumatera Barat, wadah konsultasi, koordinasi dan mediasi daerah dalam membangun pemahaman dan pengembangan upaya pengurangan risiko bencana bagi para pihak atau pemangku kepentingan di Sumatera Barat, wadah advokasi dan rekomendasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang telah di laksanakan oleh Pemerintah, multi stakeholder dan masyarakat, dan wadah monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat.

Pada tahun 2022, sebagai langkah nyata, FPRB Sumatera Barat juga turut bergerak pada masa tanggap darurat bencana Gempa Bumi Pasaman dan Pasaman Barat di bulan Februari 2022. FPRB Sumatera Barat mengambil peran mengkoordinasikan semua pihak dalam (desk relawan) dalam masa tanggap darurat gempa Pasaman dan Pasaman Barat. FPRB mengkomunikasikan isu-isu terkini untuk memberikan rekomendasi bagi Pemerintah dalam rangka kesiapsiagaan bencana.

Dalam upaya kolaboratif pelaksanaan pembangunan terdapat salah satu NSA yakni Yayasan senarai yang merupakan sebuah organisasi yang dihasilkan oleh pemikiran kreatif dari generasi muda yang disebut senarai. Komitmen dari organisasi ini yakni merupakan lembaga mitra yang bersifat kolaboratif dengan berbagai institusi dan kelompok masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap penanggulangan dan penanganan masalah kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat bangsa yang berkemajuan.

Fokus kegiatan dari Yayasan Senarai yakni meningkatkan pemahaman seluruh elemen masyarakat tentang Kesehatan, Kebijakan Kesehatan, Sosial dan Ekonomi kemasyarakatan, memberikan informasi, pengetahuan dan dukungan kepada masyarakat tentang keutamaan pengetahuan Kebijakan Kesehatan, Sosial dan Ekonomi kemasyarakatan, memperkuat hubungan kerjasama dengan pemerintah, perusahaan, mitra gerakan, lembaga donor dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan dalam rangka menjalankan fungsi edukasi yang mendukung masyarakat untuk lebih memperhatikan isu Kesehatan, Sosial dan Ekonomi kemasyarakatan.

Tidak hanya Lembaga organisasi masyarakat, unsur Akademisi yang dalam hal ini Perguruan Tinggi di Sumatera Barat juga memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, antara lain terbentuknya SDGS Center baik di Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang, yang kerap melakukan pengkajian-pengkajian secara ilmiah maupun riset di lapangan, pendampingan kepada NSA dan pemerintah daerah dalam Menyusun rencana program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan serta peran-peran lainnya.

Sebagai Lembaga Pendidikan tentunya tidak kalah penting menyiapkan peserta didik berdasarkan prinsip inklusi dan berkemajuan untuk dapat mengaplikasikan kemampuan akademiknya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan di dunia kerja. Selain itu juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan penelitian dan pengambisian maka upaya yang dilakukan juga berdasarkan prinsip ekualiti, inklusi dan berkemajuan.

1.3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal yang bermakna TPB/SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang.

TPB/SDGs merupakan kesatuan yang dilaksanakan secara integrasi pada semua dimensi pembangunan yakni sosial, ekonomi dan lingkungan yang saling komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas **Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan Media**, dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas serta membangun kepercayaan (*trust building*); kemitraan yang setara; partisipasi; akuntabel; dan saling menguntungkan antar pemangku kepentingan.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Provinsi Sumatera Barat berketetapan untuk memperkuat komitmen nasional menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD TPB/SDGs Sumatera Barat telah secara optimal melibatkan seluruh platform Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.4. Pembiayaan TPB/SDGs

Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi yang berkomitmen menjalankan TPB/SDGs, juga mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan TPB/SDGs, baik yang bersifat konvensional seperti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari: Optimalisasi Penerimaan Daerah. Penerimaan daerah yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of implementation*). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan.

Kegiatan filantropi di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan, yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis

keagamaan atau keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah dll, mempunyai potensi yang sangat besar. Selain itu, Corporate Social Responsibility (CSR) kini juga terus berkembang, dan akan semakin berkembang terarah dengan adanya “ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*, yang menjadi standar pedoman bagi perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan serta kaitannya dengan TPB/SDGs. Selanjutnya, sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Selain itu, pembiayaan inovatif juga dapat dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs, misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal dan pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap* to SDGs, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi).

Terkait dengan hal tersebut, salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian tujuan/goal 9 TPB/SDGs yaitu: Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan energi baru terbarukan serta konservasi energi yang mendukung pencapaian tujuan/goal 7 yaitu Energi Bersih dan Terbarukan.

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 jo Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga, juga bagi pemerintah daerah yang juga merupakan acuan bagi pihak non pemerintah, oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAN TPB/SDGs pada tingkat nasional dan RAD TPB/SDGs pada tingkat provinsi menjadi sangat penting.

Dalam penyusunan RAD TPB, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melibatkan keempat platform TPB/SDGs, yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- 1) **Sosialisasi**, untuk memberikan penjelasan tentang TPB/SDGs dan membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB, sosialisasi ini dihadiri oleh stakeholders terkait.
- 2) **Rapat Tim Koordinasi TPB**, rapat ini bertujuan untuk membahas pengisian matriks RAD TPB, yang dimulai dengan menyusun Matriks Pemetaan Target dan Indikator TPB – RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, yang menjadi template bagi daerah Kabupaten/Kota dan *nonstate actor* lainnya, untuk kemudian dijadikan dasar dalam pengisian matriks yakni matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan pemerintah, serta matriks bagian 3 yang merupakan program dan kegiatan non pemerintah.

- 3) **Konsultasi Publik**, yang dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dari para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan berkelanjutan.
- 4) Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah melalui sistem daring (*online*) melalui surat elektronik (email). Melalui sistem ini, Tim Pelaksana TPB mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD TPB Provinsi Sumatera Barat.

1.6. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB

Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD
- 1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.4. Pembiayaan TPB/SDGs
- 1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs
- 1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

- 2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun
- 2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- 2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- 2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- 2.5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- 2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern
- 2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- 2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
- 2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar-negara
- 2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- 2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- 2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

- 2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan
- 2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
- 2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh
- 2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global
- 2.18. Tantangan dan Kendala Pelaksanaan TPB/SDGs

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

- 3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- 3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- 3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- 3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- 3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
- 3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
- 3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- 3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- 3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
- 3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- 3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- 3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 4.1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS
- 4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Lampiran 3. Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

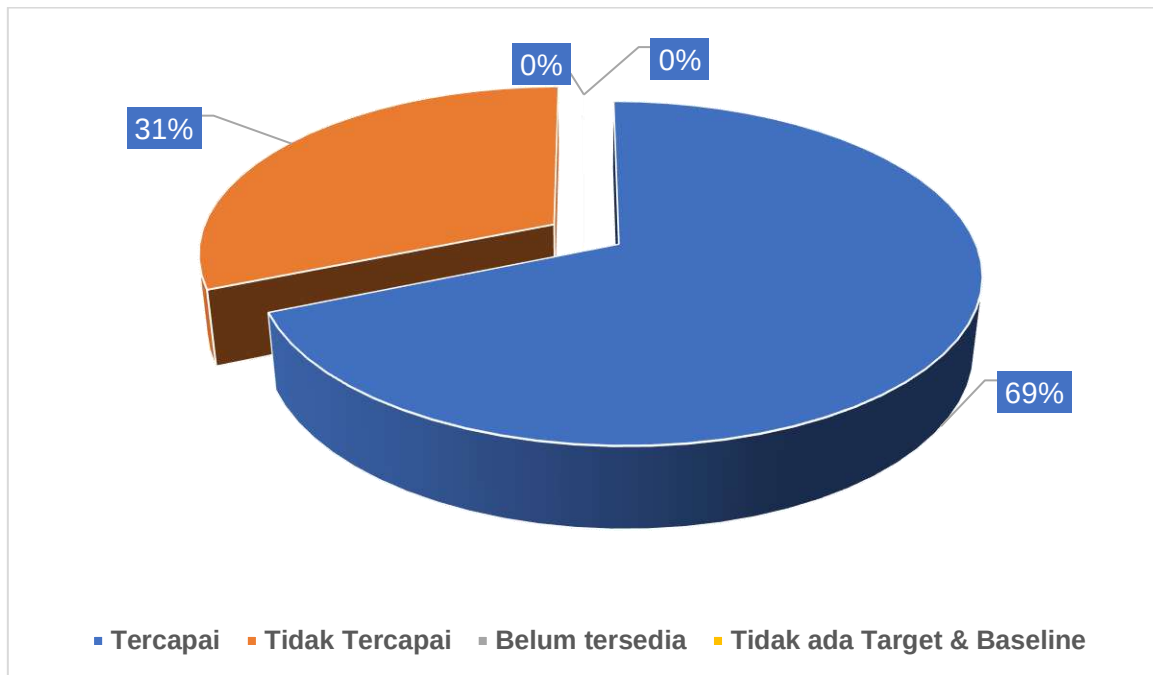
Bab ini menyajikan tentang status capaian pelaksanaan TPB/SDG's sampai dengan tahun 2022 dengan tahun 2021 sebagai *baseline* berdasarkan metadata indikator TPB/SDGs dari tujuan 1 sampai dengan tujuan 17 melalui pendekatan indikator yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia ini disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama pada semua pemangku kepentingan atas setiap indikator guna penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antarprovinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia.

Hasil evaluasi TPB/SDG's di Provinsi Sumatera Barat atas tujuan TPB/SDG's dengan indikator pada tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 melalui pendekatan penyelarasan indikator yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tujuan	Indikator SDGs			Jumlah Indikator RPJMD yang selaras dengan SDGs							
	Jumlah Indikator	Yang selaras dengan RPJMD	Tidak selaras / Tidak tersedia	Indikator Makro	IKU	IKD	Indikator Program	Indikator Progul	Jumlah	Tercapai	Tidak Tercapai
Tujuan 1	15	12	3	6	18	42	23	38	127	89	38
Tujuan 2	16	11	5	0	16	12	5	34	67	48	19
Tujuan 3	33	22	11	0	1	23	31	3	58	42	16
Tujuan 4	17	7	10	0	4	9	6	27	46	25	21
Tujuan 5	14	7	7	0	0	12	6	0	18	18	0
Tujuan 6	15	9	6	0	4	10	8	4	26	15	11
Tujuan 7	9	4	5	0	0	5	4	0	9	9	0
Tujuan 8	23	11	12	4	4	7	4	12	31	18	13
Tujuan 9	19	6	13	0	4	4	2	8	18	10	8
Tujuan 10	25	8	17	2	0	5	2	0	9	8	1
Tujuan 11	29	11	18	1	7	18	6	3	35	22	13
Tujuan 12	20	7	13	0	1	10	14	9	34	25	9
Tujuan 13	9	3	6	0	0	5	3	1	9	7	2
Tujuan 14	12	5	7	0	0	3	15	0	18	15	3
Tujuan 15	12	7	5	0	0	5	6	0	11	8	3
Tujuan 16	50	27	23	0	14	32	30	5	81	54	27
Tujuan 17	30	8	22	0	3	13	8	0	24	14	10
Total	348	165	183	13	76	215	173	144	621	427	194

Gambar 2.1
Persentase Capaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Berdasarkan hasil pencapaian diatas terdapat 621 indikator yang dipakai sebagai pendekatan dalam memperlihatkan capaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2022. Dari indikator tersebut terdapat 427 indikator yang tercapai, 194 indikator yang tidak tercapai, 0 indikator yang belum tersedia dan 0 indikator belum ada target dan baseline.

Dari pencapaian diatas didominasi oleh target yang tercapai sebesar 69% dari 621 indikator yang dipakai, 31% tidak tercapai, 0% belum tersedia dan 0% tidak ada target dan baseline. Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam lebih menggenjot upaya yang akan diambil dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci berikut ini adalah hasil evaluasi capaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan hasil pemetaan berdasarkan komitmen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terhadap pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari tujuan 1 sampai dengan tujuan 17. Hasil capaian ini didapatkan dari data yang disampaikan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017.

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

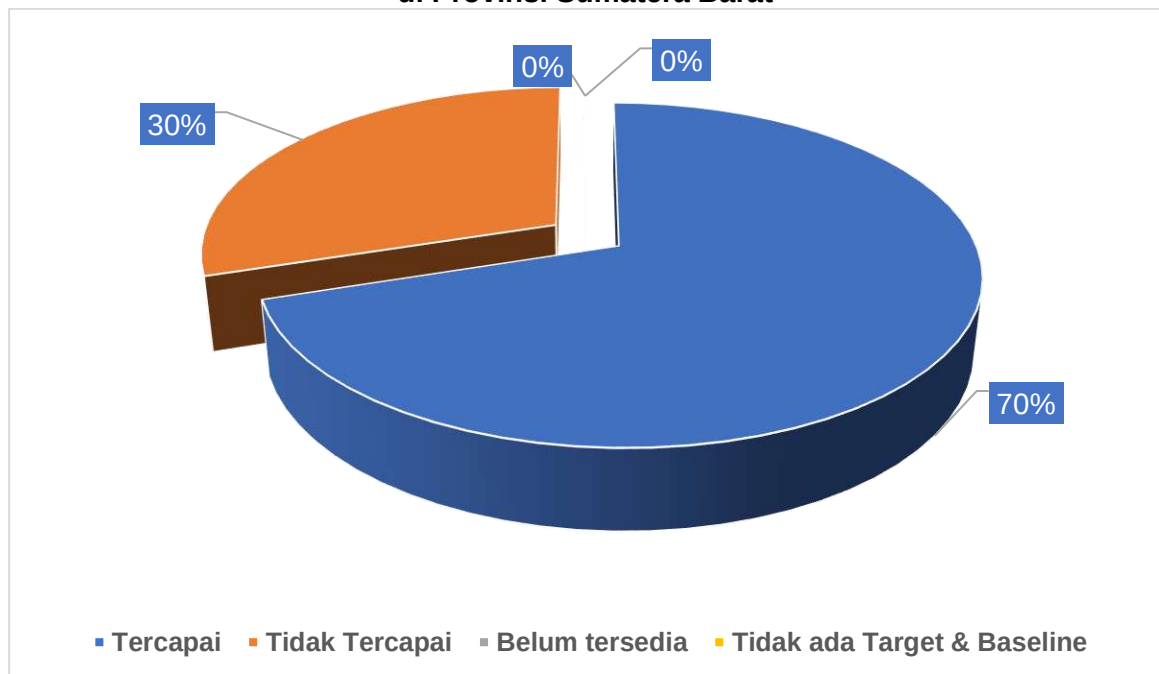
Dalam rangka mencapai tujuan Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030, terdapat 12 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 127 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari mengentaskan kemiskinan ekstrim, mengurangi setengah proporsi masyarakat miskin di

semua dimensi, penerapan sistem dan upaya perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanaan masyarakat terhadap bencana, menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber dan membuat kerangka kebijakan dalam pemberantasan kemiskinan. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 89 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 38 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Pencapaian tersebut jika disajikan dalam persentase dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Gambar 2.2
Persentase Capaian Tujuan 1 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.2
Capaian Tujuan 1 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.							
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.						
	RPJMD - Tingkat Kemiskinan (%)	Indikator Makro	%	6,04	6,28	6,04	
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.						
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	358,76	356,45	343,82	
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	358,76	356,45	343,82	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.						
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	25,2	▼
	RPJMD - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	IKD	%	85,78	53,8	0,38	▼
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	●
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	87,19	●
	RPJMD - Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	●
	RPJMD - Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	●
	RPJMD - Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	●
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	▼
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	103,47	93,22	103,47	●
	RPJMD - APK SLB	Indikator Program	%	85,78	53,8	85,78	●
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan	Indikator Program	%	82,32	35	31,16	▼

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah						
	RPJMD - Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100%	100	100	
	RPJMD - Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100%	100	100	
	RPJMD - Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100%	100	100	
	RPJMD - Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100%	100	100	
	RPJMD - Jumlah Anak yang difasilitasi perlindungan sosial (dalam pengangkatan anak)	Indikator Program	orang	13	25	13	
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	100	
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Atas (SMA)	Indikator Progul	persen	20	20	15	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Indikator Progul	persen	20	20	15	
	Progul - Jumlah masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3	Indikator Progul	orang	401	401	0	
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.						
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	86,18	
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	31,16	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.						
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	45,76	41,95	50,46	
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	45,76	11,26	50,46	
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.						
	RPJMD - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Makro	IPM	72,56	72,74	73,26	●
	RPJMD - b.Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	9,09	9,18	9,18	●
	RPJMD - c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	69,62	69,80	69,90	●
	RPJMD - Indeks Pembangunan manusia (IPM)	IKU	Nilai	72,65	72,74	73,26	●
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,07	9,18	9,18	●
	RPJMD - Angka Harapan Hidup (AHH)	IKU	Tahun	69,59	69,8	69,90	●
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	83,40	82	83,78	●
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	68,68	82	83,08 (BPS 69,2)	●
	RPJMD - Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	IKD	%	97,4	97,8	97,8	●
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	75,33	▼
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	82,24	86	85,19	▼
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	87,19	●
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	0	▼

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	75,03	75	75	
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	82,26	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	68,68	82	82,05	
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	61.11	
	RPJMD - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	14,36	
	RPJMD - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	67,21	
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,674	0,668	0,662	
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	99,91	99,5	99.98	
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	70,25%	73,7	77,42	
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82,26%	82	82,05	
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	75,034	75	75	
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	61.1	
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	Indikator Program	%	99,91	99,5	99,98	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	81	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	81	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	118	0	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	40	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	40	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	55	0	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	0	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	4	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa	Indikator Progul	unit	0	15	15	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	(SLB) > Jumlah SLB dengan 4 sarana air minum yang layak						
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	46	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	57	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	59	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Terminal Provinsi yang tersedia > Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	-	2	2	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	lokasi	10	12	12	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	lokasi	10	12	12	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	lokasi	-	-	0	
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.						
	RPJMD - Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	Indikator Program	%	75	80	80	
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	95,59	53	75	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	Indikator Program	%	0	3	0	
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.						
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030						
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	18,75	
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana						
	RPJMD - Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	IKU	Indeks	0,46	0,49	0,50 target BNPB (target rpjmd 0,62 tidak tercapai, penilaian mandiri 0,64 dari inaris)	●
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	100	100	100	●
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	18,75	▼
	RPJMD - Persentase penanganan pra bencana	IKD	%	100	100	100	●
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	●
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	71	●
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	3	10	10	●
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa	2	10	10	●

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.						
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	98479	14961	14.418 (Parsial tahun 2022)	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	107,61	100,99	110,37	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,44	103,47	108,85	
	RPJMD - Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	IKU	Rp. Juta	46255	47872	49678	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	9,74	5	6,5	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	17,31	5	11,16	
	RPJMD - Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	IKU	%	-1,41	2,14	4,8* (data sementara)	
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	NA	2,4	1,6	
	RPJMD - Kontribusi Ekonomi Digital (%)	IKU	%	NA	6,54		
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	530	368	289	
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	6,7	5	6,5	
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	46,15	8,6	20	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	6,65	2,02	73,68	
	RPJMD - Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	IKD	BUMD	70	51	51	
	RPJMD - Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	IKD	Nagari/Desa	381	410	417	
	RPJMD - Persentase Koperasi yang berkualitas	IKD	%	2,65	17,94	17,98	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	3,92	2	1,72	
	RPJMD - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	IKD	%	54,72	20	20	
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	20	40	40	
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	38174	41373	40653	
	RPJMD - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Indikator Program	hektar	53.830	50000	50000	
	RPJMD - Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Indikator Program	Sentra	42	20	25	
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	38.174	41373	40653	
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan	Indikator Progul	>= persen	10	10	9,47	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD						
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang	170	470	515	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang	2105	5872	5900	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	Indikator Progul	orang	500	1500	1600	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang	300	300	320	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang	4.532	4.759	150	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang	113	500	500	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator Progul	orang	1.040	1.950	3859	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	-	1.636	1645	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang	412	412	330	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang	200	200	300	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang	150	350	280	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang	765	675	1625	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang	-	200	200	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang	266	112	112	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta	Indikator Progul	orang	266	112	1192	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Progul - Persentase peningkatan usaha pasca panen pengolahan hasil > Luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat (Ha)	Indikator Progul	Ha	50.000	50.000	50.000	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.						
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.							
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.						

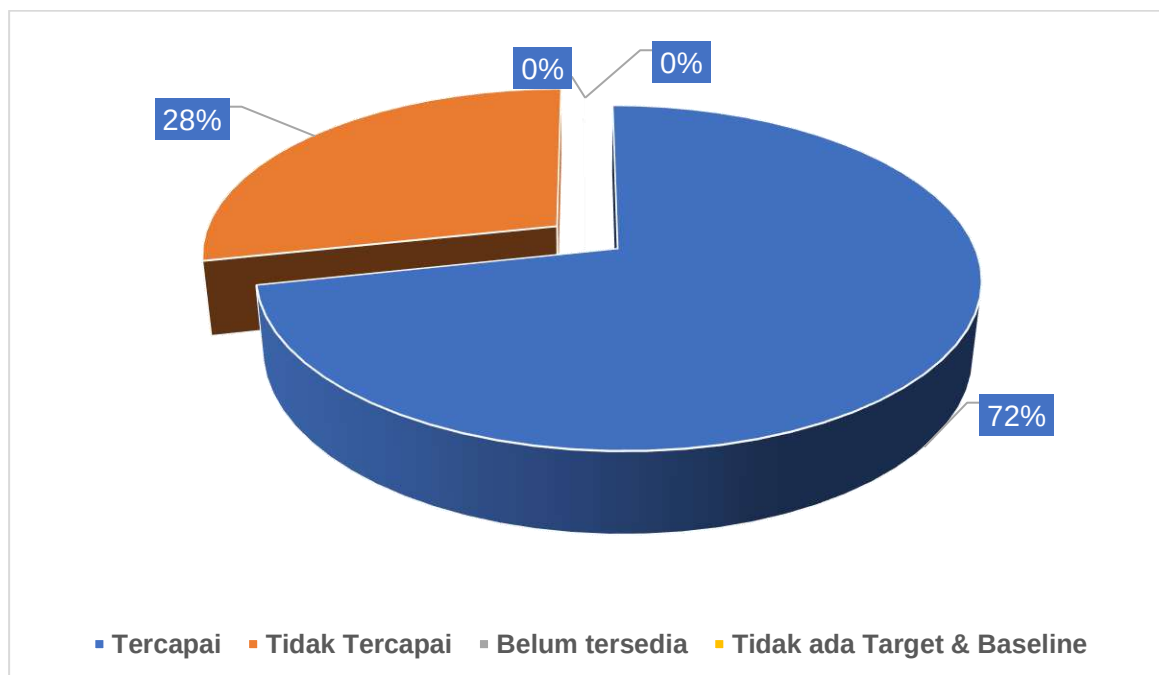
2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Pada tujuan 2 yaitu tanpa kelaparan pada tahun 2030, terdapat 11 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 67 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin sistem produksi pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, meningkatkan kapasitas produktif pertanian, memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dan membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim. Dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 48 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 19 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator belum tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Jika dipersentasekan pencapaian dari tujuan 2 ini adalah 72% pada indikator yang mampu mencapai target, 28% pada indikator dengan target yang tidak tercapai, 0% indikator yang tidak tersedia dan 0% pada indikator yang tidak mempunyai target dan baseline. Secara lebih detail dapat disajikan pada diagram berikut :

Gambar 2.3
Persentase Capaian Tujuan 2 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Untuk lebih jelasnya pencapaian dari target 2 akan dirinci dalam tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Capaian Tujuan 2 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).						
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	25,2	
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	79,55	79,13	79,45	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	86,41	92	84,02	
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	912699	833.110	610.296	
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	83,8	82,5	89.80	
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	43,75	22	27,91	
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton	1.346.063	1.542.909	1442000	
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton	921.514	978.062	950058	
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	500.000	
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	0	
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	500.000	
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	0	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.						
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	79,55	79,13	79,45	
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	86,41	92	84,02	
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	912.699	833.110	610.296	
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	83,8	82,5	89.80	
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	43,75	22	27,91	
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.						
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	25,2	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.						
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	25,2	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).						
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	79,55	79,13	79,45	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	912699	833.110	610.296	
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	83,8	82,5	89,80	
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	Indikator Program	%	83,80	82,5	89,8	
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	43,75	22	27,91	
	RPJMD - Tingkat konsumsi ikan	Indikator Program	Kg/kap/th	40,46	40	40,77	
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.						
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.							
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan						
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan						
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	107,61	100,99	110,37	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,44	103,47	108,85	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	9,74	5	6,5	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	17,31	5	11,16	
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	6,7	5	6,5	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.						
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	107,61	100,99	110,37	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,44	103,47	108,85	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	9,74	5	6,5	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	17,31	5	11,16	
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	6,7	5	6,5	
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan Yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.							
02.04.01	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.						
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.						
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.							
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.						
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa Sawit yang diadakan	Indikator Progul	batang	35.500	50.000	50.000	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kakao yang diadakan	Indikator Progul	batang	33.000	100.000	100000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kopi yang diadakan	Indikator Progul	batang	473.000	300.000	300000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Karet yang diadakan	Indikator Progul	batang	23.500	50.000	50000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa yang diadakan	Indikator Progul	batang	2.100	200.000	200000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Gambir yang diadakan	Indikator Progul	batang	-	37.500	12500	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Padi yang diadakan	Indikator Progul	ton	5,15	1.000	1000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jagung yang diadakan	Indikator Progul	ton	6,18	120	120	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cabe yang diadakan	Indikator Progul	gram	3.450	16.500	16500	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Bawang Merah yang diadakan	Indikator Progul	kg	28.000	100.000	100000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Manggis yang diadakan	Indikator Progul	batang	36.900	20.000	20000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jeruk yang diadakan	Indikator Progul	batang	17.200	40.000	40000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Alpukat yang diadakan	Indikator Progul	batang	10.450	20.000	20000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Durian yang diadakan	Indikator Progul	batang	13.600	20.000	20000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Pala yang diadakan	Indikator Progul	batang	7.155	15.000	10030	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kayu Manis yang diadakan	Indikator Progul	batang	-	44.500	44500	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cengkeh yang diadakan	Indikator Progul	batang	86.400	30.480	70090	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Tembakau yang diadakan	Indikator Progul	batang	-	15.000	0	▼
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jahe yang diadakan	Indikator Progul	kg	-	2.000	0	▼
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kunyit yang diadakan	Indikator Progul	kg	-	2.000	0	▼
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Lengkuas/Laos yang diadakan	Indikator Progul	kg	-		0	▼
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Urusan Kelautan dan Perikanan > Bibit rumput laut	Indikator Progul	kg	-	1.500	1.500	●
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	500.000	●
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	0	▼
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	500.000	●
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	0	▼
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.						
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.							
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.						

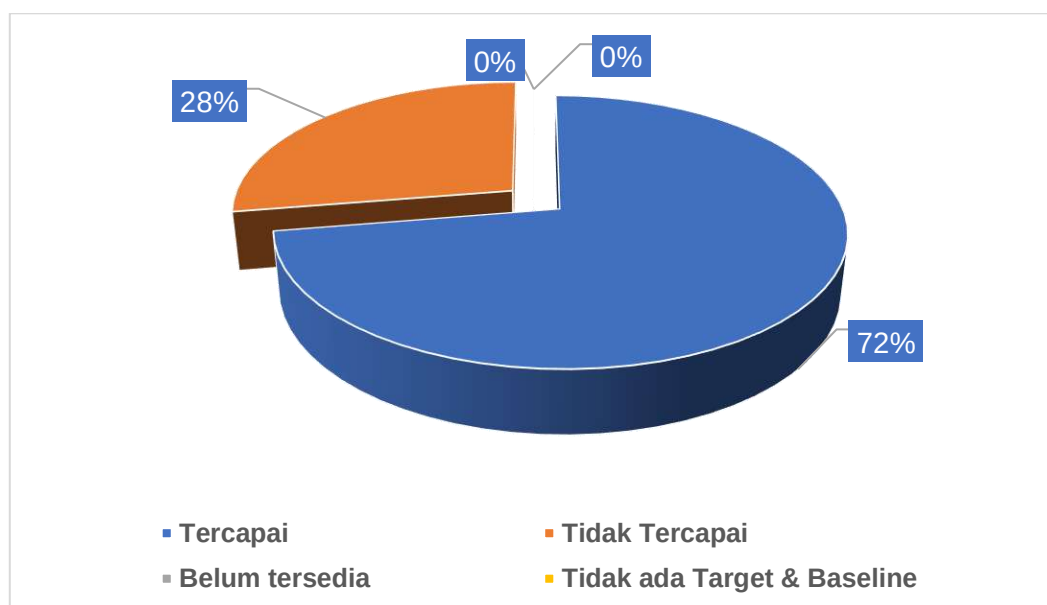
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen	10	10	9,47	
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.						
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen	10	10	9,47	
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.							
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.						
2.c Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.							

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Pada tujuan 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera, terdapat 22 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 58 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (tobacco control), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Dari pencapaian 58 indikator yang diterapkan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pencapaian yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 42 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 16 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator belum tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.4
Persentase Capaian Tujuan 3 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.4
Capaian Tujuan 3 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).						
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	75,33	
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	74,8	
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	79,6	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.						
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	75,33	
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	74,8	
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	79,6	
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.							
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.						
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	75,33	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	87,19	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	74,8	●
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	79,6	●
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.						
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	75,33	▼
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	74,8	●
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	79,6	●
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.						
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.						
	RPJMD - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	76	231	231	●
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.						
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	18	17	18	●
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.						
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	18	17	18	●
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.						
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	●

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.						
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.						
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.						
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.						
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	0,74	8,9	7,2	
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	19	
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	19	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	19	
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	19	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.						
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	19	
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	19	
03.04.02	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.						
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
03.05.01	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.						
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis						
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.						
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir.						
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.							
03.06.01	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.						
	RPJMD - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	IKD	%	50,60	62,58	52,41	▼
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.						
	RPJMD - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	IKD	%	11,8	19,1	12,2	●
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).						
	RPJMD - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	IKD	Indeks	2,6	2,7	2,46	●
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.						
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	75,33	▼
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	●
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	82,24	86	85,19	▼
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	87,19	●
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	82,26	●

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	86,18	●
	RPJMD - Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	76	231	231	●
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	18	17	18	●
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	31,16	▼
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	0,74	8,9	7,2	▼
	RPJMD - Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Indikator Program	Orang	574	420	427	●
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	70,25%	73,7	77,42	●
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	19	●
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	19	●
3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.						
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,662	▼
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,674	0,668	0,662	▼
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	86,18	●
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	31,16	▼
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	70,25%	73,7	77,42	●

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.						
3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).						
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	86,18	
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	31,16	
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.						
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	0,74	8,9	7,2	
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.						
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	87,19	
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Pertama	Indikator Progul	persen	70	80	80	
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Kedua	Indikator Progul	persen	60	70	70	
	Progul - Persentase masyarakat yang telah divaksin menuju Herd Immunity	Indikator Progul	persen	70	80	80	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.						
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.						
	RPJMD - Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial	Indikator Program	%	100	92	94,74	
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.						

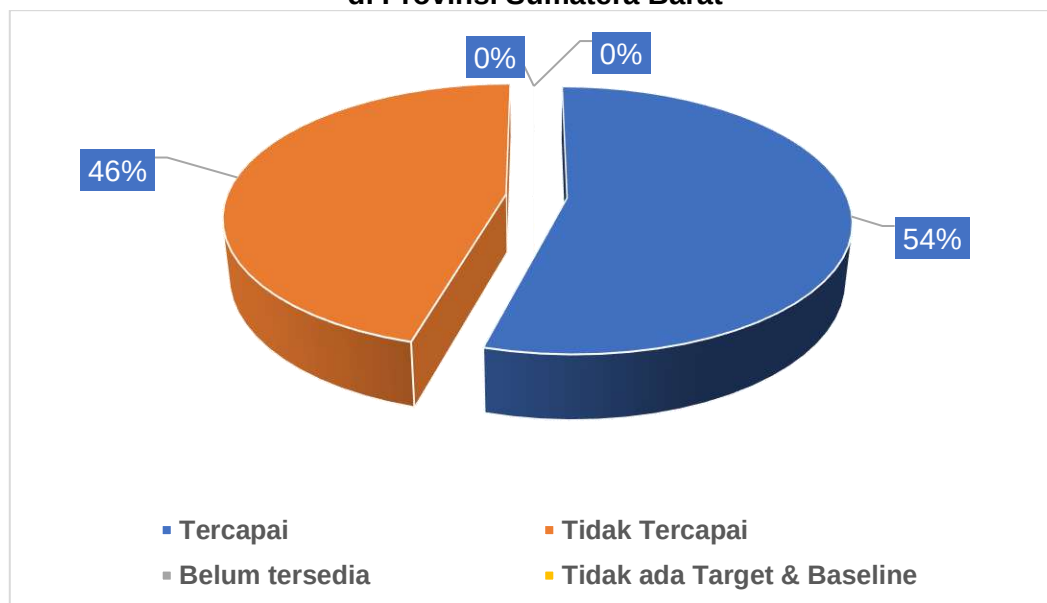
2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Pada tujuan 4 yaitu Pendidikan berkualitas pada tahun 2030, terdapat 7 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 46 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target tersebut terdiri dari menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, akses yang sama terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas, peningkatan keterampilan, menghilangkan disparitas gender, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Dari capaian tujuan 4 ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 25 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 21 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator belum tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.5
Persentase Capaian Tujuan 4 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.5
Capaian Tujuan 4 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.						
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca,						
	(ii) matematika.						
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.						
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,07	9,18	9,18	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	103,47	93,22	77,17	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	50,94	52,38	48,62	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	50,94	32,77	28,55	
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	103,47	93,22	103,47	
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	77,19	73,42	77,19	
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.						
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,07	9,18	9,18	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	103,47	93,22	77,17	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	50,94	52,38	48,62	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	50,94	32,77	28,55	
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	103,47	93,22	103,47	
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	77,19	73,42	77,19	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.						
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.						
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.						
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	98479	14961	14.418 (Parsial tahun 2022)	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	3,92	2	1,72	
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	3,92	2	1,72	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang	170	470	515	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang	2105	5872	5900	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	Indikator Progul	orang	500	1500	1600	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang	300	300	320	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang	4.532	4.759	150	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang	113	500	500	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator Progul	orang	1.040	1.950	3859	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	-	1.636	1645	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang	412	412	330	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang	200	200	300	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang	150	350	280	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan	Indikator Progul	orang	765	675	1625	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana						
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang	-	200	200	
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang	266	112	112	
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang	266	112	1192	
4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).						
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							
04.04.01	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).						
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).						
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.						
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	77,19	73,42	77,19	
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
04.06.01	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.						
	RPJMD - Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	NA	58,2	43,52	▼
	RPJMD - Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	NA	27,4	60,48	●
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.						
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.							
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).						
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	81	▼
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	236	236	236	●
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	81	▼
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	118	0	▼
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	40	▼

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	111	111	111	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	40	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	55	0	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	0	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	29	29	29	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	4	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	15	15	
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.							
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.						

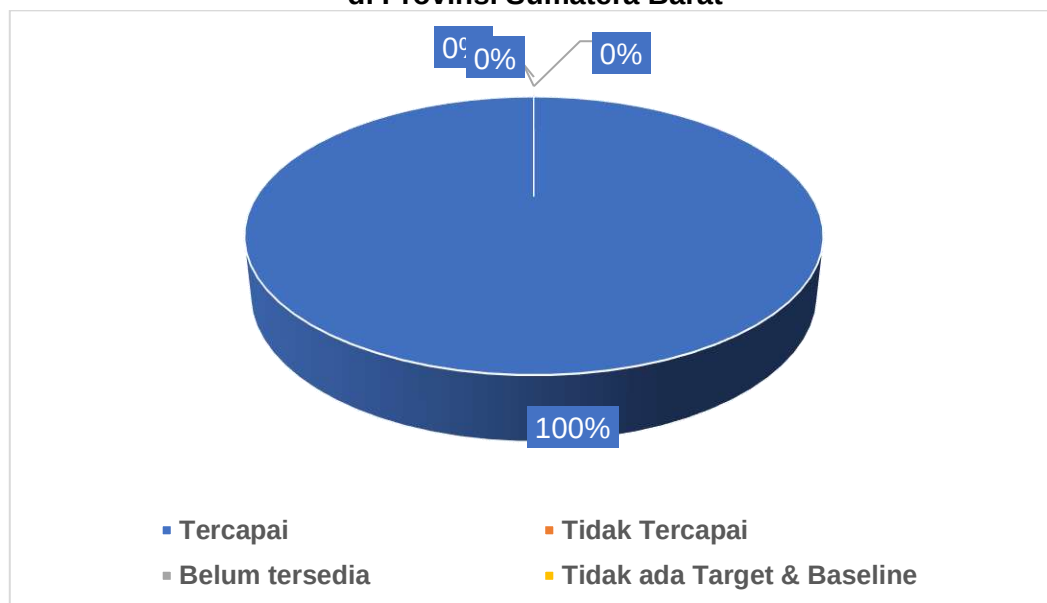
2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Pada tujuan 5 yaitu kesetaraan gender pada tahun 2030, terdapat 7 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 18 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Dari tujuan 5 ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 18 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 0 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator belum tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2.6
Persentase Capaian Tujuan 5 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.6
Capaian Tujuan 5 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.						
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	3,87	4,15	8,33	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,77	10,76	10,77	
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	20	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.						
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.						
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.						
	RPJMD - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	IKD	Usia	22,2	21,8	22,5	
05.03.02	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.						
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.							
05.04.01	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.						
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.						
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,77	10,76	10,77	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	20	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.						
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	15,38	11,54	21,15	
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	20	
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi- konferensi tersebut.							
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.						
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.						
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.							
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.						
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.						
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang- undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.							
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.						
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	3,87	4,15	8,33	
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	IKD	Kabupaten/Kota	17	17	17	
	RPJMD - Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	IKD	Predikat	Utama	Utama	Utama	

2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Dalam rangka mencapai tujuan 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, terdapat 9 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 26 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 15 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 11 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Capaian diatas dapat disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 2.7
Persentase Capaian Tujuan 6 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.7

Capaian Tujuan 6 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.						
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	83,40	82	83,78	
	RPJMD - Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	IKD	%	0	100	0	
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	82,26	
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82,26%	82	82,05	
6.2 . Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.						
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	68,68	82	83,08 (BPS 69,2)	
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	82,24	86	85,19	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	68,68	82	82,05	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
6.3 . Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
06.03.01	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman						
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	0	▼
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	82,26	▼
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	●
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	298983	●
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasionalkan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	11	●
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman						
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	0	▼
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	82,26	▼
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	●
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	298983	●
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasionalkan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	11	●
06.03.02	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.						
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	79,10	87,16	74,98	▼
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	80,75	77,43	75,59	▼
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku						
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	79,10	87,16	74,98	▼
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	80,75	77,43	75,59	▼
6.4 . Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.							
06.04.01	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.						
06.04.02	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediaannya.						
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya						
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya						
6.5 . Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepentingan.							
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).						
	RPJMD - Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Indikator Program	%	65,66	66,51	66,60	●
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	IKD	%	58,50	53,78	58,60	
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Indikator Program	%	58,50	53,78	58,60	
6.6 . Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.						
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	IKD	%	NA	37,3	37,3	
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	NA	37,5	37,3	

2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Dalam rangka mencapai tujuan 7 yaitu energi bersih dan terjangkau, terdapat 4 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 9 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global. Pencapaian dari tujuan 7 ini adalah :

1. Terdapat 9 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 0 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.8
Persentase Capaian Tujuan 7 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.8
Capaian Tujuan 7 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.						
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	99,91	99,5	99,98	
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	Indikator Program	%	99,91	99,5	99,98	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.						
7.1.02	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.						
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.						
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.						
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.						
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	29	
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	29	
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.							
7.3.1*	Intensitas energi primer.						
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	29	
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	29	
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.						
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang							
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)						
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	29	
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	29	

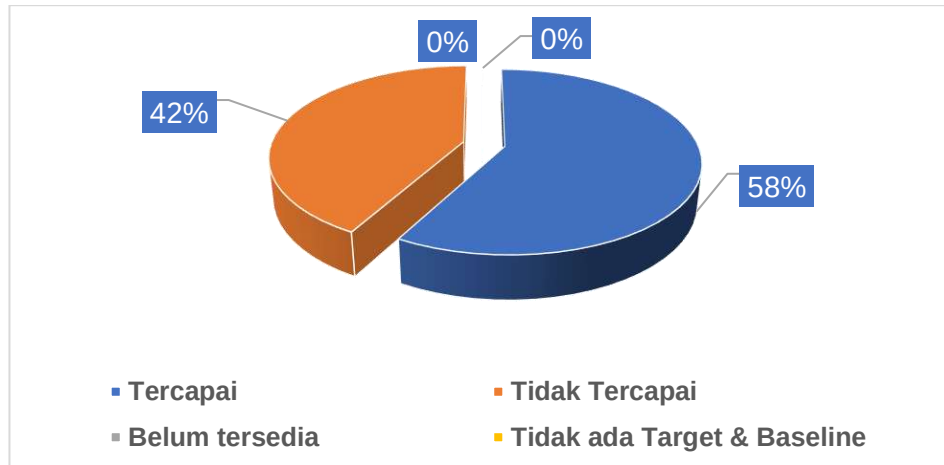
2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pada tujuan 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, terdapat 11 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 31 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 18 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 13 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Secara kumulatif capaian target tujuan 8 disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 2.9
Persentase Capaian Tujuan 8 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.9
Capaian Tujuan 8 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.						
	RPJMD - Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indikator Makro	%	3,29	3,40	4,36	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.						
	RPJMD - PDRB (ADHK) Per Kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	31,36	32	32,37	
	RPJMD - PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	45,35	48,29	50,59	
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa						
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.						
	Progul - Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga	120	540	540	
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	100	200	-	
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	300	400	265	
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	50	100	0	
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	4	4	5	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	5	5	5	
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.						
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin						
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan						
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	NA	2,4	1,6	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	3,92	2	1,72	
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	3,92	2	1,72	
	Progul - Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga	120	540	540	
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	100	200	-	
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	300	400	265	
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	50	100	0	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	4	4	5	
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	5	5	5	
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.							
08.04.01	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.						
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan						
08.04.02	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).						
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.						
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.						
	RPJMD - Tingkat pengangguran terbuka (%)	Indikator Makro	%		6,6	6,28	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.						
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).						
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
08.07.01	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	▼
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	▼
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	▼
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	▼
8.8 Melindungi hak- hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, Dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
08.08.01	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.						
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.						
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	45,76	41,95	50,46	●
	RPJMD - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	IKD	%	9,26	12,36	19,2	●
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	45,76	11,26	50,46	●

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang- undangan negara terkait.						
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.						
	RPJMD - Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	IKU	%	1,27	1,24	1,3	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.						
	RPJMD - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	IKD	%	-100	1,5	500	
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Indikator Program	%	-100	2,5	2,5	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.						
	RPJMD - Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	IKD	%	-40,23	1,5	1,5	
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Indikator Program	%	-40,23	3	3	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.						

2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Dalam mencapai tujuan 9 yaitu membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi pada tahun 2030, terdapat 6 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 18 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Tujuan 9 ini mendapatkan pencapaian sebagai berikut :

1. Terdapat 10 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 8 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.10
Persentase Capaian Tujuan 9 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.10
Capaian Tujuan 9 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.						
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,662	▼
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,674	0,668	0,662	▼
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.						
	RPJMD - Kemantapan Jalan (%)	IKU	%	75,034	75	71,39	▼
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	75,03	75	75	●
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	75,034	75	75	●
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.						
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.						
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.						
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.						
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.						
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan	4	4	4	●
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut	4	4	4	●
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan	4	4	4	●
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut	4	4	4	●
9.2 Mempromosikan dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.						
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.						
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.						
	RPJMD - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	IKU	%	8,81	8,75		▼
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	530	368	289	▼
	RPJMD - Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp	IKD	Rp. Triliun	11,36	15,7	20,93	●
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	38174	41373	40653	▼
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	38.174	41373	40653	▼
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	-	1.636	1645	●
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	300	400	265	
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	4	4	5	
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	5	5	5	
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.						
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.						
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.						
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.						
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.						
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).						

2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

Tujuan 10 yaitu berkurangnya kesenjangan pada tahun 2030, terdapat 8 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 9 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 8 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 1 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.11
Persentase Capaian Tujuan 10 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.11
Capaian Tujuan 10 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Rasio Gini.						
	RPJMD - Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indikator Makro	Indeks		0,31	0,315 (2021)	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.						
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa		356,45	335,21	
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.						
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	46,15	8,6	20	
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.						
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	6,65	2,02	73,68	
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.						
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.						
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.						
10.2 Pada tahun 2030,memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.							
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.						
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.03.01	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.						
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	73	68,01	78,51	
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).						
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.						
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.04.01	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.						
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.						
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.						
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	45,76	41,95	50,46	
10.04.02	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.						
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.							
10.05.01	Financial Soundness Indicator.						
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.						
10.7 . Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang							

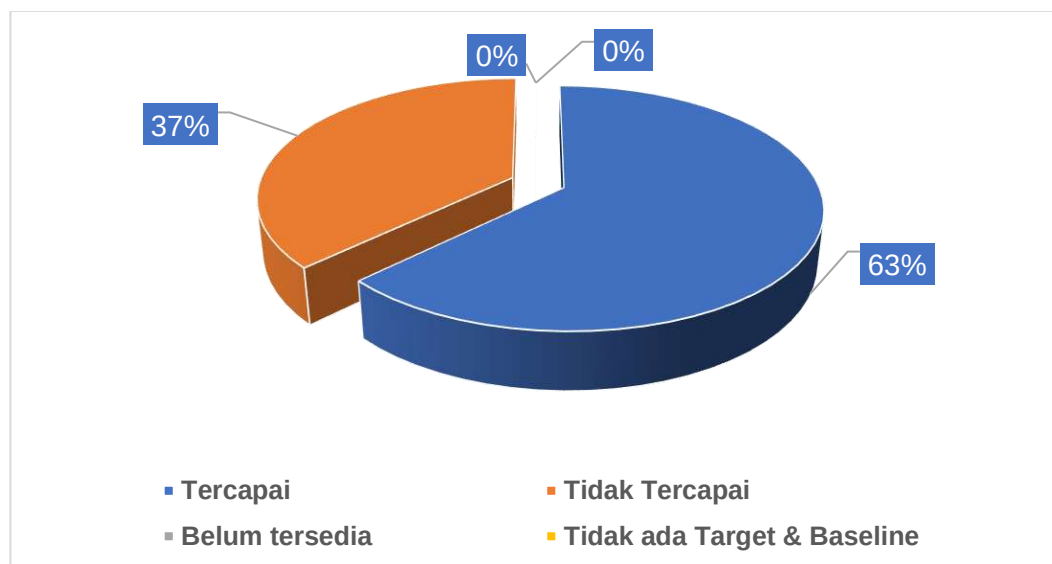
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.							
10.07.01	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.						
10.07.02	Jumlah negara yang mengimplementa- sikan kebijakan mi- gran yang baik.						
	RPJMD - Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar yang mendapatkan penanganan	Indikator Program	orang	13	35	-	
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.						
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.						
10.07.03	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.						
10.07.04	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.						

2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Pada tujuan 11 ini yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, terdapat 11 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 35 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Gambaran capaian tujuan 10 ini antara lain :

1. Terdapat 22 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 13 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.12
Persentase Capaian Tujuan 11 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.12
Capaian Tujuan 11 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.							
11.1.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.						
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau						
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	83,40	82	83,78	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	68,68	82	69,2	
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	82,26	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	68,68	82	69,2	
	RPJMD - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82,26%	82	82,05	
11.2 . Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.							
11.2.01	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas						
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,662	
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	18127254	19000000	18650012	
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum						
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,662	
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	18127254	19000000	18650012	
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.							
11.3.01	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk						
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk						
11.3.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis						
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
11.4.01	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)						
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)						
	RPJMD - d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Indikator Makro	Ribu	10790	10916	11130	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang						
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	95,59	53	75	
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	71	
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	3	10	10	
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa	2	10	10	
11.5.02	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar						
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB						
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
11.6.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota						
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya						
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	61.11	
	RPJMD - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	14,36	
	RPJMD - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	67,21	
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	61.1	
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen	1	1	1	
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola						
11.6.02	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)						
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10						
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara						
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	79,10	87,16	target RPJMD 77,43 capaian 74,98	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	80,75	77,43	75,59	
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.							
11.7.01	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.						
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua						
11.7.02	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.							
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.						
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS						
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.							
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030						
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	18,75	
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana						
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.							
11.c.1	-						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal						
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	18,75	

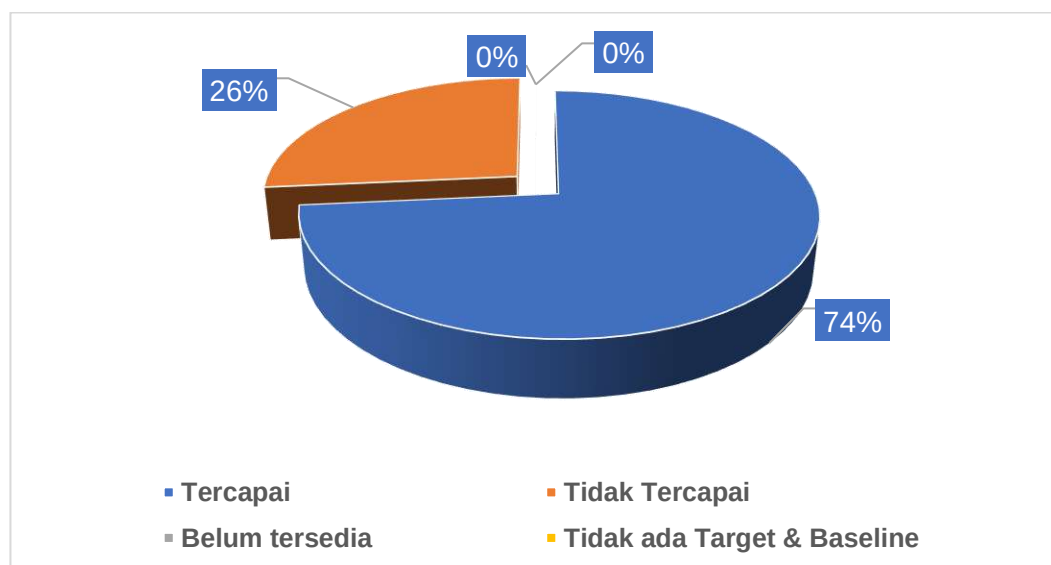
2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Tujuan 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, terdapat 7 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 34 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Capaian dari tujuan ini adalah bahwa :

1. Terdapat 25 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 9 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Capaian tujuan 12 disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 2.13
Persentase Capaian Tujuan 12 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.13
Capaian Tujuan 12 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.							
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan						
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.							
12.3.01	(a)? Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b)? Indeks sampah makanan (Food waste index)						
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan						
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	14,36	
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	67,21	
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	61.1	
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen	1	1	1	
	Progul - Jumlah nagari/desa yang melaksanakan budidaya maggot	Indikator Progul	nagari/desa	4	13	15	
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.						
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri						
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	0	▼
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	82,26	▼
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	●
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	298983	●
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	11	●
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline						
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	0	▼
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	82,26	▼
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	●
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	298983	●
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	11	●
12.4.2*	(a)? Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)? Proporsi limbah B3 yang						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.						
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	0	▼
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	82,26	▼
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	●
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		261.290	298983	●
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		10	11	●
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.01	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.						
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	61.11	●
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	14,36	▼
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	67,21	●
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	61.1	●
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek- praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.							
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.						
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional							
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi						
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah						
12.7.1(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa						
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
12.8.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.						
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup						
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.						
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	88,33	84,5	90,48	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	95,24	81	90,9	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,45	92	93,49	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,18	86	91,98	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91,38	92	92,57	●
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	88,34	92	88.58	▼
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	100,73 / 97,65	82,60 / 3,40	95,60 / 3,82	●
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit	4	50	58	●
12.a Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.							
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)						
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	29	●
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	29	●
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
12.b.1	Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan						
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development						

2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Tujuan 13 SDG's yaitu penanganan perubahan iklim, terdapat 3 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 9 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan capaian sebagai berikut :

1. Terdapat 7 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 2 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.14
Persentase Capaian Tujuan 13 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.14
Capaian Tujuan 13 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara							
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang						
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	18,75	
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	71	
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	3	10	10	
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030						
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	18,75	
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	71	
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional							
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications						
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun						
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)						
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)						
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim							
13.03.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.						
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup						

2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Tujuan 14 yaitu pelestarian dan pemanfaatan ekosistem lautan, terdapat 5 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 18 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU fisihing, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Pencapaian dari tujuan 14 adalah :

1. Terdapat 15 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 3 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.15
Persentase Capaian Tujuan 14 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.15
Capaian Tujuan 14 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi							
14.01.01	(a)? Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)? kepadatan sampah plastik terapung						
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut						
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	61.11	
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	61.1	
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif							
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan						
	RPJMD - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov	IKD	Ton	481143,69	477.362	503.950,37	
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Indikator Program	%	0,19	0,99	6,62	
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan tangkap	Indikator Program	ton	219.570,30	222693	226589,29	
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Indikator Program	%	5,56	3,33	6,66	
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya	Indikator Program	ton	261.573,39	262256	277361,08	
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya laut	Indikator Program	ton	64,9	67	1046,97	
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	Indikator Program	%	100%	6,49	7,5	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Indikator Program	ton	9.118	16652	17500	●
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan						
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	37,24	47,06	48	●
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	7	7	6	▼
	RPJMD - Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	Indikator Program	M2	140,40	250	300	●
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia							
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut						
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	37,24	47,06	48	●
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	7	7	6	▼
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	NA	37,5	37,3	▼
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)							
14.06.01	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha						
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	IKD	%	84,34	82	85	
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Indikator Program	%	84,34	82	85	
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara							
14.07.01	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)						
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar							
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil						
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan						
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi						
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari The future we want							
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)						

2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Tujuan 15 yaitu pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, terdapat 7 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 11 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati dengan capaian sebagai berikut :

1. Terdapat 8 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 3 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.16
Persentase Capaian Tujuan 15 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.16
Capaian Tujuan 15 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan						
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	64,20	60,98	63,98	
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	64,20	60,98	63,98	
15.01.02	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya						
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)						
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	1	
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							
15.02.01	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari						
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju						
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	20	40	40	
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Indikator Program	unit	20	20	20	
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi							
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	IKD	%	0,48	1,29	1,29	●
	RPJMD - Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	IKD	%	2,55	2,85	2,95	●
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.							
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi						
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	1	▼
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan						
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	64,20	60,98	63,98	●
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	64,20	60,98	63,98	●
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal							
15.07.01	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal						
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL						
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan							
15.09.01	(a)? Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan						
	(b)? integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi						
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis						

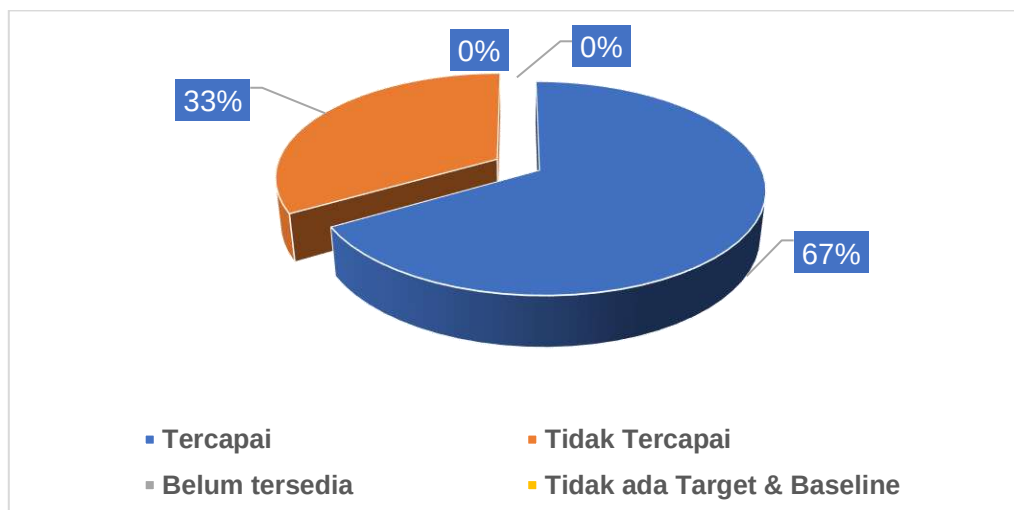
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	1	▼

2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Untuk mencapai tujuan 16 yaitu pengamanan, keadilan dan kelembagaan yang tangguh pada tahun 2030, terdapat 27 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 81 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan melalui pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Target yang akan dicapai dilaksanakan melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, dan menjaga iklim demokrasi. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 54 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 27 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.17
Persentase Capaian Tujuan 16 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.17
Capaian Tujuan 16 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
16.1.01	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.						
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	2,05	
16.1.02	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.						
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.						
	RPJMD - Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	IKD	Kasus	0	3	1	
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	2,05	
16.1.03	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.						
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	2,05	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.						
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Indikator Program	nilai	3,04	3,1	2,18	
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	2,05	
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
16.10.01	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.						
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).						
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.						
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.						
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	13,66	10	13,90%	
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	13,66	10	8,86	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif						
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	13,66	10	13,90%	
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	13,66	10	8,86	
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.						
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.							
16.2.01	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir						
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	100	
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	100	
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	100	
16.2.03	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.						
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	●
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	●
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	▼
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	●
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	▼
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	▼
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	●
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.							
16.3.01	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	100	
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus	Indikator Program	%	100	84	100	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	yang mendapatkan Layanan komprehensif						
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi						
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	100	100	100	
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.						
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	100	100	100	
16.3.02	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.						
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.						
16.3.03	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.						
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)						
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.							
16.5.01	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.						
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).						
16.5.02	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.						
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.						
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.						
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	68,89	68,5	69,88	
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ? B						
	RPJMD - Nilai SAKIP (predikat)	IKU	Predikat	BB (77,52)	BB	BB (78,02 sumber data Masih data sementara)	
	RPJMD - Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	IKD	Perangkat Daerah	6	8	8	
	RPJMD - Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Indikator Program	Perangkat Daerah	6	8	8	
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ? B						
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	68,89	68,5	69,88	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.6.02	Proporsi penduduk yang puas terhadap						
	pengalaman terakhir atas layanan publik.						
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.						
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	88,33	84,5	90,48	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	95,24	81	90,9	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,45	92	93,49	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,18	86	91,98	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91,38	92	92,57	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	88,34	92	88.58	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	100,73 / 97,65	82,60 / 3,40	95,60 / 3,82	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	46	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	53	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik	Indikator Progul	unit	4	50	57	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	(UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak						
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	59	
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit	4	50	58	
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.01	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).						
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	65,12	59,12	65,48	
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,77	10,76	10.77	
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	20	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).						
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	65,12	59,12	65,48	
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	15,38	11,54	21,15	
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	20	
16.7.02	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.						
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi						
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan						
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	73	68,01	78,51	
16.7.2.(c)	Indeks Kesenjangan						
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	65,12	59,12	65,48	
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	73	68,01	78,51	
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	88,01	86,62	101,47	
	RPJMD - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Indikator Program	%	36%	40	112,5	
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	95,79	94	104,25	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.						
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	88,01	86,62	101,47	
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	95,79	94	104,25	
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun						
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	88,01	86,62	101,47	
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	95,79	94	104,25	
16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.							
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.						
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.							
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						

2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Untuk tujuan terakhir pada tujuan 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan terdapat 8 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 24 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari mobilisasi sumber daya domestik, kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta, peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi, perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi dan monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data.

Capaian dari tujuan 17 ini adalah :

1. Terdapat 14 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 10 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Hasil capaian tujuan dimaksud disajikan dalam diagram berikut :

Gambar 2.18
Persentase Capaian Tujuan 17 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.18
Capaian Tujuan 17 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.						
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	38,05	37,84	46,50	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	2,37	3,58	-11,24	
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	1,02	36,6	1,92	
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	13,77973812	7,2	8,37	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.						
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	38,05	37,84	46,50	
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	1,02	36,6	1,92	
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	13,78	7	8,37	
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	13,77973812	7,2	8,37	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.						
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	38,05	37,84	46,50	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	2,37	3,58	-11,24	
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	1,02	36,6	1,92	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	13,78	7	8,37	
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	13,77973812	7,2	8,37	
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.							
17.10.01	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).						
17.10.1(a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati						
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.							
17.11.01	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.						
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas						
	RPJMD - Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp	IKD	Rp. Juta	3066,93	1420,99	2492.04 (Jan-Okt)	
	RPJMD - Nilai ekspor	Indikator Program	juta US\$	"3066,93 (Juta \$)"	1420,99	2492.04 (Jan-Okt)	
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.							
17.16.01	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.						
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
17.17.01	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).						
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.						
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).						
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.						
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17.18.01	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs						
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.						
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	66,7	60	58,82	
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	66,7	60	58,82	
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.						
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.						
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto,dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.01	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.						
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.						
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	66,7	60	58,82	
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	66,7	60	68,63	
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan	Indikator Program	%	60	60	70,59	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.						
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	66,7	60	58,82	▼
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	IKD	%	60	60	54,9	▼
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	66,7	60	68,63	●
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	60	60	70,59	●
17.19.02	Proporsi negara yang a)? melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b)? mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.						
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).						
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
17.03.01	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.						
17.03.02	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.						
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.						
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17.06.01	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya						
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga						
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)						
17.8 Mengoperasional- isasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangu- nan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkat- kan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khu- susnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	Persentase pengguna internet						

2.18. Tantangan dan Kendala Pelaksanaan TPB/SDGs

Pencapaian target indikator pada RAD TPB/SDGs sampai dengan tahun 2022 didukung oleh program dan kegiatan baik dari pemerintrah daerah maupun nonpemerintah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 17 Tujuan TPB oleh Perangkat Daerah diidentifikasi beberapa permasalahan yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
 - a. Masih adanya kondisi masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang dan sebagainya
 - b. Pandemi Covid 19 yang telah berjalan selama 2 tahun menjadi penghambat kemajuan pendidikan dimana Proses Tatap Muka (PTM) di sekolah dibatasi sehingga mempengaruhi kualitas belajar siswa salah satunya pembelajaran daring dan masih adanya daerah yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot)
 - c. Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah
 - d. Belum adanya hasil AN (Assesment Nasional) Tahun 2021 dari kemendikbud
 - e. Faktor Sarana prasarana sekolah yang belum memadai, SDM pendidik yang belum memenuhi kualifikasi standar, jumlah siswa yang belum memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
 - a. Masih ada persalinan kehamilan yang menggunakan tenaga non Kesehatan
 - b. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jamban sehat
 - c. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan Kesehatan terutama Kesehatan lingkungan
 - d. Aplikasi pelaporan (STBM Smart) tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga sistem pelaporan terkendala dan pelaporan secara manual tidak berjalan dengan baik
 - e. Isu negatif terkait kehalalan imunisasi yang masih beredar di tengah-tengah masyarakat
 - f. Adanya Pandemi menghambat penemuan kasus serta tidak makasimalnya layanan Kesehatan terutama pada Posyandu dan Puskesmas
 - g. Terbatasnya SDM Kesehatan baik dari kualitas dan kuantitas terutama pada pusat layanan pertama
 - h. Terbatasnya Jumlah dan sebaran Tenaga Kesehatan (Bidan Desa)
 - i. Terbatasnya pelaksanaan pengawasan /pembinaan UKOT, dan Pelaku Usaha
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Terbatasnya kewenangan pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota dalam intervensi program akses air minum dan sanitasi

- b. Terbatasnya dukungan anggaran dalam pembangunan Jalan, jembatan, ciptakarya serta pengairan
 - c. Tidak adanya pengawasan yang intensi terhadap kendaraan dengan muatan yang melebihi berat dari yang di izinkan sehingga mengakibatkan jalan cepat rusak (umur ekonomis jalan menjadi singkat)
 - d. Belum adanya MOU antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama terkait dengan sinergi pembangunan infrastruktur
 - e. Belum adanya Keputusan/Penetapan Hukum terkait dengan penetapan Kawasan strategis
 - f. Masih terdapat pihak ketiga yang kurang kompeten dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga menjadi terbengkalai/tidak diselesaikan dengan tepat waktu
 - g. Panjangnya prosedur terutama terkait dengan proses lelang pekerjaan pembangunan yang bersifat fisik
 - h. Faktor cuaca yang sering tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik
 - i. Terhambatnya pembangunan dikarenakan permasalahan pembebasan lahan
 - j. Adanya kebutuhan di daerah yang mendesak untuk menyusun dokumen seperti mengakomodir perubahan RTRW, Kondisi alam dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat dinamis yang butuh penyesuaian
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Belum ada regulasi tentang RTLH
 - b. Merupakan kewenangan kabupaten/kota
 - c. Lokasi PSU yang sulit diakses
 - d. Terbatasnya SDM pengelola kegiatan
 - e. Masih kurangnya dukungan dari masyarakat
 - f. Belum ada regulasi yang mengatur tentang sertifikasi dan registrasi untuk pengembang perumahan
 - g. Masih belum maksimalnya komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk pengurangan kawasan kumuh provinsi
 - h. Masih banyaknya permukiman yang belum memiliki PSU yang layak
5. Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Terdapatnya gangguan trantibum yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup Panjang
 - b. Masih adanya OPD yang belum berkoordinasi/kurang bersinergi dengan Satpol PP
 - c. Terbatasnya tenaga PPNS untuk melakukan penegakan Perda
 - d. Terbatasnya kewenangan penentuan status bencana
 - e. Masih belum memadainya Sumber Daya aparatur yang memahami teknis Penanggulangan Bencana

- f. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana
 - g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana seperti jalur evakuasi, selter dll
 - h. Sebagian besar masyarakat yang berada pada daerah resiko bencana masih belum paham terkait dengan upaya dan Tindakan dalam pengurangan resiko bencana
 - i. SDM Satpol PP yang masih terbatas dari sisi jumlah dan kualitas
 - j. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
 - k. Minimnya anggaran yang tersedia sedangkan Perda yang ditegakkan cukup banyak.
 - l. Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana damkar di Provinsi dan Kabupaten/ Kota
 - m. Belum tersedianya peta daerah rawan kebakaran
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
- a. Pemahaman terkait dengan kinerja dan penilaian Indek Partisipasi Sosial (IKD) yang masih terbatas dan belum diketahui semua pihak terutama oleh penyelenggara urusan sosial
 - b. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam rehabilitasi sosial diluar panti yang mennadi kewenangannya
 - c. Cukup besarnya kebutuhan alokasi anggaran untuk memenuhi SPM yang merupakan kewenangan Provinsi yakni Rehabilitasi Sosial dalam Sosial
 - d. Data DTSK yang masih jarang dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - e. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan bencana saat tanggap darurat
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
- a. Keterbatasan sarana dan prasarana BLK milik pemerintah
 - b. Kuantitas dan kualitas instruktur masih minim dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pangsa kerja
 - c. Tingkat kompetensi tenaga kerja belum maksimal
 - d. Efektifitas tenaga kerja belum optimal
 - e. Budaya kerja di Sumatera Barat yang masih rendah
 - f. Penggunaan teknologi belum maksimal oleh pencari kerja
 - g. Keterbatasan orang yang akan dilakukan pendidikan dasar dan pelatihan di BLK karena dibatasi persyaratan usia, pendidikan, lama pelatihan dll
 - h. Komitmen beberapa perusahaan yang masih rendah untuk menerapkan tata Kelola kerja yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.
 - i. Sulit untuk menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang sedang bersengketa

- j. Jumlah Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan baik di provinsi (33 orang) yang masih terbatas jika dibandingkan kondisi ideal yang mengharuskan minimal 1 fungsional pengawas ketenagakerjaan menangani 5 perusahaan
 - k. RTK Mikro belum menjadi prioritas bagi perusahaan
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Masih rendahnya alokasi anggaran yang mendukung PPRG.
 - b. Belum ada Tenaga Ahli (Psikolog dan Advokat) untuk penanganan kasus.
 - c. Belum ada Rumah Perlindungan sehingga layanan penampungan sementara belum dapat diberikan.
 - d. Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi Stop kekerasan terhadap anak.
 - e. Belum optimalnya Kabupaten/ Kota dalam menerapkan tujuh prasyarat PUG sebagai strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - f. Budaya masyarakat yang belum siap dipimpin oleh perempuan
 - g. Belum Teradvokasi dan tersosialisasikannya Program dan Kegiatan Pemberdayaan perempuan secara Optimal.
 - h. Belum tersosialisasinya indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kab/Kota.
 - i. Masih rendahnya capaian kluster 1 dalam pemenuhan Hak Anak karena masih rendah persentase anak yang terlibat didalam organisasi anak
 - j. Masih rendahnya kluster 4 dalam pemenuhan hak anak karena masih rendahnya persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni
 - k. Rendahnya Tingkat Ekonomi masyarakat
 - l. Masih tingginya tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - m. Adanya beban ganda perempuan dalam rumah tangga jika diiringi berkarir sehingga memiliki konsekuensi beban kerja yang tinggi dan menyita waktu bersama dengan keluarga
 - n. Terbatasnya komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung penilaian KLA
 - o. Konsep terkait data gender dan anak belum dipahami semua perangkat daerah pemangku urusan
 - p. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah yang terlihat dari masih belum semua Pemerintah Kabupaten/kota yang memiliki regulasi mendukung Pengarusutamaan Gender
 - q. Belum seluh kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang tertuang detail dalam dokumen RPJMD dan renstra Perangkat Daerah
 - r. Terbatasnya jumlah SDM terlatih PPRG dan jumlah anggaran yang responsive gender
9. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan
 - b. Masih terdapat masyarakat yang belum atau enggan melakukan update data kependudukan (terutama data kematian)

- c. Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum mengetahui kegunaan data kependudukan dalam pelaksanaan program
 - d. Masyarakat masih belum mengetahui tentang Kartu Identitas Anak (KIA) serta kegunaan
 - e. Kartu Identitas Anak (KIA) belum menjadi dokumen wajib kependudukan
 - f. Pembiayaan blanko Kartu Identitas Anak (KIA) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota
 - g. Terbatasnya ketersediaan blanko KTP
 - h. Masih banyak masyarakat yang belum mencetak KTP karena telah memiliki Surat keterangan Perekaman KTP
 - i. Masih terdapat masyarakat yang berada pada lokasi yang sulit dijangkau oleh layanan kependudukan seperti Kepulauan Mentawai, perbatasan antar daerah, daerah terisolir, daerah yang sulit diakses transportasi
 - j. Masih terdapat beberapa daerah yang menetapkan denda keterlambatan pembuatan akta kelahiran
 - k. Masih terdapat anak yang lahir di luar pernikahan atau dari orangtua yang menikah tidak tercatat pada akta KUA sehingga enggan untuk mengurus akta kelahiran
 - l. Masih terdapat beberapa orangtua yang malas mengurus akta kelahiran anak
 - m. Masih adanya praktek pernikahan siri sehingga sulit untuk tercatat pada dokumen kependudukan
 - n. Belum adanya kebutuhan mendesak untuk segera memiliki dokumen kependudukan
 - o. Pengelolaan data kependudukan masih belum terintegrasinya antar sector
 - p. Terbatasnya SDM IT untuk memfasilitasi terciptanya inovasi
 - q. Penyajian data kependudukan kurang menarik dan kurang kekinian
 - r. Belum ada analisa yang menggambarkan terkait dengan data yang ditampilkan sehingga tidak diketahui kegunaan data kependudukan
10. Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Pada daerah pedesaan, masih banyaknya angka usia pernikahan dini dan angka kehamilan yang tidak diinginkan pada usia remaja hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat serta lemahnya ekonomi masyarakat
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, yang melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan urusan pemerintah Bidang PPKB di wilayah Provinsi Sumatera Barat, karena belum samanya persepsi dalam pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang PPKB, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan Alat Kontrasepsi.
 - d. Capaian indeks kebahagiaan rendah karena minimnya Waktu berinteraksi antar anggota keluarga yang kurang, pola pengasuhan anak yang masih didominasi oleh 1 pihak, terbatasnya waktu berekreasi keluarga.

- e. Rendahnya capaian indeks ketentraman karena terbatasnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah dikeluarga
 - f. Masih rendahnya pemahaman tentang pembangunan kependudukan, terbatasnya analisa serta kajian dalam melihat permasalahan kependudukan, pembangunan belum berorientasi terhadap penduduk,
 - g. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan alat atau obat kontrasepsi, karena takut akan efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi, minimnya informasi terkait dengan alat kontrasepsi yang sesuai untuk digunakan, adanya penolakan dari keluarga serta dianggap bertentangan dengan ajaran agama, dan alasan kesehatan, terbatasnya akses terkait dengan informasi dan tempat layanan
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- a. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memperbaiki kualitas air sungai yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di sumber seperti pemilahan sampah sejak dari Rumah Tangga
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta secara mandiri melakukan pengolahan sampah pada level rumah Tangga
 - e. Belum terkelolanya limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat
 - f. Masih maraknya kegiatan penambangan ilegal di sungai
 - g. Terbatasnya kegiatan pengawasan lingkungan yang dilakukan
 - h. Masih minimnya kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan
 - i. Masih belum maksimalnya dalam menerapkan sanksi sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan
 - j. Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Perangkat aturan pengelolaan sampah seperti regulasi dll
 - k. Belum semua usaha dan/atau kegiatan memiliki acuan pengelolaan limbah B3 dalam izin/dokumen lingkungan (belum memiliki rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3);
 - l. Belum semua objek pencemar dan perusak tercakup dalam upaya pencegahan (pengawasan/ pemantauan/ inventarisasi);
 - m. Aktivitas perusakan lebih tinggi daripada kemampuan upaya pemulihan;
 - n. Belum maksimalnya pusat penanganan Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan
 - o. Masih rendahnya tingkat pelayanan penanganan sampah di Kabupaten/Kota khususnya di wilayah kabupaten.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- a. Masih belum optimalnya komitmen operator atau pengusaha angkutan umum untuk melakukan pengurusan pengaktifan kembali KP
 - b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dan kenyamanan transportasi umum yang dapat memberikan dampak peralihan penggunaan angkutan pribadi ke Angkutan umum
 - c. Terjadinya penambahan penggunaan jumlah kendaraan pribadi di ruas jalan provinsi terutama pada saat hari libur dan liburan Panjang sehingga menyebabkan kemacetan
 - d. Belum optimalnya koordinasi yang baik antara Kepala Terminal dengan Kepala UPTD untuk penambahan dan perbaikan fasilitas Utama dan Penunjang di terminal di tahun 2021.
 - e. Perlunya dilakukan penyesuaian perijinan kembali dengan aturan terbaru menggunakan sistem (OSS) yang terintegrasi
 - f. Belum adanya pembangunan moda transportasi yang terpadu dan saling berhubungan antar wilayah
13. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- a. Berubahnya kewenangan koperasi provinsi dalam pengelolaan UMKM
 - b. banyak koperasi tidak melaksanakan RAT karena Pandemi Covid-19
 - c. Permasalahan Akses Internet dan masih banyak anggota koperasi yang tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi
 - d. Dampak pandemic menyebabkan volume usaha turun
 - e. Terbatasnya SDM pengelola koperasi terutama dari sisi kualitas
 - f. Terbatasnya sarana dan prasarana koperasi dalam menjalankan usaha
 - g. Terbatasnya inovasi Produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM yang belum dapat bersaing di pasar
 - h. Terbatasnya akses koperasi ke pasar dan permodalan
 - i. Sebaran UMKM yang cukup luas sehingga tidak keseluruhan terjangkau dan terpantau oleh Pemerintah
 - j. Belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha
 - k. SDM koperasi masih kurang memahami tentang kelengkapan kelembagaan koperasi
 - l. Kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri
 - m. Terbatasnya sertifikat halal dan merk yang bisa diberikan secara gratis
14. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
- a. Kurangnya sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
 - b. Kurangnya sarana Pengawasan terutama Armada kapal pengawas serta terbatasnya SDM yang melakukan pengawasan
 - c. Belum adanya penetapan dari Pemerintah Pusat terhadap 2 (dua) Kawasan
 - d. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan transplantasi terumbu Karang

- e. Sarana dan teknologi penangkapan yang terbatas
- f. Penurunan populasi sumberdaya ikan di laut dan perairan umum
- g. Kebijakan penangkapan ikan terukur sehingga produksi dibatasi
- h. Terbatasnya pelaksanaan monitoring dan pengujian sampel pada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota
- i. kondisi pandemi yg membuat pemasaran ikan jadi terkendala
- j. Masih terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas yang mendukung peningkatan produksi.
- k. Masih rendahnya konsumsi makan ikan dan belum meratanya distribusi ikan segar terutama pada kabupaten/kota non pesisir
- l. Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil
- m. Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema khususnya bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona pantai
- n. Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten
- o. Berkembangan sektor lain yang memanfaatkan zona penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya
- p. Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan karena kurang tertarik pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan
- q. Terbatasnya sarana pengawasan SDI dibandingkan dengan 51.060,23 km² perairan laut Sumatera Barat
- r. Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi
- s. Kurangnya motivasi dan transfer teknologi seperti nelayan tuna
- t. Masih tingginya praktek illegal fishing di wilayah ZEE luar Mentawai, yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak diambil langkah-langkah antisipasi dan solusi konkritnya
- u. Tidak adanya penerbangan langsung baik khusus kargo maupun passenger carrier yang dapat mengangkut cargo hasil perikanan telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas pengiriman maupun karena factor kualitas yang terdegradasi karena faktor waktu pengiriman. mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk Sumatera Barat di pasar internasional
- v. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan
- w. Masih belum optimalnya pengolah paska panen dan diversifikasi olahan

- x. Masih terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan

15. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- a. Masih terdapatnya daerah rawan pangan
- b. Pemberdayaan Kelompok Wanita tani (KWT) yang belum optimal
- c. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung Ketahanan pangan
- d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait diversifikasi pangan dan gizi
- e. Masih terbatas intervensi yang dilakukan pada daerah rentan rawan pangan
- f. Masih terbatasnya kegiatan penyaluran bantuan pangan untuk daerah rawan pangan difokuskan untuk mengatasi balita stunting, gizi buruk/gizi kurang, ibu hamil dan ibu menyusui
- g. Masih minimnya kegiatan pengawasan ke lapangan dikarenakan keterbatasan SDM

16. Urusan pemerintahan bidang Pertanian

- a. Belum optimalnya peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. Masih terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- c. Ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu. dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.
- d. Masih belum optimalnya proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.
- e. Pemanfaatan teknologi pertanian belum optimal
- f. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- g. Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum
- h. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang
- i. Jumlah Populasi Sapi bali yang tinggi sekitar 30% jika dibandingkan dengan populasi sapi di Sumbar)
- j. Adanya penyakit ternak menular yang menyebabkan berkurangnya produksi ternak
- k. Masih terbatasnya ketersediaan data terkait dengan keluar masuknya daging
- l. Pengelolaan ternak khususnya sapi lokal masih belum cukup memenuhi kebutuhan daging sapi yang tinggi
- m. Peternakan sapi lokal masih merupakan usaha sampingan masyarakat
- n. Belum adanya pelatihan Teknis untuk pemanfaatan saran dan prasarana peternakan
- o. Terbatasnya sarana pertanian pada tingkat penjual.
- p. Rendahnya alokasi pupuk bersubsidi sehingga terjadi kekurangan pupuk bersubsidi terutama pada akhir tahun

- q. Keterbatasan SDM petugas pengendali OPT.
- r. Kurangnya motivasi petani/pekebun untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan.
- s. Operasional Laboratorium lapangan pada tingkat POPT yang kurang memadai yaitu: bahan kimia, peralatan pengujian dan kalibrasi peralatan dan daya tahan tubuh bagi petugas.
- t. Terlambatnya laporan dari pengamatan serangan OPT dilapangan.
- u. Keterbatasan sarana berupa tempat untuk mengadakan diklat bagi petani yang lebih representatif.
- v. Kurangnya Prasarana Pelatihan seperti lokasi praktek lapangan
- w. Pengalihan prioritas anggaran ke program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

17. Urusan pemerintahan bidang Kehutanan

- a. masyarakat sekitar hutan yang tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan
- b. rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan
- c. masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan
- d. masih rendahnya SDM masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan.
- e. alih fungsi menjadi perladangan dan perkebunan dengan penerapan sistem yang kurang konservatif
- f. Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- g. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization),
- h. Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat
- i. Pengelolaan DAS belum terpadu
- j. Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- k. Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan local

18. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Masih adanya Lokasi Rumah Tangga yang terisolir yang sulit diakses dan belum teraliri listrik
- b. Masih adanya Rumah Tangga Miskin Penerima bantuan pemasangan instalasi listrik yang belum masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu)
- c. Pebiayaan Investasi untuk pemanfaatan EBT yang cukup besar
- d. Terbitnya UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sehingga kewenangan provinsi tidak ada (Tahun 2021-2022)

- e. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- f. Belum memadainya akses infrastruktur kelistrikan di sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan
- g. Terbatasnya pendanaan/investasi baik dari Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan potensi energi baru terbarukan
- h. Masih rendahnya Ratio Elektrifikasi pada beberapa daerah (khususnya Kep.Mentawai)
- i. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral
- j. Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral
- k. Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat
- l. Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar
- m. Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat sehingga terjadi Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan
- n. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi air tanah

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II sebanyak 289 indikator dari sebelumnya pada Edisi I mencakup 319 indikator atas 17 tujuan dan 169 target TPB/SDGs Indonesia. Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan menjadi rujukan penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs periode 2020-2024 serta Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II dikelompokkan dalam 4 (empat) dokumen yang tidak terpisahkan, yaitu: (1) dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16).

Dengan memperhatikan pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 sebagaimana telah disajikan pada Bab II, maka ditentukan target dan arah kebijakan pencapaian TPB untuk periode pembangunan 5 tahun berikutnya, sesuai dengan sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Rencana program perangkat daerah pada RPJMD secara operasional dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada kedua dokumen perencanaan ini menjadi pedoman dalam penyusunan RAD TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra PD Tahun 2021-2026. Penetapan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, menjadi pedoman bagi pembangunan jangka menengah di Provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah memiliki keselarasan, sehingga visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian

rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Dalam mencapai visi RPJMD, ditetapkan 7 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing

Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional.

Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkeaktivitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi.

Selain pendidikan berkualitas, misi pertama yang ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna, sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalnya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Falsafah budaya Minangkabau dalam *AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal.

Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan bahwa : a) sektor ini berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), b) Potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan.

Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya lokal.

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.

Misi keempat ini bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk lima tahun mendatang disamping pertanian. Dalam konteks inilah kita akan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Lima tahun ini kita melihat dan merasakan kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, untuk itu kita harus memperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenities di Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek *non-fisik* (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

Penyediaan infrastruktur tersebut seperti sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur juga wajib memperhatikan penataan ruang, lingkungan dan *green energy* agar tercipta Sumatera Barat yang bersih, tertib dan teratur.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan ini akan bermanfaat optimal dan berkelanjutan jika di tengah potensi bencana alam geologis dan hidrometeorologis yang besar, dapat diantisipasi risikonya melalui usaha PRB (Pengurangan Risiko Bencana). Usaha PRB ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Karena itu penting sekali untuk dibangun Sumatera Barat yang tangguh bencana melalui kota/kabupaten serta desa/nagari tangguh bencana.

7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat dengan maksud untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (eGovernment), namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, sudah saatnya pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan eGovernment yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya. Selama ini pemanfaatan eGovernment oleh SKPD yang ada belum sampai pada tahapan ini. Walaupun sudah diterbitkan Perda No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta didukung oleh Perda No.10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, implementasi kedua Perda ini perlu mendapat perhatian SKPD yang ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga akan mengupayakan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia ASN yang dapat memahami, melaksanakan dan mengembangkan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Sumatera Barat yang terus berubah.

Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandaskan dalam prinsip *good and clean government*. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya, upaya pencapaian misi ini adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur.

Begitu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkualitas ini harus dimulai dengan mengintegrasikan semua program dan kegiatan ke dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi ke dalam sistem yang berbasis pada SPBE. Karena bagaimana pun, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Hal lain yang penting adalah bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengawasi bagaimana pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sehingga ada sinergitas dalam rangka memperbaiki kelemahan dalam upaya melaksanakan misi ini.

Di samping itu, ke depannya tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil atau *outcome*. Bahkan dalam perkembangannya, pemerintah daerah juga harus bisa mengembangkan orientasi kinerja ini pada manfaat dan dampak kepada kualitas hidup yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi proses perencanaan berbasis program yang mendukung pencapaian visi dan misi serta program untuk menyediakan standar pelayanan minimum yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Strategi umum yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan oleh 7 (tujuh) misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.
2. Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang melibatkan semua komponen masyarakat baik di daerah maupun di rantau dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.
4. Menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya baik di bidang infrastruktur maupun di bidang sosial dan ekonomi.
5. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat 4 (empat) Tema Program Unggulan yang dijabarkan pada 25 (dua puluh lima) Program Unggulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yakni :

A. Sumatera Barat Sehat dan Cerdas, dengan program unggulan yakni :

1. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19
2. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru.
3. Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga & pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru
4. Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
5. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen.
6. Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses Pendidikan.
7. Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.
8. Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan

B. Sumatera Barat Religius Dan Berbudaya, dengan program unggulan yakni :

1. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan wisata religi
2. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan
3. Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (education tourism)
4. Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan

C. Sumatera Barat Sejahtera

1. Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian
2. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak
3. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
4. Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif
5. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula

6. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
7. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan
8. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional

D. Sumatera Barat Berkeadilan

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
2. Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang
3. Mengembangkan Kota dan Kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas
4. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
5. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (*e-government*).

Target indikator TPB untuk mendukung pelaksanaan setiap TPB disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan didukung oleh RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat. Tahun perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2022 sampai dengan 2026. Penyusunan RAD TPB juga mendapat dukungan program dan kegiatan dari nonpemerintah (*non stateactor*), baik lembaga kemasyarakatan, filantropi, academia, maupun perusahaan.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota yang digunakan dalam mendukung pencapaian target TPB Provinsi Sumatera Barat, meliputi:

1. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 - 2022 dan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 - 2026
2. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026
3. RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026
4. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 - 2026
5. RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 - 2026
6. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026
7. RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026

8. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026
9. RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021 - 2026
10. RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026
11. RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026
12. RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026
13. RPJMD Kota Padang Tahun 2019 - 2024
14. RPJMD Kota Solok Tahun 2021 - 2026
15. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 dan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 - 2026
16. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026
17. RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026
18. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026
19. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018 - 2023 dan RPD Kota Pariaman Tahun 2024 - 2026

Rencana aksi ini disusun sesuai kewenangan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Terdapat sebagian indikator TPB yang merupakan kewenangan atau dilaksanakan untuk pemerintah pusat, sehingga tidak diisi target indikatornya oleh pemerintah daerah. Indikator TPB lainnya yang tidak diisi disebabkan tidak direncanakan targetnya serta tidak selaras dengan target indikator kinerja pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Indikator TPB Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan 2026 sebanyak 165 Indikator TPB yang selaras dengan 621 Indikator Kinerja yang terdapat pada RPJMD yang terdiri dari 13 Indikator Kinerja Makro, 76 Indikator Kinerja Utama, 215 Indikator Kinerja Daerah, 173 Indikator Program dan 144 Indikator Kinerja Program Unggulan, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Jumlah Indikator TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026

Tujuan	Indikator SDGs			Jumlah Indikator RPJMD yang selaras dengan SDGs					
	Jumlah Indikator	Yang selaras dengan RPJMD	Tidak selaras / Tidak tersedia	Indikator Makro	IKU	IKD	Indikator Program	Indikator Progul	Jumlah
Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	15	12	3	6	18	42	23	38	127
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	16	11	5	0	16	12	5	36	69
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	33	22	11	0	1	23	31	3	58
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	17	7	10	0	4	9	6	27	46
Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14	7	7	0	0	12	6	0	18
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	15	9	6	0	4	10	8	4	26
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	9	4	5	0	0	5	4	0	9
Tujuan 8: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	23	11	12	4	4	7	4	12	31
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	19	6	13	0	4	4	2	8	18
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	25	8	17	2	0	5	2	0	9
Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	29	11	18	1	7	18	6	3	35

Tujuan	Indikator SDGs			Jumlah Indikator RPJMD yang selaras dengan SDGs					
	Jumlah Indikator	Yang selaras dengan RPJMD	Tidak selaras / Tidak tersedia	Indikator Makro	IKU	IKD	Indikator Program	Indikator Progul	Jumlah
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	20	7	13	0	1	10	14	9	34
Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	9	3	6	0	0	5	3	1	9
Tujuan 14 Ekosistem Lautan	12	5	7	0	0	3	15	0	18
Tujuan 15 Ekosistem Daratan	12	7	5	0	0	5	6	0	11
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	50	27	23	0	14	32	30	5	81
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	30	8	22	0	3	13	8	0	24
Total	348	165	183	13	76	215	173	144	621

Adapun arah kebijakan dan target indikator sebagai rencana aksi pencapaian TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang disajikan berdasarkan TPB diuraikan sebagai berikut :



3.1 Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Upaya untuk mencapai **Tujuan 1 TPB/SDGs, yakni Tanpa Kemiskinan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan, dengan Arah kebijakan:
 - a) Meningkatkan penyediaan dan benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani
 - b) Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
 - c) Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
 - d) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian
 - e) Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - f) Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
 - g) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani dan petugas
 - h) Pengawasan pupuk bersubsidi
 - i) Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura
 - j) meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada
 - k) Rehabilitasi lahan dan air
 - l) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani
 - m) Meningkatkan produksi padi dan jagung serta beberapa komunitas ternak
 - n) Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan

2. Strategi Mengembangkan Usaha - Usaha Ekonomi Berbasis kelautan dan Perikanan, dengan Arah Kebijakan Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan.
3. Strategi Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau.
 - b) Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis
4. Strategi Peningkatan daya saing produk IKM, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan produk
 - b) Peningkatan kualitas, kontinuitas produksi, dan sertifikasi produk
 - c) Peningkatan promosi dan pemasaran produk
 - d) Peningkatan kapasitas pelaku IKM
5. Strategi Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan sarana dan prasarana untuk sentra IKM
 - b) Peningkatan Kerjasama pengembangan sentra IKM
 - c) Pendampingan dan fasilitasi sentra IKM
6. Strategi Peningkatan kapasitas UMKM dan wirausaha, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
 - b) Fasilitasi penumbuhan *millenial enterpreuner* dan *Women enterpreuner*
 - c) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan usaha, promosi dan pemasaran produk UMKM
 - d) Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk UMKM
 - e) Pengembangan usaha dan diversifikasi produk UMKM
 - f) Peningkatan Kemitraan UMKM dengan pengusaha besar
 - g) Fasilitasi penerbitan sertifikat hak paten terhadap produk UMKM
 - h) Fasilitasi pelatihan berkelanjutan
7. Strategi dan arah kebijakan Urusan Sosial, antara lain yakni :
 - a) Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di dalam panti.
 - b) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar PMKS Lainnya di dalam panti.
 - c) Terpenuhinya peningkatan kapasitas SDM penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar PMKS lainnya di dalam panti.

- d) Meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - e) Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersertifikasi.
 - f) Memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak.
 - g) Termutakhirkannya data fakir miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - h) Meningkatnya persediaan Permakanan (Bantuan Logistik) Korban Bencana.
 - i) Penanganan masalah sosial dari berbagai sumber pendanaan secara terpadu
 - j) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi
 - k) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - l) Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dalam panti
 - m) Peningkatan layanan rehabilitasi social untuk PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
 - n) Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan
 - o) Penguatan Skema Penanggulangan Bencana
8. Strategi dan arah kebijakan urusan Kesehatan, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
 - b) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas
 - c) Meningkatkan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
 - d) Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata
 - e) Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
 - f) Meningkatkan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui
 - g) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan pembiayaan promotif dan preventif untuk layanan kesehatan
 - h) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
 - i) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa
 - j) Meningkatkan keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin / kurang mampu
 - k) Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan non penerima bantuan iuran
 - l) Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pelayanan publik berbasis teknologi informasi
 - m) Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik
 - n) Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik

9. Strategi dan arah kebijakan urusan Tenaga Kerja, antara lain yakni :
- a) Meningkatnya Kualitas Pencari Kerja melalui Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing melalui pelatihan vokasi, penguatan BLK dan peningkatan lembaga produktivitas
 - b) Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan
 - c) Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
 - d) Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
10. Strategi dan arah kebijakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pertanahan, antara lain yakni :
- a) Mengurangi luasan kawasan kumuh.
 - b) Meningkatkan kualitas PSU permukiman.
 - c) Meningkatnya rumah layak huni
 - d) Meningkatnya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi dan korban bencana provinsi.
 - e) Menyusun database kawasan permukiman kumuh.
 - f) Menyusun database rumah tidak layak huni
 - g) Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah.
 - h) Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, seimbang dan terpadu.
 - i) Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
 - j) Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - k) Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan
 - l) Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat
 - m) Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi
11. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
- a) Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan
 - c) Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan
 - d) Penanggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak
 - e) Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan
 - f) Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan
 - g) Mengendalikan mutu lokasi konservasi / pemeliharaan

- h) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - i) Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
12. Strategi dan arah kebijakan urusan Pekerjaan Umum, antara lain yakni :
- a) Pengurangan jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir
 - b) Meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan
 - c) Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan
 - d) Meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi
 - e) Meningkatkan RTR yang berkekuatan hukum
 - f) Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR
13. Strategi dan arah kebijakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan Ketersediaan infrastruktur pemanfaatan energi terbarukan
 - b) Meningkatkan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi
 - c) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan
 - d) Meningkatkan tata kelola ketenagalistrikan yang aman andal dan akrab lingkungan
 - e) Meningkatkan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat
 - f) Meningkatkan pengawasan pemakaian air tanah pada Zona Konservasi
 - g) Meningkatkan pengembangan dan pengusahaan energi terbarukan
 - h) Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi terutama di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan
 - i) Meningkatkan penatausahaan izin sektor energi terbarukan
 - j) Meningkatkan pelaksanaan konservasi energi
 - k) Meningkatkan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - l) Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu
 - m) Meningkatkan pengembangan dan pengusahaan ketenagalistrikan
 - n) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan ketenagalistrikan
 - o) Meningkatkan penatausahaan izin ketenagalistrikan
 - p) Meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat
 - q) Meningkatkan penatausahaan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat

- r) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek konservasi pemanfaatan air tanah

14. Strategi dan arah kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain yakni :

- a) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagai acuan bagi Pemda, dan Organisasi dalam pelaksanaan strategi PUG
- b) Meningkatkan pelatihan dan keterampilan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan
- c) Meningkatkan kapasitas SDM perempuan bidang Politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- d) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
- e) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan perempuan.
- f) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan.
- g) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan
- h) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat kualitas keluarga pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga
- i) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan kualitas keluarga di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
- j) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga.
- k) Meningkatkan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- l) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak
- m) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- n) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap korban kekerasan.
- o) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap anak.
- p) Melakukan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan pembentukan dan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

- q) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan khusus anak
 - r) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan perlindungan khusus anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
 - s) Melakukan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
 - t) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.
15. Strategi dan arah kebijakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Bidang Kebencanaan, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam mitigasi bencana
 - b) Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana
 - c) Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana
 - d) Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana
 - e) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi bencana
 - f) Pengembangan nagari dan desa siaga bencana
 - g) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat
 - h) Penyediaan dan perluasan informasi kebencanaan
 - i) Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana
 - j) Pembangunan infrastruktur kebencanaan
 - k) Penanganan bencana banjir, longsor, gempa bumi yang berefek pada infrastruktur jalan
 - l) Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
 - m) Pemulihan daerah pasca bencana
16. Strategi dan arah kebijakan urusan Pendidikan, antara lain yakni :
- a) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - b) Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan
 - c) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
 - d) Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal
 - e) Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan
 - f) Melaksanakan pembinaan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat

- g) Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK
- h) Melaksanakan penambahan ruang kelas baru SMA dan SMK
- i) Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA, dan SMK
- j) Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus
- k) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah SMA dan SMK
- l) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah pendidikan khusus (SLB)

Tabel 3.2
Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.										
1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim.										
	RPJMD - Tingkat Kemiskinan (%)	Indikator Makro	%	6,4	6,28	6,16	6,03	5,9	5,77	
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	358,76	356,45	353,68	350,62	347,27	343,62	
1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	358,76	356,45	353,68	350,62	347,27	343,62	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.										
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	21,45	18,44	15,43	14	12,5	10,6	
	RPJMD - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	IKD	%	52,87	53,8	54,72	55,65	56,57	57,5	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	70	75	80	85	90	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	Dinas Pendidikan
	RPJMD - APK SLB	Indikator Program	%	52,87	53,8	54,72	55,65	56,57	57,5	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	34,4	35	37	38	39	40	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Jumlah Anak yang difasilitasi perlindungan sosial (dalam pengangkatan anak)	Indikator Program	orang	25	25	25	25	25	25	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Atas (SMA)	Indikator Progul	persen	20	20	20	20	20	20	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Indikator Progul	persen	20	20	20	20	20	20	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3	Indikator Progul	orang	401	401	401	401	401	401	Dinas Pendidikan
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.										
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,48	86,1	88,2	90,3	92,4	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	34,4	35	37	38	39	40	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.										
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	37,61	41,95	46,29	50,63	59,31	61,92	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	10,69	11,26	11,83	12,41	12,98	13,56	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1* Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.										
	RPJMD - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Makro	IPM	72,56	72,74	73,23	73,7	74,16	74,6	
	RPJMD - b.Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57	
	RPJMD - c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	69,62	69,80	69,98	70,17	70,35	70,53	
	RPJMD - Indeks Pembangunan manusia (IPM)	IKU	Nilai	72,56	72,74	73,23	73,7	74,16	74,6	
	RPJMD - Angka Harapan Hidup (AHH)	IKU	Tahun	69,62	69,8	69,98	70,17	70,35	70,53	
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57	
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	80,04	82	84	86	88	90	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	81	82	84	86	88	90	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	IKD	%	97,4	97,8	98,2	98,5	98,7	100	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	77,3	78,5	80	82	84	86	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	83	86	89	92	95	100	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	70	75	80	85	90	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	73,92	75	77	79	81	82	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	15	17	19	21	23	25	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	54	56	58	60	62	64	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	Dinas Perhubungan
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	99,91	100	100	100	100	100	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	68,7	73,7	79,9	87	95	100	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	73,92	75	77	79	81	82	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD – Rasio Elektrifikasi	Indikator Program	%	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	236	236	236	236	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	236	236	236	236	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	111	111	111	111	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	111	111	111	111	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	55	111	111	111	111	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	15	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Terminal Provinsi yang tersedia > Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	-	-	1	2	3	5	Dinas Perhubungan
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	lokasi	10	12	15	16	18	19	Dinas Pariwisata
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	lokasi	10	12	15	16	18	19	Dinas Pariwisata
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	lokasi	-	-	19	19	19	19	Dinas Pariwisata
1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.										
	RPJMD - Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
	RPJMD - Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	Indikator Program	%	75	80	85	90	95	95	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)									
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	50	53	56	59	62	65	Satuan Polisi Pamong Praja
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	Indikator Program	%	0	3	3	3	3	3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1.5.2* Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.										
1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030										
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana										
	RPJMD - Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	IKU	Indeks	0,48	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase penanganan pra bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	70	71	72	73	74	75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	3	10	10	10	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa	2	10	10	10	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.										
1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.										
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	100,79	100,99	100,19	101,4	101,6	101,8	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,95	103,47	103,98	104,5	105,03	105,55	
	RPJMD - Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	IKU	Rp. Juta	45592	47872	50265	52779	55418	58199	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	358	368	379	390	401	413	
	RPJMD - Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	IKU	%	1,94	2,14	2,18	2,23	2,28	2,33	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	1,7	2,4	3,1	3,8	4,5	5,2	
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	97633	14961	17888	20176	23053	23992	
	RPJMD - Kontribusi Ekonomi Digital (%)	IKU	%	6,44	6,54	6,7	7,1	7,25	7,65	
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	43,47	8,6	10,43	13,04	14,78	9,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	0,6	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	RPJMD - Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	IKD	BUMD	41	51	61	71	81	91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	RPJMD - Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	IKD	Nagari/Desa	381	410	450	500	550	600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	RPJMD - Persentase Koperasi yang berkualitas	IKD	%	16,43	17,94	20,49	24,39	29,21	35,01	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	1,9	2	3	3,7	4,2	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	RPJMD - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	IKD	%	20	20	20	20	20	20	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	20	40	60	80	100	120	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	39403	41373	43263	45363	47673	50193	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	RPJMD - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Indikator Program	hektar	50000	50000	50000	50000	50000	50000	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Indikator Program	Sentra	15	20	20	25	25	30	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	39403	41373	43263	45363	47673	50193	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas	Indikator Progul	>= persen	10	10	10	10	10	10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD									
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang	170	470	528	528	528	528	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang	2105	5872	6742	6797	6852	6907	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	Indikator Progul	orang	500	1500	2000	2000	2000	2000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang	300	300	300	300	300	300	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang	4.532	4.759	4.997	5.246	5.509	5.784	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang	113	500	500	500	500	500	Dinas Kehutanan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	-	1.636	1.855	2.000	2.200	2.300	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang	412	412	412	412	412	412	Dinas Sosial
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang	200	200	240	280	320	360	Dinas Kebudayaan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang	150	350	400	450	500	550	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang	765	675	700	725	750	775	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang	-	200	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang	266	112	112	112	112	112	Dinas Pangan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang	266	112	112	112	112	112	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Progul - Persentase peningkatan usaha pasca panen pengolahan hasil > Luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat (Ha)	Indikator Progul	Ha	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinas Kehutanan
1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.										
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.										
1.b.1 Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.										



Tujuan 2: TANPA KELAPARAN

3.2 Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Upaya untuk mencapai **Tujuan 2 TPB/SDGs, yakni Tanpa Kelaparan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok, dengan Arah Kebijakan:
 - a) Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau.
 - b) Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis
2. Strategi Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan Arah kebijakan Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat.
3. Strategi Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan
 - b) Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal
4. Strategi Pemberdayaan daerah rentan pangan, dengan Arah Kebijakan Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan.
5. Strategi Peningkatan keamanan pangan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;
 - b) Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen
 - c) Pengawasan peredaran sarana pertanian
 - d) Pengendalian kesehatan dan keamanan produk hewan
 - e) Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan
6. Strategi dan arah kebijakan umum urusan Pangan, antara lain yakni :

- a) Revitalisasi dan penyediaan RMU mobile
 - b) Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
 - c) Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal
 - d) Pemberdayaan daerah rentan pangan
 - e) Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan
 - f) Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan
 - g) Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal
 - h) Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen
 - i) Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis
 - j) Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok
 - k) Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen
 - l) Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau
7. Strategi dan arah kebijakan umum urusan Kesehatan, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan
 - b) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas
 - c) Meningkatkan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
 - d) Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata
 - e) Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
 - f) Meningkatkan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui
 - g) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan pembiayaan promotif dan preventif untuk layanan kesehatan
 - h) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
 - i) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa
 - j) Meningkatkan keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin / kurang mampu
 - k) Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan non penerima bantuan iuran
 - l) Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik
 - m) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
 - n) Peningkatan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan

- o) Peningkatan perbaikan gizi masyarakat
 - p) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari kehidupan manusia
 - q) Peningkatan layanan kesehatan dengan lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif dibandingkan dengan upaya kuratif
 - r) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan
 - s) Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dengan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat
 - t) Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan
 - u) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV dan Tuberkulosis
 - v) Peningkatan upaya Pendeteksian dini penyakit tidak menular
 - w) Peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap kejadian luar biasa dan tanggapdarurat bencana
 - x) Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan
 - y) Menurunkan ketidaktepatan sasaran pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
 - z) Peningkatan kepesertaan mandiri dan pekerja melalui Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat program JKN
8. Strategi dan arah kebijakan umum urusan Kelautan dan Perikanan, antara lain yakni :
- a) Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan
 - b) Mengembangkan Usaha - Usaha Ekonomi Berbasis kelautan dan Perikanan
 - c) Meningkatkan akses permodalan
 - d) Pengembangan system value chain
 - e) Peningkatan Pelestarian dan pengelolaan lingkungan
 - f) Meningkatkan pemakaian benih bermutu
 - g) Meningkatkan akses permodalan
 - h) Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan melalui 1000 rumpon dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan
 - i) Pengembangan budidaya perikanan payau (udang vanamae) dan komoditas perikanan lainnya
 - j) Peningkatan pengawasan Agro input
 - k) Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas perikanan
 - l) Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian ,perkebunan dan Perikanan
 - m) Peningkatan peranserta masyarakat dalam pelestarian lingkungan

- n) Rehabilitasi Hutan dan lahan
 - o) Pengembangan ekosistem esensial dan kawasan konservasi
 - p) Peningkatan upaya Adaptasi mitigasi perubahan iklim
9. Strategi dan arah kebijakan urusan pertanian sub bidang Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, antara lain yakni :
- a) Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah yang baik
 - c) Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani
 - d) Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
 - e) Optimalisasi pemanfaatan lahan serta rehabilitasi jaringan irigasi
 - f) Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 168
 - g) Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada
 - h) Meningkatkan Kapasitas dan pemberdayaan SDM Petugas serta Petani
 - i) Pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi
 - j) Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani
 - k) Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura
 - l) Pengembangan pertanian organik dan berwawasan lingkungan
 - m) Mendorong pengelolaan dan pembentukan BUMD profesional bidang Pertanian
 - n) Meningkatkan penyediaan dan benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani
 - o) Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
 - p) Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
 - q) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian/ peternakan
 - r) Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - s) Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
 - t) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani dan petugas
10. Strategi dan arah kebijakan urusan pertanian sub bidang Peternakan, antara lain yakni :
- a) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor, peternakan
 - b) Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna
 - c) Pengembangan *system value chain*
 - d) Fasilitasi pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan

- e) Mempertahankan status daerah bebas Hog Cholera dan Bru cellosis
- f) Menurunkan kasus Penyakit Hewat Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)
- g) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
- h) Peningkatan nilai tambah produksi hasil peternakan
- i) Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk peternakan
- j) Mendorong tumbuh petani milenial
- k) Penerapan Inovasi dan Teknologi Pertanian
- l) Meningkatkan akses permodalan
- m) Peningkatan kapasitas kelembagaan tani
- n) Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas peternakan
- o) Meminimalisir resiko kerugian usaha tani
- p) Pengintegrasian program pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lingkungan hidup
- q) Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan dan peternakan
- r) Penguatan otoritas veteriner di daerah (Provinsi, Kab/ Kota dan Puskesmas)
- s) Meningkatkan surveilans dan Monitoring Penyakit Hewan
- t) Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular
- u) Mengembangkan jejaring dan sistem informasi kesehatan hewan (Sikhnas)
- v) Penguatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
- w) Meningkatkan Pengawasan Peredaran Obat Hewan, Sarana, dan Bahan Medik
- x) Meningkatkan Pelayanan kesehatan hewan di Unit-Unit Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet
- y) Membangun sistem kompetensi profesi medik dan paramedik veteriner
- z) Meningkatkan Kesiagaan Darurat Penyakit Eksotik melalui program kesiagaan darurat veteriner Indonesia (KIATVETINDO)
- aa) Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan biosekuriti
- bb) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular

11. Strategi dan arah kebijakan urusan Kehutanan, antara lain yakni :

- a) Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN dan HKm
- b) Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan
- c) Percepatan Proses Pemantapan Kawasan Hutan
- d) Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

- e) Penyediaan bibit berkualitas dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan
- f) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- g) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- h) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- i) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- j) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan
- k) Pengelolaan Hutan (KPH)
- l) Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
- m) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
- n) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- o) Perbenihan Tanaman Hutan
- p) Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Tabel 3.3
Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).										
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	21,45	18,44	15,43	14	12,5	10,6	
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	78,64	79,13	80,21	81,6	82,05	83,22	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	86	92	94	96	98	100	Dinas Pangan
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	820798	833.110	845.607	858.291	871.165	884.233	Dinas Pangan
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	82	82,5	83	84	84,5	85	Dinas Pangan
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	21	22	24	27	28	30	Dinas Pangan
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton	1.346.063	1.542.909	1.573.767	1.605.243	1.637.347	1.670.094	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton	921.514	978.062	1.012.295	1.048.737	1.088.589	1.131.044	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	650.000	750.000	850.000	1.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	5.000	7.000	9.000	10.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton	1.346.063	1.542.909	1.573.767	1.605.243	1.637.347	1.670.094	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton	921.514	978.062	1.012.295	1.048.737	1.088.589	1.131.044	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	650.000	750.000	850.000	1.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	5.000	7.000	9.000	10.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.										
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	78,64	79,13	80,21	81,6	82,05	83,22	
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	86	92	94	96	98	100	Dinas Pangan
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	820798	833.110	845.607	858.291	871.165	884.233	Dinas Pangan
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	82	82,5	83	84	84,5	85	Dinas Pangan
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	21	22	24	27	28	30	Dinas Pangan
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.										
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	21,45	18,44	15,43	14	12,5	10,6	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.										
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	21,45	18,44	15,43	14	12,5	10,6	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).										
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	78,64	79,13	80,21	81,6	82,05	83,22	
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	820798	833.110	845.607	858.291	871.165	884.233	Dinas Pangan
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	82	82,5	83	84	84,5	85	Dinas Pangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	Indikator Program	%	82	82,5	83	84	84,5	85	Dinas Pangan
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	21	22	24	27	28	30	Dinas Pangan
	RPJMD - Tingkat konsumsi ikan	Indikator Program	Kg/kap/th	39,27	40	40,5	41,6	42,4	43,5	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2.2.3* Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.										
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.										
2.3.1* Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan										
2.3.1 (a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan										
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	100,79	100,99	100,19	101,4	101,6	101,8	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,95	103,47	103,98	104,5	105,03	105,55	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
2.3.2* Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.										
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	100,79	100,99	100,19	101,4	101,6	101,8	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,95	103,47	103,98	104,5	105,03	105,55	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan Yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.										
02.04.01 Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
2.4.1(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.										
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.										
2.5.1* Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.										
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa Sawit yang diadakan	Indikator Progul	batang	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kakao yang diadakan	Indikator Progul	batang	33.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kopi yang diadakan	Indikator Progul	batang	473.000	300.000	400.000	400.000	300.000	300.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Karet yang diadakan	Indikator Progul	batang	23.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa yang diadakan	Indikator Progul	batang	2.100	200.000	400.000	400.000	100.000	100.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan,	Indikator Progul	batang	-	37.500	231.250	231.250	100.000	100.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Gambir yang diadakan									
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Padi yang diadakan	Indikator Progul	ton	5,15	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jagung yang diadakan	Indikator Progul	ton	6,18	120	120	120	120	120	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cabe yang diadakan	Indikator Progul	gram	3.450	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Bawang Merah yang diadakan	Indikator Progul	kg	28.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Manggis yang diadakan	Indikator Progul	batang	36.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jeruk yang diadakan	Indikator Progul	batang	17.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Alpukat yang diadakan	Indikator Progul	batang	10.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Pala yang diadakan	Indikator Progul	batang	7.155	15.000	20.000	25.000	30.000	30.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kayu Manis yang diadakan	Indikator Progul	batang	-	44.500	55.000	55.000	60.000	60.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cengkeh yang diadakan	Indikator Progul	batang	86.400	30.480	50.000	60.000	65.000	65.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Tembakau yang diadakan	Indikator Progul	batang	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jahe yang diadakan	Indikator Progul	kg	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura >	Indikator Progul	kg	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah benih/bibit Kunyit yang diadakan									
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Lengkuas/Laos yang diadakan	Indikator Progul	kg	-	-?	2.000	2.000	2.000	2.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Urusan Kelautan dan Perikanan > Bibit rumput laut	Indikator Progul	kg	-	1.500	1.800	2.000	2.300	2.500	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	650.000	750.000	850.000	1.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	5.000	7.000	9.000	10.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	650.000	750.000	850.000	1.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	5.000	7.000	9.000	10.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
2.5.2* Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.										
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.										
2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.										
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga,	Indikator Progul	>= persen	10	10	10	10	10	10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD									
2.a.2* Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.										
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen	10	10	10	10	10	10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.										
2.b.1* Subsidi ekspor pertanian.										
2.c Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.										
2.c.1* Indikator anomali harga pangan.										

Tujuan 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.3 Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Upaya untuk mencapai **Tujuan 3 TPB/SDGs, yakni Kehidupan Sehat dan Sejahtera**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sectoral sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian covid-19, dengan Arah Kebijakan Meningkatkan kemampuan SDM dan fasilitas dan laboratorium kesehatan dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19.
2. Strategi Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat, dengan Arah Kebijakan:
 - a) Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas layanan kesehatan
 - b) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan
 - c) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir, termasuk imunisasi
 - d) Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)
 - e) Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
 - f) Peningkatan cakupan ASI eksklusif
 - g) Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil
 - h) Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting
 - i) Penguatan sistem surveilans gizi
 - j) Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus
 - k) Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 - l) Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan termasuk laboratorium kesehatan
 - m) Penguatan kemampuan RS Khusus
 - n) Penguatan pelayanan kesehatan primer

- o) Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM
 - p) Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat
 - q) Peningkatan akses air bersih dan perilaku higienis
 - r) Peningkatan pelayanan dasar anak terlantar, disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar di dalam panti
 - s) Penguatan sistem laboratorium kesehatan daerah
 - t) Penguatan *reporting* dan *real time surveillance* untuk penyakit berpotensi wabah dan penyakit baru muncul (*new emerging diseases*)
 - u) Membangun sistem kewaspadaan dini.
 - v) Meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan untuk respon cepat
 - w) Revitalisasi peralatan kesehatan rumah sakit milik provinsi
 - x) Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru
3. Strategi Peningkatan kapasitas SDM kesehatan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan provinsi
 - b) Pengembangan Mutu dan kompetensi teknis sumberdaya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi
 4. Strategi Penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dengan arah kebijakan:
 - a) Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan,
 - b) Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan penggunaan obat rasional.
 - c) Memastikan ketersediaan alat kesehatan dan makanan minum
 5. Strategi Menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Mendorong kegiatan Germas, kampanye makan ikan, makan buah dan sayur, serta kampanye diet seimbang (isi piringku).
 - b) Meningkatkan metode/cara promosi kesehatan, melalui TV *spot*, *leaflets*, *booklet*, media sosial, dan sebagainya
 - c) Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, UKS dan lingkungan kerja sehat.
 - d) Promosi pembudayaan hidup sehat
 - e) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen APBD, khususnya terkait Upaya Kesehatan Masyarakat
 - f) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan aktifitas kebugaran
 6. Strategi Pemenuhan Standar pelayanan minimal bidang kesehatan, dengan Arah Kebijakan :

- a) Memprioritaskan Pemenuhan SPM bidang kesehatan
 - b) Optimalisasi layanan kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit Khusus Pemprov
7. Strategi dan arah kebijakan umum urusan Kesehatan, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
 - b) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas
 - c) Meningkatkan Rumah Sakit daerah yang terakreditasi
 - d) Meningkatkan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
 - e) Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata
 - f) Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
 - g) Meningkatkan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui
 - h) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan pembiayaan promotif dan preventif untuk layanan kesehatan
 - i) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
 - j) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa
 - k) Meningkatkan keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin / kurang mampu
 - l) Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan non penerima bantuan iuran
 - m) Peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya kesehatan yang memiliki kompetensi dan terstandarisasi
 - n) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemeratan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
 - o) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
 - p) Peningkatan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
 - q) Peningkatan perbaikan gizi masyarakat
 - r) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari kehidupan manusia
 - s) Peningkatan layanan kesehatan dengan lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif dibandingkan dengan upaya kuratif
 - t) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan
 - u) Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dengan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat
 - v) Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan
 - w) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV dan Tuberkulosis

- x) Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi gangguan kesehatan kejiwaan
 - y) Peningkatan upaya Pendeteksian dini penyakit tidak menular
 - z) Peningkatan sistim kewaspadaan dini dan respon terhadap kejadian luar biasa dan tanggapdarurat bencana
 - aa) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat program JKN
8. Strategi dan arah kebijakan urusan Perhubungan, antara lain yakni :
- a) Mengintegrasikan sistem transportasi antar intermodal
 - b) Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik
 - c) Pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah – daerah terpencil
 - d) Dukungan akses transportasi ke sentra produksi pertanian dan perikanan
 - e) Dukungan keterpaduan transportasi antar moda (bandara, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun Kereta Api)
 - f) Penataan sistem perijinan transportasi
 - g) Perbaikan sarana dan prasarana terminal Tipe B
 - h) Pengembangan jaringan pelayanan angkutan
9. Strategi dan arah kebijakan urusan Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :
- a) Peningkatan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
 - b) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kualitas hidup keluarga, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak diberbagai bidang pembangunan
 - c) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan organisasi dalam pelaksanaan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
 - d) Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan
 - e) Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak

- f) Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
- g) Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak
- h) Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring.
- i) Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
- j) Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Tabel 3.4
Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	77,3	78,5	80	82	84	86	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	73,8	74,8	76	78	80	82	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	78,6	79,6	81	83	85	87	Dinas Kesehatan
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	77,3	78,5	80	82	84	86	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	73,8	74,8	76	78	80	82	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	78,6	79,6	81	83	85	87	Dinas Kesehatan
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.										
3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	77,3	78,5	80	82	84	86	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	70	75	80	85	90	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	73,8	74,8	76	78	80	82	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	78,6	79,6	81	83	85	87	Dinas Kesehatan
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	77,3	78,5	80	82	84	86	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	73,8	74,8	76	78	80	82	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	78,6	79,6	81	83	85	87	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.										
3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.										
	RPJMD - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	252	231	211	190	190	190	Dinas Kesehatan
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.										
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupat en/kota	17	17	18	18	18	19	Dinas Kesehatan
3.3.3.[a] Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.										
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupat en/kota	17	17	18	18	18	19	Dinas Kesehatan
3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.5.[a] Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.5.[b] Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.										
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.										
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
03.04.02 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.										
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.										
03.05.01 Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.										
3.5.1(a) Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis										
3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.										
3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir.										
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.										
03.06.01 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.										
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.										
	RPJMD - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	IKD	%	62,18	62,58	63	63,41	63,9 2	64,3 2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
3.7.2* Angka Kelahiran Remaja (Umur 10-14 Tahun; Umur 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan Di Kelompok Umur Yang Sama.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	IKD	%	19,6	19,1	18,6	18,1	17,6	17,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
3.7.2.[a] Total Fertility Rate (TFR).										
	RPJMD - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	IKD	Indeks	2,73	2,7	2,67	2,64	2,61	2,58	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan esensial.										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	77,3	78,5	80	82	84	86	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	83	86	89	92	95	100	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	70	75	80	85	90	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,48	86,1	88,2	90,3	92,4	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	252	231	211	190	190	190	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	17	17	18	18	18	19	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	34,4	35	37	38	39	40	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Indikator Program	Orang	652	420	480	530	580	630	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	68,7	73,7	79,9	87	95	100	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
3.8.1.[a Unmet Need Pelayanan Kesehatan.										
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	Dinas Perhubungan
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,48	86,1	88,2	90,3	92,4	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	34,4	35	37	38	39	40	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	68,7	73,7	79,9	87	95	100	Dinas Kesehatan
3.8.2* Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.										
3.8.2.a Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).										
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,48	86,1	88,2	90,3	92,4	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	34,4	35	37	38	39	40	Dinas Kesehatan
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	Dinas Kesehatan
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.										
3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	70	75	80	85	90	95	Dinas Kesehatan
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Pertama	Indikator Progul	persen	70	80	90	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Kedua	Indikator Progul	persen	60	70	85	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Progul - Persentase masyarakat yang telah divaksin menuju Herd Immunity	Indikator Progul	persen	70	80	90	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.b.2* Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.										
3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.										
	RPJMD - Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	Indikator Program	%	90	92	94	96	98	100	Dinas Kesehatan
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										

Tujuan 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS

3.4 Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Upaya untuk mencapai **Tujuan 4 TPB/SDGs, yakni Pendidikan Berkualitas**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, dengan Arah kebijakan:
 - a) Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan
 - b) Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen
2. Strategi Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK
 - b) Melaksanakan penambahan ruang kelas baru SMA dan SMK
 - c) Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA, dan SMK
 - d) Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus
 - e) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah SMA dan SMK
 - f) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah pendidikan khusus (SLB).
 - g) Pembangunan sekolah baru di zona perbatasan
 - h) Revitalisasi SMK sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja Penguatan karakter melalui pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa.
 - i) Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan terutama yang berada pada daerah 3T secara bertahap.
 - j) Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri
3. Strategi Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau di sekolah
 - b) Mendorong Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

4. Strategi peningkatan Pemetaan dan Penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Melaksanakan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota
 - b) Melaksanakan Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota
 - c) Peningkatan kualitas kompetensi guru
5. Strategi Pelaksanaan Pengendalian perizinan Pendidikan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - b) Melaksanakan pembinaan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
6. Strategi Penguatan Pengembangan bahasa dan sastra, dengan Arah Kebijakan Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah.
7. Strategi dan arah kebijakan urusan Pendidikan, antara lain sebagai berikut yakni :
 - a) Pelaksanaan Pengendalian perizinan Pendidikan
 - b) Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan
 - c) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
 - d) Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal
 - e) Penguatan Pengembangan bahasa dan sastra
 - f) Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan
 - g) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - h) Melaksanakan pembinaan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - i) Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK
 - j) Melaksanakan penambahan ruang kelas baru SMA dan SMK
 - k) Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA, dan SMK
 - l) Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus
 - m) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah SMA dan SMK
 - n) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah pendidikan khusus (SLB)
8. Strategi dan arah kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain yakni :
 - a) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - b) Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi

- c) Meningkatkan penyebarluasan informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
 - d) Meningkatkan pelayanan penyebaran informasi dan komunikasi publik pendidikan inklusif
 - e) Pembangunan sistem penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah Daerah
9. Strategi dan arah kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain yakni :
- a) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
 - c) Meningkatkan penguatan organisasi perempuan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan.
 - d) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender di OPD provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota
 - e) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program dan kegiatan pada OPD Provinsi dan Pemda yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
 - f) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
 - g) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan perempuan.
 - h) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan.
 - i) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan
 - j) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan Organisasi
 - k) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan kualitas keluarga sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
 - l) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran kualitas keluarga pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

- m) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat kualitas keluarga pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga
- n) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan kualitas keluarga di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
- o) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga.
- p) Meningkatkan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- q) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
- r) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak
- s) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi
- t) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- u) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap korban kekerasan.
- v) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap anak.
- w) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran data gender dan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- x) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan data gender dan anak
- y) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang data gender dan anak.
- z) Melakukan pelaksanaan sistem data gender dan anak.
- aa) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran perlindungan khusus anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- bb) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan khusus anak
- cc) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.

- cc) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kualitas hidup keluarga, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak diberbagai bidang pembangunan
- dd) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan organisasi dalam pelaksanaan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
- ee) Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan
- ff) Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
- gg) Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
- hh) Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
- ii) Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Tabel 3.5
Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
04.01.01 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.										
4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.										
4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.										
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	31,27	32,77	34,27	35,77	37,27	38,77	Dinas Pendidikan
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	Dinas Pendidikan
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72	Dinas Pendidikan
4.1.2.[a] Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.										
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	31,27	32,77	34,27	35,77	37,27	38,77	Dinas Pendidikan
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	Dinas Pendidikan
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72	Dinas Pendidikan
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
4.2.1* Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.										
4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.										
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.										
4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.										
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	97.633	14.961	17.888	20.176	23.053	23.992	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	1,9	2	3	3,7	4,2	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	1,9	2	3	3,5	4,2	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang	170	470	528	528	528	528	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang	2105	5872	6742	6797	6852	6907	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	Indikator Progul	orang	500	1500	2000	2000	2000	2000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang	300	300	300	300	300	300	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang	4.532	4.759	4.997	5.246	5.509	5.784	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang	113	500	500	500	500	500	Dinas Kehutanan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator Progul	orang	1.040	1.950	2.220	2.664	3.197	3.836	Dinas Pariwisata
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru	Indikator Progul	Orang	-	1.636	1.855	2.000	2.200	2.300	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)									
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang	412	412	412	412	412	412	Dinas Sosial
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang	200	200	240	280	320	360	Dinas Kebudayaan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang	150	350	400	450	500	550	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang	765	675	700	725	750	775	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang	-	200	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang	266	112	112	112	112	112	Dinas Pangan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang	266	112	112	112	112	112	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
4.3.1.[a] Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).										
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
04.04.01 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).										
4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).										
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.										
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
04.06.01 Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.										
	RPJMD - Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	NA	58,2	58,51	58,82	59,13	59,45	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	NA	27,4	27,7	28,01	28,32	28,63	Dinas Pendidikan
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.										
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.										
4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).										
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	236	236	236	236	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	236	236	236	236	236	236	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	236	236	236	236	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	118	236	236	236	236	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	111	111	111	111	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	111	111	111	111	111	111	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	111	111	111	111	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	55	111	111	111	111	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	29	29	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	15	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
4.a.1.[a] Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.										
4.b.1* Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.										
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.										
4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.										

Tujuan 5: KESETARAAN GENDER

3.5 Tujuan 5: Kesenjangan Gender

Upaya untuk mencapai **Tujuan 5 TPB/SDGs, yakni Kesenjangan Gender**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan Arah kebijakan:
 - a) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
 - b) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 - c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2. Strategi Peningkatan perlindungan hak perempuan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
3. Strategi Peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - c) Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4. Strategi dan arah kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain yakni :
- a) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
 - c) Meningkatkan penguatan organisasi perempuan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan.
 - d) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender di OPD provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota
 - e) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program dan kegiatan pada OPD Provinsi dan Pemda yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
 - f) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
 - g) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan perempuan.
 - h) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan.
 - i) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan
 - j) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan Organisasi
 - k) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan kualitas keluarga sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
 - l) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran kualitas keluarga pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - m) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat kualitas keluarga pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga

- n) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan kualitas keluarga di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
- o) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga.
- p) Meningkatkan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- q) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
- a. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak
- r) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi
- s) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- t) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap korban kekerasan.
- u) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap anak.
- v) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran data gender dan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- w) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan data gender dan anak
- x) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang data gender dan anak.
- y) Melakukan pelaksanaan sistem data gender dan anak.
- z) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran perlindungan khusus anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- aa) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan khusus anak
- bb) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.

- cc) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kualitas hidup keluarga, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak diberbagai bidang pembangunan
- dd) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan organisasi dalam pelaksanaan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
- ee) Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan
- ff) Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
- gg) Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
- hh) Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Tabel 3.6
Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesenjangan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.										
5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.										
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	4	4,15	4,3	4,45	4,6	4,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,76	10,76	10,76	12,3	12,3	12,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.										
	RPJMD - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	IKD	Usia	21,6	21,8	22	22,2	22,4	22,6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
05.03.02 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.										
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.										
05.04.01 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.										
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.										
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,76	10,76	10,76	12,3	12,3	12,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.										
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil revidi dari konferensi- konferensi tersebut.										
5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.										
5.6.2* Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.										
5.a.1* (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.										
5.a.2* Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.										
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.										
5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.										
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang- undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.										
5.c.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.										
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	4	4,15	4,3	4,45	4,6	4,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	IKD	Kabupaten/Kota	17	17	18	18	19	19	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	IKD	Predikat	Utama	Utama	Utama	Utama	Mentor	Mentor	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB



Tujuan 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

3.6 Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Upaya untuk mencapai **Tujuan 6 TPB/SDGs, yakni Air Bersih dan Sanitasi Layak**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya baik di bidang infrastruktur maupun di bidang sosial dan ekonomi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan, dengan Arah kebijakan:
 - a) Pembangunan SPAM Regional
 - b) Penyediaan PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan
 - c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
2. Strategi dan arah kebijakan urusan Pekerjaan Umum, antara lain yakni :
 - a. Meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi
 - b) Pembangunan infrastruktur air minum
 - c) Pembangunan infrastruktur sanitasi
 - d) Pendayagunaan sumber daya air melalui peningkatan jaringan pemanfaatan air pada daerah irigasi kewenangan provinsi sebagai penunjang ketahanan pangan.
 - e) Peningkatan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur konservasi sumber daya air melalui pelaksanaan jaringan sumber air.
 - f) Perencanaan, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan PJPA (Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air).
3. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
 - a) Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan
 - c) Penanggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak
 - d) Penegakkan hukum dan penaatan terhadap hukum lingkungan
 - e) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - f) Peningkatan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.

- g) Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- h) Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
- i) Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan
- j) Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan
- k) Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketesediaan PPLH dan PPNS.
- l) Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/tercemar
- m) Pencegahan terjadinya degradasi lahan
- n) Penerapan teknologi pengelolaan limbah
- o) Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH
- p) Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
- q) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian informasi dan publikasi kepada stakeholders
- r) Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain
- s) Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan
- t) Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapat dijadikan rujukan ke depan
- u) Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel 3.7
Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.										
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	80,04	82	84	86	88	90	
	RPJMD - Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
6.2 . Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	81	82	84	86	88	90	
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	83	86	89	92	95	100	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
6.3 . Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
06.03.01 Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	81	83	85	87	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	18	18	19	19	Dinas Lingkungan Hidup
6.3.1.(A) Persentase Limbah Cair Industri Yang Dikelola Secara Aman										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	81	83	85	87	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	18	18	19	19	Dinas Lingkungan Hidup
06.03.02 Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.										
6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku										
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	86,64	87,16	87,66	88,16	88,67	89,17	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	76,94	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25	Dinas Lingkungan Hidup
6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku										
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	86,64	87,16	87,66	88,16	88,67	89,17	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	76,94	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25	Dinas Lingkungan Hidup
6.4 . Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.										
06.04.01 Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.										
06.04.02 Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediaannya.										
6.4.2.(a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
6.4.2.(b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya										
6.5 . Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.										
6.5.1* Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).										
	RPJMD - Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Indikator Program	%	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi
6.5.2* Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.										
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	IKD	%	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Indikator Program	%	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi
6.6 . Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.										
6.6.1* Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.										
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	IKD	%	NA	37,3	55	67	83	100	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	29,37	37,5	55	67	83	100	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Tujuan 7: ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

3.7 Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Upaya untuk mencapai **Tujuan 7 TPB/SDGs, yakni Energi Bersih dan Terjangkau**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi Pemenuhan kebutuhan energi dan insfrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah, dengan Arah kebijakan:
 - a) Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
 - b) Peningkatkan tata kelola ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab lingkungan
2. Strategi Peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bauran energi daerah, dengan Arah kebijakan:
 - a) peningkatan ketersediaan infrastruktur pemanfaatan Energi Terbarukan
 - b) Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi
3. Strategi dan arah kebijakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain yakni :
 - a) Meningkatkan Ketersediaan infrastruktur pemanfaatan energi terbarukan
 - b) Meningkatkan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi
 - c) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan
 - d) Meningkatkan tata kelola ketenagalistrikan yang aman andal dan akrab lingkungan
 - e) Meningkatkan pengembangan dan pengusaha energi terbarukan
 - f) Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi terutama di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan
 - g) Meningkatkan penatausahaan izin sektor energi terbarukan
 - h) Meningkatkan pelaksanaan konservasi energi
 - i) Meningkatkan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Tabel 3.8
Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.1.1* Rasio elektrifikasi.										
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	99,91	100	100	100	100	100	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD – Rasio Elektrifikasi	Indikator Program	%	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita.										
07.01.02 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.										
7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.										
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga.										
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.										
7.2.1* Bauran energi terbarukan.										
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.										
7.3.1* Intensitas energi primer.										
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih,teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih										
7.a.1 Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.										
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang										
7.b.1* Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

3.8 Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Upaya untuk mencapai Tujuan 8 TPB/SDGs, yakni **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan Vokasi, penguatan BLK dan lembaga produktivitas, dengan Arah Kebijakan Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing melalui pelatihan vokasi, penguatan BLK dan Peningkatan Lembaga produktivitas.
2. Strategi Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan
 - b) Peningkatan kompetensi lulusan SMK yang mampu diterima di dunia usaha dan dunia industri
3. Strategi Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan Arah Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
4. Strategi Meningkatkan suasana Ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial yang harmonis, dengan arah kebijakan Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5. Strategi dan arah kebijakan urusan Tenaga Kerja, antara lain yakni :
 - a) Meningkatnya Kualitas Pencari Kerja melalui Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing melalui pelatihan vokasi, penguatan BLK dan peningkatan lembaga produktivitas
 - b) Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dengan sasaran program me ningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditenpatkan dan diberdayakan
6. Strategi dan arah kebijakan urusan Koperasi dan UMKM, antara lain yakni :
 - a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia

- b) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
 - c) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
 - d) Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
 - e) Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (naik kelas) dan berdaya saing
 - f) Peningkatan penyuluhan, pendampingan, diklat serta pengawasan
 - g) Peningkatan penyelenggaraan diklat, pendampingan, fasilitasi standarisasi produk, akses permodalan, promosi, kemitraan serta pemasaran produk UKM
7. Strategi dan arah kebijakan urusan Pariwisata, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata berbasis aglomerasi
 - b) Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
 - c) Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Pariwisata
 - d) Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas internasional dan 19 (sembilan belas) destinasi wisata unggulan
 - e) Memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenitas, Aksesibilitas, Atraksi) dan 2P (Pemasaran dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah)
 - f) Mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan (Agrowisata, Ekowisata, Eopark, OCMH, Desa Wisata, dan Wisata Halal)
 - g) Memfasilitasi pengusulan KEK pariwisata
 - h) Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata
 - i) Mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Sustainability)
 - j) Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri
 - k) Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
 - l) Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan
 - m) Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM pelaku wisata

Tabel 3.9
Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.										
	RPJMD - Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indikator Makro	%	3,44	3,40	4,57	4,60	4,70	4,84	
8.1.1.(a) PDB per kapita.										
	RPJMD - PDRB (ADHK) Per Kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	31,45	32	32,97	34,09	35,29	36,58	
	RPJMD - PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	46,09	48,29	50,6	53,69	56,13	59,3	
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										
8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa										
8.10.1.(a) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.										
	Progul - Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga	120	540	540	540	540	540	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	100	200	200	200	200	200	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	300	400	400	400	400	400	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	50	100	150	150	150	200	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	4	4	4	4	4	4	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	5	5	5	5	5	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.										
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin										
8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	1,7	2,4	3,1	3,8	4,5	5,2	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	1,9	2	3	3,7	4,2	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	1,9	2	3	3,5	4,2	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga	120	540	540	540	540	540	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	100	200	200	200	200	200	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	300	400	400	400	400	400	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	50	100	150	150	150	200	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	4	4	4	4	4	4	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	5	5	5	5	5	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.										
08.04.01 Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.										
8.4.1.(a) Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan										
08.04.02 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.										
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.										
	RPJMD - Tingkat pengangguran terbuka (%)	Indikator Makro	%	6,7	6,6	6,45	6,31	6,13	5,94	
8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran.										
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).										
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.										
08.07.01 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
8.8 Melindungi hak- hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, Dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.										
08.08.01 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.										
8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.										
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	37,61	41,95	46,29	50,63	59,31	61,92	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	RPJMD - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	IKD	%	8,14	12,36	16,58	20,8	25,01	29,23	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	10,69	11,26	11,83	12,41	12,98	13,56	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
08.08.02 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.										
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.										
	RPJMD - Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	IKU	%	1,24	1,24	1,24	1,25	1,26	1,27	
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.										
	RPJMD - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	IKD	%	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Dinas Pariwisata
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Indikator Program	%	1	2,5	4	5,5	7	8,5	Dinas Pariwisata
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
	RPJMD - Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	IKD	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Dinas Pariwisata
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Indikator Program	%	1,5	3	4,5	6	7,5	9	Dinas Pariwisata
8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.										

Tujuan 9: INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

3.9 Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Upaya untuk mencapai Tujuan 9 TPB/SDGs, yakni **Industri, Inovasi, dan Infrastruktur**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi Fasilitasi pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Memfasilitasi pembangunan industri benih tanaman pangan dan perkebunan
 - b) Memfasilitasi pembangunan pasca panen tanaman pangan, perkebunan dan produk kehutanan non kayu
 - c) Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan dan peternakan
2. Strategi Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi
 - b) Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan Provinsi
3. Strategi Mengintegrasikan sistem transportasi antar intermoda, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah – daerah terpencil
 - b) Dukungan keterpaduan transportasi antar moda (bandara, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun Kereta Api)
 - c) Pengembangan jaringan pelayanan angkutan
 - d) Penataan sistem perijinan transportasi
 - e) Perbaikan sarana dan prasarana terminal Tipe B
 - f) Pengendalian angka kecelakaan melalui pengawasan, penyediaan sarana fasilitas keselamatan dan peningkatan kesadaran masyarakat
4. Strategi Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis, dengan Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan baru dan jalan lama termasuk lintas pantai barat sumatera barat, sesuai master plan yang telah ada dan interkoneksi dan koneksi antar daerah
 - b) Dukungan akses transportasi ke sentra produksi pertanian dan perikanan, destinasi wisata, industri dan UMKM
5. Strategi Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional, dengan Arah Kebijakan Meningkatnya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional
6. Strategi Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan, dengan Arah kebijakan :
- a) Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis
 - b) Penataan bangunan dan lingkungan
 - c) Pembangunan SPAM Regional
 - d) Pembangunan dan pengelolaan TPA Regional
 - e) Pembangunan Drainase primer
 - f) Pembangunan IPLT Regional
 - g) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan konflik pertanahan
 - h) Penyediaan PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan
 - i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
7. Strategi Pembangunan Infrastruktur Pertanian, dengan Arah Kebijakan :
- a) Pengembangan dan rehabilitasi Irigasi dan pengairan kewenangan provinsi serta peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif
 - b) Peningkatan daya tampung air (pembangunan embung)
8. Strategi Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna, dengan Arah Kebijakan:
- a) Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian, peternakan dan perikanan
 - b) Mendorong tumbuh petani milenial
 - c) Penerapan Inovasi dan Teknologi Pertanian
9. Strategi Pembangunan insfrastruktur pertanian, dengan Arah Kebijakan :
- a) Pengembangan dan rehabilitasi Irigasi dan pengairan kewenangan provinsi serta peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif
 - b) Peningkatan daya tampung air (pembangunan embung)
10. Strategi dan arah kebijakan urusan Perindustrian, antara lain yakni :
- a) Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumberdaya dan penguasaan teknologi;
 - b) Mengembangkan usaha hilirisasi produk industri pengolahan;
 - c) Meningkatkan kualitas produk industri;

- d) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia sektor industri;
 - e) Peningkatan wirausaha industri startup yang berkompeten dan melek digital
 - f) Pengembangan dan penguatan sentra industri;
 - g) Peningkatan produksi usaha industri melalui hilirisasi, diversifikasi, dan penggunaan teknologi tepat guna;
 - h) Peningkatan daya saing produk industri melalui peningkatan kualitas, desain, kemasan, kontinuitas produksi dan sertifikasi produk
 - i) Peningkatan kompetensi manajerial dan teknis bagi wirausaha industri startup
11. Strategi dan arah kebijakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan, antara lain yakni:
- a) Melakukan Penelitian dan Pengkajian
 - b) Melakukan penguatan kelembagaan litbang
 - c) Melakukan Perekayasaan Produk dan Teknologi
 - d) Melakukan Penerapan Produk dan Teknologi
 - e) Melakukan Diseminasi Hasil-Hasil IPTEK
 - f) Meningkatkan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
 - g) Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik
 - h) Meningkatkan Inovasi Daerah Lainnya
 - i) Meningkatkan Pemahaman OPD Hasil Bimtek, Sosialisasi IPKD, Rakor Inovasi
 - j) Terlaksananya Koordinasi dengan Lembaga Litbang

Tabel 3.10
Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.1* Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.										
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	Dinas Perhubungan
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.										
	RPJMD - Kemantapan Jalan (%)	IKU	%	73,92	75	77	79	81	82	
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	73,92	75	77	79	81	82	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	73,92	75	77	79	81	82	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol.										
9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api.										
9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.										
9.1.2.(a) Jumlah bandara.										
9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan.										
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan	4	4	4	4	4	4	Dinas Perhubungan
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut	4	4	4	4	4	4	Dinas Perhubungan
9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.										
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan	4	4	4	4	4	4	Dinas Perhubungan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut	4	4	4	4	4	4	Dinas Perhubungan
9.2 Mempromosikan dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.										
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.										
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.										
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.										
	RPJMD - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	IKU	%	8,62	8,75	8,88	9,02	9,15	9,29	
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	358	368	379	390	401	413	
	RPJMD - Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp)	IKD	Rp. Triliun	15,4	15,7	16	16,3	16,7	17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	39403	41373	43263	45363	47673	50193	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	39403	41373	43263	45363	47673	50193	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	-	1.636	1.855	2.000	2.200	2.300	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.										
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	300	400	400	400	400	400	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	4	4	4	4	4	4	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	5	5	5	5	5	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
9.4.1* Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.										
9.4.1.(a) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.										
9.4.1.(b) Intensitas emisi sektor industri.										
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.										
9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.										
9.5.2* Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa,dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.										
9.5.2.(a) Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).										



Tujuan 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN

3.10 Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Upaya untuk mencapai Tujuan 10 TPB/SDGs, yakni **Berkurangnya Kesenjangan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan Vokasi, penguatan BLK dan lembaga produktivitas, dengan Arah Kebijakan Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing melalui pelatihan vokasi, penguatan BLK dan Peningkatan Lembaga produktivitas.
2. Strategi Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan
 - b) Peningkatan kompetensi lulusan SMK yang mampu diterima di dunia usaha dan dunia industri
3. Strategi Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan Arah Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.
4. Strategi Meningkatkan suasana Ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial yang harmonis, dengan Arah Kebijakan Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5. Strategi Penciptaan iklim investasi, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Kemudahan dan fasilitas investasi serta pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi
 - b) Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha
 - c) Penyusunan regulasi peningkatan layanan investasi yang lebih efisien, transparan dan akuntabel
6. Strategi dan arah kebijakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain yakni :
 - a) Peningkatan Kerjasama Desa

- b) Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa
- c) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- d) Meningkatnya Penataan Desa dan Desa Adat
- e) Pengelolaan Administrasi pemerintahan yang sesuai dengan SOP
- f) Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
- g) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- h) Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
- i) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- j) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG
- k) Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
- l) Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
- m) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- n) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- o) Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- p) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- q) Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
- r) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
- s) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- t) Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
- u) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa
- v) Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
- w) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- x) Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- y) Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa
- z) Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
- aa) Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
- bb) Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
- cc) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- dd) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- ee) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- ff) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- gg) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- hh) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- ii) Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi
- jj) Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
- kk) Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
- ll) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

Tabel 3.11
Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1* Rasio Gini.										
	RPJMD - Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indikator Makro	Indeks	0,311	0,31	0,309	0,308	0,307	0,306	
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	358,76	356,45	353,68	350,62	347,27	343,62	
10.1.1.(b) Jumlah desa tertinggal.										
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	43,47	8,6	10,43	13,04	14,78	9,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri.										
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	0,6	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
10.1.1.(d) Jumlah daerah tertinggal.										
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.										
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.										
10.2 Pada tahun 2030,memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.										
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10.03.01 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.										
10.3.1.(a) Indeks Kebebasan.										
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	67,69	68,01	68,5	68,75	69,25	70	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).										
10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.										
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
										Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.										
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.04.01 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.										
10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.										
10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.										
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	37,61	41,95	46,29	50,63	59,31	61,92	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
10.04.02 Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.										
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.										
10.05.01 Financial Soundness Indicator.										
10.5.1.(a) Indikator Kesehatan Perbankan.										
10.7 . Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.										
10.07.01 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.										
10.07.02 Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migrasi yang baik.										
	RPJMD - Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar yang mendapatkan penanganan	Indikator Program	orang	35	35	35	35	35	35	Dinas Sosial
10.7.2.(a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.										
10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.										
10.07.03 Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.										
10.07.04 Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.										



Tujuan 11: KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

3.11 Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Upaya untuk mencapai Tujuan 11 TPB/SDGs, yakni **Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Penyediaan PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan
 - b) Fasilitasi penyediaan perumahan layak huni
 - c) Mengurangi luasan kawasan kumuh
2. Strategi dan arah kebijakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain yakni :
 - a) Mengurangi luasan kawasan kumuh.
 - b) Meningkatkan kualitas PSU permukiman.
 - c) Meningkatkan rumah layak huni
 - d) Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman.
 - e) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman.
 - f) Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman.
 - g) Menyusun database kawasan permukiman kumuh.
 - h) Menyusun database rumah tidak layak huni.
 - i) Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan.
3. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
 - a) Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Penaggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak
 - c) Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan
 - d) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - e) Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.
 - f) Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup

- g) Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
- h) Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan
- i) Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya
- j) Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota
- k) Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH
- l) Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
- m) Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat / stakeholders
- n) Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain
- o) Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan
- p) Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapt dijadikan rujukan ke depan
- q) Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaaan lingkungan.

Tabel 3.12
Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.01.01 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.										
11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau										
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	80,04	82	84	86	88	90	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	81	82	84	86	88	90	
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
11.2 . Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.										
11.02.01 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas										
11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik										
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	18000000	19000000	20000000	22000000	23000000	24000000	Dinas Perhubungan
11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum										
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	18000000	19000000	20000000	22000000	23000000	24000000	Dinas Perhubungan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.										
11.03.01 Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk										
11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk										
11.03.02 Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis										
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.										
11.04.01 Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)										
11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)										
	RPJMD - d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Indikator Makro	Ribu	10865	10916	11108	11342	11592	11863	
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang - orang dalam situasi rentan.										
11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang										
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	50	53	56	59	62	65	Satuan Polisi Pamong Praja
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	70	71	72	73	74	75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	3	10	10	10	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa	2	10	10	10	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.05.02 Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar										
11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB										
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.06.01 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota										
11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya										
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	15	17	19	21	23	25	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	54	56	58	60	62	64	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen	-	-	-	-	30	40	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.1.(b) Persentase sampah nasional yang terkelola										
11.06.02 Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)										
11.6.2.(a) Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10										
11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara										
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	86,64	87,16	87,66	88,16	88,67	89,17	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	76,94	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25	Dinas Lingkungan Hidup
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.										
11.07.01 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua										
11.07.02 Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
11.7.2.(a) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.										
11.a.1 Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.										
11.a.1.(a) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS										
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.										
11.b.1* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030										
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana										
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.										
11.c.1 -										
11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal										
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB

3.12 Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Upaya untuk mencapai Tujuan 12 TPB/SDGs, yakni **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab** telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Meningkatkan penyediaan dan benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani
 - b) Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
 - c) Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
 - d) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian
 - e) Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - f) Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
 - g) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani dan petugas
 - h) Pengawasan pupuk bersubsidi
2. Strategi Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna, dengan Arah Kebijakan:
 - a) Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian, peternakan dan perikanan
 - b) Mendorong tumbuh petani milenial
 - c) Penerapan Inovasi dan Teknologi Pertanian
3. Strategi Pengembangan system value chain, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Meningkatkan akses permodalan
 - b) Peningkatan kapasitas kelembagaan tani
 - c) Peningkatan pengawasan Agro input
 - d) Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan
 - e) Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian ,perkebunan dan Perikanan

- f) Meminimalisir resiko kerugian usaha tani
 - g) Pengintegrasian program pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lingkungan hidup
4. Strategi Fasilitas pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan, dengan Arah Kebijakan :
- a) Memfasilitasi pembangunan industri benih tanaman pangan dan perkebunan
 - b) Memfasilitasi pembangunan pasca panen tanaman pangan, perkebunan dan produk kehutanan non kayu
 - c) Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan dan peternakan
5. Strategi dan arah kebijakan urusan Pangan, antara lain yakni :
- a) Revitalisasi dan penyediaan RMU mobile
 - b) Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
 - c) Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan
 - d) Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan
 - e) Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal
 - f) Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen
 - g) Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis
 - h) Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok
 - i) Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal
 - j) Pemberdayaan daerah rentan pangan
 - k) Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen
 - l) Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau
6. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
- a) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - b) Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.
 - c) Memberikan jaminan fasilitas dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - d) Melaksanakan even-even stimulan peranserta masyarakat / stakeholders
 - e) Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain

- f) Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan
 - g) Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapat dijadikan rujukan ke depan
 - h) Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan.
7. Strategi dan arah kebijakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan Ketersediaan infrastruktur pemanfaatan energi terbarukan
 - b) Meningkatkan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi
 - c) Meningkatkan pengembangan dan pengusaha energi terbarukan
 - d) Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi terutama di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan
 - e) Meningkatkan penatausahaan izin sektor energi terbarukan
 - f) Meningkatkan pelaksanaan konservasi energi

Tabel 3.13
Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.										
12.1.1* Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan										
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.										
12.03.01 (a)? Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b)? Indeks sampah makanan (Food waste index)										
12.3.1.(a) Persentase sisa makanan										
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	15	17	19	21	23	25	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	54	56	58	60	62	64	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen	-	-	-	-	30	40	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah nagari/desa yang melaksanakan budidaya maggots	Indikator Progul	nagari/desa	4	13	18	23	28	30	Dinas Lingkungan Hidup
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.4.1* Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.										
12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	81	83	85	87	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	18	18	19	19	Dinas Lingkungan Hidup
12.4.1.(b) Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	81	83	85	87	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	18	18	19	19	Dinas Lingkungan Hidup
12.4.2* (a)? Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)? Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	81	83	85	87	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	18	18	19	19	Dinas Lingkungan Hidup
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.05.01 Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang										
12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.										
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	15	17	19	21	23	25	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	54	56	58	60	62	64	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek- praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya										
12.6.1(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.										
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional										
12.7.1* Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi										
12.7.1(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah										
12.7.1(b) Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa										
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										
12.08.01 Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.										
12.8.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										
12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.										
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	84,3	84,5	87,5	88,5	89,5	89,5	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	80	81	82	83	84	85	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91	92	93	94	95	96	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittingi
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	85	86	87	88	89	90	Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91	92	93	94	95	96	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	92	92	93	94	95	96	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	82,60 / 3,40	82,60 / 3,40	82,75 / 3,41	82,90 / 3,43	83,05 / 3,45	83,20 / 3,47	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
12.a Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.										
12.a.1* Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)										
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
12.b.1 Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan										
12.b.1(a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development										



Tujuan 13: PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

3.13 Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim

Upaya untuk mencapai Tujuan 13 TPB/SDGs, yakni **Penanganan Perubahan Iklim**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan Pelestarian dan pengelolaan lingkungan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Pemulihan media lingkungan yang rusak/tercemar
 - b) Pencegahan terjadinya degradasi lahan/sumber daya alam
 - c) Pengendalian dan pengurangan beban pencemaran
 - d) Penanganan limbah B3
 - e) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
 - f) Rehabilitasi Hutan dan lahan
 - g) Peningkatan upaya Adaptasi mitigasi perubahan iklim
 - h) Optimalisasi penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif (waste to energy)
 - i) Optimalisasi pengurangan sampah dan meningkatkan efektifitas pengolahan sampah
2. Strategi Pengarusutamaan perencanaan dan implementasi pembangunan rendah karbon, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
 - b) Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan hutan
 - c) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - d) Pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - e) Pengelolaan sampah dan limbah yang akrab lingkungan
 - f) Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi
 - g) Peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
3. Strategi dan arah kebijakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sub Bidang Kebencanaan, antara lain yakni :
 - a) Meningkatkan kualitas kelembagaan aparaturnya dan masyarakat dalam mitigasi bencana

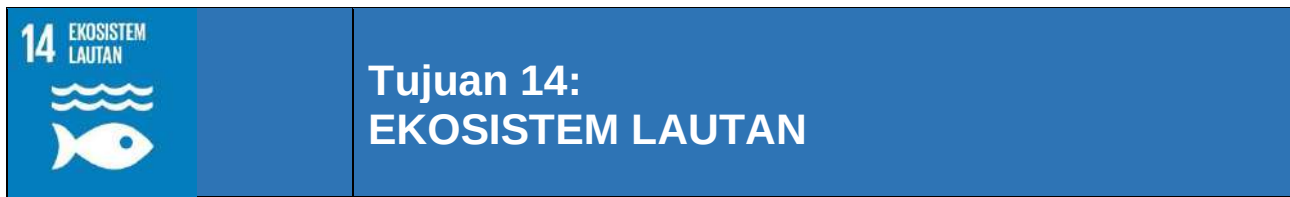
- b) Meningkatkan kualitas kelembagaan aparaturnya dan masyarakat dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana
 - c) Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana
 - d) Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana
 - e) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat
 - f) Penyediaan dan perluasan informasi kebencanaan
 - g) Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana
 - h) Pembangunan infrastruktur kebencanaan
 - i) Penanganan bencana banjir, longsor, gempa bumi yang beresek pada infrastruktur jalan
 - j) Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
 - k) Pemulihan daerah pasca bencana
4. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
- a) Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan
 - c) Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan
 - d) Penanggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak
 - e) Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan
 - f) Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan
 - g) Mengendalikan mutu lokasi konservasi / pemeliharaan
 - h) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - i) Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.
 - j) Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - k) Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
 - l) Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan
 - m) Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya
 - n) Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota
 - o) Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi lingkungan serta regulasi dalam implementasinya

- p) Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan.
- q) Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan
- r) Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketersediaan PPLH dan PPNS.
- s) Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/tercemar
- t) Pencegahan terjadinya degradasi lahan
- u) Penerapan teknologi pengelolaan limbah
- v) Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH
- w) Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
- x) Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi.
- y) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi
- z) Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaan
 - aa) Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / design model-model pemeliharaan
 - bb) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian
 - cc) informasi dan publikasi kepada stakeholders
 - dd) Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat / stakeholders
 - ee) Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain
 - ff) Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan
 - gg) Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapat dijadikan rujukan ke depan
 - hh) Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel 3.14
Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara										
13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang										
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	70	71	72	73	74	75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	3	10	10	10	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030										
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL
13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana										
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	70	71	72	73	74	75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional										
13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun										
13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)										
13.2.2.(b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)										
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim										
13.03.01 Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.										
13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										



3.14 Tujuan 14: Ekosistem Lautan

Upaya untuk mencapai Tujuan 14 TPB/SDGs, yakni **Ekosistem Lautan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi Mengembangkan Usaha - Usaha Ekonomi Berbasis kelautan dan Perikanan, dengan Arah Kebijakan Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan.
2. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
 - a) Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan
 - c) Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan
 - d) Penaggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak
 - e) Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan
 - f) Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan
 - g) Mengendalikan mutu lokasi konservasi / pemeliharaan
 - h) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - i) Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.
 - j) Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - k) Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
 - l) Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan
 - m) Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya

- n) Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota
 - o) Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi lingkungan serta regulasi dalam implementasinya
 - p) Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan.
 - q) Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan
 - r) Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketersediaan PPLH dan PPNS.
 - s) Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/tercemar
 - t) Pencegahan terjadinya degradasi lahan
 - u) Penerapan teknologi pengelolaan limbah
 - v) Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH
 - w) Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
 - x) Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi.
 - y) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi
 - z) Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaan
 - aa) Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / design model-model pemeliharaan
 - bb) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian
 - cc) informasi dan publikasi kepada stakeholders
 - dd) Melaksanakan even-even stimulan peranserta masyarakat / stakeholders
 - ee) Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain
 - ff) Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan
 - gg) Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapat dijadikan rujukan ke depan
 - hh) Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan.
3. Strategi dan arah kebijakan urusan Kelautan dan Perikanan, antara lain yakni :
- a) Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan
 - b) Mengembangkan Usaha - Usaha Ekonomi Berbasis kelautan dan Perikanan
 - c) Meningkatkan akses permodalan
 - d) Pengembangan system value chain
 - e) Peningkatan Pelestarian dan pengelolaan lingkungan
 - f) Meningkatkan pemakaian benih bermutu

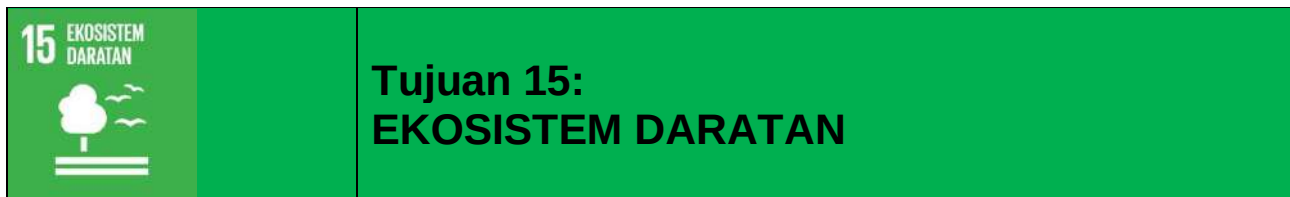
- g) Meningkatkan akses permodalan
- h) Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan melalui 1000 rumpon dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan
- i) Pengembangan budidaya perikanan payau (udang vanamae) dan komoditas perikanan lainnya
- j) Peningkatan pengawasan Agro input
- k) Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas perikanan
- l) Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian ,perkebunan dan Perikanan
- m) Peningkatan peranserta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
- n) Rehabilitasi Hutan dan lahan
- o) Pengembangan ekosistem esensial dan kawasan konservasi
- p) Peningkatan upaya Adaptasi mitigasi perubahan iklim

Tabel 3.15
Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi										
14.01.01 (a)? Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)? kepadatan sampah plastik terapung										
14.1.1.(a) Presentase penurunan sampah terbuang ke laut										
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif										
14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan										
	RPJMD - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov	IKD	Ton	467.082	477.362	487.949	499.311	512.013	525.307	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Indikator Program	%	0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan tangkap	Indikator Program	ton	220615	222693	225081	227546	230081	232762	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Indikator Program	%	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya	Indikator Program	ton	256747	262256	274280	284467	295226	306934	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya laut	Indikator Program	ton	52	67	72	79	85	93	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	Indikator Program	%	6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Indikator Program	ton	15633	16652	17861	19280	20832	22742	Dinas Kelautan Dan Perikanan
14.2.1.(a) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	7	7	7	7	7	7	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	Indikator Program	M2	250	250	300	350	350	350	Dinas Kelautan Dan Perikanan
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia										
14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut										
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	7	7	7	7	7	7	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	29,37	37,5	55	67	83	100	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)										
14.06.01 Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)										
14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha										
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	IKD	%	80	82	84	86	90	92	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Indikator Program	%	80	82	84	86	90	92	Dinas Kelautan Dan Perikanan
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
14.07.01 Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)										
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar										
14.b.1* Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil										
14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan										
14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi										
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hokum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hokum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari The future we want										
14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)										



3.15 Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Upaya untuk mencapai Tujuan 14 TPB/SDGs, yakni **Ekosistem Daratan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan sosial dalam bentuk HTR, HN dan HKm, dengan Arah kebijakan :
 - a) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - b) Peningkatan kapasitas SDM petani hutan
2. Strategi Peningkatan Kinerja pengusaha dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mekanisme perhutanan sosial
 - b) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 - c) Perbenihan Tanaman Hutan
 - d) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
 - e) Penegakan hukum dalam pengamanan dan perlindungan hutan
3. Strategi dan arah kebijakan urusan Kehutanan, antara lain yakni :
 - a) Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN dan HKm
 - b) Peningkatan Kinerja pengusaha dan penatausahaan hasil hutan
 - c) Percepatan Proses Pemantapan Kawasan Hutan
 - d) Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim
 - e) Penyediaan bibit berkualitas dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan
 - f) Peningkatan melalui optimalisasi pelayanan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja

- g) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - h) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - i) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 - j) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - k) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan
 - l) Pengelolaan Hutan (KPH)
 - m) Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
 - n) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - o) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - p) Perbenihan Tanaman Hutan
 - q) Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - r) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
 - s) Peningkatan kualitas pelayanan, menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas serta peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan
4. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
- a) Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan
 - c) Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan
 - d) Penanggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak
 - e) Penegakkan hukum dan penaatan terhadap hukum lingkungan
 - f) Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan
 - g) Mengendalikan mutu lokasi konservasi / pemeliharaan
 - h) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - i) Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.
 - j) Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - k) Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
 - l) Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan

- m) Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya
- n) Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota
- o) Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi lingkungan serta regulasi dalam implementasinya
- p) Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan.
- q) Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan
- r) Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketersediaan PPLH dan PPNS.
- s) Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/tercemar
- t) Pencegahan terjadinya degradasi lahan
- u) Penerapan teknologi pengelolaan limbah
- v) Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH
- w) Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
- x) Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi.
- y) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi
- z) Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaan
- aa) Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / design model-model pemeliharaan
- bb) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian
- cc) informasi dan publikasi kepada stakeholders
- dd) Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat / stakeholders
- ee) Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain
- ff) Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan
- gg) Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapat dijadikan rujukan ke depan
- hh) Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel 3.16
Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.										
15.1.1* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan										
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26	Dinas Kehutanan
15.01.02 Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya										
15.1.2.(a) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)										
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.										
15.02.01 Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari										
15.2.1.(a) Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju										
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	20	40	60	80	100	120	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Indikator Program	unit	20	20	20	20	20	20	Dinas Kehutanan
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi										
15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan										
	RPJMD - Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	IKD	%	0,79	1,29	1,79	2,29	2,79	3,29	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	IKD	%	1,9	2,85	3,81	4,76	5,71	6,66	Dinas Kehutanan
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.										
15.4.1* Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi										
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
15.4.2* Indeks Tutupan Hijau Pegunungan										
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26	Dinas Kehutanan
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal										
15.07.01 Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal										
15.7.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL										
15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan										
15.09.01 (a)? Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan										
(b)? integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi										
15.9.1.(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis										
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan

Tujuan 16: PERDAMAIAN, Keadilan dan KELEMBAGAAN YANG TANGGUH.

3.16 Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Upaya untuk mencapai Tujuan 16 TPB/SDGs, yakni **Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang melibatkan semua komponen masyarakat baik di daerah maupun di rantau dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, dengan Arah Kebijakan Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Strategi Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dengan Arah Kebijakan Peningkatan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kab/Kota.
3. Strategi Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat, dengan Arah Kebijakan Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek).
4. Strategi Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dengan Arah Kebijakan Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.
5. Strategi Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya konflik antar umat beragama, dengan Arah Kebijakan Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
6. Strategi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya, dengan Arah Kebijakan Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama

7. Strategi Terwujudnya Ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, dengan Arah Kebijakan Membuat Peta jalan ABS SBK.
8. **Strategi dan arah kebijakan urusan pemerintahan umum, antara lain yakni :**
Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat
 - a) Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat
 - b) Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
 - c) Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik
 - d) Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - e) Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan
 - f) Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - g) Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
 - h) Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)
 - i) Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
 - j) Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
 - k) Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
 - l) Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik
 - m) Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan
 - n) Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
 - o) Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Strategi dan arah kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, antara lain yakni :
 - a) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagai acuan bagi Pemda, dan Organisasi dalam pelaksanaan strategi PUG

- b) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
- d) Meningkatkan penguatan organisasi perempuan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan.
- e) Meningkatkan pelatihan dan keterampilan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan
- f) Meningkatkan kapasitas SDM perempuan bidang Politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- g) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender di OPD provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota
- h) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi K/L, Pemda, dan Organisasi
- i) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program dan kegiatan pada OPD Provinsi dan Pemda yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
- j) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
- k) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan perempuan.
- l) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan.
- m) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan
- n) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan Organisasi
- o) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan kualitas keluarga sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
- p) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran kualitas keluarga pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

- q) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat kualitas keluarga pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga
- r) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan kualitas keluarga di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
- s) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga.
- t) Meningkatkan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- u) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
- v) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- w) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak
- x) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi
- y) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- z) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap korban kekerasan.
- aa) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap anak.
- bb) Melakukan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan pembentukan dan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- cc) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan data gender dan anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
- dd) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran data gender dan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- ee) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan data gender dan anak

- ff) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan data gender dan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi
 - gg) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang data gender dan anak.
 - hh) Melakukan pelaksanaan sistem data gender dan anak.
 - ii) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
 - jj) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran perlindungan khusus anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - kk) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan khusus anak
 - ll) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan perlindungan khusus anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
 - mm) Melakukan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
 - nn) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.
10. Strategi dan arah kebijakan urusan Ketentraman dan Ketertiban umum, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran perda
 - b) Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait
 - c) Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat
 - d) Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
 - e) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur, kuantitas dan kualitas aparatur, pemenuhan penerapan standar pelayanan minimal urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 - f) Peningkatan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan pemberdayaan PPNS

- g) Peningkatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- h) Peningkatan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- i) Peningkatan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- j) Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, kuantitas dan kualitas aparatur, penerapan standar pelayanan minimal urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

11. Strategi dan arah kebijakan urusan Sosial, antara lain yakni :

- a) Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di dalam panti.
- b) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar PMKS Lainnya di dalam panti.
- c) Terpenuhinya peningkatan kapasitas SDM penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar PMKS lainnya di dalam panti.
- d) Meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e) Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersertifikasi.
- f) Terpenuhinya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Terlaksananya penguatan nilai KSN dan kepahlawanan.
- g) Terlaksananya pemberian gelar kepada pahlawan nasional di daerah.
- h) Memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- i) Termutakhirkannya data fakir miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- j) Meningkatnya persediaan Permakanan (Bantuan Logistik) Korban Bencana.
- k) Penanganan masalah social dari berbagai sumber pendanaan secara terpadu
- l) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi
- m) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- n) Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dalam panti
- o) Peningkatan layanan rehabilitasi social untuk PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
- p) Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan
- q) Penguatan Skema Penanggulangan Bencana
- r) Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PPKS.

- s) Meningkatkan kapasitas SDM dalam membina pelayanan dalam panti.
- t) Pengembangan kemampuan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- u) Menumbuhkan kembangkan nilai-nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
- v) Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial .
- w) Memutakhirkan data Fakir Miskin.
- x) Tersedianya bantuan logistik untuk korban bencana.
- y) Koordinasi intervensi masalah social dengan melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi serta masyarakat
- z) Pemanfaat data terpadu kesejahteraan social (DTKS) sebagai sumber data utama intervensi yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi serta masyarakat
- aa) Publikasi sasaran intervensi social yang telah dilakukan sebagai wujud transparansi pelaksanaan kegiatan
- bb) Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Provinsi
- cc) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi
- dd) Pemulangan Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar didaerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/ Kota asal
- ee) Penguatan Kelembagaan Pengangkatan Anak antar WNI melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Keluarga/ Perorangan
- ff) Pengelolaan Data Kemandirian Sosial, Fakir Miskin dan Rentan Cakupan Daerah
- gg) Penguatan dan Pemberian Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi

12. Strategi dan arah kebijakan fungsi penunjang Sekretariat Daerah, antara lain yakni :

- a) Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi penyusunan perundang-undangan
- b) Optimalisasi fasilitasi bantuan hukum
- c) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui capaian realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang efektif dan efisien
- d) Peningkatan penataan produk hukum daerah
- e) Peningkatan penyelesaian bantuan hukum
- f) Tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju penerapan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik

- g) Penetapan perangkat daerah Provinsi dengan pengkajian dan evaluasi ketepatan tupoksi dan urusan
 - h) Mengendalikan pembentukan perangkat daerah melalui verifikasi dan fasilitasi
 - i) Penetapan jabatan pada Perangkat Daerah dengan metode Analisis Jabatan
 - j) Meningkatkan pemahaman SDM terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah
 - k) Meningkatkan koordinasi dengan tim evaluator dari Kementerian PAN dan RB
 - l) Meningkatkan proses penganggaran yang menyesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai.
 - m) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja Pemerintah Daerah
 - n) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait
13. Strategi dan arah kebijakan fungsi keuangan antara lain yakni :
- a) Meningkatkan validasi data keuangan dan aset daerah
 - b) Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah
 - c) Meningkatkan asistensi dan rekonsinasi data anggaran
 - d) Meningkatkan Pelatihan/bintek pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - e) Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal
 - f) Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan
 - g) Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan
 - h) Peningkatan efektifitas dan daya guna keuangan daerah melalui restrusasi Perda/Pergub/Kebijakan
 - i) Peningkatan pengawasan aset daerah
 - j) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - k) Sosialisasi peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan daerah
 - l) Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan stakeholder terkait
 - m) Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah
 - n) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi ASN
 - o) Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja langsung
14. Strategi dan arah kebijakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan bimbingan teknis dalam pengembangan inovasi pelayanan publik
 - b) Memberikan bimbingan dalam peningkatan kompetensi aparatur untuk mewujudkan penataan ketatalaksanaan organisasi yang baik
 - c) Meningkatnya peranan pengawasan organisasi
 - d) Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

- e) Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - f) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - g) Pelayanan Pencatatan Sipil
 - h) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di provinsi
 - i) Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - j) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - k) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - l) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - m) Penyediaan Profil Kependudukan
15. Strategi dan arah kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain yakni :
- a) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - b) Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SPBE
 - c) Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik yang berkualitas
 - d) Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi
 - e) Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
 - f) Meningkatkan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah
 - g) Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektor
 - h) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor berdasarkan Prinsip satu Data
 - i) Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - j) Pembangunan sistem penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah Daerah

Tabel 3.17
Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
16.01.01 Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.										
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.										
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16.01.02 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.										
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.										
	RPJMD - Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	IKD	Kasus	4	3	3	2	2	2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16.01.03 Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.										
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.										
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Indikator Program	nilai	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
16.10.01 Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.										
16.10.1.(a) Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.										
16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).										
16.10.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.										
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.										
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	NA	10	20	30	40	50	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	5	10	20	30	40	50	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif										
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	NA	10	20	30	40	50	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran	Indikator Program	%	5	10	20	30	40	50	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi									
16.10.2.(b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.										
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.										
16.02.01 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir										
16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.02.03 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.										
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.										
16.03.01 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum
16.3.1.(c) Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.										
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum
16.03.02 Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.										
16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.										
16.03.03 Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.										
16.3.3 (a) Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)										
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
16.05.01 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.										
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).										
16.05.02 Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.										
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.										
16.6.1.(a) Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.										
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	67,5	68,5	69,5	70,5	71	71,87	
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP B										
	RPJMD - Nilai SAKIP (predikat)	IKU	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A	
	RPJMD - Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	IKD	Perangkat Daerah	7	8	10	12	14	16	Biro Organisasi
	RPJMD - Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Indikator Program	Perangkat Daerah	7	8	10	12	14	16	Biro Organisasi
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ? B										
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	67,5	68,5	69,5	70,5	71	71,87	
16.06.02 Proporsi penduduk yang puas terhadap										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
pengalaman terakhir atas layanan publik.										
16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.										
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	84,3	84,5	87,5	88,5	89,5	89,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittingi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	80	81	82	83	84	85	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91	92	93	94	95	96	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	85	86	87	88	89	90	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91	92	93	94	95	96	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	92	92	93	94	95	96	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	82,60 / 3,40	82,60 / 3,40	82,75 / 3,41	82,90 / 3,43	83,05 / 3,45	83,20 / 3,47	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.07.01 Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.										
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	59,09	59,12	60,01	61,2	61,75	62,42	
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,76	10,76	10,76	12,3	12,3	12,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).										
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	59,09	59,12	60,01	61,2	61,75	62,42	
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.07.02 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.										
16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi										
16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan										
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	67,69	68,01	68,5	68,75	69,25	70	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16.7.2.(c) Indeks Kesetaraan										
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	59,09	59,12	60,01	61,2	61,75	62,42	
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	67,69	68,01	68,5	68,75	69,25	70	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.										
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	86,43	86,62	90,50	92,37	94,25	96,16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	RPJMD - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Indikator Program	%	30	40	50	60	70	80	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	91,47	94	95	96	97	98	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.										
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	86,43	86,62	90,50	92,37	94,25	96,16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	91,47	94	95	96	97	98	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun										
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	86,43	86,62	90,50	92,37	94,25	96,16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	91,47	94	95	96	97	98	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.										
16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.										
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.										
16.b.1 Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.										
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.										

Tujuan 17: KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

3.17 Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Upaya untuk mencapai Tujuan 17 TPB/SDGs, yakni **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang melibatkan semua komponen masyarakat baik di daerah maupun di rantau dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Penumbuhan dan Peningkatan SDM enterpreneur, dengan Arah Kebijakan:
 - a) Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM enterpreneur
 - b) Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan enterpreneur
2. Strategi Peningkatan fasilitasi enterpreneur, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan kolaborasi melalui sinergisitas dalam rangka pemberdayaan enterpreneur
 - b) Peningkatan fasilitasi akses pembiayaan dan akses pasar bagi enterpreneur
 - c) Peningkatan inovasi, branding dan sertifikasi produk
 - d) Peningkatan digitalisasi produk bagi pelaku enterpreneur
3. Strategi Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi
 - b) Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c) Peningkatan Upaya Promosi Investasi
4. Strategi Meningkatkan kontribusi ekonomi digital, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan industri kecil dan menengah, UMKM yang berkompeten dan meleak teknologi digital
 - b) Penumbuhan dan pengembangan marketplace
 - c) Fasilitasi penumbuhan pelaku e-commerce
5. Strategi dan arah kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain yakni :
 - a) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - b) Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SPBE
 - c) Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik yang berkualitas
 - d) Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi
 - e) Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

- f) Meningkatkan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah
 - g) Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral
 - h) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral berdasarkan Prinsip satu Data
 - i) Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - j) Pembangunan sistem penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah Daerah
6. Strategi dan arah kebijakan fungsi penunjang Perencanaan, antara lain yakni :
- a) Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas.
 - b) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
 - c) Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d) Mengoptimalkan Pelaksanaan Musrenbang.
 - e) Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan.
 - f) Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - g) Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai bidang urusan.
 - h) Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah.
 - i) Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
 - j) Pemanfaatan data & informasi yang valid, mudah diakses dan mutakhir berbasiskan Satu Data.
7. Strategi dan arah kebijakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan bimbingan teknis dalam pengembangan inovasi pelayanan publik
 - b) Memberikan bimbingan dalam peningkatan kompetensi aparatur untuk mewujudkan penataan ketatalaksanaan organisasi yang baik
 - c) Meningkatkan peranan pengawasan organisasi
 - d) Melaksanakan penyusunan laporan akutabilitas kinerja Biro Organisasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - e) Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - f) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - g) Pelayanan Pencatatan Sipil
 - h) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di provinsi
 - i) Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- j) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- k) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
- l) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
- m) Penyediaan Profil Kependudukan

Tabel 3.18
Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.										
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	36	37,84	38,25	39,56	40,75	41	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	3,6	3,58	3,56	3,55	3,54	3,53	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	35,4	36,6	37,8	39	40,3	41,5	Badan Pendapatan Daerah
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	Badan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.										
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	36	37,84	38,25	39,56	40,75	41	
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	35,4	36,6	37,8	39	40,3	41,5	Badan Pendapatan Daerah
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	3,4	7	7	7	7	7	Badan Pendapatan Daerah
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	Badan Pendapatan Daerah
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.										
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	36	37,84	38,25	39,56	40,75	41	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	3,6	3,58	3,56	3,55	3,54	3,53	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	35,4	36,6	37,8	39	40,3	41,5	Badan Pendapatan Daerah
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	3,4	7	7	7	7	7	Badan Pendapatan Daerah
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	Badan Pendapatan Daerah
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.										
17.10.01 Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
17.10.1(a) Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati										
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.										
17.11.01 Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.										
17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas										
	RPJMD - Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp	IKD	Rp. Juta	1393,13	1420,99	1449,41	1478,4	1507,97	1538,12	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	RPJMD - Nilai ekspor	Indikator Program	juta US\$	1393,13	1420,99	1449,41	1478,4	1507,97	1538,12	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.										
17.16.01 Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.										
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										
17.17.01 Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).										
17.17.1.(a) Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.										
17.17.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).										
17.17.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.										
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17.18.01 Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs										
17.18.1.(a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.										
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17.18.1.(b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.										
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17.18.2* Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.										
17.18.3* Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto,dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										
17.19.01 Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.										
17.19.1.(a) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.										
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17.19.1.(b) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.										
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	IKD	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17.19.02 Proporsi negara yang a)? melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b)? mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.										
17.19.2 (a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.										
17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).										
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
17.03.01	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.									
17.03.02	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.									
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.									
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.									
17.06.01	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya									
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga									
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)									
17.8	Mengoperasional- isasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangu- nan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkat- kan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khu- susnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1*	Persentase pengguna internet									

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan untuk mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs secara periodik dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sehingga kemajuan pencapaian target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diukur. Selain itu, pemantauan dimaksudkan juga untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan/atau berkemungkinan timbul, sehingga dapat segera diambil tindakan yang diperlukan.

Sementara, evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran atas capaian TPB/SDGs, dan menganalisis permasalahan serta penyebab permasalahan yang timbul. Hasil evaluasi bermanfaat sebagai umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terutama yang terkait dengan TPB/SDGs.

4.2 Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan, dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara, mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak non-pemerintah dilakukan secara *selfassessment*. Kedua mekanisme ini selanjutnya akan disinkronkan dan digabungkan oleh Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 sehingga menjadi satu kesatuan laporan pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat.

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting yang perlu dilaksanakan untuk memastikan pencapaian TPB dari waktu ke waktu sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian TPB yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi Daerah hingga pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan pelaksana TPB.

4.2.1 Landasan Hukum

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu kewajiban dari Tim Pelaksanaan TPB dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan pasal 6 Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan. Pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut di mana setiap Menteri/Kepala Lembaga dan juga Gubernur Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana SDGs Nasional.

Demikian juga dengan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-94-2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2022-2026, diamanatkan bahwa Tim Koordinasi Daerah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan TPB/SDGs dan melaporkan hasil pemantauan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi setiap satu tahun sekali.

4.2.2 Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan dan evaluasi program Pencapaian TPB/SDGs pada dasarnya dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik oleh lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh Perangkat Daerah (PD) terkait, maupun oleh lembaga non pemerintah. Hasil Pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasi oleh Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.

Disamping prinsip tersebut di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang antara lain :

- 1) Pelaku pemantauan dan evaluasi adalah semua pelaku/*stakeholders* yang berkepentingan terhadap pencapaian target TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat. Dengan kata lain, pelaku pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program pencapaian target TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat adalah pemantau bagi program yang terkait langsung dengan pelaksana program dan kegiatan dan bagi pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab mengkoordinasikan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- 2) Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pencapaian target TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena

itu, kegiatan pemantauan dilaksanakan sejak awal dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

- 3) Sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pencapaian target TPB/SDGs adalah seluruh sarana yang dimiliki oleh masing-masing pelaku, selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan, sehingga para pelaku dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang hasilnya dikaji bersama sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan pencapaian TPB/SDGs selanjutnya.
- 4) Metode pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pencapaian target TPB/SDGs ditentukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing dengan semangat memperbaiki kebijakan, program dan kegiatan pencapaian TPB/SDGs yang sedang berjalan.

4.2.3 Manfaat Pemantauan dan Evaluasi

Terdapat dua manfaat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs yaitu:

- 1) Manfaat terkait dengan operasional

Melalui pemantauan dan evaluasi kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk mencapai target TPB/SDGs yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program Pencapaian TPB/SDGs yang dilakukan, melakukan perubahan-perubahan modifikasi dan supervisi terhadap kegiatan/program Pencapaian TPB/SDGs yang dilaksanakan, dan dapat mengembangkan tujuan-tujuan serta analisis informasi yang bermanfaat bagi pelaporan kegiatan.

- 2) Kegunaan terkait dengan kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat dirumuskan kembali strategi pencapaian target TPB/SDGs, pendekatan dan asumsi-asumsi yang digunakan. Selain itu, untuk menggali dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang hubungan antar program dan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi di masa mendatang.

4.3 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS

Kegiatan pemantauan dan evaluasi percepatan pencapaian target TPB dibagi menurut waktu pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Pemantauan pada saat program dan kegiatan berjalan, dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- 2) Evaluasi tahunan, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target-target tahunan yang telah disusun.
- 3) Evaluasi akhir (*summative evaluation*), dilakukan pada akhir periode rencana aksi ini yaitu tahun 2026.

Dengan demikian kegiatan pemantauan dan evaluasi bukan merupakan kegiatan yang sekali saja dilakukan pada saat akhir program/kegiatan tetapi kegiatan yang bisa dilakukan sesuai tahapan yang dilaksanakan.

4.3.1 Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara, mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak non-pemerintah dilakukan secara *selfassessment*. Kedua mekanisme ini selanjutnya akan disinkronkan dan digabungkan oleh Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 sehingga menjadi satu kesatuan laporan pencapaian target dan indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat.

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting yang perlu dilaksanakan untuk memastikan pencapaian TPB dari waktu ke waktu sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian TPB yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi Daerah hingga pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan pelaksana TPB.

a) Mekanisme Pemantauan RAD

Kewajiban penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59 Tahun 2017 jo Perpres 111 Tahun 2022. Sementara itu laporan pencapaian atas pelaksanaan target TPB Provinsi disampaikan oleh Gubernur setiap enam bulan sekali kepada Menteri PPN/Bappenas selaku koordinator Pelaksana TPB dan juga Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2. Adapaun alur pemantauan pelaksanaan TPB daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Alur Informasi untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat



Alur Laporan

1) Langkah 1

Setiap enam bulan sekali, Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs Propinsi Sumatera Barat mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs yang dilakukan oleh Pokja 4 pilar dan kemudian menuangkannya ke dalam format matriks 2 yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan tersebut.

2) Langkah 2

Matriks konsolidasi dari semua pilar dilengkapi dengan penjelasan tentang kemajuan, kendala dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai standar yang telah dinyatakan dalam RAD dikirimkan kepada Gubernur Sumatera Barta oleh Kepala Bappeda Provinsi selaku Ketua Tim Pelaksana TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat.

3) Langkah 3

Gubernur menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Laporan yang sama juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Sekretariat TPB/SDGs Nasional untuk koordinasi pelaporan RAD dari seluruh Provinsi.

Alur Umpan Balik

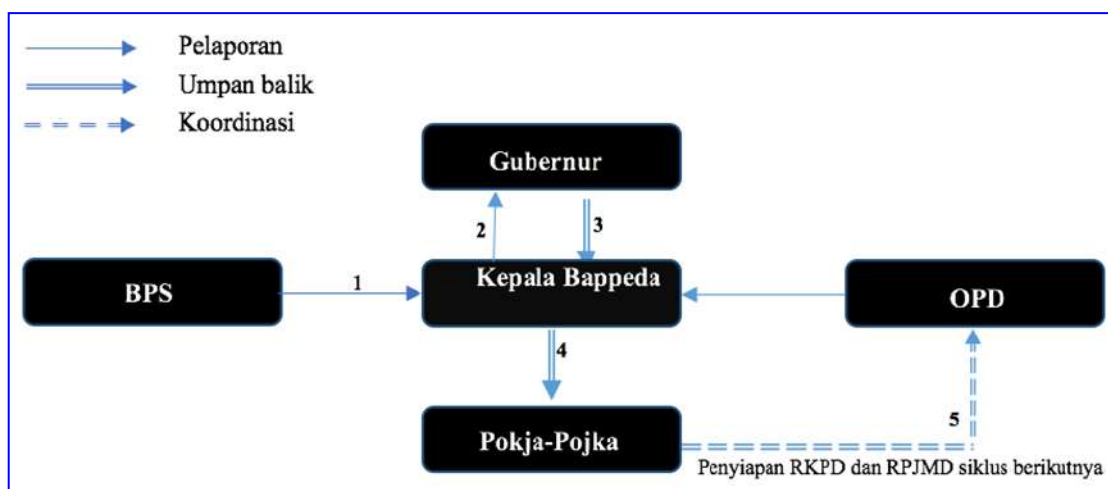
Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memudahkan proses perbaikan atau peningkatan kualitas pencapaian indikator TPB/SDGs yang dilaporkan oleh Gubernur Sumatera Barta. Berdasarkan umpan balik dari Tim Pelaksana TPB/SDGs Nasional, Gubernur Sumatera Barat memperbaiki atau merumuskan ulang program dan kegiatan pencapaian TPB/SDGs daerah dan menuangkannya ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran untuk mendapatkan kesepakatan dari DPRD dan kepada Bappeda sebagai arahan penyusunan program dan kegiatan periode berikutnya.

b) Mekanisme Evaluasi

Terdapat dua jenis evaluasi yaitu tahunan dan akhir periode. Kegiatan evaluasi tahunan dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Sedangkan evaluasi akhir periode dilaksanakan pada akhir periode RAD TPB/SDGs yaitu tahun 2021. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB/SDGs serta mencari jalan keluar atas kesenjangan yang terjadi antara standar pencapaian yang telah ditetapkan dan realisasinya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barta. Adapun mekanisme yang diterapkan dalam proses evaluasi pada Provinsi Sumatera Barat ada sebagai berikut:

Gambar 4.2

Mekanisme evaluasi RAD TPB Provinsi Sumatera Barat



Alur laporan evaluasi

1) Langkah 1

Laporan evaluasi atas pencapaian indikator TPB/SDGs utamanya datang dari BPS melalui berbagai survei yang mencakup Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, laporan evaluasi diperoleh juga dari berbagai survei sektoral dan laporan-laporan administratif yang dilakukan oleh OPD.

Laporan evaluasi tersebut yang telah dipetakan ke dalam jenis-jenis indikator provinsi disampaikan Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Sumatera Barat untuk dikonsolidasikan.

2) Langkah 2

Ketua Tim Pelaksana menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Gubernur sebagai Ketua Tim Pengarah untuk menjadi masukan evaluasi program dan kegiatan bagi pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

Alur Umpan Balik

1) Langkah 1

Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Sumatera Barat mendapatkan arahan kebijakan dari Gubernur Sumatera Barat sebagai Ketua Tim Pengarah terkait hasil evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat untuk dipergunakan sebagai bahan perbaikan RPJMD periode berikutnya.

2) Langkah 2

Ketua Tim Pelaksana memberikan penjabaran arahan kebijakan untuk diintegrasikan dalam proses penyiapan RKPD dan RPJMD pada siklus berikutnya kepada Kelompok Kerja TPB Provinsi Sumatera Barat.

3) Langkah 3

Kelompok Kerja merincikan umpan balik yang harus direncanakan dan dianggarkan oleh masing-masing OPD pada program dan kegiatan masing-masing.

4.3.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pihak Non Pemerintah

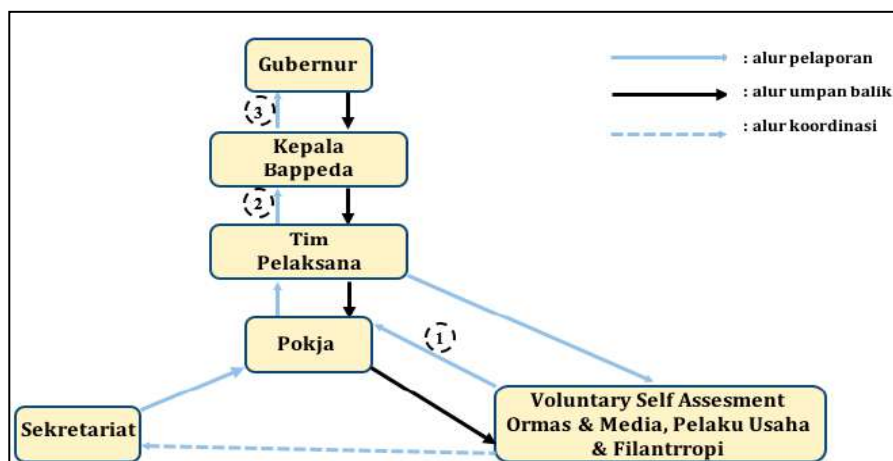
Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak non pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi dan akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak non pemerintah untuk

pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Kapasitas organisasi non pemerintah sangat beragam, maka perlu dirumuskan mekanisme pelaporan yang sederhana dan efisien, namun tetap tidak mengurangi esensi hal yang dikerjakan.

Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui self assesment tool (SAT) yang disepakati. Adapun alur informasi pemantauan dan evalausi dari organisasi non pemerintah adalah sebagai berikut, seperti digambarkan dalam bagan :

Gambar 4.3.

**Alur Informasi Evaluasi untuk RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat
Non-Pemerintah**



Alur Laporan

1) Langkah 1

Organisasi Non Pemerintah melakukan *voluntary self assesment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self assesment tool*, lalu dilaporkan pada Kelompok Kerja pada pilar yang sesuai dengan isu lembaga dimaksud dan/atau disampaikan juga kepada Sekretariat TPB Provinsi Sumatera Barat.

2) Langkah 2

Kelompok Kerja atau Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dari Organisasi Non Pemerintah untuk diolah, divalidasi dan direkapitulasi yang

selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda Sumatera Barat selaku Ketua Tim Pelaksana.

3) Langkah 3

Tim Pelaksana merangkum keseluruhan laporan baik dari pemerintah maupun non pemerintah ke dalam suatu laporan yang utuh yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Tim Pengarah.

Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memudahkan proses perbaikan atau peningkatan kualitas kinerja non pemerintah yaitu : Kelompok Kerja dibantu Sekretariat akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Organisasi Non Pemerintah jika terdapat kekuranglengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data.

Mekanisme evaluasi untuk Organisasi Non Pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk *secara ad hoc* oleh Organisasi Non Pemerintah itu sendiri yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para personel yang diakui kompetensi, pengalaman dan integritasnya dari *stakeholders* berkaitan.

Forum atau tim tersebut juga melibatkan perwakilan dari unsur pemerintah serta perwakilan lain bila diperlukan dari penilai independen berdasarkan kompetensinya, misalnya pakar keuangan, manajemen, ahli evaluasi dampak, dan lain-lain.

Hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Kelompok Kerja yang kemudian akan diserahkan kepada Ketua Tim Pelaksana sebagai bahan evaluasi keseluruhan dari para *stakeholders*. Ketua Tim Pelaksana akan menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Tim Pengarah.

Ketua Tim Pengarah akan memberikan umpan balik yang bersifat strategis kepada para *stakeholders* untuk pencapaian TPB/SDGs yang lebih optimal. Ketua Tim Pelaksana akan memberikan umpan balik penjabaran dari arahan kebijakan strategis dari Ketua Tim Pengarah kepada Kelompok Kerja, yang akan dilanjutkan disampaikan kepada Organisasi Non Pemerintah terkait.

4.4 Publikasi Hasil Pemantauan Dan Evaluasi

Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh Sekretariat TPB/SDGs telah menyiapkan laman sdgs.bappenas.go.id sebagai media publik untuk melakukan disseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGs, dokumen dan informasi publik lainnya.

BAB V PENUTUP

Pencapaian sasaran TPB Provinsi Sumatera Barat dilakukan antara lain melalui penyusunan RAD TPB 5 (lima) tahunan. RAD TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2026 merupakan kelanjutan dari RAD TPB Tahun 2018-2021. Penyusunan RAD TPB Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara inklusif dengan melibatkan kabupaten/kota dan berbagai pemangku kepentingan. Rencana Aksi Daerah TPB (RAD TPB) merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Selain itu, Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2026 ini disusun juga sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung tercapainya target-target TPB di tingkat Nasional yang telah digambarkan dalam Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RA TPB) Tahun 2020-2024 dan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

Rencana aksi ini memuat target indikator kinerja TPB mulai tahun 2023 sampai dengan 2026 sesuai periodisasi RPJMD. Guna mendukung pencapaian target-target indikator TPB, ditetapkan serangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu terdapat pula dukungan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan RPJMD dan Renstra PD masing-masing; serta program dan kegiatan dari nonpemerintah (*Non State Actor*).

Keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah juga terus meningkat, antara lain melalui pembentukan SDGs Center di Universitas Andalas dan di Universitas Negeri Padang. Peran lembaga kemasyarakatan, filantropi, dan perusahaan juga terus meningkat, yang ditunjukkan dengan ikut sertanya pihak nonpemerintah tersebut dalam proses penyusunan RAD TPB. Penyampaian rencana program dan kegiatan dalam RAD TPB merupakan dukungan pihak nonpemerintah dalam pelaksanaan TPB/SDGs.

Sehingga dalam implementasinya pada tahun 2023-2026, maka RAD TPB ini menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Sumatera Barat dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang disepakati secara global dalam target-target TPB.

Oleh karena itu RAD TPB ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian RAD TPB ini tentu saja sangat tergantung dari dukungan pendanaan Pemerintah Daerah melalui APBD, dan tentunya juga tidak menutup kemungkinan pendanaan dari partisipasi swasta dan masyarakat. Terkait dengan hal ini dukungan komitmen dari DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi *budgeting* dalam penentuan anggaran pembangunan daerah sangat penting artinya untuk menjamin keberhasilan implementasi RAD ini.

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu merespon RAD ini dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin implementasi dan mencapai target seperti yang diharapkan dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Selain partisipasi dalam pendanaan guna mendukung tercapainya target-target TPB, peran masyarakat dalam hal ini LSM, Perguruan Tinggi. Lembaga filantropi dan organisasi masyarakat yang lainnya, juga diperlukan untuk ikut melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program percepatan pencapaian target TPB, tentu saja sesuai dengan koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN
2023-2026.

- Lampiran 1 : Rencana Kerja Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026
dapat di download pada link : https://bit.ly/RADSDGs_2023-2026
- Lampiran 2 : Rencana Kerja Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022-2026
dapat di download pada link : https://bit.ly/RADSDGs_2023-2026
- Lampiran 3 : Rencana Kerja Program/Kegiatan Non Pemerintah Tahun 2022-2026
dapat di download pada link : https://bit.ly/RADSDGs_2023-2026

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN
2023-2026.

**Lampiran 1 : Rencana Kerja Program/Kegiatan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022-2026**

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi

TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim.														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik		2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	580.191.281	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana pendidikan SMK		13 Sekolah	14 Sekolah	15 Sekolah	16 Sekolah	17 Sekolah	510.502.497.835	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang		13 Sekolah	14 Sekolah	15 Sekolah	16 Sekolah	17 Sekolah	31.672.722.398	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik) di kelola SMA Negeri Se- Sumatera Barat		112 Sekolah	113 Sekolah	114 Sekolah	115 Sekolah	116 Sekolah	860.088.947.008	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Terpenuhinya Perlengkapan Didik Peserta SLB		2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	1.160.382.562	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang		3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	7 Sekolah	1.868.709.666	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik) di kelola SMA Negeri Se- Sumatera Barat		30 Sekolah	31 Sekolah	32 Sekolah	33 Sekolah	34 Sekolah	35.346.121.108	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah daerah DTPK (kabupaten kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan).	Kabupaten/kota	2	2	2	2	2	2.298.576.000	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jenis Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman dan bahan medis habis pakai yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	4	22.733.441.210	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga								1.075.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Lokasi yang berpotensi bencana dan/atau yang terdampak krisis akibat bencana tingkat Provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai standar		7	7	7	7	7	36.160.517.745	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Lokasi pada kondisi KLB tingkat Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan.	Kabupaten/Kota	19	19	19	19	19	5.126.104.344	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	3	3	3	1.678.023.764	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	4	800.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	14	14	7.089.966.231	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	5	5	6	6	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali						725.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis						0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	5	8.072.533.416	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	3	3	3	4	796.000.582	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terselenggaranya layanan konseling	Kali	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD		RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	2	2	2	2	1.998.076.677	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang didistribusikan	Orang						0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi	Orang	652	420	480	530	580	4.896.799.077	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Promosi kesehatan dan PHBS yang dilakukan	Kali	4	5	5	5	5	3.838.251.219	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Preventif Tingkat Daerah Provinsi													
			Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	20	21	22	23	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	0	3	4	5	5	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum		8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	19.639.285.927	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL													
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Terlaksananya pembangunan/ pengembangan TPA Sampah Regional		2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	3.017.843.760	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1.04.02.1.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.01.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Yang Direhabilitasi	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.02.1.03.03.	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban bencana	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.02.1.03.04.	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rumah Terbangun Untuk Korban Bencana	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.02.1.03.05.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau relokasi Program Provinsi	1. Rumah Khusus untuk korban bencana dan PSU	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				2. Rumah Khusus untuk Relokasi Program Provinsi dan PSU	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.02.1.03.06.	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada relokasi Program Provinsi	Jumlah Perumahan yang menerima operasional dan pemeliharaan pada relokasi program provinsi	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.02.1.03.01.	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau relokasi Program Provinsi	1. Pembagian rumah bagi korban bencana	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				2. Pembagian rumah bagi relokasi program provinsi	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
														PERTANAHAN
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	1.04.03.01.01.	Pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Terbentuk, Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Sudah Mandiri	%	12,66	12,66	12,66	0	12,66	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.03.01.02.	Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyadaran Publik	%	12,66	12,66	12,66	0	12,66	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.03.01.04.	Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman	Persentase Jumlah Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	%	4,75	4,75	4,75	0	4,75	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.03.01.05.	Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Persentase Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	%	4,75	4,75	4,75	0	4,75	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.03.01.06.	Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman	Persentase Jumlah Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	%	4,75	4,75	4,75	0	4,75	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.02.03.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah RTLH pada Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.03.02.04.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalm kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah Kerjasama Perbaikan RTLH pada Kawasan Kumuh	%	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	.04.03.02.06.	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat Yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Jumlah Kepala Keluarga Yang Dibantu	%	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen JITU PASNA Provinsi yang disusun (dokumen)		1	1	1	1	1	706.506.224	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap capaian JITU PASNA Provinsi (laporan)		1	1	1	1	1	1.289.153.828	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
1.06.04.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	2.542.181.040	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	3.938.400.010	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.458.043.670	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.147.180.348	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			100%	100%	100%	100%	100%	1.512.355.372	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	61.477.930	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	39.077.524	APBD		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	557.744.231	APBD		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	2.601.344.898	APBD		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	3.431.910.297	APBD		DINAS SOSIAL
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	3.052.550.000	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	25.989.423.985	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	11.098.003.408	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	1.292.115.417	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.791.247.635	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.098.338.016	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			100%	100%	100%	100%	100%	5.189.335.000	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	45.031.218	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	23.879.671	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	81.528.726	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	3.658.551.384	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	4.327.476.056	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	3.506.951.067	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	4.633.022.891	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			100%	100%	100%	100%	100%	2.442.040.000	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	92.387.257	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	57.421.519	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	220.065.045	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	175.826.880	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	102.565.680	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	308.425.378	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	8.613.990.845	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	5.487.569.135	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	1.854.958.932	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)				100%	100%	100%	100%	100%	924.858.302	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)				100%	100%	100%	100%	100%	123.841.954	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)				100%	100%	100%	100%	100%	67.235.564	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)				100%	100%	100%	100%	100%	1.108.736.741	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)				100%	100%	100%	100%	100%	1.977.743.371	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)				100%	100%	100%	100%	100%	198.415.750	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)				100%	100%	100%	100%	100%	94.018.540	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	100%	100%	100%	3.572.895.952	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)				100%	100%	100%	100%	100%	713.375.318	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)				100%	100%	100%	100%	100%	73.658.032	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)				100%	100%	100%	100%	100%	2.008.156.648	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)		Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	311.732.511	APBD	DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
1.06.05.1.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	4.628.215.015	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
1.06.06.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	1.315.646.608	APBD		DINAS SOSIAL
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	2.648.089.567	APBD		DINAS SOSIAL
		Pelayanan Dukungan Psikososial			100%	100%	100%	100%	100%	1.303.681.833	APBD		DINAS SOSIAL
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan	Orang	8,31	8,53	8,75	8,97	8,97	76.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja usaha mandiri	Orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Pelindungan PMI (pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	300	300	300	300	300	3.500.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegritas secara	Jumlah perusahaan yang diberikan rekomendasi izin cabang	Perusahaan	50	50	50	50	50	1.750.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penyediaan layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah peserta sosialisasi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) calon pekerja migran (PMI)	Orang	1	1	1	1	1	8.600.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang diberdayakan	Orang	100	100	100	100	100	3.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Penetapan Upah Minimum (UMP)	SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
	Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)									292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	Penetapan Upah Minimum Kab/Kota(UMK)	SK		1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Penetapan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)									292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah kepesertaan pekerja diperusahaan pada jaminan sosial dan dipenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja sesuai aturan	Perusahaan		1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan PPRG	Orang	40 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	250.000.000	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		[1] PKS; [2] kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	325.000.000	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								17.800.000.000	APBD	DINAS PANGAN
			Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0	APBD	DINAS PANGAN
			Jumlah Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan dan ternak kecil) yang diberdayakan	248 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT		0	APBD	DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah pelatihan/Bimtek pengolahan, manajemen usaha dan pemasaran yang terlaksana		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah pembinaan, pameran produk olahan pangan lokal dan pertemuan koordinasi dengan Stakeholder terkait yang terlaksana		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah kelompok pangan lokal yang dibina	12 Kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok		0 APBD		DINAS PANGAN
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan								4.659.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat yang dibina	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah kegiatan promosi produk kelompok tani dan pelaku usaha yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah kategori penilaian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara yang dilaksanakan	3 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori		0 APBD		DINAS PANGAN
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							2.579.000.000	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah media cetak untuk promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah penyaluran bantuan bahan pangan alternatif pengganti beras yang dilaksanakan	1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional yang diikuti	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)							806.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah media cetak untuk Pemasyarakatan Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang disediakan	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah rapat koordinasi dan sosialisasi, rapat koordinasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun								671.000.000	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan masyarakat yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah sosialisasi, rapat koordinasi dan pembahasan Pola Pangan Harapan (PPH) yang dilaksanakan	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan makanan							1.711.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jumlah data/informasi harga pangan pada 19 kab/kota yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah buku neraca bahan makanan (NBM) yang tersedia	1 Dokumen	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah sosialisasi, rapat koordinasi dan pembahasan harga pangan dan neraca bahan makanan yang terlaksana	2 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya								537.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jumlah data/informasi distribusi dan akses pangan pada 19 kabupaten/kota yang tersedia.	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah pelatihan, pemantauan dan rapat koordinasi yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			-	-	-	-	-	8.572.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jenis Bahan Pangan dalam rangka operasi pasar, gelar pangan	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan strategis	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			murah yang didistribusikan		strategis								
			Jumlah bazar/pasar murah bahan pangan yang dilaksanakan	78 kali	150 kali	150 kali	150 kali	150 kali	150 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disediakan	0 Ton	100 Ton	100 ton	100 ton	100 ton	100 ton	6.847.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
			Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan Pangan Provinsi								58.173.000.000	APBD	Nagari/Desa /kelurahan Mandiri Pangan	DINAS PANGAN
			Jumlah Nagari yang difasilitasi sarana/prasarana/ Bimtek iptek pada nagari mandiri pangan yang dilaksanakan	98 Nagari	110 Nagari	125 Nagari	135 Nagari	150 Nagari	150 Nagari	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Nagari yang dilakukan pembinaan dan Monev di Nagari Mandiri Pangan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Koordinasi Pokja Ahli Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah data/ informasi data sumberdaya pangan strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Pengembangan Sumberdaya Pangan Strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	0	APBD		DINAS PANGAN
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								61.184.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jumlah masyarakat yang terdampak dan beresiko rawan pangan dan gizi serta stunting yang dibantu	495 KK	1.000 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah pembinaan, sosialisasi dalam rangka antisipasi dan penanganan kejadian rawan pangan yang dilaksanakan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH													
Kegiatan 1: Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Sub kegiatan 1: Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan pendataan dan penggalian informasi tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	kelompok masyarakat	0	2	2	2	2	146.405.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah kelompok yang difasilitasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA	orang/kelompok	1	0	0	0	0	45.900.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Sub Kegiatan 2: Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA yang dilakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan / kemitraan / penguatan kelembagaan	kelompok masyarakat	0	1	1	1	1	60.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	kali	4	4	4	4	4	309.533.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA													
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat		Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	1. Monitoring dan Evaluasi penataan Desa Adat 2. Terlaksananya sosialisasi identifikasi dan inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat		1. 4?kali 2. 30?orang	1. 4?kali 2. 30?orang	1. 4?kali 2. 30?orang	1. 4?kali 2. 30?orang	1. 4?kali 2. 30?orang	211.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA													
Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Terlaksananya FGD kegiatan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 2. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring kegiatan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa/Nagari		1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang	1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang	1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang	1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang	1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang	1.587.132.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			(BUMDes/BUMNag) Bersama pada Kawasan Perdesaan 4. Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 5. Terlaksananya Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag) Bersama pada Kawasan Perdesaan										
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	180.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													
2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.02.02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah pemberdayaan Kelompok masyarakat di kakabeti sesuai kearifan lokal	kakbeti	-	5	5	5	5	600.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM													
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi							702.086.500	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN													
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pelatihan yang dilaksanakan		2	3	4	5	6	5.801.912.813	APBD		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengawasan Wilayah Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil + Sosialisasi pulau keci	kab/kota	7	7	7	7	7	1.890.000.000	APBD	DKP Provinsi dan UPTD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya monitoring bio fisik, penanaman mangrove, Rehabilitasi Terumbu Karang	kab/kota	7	7	7	7	7	8.750.000.000	APBD	DKP Provinsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya sekolah pantai, Pemilihan Putra Putri Maritim, Forum Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan Pesisir dlm rangka kesetaraan gender, Tracking ,Mangrove,bersih pantai,Peningkatan sarpras di pulau2 kecil	kab/kota	7	7	7	7	7	11.950.000.000	APBD	Prov. Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Forum Koordinasi Mitra Konservasi dan Peningkatan Kelembagaan peningkatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama	kab/kota	7	7	7	7	7	3.155.628.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan,Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan,Sosialisasi perlindungan nelayan,Asuransi Nelayan / Perlindungan Nelayan	kab/kota	7	7	7	7	7	3.165.000.000	APBD	DKP Provinsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), Penyediaan sarana dan prasarana KKPD	kawasan	3	4	4	4	4	26.601.783.000	APBD	Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya monitoring bio fisik, penanaman mangrove, Rehabilitasi Terumbu Karang	kab/kota	7	7	7	7	7	8.300.000.000	APBD	DKP Provinsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana penangkap ikan, alat penangkap ikan, mesin tempel, trammel net, sarana bantu, pengadaan rumpon	unit	5340	5350	5360	5370	5380	109.314.979.000	APBD	Prov. Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya restocking, pelestarian sumberdaya Perairan Umum, sarana penangkapan perairan umum	kab/kota	10	12	12	12	12	33.300.000.000	APBD	Prov. Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	TMMD, Kelembagaaan BBI, Pokdakan dan UPR ,Peningkatan SDM Forum ,Pengelolaan BBI Se-Sumatera Barat,Pengembangan Tambak Milinial Budidaya Udang Vaname							5.281.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan									0	APBD	DINAS PARIWISATA
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata									0	APBD	DINAS PARIWISATA
		Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan									0	APBD	DINAS PARIWISATA
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									0	APBD	DINAS PARIWISATA
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
(1) Keg. Pengawasan Mutu Penyediaan dan peredaran Benih tanaman			1. Jumlah Benih Tan. Pangan yang disertifikasi	ton	3.082	4.132	5.182	6.332	7.500		0	APBD	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			2. Jumlah Benih Tan. Buah-buahan yang disertifikasi	batang	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000		0	APBD	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			5. Jumlah produsen benih perkebunan	Kelompok	50	50	50	50	50		0	APBD	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			6. Jumlah Benih Tan. Perkebunan yang disertifikasi	batang	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000		0	APBD	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	7. Penyaluran Benih Bersertifikat Komoditas Perkebunan, Tan. Pangan dan Hortikultura	%	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	5. Penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung lainnya	%	100	100	100	100		0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	8. Meningkatnya Penggunaan Alsintan	unit	3.018	3.118	3.218	3.318		0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	9. Penyaluran Benih Bersertifikat untuk komoditi :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Kelapa Sawit	Batang	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- KaKao	Batang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Kopi	Batang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Karet	Batang	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Kelapa	Batang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Gambir	Batang	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Padi	ton	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Jagung	ton	120	120	120	120	120	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	- Cabe	gram	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Bawang Merah	ton	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Manggis	batang	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Jeruk	batang	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	10. a. Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan Tan. Pangan tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kelapa Sawit	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kakao	paket	40	40	40	40	40	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kopi	paket	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Karet	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kelapa	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Gambir	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- SL PTT Padi (Jarwo)	unit	80	80	80	80	80	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	b. Penerapan GAP/SOP komoditas Hortikultura tdd :							0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP Cabe	paket	30	30	30	30	30	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP Bawang	paket	30	30	30	30	30	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP manggis	paket	35	35	35	35	35	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP Jeruk	paket	25	25	25	25	25	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	11. a. Penerapan GHP komoditas perkebunan tdd :							0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kakao	paket	16	16	16	16	16	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kopi	paket	16	16	16	16	16	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Karet	paket	20	20	20	20	20	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Gambir	paket	10	10	10	10	10	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Perkebunan Lainnya	paket	5	5	5	5	5	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	11.b Penerapan GHP komoditas Hortikultura tdd :							0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	- Cabe	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Bawang Merah	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Manggis	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Jeruk	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-Horti lainnya	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	12. Pelatihan Pengolahan hasil komoditas Hortikultura	unit	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	13, Pelatihan teknis agribisnis komoditas Hortikultura	angkatan	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.01 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang dilakukan	Kali	37	37	37	37	37	37.510.671.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Jumlah laporan pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disusun	Laporan	4	4	4	4	4	4	0	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	uraian : 1) Kontes Ternak	Kali	1	1	1	1	1	1	5.500.000.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	1	0	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2) Peningkatan produksi semen beku, pemanfaatan teknologi reproduksi (IB dan ET)	Kali	12	12	12	12	12	12	18.770.671.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			dan Produktifitas ternak sapi										
				Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			3) Peningkatan produktifitas bibit ternak unggas	Kali	12	12	12	12	12	6.870.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			4) Peningkatan produktifitas bibit ternak ruminansia	Kali	12	12	12	12	12	6.370.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.05.02 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan			4) Peningkatan produktifitas bibit ternak ruminansia	Kali	12	12	12	12	12	6.370.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	rekomendasi	50	52	53	54	56	6.690.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			uraian : !) Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi	rekomendasi	9	11	12	13	15	660.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			2) Terjaminnya ketersediaan pakan ternak (Bank Pakan) (5 kelompok)	Kelompok	5	5	5	5	5	2.650.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			3) Tersedianya ternak bibit bersertifikat (SKLB)	rekomendasi	18	18	18	18	18	690.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			4) Tersedianya usaha Pembibitan ternak yang bersertifikat (SKPT)	rekomendasi	5	5	5	5	5	620.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			5) 'Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian sampel pakan secara aktif maupun pasif servis (sampel)	rekomendasi	18	18	18	18	18	2.070.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.27.02.1.07.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang disediakan	Komoditi	8	8	8	8	8	332.024.326.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
(1) Penataan prasarana pertanian			1. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier	Ha	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	1. Terlaksananya Pengembangan Padi Organik , kopi dan Horti Organik	Ha	175	275	325	375	425	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3. Peningkatan kualitas dan akses Pemasaran hasil pertanian berupa Fasilitas Asosiasi Petani Komoditas Perkebunan	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	4. Terlaksananya Fasilitas kemitraan komoditas perkebunan	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	5. Koordinasi dan penetapan harga TBS Kelapa Sawit	SK	24	24	24	24	24	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) UU No. 41/2009	Kab/kota	5	7	9	12	15	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Peningkatan luas pertanian organik untuk produk unggulan (padi, kopi, hortikultura)	Ha	175	275	325	375	425	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	7. Pengembangan Kampung Buah							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kampung Durian	kampung	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kampung Manggis	kampung	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kampung Jeruk	kampung	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kampung Buah Naga	kampung	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kampung Alpukat	kampung	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4					5	6	7	8	
	8. Pengembangan kampung Sayur	kampung	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	9. Fasilitasi Asosiasi Petani Komoditas Hortikultura	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	10. Fasilitasi kemitraan komoditas Hortikultura	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	11. Pembinaan dan Penumbuhan UP3HP	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	12. Terlaksananya Pembangunan lanjutan gedung balai diklat pertanian	unit	1					0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	13. Sinkronisasi dan Koordinasi terkait penetapan harga TBS Kelapa Sawit	SK	24	24	24	24	24	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN												
(1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			1. Pengendalian OPT Kakao	Kali	40	40	40	40	40	0	APBD	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			2. Pengendalian OPT Kopi	Kali	5	5	5	5	5	0	APBD	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			3. Pengendalian OPT Karet	Kali	20	20	20	20	20	0	APBD	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			4. Pengendalian OPT Kelapa	Kali	12	12	12	12	12	0	APBD	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			5. Pengendalian OPT Tan. Pangan	unit	40	40	40	40	40	0	APBD	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			6. penerapan PHT Padi dan Jagung	unit	100	100	100	100	100	0	APBD	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
											HOLTIKULTURA
	7. Insentif benih padi bagi penangkar	Rp	500/kg untuk 2.157.000 Kg benih	500/kg untuk 2.892.000 Kg benih	400/kg untuk 3.627.000 Kg benih	400/kg untuk 4.432.000 Kg benih	400/kg untuk 4.432.000 Kg benih	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	8. Terlaksananya pembinaan dampak perubahan iklim TTHP	Kab/Kota	18	18	18	18	18	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	9. Pembinaan petani pengamat hama	orang	75	75	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	10. Penyediaan sarana Brigade perlindungan Tanaman	unit	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	11. Pengawasan mutu standar pestisida	sampel	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	12. Terlaksananya moneyv gas rumah kaca	Kab/Kota	18	18	18	18	18	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	13. Penerapan PHT Cabe	unit	11	11	11	11	11	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	14. Penerapan PHT Bawang	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	15. Penerapan PHT Manggis	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	16. Penerapan PHT Jeruk	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	17. Klinik PHT Kakao	unit	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	18. Gerakan Pengendalian OPT Cabe	Ha	110	110	110	110	110	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
														HOLTIKULTURA
				19. Gerakan Pengendalian OPT Manggis	Ha	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
				20. Gerakan Pengendalian OPT Jeruk	Ha	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
				21. Sarana Klinik PHT Komoditas Cabe dan Bawang	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
				22. Asuransi Usaha Tani padi	Ha	8.500	9.000	10.000	11.000	12.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
				23. Pembinaan Regu Pengendalian OPT Perkebunan	Orang	90	90	90	90	90	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
				24. Penerapan PHT Pada pengendalian OPT Kopi	lokasi	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang terbangun	Hektar	300	300	300	300	300	23.002.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA														
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Ekosistem		10	10	10	10	10	45.205.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN														
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi	Kelompok	50	50	50	50	50	11.535.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
				Jumlah usulan Perhutanan Sosial	Kelompok	30	30	30	30	30	3.262.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
				Jumlah anggota Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	orang	300	300	300	300	300	5.412.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah fasilitiasi kewirausahaan	Kali	100	100	100	100	100	14.229.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
				Jumlah Alat Ekonomi Produktif yang difasilitasi	unit	100	100	100	100	100	63.233.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN														
3.29.06.1.06	Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Tersedianya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	282.400.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terbangunnya Instalasi Listrik bagi Kelompok Masyarakat tidak Mampu yang dilewati jaringan listrik		1200 KK	1200 KK	1100 KK	1000 KK	800 KK	84.323.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya data dan informasi awal potensi energi			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	200.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terseidanya data Ratio Elektrifikasi (RE) dan Ratio Desa Berlistrik (RD) Terverifikasi DJL dan PLN			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	165.028.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terbangunnya PLTS Tersebar/SHS Revit PLTMH		20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	1.050.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06.1.06.07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tertatanya pengelolaan pembangkit EBT Perdesaan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	308.886.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah operasi pasar/pasar murah yang dilakukan	kali	7 kali	7 kali	8 kali	8 kali	8 kali	1.333.761.500	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang dinilai perwujudannya	Kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	192.070.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Transmigrasi	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum yang disiapkan untuk lingkungan hunian penduduk setempat	Persen	100	100	100	100	100	219.495.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penyuluhan Transmigrasi	Persentase penyuluhan transmigrasi yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	1.008.504.375	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pelatihan Transmigrasi	Persentase pelatihan transmigrasi yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	1.008.504.375	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase KK (Kepala Keluarga) yang dibina	Persen	100	100	100	100	100	457.806.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase penguatan/penambahan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan yang dikembangkan	Persen	100	100	100	100	100	306.354.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT													
Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar		Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan	terfasilitasinya pengembangan pelayanan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan		20%	40%	60%	80%	100%	4.129.468.150	APBD		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Kesehatan	terfasilitasinya pengembangan pelayanan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan		20%	40%	60%	80%	100%	1.747.804.400	APBD		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Sosial	terfasilitasinya pengembangan pelayanan kesejahteraan rakyat bidang sosial		20%	40%	60%	80%	100%	1.852.179.800	APBD		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan wanita dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Terlaksananya fasilitasi kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar bidang pemberdayaan wanita dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		20%	40%	60%	80%	100%	2.750.000.000	APBD		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	2	3	2	2	2.770.474.325	APBD		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2	2	3	2	2	2.446.767.025	APBD		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1	1	1	1	1	667.300.125	APBD		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.													
1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.													
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik) di kelola SMA Negeri Se- Sumatera Barat	112 Sekolah	113 Sekolah	114 Sekolah	115 Sekolah	116 Sekolah	860.088.947.008	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Terpenuhinya Perlengkapan Didik Peserta SLB	2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	1.160.382.562	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	7 Sekolah	1.868.709.666	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik) di kelola SMA Negeri Se- Sumatera Barat	30 Sekolah	31 Sekolah	32 Sekolah	33 Sekolah	34 Sekolah	35.346.121.108	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Bimbingan Teknis Informasi dan Teknologi Bagi Guru SMA, SMK dan SLB Terlaksananya Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi Tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun 2021 Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Berdasarkan Jenis Ketunaan (Tunagrahita dan Autis) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Teknologi Kejuruan Terlaksananya Seleksi Calon Kepala SMA, SMK, SLB dan Pengawas Sekolah Terlaksananya Training Of Trainer Musyawarah Guru Mata Pelajaran (TOT MGMP) SMA, SMK dan Kelompok	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	12.340.992.586	APBD		DINAS PENDIDIKAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Kerja Guru (KKG) SLB										
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah daerah DTPK (kabupaten kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan).	Kabupaten/kota	2	2	2	2	2	2.298.576.000	APBD	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Lokasi yang berpotensi bencana dan/atau yang terdampak krisis akibat bencana tingkat Provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai standar		7	7	7	7	7	36.160.517.745	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Lokasi pada kondisi KLB tingkat Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan.	Kabupaten/Kota	19	19	19	19	19	5.126.104.344	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	3	3	3	1.678.023.764	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	4	800.000.000	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	2	2	2	0	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	14	14	7.089.966.231	APBD	DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	5	5	6	6	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kali						725.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis						0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kali	3	3	4	4	5	8.072.533.416	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kali	2	3	3	3	4	796.000.582	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kali	4	4	6	6	6	2.968.299.620	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Laporan SPM Provinsi	Laporan						0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Rekomendasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota	Rekomendasi						0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.19		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali	19	19	19	19	19	31.123.637.425	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah program prioritas yang difasilitasi	Program	12	12	12	12	12	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi	Orang	57	57	57	57	57	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.26		Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan									597.031.365	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.27		Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah puskesmas yang dilakukan verifikasi	Puskesmas	25	25	25	25	25	619.179.242	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kegiatan yang dilakukan monitoring	Kali						0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terselenggaranya layanan konseling	Kali	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD		RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	2	2	2	2	1.998.076.677	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang didistribusikan	Orang						0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi	Orang	652	420	480	530	580	4.896.799.077	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi & Kualifikasi SDM Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesehatan	Kegiatan	10	10	10	10	10	2.900.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia								1.000.000.000	APBD		RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Provinsi			Kesehatan										
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi teknis SDM kesehatan daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	org	710	750	770	800	830	13.510.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun	1	1	1	1	1	2.600.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Promosi kesehatan dan PHBS yang dilakukan	Kali	4	5	5	5	5	3.838.251.219	APBD	DINAS KESEHATAN
			Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	20	21	22	23	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	0	3	4	5	5	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)													
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya							21.155.000.000	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Sabai Nan Aluih, Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Limau Manih Kabupaten Pesisir Selatan	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Batu Licin Kabupaten Pesisir Selatan	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Solok Sei. Nyalo Kabupaten Pesisir Selatan	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Sungai Putuih Kabupaten Pesisir Selatan	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Persentase terbangun Embung Batu Hampa Rawang Gunung Malelo Kabupaten Pesisir Selatan	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Bayang Sani Kabupaten Pesisir Selatan	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Kambang Utara Kabupaten Pesisir Selatan	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Lurah Bomben Kota Sawahlunto	%	5% dari konstruksi 1 Unit embung	0,5	0,5			0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Pengadaan dan Pemasangan Sumur Tancap di Sirukam kabupaten Solok	unit	10					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Pengadaan dan Pemasangan Sumur Tancap di Supayang kabupaten Solok	unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Pengadaan dan Pemasangan Sumur Tancap di Kambang Barat kabupaten Pesisir Selatan	unit	10					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Pengadaan dan Pemasangan Sumur Tancap di Kambang Utara kabupaten Pesisir Selatan	unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Pengadaan dan Pemasangan Sumur Tancap di Kambang Timur kabupaten Pesisir Selatan	unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Pengadaan dan Pemasangan Sumur Tancap di Lakitan Tengah kabupaten Pesisir Selatan	unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Pengadaan dan Pemasangan Sumur Tancap di Lakitan Selatan kabupaten Pesisir Selatan	unit	10					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Pengadaan dan Pemasangan Sumur Tancap di Lakitan Utara kabupaten Pesisir Selatan	unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Bukik Sula Jorong Bukik Kambuik Kabupaten Lima Pulu Kota	%				0,5		0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Bancha Galinggang Kabupaten Pasaman Barat	%			1			0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Batang Dareh-Bulakan Kabupaten Lima Pulu Kota	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Persentase terbangun Embung Batang Aro Kabupaten Lima Puluh Kota	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Cubadak Kabupaten Solok	%	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Biobio Kabupaten Solok	%	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Cirubuih Nagari Sirukam Kabupaten Solok	%	0,4 0,3					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Kubang Badak Nagari Koto Laweh Lembang Jaya Kabupaten Solok	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Galagah Alahan Panjang, Kabupaten Solok	%	5% dari konstruksi 1 Unit embung 0,4 0,2					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung di Nagari Pakandangan Kabupaten Padang Pariaman	%	5% dari konstruksi 1 Unit embung					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Tabek Layek Kabupaten Solok	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Cikarau Kabupaten Solok	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Aie Tambau Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Tanjung Bingkung Kabupaten Solok	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Pinang Sinawa Kabupaten Solok	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Bukik Sianik Kabupaten Solok	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Sarang Gagak Kabupaten Solok	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Talago Guci Paninggahan Kabupaten Solok	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Banto Guguk Sarai Kabupaten Solok	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Persentase terbangun Embung Galagah Alahan Anggang Kabupaten Agam	%						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2022	2023	2024	2025	2026					
1			2	3	4					5	6	7	8	
			Persentase terbangun Embung Munggu Gadang Kabupaten Agam	%	0,5					0,5	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Rikie Jorong Rikia Nagari Persiapan Dalko Kec. Tanjung Raya Kabupaten Agam	%	0,5					0,5	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Sirangkak Gadang Kabupaten Agam	%							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Talago Paninjauan Kabupaten Tanah Datar	%							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Tambangan Kabupaten Tanah Datar	%							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Mungko Banda Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar	%							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Ganting Kabupaten Tanah Datar	%							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Kandang Biru Kabupaten Tanah Datar	%							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Sijonie Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung	%							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Tabek Gadang Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung	%							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Persentase terbangun Embung Sungai Siangkek Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung	%							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.01.07			Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku								0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.01.08			Pembangunan Unit Air Baku								0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum		8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	19.639.285.927	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)		1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	3.183.439.750	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi		44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 11 ruas, 1 dokumen, 555 meter	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 555 meter	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 555 meter	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 555 meter	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 555 meter	752.542.000.000	APBD	BIDANG BINA MARGA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi		15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	9.342.727.627	APBD	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	28.965.753.526	APBD	UPTD Workshop dan Peralatan	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	60.061.714.351	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	59.256.849.674	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	50.732.531.069	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	52.440.941.791	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		1 dokumen, 118,98 km, 58,9 km	1 dokumen, 118,98 km, 58,9 km	1 dokumen, 118,98 km, 58,9 km	1 dokumen, 118,98 km, 58,9 km	1 dokumen, 118,98 km, 58,9 km	49.843.198.710	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	49.675.373.651	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1.04.02.1.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.01.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data perumahan yang berada pada kawasan bencana dan yang terkena relokasi program provinsi	%	79	79	79	0	79	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	1.04.02.1.01.02.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Tersedianya data lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	%	26	26	26	0	26	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.03.	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Tersedianya data jumlah dan kondisi rumah korban bencana yang belum tertangani	%	100	100	100	100	100	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.04.	pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Tersedianya dokumen data tingkat kerusakan rumah akibat bencana provinsi	%	100	100	100	100	100	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.05.	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi	Tersedianya Dokumen penerima rumah bagi korban bencana alam	%	100	100	100	100	100	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Tersedianya Dokumen penerima rumah terkena relokasi program provinsi	%	100	100	100	100	100	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.06.	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersedianya Dokumen data rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	%	100	100	100	100	100	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.02.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.05.	Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rembug Warga Dilaksanakan	%	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.01.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Yang Direhabilitasi	%	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.03.	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban bencana	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.04.	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rumah Terbangun Untuk Korban Bencana	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.05.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau relokasi Program Provinsi	1. Rumah Khusus untuk korban bencana dan PSU	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			2. Rumah Khusus untuk Relokasi Program Provinsi dan PSU	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.03.06.	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada relokasi Program Provinsi	Jumlah Perumahan yang menerima operasional dan pemeliharaan pada relokasi program provinsi	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
1.04.02.1.03.01. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau relokasi Program Provinsi			1. Pembagian rumah bagi korban bencana	%	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			2. Pembagian rumah bagi relokasi program provinsi	%	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	1.04.03.01.01.	Pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Terbentuk, Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Sudah Mandiri	%	12,66	12,66	12,66	0	12,66	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.01.02.	Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyadaran Publik	%	12,66	12,66	12,66	0	12,66	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.01.03.	Koordinasi dan sikronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan /permukiman kembali permukiman kumuh	Persentase Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	%	20	20	20	0	20	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.01.04.	Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman	Persentase Jumlah Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	%	4,75	4,75	4,75	0	4,75	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.01.05.	Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Persentase Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	%	4,75	4,75	4,75	0	4,75	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.01.06.	Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman	Persentase Jumlah Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	%	4,75	4,75	4,75	0	4,75	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.01.07.	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi masyarakat terdampak Program Pemugaran /peremajaan permukiman kumuh	Pelaksanaan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	%	4,75	4,75	4,75	0	4,75	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.02.01.	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah dokumen site plan dan DED	%	12,66	12,66	12,66	98,73	12,66	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemyelenggaraan pemugaran/peremajsaan /Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	%	20	20	20	20	20	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.02.03.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah RTLH pada Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.02.04.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalm kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah Kerjasama Perbaikan RTLH pada Kawasan Kumuh	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	.04.03.02.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemyelenggaraan pemugaran/peremajsaan /Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan /Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	%	20	20	20	0	20	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	.04.03.02.06.	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat Yang Terkena Program Peremajaan	Persentase Jumlah Kepala Keluarga Yang Dibantu	%	0	0	0	0	0	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
		Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha											
.04.03.02.07.		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%	0,25	0,25	0,25	0,13	0,25	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.01.01.	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Jumlah DED PSU Permukiman	%	17,26	17,26	17,26	8,71	17,26	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.01.02.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase Jumlah Pembangunan dan Peningkatan PSU	%	17,26	17,26	17,26	8,71	17,26	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Persentase Pembangunan PSU Perumahan Subsidi	%	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditangani	0,16	0,16	0,22	0,27	0,27	0,33	10.506.846.000	APBD		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana provinsi yang disusun (dokumen)		1	2	1	1	1	1.989.293.752	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di sekolah/kampus yang dilakukan (kali)		58	58	58	58	58	1.513.574.893	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di masyarakat yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	1.415.833.493	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah kampanye/publikasi media/pameran/ pembuatan baliho kebencanaan yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	151.357.490	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana yang disediakan (jenis)		2	2	2	2	2	2.262.794.857	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana kewenangan provinsi yang disusun (laporan)		1	1	1	1	1	1.816.730.291	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang disusun (laporan)		1	1	1	1	1	262.154.443	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen JITU PASNA Provinsi yang disusun (dokumen)		1	1	1	1	1	706.506.224	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap capaian JITU PASNA Provinsi (laporan)		1	1	1	1	1	1.289.153.828	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan risiko bencana yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)		-	20	20	20	20	83.806.900	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Jumlah pertemuan/koordinasi/ event/pelatihan antar stakeholder dalam rangka pengelolaan risiko bencana (kali)		1	2	2	1	1	1.643.481.432	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Jumlah kerjasama antar lembaga dalam rangka pengelolaan risiko bencana (perjanjian kerjasama)		-	1	1	1	1	213.707.594	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													
1.06.02.1.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi			100%	100%	100%	100%	100%	4.009.706.357	APBD		DINAS SOSIAL
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi			100%	100%	100%	100%	100%	3.008.841.147	APBD		DINAS SOSIAL
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			100%	100%	100%	100%	100%	11.222.407.470	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
1.06.04.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	2.542.181.040	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	3.938.400.010	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.458.043.670	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.147.180.348	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			100%	100%	100%	100%	100%	1.512.355.372	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	61.477.930	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	39.077.524	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	557.744.231	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	2.601.344.898	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	3.431.910.297	APBD		DINAS SOSIAL
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	3.052.550.000	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	25.989.423.985	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	11.098.003.408	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni"			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Padang Panjang)										
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	100%	100%	100%	1.292.115.417	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	1.791.247.635	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	1.098.338.016	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		100%	100%	100%	100%	100%	5.189.335.000	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	100%	100%	100%	45.031.218	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	23.879.671	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	81.528.726	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	100%	100%	100%	3.658.551.384	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	4.327.476.056	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	100%	100%	100%	3.506.951.067	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	4.633.022.891	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		100%	100%	100%	100%	100%	2.442.040.000	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	92.387.257	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	57.421.519	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	220.065.045	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	175.826.880	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	102.565.680	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	308.425.378	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	8.613.990.845	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	5.487.569.135	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	1.854.958.932	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	924.858.302	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	123.841.954	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW)			100%	100%	100%	100%	100%	67.235.564	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2022	2023	2024	2025	2026					
1			2	3	4					5	6	7	8	
			"Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)											
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	1.108.736.741	APBD		DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	1.977.743.371	APBD		DINAS SOSIAL
			Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	198.415.750	APBD		DINAS SOSIAL
			Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	94.018.540	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)			100%	100%	100%	100%	100%	3.572.895.952	APBD		DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)			100%	100%	100%	100%	100%	713.375.318	APBD		DINAS SOSIAL
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)			100%	100%	100%	100%	100%	73.658.032	APBD		DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)			100%	100%	100%	100%	100%	2.008.156.648	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)		Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	311.732.511	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.05.1.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	4.628.215.015	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
1.06.06.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	1.315.646.608	APBD		DINAS SOSIAL
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	2.648.089.567	APBD		DINAS SOSIAL
			Pelayanan Dukungan Psikososial			100%	100%	100%	100%	100%	1.303.681.833	APBD		DINAS SOSIAL
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan	Orang	8,31	8,53	8,75	8,97	8,97	76.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Tersedianya sarana dan prasarana layanan terpadu satu pintu bagi calon PMI	Unit	1	1	1	1	1	7.500.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja yang dinilai	Orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	2.625.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Aparatur tenaga kerja yang dilatih	Orang	50	50	50	50	50	1.750.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pelayanan Antar Kerja	Tenaga Kerja yang ditempatkan	Orang	6250	6250	6250	6250	6250	1.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang disuluh dan dibimbing	Orang	250	250	250	250	250	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	[1] Jumlah Pembinaan Petugas AKAD	Orang	[1] 50	[1] 50	[1] 50	[1] 50	[1] 50	2.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			[2] Jumlah Peserta sosialisasi AKAD	Orang	[2] 200	[2] 250	[2] 300	[2] 350	[2] 350	0	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			[3] Jumlah Peserta Workshop (AKAD, AKL dan AKAN)	Orang	[3] 100	[3] 150	[3] 200	[3] 250	[3] 250	0	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja usaha mandiri	Orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Informasi Pasr Kerja Online	Orang	15	15	15	15	15	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Job Fair/Bursa Kerja	Persentase penyerapan pencari kerja terhadap lowongan yang tersedia di perusahaan peserta job fair	Persen	150	150	150	150	150	4.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pelindungan PMI (pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	300	300	300	300	300	3.500.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penyediaan layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah peserta sosialisasi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) calon pekerja migran (PMI)	Orang	1	1	1	1	1	8.600.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang diberdayakan	Orang	100	100	100	100	100	3.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Penetapan Upah Minimum (UMP)	SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)								292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penetapan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)								292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah kepesertaan pekerja diperusahaan pada jaminan sosial dan dipenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja sesuai aturan	Perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan PPRG	Orang	40 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	250.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	330.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		[1] PKS; [2] kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	325.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								17.800.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan dan ternak kecil) yang diberdayakan	248 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pelatihan/Bimtek pengolahan, manajemen usaha dan pemasaran yang terlaksana		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pembinaan, pameran produk olahan pangan lokal dan pertemuan koordinasi dengan Stakeholder terkait yang terlaksana		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah kelompok pangan lokal yang dibina	12 Kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	0	APBD		DINAS PANGAN
		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan								4.659.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat yang dibina	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah kegiatan promosi produk kelompok tani dan pelaku usaha yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah kategori penilaian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara yang dilaksanakan	3 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	0	APBD		DINAS PANGAN
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								2.579.000.000	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah media cetak untuk promosi Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah penyaluran bantuan bahan pangan alternatif pengganti beras yang dilaksanakan	1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional yang diikuti	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)							806.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jumlah media cetak untuk Pemasyarakatan Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang disediakan	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah rapat koordinasi dan sosialisasi, rapat koordinasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun							671.000.000	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan masyarakat yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah sosialisasi, rapat koordinasi dan pembahasan Pola Pangan Harapan (PPH) yang dilaksanakan	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan makanan							1.711.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jumlah data/informasi harga pangan pada 19 kab/kota yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah buku neraca bahan makanan (NBM) yang tersedia	1 Dokumen	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah sosialisasi, rapat koordinasi dan pembahasan harga pangan dan neraca bahan makanan yang terlaksana	2 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya										537.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jumlah data/informasi distribusi dan akses pangan pada 19 kabupaten/kota yang tersedia.	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pelatihan, pemantauan dan rapat koordinasi yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
					-	-	-	-	-	8.572.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jenis Bahan Pangan dalam rangka operasi pasar, gelar pangan murah yang didistribusikan	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan strategis		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah bazar/pasar murah bahan pangan yang dilaksanakan	78 kali	150 kali	150 kali	150 kali	150 kali	150 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	22 kelompok	33 Kelompok	38 Kelompok	43 Kelompok	48 Kelompok	48 Kelompok	509.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disediakan	0 Ton	100 Ton	100 ton	100 ton	100 ton	6.847.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75		0 APBD		DINAS PANGAN
			Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75		0 APBD		DINAS PANGAN
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota								1.477.000.000	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
		Jumlah peningkatan kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota dalam penyusunan peta	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	ketahanan dan kerentanan pangan pada 19 kab/kota yang dilaksanakan										
	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat provinsi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		0 APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
	Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota Dalam Penyusunan Peta SKPG Pada 19 Kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN
	Jumlah pemetaan situasi pangan dan gizi di Sumatera Barat yang dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		0 APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
	Jumlah sumber daya manusia Analis Ketahanan Pangan dan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (Fungsional AKP, PMPH dan APHP)	20 orang	28 orang	32 orang	36 orang	40 orang	44 orang		0 APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN
	Jumlah pelatihan/Bimtek Fungsional, aparatur dan masyarakat	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah data/informasi data komditi, lokasi, tanggal tanam, jadwal panen dan jumlah produksi	-	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota		0 APBD		DINAS PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan Pangan Provinsi							58.173.000.000	APBD	Nagari/Desa /kelurahan Mandiri Pangan	DINAS PANGAN
	Jumlah Nagari yang difasilitasi sarana/prasarana/ Bimtek iptek pada nagari mandiri pangan yang dilaksanakan	98 Nagari	110 Nagari	125 Nagari	135 Nagari	150 Nagari	150 Nagari		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Nagari yang dilakukan pembinaan dan Money di Nagari Mandiri Pangan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Koordinasi Pokja Ahli Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah data/ informasi data sumberdaya pangan strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Pengembangan Sumberdaya Pangan Strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota		0 APBD		DINAS PANGAN
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan							61.184.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
		Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
			Jumlah masyarakat yang terdampak dan beresiko rawan pangan dan gizi serta stunting yang dibantu	495 KK	1.000 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pembinaan, sosialisasi dalam rangka antisipasi dan penanganan kejadian rawan pangan yang dilaksanakan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN													
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab/Kota		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi								18.621.000.000	APBD	19 kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jumlah hasil uji laboratorium pangan yang beredar	50 sampel	250 sampel	250 sampel	250 sampel	250 sampel	250 sampel		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pengawasan keamanan pangan terpadu yang dilaksanakan	-	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Kab/Kota yang mengikuti KIE keamanan pangan		19 Kab/kota	19 Kab/kota	19 Kab/kota	19 Kab/kota	19 Kab/kota		0 APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Prima yang diterbitkan	100 sertifikat						4.920.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Terbitnya sertifikat Prima	100 sertifikat	86 sertifikat	86 sertifikat	86 sertifikat	86 sertifikat	86 sertifikat		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah hasil uji laboratorium ditingkat produsen	50 buah	55 buah	60 buah	65 buah	70 buah	75 buah		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pelaku usaha pangan segar hasil pertanian yang telah memiliki sertifikat prima yang disurvei	60 PUA	60 PUA	65 PUA	70 PUA	75 PUA	80 PUA		0 APBD		DINAS PANGAN
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH													
Kegiatan 1: Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Sub kegiatan 1: Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan pendataan dan penggalan informasi tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	kelompok masyarakat	0	2	2	2	2	146.405.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah kelompok yang difasilitasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA	orang/ kelompok	1	0	0	0	0	45.900.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Sub Kegiatan 2: Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA yang dilakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan / kemitraan / penguatan kelembagaan	kelompok masyarakat	0	1	1	1	1	60.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	kali	4	4	4	4	4	309.533.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil	kali	3	2	3	3	3	376.689.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	orang	1	2	2	2	2	250.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	180.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Terfasilitasinya Penilaian Posyantek Tingkat Nasional 2. Terlaksananya Penilaian Inovator dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat 3. Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Terikutinya Gelar TTG Tingkat Nasional 4. Terlaksananya pelatihan Posyantek Tingkat		7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3. 2?kali 2. 19?Kab/Kota 1. 1?kali	7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3. 2?kali 2. 1?kali	7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3. 2?kali 2. 1?kali	7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3. 2?kali 2. 1?kali	7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3. 2?kali 2. 1?kali	1.600.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1	2		3	4					5	6	7	8	
			Provinsi Sumatera Barat 5. Terlaksananya Penilaian KP-SPAMS Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat 6. Terlaksananya Penilaian Posyantek Tingkat Provinsi Sumatera Barat 7. Terlaksananya Sosialisasi KP-SPAMS Sumatera Barat										
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam PemanfaatanTTG		1. Terfasilitasinya Penilaian Posyantek Tingkat Nasional 2. Terlaksananya Penilaian Inovator dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat 3. Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Terikutinya Gelar TTG Tingkat Nasional 4. Terlaksananya pelatihan Posyantek Tingkat Provinsi		1. 1?kali 19?Kab/Kota 3. 2?kali 30?orang	1. 1?kali 19?Kab/Kota 3. 2?kali 30?orang	1. 1?kali 19?Kab/Kota 3. 2?kali 30?orang	1. 1?kali 19?Kab/Kota 3. 2?kali 30?orang	1. 1?kali 19?Kab/Kota 3. 2?kali 30?orang	1.100.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis Pembinaan yang dilakukan	jenis	2	2	2	2	2	700.000.000	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.1.01.05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah pembinaan ketahan keluarga	kali	-	-	-	-	-	0	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.1.01.09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Kebijakan yang disediakan	Kebijakan	-	-	-	-	-	0	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah peserta pelathan Pengasuhan 1000HPK	orang	50	50	50	50	50	350.000.000	APBD			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.01.15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK			-	-	-	-	-	0	APBD			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		-	-	-	-	-	0	APBD			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.02.02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah pemeberdayaan Kelompok masyarakat di kakabeti sesuai kearifan lokal	kakabeti	-	5	5	5	5	600.000.000	APBD			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.02.05	Fasiliitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat di kakabeti sesuai kearifan lokal	kakabeti	5	5	5	5	5	650.000.000	APBD			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN													
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta pelatihan Akuntansi bagi pengurus dan pengawas koperasi Jumlah peserta pelatihan Akuntansi syariah berbasis IT bagi KSPPS/USPPS Koperasi Jumlah peserta pelatihan pengawasan koperasi bagi gerakan koperasi anggota lintas Kab./kota Jumlah peserta pelatihan							48.944.586.700	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			pengawasan koperasi bagi pembina Jumlah peserta pelatihan penguatan Kelembagaan bagi pengurus koperasi Jumlah peserta pelatihan penguatan pengawasan bagi pengurus/pengawas koperasi Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi generasi muda Jumlah peserta pelatihan perkoperasian pola syariah Jumlah peserta pelatihan sertifikasi dewan sayariah bagi KSPPS/USPPS Koperasi Jumlah peserta pelatihan sertifikasi kompetensi koperasi jasa keuangan bagi pengurus/pengawas dan pengelola										
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah peserta pelatihan ekspor bagi KUKM Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi UKM Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha bagi UKM di kawasan wisata Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha dan inovasi Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha UMKM							29.414.371.800	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terfasilitasi perluasan akses pasar koperasi Terlaksananya pembinaan usaha sektor riil menuju kemitraan Terlaksananya penataan manajemen dan perkuatan usaha koperasi Terlaksananya restrukturisasi usaha koperasi							15.730.105.662	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Dokumen data koperasi yang akurat Jumlah Koperasi baru Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan/pembinaan kelembagaan Terfasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi Terfasilitasinya peningkatan peran koperasi syariah							19.073.364.772	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Terfasilitasinya akses UMKM ke bank dan lembaga non bank Terfasilitasinya pendaftaran merk dan sertifikat halal UKM Terfasilitasinya perlindungan hukum dan konsultasi usaha bagi UKM Terlaksananya pembekalan keterampilan bagi wirausaha baru Terlaksananya pembinaan kelembagaan UKM di lokasi strategis							32.129.900.000	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Fasilitasi perluasan pasar produk UKM sumatera barat Terfasilitasinya pendampingan pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil menengah (PLUT-KUMKM) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk unggulan sumatera barat Terlaksananya pengembangan UKM kerajinan Terlaksananya peningkatan kapasitas kewirausahaan							60.040.650.000	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL													
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya peraturan Gubernur ttg. pedoman dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	Peraturan Gubernur	1	-	-	-	1	753.708.000	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Orang	80	80	80	80	80	0	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Tersedianya Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal	Keputusan Gubernur	-	1	-	1	-	0	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya laporan evaluasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	laporan	-	-	1	1	1	195.247.000	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN													
2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		380	380	380	380	380	6.000.000.000	APBD		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Kewenangan Provinsi													
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Permuseuman	kali	2	2	2	2	2	3.000.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Pembentukan Tim Penilai Pendirian Museum Pemerintah di Kabupaten/Kota	Tim Provinsi	1	0	0	0	0	350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Pendampingan Calon Museum Baru	Calon Musuem	3	3	3	3	3	1.900.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Registrasi Museum Nagari/Pemerintah	Museum	24	1	1	1	1	350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Terlaksananya Pemilihan Duta Budaya Sumatera Barat Tahun 2022	kali	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Riset terhadap kesenian yang hampir punah	dok	2	2	2	2	2	500.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kebudayaan	kali	3	3	3	3	3	3.305.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah								0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		Penetapan Cagar Budaya	Ditetapkan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	CB tidak bergerak	5	5	5	5	5	2.700.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Ditetapkan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	CB bergerak	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		b.??? Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan	orang	10		10		10	450.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Revitalisasi Sarana dan Prasarana UPTD TAMAN BUDAYA	paket	5	5	5	5	5	1.600.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Temnu Karya Taman Budaya Tk. Nasional	kali	1	1	1	1	1	1.840.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Temnu Karya Taman Budaya Tk. Regional	kali	1	1	1	1	1	1.350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya Penatakelolaan Adat Istiadat	kab/kota	19					0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Bimbingan bagi Wali Nagari se-Sumatera Barat							0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Tersusunnya Konsep Nagari Madani		100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Festival/pelindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan	wbtbi kali	5	5	5	5	5	10.000.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Pencatatan, Penetapan, Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbi)		50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	5.000.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara	kali	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Kemah Budaya	kali	1	1	1	1	1	2.350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Bimtek kepada penggiat sejarah	kali	1		2			300.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Bertambahnya ODCB di Sumatera Barat	ODCB	10	10	10	10	10	2.700.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		a.??? Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu.	Jumlah kajian/ penelitian koleksi	kajian	6	6	5	6	6	3.150.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Jumlah koleksi yang dikonservasi	koleksi	700	700	800	700	700	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Jumlah naskah kuno yang ditransliterasi	naskah	2	2	2	0	0	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Pendokumentasian koleksi dan label QR	koleksi	500	500	1000	500	500	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terjemahan dan Entry Informasi Koleksi ke Bahasa Inggris	koleksi	1000	1000	1000	1000	0	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya sekolah pantai, Pemilihan Putra Putri Maritim, Forum Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan Pesisir dlm rangka kesetaraan gender, Tracking ,Mangrove, bersih pantai, Peningkatan sarpras di pulau2 kecil	kab/kota	7	7	7	7	7	11.950.000.000	APBD	Prov. Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Forum Koordinasi Mitra Konservasi dan Peningkatan Kelembagaan peningkatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama	kab/kota	7	7	7	7	7	3.155.628.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,	Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan, Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan, Sosialisasi	kab/kota	7	7	7	7	7	3.165.000.000	APBD	DKP Provinsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			perlindungan nelayan,Asuransi Nelayan / Perlindungan Nelayan										
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pembangunan dan penyediaan prasarana pelabuhan Perikanan wilayah II (Rehabilitasi fasilitas untuk 4 PPI (bangis, Sasak, Tiku, Pasir Baru, pagar keliling utk 4 PPI, pabrik es di Sasak, mess nelayan PPI air Bangis, pembuatan dokumen lingkungan PPI tiku dan Pasir baru, fasilitas MCK utk 4 PPI, pemb pos jaga PPI pasir baru, pengerukan kolam pelabuhan)	lokasi	4	4	4	4	4	38.250.000.000	APBD	PPW II	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pembangunan dan penyediaan prasarana pelabuhan Perikanan wilayah III (sumur bor pengadaan air bersih, Genset pabrik es, perluasan dermaga, perbaikan jalan komplek, Mess, pagar keliling, cetakan es ,tiang tambat kapal , peralatan bengkel, MCK, rehab rumah nelayan, kendaraan operasional	lokasi	1	1	1	1	1	19.175.000.000	APBD	PPW III	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan Ikan Kerapu Pada Kawasan Sentra Produksi	kawasan	5	5	5	5	5	10.630.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	TMMD, Kelembagaan BBI, Pokdakan dan UPR ,Peningkatan SDM Forum Pengelolaan BBI Se-Sumatera Barat,Pengembangan Tambak Milinial Budidaya Udang Vaname							5.281.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan praarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan mutu dan peningkatan mutu benih							1.881.494.009	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	pelatihan dan Pembinaan CBIB, Pengadaan rumput laut dan Sarana Parasarana, Percontohan Budidaya Lobster, Percontohan Pengembangan Budidaya Kepiting Bakau, apartemen kepiting	kab/kota	5	7	8	9		19.900.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	a. Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Pokok UPTD (bak Pakan alami/Bak Tandon air Laut/rumah packing benih, sumur air tawar/gedung kantor/gedung laboratorium/mes karyawan/Mushollah Turap, dll) (DAK/APBD)	lokasi	2	2	2	2	2	13.650.000.000	APBD	Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Benih Ikan dan Benur Udang Vanname. (ekor/ tahun) [benih ikan uk. 10 cm dan Benur Udang PL8-PL10], pengembangan percontohan budidaya lobster, udang vaname dan kepiting bakau)	lokasi	2	2	2	2	2	10.000.000.000	APBD	Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Personil (SDM) Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Laut dan Payau yang dilatih, In House Training	lokasi	2	2	2	2	2	1.190.000.000	APBD	Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan dan pelestarian spesies endemik (jenis ikan)	lokasi	1	1	1	1	1	10.800.000.000	APBD	Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN												
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	kab/kota	19	19	19	19	19	13.880.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan	unit	1	1	1	1	1	5.860.962.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Skala Menengah dan Besar		Pemasaran Skala Menengah dan Besar	(waterbath, inkubator,, alat uji lemak), Pengadaan alat-alat laboratorium lainnya (Meja preparasi, lemari jas lab , kursi labor lemari penyimpanan alat organoleptik), Pengadaan suku cadang alat Laboratorium (HPLC, AAS. alat laboratorium lainnya), Rehab kantor/ laboratorium /pagar dan cat gedung kantor										
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Survailen UPI yang mempunyai SKP, Pengawasan Sanitasi Kekerangan, Verifikasi UPI untuk rekomendasi SKP, Pengawasa Terpadu Pemakaian Bahan berbahaya, RSNl, Pengembangan Kapasitas PPMHP dan Temu teknis PPMHP, Penyediaan Bahan kimia, Inhouse Training pengujian Kimia, Mikrobiologi dan Organoleptik ,Pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan Laboratorium	kab/kota	10	12	12	12	15	4.460.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi									0 APBD		DINAS PARIWISATA
Pengelolaan Kawasan Stratgis Pariwisata Provinsi		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									0 APBD		DINAS PARIWISATA
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL													
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik									0 APBD		DINAS PARIWISATA
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan									0 APBD		DINAS PARIWISATA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata									0 APBD			DINAS PARIWISATA
	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan									0 APBD			DINAS PARIWISATA
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata									0 APBD			DINAS PARIWISATA
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif									0 APBD			DINAS PARIWISATA
										0 APBD			DINAS PARIWISATA
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									0 APBD			DINAS PARIWISATA
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
(1) Keg. Pengawasan Mutu Penyediaan dan peredaran Benih tanaman			1. Jumlah Benih Tan. Pangan yang disertifikasi	ton	3.082	4.132	5.182	6.332	7.500	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			2. Jumlah Benih Tan. Buah-buahan yang disertifikasi	batang	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			5. Jumlah produsen benih perkebunan	Kelompok	50	50	50	50	50	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			6. Jumlah Benih Tan. Perkebunan yang disertifikasi	batang	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			7. Penyaluran Benih Bersertifikat Komoditas Perkebunan, Tan. Pangan dan Hortikultura	%	100	100	100	100	100	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			5. Penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung lainnya	%	100	100	100	100		0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			8. Meningkatnya Penggunaan Alsintan	unit	3.018	3.118	3.218	3.318		0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	9. Penyaluran Benih Bersertifikat untuk komoditi :							0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kelapa Sawit	Batang	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- KaKao	Batang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kopi	Batang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Karet	Batang	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kelapa	Batang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Gambir	Batang	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Padi	ton	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Jagung	ton	120	120	120	120	120	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Cabe	gram	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Bawang Merah	ton	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Manggis	batang	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	- Jeruk	batang	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	10. a. Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan Tan. Pangan tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Kelapa Sawit	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Kakao	paket	40	40	40	40	40	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Kopi	paket	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Karet	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Kelapa	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Gambir	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- SL PTT Padi (Jarwo)	unit	80	80	80	80	80	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	b. Penerapan GAP/SOP komoditas Hortikultura tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP Cabe	paket	30	30	30	30	30	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP Bawang	paket	30	30	30	30	30	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Penerapan GAP/SOP manggis	paket	35	35	35	35	35	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP Jeruk	paket	25	25	25	25	25	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	11. a. Penerapan GHP komoditas perkebunan tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Kakao	paket	16	16	16	16	16	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Kopi	paket	16	16	16	16	16	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Karet	paket	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Gambir	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Perkebunan Lainnya	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	11.b Penerapan GHP komoditas Hortikultura tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Cabe	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Bawang Merah	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Manggis	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			- Jeruk	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			-Horti lainnya	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			12. Pelatihan Pengolahan hasil komoditas Hortikultura	unit	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			13. Pelatihan teknis agribisnis komoditas Hortikultura	angkatan	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap Pengawasan Peredaran Sarana peternakan yang dilaksanakan	Kali		10	10	10	20	250.000.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap Pengawasan Peredaran Sarana peternakan yang dilaksanakan	Laporan		1	1	1	1	0	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Kali	3	3	3	3	4	2.215.000.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				uraian : 1) Meningkatnya kemampuan teknologi di Bidang Pengolahan pakan		1	1	1	1	1	855.000.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				2) Meningkatnya kemampuan petugas reproduksi ternak		2	2	2	2	3	1.360.000.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang dilakukan	Kali	37	37	37	37	37	37.510.671.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Jumlah laporan pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disusun	Laporan	4	4	4	4	4	0	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	uraian : 1) Kontes Ternak	Kali	1	1	1	1	1	5.500.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2) Peningkatan produksi semen beku, pemanfaatan teknologi reproduksi (IB dan ET) dan Produktifitas ternak sapi	Kali	12	12	12	12	12	18.770.671.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3) Peningkatan produktifitas bibit ternak unggas	Kali	12	12	12	12	12	6.870.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	4) Peningkatan produktifitas bibit ternak ruminansia	Kali	12	12	12	12	12	6.370.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	rekomendasi	50	52	53	54	56	6.690.000.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	uraian : 1) Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi	rekomendasi	9	11	12	13	15	660.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2) Terjaminnya ketersediaan pakan ternak (Bank Pakan) (5 kelompok)	Kelompok	5	5	5	5	5	2.650.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3) Tersedianya ternak bibit bersertifikat (SKLB)	rekomendasi	18	18	18	18	18	690.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	4) Tersedianya usaha Pembibitan ternak yang bersertifikat (SKPT)	rekomendasi	5	5	5	5	5	620.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	5) Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian sampel pakan secara aktif maupun pasif servis (sampel)	rekomendasi	18	18	18	18	18	2.070.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
3.27.02.1.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak			Jumlah Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak yang dilakukan	Kali	20	20	20	20	20	625.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Jumlah laporan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak yang disusun	Laporan	1	1	1	1	2	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang disediakan	Komoditi	8	8	8	8	8	332.024.326.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.27.03.1.02.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pengendalian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (kawasan sentra produksi peternakan) yang dilakukan	Kali	20	20	20	20	20	750.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Jumlah laporan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (kawasan sentra produksi peternakan) yang disusun	Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				uraian : 1) Pengembangan ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi.	Kali		20	20	20	20	600.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
					Laporan		1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				2) Meningkatnya kawasan sentra produksi peternakan	Kali	20					150.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
					Laporan	1					0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis yang dilakukan	Kali	100	100	100	100	100	36.795.328.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Jumlah laporan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit	Laporan	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Hewan dan Zoonosis yang disusun										HEWAN
			Uraian : Penurunan kasus PHMS (rabies, AI, Jembrana, SE) dan Zoonosis; penanggulangan kejadian penyakit yang diakibatkan gangguan reproduksi; TOT pengendalian dan penanggulangan PHMSZ; Pembinaan, pengawasan, penyidikan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit, epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya, Database/ peta PHMSZ, dll	Kab/Kota	19 19					29.605.328.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Kali	20					200.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Ekor	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.950.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Kab/Kota	19					500.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Kali	20					250.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Kali	20	20	20	20	20	1.250.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Orang	100	100	100	100	100	2.000.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
(1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			1. Pengendalian OPT Kakao	Kali	40	40	40	40	40	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			2. Pengendalian OPT Kopi	Kali	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			3. Pengendalian OPT Karet	Kali	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	4. Pengendalian OPT Kelapa	Kali	12	12	12	12	12	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	5. Pengendalian OPT Tan. Pangan	unit	40	40	40	40	40	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	6. penerapan PHT Padi dan Jagung	unit	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	7. Insentif benih padi bagi penangkar	Rp	500/kg untuk 2.157 .000 Kg benih	500/kg untuk 2.892.000 Kg benih	400/kg untuk 3.627.000 Kg benih	400/kg untuk 4.432.000 Kg benih	400/kg untuk 4.432.000 Kg benih	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	8. Terlaksananya pembinaan dampak perubahan iklim TTHP	Kab/Kota	18	18	18	18	18	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	9. Pembinaan petani pengamat hama	orang	75	75	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	10. Penyediaan sarana Brigade perlindungan Tanaman	unit	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	11. Pengawasan mutu standar pestisida	sampel	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	12. Terlaksananya money gas rumah kaca	Kab/Kota	18	18	18	18	18	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	13. Penerapan PHT Cabe	unit	11	11	11	11	11	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	14. Penerapan PHT Bawang	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	15. Penerapan PHT Manggis	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
		16. Penerapan PHT Jeruk	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
		17. Klinik PHT Kakao	unit	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
		18. Gerakan Pengendalian OPT Cabe	Ha	110	110	110	110	110	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
		19. Gerakan Pengendalian OPT Manggis	Ha	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
		20. Gerakan Pengendalian OPT Jeruk	Ha	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
		21. Sarana Klinik PHT Komoditas Cabe dan Bawang	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
		22. Asuransi Usaha Tani padi	Ha	8.500	9.000	10.000	11.000	12.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
		23. Pembinaan Regu Pengendalian OPT Perkebunan	Orang	90	90	90	90	90	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
		24. Penerapan PHT Pada pengendalian OPT Kopi	lokasi	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan		Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit	10	10	10	10	10	870.445.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang terbangun	300	300	300	300	300	23.002.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif	400	400	400	400	400	5.255.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA													
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Ekosistem		10	10	10	10	10	45.205.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi	Kelompok	50	50	50	50	50	11.535.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah usulan Perhutanan Sosial	Kelompok	30	30	30	30	30	3.262.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah anggota Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	orang	300	300	300	300	300	5.412.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah fasilitasi kewirausahaan	Kali	100	100	100	100	100	14.229.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Alat Ekonomi Produktif yang difasilitasi	unit	100	100	100	100	100	63.233.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN													
3.29.06.1.06 Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Tersedianya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	282.400.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terbangunnya Instalasi Listrik bagi Kelompok Masyarakat tidak Mampu yang dilewati jaringan listrik		1200 KK	1200 KK	1100 KK	1000 KK	800 KK	84.323.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya data dan informasi awal potensi energi			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	200.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terseidanya data Ratio Elektrifikasi (RE) dan Ratio Desa Berlistrik (RD) Terverifikasi DJL dan PLN			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	165.028.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terbangunnya PLTS Tersebar/SHS Revit PLTMH		20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	1.050.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
3.29.06.1.06.07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Tertatanya pengelolaan pembangkit EBT Perdesaan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	308.886.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING													
Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah data dan informasi barang penting di tingkat distributor	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	202.820.000	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah operasi pasar/pasar murah yang dilakukan	kali	7 kali	7 kali	8 kali	8 kali	8 kali	1.333.761.500	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1) Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek dan diversifikasi produk 2) Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi dan standarisasi produk industri (sertifikat halal, MD, SNI, Merk, HACCP)	IKM	975 147	650 147	975 160	975 175	975 192	35.290.469.000	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			3) Jumlah wirasaha baru sektor industri	orang	1136 orang	1355 orang	1500 orang	1700 orang	1800 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			INDUSTRI NON AGRO*							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM sentra kulit yang mendapatkan diversifikasi produk	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan diversifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil	IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengembangan produk olahan semen	IKM	50 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan produksi barang-barang dari bahan baku karet	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah IKM sentra kerajinan yang mendapatkan bimbingan teknis pengolahan limbah kelapa	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengolahan sepatu	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	INDUSTRI AGRO'							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis HaKI bagi IKM	IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis peningkatan kualitas kemasan dan label	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan makanan ringan	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat standarisasi produk industri (Sertifikat halal, MD, sertifikat GMP, dan merk)	sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis CPPOB	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang bertambah kemampuannya dalam melakukan diversifikasi produk berbasis gambir	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan minuman	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan peningkatan kualitas VCO	IKM	30 IKM	35 IKM				0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UPTD PPMATSIRI							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi minyak atsiri	IKMWWUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah enterpreneur yang mengikuti manajemen kewirausahaan minyak	WUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	atsiri										PERDAGANGAN
	Jumlah IKM minyak atsiri yang mengikuti sosialisasi standarisasi minyak atsiri		50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Penghasil minyak atsiri yang mengikuti temu usaha minyak atsiri			50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Minyak Atsiri yang mendapatkan pelatihan teknis dan fasilitasi uji labor minyak atsiri		50 IKM, 5 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah operator alat suling minyak atsiri yang berkompeten			10 orang	10 orang	15 orang	15 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan penunjang kegiatan pelayanan(2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)		3 alat (2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah rumahan alat suling 2 unit							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan dan aplikasi ekonomi digital minyak atsiri serta operasional pelayanan ekonomi digital			1 KEGIATAN	20 KM	40 IKM	40 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah fasilitas penelitian dan pengembangan minyak atsiri			1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Menjalin kerjasama dengan instansi peneliti minyak atsiri dan buyer minyak atsiri					1 MOU	1 MOU	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UPTD LOGAM							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi prototipe teknologi tepat guna	orang	20 orang	150 orang	150 orang		150 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan rekayasa peralatan dan perkakas bantu mesin pengolahan rotan	IKM						0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat kompetensi pengelasan	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah rekayasa dan rancang bangun teknologi tepat guna yang dihasilkan	unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan pelatihan rancang bangun dan perekayasaan alat teknologi tepat guna	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan bimbingan teknis, manajemen dan legalitas usaha perbengkelan	IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM Pengolahan yang mendapatkan pelatihan penggunaan teknologi tepat guna	IKM	20 IKM			20 IKM		0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah enterpreneur IKM logam mesin yang mendapatkan bintek produksi	orang	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang dinilai perwujudannya	Kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	192.070.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah pengurusan dan penyelesaian konsolidasi tanah dan HPL yang dilakukan bersama instansi terkait	Tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	192.070.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum yang disiapkan untuk lingkungan hunian penduduk setempat	Persen	100	100	100	100	100	219.495.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Persentase TPS yang dikembangkan permukimannya di SP	Persen	100	100	100	100	100	219.495.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kab/Kota dalam Provinsi	Persentase KK yang dipindahkan dan ditempatkan	Persen	100	100	100	100	100	219.495.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pelatihan Transmigrasi	Persentase pelatihan transmigrasi yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	1.008.504.375	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase KK (Kepala Keluarga) yang dibina	Persen	100	100	100	100	100	457.806.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman			Persentase penguatan/penambahan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan yang dikembangkan	Persen	100	100	100	100	100	306.354.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH													
Fasilitasi Kerjasama Daerah		Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah izin perjalanan dinas luar negeri KDH/WKDH,	dokumen	1	1	1	1	1	3.950.500.000	APBD		BIRO PEMERINTAHAN
			Jumlah kerjasama pemerintah yang difasilitasi	laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		BIRO PEMERINTAHAN
			Jumlah kerjasama wajib yang difasilitasi	laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		BIRO PEMERINTAHAN
			Jumlah rapat koordinasi kerjasama daerah yang dilaksanakan	kali	1	1	1	1	1	0	APBD		BIRO PEMERINTAHAN
4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT													
Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar		Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan	terfasilitasinya pengembangan pelayanan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan		20%	40%	60%	80%	100%	4.129.468.150	APBD		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Kesehatan	terfasilitasinya pengembangan pelayanan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan		20%	40%	60%	80%	100%	1.747.804.400	APBD		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Sosial	terfasilitasinya pengembangan pelayanan kesejahteraan rakyat bidang sosial		20%	40%	60%	80%	100%	1.852.179.800	APBD		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya fasilitasi kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata		20%	40%	60%	80%	100%	3.873.358.000	APBD		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan wanita dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Terlaksananya fasilitasi kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar bidang pemberdayaan wanita dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		20%	40%	60%	80%	100%	2.750.000.000	APBD		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian		1	1	1	1	1	667.300.125	APBD		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Tersedianya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		26 Sekolah	27 Sekolah	28 Sekolah	29 Sekolah	30 Sekolah	240.395.654.807	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik		2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	580.191.281	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Terpenuhinya Perlengkapan Didik Peserta SLB		2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	1.160.382.562	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Lokasi yang berpotensi bencana dan/atau yang terdampak krisis akibat bencana tingkat Provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai standar		7	7	7	7	7	36.160.517.745	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	3	3	3	1.678.023.764	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	4	800.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	14	14	7.089.966.231	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	5	5	6	6	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	3	3	3	4	796.000.582	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
1.06.04.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	2.542.181.040	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	3.938.400.010	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	1.458.043.670	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	1.147.180.348	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		100%	100%	100%	100%	100%	1.512.355.372	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	61.477.930	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	39.077.524	APBD		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	557.744.231	APBD		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG)		100%	100%	100%	100%	100%	2.601.344.898	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	"Harapan Ibu" Padang)											
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	3.431.910.297	APBD		DINAS SOSIAL
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	3.052.550.000	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	25.989.423.985	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	11.098.003.408	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	1.292.115.417	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.791.247.635	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.098.338.016	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			100%	100%	100%	100%	100%	5.189.335.000	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	45.031.218	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	23.879.671	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial			100%	100%	100%	100%	100%	81.528.726	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)											
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	3.658.551.384	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	4.327.476.056	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	3.506.951.067	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	4.633.022.891	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			100%	100%	100%	100%	100%	2.442.040.000	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	92.387.257	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	57.421.519	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	220.065.045	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	175.826.880	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	102.565.680	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	308.425.378	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	8.613.990.845	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	5.487.569.135	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	1.854.958.932	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	924.858.302	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	123.841.954	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	67.235.564	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	1.108.736.741	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	1.977.743.371	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	198.415.750	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	94.018.540	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	100%	100%	100%	3.572.895.952	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)			100%	100%	100%	100%	100%	713.375.318	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)					100%	100%	100%	100%	100%	73.658.032	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)					100%	100%	100%	100%	100%	2.008.156.648	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)		Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	311.732.511	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.05.1.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	4.628.215.015	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
1.06.06.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	1.315.646.608	APBD		DINAS SOSIAL
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	2.648.089.567	APBD		DINAS SOSIAL
			Pelayanan Dukungan Psikososial			100%	100%	100%	100%	100%	1.303.681.833	APBD		DINAS SOSIAL
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah kepesertaan pekerja diperusahaan pada jaminan sosial dan dipenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja sesuai aturan	Perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.														
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.														
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah		Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Petugas yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	50	50	50	50	50	1.589.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Kabupaten Kota													
		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	LPTKS yang diawasi dan dikendalikan	perusahaan LPTKS	25	25	25	25	25	1.050.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pelindungan PMI (pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	300	300	300	300	300	3.500.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegritas secara	Jumlah perusahaan yang diberikan rekomendasi izin cabang	Perusahaan	50	50	50	50	50	1.750.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penyediaan layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah peserta sosialisasi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) calon pekerja migran (PMI)	Orang	1	1	1	1	1	8.600.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang diberdayakan	Orang	100	100	100	100	100	3.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Peraturan Perusahaan yang di SAHkan	Dokumen	1 dokumen PP	1 dokumen PP	1 dokumen PP	1 dokumen PP	1 dokumen PP	1.288.740.750	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan	Dokumen	1 dokumen PKB	1 dokumen PKB	1 dokumen PKB	1 dokumen PKB	1 dokumen PKB	1.288.740.750	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah LKS Bipartit dan Tripartit dan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	Lembaga/orang	1	1	1	1	1	1.288.740.750	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan berdasarkan hasil penilaian kondisi Hubungan Industrial	Perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	749.001.250	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah kasus perselisihan	Kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	285.851.250	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi				Data permasalahan serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	449.223.250	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN														
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang wajib lapor (WLK) dilakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan.	Perusahaan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.919.500.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah pengaduan/kasus yang diselesaikan	Pengaduan/Kasus	1	1	1	1	1	1.125.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan	Perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	3.491.170.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.4.1* Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.														
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Tersedianya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		26 Sekolah	27 Sekolah	28 Sekolah	29 Sekolah	30 Sekolah	240.395.654.807	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang		18 Sekolah	19 Sekolah	20 Sekolah	21 Sekolah	22 Sekolah	28.819.356.473	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik		2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	580.191.281	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang		13 Sekolah	14 Sekolah	15 Sekolah	16 Sekolah	17 Sekolah	31.672.722.398	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Terpenuhinya Perlengkapan Didik Peserta SLB		2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	1.160.382.562	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang		3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	7 Sekolah	1.868.709.666	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas Terlaksananya Pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Penguatan Pengawas SMA, SMK dan SLB Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	7.865.990.579	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Bimbingan Teknis Informasi dan Teknologi Bagi Guru SMA, SMK dan SLB Terlaksananya Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi Tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun 2021 Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Berdasarkan Jenis Ketunaan (Tunagrahita dan Autis) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Teknologi Kejuruan Terlaksananya Seleksi Calon Kepala SMA, SMK, SLB dan Pengawas Sekolah Terlaksananya Training Of Trainer Musyawarah Guru Mata Pelajaran (TOT MGMP) SMA, SMK dan Kelompok Kerja Guru (KKG) SLB	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	12.340.992.586	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah daerah DTPK (kabupaten kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan).	Kabupaten/kota	2	2	2	2	2	2.298.576.000	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jenis Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman dan bahan medis habis pakai yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	4	22.733.441.210	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga							1.075.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Lokasi yang berpotensi bencana dan/atau yang terdampak krisis akibat bencana tingkat Provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai standar		7	7	7	7	7	36.160.517.745	APBD	DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Lokasi pada kondisi KLB tingkat Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan.	Kabupaten/Kota	19	19	19	19	19	5.126.104.344	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	3	3	3	1.678.023.764	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	4	800.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	14	15	16	16	17	1.057.344.960	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	5	5	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	14	14	7.089.966.231	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	5	5	6	6	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali						725.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis						0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kali						646.817.729	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kali	3	3	4	4	5	8.072.533.416	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kali	2	3	3	3	4	796.000.582	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Kali	2	2	2	2	2	1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kali	4	4	6	6	6	2.968.299.620	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				Jumlah koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Laporan SPM Provinsi	Laporan						0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Rekomendasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota	Rekomendasi						0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	2	2	2	2	1.998.076.677	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang didistribusikan	Orang						0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi	Orang	652	420	480	530	580	4.896.799.077	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	2	2	2	2	1.988.148.246	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi & Kualifikasi SDM Kesehatan	Terlaksananya Pelatihanna Tenaga Kesehatan	Kegiatan	10	10	10	10	10	2.900.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan							1.000.000.000	APBD		RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	org	710	750	770	800	830	13.510.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun	1	1	1	1	1	2.600.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Promosi kesehatan dan PHBS yang dilakukan	Kali	4	5	5	5	5	3.838.251.219	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	20	21	22	23	0	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	0	3	4	5	5	0	APBD	DINAS KESEHATAN
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	1.04.03.01.04.	Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman	Persentase Jumlah Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	%	4,75	4,75	4,75	0	4,75	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.02.01.	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah dokumen site plan dan DED	%	12,66	12,66	12,66	98,73	12,66	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.03.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan pemugaran/peremajaan /Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan	Persentase Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	%	20	20	20	20	20	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha											
1.04.03.02.03.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah RTLH pada Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.02.04.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalm kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah Kerjasama Perbaikan RTLH pada Kawasan Kumuh	%	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
.04.03.02.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan pemugaran/peremajsaan /Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan /Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	%	20	20	20	0	20	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
.04.03.02.06.	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat Yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Jumlah Kepala Keluarga Yang Dibantu	%	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
.04.03.02.07.	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%	0,25	0,25	0,25	0,13	0,25	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.01.01.	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Jumlah DED PSU Permukiman	%	17,26	17,26	17,26	8,71	17,26	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.01.02.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase Jumlah Pembangunan dan Peningkatan PSU	%	17,26	17,26	17,26	8,71	17,26	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Persentase Pembangunan PSU Perumahan Subsidi	%	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Persentase Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	%	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.01.04.	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Persentase Jumlah PSU diserahkan terimakan	%	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.01.05.	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Persentase Jumlah Kerjasama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman	%	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Sub kegiatan 1: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	kali	1	1	1	1	1	380.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	kab/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Sub kegiatan 2: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasionalkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	fasilitas	1	1	1	1	1	14.351.467.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes	Kab/Kota	0	2	2	2	2	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP													
Kegiatan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan		Sub kegiatan: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase pengaduan yang difasilitasi baik melalui pelimpahan sesuai kewenangan maupun verifikasi lapangan	%	0	100	100	100	100	449.682.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi													
			Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	kasus	3	0	0	0	0	100.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya	kasus	9	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN													
Kegiatan: Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Sub kegiatan 1: Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen terkait pengelolaan sampah yang disusun	Dokumen	0	1	0	1	3	1.221.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Dokumen naskah akademis Ranperda yang disusun	dokumen	1	0	0	0	0	225.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Dokumen masterplan pengelola sampah provinsi sumatera barat dan dokumen studi kelayakan penerapan teknologi waste to energy yang disusun	dokumen	2	0	0	0	0	250.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Sub kegiatan 3: Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang dioperasikan/diperlihara	TPA	0	2	2	2	2	15.600.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah TPA sampah regional yang dioperasionalkan	TPA	2	0	0	0	0	3.216.434.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah TPA sampah regional yang dipelihara infrastrukturnya	TPA	2	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA sampah regional yang dipantau	laporan	4	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Sub kegiatan 4: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi terkait penyediaan sarana dan prasarana di TPA regional yang dikoordinasi dan disinkronkan dalam penyediaannya	laporan	0	1	1	1	1	143.689.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		sub kegiatan 5: Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA Regional yang diadakan	Paket	0	0	0	2	2	10.791.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN													
3.29.06.1.06 Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan	3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Tersedianya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	282.400.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan													
	3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terbangunnya Instalasi Listrik bagi Kelompok Masyarakat tidak Mampu yang dilewati jaringan listrik		1200 KK	1200 KK	1100 KK	1000 KK	800 KK	84.323.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya data dan informasi awal potensi energi			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	200.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terseidanya data Ratio Elektrifikasi (RE) dan Ratio Desa Berlistrik (RD) Terverifikasi DJL dan PLN			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	165.028.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terbangunnya PLTS Tersebar/SHS Revit PLTMH		20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	1.050.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tertatanya pengelolaan pembangkit EBT Perdesaan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	308.886.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.													
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN												
02.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	02.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diinventarisir	%	70	75	80	85	90	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		02.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	70	75	80	85	90	0	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.													
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana provinsi yang disusun (dokumen)		1	2	1	1	1	1.989.293.752	APBD	Prov. Sumbar BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di sekolah/kampus yang dilakukan (kali)		58	58	58	58	58	1.513.574.893	APBD	Prov. Sumbar BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di masyarakat yang		1	1	1	1	1	1.415.833.493	APBD	Prov. Sumbar BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
		dilakukan (kali)										
		Jumlah kampanye/publikasi media/pameran/ pembuatan baliho kebencanaan yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	151.357.490	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana daerah yang ditingkatkan yang disusun (dokumen)		-	-	1	-	-	414.715.950	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah lembaga bencana daerah yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)		20	20	20	20	20	262.154.443	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah perjanjian kerjasama yang ditetapkan (perjanjian kerjasama)		1	1	1	1	1	26.215.444	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem informasi kebencanaan yang disediakan (sistem)		1	1	1	1	1	804.320.241	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah publikasi data dan informasi kebencanaan yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	279.661.117	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	681.601.552	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana (kabupaten/kota)		19	19	19	19	19	491.382.288	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana yang disediakan (jenis)		2	2	2	2	2	2.262.794.857	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah laporan data dan informasi bencana yang disusun (dokumen)		1	1	1	1	1	6.763.584.632	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana yang disediakan (unit)		1	1	1	1	1	1.572.926.658	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas kewenangan provinsi yang disusun (laporan)		1	1	1	1	1	26.215.444	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana kewenangan provinsi yang disusun (laporan)	1	1	1	1	1	1.816.730.291	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang disusun (laporan)	1	1	1	1	1	262.154.443	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah logistik/peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang disediakan (paket)	2	2	2	2	2	1.624.044.024	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana yang disusun (laporan)	1	1	1	1	1	26.215.444	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Respon Cepat Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan epidemi/wabah penyakit yang disusun (laporan)	1	1	1	1	1	262.154.443	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen JITU PASNA Provinsi yang disusun (dokumen)	1	1	1	1	1	706.506.224	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap capaian JITU PASNA Provinsi (laporan)	1	1	1	1	1	1.289.153.828	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi yang disusun/direview (dokumen)	-	1	-	1	-	834.212.860	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah pelatihan kebencanaan bagi relawan yang dilaksanakan (kali)	1	1	1	1	1	1.009.294.606	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah pelatihan kebencanaan bagi aparaturnya yang dilaksanakan (kali)	1	1	1	1	1	1.009.294.606	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan risiko bencana yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	-	20	20	20	20	83.806.900	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah pertemuan/koordinasi/ event/pelatihan antar stakeholder dalam rangka pengelolaan risiko bencana (kali)	1	2	2	1	1	1.643.481.432	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah kerjasama antar lembaga dalam rangka pengelolaan risiko bencana (perjanjian)	-	1	1	1	1	213.707.594	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			kerjasama)										
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			Jumlah penguatan/peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana (KSB) yang dilakukan (kali)		10	10	10	10	10	2.621.544.430	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah penguatan/peningkatan kapasitas nagari tangguh bencana (DESTANA) yang dilakukan (kali)		10	10	10	10	10	7.864.633.292	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			Jumlah peningkatan/ pengembangan kapasitas TRC Provinsi yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	786.463.329	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah koordinasi TRC Provinsi yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	222.831.277	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Rencana Kontinjensi			Jumlah dokumen rencana kontinjensi per jenis bencana yang disusun/direview (dokumen)		-	1	1	1	1	1.349.302.259	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Jumlah gladi kesiapsiagaan terhadap bencana tingkat provinsi yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	917.540.551	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			Jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) yang disusun/ direview (dokumen)		1	-	-	1	-	829.178.060	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			Persentase pemetaan rawan bencana kebakaran kabupaten/kota yang dapat disusun	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	2.003.305.000	APBD		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
1.06.06.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	1.315.646.608	APBD		DINAS SOSIAL
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	2.648.089.567	APBD		DINAS SOSIAL
			Pelayanan Dukungan Psikososial		100%	100%	100%	100%	100%	1.303.681.833	APBD		DINAS SOSIAL
1.5.2* Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.													
1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030													
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana provinsi yang disusun (dokumen)	1	2	1	1	1	1.989.293.752	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana daerah tingkat provinsi yang disusun (dokumen)	-	-	1	-	-	414.715.950	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen JITU PASNA Provinsi yang disusun (dokumen)		1	1	1	1	1	706.506.224	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap capaian JITU PASNA Provinsi (laporan)		1	1	1	1	1	1.289.153.828	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi yang disusun/direview (dokumen)		-	1	-	1	-	834.212.860	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah dokumen rencana kontinjensi per jenis bencana yang disusun/direview (dokumen)		-	1	1	1	1	1.349.302.259	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) yang disusun/ direview (dokumen)		1	-	-	1	-	829.178.060	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana														
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen JITU PASNA Provinsi yang disusun (dokumen)		1	1	1	1	1	706.506.224	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap capaian JITU PASNA Provinsi (laporan)		1	1	1	1	1	1.289.153.828	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi yang disusun/direview (dokumen)		-	1	-	1	-	834.212.860	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah dokumen rencana kontinjensi per jenis bencana yang disusun/direview (dokumen)		-	1	1	1	1	1.349.302.259	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) yang disusun/ direview (dokumen)		1	-	-	1	-	829.178.060	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			Persentase pemetaan rawan bencana kebakaran kabupaten/kota yang dapat disusun	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	2.003.305.000	APBD		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Tersedianya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		26 Sekolah	27 Sekolah	28 Sekolah	29 Sekolah	30 Sekolah	240.395.654.807	APBD		DINAS PENDIDIKAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		18 Sekolah	19 Sekolah	20 Sekolah	21 Sekolah	22 Sekolah	28.819.356.473	APBD		DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	580.191.281	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		13 Sekolah	14 Sekolah	15 Sekolah	16 Sekolah	17 Sekolah	510.502.497.835	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses belajar mengajar di kota Padang		13 Sekolah	14 Sekolah	15 Sekolah	16 Sekolah	17 Sekolah	31.672.722.398	APBD		DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Khusus		1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	1.160.382.562	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	7 Sekolah	1.868.709.666	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah daerah DTPK (kabupaten kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan).	Kabupaten/kota	2	2	2	2	2	2.298.576.000	APBD	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Lokasi yang berpotensi bencana dan/atau yang terdampak krisis akibat bencana tingkat Provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai standar		7	7	7	7	7	36.160.517.745	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Lokasi pada kondisi KLB tingkat Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan.	Kabupaten/Kota	19	19	19	19	19	5.126.104.344	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD	DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	3	3	3	1.678.023.764	APBD	DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	4	800.000.000	APBD	DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kali	12	12	12	14	14	7.089.966.231	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	5	5	6	6	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kali						725.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis						0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kali	3	3	4	4	5	8.072.533.416	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kali	2	3	3	3	4	796.000.582	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Kali	2	2	2	2	2	1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2022	2023	2024	2025	2026					
1			2	3	4					5	6	7	8	
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.02.16			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN	
			Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.02.18			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN	
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN	
			Laporan SPM Provinsi	Laporan						0	APBD		DINAS KESEHATAN	
			Rekomendasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota	Rekomendasi						0	APBD		DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terselenggaranya layanan konseling	Kali	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD		RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	2	2	2	2	1.998.076.677	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN	
		1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang didistribusikan	Orang						0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
1.04.02.1.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.01.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data perumahan yang berada pada kawasan bencana dan yang terkena relokasi program provinsi	%	79	79	79	0	79	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.02.1.01.03.	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Tersedianya data jumlah dan kondisi rumah korban bencana yang belum tertangani	%	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.02.1.01.04.	pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Tersedianya dokumen data tingkat kerusakan rumah akibat bencana provinsi	%	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
1.04.02.1.01.05.	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi		Tersedianya Dokumen penerima rumah bagi korban bencana alam	%	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Tersedianya Dokumen penerima rumah terkena relokasi program provinsi	%	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	1.04.03.01.01.	Pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Terbentuk, Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Sudah Mandiri	%	12,66	12,66	12,66	0	12,66	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.02.03.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah RTLH pada Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	.04.03.02.06.	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat Yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Jumlah Kepala Keluarga Yang Dibantu	%	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													
1.06.02.1.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		100%	100%	100%	100%	100%	4.009.706.357	APBD		DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi		100%	100%	100%	100%	100%	3.008.841.147	APBD		DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi		100%	100%	100%	100%	100%	11.222.407.470	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
1.06.04.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	2.542.181.040	APBD		DINAS SOSIAL
			Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	3.938.400.010	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.458.043.670	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.147.180.348	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			100%	100%	100%	100%	100%	1.512.355.372	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	61.477.930	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	39.077.524	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	557.744.231	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	2.601.344.898	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	3.431.910.297	APBD		DINAS SOSIAL
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	3.052.550.000	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	25.989.423.985	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	11.098.003.408	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni"			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Padang Panjang)										
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	100%	100%	100%	1.292.115.417	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	1.791.247.635	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	1.098.338.016	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		100%	100%	100%	100%	100%	5.189.335.000	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	100%	100%	100%	45.031.218	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	23.879.671	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	81.528.726	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	100%	100%	100%	3.658.551.384	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	4.327.476.056	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	100%	100%	100%	3.506.951.067	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	4.633.022.891	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		100%	100%	100%	100%	100%	2.442.040.000	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	92.387.257	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	57.421.519	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	220.065.045	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	175.826.880	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	102.565.680	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	308.425.378	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	8.613.990.845	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	5.487.569.135	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	1.854.958.932	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	924.858.302	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	123.841.954	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW)			100%	100%	100%	100%	100%	67.235.564	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2022	2023	2024	2025	2026					
1			2	3	4					5	6	7	8	
			"Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)											
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	1.108.736.741	APBD		DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	1.977.743.371	APBD		DINAS SOSIAL
			Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	198.415.750	APBD		DINAS SOSIAL
			Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	94.018.540	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)			100%	100%	100%	100%	100%	3.572.895.952	APBD		DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)			100%	100%	100%	100%	100%	713.375.318	APBD		DINAS SOSIAL
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)			100%	100%	100%	100%	100%	73.658.032	APBD		DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)			100%	100%	100%	100%	100%	2.008.156.648	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)		Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	311.732.511	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.05.1.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	4.628.215.015	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
1.06.06.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	1.315.646.608	APBD		DINAS SOSIAL
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	2.648.089.567	APBD		DINAS SOSIAL
			Pelayanan Dukungan Psikososial			100%	100%	100%	100%	100%	1.303.681.833	APBD		DINAS SOSIAL
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan	Orang	8,31	8,53	8,75	8,97	8,97	76.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja usaha mandiri	Orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Informasi Pasr Kerja Online	Orang	15	15	15	15	15	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Job Fair/Bursa Kerja	Persentase penyerapan pencari kerja terhadap lowongan yang tersedia di perusahaan peserta job fair	Persen	150	150	150	150	150	4.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pelindungan PMI (pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Penyediaan layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah peserta sosialisasi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) calon pekerja migran (PMI)	Orang	1	1	1	1	1	8.600.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang diberdayakan	Orang	100	100	100	100	100	3.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	550.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								17.800.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman	248 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			sayuran, buah, ikan dan ternak kecil) yang diberdayakan										
			Jumlah pelatihan/Bimtek pengolahan, manajemen usaha dan pemasaran yang terlaksana		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pembinaan, pameran produk olahan pangan lokal dan pertemuan koordinasi dengan Stakeholder terkait yang terlaksana		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah kelompok pangan lokal yang dibina	12 Kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	0	APBD		DINAS PANGAN
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan								488.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jumlah laporan pemantauan produksi dan ketersediaan pangan wilayah Sumatera barat dan prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan dalam rangka HBKN yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
										5.000.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jumlah Kesepakatan pasokan bahan pangan	5 PKs	5 PKs	6 Pks	6 PKs	7 Pks	7 Pks	0	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	22 kelompok	33 Kelompok	38 Kelompok	43 Kelompok	48 Kelompok	48 Kelompok	509.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disediakan	0 Ton	100 Ton	100 ton	100 ton	100 ton	100 ton	6.847.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
			Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan Pangan Provinsi								58.173.000.000	APBD	Nagari/Desa /kelurahan Madiri Pangan	DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah Nagari yang difasilitasi sarana/prasarana/ Bimtek iptek pada nagari mandiri pangan yang dilaksanakan	98 Nagari	110 Nagari	125 Nagari	135 Nagari	150 Nagari	150 Nagari	0	APBD		DINAS PANGAN
				Jumlah Nagari yang dilakukan pembinaan dan Monev di Nagari Mandiri Pangan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
				Jumlah Koordinasi Pokja Ahli Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
				Jumlah data/ informasi data sumberdaya pangan strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	0	APBD		DINAS PANGAN
				Jumlah Pengembangan Sumberdaya Pangan Strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	0	APBD		DINAS PANGAN
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							61.184.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
				Jumlah masyarakat yang terdampak dan beresiko rawan pangan dan gizi serta stunting yang dibantu	495 KK	1.000 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK	0	APBD		DINAS PANGAN
				Jumlah pembinaan, sosialisasi dalam rangka antisipasi dan penanganan kejadian rawan pangan yang dilaksanakan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring KPM 2. Terlaksananya Pencanangan BBGRM 3. Terlaksananya Sosialisasi KPM 4. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring BBGRM		1. 11?Kab/Kota 2. 1?kali 3. 38?orang 4. 13?Kab/Kota	1. 11?Kab/Kota 2. 1?kali 3. 38?orang 4. 13?Kab/Kota	1. 11?Kab/Kota 2. 1?kali 3. 38?orang 4. 13?Kab/Kota	1. 11?Kab/Kota 2. 1?kali 3. 38?orang 4. 13?Kab/Kota	1. 11?Kab/Kota 2. 1?kali 3. 38?orang 4. 13?Kab/Kota	566.528.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis Pembinaan yang dilakukan	jenis	2	2	2	2	2	700.000.000	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.1.01.09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Kebijakan yang disediakan	Kebijakan	-	-	-	-	-	0	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN													
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta pelatihan Akuntansi bagi pengurus dan pengawas koperasi Jumlah peserta pelatihan Akuntansi syariah berbasis IT bagi KSPPS/USPPS Koperasi Jumlah peserta pelatihan pengawasan koperasi bagi gerakan koperasi anggota lintas Kab./kota Jumlah peserta pelatihan pengawasan koperasi bagi pembina Jumlah peserta pelatihan penguatan Kelembagaan bagi pengurus koperasi Jumlah peserta pelatihan penguatan pengawasan bagi pengurus/pengawas koperasi Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi generasi muda Jumlah peserta pelatihan perkoperasian pola syariah Jumlah peserta pelatihan sertifikasi dewan sayariah bagi KSPPS/USPPS Koperasi Jumlah peserta pelatihan sertifikasi kompetensi koperasi jasa keuangan bagi pengurus/pengawas dan pengelola							48.944.586.700	APBD	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah peserta pelatihan ekspor bagi KUKM Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi UKM Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha bagi UKM di kawasan wisata Jumlah peserta							29.414.371.800	APBD	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			pelatihan pengembangan usaha dan inovasi Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha UMKM										
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terfasilitasi perluasan akses pasar koperasi Terlaksananya pembinaan usaha sektor riil menuju kemitraan Terlaksananya penataan manajemen dan perkuatan usaha koperasi Terlaksananya restrukturisasi usaha koperasi							15.730.105.662	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Dokumen data koperasi yang akurat Jumlah Koperasi baru Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan/pembinaan kelembagaan Terfasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi Terfasilitasinya peningkatan peran koperasi syariah							19.073.364.772	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Terfasilitasinya akses UMKM ke bank dan lembaga non bank Terfasilitasinya pendaftaran merk dan sertifikat halal UKM Terfasilitasinya perlindungan hukum dan konsultasi usaha bagi UKM Terlaksananya pembekalan keterampilan bagi wirausaha baru Terlaksananya pembinaan kelembagaan UKM di lokasi strategis							32.129.900.000	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Facilitasi perluasan pasar produk UKM Sumatera barat Terfasilitasinya pendampingan pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil menengah (PLUT-KUMKM) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk unggulan Sumatera barat Terlaksananya pengembangan UKM kerajinan Terlaksananya peningkatan kapasitas kewirausahaan							60.040.650.000	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN													
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		380	380	380	380	380	6.000.000.000	APBD	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya sekolah pantai, Pemilihan Putra Putri Maritim, Forum Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan Pesisir dlm rangka kesetaraan gender, Tracking ,Mangrove, bersih pantai, Peningkatan sarpras di pulau2 kecil	kab/kota	7	7	7	7	7	11.950.000.000	APBD	Prov. Sumbar DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Forum Koordinasi Mitra Konservasi dan Peningkatan Kelembagaan peningkatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama	kab/kota	7	7	7	7	7	3.155.628.000	APBD	19 Kab/Kota DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan, Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan, Sosialisasi perlindungan nelayan, Asuransi Nelayan / Perlindungan Nelayan	kab/kota	7	7	7	7	7	3.165.000.000	APBD	DKP Provinsi DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan sarana pengolahan Poklhasar , Gerakan memasyarakatkan makan ikan, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan), Peningkatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	kab/kota	19	19	19	19	19	13.880.000.000	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan laboratorium (Naik daya listrik, genset), Pengadaan alat-alat laboratorium (waterbath, inkubator, alat uji lemak), Pengadaan alat-alat laboratorium lainnya (Meja preparasi, lemari jas lab , kursi labor lemari penyimpanan alat organoleptik), Pengadaan suku cadang alat Laboratorium (HPLC, AAS. alat laboratorium	unit	1	1	1	1	1	5.860.962.000	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			lainnya), Rehab kantor/ laboratorium /pagar dan cat gedung kantor										
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								0 APBD			DINAS PARIWISATA
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
(1) Keg. Pengawasan Mutu Penyediaan dan peredaran Benih tanaman			1. Jumlah Benih Tan. Pangan yang disertifikasi	ton	3.082	4.132	5.182	6.332	7.500	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			2. Jumlah Benih Tan. Buah-buahan yang disertifikasi	batang	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			5. Jumlah produsen benih perkebunan	Kelompok	50	50	50	50	50	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			6. Jumlah Benih Tan. Perkebunan yang disertifikasi	batang	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			7. Penyaluran Benih Bersertifikat Komoditas Perkebunan, Tan. Pangan dan Hortikultura	%	100	100	100	100	100	0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			5. Penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung lainnya	%	100	100	100	100		0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			8. Meningkatnya Penggunaan Alsintan	unit	3.018	3.118	3.218	3.318		0 APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
											HOLTIKULTURA
	9. Penyaluran Benih Bersertifikat untuk komoditi :								0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kelapa Sawit	Batang	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- KaKao	Batang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kopi	Batang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Karet	Batang	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kelapa	Batang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Gambir	Batang	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Padi	ton	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Jagung	ton	120	120	120	120	120		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Cabe	gram	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Bawang Merah	ton	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Manggis	batang	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
											HOLTIKULTURA
	- Jeruk	batang	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	10. a. Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan Tan. Pangan tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kelapa Sawit	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kakao	paket	40	40	40	40	40	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kopi	paket	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Karet	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kelapa	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Gambir	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- SL PTT Padi (Jarwo)	unit	80	80	80	80	80	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	b. Penerapan GAP/SOP komoditas Hortikultura tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP Cabe	paket	30	30	30	30	30	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP Bawang	paket	30	30	30	30	30	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
											HOLTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP manggis	paket	35	35	35	35	35	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP Jeruk	paket	25	25	25	25	25	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	11. a. Penerapan GHP komoditas perkebunan tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kakao	paket	16	16	16	16	16	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kopi	paket	16	16	16	16	16	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Karet	paket	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Gambir	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Perkebunan Lainnya	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	11.b Penerapan GHP komoditas Hortikultura tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Cabe	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Bawang Merah	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Manggis	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
													HOLTIKULTURA
			- Jeruk	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			-Horti lainnya	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			12. Pelatihan Pengolahan hasil komoditas Hortikultura	unit	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			13. Pelatihan teknis agribisnis komoditas Hortikultura	angkatan	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Kali	3	3	3	3	4	2.215.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			uraian : 1) Meningkatnya kemampuan teknologi di Bidang Pengolahan pakan		1	1	1	1	1	855.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			2) Meningkatnya kemampuan petugas reproduksi ternak		2	2	2	2	3	1.360.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang disediakan	Komoditi	8	8	8	8	8	332.024.326.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	(2) Keg. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		1. Pengadaan alat dan mesin pertanian pra, panen dan pasca panen tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			a.. KaKao							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			- Gunting Pangkas	set	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	- Peralatan Jemur	buah	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kotak Fermentasi	unit	200	200	200	200	200	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	b.. Kopi							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Gunting Pangkas	set	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Peralatan Jemur	buah	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	c. Karet							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Sarana Panen dan Pasca Panen Karet (mangkok sadap, pisau sadap, Ring Sadap)	unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	d. Gambir							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Sarana Panen dan Pasca Panen (Alat kempa Gambir, Alat peniris, Gerobak, dll)	unit	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	e Padi							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Combine	unit	8	8	8	8	8	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Motor Spryer	unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	- Power Tresher	unit	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Hand Traktor	unit	25	25	25	25	25	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	f. Jagung							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Combine	unit	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Cultivator	unit	50	50	50	50	50	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Corn Seller	unit	50	50	50	50	50	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	g. Cabe							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Cultivator	unit	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Handsprayer electric	unit	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- APPO (alat Pencacah Pupuk Organik)	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Sarana Pasca Panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll)	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	h. Bawang Merah							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	- Cultivator	unit	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Handsprayer electric	unit	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- APPO (alat Pencacah Pupuk Organik)	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Sarana Pasca Panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll)	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	i. Manggis							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Power Sprayer	unit	50	50	50	50	50	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Instalasi Pompa Hisap	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Sarana Pasca Panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll)	unit	11	11	11	11	11	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	j. Jeruk							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Power Sprayer	unit	50	50	50	50	50	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Instalasi Pompa Hisap	unit	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Sarana Pasca Panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll)	unit	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	2. Penyaluran Pupuk Jagung	ton	300	300	300	300	300	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3. Penyaluran Saprodi tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Saprodi Cabe	Ha	110	110	110	110	110	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Saprodi Bawang Merah	Ha	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Saprodi Maggis	Ha	200	200	200	200	200	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Saprodi Jeruk	Ha	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3. Pengadaan sarana pengolahan perkebunan tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	a Sarana pengolahan Kakao	unit	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	b. Sarana pengolahan Kopi (pulper, Huller, Alat Sangrai)	unit	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	c. Uji/Cita Rasa Mutu Kopi	unit	1	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	4. Pengadaan Sarana pengolahan dan pemasaran cabe (mesin penggiling, timbangan digital, cold storage dll)	unit	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	5. Sarana pengolahan dan pemasaran Bawang (mesin penggiling, perajang, spinner, timbangan digital, dll)	unit	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			6. Sarana pengolahan dan pemasaran Jeruk (mesin pemeras, cup sealer, kemasan, label dll)	unit	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			7. Pembinaan, pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan Sarana Pendukung Pertanian	%	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
(1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			1. Pengendalian OPT Kakao	Kali	40	40	40	40	40	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			2. Pengendalian OPT Kopi	Kali	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			3. Pengendalian OPT Karet	Kali	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			4. Pengendalian OPT Kelapa	Kali	12	12	12	12	12	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			5. Pengendalian OPT Tan. Pangan	unit	40	40	40	40	40	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			6. penerapan PHT Padi dan Jagung	unit	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			7. Insentif benih padi bagi penangkar	Rp	500/kg untuk 2.157 .000 Kg benih	500/kg untuk 2.892.000 Kg benih	400/kg untuk 3.627.000 Kg benih	400/kg untuk 4.432.000 Kg benih	400/kg untuk 4.432.000 Kg benih	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			8. Terlaksananya pembinaan dampak perubahan iklim TTHP	Kab/Kota	18	18	18	18	18	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			9. Pembinaan petani pengamat hama	orang	75	75	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			10. Penyediaan sarana Brigade perlindungan Tanaman	unit	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
											HOLTIKULTURA
	11. Pengawasan mutu standar pestisida	sampel	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	12. Terlaksananya money gas rumah kaca	Kab/Kota	18	18	18	18	18	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	13. Penerapan PHT Cabe	unit	11	11	11	11	11	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	14. Penerapan PHT Bawang	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	15. Penerapan PHT Manggis	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	16. Penerapan PHT Jeruk	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	17. Klinik PHT Kakao	unit	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	18. Gerakan Pengendalian OPT Cabe	Ha	110	110	110	110	110	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	19. Gerakan Pengendalian OPT Manggis	Ha	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	20. Gerakan Pengendalian OPT Jeruk	Ha	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	21. Sarana Klinik PHT Komoditas Cabe dan Bawang	unit	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	22. Asuransi Usaha Tani padi	Ha	8.500	9.000	10.000	11.000	12.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
													HOLTIKULTURA
			23. Pembinaan Regu Pengendalian OPT Perkebunan	Orang	90	90	90	90	90	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			24. Penerapan PHT Pada pengendalian OPT Kopi	lokasi	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
(3) kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi Petani Berbasis Kawasan			Pelatihan Manajemen dan Kemitraan Kelembagaan bagi Petani dan Petugas	angkatan	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Sekolah Lapang pada BPP	BPP	165	165	165	165	165	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Pengawalan dan Pendampingan SL Oleh Penyuluh Pertanian Provinsi pada Kabupaten/Kota	19 Kab/Kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Temu Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan tani (KEP, Posluhnag/Posluhdes, Gapoktan)	orang	85	85	85	85	85	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Temu Teknis Pengelolaan BPP	165 BPP	40 BPP	40 BPP	35 BPP	35 BPP	35 BPP	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Pemberian Penghargaan Bidang Ketenagaan dan kelembagaan	Kategori	7 Kategori	7 Kategori	7 Kategori	7 Kategori	7 Kategori	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Gerakan Optimalisasi Penyuluhan	Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab / Kota	19 Kab/ Kota	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Pemberdayaan Asosiasi Petani Komoditas	klpk	5	8	10	12	14	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Temu Teknis Stakeholder	Orang	150	150	150	150	150	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Kelembagaan Koorporasi Petani baru yang dibentuk dan beroperasi	Lembaga	4	4	4	4	4	2.500.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah penguatan kelembagaan Koorporasi Petani yang dilakukan	Kali	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			uraian : Meningkatkan usaha UMKM peternakan; Terbina dan terawasinya; debitur penerima dana KUR dan sumber-sumber pembiayaan lainnya; Terbentuknya lembaga koorporasi pada kawasan peternakan; Bimtek, dll	UMKM	5	5	5	5	5	2.500.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani yang dilakukan	Kali	3	3	3	3	3	499.455.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			uraian : Kemitraan Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Barat, dll							0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	Kelompok	100	100	100	100	100	3.000.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi	Kelompok	50	50	50	50	50	11.535.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah usulan Perhutanan Sosial	Kelompok	30	30	30	30	30	3.262.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah anggota Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	orang	300	300	300	300	300	5.412.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah fasilitasi kewirausahaan	Kali	100	100	100	100	100	14.229.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Alat Ekonomi Produktif yang difasilitasi	unit	100	100	100	100	100	63.233.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN													
3.29.06.1.06	Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Tersedianya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	282.400.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terbangunnya Instalasi Listrik bagi Kelompok Masyarakat tidak Mampu yang dilewati jaringan listrik		1200 KK	1200 KK	1100 KK	1000 KK	800 KK	84.323.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya data dan informasi awal potensi energi			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	200.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terseidanya data Ratio Elektrifikasi (RE) dan Ratio Desa Berlistrik (RD) Terverifikasi DJL dan PLN			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	165.028.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terbangunnya PLTS Tersebar/SHS Revit PLTMH		20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	20 Unit 2 Paket	1.050.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.06.1.06.07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tertatanya pengelolaan pembangkit EBT Perdesaan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	308.886.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING													
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah operasi pasar/pasar murah yang dilakukan	kali	7 kali	7 kali	8 kali	8 kali	8 kali	1.333.761.500	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kab/kota	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	452.435.000	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum yang disiapkan untuk lingkungan hunian penduduk setempat	Persen	100	100	100	100	100	219.495.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Daerah Provinsi													
		Pelatihan Transmigrasi	Persentase pelatihan transmigrasi yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	1.008.504.375	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase penguatan/penambahan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan yang dikembangkan	Persen	100	100	100	100	100	306.354.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.													
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Lokasi yang berpotensi bencana dan/atau yang terdampak krisis akibat bencana tingkat Provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai standar		7	7	7	7	7	36.160.517.745	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Lokasi pada kondisi KLB tingkat Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan.	Kabupaten/Kota	19	19	19	19	19	5.126.104.344	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	3	3	3	1.678.023.764	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	4	800.000.000	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	2	2	2	0	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD	DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2022	2023	2024	2025	2026					
1		2	3	4					5	6	7	8	
1.02.02.1.02.08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	14	14	7.089.966.231	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	5	5	6	6	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.09		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali						725.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis						0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	5	8.072.533.416	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	3	3	3	4	796.000.582	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.16		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.18		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Laporan SPM Provinsi	Laporan						0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Rekomendasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota	Rekomendasi						0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Terselenggaranya layanan konseling	Kali	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD		RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Promosi kesehatan dan PHBS yang dilakukan	Kali	4	5	5	5	5	3.838.251.219	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	20	21	22	23	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	0	3	4	5	5	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
1.06.04.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	2.542.181.040	APBD		DINAS SOSIAL
			Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
			Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	3.938.400.010	APBD		DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	1.458.043.670	APBD		DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	1.147.180.348	APBD		DINAS SOSIAL
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		100%	100%	100%	100%	100%	1.512.355.372	APBD		DINAS SOSIAL
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	61.477.930	APBD		DINAS SOSIAL
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	39.077.524	APBD		DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	557.744.231	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	2.601.344.898	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	3.431.910.297	APBD		DINAS SOSIAL
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	3.052.550.000	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	25.989.423.985	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	11.098.003.408	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	1.292.115.417	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.791.247.635	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.098.338.016	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			100%	100%	100%	100%	100%	5.189.335.000	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	45.031.218	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	23.879.671	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
Panjang)											
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	81.528.726	APBD		DINAS SOSIAL
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	3.658.551.384	APBD		DINAS SOSIAL
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	4.327.476.056	APBD		DINAS SOSIAL
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	3.506.951.067	APBD		DINAS SOSIAL
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	4.633.022.891	APBD		DINAS SOSIAL
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			100%	100%	100%	100%	100%	2.442.040.000	APBD		DINAS SOSIAL
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	92.387.257	APBD		DINAS SOSIAL
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	57.421.519	APBD		DINAS SOSIAL
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	220.065.045	APBD		DINAS SOSIAL
Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	175.826.880	APBD		DINAS SOSIAL
Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan"			100%	100%	100%	100%	100%	102.565.680	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Padang Panjang)											
1.06.04.1.03	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	308.425.378	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	100%	100%	100%	8.613.990.845	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	100%	100%	100%	5.487.569.135	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	100%	100%	100%	1.854.958.932	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	100%	100%	100%	924.858.302	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	100%	100%	100%	123.841.954	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	100%	100%	100%	67.235.564	APBD		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	100%	100%	100%	1.108.736.741	APBD		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	100%	100%	100%	1.977.743.371	APBD		DINAS SOSIAL
		Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	100%	100%	100%	198.415.750	APBD		DINAS SOSIAL
		Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	100%	100%	100%	94.018.540	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	100%	100%	100%	3.572.895.952	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)				100%	100%	100%	100%	100%	713.375.318	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)				100%	100%	100%	100%	100%	73.658.032	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)				100%	100%	100%	100%	100%	2.008.156.648	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)		Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	311.732.511	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.05.1.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	4.628.215.015	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
1.06.06.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	1.315.646.608	APBD		DINAS SOSIAL
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	2.648.089.567	APBD		DINAS SOSIAL
			Pelayanan Dukungan Psikososial		100%	100%	100%	100%	100%	1.303.681.833	APBD		DINAS SOSIAL
1.b.1 Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.													
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Lokasi yang berpotensi bencana dan/atau yang terdampak krisis akibat bencana tingkat Provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai standar		7	7	7	7	7	36.160.517.745	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Lokasi pada kondisi KLB tingkat Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan.	Kabupaten/Kota	19	19	19	19	19	5.126.104.344	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	4	800.000.000	APBD	DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	2	2	2	0	APBD	DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	3	3	3	4	796.000.582	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Laporan SPM Provinsi	Laporan						0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Rekomendasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota	Rekomendasi						0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
1.06.04.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	2.542.181.040	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	3.938.400.010	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	100%	100%	100%	1.458.043.670	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.147.180.348	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			100%	100%	100%	100%	100%	1.512.355.372	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	61.477.930	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	39.077.524	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	557.744.231	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	2.601.344.898	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	3.431.910.297	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	25.989.423.985	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	11.098.003.408	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	1.292.115.417	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.791.247.635	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.098.338.016	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		100%	100%	100%	100%	100%	5.189.335.000	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	100%	100%	100%	45.031.218	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	23.879.671	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	81.528.726	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	100%	100%	100%	3.658.551.384	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	4.327.476.056	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	100%	100%	100%	3.506.951.067	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	4.633.022.891	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		100%	100%	100%	100%	100%	2.442.040.000	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	100%	100%	100%	92.387.257	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	100%	100%	100%	57.421.519	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan		100%	100%	100%	100%	100%	220.065.045	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)											
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	175.826.880	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	102.565.680	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	308.425.378	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	8.613.990.845	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	5.487.569.135	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	1.854.958.932	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	924.858.302	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	123.841.954	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	67.235.564	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)			100%	100%	100%	100%	100%	1.108.736.741	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)			100%	100%	100%	100%	100%	1.977.743.371	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
	Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)				100%	100%	100%	100%	100%	198.415.750	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)				100%	100%	100%	100%	100%	94.018.540	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)			100%	100%	100%	100%	100%	3.572.895.952	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)				100%	100%	100%	100%	100%	713.375.318	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)				100%	100%	100%	100%	100%	73.658.032	APBD		DINAS SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)				100%	100%	100%	100%	100%	2.008.156.648	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)	Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	311.732.511	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.05.1.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	4.628.215.015	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
1.06.06.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	1.315.646.608	APBD		DINAS SOSIAL
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	2.648.089.567	APBD		DINAS SOSIAL
		Pelayanan Dukungan Psikososial			100%	100%	100%	100%	100%	1.303.681.833	APBD		DINAS SOSIAL
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan	Orang	8,31	8,53	8,75	8,97	8,97	76.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan PPRG	Orang	40 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	250.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
													KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	330.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	550.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		[1] PKS; [2] kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	325.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								17.800.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan dan ternak kecil) yang diberdayakan	248 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pelatihan/Bimtek pengolahan, manajemen usaha dan pemasaran yang terlaksana		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		0 APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah pembinaan, pameran produk olahan pangan lokal dan pertemuan koordinasi dengan Stakeholder terkait yang terlaksana		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah kelompok pangan lokal yang dibina	12 Kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	0	APBD		DINAS PANGAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	22 kelompok	33 Kelompok	38 Kelompok	43 Kelompok	48 Kelompok	48 Kelompok	48 Kelompok	48 Kelompok	509.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disediakan	0 Ton	100 Ton	100 ton	100 ton	100 ton	100 ton	100 ton	100 ton	6.847.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	72	75	78	80	81	82	82	82	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72	75	78	80	81	82	82	82	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.02.05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat di kakabeti sesuai kearifan lokal	kakabeti	5	5	5	5	5	650.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL														
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya sekolah pantai, Pemilihan Putra Putri Maritim, Forum Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan Pesisir dlm rangka kesetaraan gender, Tracking ,Mangrove,bersih pantai,Peningkatan sarpras di pulau2 kecil	kab/kota	7	7	7	7	7	7	7	11.950.000.000	APBD	Prov. Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAIPI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								17.800.000.000	APBD		DINAS PANGAN
				Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
				Jumlah Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan dan ternak kecil) yang diberdayakan	248 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah pelatihan/Bimtek pengolahan, manajemen usaha dan pemasaran yang terlaksana		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah pembinaan, pameran produk olahan pangan lokal dan pertemuan koordinasi dengan Stakeholder terkait yang terlaksana		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah kelompok pangan lokal yang dibina	12 Kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	0	APBD		DINAS PANGAN
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							2.579.000.000	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah media cetak untuk promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah penyaluran bantuan bahan pangan alternatif pengganti beras yang dilaksanakan	1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional yang diikuti	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)							806.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah media cetak untuk Pemasyarakatan Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang disediakan	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah rapat koordinasi dan sosialisasi, rapat koordinasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun								671.000.000	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan masyarakat yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah sosialisasi, rapat koordinasi dan pembahasan Pola Pangan Harapan (PPH) yang dilaksanakan	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan makanan							1.711.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jumlah data/informasi harga pangan pada 19 kab/kota yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah buku neraca bahan makanan (NBM) yang tersedia	1 Dokumen	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah sosialisasi, rapat koordinasi dan pembahasan harga pangan dan neraca bahan makanan yang terlaksana	2 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2022	2023	2024	2025	2026					
1		2	3	4					5	6	7	8	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya									537.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN	
		Jumlah data/informasi distribusi dan akses pangan pada 19 kabupaten/kota yang tersedia.	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN	
		Jumlah pelatihan, pemantauan dan rapat koordinasi yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN	
					-	-	-	-	8.572.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN	
		Jenis Bahan Pangan dalam rangka operasi pasar, gelar pangan murah yang didistribusikan	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan strategis	10 bahan pangan pokok dan strategis	0	APBD		DINAS PANGAN	
		Jumlah bazar/pasar murah bahan pangan yang dilaksanakan	78 kali	150 kali	150 kali	150 kali	150 kali	150 kali	0	APBD		DINAS PANGAN	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan									488.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN	
		Jumlah laporan pemantauan produksi dan ketersediaan pangan wilayah sumatera barat dan prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan dalam rangka HBKN yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN	
									5.000.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN	
		Jumlah Kesepakatan pasokan bahan pangan	5 PKs	5 PKs	6 Pks	6 PKs	7 Pks	7 Pks	0	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	22 kelompok	33 Kelompok	38 Kelompok	43 Kelompok	48 Kelompok	48 Kelompok	509.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disediakan	0 Ton	100 Ton	100 ton	100 ton	100 ton	100 ton	6.847.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
			Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota								1.477.000.000	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah peningkatan kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan pada 19 kab/kota yang dilaksanakan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat provinsi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota Dalam Penyusunan Peta SKPG Pada 19 Kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah pemetaan situasi pangan dan gizi di Sumatera Barat yang dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah sumber daya manusia Analis Ketahanan Pangan dan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (Fungsional AKP, PMPH dan APHP)	20 orang	28 orang	32 orang	36 orang	40 orang	44 orang	0	APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah pelatihan/Bimtek Fungsional, aparatur dan masyarakat	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah data/informasi data komoditi, lokasi, tanggal tanam, jadwal panen dan jumlah produksi	-	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	0	APBD		DINAS PANGAN
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.														
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota								1.477.000.000	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah peningkatan kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan pada 19 kab/kota yang dilaksanakan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat provinsi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota Dalam Penyusunan Peta SKPG Pada 19 Kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah pemetaan situasi pangan dan gizi di Sumatera Barat yang dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah sumber daya manusia Analis Ketahanan Pangan dan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (Fungsional AKP, PMPH dan APHP)	20 orang	28 orang	32 orang	36 orang	40 orang	44 orang	44 orang	0	APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah pelatihan/Bimtek Fungsional, aparatur dan masyarakat	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah data/informasi data komoditi, lokasi, tanggal tanam, jadwal	-	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	panen dan jumlah produksi										
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan Pangan Provinsi							58.173.000.000	APBD	Nagari/Desa /kelurahan Mandiri Pangan	DINAS PANGAN
	Jumlah Nagari yang difasilitasi sarana/prasarana/ Bimtek iptek pada nagari mandiri pangan yang dilaksanakan	98 Nagari	110 Nagari	125 Nagari	135 Nagari	150 Nagari	150 Nagari	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Nagari yang dilakukan pembinaan dan Monev di Nagari Mandiri Pangan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Koordinasi Pokja Ahli Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah data/ informasi data sumberdaya pangan strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Pengembangan Sumberdaya Pangan Strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	0	APBD		DINAS PANGAN
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							61.184.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jumlah masyarakat yang terdampak dan beresiko rawan pangan dan gizi serta stunting yang dibantu	495 KK	1.000 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah pembinaan, sosialisasi dalam rangka antisipasi dan penanganan kejadian rawan pangan yang dilaksanakan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab/Kota		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi								18.621.000.000	APBD	19 kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jumlah hasil uji laboratorium pangan yang beredar	50 sampel	250 sampel	250 sampel	250 sampel	250 sampel	250 sampel	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pengawasan keamanan pangan terpadu yang dilaksanakan	-	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Kab/Kota yang mengikuti KIE keamanan pangan		19 Kab/kota	19 Kab/kota	19 Kab/kota	19 Kab/kota	19 Kab/kota	0	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Prima yang diterbitkan	100 sertifikat						4.920.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Terbitnya sertifikat Prima	100 sertifikat	86 sertifikat	86 sertifikat	86 sertifikat	86 sertifikat	86 sertifikat	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah hasil uji laboratorium ditingkat produsen	50 buah	55 buah	60 buah	65 buah	70 buah	75 buah	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pelaku usaha pangan segar hasil pertanian yang telah memiliki sertifikat prima yang disurvei	60 PUA	60 PUA	65 PUA	70 PUA	75 PUA	80 PUA	0	APBD		DINAS PANGAN
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi PSAT dan registrasi Rumah Kemas yang diterbitkan	40 Registrasi PSAT & Rumah Kemas	45 Registrasi PSAT, 5 Registrasi rumah kemas	45 Registrasi PSAT, 5 Registrasi rumah kemas	45 Registrasi PSAT, 5 Registrasi rumah kemas	45 Registrasi PSAT, 5 Registrasi rumah kemas	45 Registrasi PSAT, 5 Registrasi rumah kemas	1.831.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								833.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jumlah koordinasi/sosialisasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	4 kali	5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	3	3	3	1.678.023.764	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Laporan SPM Provinsi	Laporan						0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Rekomendasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota	Rekomendasi					0	APBD		DINAS KESEHATAN	
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum		8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	19.639.285.927	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL														
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			Terlaksananya pembangunan/ pengembangan TPA Sampah Regional		2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	3.017.843.760	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)		1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	3.183.439.750	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi			Terlaksananya pembangunan drainase primer		3.450 m, 3 dokumen	3.450 m, 3 dokumen	3.450 m, 3 dokumen	3.450 m, 3 dokumen	3.450 m, 3 dokumen	4.841.227.696	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	1.04.03.01.01.	Pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Terbentuk, Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Sudah Mandiri	%	12,66	12,66	12,66	0	12,66	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
1.04.03.01.02. Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyadaran Publik	%	12,66	12,66	12,66	0	12,66		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.01.04. Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman	Persentase Jumlah Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	%	4,75	4,75	4,75	0	4,75		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1.04.03.02.03. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah RTLH pada Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
.04.03.02.05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemyelenggaraan pemugaran/peremajaan /Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan /Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	%	20	20	20	0	20		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
.04.03.02.06. Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat Yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Jumlah Kepala Keluarga Yang Dibantu	%	0	0	0	0	0		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
.04.03.02.07.		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%	0,25	0,25	0,25	0,13	0,25		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.01.01.	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Jumlah DED PSU Permukiman	%	17,26	17,26	17,26	8,71	17,26		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
1.06.04.1.01	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	2.542.181.040	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	3.938.400.010	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	61.477.930	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	39.077.524	APBD		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	557.744.231	APBD		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	2.601.344.898	APBD		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)			100%	100%	100%	100%	100%	3.431.910.297	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
1.06.04.1.02 Makanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	25.989.423.985	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	11.098.003.408	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	7.834.064.320	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	1.292.115.417	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.791.247.635	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	1.098.338.016	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)			100%	100%	100%	100%	100%	45.031.218	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	23.879.671	APBD		DINAS SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)			100%	100%	100%	100%	100%	81.528.726	APBD		DINAS SOSIAL
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			100%	100%	100%	100%	100%	2.442.040.000	APBD		DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
1.06.04.1.03	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	100%	100%	100%	308.425.378	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	100%	100%	100%	8.613.990.845	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	100%	100%	100%	5.487.569.135	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	100%	100%	100%	123.841.954	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	100%	100%	100%	67.235.564	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	100%	100%	100%	3.572.895.952	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Sandang (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	100%	100%	100%	713.375.318	APBD		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	100%	100%	100%	73.658.032	APBD		DINAS SOSIAL
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								17.800.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan dan ternak kecil) yang diberdayakan	248 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pelatihan/Bimtek pengolahan, manajemen usaha dan pemasaran yang terlaksana		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pembinaan, pameran produk olahan pangan lokal dan pertemuan koordinasi dengan Stakeholder terkait yang terlaksana		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah kelompok pangan lokal yang dibina	12 Kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	0	APBD		DINAS PANGAN
		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan								4.659.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat yang dibina	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah kegiatan promosi produk kelompok tani dan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	pelaku usaha yang dilaksanakan										
	Jumlah kategori penilaian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara yang dilaksanakan	3 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori		0 APBD		DINAS PANGAN
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							2.579.000.000	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah media cetak untuk promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah penyaluran bantuan bahan pangan alternatif pengganti beras yang dilaksanakan	1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional yang diikuti	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)							806.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jumlah media cetak untuk Masyarakat Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang disediakan	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah rapat koordinasi dan sosialisasi, rapat koordinasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			dilaksanakan										
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun										671.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan masyarakat yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah sosialisasi, rapat koordinasi dan pembahasan Pola Pangan Harapan (PPH) yang dilaksanakan	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	22 kelompok	33 Kelompok	38 Kelompok	43 Kelompok	48 Kelompok	48 Kelompok	509.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disediakan	0 Ton	100 Ton	100 ton	100 ton	100 ton	100 ton	6.847.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
			Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota								1.477.000.000	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah peningkatan kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan pada 19 kab/kota yang dilaksanakan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat provinsi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
	Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota Dalam Penyusunan Peta SKPG Pada 19 Kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN
	Jumlah pemetaan situasi pangan dan gizi di Sumatera Barat yang dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
	Jumlah sumber daya manusia Analis Ketahanan Pangan dan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (Fungsional AKP, PMPH dan APHP)	20 orang	28 orang	32 orang	36 orang	40 orang	44 orang	0	APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN
	Jumlah pelatihan/Bimtek Fungsional, aparatur dan masyarakat	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah data/informasi data komoditi, lokasi, tanggal tanam, jadwal panen dan jumlah produksi	-	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	0	APBD		DINAS PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan Pangan Provinsi							58.173.000.000	APBD	Nagari/Desa /kelurahan Madiri Pangan	DINAS PANGAN
	Jumlah Nagari yang difasilitasi sarana/prasarana/ Bimtek iptek pada nagari mandiri pangan yang dilaksanakan	98 Nagari	110 Nagari	125 Nagari	135 Nagari	150 Nagari	150 Nagari	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Nagari yang dilakukan pembinaan dan Monev di Nagari Mandiri Pangan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Koordinasi Pokja Ahli Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah data/ informasi data sumberdaya pangan strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Pengembangan Sumberdaya Pangan Strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	0	APBD		DINAS PANGAN
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									61.184.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jumlah masyarakat yang terdampak dan beresiko rawan pangan dan gizi serta stunting yang dibantu	495 KK	1.000 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pembinaan, sosialisasi dalam rangka antisipasi dan penanganan kejadian rawan pangan yang dilaksanakan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.01	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kebijakan	-	1	1	1	-	350.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis Pembinaan yang dilakukan	jenis	2	2	2	2	700.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.1.01.04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Sosialisasi pembinaan Genre	kali	-	5	5	5	400.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
											ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah pembinaan ketahan keluarga	kali	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah pengelola dan pembina dan yang dibina	orang	38	50	50	50	50	470.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.01.07 Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Penyediaan Materi PIK R	Materi	-	-	114	114	114	500.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.01.08 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang difasilitasi	kelompok	5	5	5	5	5	600.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.01.09 Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Kebijakan yang disediakan	Kebijakan	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
											BERENCANA
2.14.04.1.01.11 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah materi PIK	Materi	-	19	19			155.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.01.12 Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Advokasi IPK	orang	120	150	150	150	150	1.120.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.01.14 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah peserta pelatihan Pengasuhan 1000HPK	orang	50	50	50	50	50	350.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.1.01.15 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK			-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	2.14.04.1.02.01	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
		2.14.04.1.02.02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah pemberdayaan Kelompok masyarakat di kakabeti sesuai kearifan lokal	kakabeti	-	5	5	5	5	600.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.1.02.05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat di kakabeti sesuai kearifan lokal	kakabeti	5	5	5	5	5	650.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengadaan infrastruktur baliho, videotron dan terlaksananya diseminasi/sosialisasi							23.010.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Rakor PPID, Workshop PPID, Vakasi DIP dan DIP							2.750.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Kali	3	3	3	3	3	1.678.023.764	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kali						725.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis						0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kali	3	3	4	4	5	8.072.533.416	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Laporan SPM Provinsi	Laporan						0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Rekomendasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota	Rekomendasi						0	APBD		DINAS KESEHATAN
		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali	19	19	19	19	19	31.123.637.425	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah program prioritas yang difasilitasi	Program	12	12	12	12	12	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi	Orang	57	57	57	57	57	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kemitraan, kelompok masyarakat dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan program kesehatan	Mitra/kelompok masyarakat	5	6	7	8	9	6.134.935.003	APBD	DINAS KESEHATAN
			jumlah Kab/Kota yang di monitoring dan dievaluasi	Kab/Kota	9	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Promosi kesehatan dan PHBS yang dilakukan	Kali	4	5	5	5	5	3.838.251.219	APBD	DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Daerah Provinsi														
				Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	20	21	22	23	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	0	3	4	5	5	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum		8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	19.639.285.927	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)		1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	3.183.439.750	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	1.04.03.01.01.	Pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Terbentuk, Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Sudah Mandiri	%	12,66	12,66	12,66	0	12,66	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.03.01.02.	Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyadaran Publik	%	12,66	12,66	12,66	0	12,66	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.01.02.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase Jumlah Pembangunan dan Peningkatan PSU	%	17,26	17,26	17,26	8,71	17,26	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Persentase Pembangunan PSU Perumahan Subsidi	%	20	20	20	20	20		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								17.800.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan dan ternak kecil) yang diberdayakan	248 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pelatihan/Bimtek pengolahan, manajemen usaha dan pemasaran yang terlaksana		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pembinaan, pameran produk olahan pangan lokal dan pertemuan koordinasi dengan Stakeholder terkait yang terlaksana		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah kelompok pangan lokal yang dibina	12 Kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok		0 APBD		DINAS PANGAN
Promosi Pencapaian Target Konsumsi		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan								2.579.000.000	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Berbasis Sumber Daya Lokal										
	Jumlah media cetak untuk promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah penyaluran bantuan bahan pangan alternatif pengganti beras yang dilaksanakan	1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional yang diikuti	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)							806.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jumlah media cetak untuk Pemasyarakatan Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang disediakan	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah rapat koordinasi dan sosialisasi, rapat koordinasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun							671.000.000	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan masyarakat yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		0 APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah sosialisasi, rapat koordinasi dan pembahasan Pola Pangan Harapan (PPH) yang dilaksanakan	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	22 kelompok	33 Kelompok	38 Kelompok	43 Kelompok	48 Kelompok	48 Kelompok	509.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disediakan	0 Ton	100 Ton	100 ton	100 ton	100 ton	100 ton	6.847.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
			Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota								1.477.000.000	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah peningkatan kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan pada 19 kab/kota yang dilaksanakan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat provinsi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota Dalam Penyusunan Peta SKPG Pada 19	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Kabupaten/kota yang dilaksanakan										
	Jumlah pemetaan situasi pangan dan gizi di Sumatera Barat yang dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		0 APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
	Jumlah sumber daya manusia Analis Ketahanan Pangan dan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (Fungsional AKP, PMPH dan APHP)	20 orang	28 orang	32 orang	36 orang	40 orang	44 orang		0 APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN
	Jumlah pelatihan/Bimtek Fungsional, aparatur dan masyarakat	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah data/informasi data komoditi, lokasi, tanggal tanam, jadwal panen dan jumlah produksi	-	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota		0 APBD		DINAS PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan Pangan Provinsi							58.173.000.000	APBD	Nagari/Desa /kelurahan Mandiri Pangan	DINAS PANGAN
	Jumlah Nagari yang difasilitasi sarana/prasarana/ Bimtek iptek pada nagari mandiri pangan yang dilaksanakan	98 Nagari	110 Nagari	125 Nagari	135 Nagari	150 Nagari	150 Nagari		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Nagari yang dilakukan pembinaan dan Monev di Nagari Mandiri Pangan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Koordinasi Pokja Ahli Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah data/ informasi data sumberdaya pangan strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Pengembangan Sumberdaya Pangan Strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota		0 APBD		DINAS PANGAN
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan							61.184.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
	Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
			Jumlah masyarakat yang terdampak dan beresiko rawan pangan dan gizi serta stunting yang dibantu	495 KK	1.000 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pembinaan, sosialisasi dalam rangka antisipasi dan penanganan kejadian rawan pangan yang dilaksanakan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN													
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab/Kota		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi								18.621.000.000	APBD	19 kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jumlah hasil uji laboratorium pangan yang beredar	50 sampel	250 sampel	250 sampel	250 sampel	250 sampel	250 sampel		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pengawasan keamanan pangan terpadu yang dilaksanakan	-	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Kab/Kota yang mengikuti KIE keamanan pangan		19 Kab/kota	19 Kab/kota	19 Kab/kota	19 Kab/kota	19 Kab/kota		0 APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Kelembagaan Adat 2. Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Kelembagaan LPM Nagari/Desa/Kelurahan 3. Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Kelembagaan PKK 4. Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Posyandu 5. Terlaksananya Pendataan Karang		1. 19 Kab/kota 2. 19 Kab/kota 3. 19 Kab/kota 4. 19 Kab/kota 5. 19 Kab/kota 6. 7 Kab/kota	1. 19 Kab/kota 2. 19 Kab/kota 3. 19 Kab/kota 4. 19 Kab/kota 5. 19 Kab/kota 6. 7 Kab/kota	1. 19 Kab/kota 2. 19 Kab/kota 3. 19 Kab/kota 4. 19 Kab/kota 5. 19 Kab/kota 6. 7 Kab/kota	1. 19 Kab/kota 2. 19 Kab/kota 3. 19 Kab/kota 4. 19 Kab/kota 5. 19 Kab/kota 6. 7 Kab/kota	1. 19 Kab/kota 2. 19 Kab/kota 3. 19 Kab/kota 4. 19 Kab/kota 5. 19 Kab/kota 6. 7 Kab/kota	530.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Daerah Kabupaten/Kota			Taruna Nagari/Desa /Kelurahan 6. Terlaksananya Pendataan RT/RW										
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Terlaksananya Mukerda DPD LPM 2. Terlaksananya Penilaian Kader Posyandu Berprestasi Tk. Prov. Sumbar 3. Terlaksananya Penilaian KAN Terbaik Tk. Prov. Sumbar 4. Terlaksananya Penilaian LPM Tk. Prov. Sumbar 5. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kader PKK 6. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat/Pemangku Adat 7. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM/LPMND/K 8. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pokjanal/Pokja dan Kader Posyandu 9. Terlaksananya Temu Kader Posyandu Berprestasi Tk. Prov. Sumbar		1. 55?orang 2. 11?Kab/Kota 3. 8?Kab/Kota 4. 7?Kab/Kota 5. 786?orang 6. 834?orang 7. 323?orang 8. 910?orang 9. 57?orang	1. 55?orang 2. 11?Kab/Kota 3. 8?Kab/Kota 4. 7?Kab/Kota 5. 786?orang 6. 834?orang 7. 323?orang 8. 910?orang 9. 57?orang	1. 55?orang 2. 11?Kab/Kota 3. 8?Kab/Kota 4. 7?Kab/Kota 5. 786?orang 6. 834?orang 7. 323?orang 8. 910?orang 9. 57?orang	1. 55?orang 2. 11?Kab/Kota 3. 8?Kab/Kota 4. 7?Kab/Kota 5. 786?orang 6. 834?orang 7. 323?orang 8. 910?orang 9. 57?orang	1. 55?orang 2. 11?Kab/Kota 3. 8?Kab/Kota 4. 7?Kab/Kota 5. 786?orang 6. 834?orang 7. 323?orang 8. 910?orang 9. 57?orang	9.500.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Kebijakan yang disediakan	Kebijakan	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah peserta pelatihan Pengasuhan 1000HPK	orang	50	50	50	50	50	350.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2022	2023	2024	2025	2026					
1			2	3	4					5	6	7	8	
													BERENCANA	
2.14.04.1.01.15 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK					-					0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.02.03 Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah peserta Sosialisasi	orang		40	40	40	40	120.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pengembangan Produk Perikanan Non Komsumsi, Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan bagi pengolah UPI, Pelatihan Penerapan GMP/SSOP dalam sistem HACCP, Peningkatan Pelayanan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, Peningkatan Kapasitas KKMB, Pembinaan Pengelolaan Pasar Ikan	kab/kota	19	19	19	19	19	7.120.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan sarana pengolahan Poklaksar , Gerakan memasyarakatkan makan ikan, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan), Peningkatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	kab/kota	19	19	19	19	19	13.880.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).														
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								17.800.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan dan ternak kecil) yang diberdayakan	248 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pelatihan/Bimtek pengolahan, manajemen usaha dan pemasaran yang terlaksana		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pembinaan, pameran produk olahan pangan lokal dan pertemuan koordinasi dengan Stakeholder terkait yang terlaksana		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah kelompok pangan lokal yang dibina	12 Kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	0	APBD		DINAS PANGAN
		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan								4.659.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat yang dibina	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah kegiatan promosi produk kelompok tani dan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	pelaku usaha yang dilaksanakan										
	Jumlah kategori penilaian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara yang dilaksanakan	3 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori		0 APBD		DINAS PANGAN
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							2.579.000.000	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah media cetak untuk promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah penyaluran bantuan bahan pangan alternatif pengganti beras yang dilaksanakan	1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional yang diikuti	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)							806.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jumlah media cetak untuk Masyarakat Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang disediakan	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		0 APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah rapat koordinasi dan sosialisasi, rapat koordinasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4					5	6	7	8	
	dilaksanakan											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun								671.000.000	APBD		DINAS PANGAN	
	Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan masyarakat yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN	
	Jumlah sosialisasi, rapat koordinasi dan pembahasan Pola Pangan Harapan (PPH) yang dilaksanakan	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan							488.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN	
	Jumlah laporan pemantauan produksi dan ketersediaan pangan wilayah sumatera barat dan prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan dalam rangka HBKN yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN	
								5.000.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN	
	Jumlah Kesepakatan pasokan bahan pangan	5 PKs	5 PKs	6 Pks	6 PKs	7 Pks	7 Pks	0	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	22 kelompok	33 Kelompok	38 Kelompok	43 Kelompok	48 Kelompok	48 Kelompok	509.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disediakan	0 Ton	100 Ton	100 ton	100 ton	100 ton	100 ton	6.847.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
			Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	72	75	78	80	81	82	86.025.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	75	75	75	75	75	0	APBD		DINAS PANGAN
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota								1.477.000.000	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah peningkatan kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan pada 19 kab/kota yang dilaksanakan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat provinsi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota Dalam Penyusunan Peta SKPG Pada 19 Kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah pemetaan situasi pangan dan gizi di Sumatera Barat yang dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah sumber daya manusia Analis Ketahanan Pangan dan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (Fungsional AKP, PMPH dan APHP)	20 orang	28 orang	32 orang	36 orang	40 orang	44 orang	0	APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah pelatihan/Bimtek Fungsional, aparatur dan masyarakat	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah data/informasi data komditi, lokasi, tanggal tanam, jadwal panen dan jumlah produksi	-	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	0	APBD		DINAS PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan Pangan Provinsi							58.173.000.000	APBD	Nagari/Desa /kelurahan Mandiri Pangan	DINAS PANGAN
	Jumlah Nagari yang difasilitasi sarana/prasarana/ Bimtek iptek pada nagari mandiri pangan yang dilaksanakan	98 Nagari	110 Nagari	125 Nagari	135 Nagari	150 Nagari	150 Nagari	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Nagari yang dilakukan pembinaan dan Monev di Nagari Mandiri Pangan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Koordinasi Pokja Ahli Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah data/ informasi data sumberdaya pangan strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah Pengembangan Sumberdaya Pangan Strategis	-	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	0	APBD		DINAS PANGAN
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							61.184.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jumlah masyarakat yang terdampak dan beresiko rawan pangan dan gizi serta stunting yang dibantu	495 KK	1.000 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK	4.150 KK	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah pembinaan, sosialisasi dalam rangka antisipasi dan penanganan kejadian rawan pangan yang dilaksanakan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN													
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab/Kota		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi									18.621.000.000	APBD	19 kab/Kota DINAS PANGAN
			Jumlah hasil uji laboratorium pangan yang beredar	50 sampel	250 sampel	250 sampel	250 sampel	250 sampel	250 sampel		0	APBD	DINAS PANGAN
			Jumlah pengawasan keamanan pangan terpadu yang dilaksanakan	-	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali		0	APBD	DINAS PANGAN
			Jumlah Kab/Kota yang mengikuti KIE keamanan pangan		19 Kab/kota	19 Kab/kota	19 Kab/kota	19 Kab/kota	19 Kab/kota		0	APBD	19 Kab/Kota DINAS PANGAN
		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Prima yang diterbitkan	100 sertifikat						4.920.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Terbitnya sertifikat Prima	100 sertifikat	86 sertifikat	86 sertifikat	86 sertifikat	86 sertifikat	86 sertifikat		0	APBD	DINAS PANGAN
			Jumlah hasil uji laboratorium ditingkat produsen	50 buah	55 buah	60 buah	65 buah	70 buah	75 buah		0	APBD	DINAS PANGAN
			Jumlah pelaku usaha pangan segar hasil pertanian yang telah memiliki sertifikat prima yang disurvei	60 PUA	60 PUA	65 PUA	70 PUA	75 PUA	80 PUA		0	APBD	DINAS PANGAN
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi PSAT dan registrasi Rumah Kemas yang diterbitkan	40 Registrasi PSAT & Rumah Kemas	45 Registrasi PSAT, 5 Registrasi rumah kemas	45 Registrasi PSAT, 5 Registrasi rumah kemas	45 Registrasi PSAT, 5 Registrasi rumah kemas	45 Registrasi PSAT, 5 Registrasi rumah kemas	45 Registrasi PSAT, 5 Registrasi rumah kemas	1.831.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								833.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
			Jumlah koordinasi/sosialisasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	4 kali	5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali		0	APBD	DINAS PANGAN
			Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0	APBD	19 Kab/Kota DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				yang diterbitkan										
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan				Jumlah sarana dan prasarana laboratorium keamanan pangan Provinsi Sumatera Barat yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	27.322.000.000	APBD		DINAS PANGAN
				CV harga bahan pangan pokok dan strategis: a. beras b. Cabe Merah c. Bawang Merah	a. CV ? 10 b. CV ? 25 c. CV ? 25	a. CV ? 10 b. CV ? 25 c. CV CV ? 25	a. CV ? 10 b. CV ? 25 c. CV CV ? 25	a. CV ? 10 b. CV ? 25 c. CV CV ? 25	a. CV ? 10 b. CV ? 25 c. CV CV ? 25	a. CV ? 10 b. CV ? 25 c. CV CV ? 25	23.666.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
2.2.3* Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	3	3	3	1.678.023.764	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Laporan SPM Provinsi	Laporan						0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Rekomendasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota	Rekomendasi						0	APBD		DINAS KESEHATAN
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 1.02.02.1.02.19				Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali	19	19	19	19	19	31.123.637.425	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah program prioritas yang difasilitasi	Program	12	12	12	12	12	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi	Orang	57	57	57	57	57	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Promosi kesehatan dan PHBS yang dilakukan	Kali	4	5	5	5	5	3.838.251.219	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	20	21	22	23	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	0	3	4	5	5	0	APBD		DINAS KESEHATAN
2.3.1* Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan														
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
	(1) Keg. Pengawasan Mutu Penyediaan dan peredaran Benih tanaman			1. Jumlah Benih Tan. Pangan yang disertifikasi	ton	3.082	4.132	5.182	6.332	7.500	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
				2. Jumlah Benih Tan. Buah-buahan yang disertifikasi	batang	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	5. Jumlah produsen benih perkebunan	Kelompok	50	50	50	50	50	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	6. Jumlah Benih Tan. Perkebunan yang disertifikasi	batang	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	7. Penyaluran Benih Bersertifikat Komoditas Perkebunan, Tan. Pangan dan Hortikultura	%	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	5. Penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung lainnya	%	100	100	100	100		0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	8. Meningkatnya Penggunaan Alsintan	unit	3.018	3.118	3.218	3.318		0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	9. Penyaluran Benih Bersertifikat untuk komoditi :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Kelapa Sawit	Batang	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- KaKao	Batang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Kopi	Batang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Karet	Batang	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	- Kelapa	Batang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Gambir	Batang	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Padi	ton	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Jagung	ton	120	120	120	120	120	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Cabe	gram	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Bawang Merah	ton	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Manggis	batang	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Jeruk	batang	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	10. a. Penerapan GAP/SOP komoditas perkebunan dan Tan. Pangan tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kelapa Sawit	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	- Kakao	paket	40	40	40	40	40	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Kopi	paket	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Karet	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Kelapa	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Gambir	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- SL PTT Padi (Jarwo)	unit	80	80	80	80	80	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	b. Penerapan GAP/SOP komoditas Hortikultura tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP Cabe	paket	30	30	30	30	30	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP Bawang	paket	30	30	30	30	30	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Penerapan GAP/SOP manggis	paket	35	35	35	35	35	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Penerapan GAP/SOP Jeruk	paket	25	25	25	25	25	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	11. a. Penerapan GHP komoditas perkebunan tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kakao	paket	16	16	16	16	16	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kopi	paket	16	16	16	16	16	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Karet	paket	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Gambir	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Perkebunan Lainnya	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	11.b Penerapan GHP komoditas Hortikultura tdd :							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Cabe	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Bawang Merah	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Manggis	paket	10	10	10	10	10		0	APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	- Jeruk	paket	10	10	10	10	10		0	APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-Horti lainnya	paket	5	5	5	5	5		0	APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	12. Pelatihan Pengolahan hasil komoditas Hortikultura	unit	5	5	5	5	5		0	APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	13, Pelatihan teknis agribisnis komoditas Hortikultura	angkatan	4	4	4	4	4		0	APBD			DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.03 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Kali	2	1	1	1	1	953.727.000	APBD			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	(uraian : Seminar/ bimtek bagi fungsional peternakan dan kesehatan hewan)								0	APBD			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
3.27.04.1.04 Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.1.04.02 Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kali	7	7	7	7	7	6.500.000.000	APBD			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			uraian : Peningkatan SDM pelayanan medik veteriner dan paramedik, Peningkatan kemampuan teknis dokter hewan puskesmas se-Sumatera Barat, Pengembangan kompetensi petugas penerapan pengawasan kesmavet, Pembinaan penerapan standar teknis pengawasan obat hewan, dll								0 APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Peningkatan SDM pelayanan medik veteriner dan paramedik		1	1	1	1	1	2.000.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Peningkatan kemampuan teknis dokter hewan puskesmas se-Sumatera Barat		1	1	1	1	1	2.000.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Pengembangan kompetensi petugas penerapan pengawasan kesmavet		1	1	1	1	1	1.250.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Pembinaan penerapan standar teknis pengawasan obat hewan		1	1	1	1	1	1.250.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
(1) Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			Pelatihan Pengolahan hasil komoditas Pangan dan palawija	angkatan	2	2	2	2	2		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Pelatihan Pengolahan hasil komoditas Perkebunan bagi petani	kali	3	3	3	3	3		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Pelatihan teknis agribisnis komoditas perkebunan dan tan. Pangan bagi petani	angkatan	5	5	5	5	5		0 APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Pelatihan teknis agribisnis komoditas Hortikultura bagi petani	angkatan	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Temu Teknis Petani Milenial	Orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Bimtek operator dan mekanik alsintan bagi keltan	angkatan	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
(2) Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pelatihan teknis agribisnis komoditas perkebunan bagi petugas	angkatan	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Bimtek Petugas (PPL) untuk komoditas Padi	kali	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Bimtek Petugas (POPT) untuk komoditas Perkebunan dan Tan. Pangan	kali	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Pelatihan Pengolahan hasil komoditas Pangan dan Palawija bagi petugas	angkatan	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Pelatihan Manajemen Penyuluhan Pertanian	angkatan	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Temu teknis Penyuluhan dan kelembagaan	paket	25	25	25	25	25	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Temu Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Temu Penyuluh Pertanian dan Peneliti	Orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Temu Tugas Penyuluh Pertanian	Orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Temu Teknis Pengelolaan data dan Informasi Penyuluhan Pertanian	Orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Workshop Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	Orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Temu Koordinasi Penyusunan Program dan Program Penyuluhan Pertanian	Orang	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Mimbar Sarahsehan Penyusunan Program dan Program Penyuluhan Pertanian	orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Workshop Penulisan Laporan dan karya Ilmiah	orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Workshop Pembuatan Media Penyuluhan Pertanian	Orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Bimtek operator dan mekanik alsintan bagi petugas	angkatan	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
(3) kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pelatihan Manajemen dan Kemitraan Kelembagaan bagi Petani dan Petugas	angkatan	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Sekolah Lapang pada BPP	BPP	165	165	165	165	165	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Pengawalan dan Pendampingan SL Oleh Penyuluh Pertanian Provinsi pada Kabupaten/Kota	19 Kab/Kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Temu Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan tani (KEP, Posluhnag/Posluhdes, Gapoktan)	orang	85	85	85	85	85	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Temu Teknis Pengelolaan BPP	165 BPP	40 BPP	40 BPP	35 BPP	35 BPP	35 BPP	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Pemberian Penghargaan Bidang Ketenagaan dan kelembagaan	Kategori	7 Kategori	7 Kategori	7 Kategori	7 Kategori	7 Kategori	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Gerakan Optimalisasi Penyuluhan	Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab / Kota	19 Kab/ Kota	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Pemberdayaan Asosiasi Petani Komoditas	klpk	5	8	10	12	14	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Temu Teknis Stakeholder	Orang	150	150	150	150	150	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti diklat/ bimtek pengembangan kompetensi	Orang	60	60	60	60	60	950.000.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Uraian : TOT GBP dan GFP bagi Petugas Teknis Peternakan; Terpilihnya petugas dan kelompok berprestasi, dll								0	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
						2022	2023	2024	2025	2026					
1				2	3	4					5	6	7	8	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Kelembagaan Koorporasi Petani baru yang dibentuk dan beroperasi	Lembaga	4	4	4	4	4	2.500.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah penguatan kelembagaan Koorporasi Petani yang dilakukan	Kali	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			uraian : Meningkatnya usaha UMKM peternakan; Terbina dan terawasinya; debitur penerima dana KUR dan sumber-sumber pembiayaan lainnya; Terbentuknya lembaga koorporasi pada kawasan peternakan; Bimtek, dll	UMKM	5	5	5	5	5	2.500.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Pendampingan Manajememen Koorporasi Petani	3.27.07.1.03.02	Jumlah Pendampingan Manajememen Koorporasi Petani yang dilakukan	Kali	3	3	3	3	3	499.455.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				uraian : Kemitraan Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Barat, dll							0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajememen Koorporasi petani	3.27.07.1.03.03	Jumlah Koorporasi Petani yang memenuhi Standarisasi Manajememen Koorporasi Petani	Koorporasi Petani		1	1	1	1	1	451.598.000	APBD	
		3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan	Kali	1						117.326.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA															
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Ekosistem		10	10	10	10	10	45.205.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan meningkat kompetensinya.	Orang	250	250	250	250	250	5.500.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	Unit	10	10	10	10	10	7.830.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah sekolah lapangan yang dilaksanakan		10	10	10	10	10	2.285.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	Kelompok	100	100	100	100	100	3.000.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi	Kelompok	50	50	50	50	50	11.535.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah usulan Perhutanan Sosial	Kelompok	30	30	30	30	30	3.262.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah anggota Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	orang	300	300	300	300	300	5.412.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah fasilitasi kewirausahaan	Kali	100	100	100	100	100	14.229.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Alat Ekonomi Produktif yang difasilitasi	unit	100	100	100	100	100	63.233.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
2.3.1 (a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan													
2.3.2* Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.													
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang dilakukan	Kali	37	37	37	37	37	37.510.671.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah laporan pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disusun	Laporan	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	uraian : 1) Kontes Ternak	Kali	1	1	1	1	1	5.500.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2) Peningkatan produksi semen beku, pemanfaatan teknologi reproduksi (IB dan ET) dan Produktifitas ternak sapi	Kali	12	12	12	12	12	18.770.671.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3) Peningkatan produktifitas bibit ternak unggas	Kali	12	12	12	12	12	6.870.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	4) Peningkatan produktifitas bibit ternak ruminansia	Kali	12	12	12	12	12	6.370.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	50	52	53	54	56	6.690.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	uraian : !) Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi	rekomendasi	9	11	12	13	15	660.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2) Terjaminnya ketersediaan pakan ternak (Bank Pakan) (5 kelompok)	Kelompok	5	5	5	5	5	2.650.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			3) Tersedianya ternak bibit bersertifikat (SKLB)	rekomendasi	18	18	18	18	18	690.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			4) Tersedianya usaha Pembibitan ternak yang bersertifikat (SKPT)	rekomendasi	5	5	5	5	5	620.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			5) Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian sampel pakan secara aktif maupun pasif servis (sampel)	rekomendasi	18	18	18	18	18	2.070.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak		Jumlah Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak yang dilakukan	Kali	20	20	20	20	20	625.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah laporan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak yang disusun	Laporan	1	1	1	1	2	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian/peternakan yang disusun	Dokumen	3	2	2	2	2	1.150.000.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			uraian : Pengembangan prasarana, kawasan peternakan, pengembangan kawasan ayam lokal, road map kawasan (kooporasi petani), dll								0	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian yang dilakukan	Kali	40	55	62	69	76	6.659.772.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah laporan pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian yang disusun	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Uraian : 1) Terkendali dan termanfaatkannya prasarana, kawasan komoditas peternakan di kawasan , Hilirisasi pertanian, unit pengolahan pakan, unit pengolahan susu, dll	kali	20	30	32	34	36	36	36	5.559.772.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2) Register Kandang	kali	20	25	30	35	40	40	40	1.100.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN													
(1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota			1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian	Kab/Kota	7	8	8	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			2. Terlaksananya penilaian klasifikasi kelas kebun usaha perkebunan	perusahaan perkebunan	15	15	15	15	15	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			3. Jumlah sertifikat benih komoditas perkebunan yang dikeluarkan	Jml Sertifikat	260	260	260	260	260	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	kali	2	20	30	35	40	1.349.640.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			uraian : 1) Pertemuan dan pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pada Pelaku Usaha UMKM; Penerapan sertifikasi produk peternakan, dll	kali						1.223.567.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			2) Implementasi dan evaluasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015	Kali	1					76.073.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			3) Pemahaman Teknik Audit dan Kajian Resiko Laboratorium ISO 17025:2017	Kali	1					50.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
	(1) Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Pelatihan Pengolahan hasil komoditas Pangan dan palawija	angkatan	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Pelatihan Pengolahan hasil komoditas Perkebunan bagi petani	kali	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Pelatihan teknis agribisnis komoditas perkebunan dan tan. Pangan bagi petani	angkatan	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Pelatihan teknis agribisnis komoditas Hortikultura bagi petani	angkatan	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Temu Teknis Petani Milenial	Orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			Bimtek operator dan mekanik alsintan bagi keltan	angkatan	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
											PANGAN DAN HOLTIKULTURA
(2) Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pelatihan teknis agribisnis komoditas perkebunan bagi petugas	angkatan	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Bimtek Petugas (PPL) untuk komoditas Padi	kali	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Bimtek Petugas (POPT) untuk komoditas Perkebunan dan Tan. Pangan	kali	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Pelatihan Pengolahan hasil komoditas Pangan dan Palawija bagi petugas	angkatan	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Pelatihan Manajemen Penyuluhan Pertanian	angkatan	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Temu teknis Penyuluhan dan kelembagaan	paket	25	25	25	25	25	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Temu Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Temu Penyuluh Pertanian dan Peneliti	Orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Temu Tugas Penyuluh Pertanian	Orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Temu Teknis Pengelolaan data dan Informasi Penyuluhan Pertanian	Orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Workshop Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	Orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Temu Koordinasi Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan Pertanian	Orang	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Mimbar Sarahsehan Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan Pertanian	orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Workshop Penulisan Laporan dan karya Ilmiah	orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Workshop Pembuatan Media Penyuluhan Pertanian	Orang	60	60	60	60	60	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Bimtek operator dan mekanik alsintan bagi petugas	angkatan	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
(3) kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pelatihan Manajemen dan Kemitraan Kelembagaan bagi Petani dan Petugas	angkatan	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Sekolah Lapang pada BPP	BPP	165	165	165	165	165	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Pengawalan dan Pendampingan SL Oleh Penyuluh Pertanian Provinsi pada Kabupaten/Kota	19 Kab/Kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana			
			2022	2023	2024	2025	2026							
1	2	3	4					5	6	7	8			
	Temu Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan tani (KEP, Posluhnag/Posluhdes, Gapoktan)	orang	85	85	85	85	85	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA			
	Temu Teknis Pengelolaan BPP	165 BPP	40 BPP	40 BPP	35 BPP	35 BPP	35 BPP	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA			
	Pemberian Penghargaan Bidang Ketenagaan dan kelembagaan	Kategori	7 Kategori	7 Kategori	7 Kategori	7 Kategori	7 Kategori	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA			
	Gerakan Optimalisasi Penyuluhan	Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab / Kota	19 Kab/ Kota	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA			
	Pemberdayaan Asosiasi Petani Komoditas	klpk	5	8	10	12	14	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA			
	Temu Teknis Stakeholder	Orang	150	150	150	150	150	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA			
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti diklat/ bimtek pengembangan kompetensi	Orang	60	60	60	60	60	950.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Uraian : TOT GBP dan GFP bagi Petugas Teknis Pternakan; Terpilihnya petugas dan kelompok berprestasi, dll							0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Kelembagaan Koorporasi Petani baru yang dibentuk dan beroperasi	Lembaga	4	4	4	4	4	2.500.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah penguatan kelembagaan Koorporasi Petani yang dilakukan	Kali	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				uraian : Meningkatnya usaha UMKM peternakan; Terbina dan terawasinya; debitur penerima dana KUR dan sumber-sumber pembiayaan lainnya; Terbentuknya lembaga koorporasi pada kawasan peternakan; Bimtek, dll	UMKM	5	5	5	5	5	2.500.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pendampingan 3.27.07.1.03.02 Manajemen Koorporasi Petani				Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani yang dilakukan	Kali	3	3	3	3	3	499.455.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				uraian : Kemitraan Usaha Peternakan di Provinsi Sumatera Barat, dll							0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Penilaian Kelayakan dan 3.27.07.1.03.03 Standarisasi Manajamen Koorporasi petani				Jumlah Koorporasi Petani yang memenuhi Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	Koorporasi Petani		1	1	1	1	451.598.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pembentukan dan 3.27.07.1.03.04 Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani				Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan	Kali	1					117.326.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA														
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Ekosistem		10	10	10	10	10	45.205.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan meningkat kompetensinya.	Orang	250	250	250	250	250	5.500.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	Unit	10	10	10	10	10	7.830.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah sekolah lapangan yang dilaksanakan		10	10	10	10	10	2.285.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	Kelompok	100	100	100	100	100	3.000.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi	Kelompok	50	50	50	50	50	11.535.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah usulan Perhutanan Sosial	Kelompok	30	30	30	30	30	3.262.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah anggota Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	orang	300	300	300	300	300	5.412.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah fasilitasi kewirausahaan	Kali	100	100	100	100	100	14.229.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Alat Ekonomi Produktif yang difasilitasi	unit	100	100	100	100	100	63.233.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
02.04.01 Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.													
2.4.1(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.													
2.5.1* Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.													
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang dilakukan	Kali	37	37	37	37	37	37.510.671.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah laporan pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disusun	Laporan	4	4	4	4	4		0 APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	uraian : 1) Kontes Ternak	Kali	1	1	1	1	1	5.500.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2) Peningkatan produksi semen beku, pemanfaatan teknologi reproduksi (IB dan ET) dan Produktifitas ternak sapi	Kali	12	12	12	12	12	18.770.671.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3) Peningkatan produktifitas bibit ternak unggas	Kali	12	12	12	12	12	6.870.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	4) Peningkatan produktifitas bibit ternak ruminansia	Kali	12	12	12	12	12	6.370.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	50	52	53	54	56	6.690.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	uraian : !) Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi	rekomendasi	9	11	12	13	15	660.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				2) Terjaminnya ketersediaan pakan ternak (Bank Pakan) (5 kelompok)	Kelompok	5	5	5	5	5	2.650.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				3) Tersedianya ternak bibit bersertifikat (SKLB)	rekomendasi	18	18	18	18	18	690.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				4) Tersedianya usaha Pembibitan ternak yang bersertifikat (SKPT)	rekomendasi	5	5	5	5	5	620.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				5) Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian sampel pakan secara aktif maupun pasif servis (sampel)	rekomendasi	18	18	18	18	18	2.070.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan yang dilakukan	Kali	20	20	20	20	20	660.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Jumlah laporan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan yang disusun	Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang disediakan	Komoditi	8	8	8	8	8	332.024.326.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.27.03.1.02.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pengendalian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (kawasan sentra produksi peternakan) yang dilakukan	Kali	20	20	20	20	20	750.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah laporan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (kawasan sentra produksi peternakan) yang disusun	Laporan	1	1	1	1	1		0 APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	uraian : 1) Pengembangan ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi.	Kali		20	20	20	20	600.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan		1	1	1	1		0 APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2) Meningkatnya kawasan sentra produksi peternakan	Kali	20					150.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Laporan	1						0 APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2.5.2* Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.

2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)													
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air									0 APBD	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan									0 APBD	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
1.03.02.1.02.03 Pembangunan Bendung Irigasi								33.786.051.000	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang dibangun pada D.I Lubuk Kubang Kabupaten Pesisir Selatan	Unit		1	1				0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang dibangun pada Bandar Sei. Aro Kabupaten Solok Selatan	Unit		1	1	1	1		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang dibangun pada Bandar Batang Bangko Kabupaten Solok Selatan	Unit		1	1	1	1		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.05 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak									0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.06 Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah									0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah									0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan									0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.09 Peningkatan Bendung Irigasi									0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.10 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa									0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.11 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak									0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.12 Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah									0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
1.03.02.1.02.13 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah								0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								219.458.329.120	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	DAK							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah dokumen kegiatan program IPDMIP	Dokumen	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Tingkarang Kabupaten Pasaman	Meter	100	400	400	700	800	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Partupangan Kabupaten Pasaman Barat	Meter		100	400	400	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Kapar Ampu Kabupaten Pasaman Barat	Meter		100	400	400	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Lubuk Gobing Kabupaten Pasaman Barat	Meter		100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Rimbo Tampurung Kabupaten Pasaman Barat	Meter		100	400	700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan	Meter	100	100	100	100	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Koto Salapan Kabupaten Pesisir Selatan	Meter		100	500	700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	Meter	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Surantih Kabupaten Pesisir Selatan	Meter	800	400	400	700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Lubuk Sariak Kabupaten Pesisir Selatan	Meter	100	100	500	700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Malepang Kabupaten Pesisir Selatan	Meter		100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan	Meter	2.500	500	500	500	500	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Talang Kemuning Jaya Kabupaten Pesisir Selatan	Meter	100	500	500	700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Jalamu Kabupaten Pesisir Selatan	Meter		500	500	500	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Lubuk Kubang Kabupaten Pesisir Selatan	Meter				700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bandar Batang Dareh Kabupaten Agam	Meter		100	250	700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Gumarang Kabupaten Agam	Meter		100	250	700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bandar Sangkir Geragahan Kabupaten Agam	Meter		250	250	700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Sianok Kabupaten Agam	Meter		250	250	250	250		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Baramban III Lurah Kabupaten Agam	Meter		100	100	100	100		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Sirangkak Gadang Kabupaten Agam	Meter			700	700	700		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Batu Hampa Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	Meter	100	100	100	100	100		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Garegeh Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	Meter	100	100	100	100	100		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Pulau Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	Meter		100	100	100	100		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Rakik Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	Meter		100	100	100	100		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Kubu Banda Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	Meter		250	250	250	250		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Durian Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	Meter		100	100	100	100		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Gadang Sini Air Kabupaten Agam - Kabupaten Padang Pariaman	Meter		100	100	100	100		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Ipuh Kabupaten Agam - Kabupaten Padang Pariaman	Meter		100	100	100	100		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Sawah Aru Kabupaten Padang Pariaman - Kota Pariaman	Meter		100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Sicaung Kabupaten Padang Pariaman	Meter		100	500	500	500	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Ladang Laweh Kabupaten Padang Pariaman	Meter		100	500	700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bandar Pekonina Kabupaten Solok Selatan	Meter		700	700	700	1.000	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Suliti Kabupaten Solok Selatan	Meter	100	500	700	700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bandar Sawah Padang Kabupaten Solok Selatan	Meter	100	500	500	500	500	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Bangko Kabupaten Solok Selatan	Meter		250	250	250	250	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan	Meter	100	250	250	250	250	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bandar Ubo Kabupaten Solok	Meter		250	250	250	250	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bandar Gadang Kabupaten Solok	Meter		250	250	250	250	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bintungan Kabupaten Solok	Meter	100	250	250	250	250	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Muaro Danau Kabupaten Solok	Meter		100	100	100	100		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Sapan Kayu Manang Kabupaten Solok	Meter	100	250	250	250	700		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Paneh Gadang Kabupaten Solok	Meter		100	100	100	100		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bandar Laweh Sirukam Kabupaten Solok - Kota Solok	Meter		700	700	1.200	1.200		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok	Meter		500	500	500	500		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Halim Kabupaten Solok - Kota Solok	Meter	100	250	250	250	250		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Pamujan Kabupaten Solok - Kota Solok	Meter		100	100	100	100		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Panjang Selayo Kabupaten Solok - Kota Solok	Meter	100	100	100	100	100		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Pompa VII Kabupaten Solok - Kota Solok	Meter	100	250	250	250	250		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Gunung Nago Kota Padang	Meter	800	800	800	1.200	1.200		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Koto Tuo Kota Padang	Meter		100	100	100	100		0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Tabik Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	Meter	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Agam Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	Meter	200	100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Sei. Dareh Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	Meter		500	500	500	500	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Lampasi Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	Meter		700	700	700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Talawi Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	Meter	100	500	500	500	500	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Selo Kabupaten Tanah Datar	Meter	100	100	100	1.000	1.000	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bandar Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar	Meter	100	500	500	500	500	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Parika Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Meter		100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Bulaan Dalam Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Meter	100	500	500	500	500	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Gadang Darek Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Meter	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Gadang II	Meter		500	500	700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Paninjauan Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang										KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Rupik Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Meter	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Sigando Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Meter		100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Bdr. Jambu Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Meter		100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Muka Air Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Meter		100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Sei. Samek Kabupaten Sijunjung	Meter		250	250	250	250	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Sangki II Kabupaten Tanah Datar - Kabupaten Sijunjung	Meter		100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Sibaragung Kabupaten Agam - Kabupaten Padang Pariaman	Meter	100	100	100	100	100	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Panjang Jaringan Irigasi yang terehabilitasi pada D.I Batang Kajatan Kabupaten Sijunjung	Meter		700	700	700	700	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi							71.723.000.000	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang terehabilitasi pada D.I Batang Gumarang Kabupaten Agam	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah Bendung yang terehabilitasi pada D.I Bandar Batang Dareh Kabupaten Agam	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang Terehabilitasi pada D.I Bdr. Pulau Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang Terehabilitasi pada D.I Ladang Laweh Kabupaten Padang Pariaman	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang Terehabilitasi pada D.I Batang Lampasi Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang Terehabilitasi pada D.I Batang Talawi Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	Unit		1				0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang Terehabilitasi pada D.I Batang Tingkarang Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	Unit				1		0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang Terehabilitasi pada D.I Batang Partupangan Kabupaten Pasaman Barat	Unit		1				0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang Terehabilitasi pada D.I Bandar Halim Kabupaten Solok - Kota Solok	Unit		1				0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang terehabilitasi pada D.I Kapar Ampu Kabupaten Pasaman Barat	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang terehabilitasi pada D.I Lubuk Gobing Kabupaten Pasaman Barat	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang terehabilitasi pada D.I Rimbo Tampurung Kabupaten Pasaman Barat	Unit	1	1				0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Koto Salapan Kabupaten Pesisir Selatan	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Batang Bayang Kabupaten Pesisir Selatan	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Batang Surantih Kabupaten Pesisir Selatan	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Lubuak Sariak Kabupaten Pesisir Selatan	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Malepang Kabupaten Pesisir Selatan	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Talang Kemuning Jaya Kabupaten Pesisir Selatan	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Batang Jalamu Kabupaten Pesisir Selatan	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Lubuk Kubang Kabupaten Pesisir Selatan	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bandar Sangkir Geragahan Kabupaten	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Agam										
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Batang Sianok Kabupaten Agam	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Baramban III Lurah Kabupaten Agam	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Sirangkak Gadang Kabupaten Agam	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Batu Hampa Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	Unit	1						0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Garegeh Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Rakik Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Kubu Banda Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Durian Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Gadang Sini Air Kabupaten Agam - Kabupaten Padang Pariaman	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Ipuh Kabupaten Agam - Kabupaten Padang Pariaman	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Sawah Aru Kabupaten Padang Pariaman - Kota Pariaman	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Sicaung Kabupaten Padang Pariaman	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bandar Pekonina Kabupaten Solok Selatan	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Batang Suliti Kabupaten Solok Selatan	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bandar Sawah Padang Kabupaten Solok Selatan	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Bangko Kabupaten Solok Selatan	Unit	1		1	1		0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Sawah Padang Kabupaten Solok Selatan	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bandar Ubo Kabupaten Solok	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Gadang Kabupaten Solok	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Muaro Danau Kabupaten Solok	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bintungan Kabupaten Solok	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Sapan Kayu Manang Kabupaten Solok	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Paneh Gadang Kabupaten Solok	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bandar Laweh Sirukam Kabupaten Solok - Kota Solok	Unit	1						0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Halim Kabupaten Solok - Kota Solok	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Pamujan Kabupaten Solok - Kota Solok	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Panjang Selayo Kabupaten Solok - Kota Solok	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Pompa VII Kabupaten Solok - Kota Solok	Unit	1						0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Gunung Nago Kota Padang	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Koto Tuo Kota Padang	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Batang Tabik Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Batang Agam Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Sei. Dareh Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Batang Selo Kabupaten Tanah Datar	Unit		1					0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bandar Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar	Unit		1					0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Batang Parika Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Bulaan Dalam Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Gadang Darek Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Gadang II Paninjauan Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Rupik Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Sigando Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Bdr. Jambu Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang ter rehabilitasi pada D.I Muka Air Kabupaten	Unit							0 APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Tanah Datar - Kota Padang Panjang										KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang terehabilitasi pada D.I Sei. Samek Kabupaten Sijunjung	Unit						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung yang terehabilitasi pada D.I Batang Kajatan Kabupaten Sijunjung	Unit	1					0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan							98.521.257.000	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara pada UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi wilayah utara		40	40	40	40	40	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara pada UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi wilayah selatan		25	27	27	27	27	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi							23.441.828.000	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Bendung Irigasi yang dipelihara pada UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi wilayah utara		40	40	40	40	40	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah Bendung Irigasi yang dipelihara pada UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi wilayah selatan		25	25	25	25	25	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa								0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.24 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak								0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.25 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah								0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah								0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.02.1.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi								16.000.000.000	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah laporan monitoring, Evaluasi dan pelaporan inventarisasi irigasi kewenangan provinsi pada Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi wilayah utara							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah laporan monitoring, Evaluasi dan pelaporan inventarisasi irigasi kewenangan provinsi pada Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi wilayah selatan							0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah Daerah Irigasi yang dilakukan Operasional Pengelola Irigasi pada UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi wilayah utara		40	40	40	40	40	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

[illegible]

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi

TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2022	2023	2024	2025	2026					
1			2	3	4					5	6	7	8	
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).														
1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah daerah DTPK (kabupaten kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan).	Kabupaten/kota	2	2	2	2	2	2.298.576.000	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Laporan SPM Provinsi	Laporan						0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Rekomendasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota	Rekomendasi						0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.														
1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana	1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK	Jumlah daerah DTPK (kabupaten kota yang mendapatkan pelayanan	Kabupaten/kota	2	2	2	2	2	2.298.576.000	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		(Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	kesehatan).										
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Laporan SPM Provinsi	Laporan						0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Rekomendasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota	Rekomendasi						0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	2	2	2	2	1.998.076.677	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang didistribusikan	Orang						0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi & Kualifikasi SDM Kesehatan	Terlaksananya Pelatihana Tenaga Kesehatan	Kegiatan	10	10	10	10	10	2.900.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								1.000.000.000	APBD		RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkaatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan		org	710	750	770	800	830	13.510.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Tahun	1	1	1	1	1	2.600.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	6	6	6	2.968.299.620	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	5	8.072.533.416	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	6	6	6	2.968.299.620	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
1.02.02.1.02 UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	5	8.072.533.416	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	6	6	6	2.968.299.620	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.3.3.[a] Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.													
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.02	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	5	8.072.533.416	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	6	6	6	2.968.299.620	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.													
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.02	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	5	8.072.533.416	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
Pengelolaan 1.02.02.1.02.15 Pelayanan Kesehatan Khusus				Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	6	6	6	2.968.299.620	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.														
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	14	14	7.089.966.231	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	5	5	6	6	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.3.5.[a] Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.														
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	14	14	7.089.966.231	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	5	5	6	6	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
3.3.5.[b] Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	14	14	7.089.966.231	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	5	5	6	6	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	3	3	3	1.678.023.764	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	5	8.072.533.416	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	3	3	3	1.678.023.764	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.05				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Kali	3	3	4	4	4	800.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.														
1.02.02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
03.04.02 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.														
1.02.02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	3	3	3	4	796.000.582	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
03.05.01 Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.5.1(a) Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				dievaluasi										
03.06.01 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.														
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.400.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.														
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)													
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.1.01.07	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jenis Buku Panduan	Jenis	-	1	1	2	2	190.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.1.01.08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Peserta Bimtek	orang	50	50	50	50	50	500.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.1.02.02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PKS	PKS	-	3	3	3	3	200.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.03.1.02.03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Jumlah jejaring kemitraan yang dilibatkan	jejaring kemitraan	3	4	4	4	4	660.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.														
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah pembinaan ketahan keluarga	kali	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8			
2.14.04.1.01.09	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Kebijakan yang disediakan	Kebijakan	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah peserta pelatihan Pengasuhan 1000HPK	orang	50	50	50	50	50	350.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2.14.04.1.01.15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK			-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
3.7.2.[a] Total Fertility Rate (TFR).														
3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan esensial.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit yang dibangun baru	Unit					6.278.984.596	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun baru	Unit	1	1	1	1	44.415.516.868	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah unit pengembangan Rumah Sakit yang dilakukan	unit		1	1	1	2.750.000.000	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah unit pengembangan fasilitas kesehatan yang telah ada		1	2	2	2	3.790.913.834	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah daerah DTPK (kabupaten kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan).	Kabupaten/kota	2	2	2	2	2.298.576.000	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center							0	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
1.02.02.1.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang direhab/dipelihara	Unit	2	2	2	2	2	750.000.000	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang direhab/dipelihara	unit	1	1	1	1	1	0	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Yang diadakan.	unit						2.872.549.372	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang diadakan	Unit	1	1	10	10	10	1.250.000.000	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas kesehatan yang diadakan	Unit	1	2	2	2	2	1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kalibrasi yang dipelihara	unit	8	8	9	9	9	750.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jumlah Alat kalibrasi yang diadakan	unit						0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jenis Alat kesehatan/Pelaraslatan Laboratorium Kesehatan yang diadakan	unit						29.326.536.023	APBD		DINAS KESEHATAN
		Jenis Alat kesehatan/Pelaraslatan Laboratorium Kesehatan yang dipelihara.	Unit						0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara	Unit						750.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara	Unit						750.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sistem Telemedicine yang disediakan	Sistem						0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi yang dilakukan	Kab/Kota	19	19	19	19	19	1.127.322.589	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jenis Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman dan bahan medis habis pakai yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	4	22.733.441.210	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga								1.075.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kali	4	4	4	4	4	5.208.263.801	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
Daerah Provinsi											
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	17	17	15	15	15	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	18	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Kali	3	3	4	4	4	800.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kali	12	12	12	14	14	7.089.966.231	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	5	5	6	6	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kali						725.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis						0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kali	3	3	4	4	5	8.072.533.416	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	3	3	3	4	796.000.582	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	2	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali						2.828.616.245	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis data yang dianalisa	Jenis						0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Laporan SPM Provinsi	Laporan						0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Rekomendasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota	Rekomendasi						0	APBD		DINAS KESEHATAN
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 1.02.02.1.02.19				Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali	19	19	19	19	19	31.123.637.425	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah program prioritas yang difasilitasi	Program	12	12	12	12	12	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi	Orang	57	57	57	57	57	0	APBD		DINAS KESEHATAN
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.1.02.27				Jumlah puskesmas yang dilakukan verifikasi	Puskesmas	25	25	25	25	25	619.179.242	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kegiatan yang dilakukan monitoring	Kali						0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.8.1.[a Unmet Need Pelayanan Kesehatan.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah daerah DTPK (kabupaten kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan).	Kabupaten/kota	2	2	2	2	2	2.298.576.000	APBD	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali						725.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis							0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232						0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali	19	19	19	19	19	31.123.637.425	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah program prioritas yang difasilitasi	Program	12	12	12	12	12	12	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti kompetensi	Orang	57	57	57	57	57	57	0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				dan kualifikasi										
Pendampingan 1.02.02.1.02.27 Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Jumlah puskesmas yang dilakukan verifikasi	Puskesmas	25	25	25	25	25	619.179.242	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kegiatan yang dilakukan monitoring	Kali						0	APBD		DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali						1.000.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis						0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis						0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.8.2* Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Laporan SPM Provinsi	Laporan						0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Rekomendasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota	Rekomendasi						0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali	19	19	19	19	19	31.123.637.425	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah program prioritas yang difasilitasi	Program	12	12	12	12	12	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi	Orang	57	57	57	57	57	0	APBD		DINAS KESEHATAN
Pendampingan 1.02.02.1.02.27 Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Jumlah puskesmas yang dilakukan verifikasi	Puskesmas	25	25	25	25	25	619.179.242	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kegiatan yang dilakukan monitoring	Kali						0	APBD		DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali						1.000.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis						0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.8.2 [a Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).														
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
03.09.01 Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.														
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	14	14	7.089.966.231	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	5	5	6	6	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
03.09.02 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.														
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	14	14	7.089.966.231	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	5	5	6	6	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				Jumlah koordinasi dan supervisi yang dilaksanakan	Kali						1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Laporan SPM Provinsi	Laporan						0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Rekomendasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota	Rekomendasi						0	APBD		DINAS KESEHATAN
03.09.03 Angka kematian akibat keracunan.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	14	14	7.089.966.231	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	5	5	6	6	6	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	1.250.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	6	6	6	2.968.299.620	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				dievaluasi										
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	4	4	5	8.072.533.416	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali						725.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis						0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	19	19	19	19	19	541.422.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
				Jumlah peserta PBI JKN	Orang	1.923.232					0	APBD		DINAS KESEHATAN
3.b.2* Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi yang dilakukan	Kab/Kota	19	19	19	19	19	1.127.322.589	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jenis Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman dan bahan medis habis pakai yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	4	22.733.441.210	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga								1.075.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi yang dilakukan	Kab/Kota	19	19	19	19	19	1.127.322.589	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jenis Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman dan bahan medis habis pakai yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	4	22.733.441.210	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga								1.075.000.000	APBD		DINAS KESEHATAN
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.10.1.05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rumah Dinas Yang Dikembangkan	Unit	-	-	-	3	0	1.500.000.000	APBD		RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah tenaga kesehatan yang diberikan jasa tindak medik siaga	Orang						12.121.944.674	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang didistribusikan	Orang						0	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan Tingkat Daerah/Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi & Kualifikasi SDM Kesehatan	Terlaksananya Pelatihanna Tenaga Kesehatan	Kegiatan	10	10	10	10	10	2.900.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
3.d.1* Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Lokasi yang berpotensi bencana dan/atau yang terdampak krisis akibat bencana tingkat Provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai standar		7	7	7	7	7	36.160.517.745	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi	Lokasi pada kondisi KLB tingkat Provinsi yang mendapatkan	Kabupaten/Kota	19	19	19	19	19	5.126.104.344	APBD		DINAS KESEHATAN

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
04.01.01 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.														
4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.														
4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.														
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang		18 Sekolah	19 Sekolah	20 Sekolah	21 Sekolah	22 Sekolah	28.819.356.473	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Terlaksananya Penilaian Terhadap Kurikulum Satuan Pendidikan di SMA se Sumatera Barat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.117.162.078	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang		13 Sekolah	14 Sekolah	15 Sekolah	16 Sekolah	17 Sekolah	31.672.722.398	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Terlaksananya Validasi KTSP Terlaksananya kegiatan muatan Lokal Terlaksananya kegiatan Pendidikan Karakter Terlaksananya kegiatan Pendidikan Al-Quran Terlaksananya Penelusuran kelulusan		4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	5.163.816.119	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Bimtek Pembentukan LSP P1 Terlaksananya SMK dan SLB Terlaksana kegiatan Rakor Kemitraan Terlaksananya Verifikasi TUK		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.014.655.329	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang		3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	7 Sekolah	1.868.709.666	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Evaluasi dan Validasi Implementasi KTSP SLB		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.339.612.931	APBD		DINAS PENDIDIKAN
4.1.2.[a] Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.														
1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas Terlaksananya Pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Penguatan Pengawas SMA, SMK dan SLB Terlaksananya Penilaian Angka		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	7.865.990.579	APBD		DINAS PENDIDIKAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Provinsi			Kredit Guru dan Pengawas										
	1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Bimbingan Teknis Informasi dan Teknologi Bagi Guru SMA, SMK dan SLB Terlaksananya Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi Tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun 2021 Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Berdasarkan Jenis Ketunaan (Tunagrahita dan Autis) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Teknologi Kejuruan Terlaksananya Seleksi Calon Kepala SMA, SMK, SLB dan Pengawas Sekolah Terlaksananya Training Of Trainer Musyawarah Guru Mata Pelajaran (TOT MGMP) SMA, SMK dan Kelompok Kerja Guru (KKG) SLB		6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	12.340.992.586	APBD		DINAS PENDIDIKAN
4.2.1* Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.													
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	3	3	3	3	3	1.678.023.764	APBD	DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	3	3	3	3	3	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	10	10	19	19	19	40.934.226.933	APBD	DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	1	1	2	2	2	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	14	15	16	16	17	1.057.344.960	APBD	DINAS KESEHATAN
			Jenis peningkatan kapasitas SDM Kesehatan yang dilakukan.	Jenis	4	4	5	5	6	0	APBD		DINAS KESEHATAN
			Jumlah kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	Kabupaten/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS KESEHATAN
4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.													
4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.													
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Terlaksananya Penilaian Terhadap Kurikulum Satuan Pendidikan di SMA se Sumatera Barat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.117.162.078	APBD	DINAS PENDIDIKAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Pembinaan Minat, 1.01.02.1.01.49 Bakat dan Kreativitas Siswa				Terlaksananya Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa 7 Cabang, KSN, KOSN, FL2SN, Lomba Debat Bahasa / bahasa indonesia, Parade Cinta Tanah Air, Cerdas Cermat TAP MPR, Lomba Mushabqah Tilawatil Quran		7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	19.146.848.376	APBD		DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.01.02.1.02.40				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	5.163.816.119	APBD		DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Minat, 1.01.02.1.02.41 Bakat dan Kreativitas Siswa				Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan LKS Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan FLS2N Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan O2SN Terlaksananya Kegiatan yang meningkatkan kemampuan siswa di bidang sains Terlaksananya kegiatan tahfidz di SMKN 1 Suliki kab. Limapuluh Kota Terlaksananya Kegiatan Pemahaman Siswa di bidang NAPZA		6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	8.522.781.324	APBD		DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Khusus 1.01.02.1.03.47				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.339.612.931	APBD		DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Minat, 1.01.02.1.03.48 Bakat dan Kreativitas Siswa				Terlaksananya LKS SDLB, SMPLB, dan SMALB Terlaksananya dan terpilihnya pemenang lomba FL2SN SLB Tingkat Provinsi dan persiapan Tingkat Nasional Terlaksananya dan terpilihnya pemenang lomba O2SN SLB Tingkat Provinsi dan persiapan Tingkat Nasional		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	7.013.981.133	APBD		DINAS PENDIDIKAN
4.3.1.[a] Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).														
04.04.01 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).														
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Terlaksananya Penilaian Terhadap Kurikulum Satuan Pendidikan di SMA se Sumatera Barat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.117.162.078	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa 7 Cabang, KSN, KOSN, FL2SN, Lomba Debat Bahasa / bahasa indonesia, Parade Cinta Tanah Air, Cerdas Cermat TAP MPR, Lomba Mushabqah Tilawatil Quran		7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	19.146.848.376	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan	Terlaksananya Validasi KTSP Terlaksananya Kegiatan muatan Lokal Terlaksananya kegiatan Pendidikan		4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	5.163.816.119	APBD		DINAS PENDIDIKAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Menengah Kejuruan				Karakter Terlaksananya kegiatan Pendidikan Al-Quran Terlaksananya Penelusuran kelulusan										
1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan LKS Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan FLS2N Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan O2SN Terlaksananya Kegiatan yang meningkatkan kemampuan siswa di bidang sains Terlaksananya kegiatan tahfidz di SMKN 1 Suliki kab. Limapuluh Kota Terlaksananya Kegiatan Pemahaman Siswa di bidang NAPZA		6 6 6 6 6 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan					8.522.781.324	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Evaluasi dan Validasi Implementasi KTSP SLB		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.339.612.931	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				Terlaksananya LKS SDLB, SMPLB, dan SMALB Terlaksananya dan terpilihnya pemenang lomba FL2SN SLB Tingkat Provinsi dan persiapan Tingkat Nasional Terlaksananya dan terpilihnya pemenang lomba O2SN SLB Tingkat Provinsi dan persiapan Tingkat Nasional		3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan					7.013.981.133	APBD		DINAS PENDIDIKAN
4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Terlaksananya Penilaian Terhadap Kurikulum Satuan Pendidikan di SMA se Sumatera Barat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.117.162.078	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa 7 Cabang, KSN, KOSN, FL2SN, Lomba Debat Bahasa / bahasa indonesia, Parade Cinta Tanah Air, Cerdas Cermat TAP MPR, Lomba Mushabqah Tilawatil Quran		7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	19.146.848.376	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Terlaksananya Validasi KTSP Terlaksananya Kegiatan muatan Lokal Terlaksananya kegiatan Pendidikan Karakter Terlaksananya kegiatan Pendidikan Al-Quran Terlaksananya Penelusuran kelulusan		4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	5.163.816.119	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan LKS Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan FLS2N Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan O2SN Terlaksananya Kegiatan yang		6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	8.522.781.324	APBD		DINAS PENDIDIKAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				meningkatkan kemampuan siswa di bidang sains Terlaksananya kegiatan tahfidz di SMKN 1 Suliki kab. Limapuluh Kota Terlaksananya Kegiatan Pemahaman Siswa di bidang NAPZA										
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Evaluasi dan Validasi Implementasi KTSP SLB		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.339.612.931	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya LKS SDLB, SMPLB, dan SMALB Terlaksananya dan terpilihnya pemenang lomba FL2SN SLB Tingkat Provinsi dan persiapan Tingkat Nasional Terlaksananya dan terpilihnya pemenang lomba O2SN SLB Tingkat Provinsi dan persiapan Tingkat Nasional		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	7.013.981.133	APBD		DINAS PENDIDIKAN
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.														
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terbangunnya Penambahan Ruang Kelas Baru		20 Sekolah	21 Sekolah	22 Sekolah	23 Sekolah	24 Sekolah	43.841.987.250	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunnya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		6 Sekolah	7 Sekolah	8 Sekolah	9 Sekolah	10 Sekolah	6.747.450.542	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Terbangunnya Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer		8 Sekolah	9 Sekolah	10 Sekolah	11 Sekolah	12 Sekolah	8.752.853.101	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Terbangunnya Pembangunan Ruang Laboratorium IPA		11 Sekolah	12 Sekolah	13 Sekolah	14 Sekolah	15 Sekolah	15.783.748.610	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	7 Sekolah	8 Sekolah	4.532.709.572	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Perpustakaan Sekolah		2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	1.445.691.623	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Terbangunnya Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		7 Sekolah	8 Sekolah	9 Sekolah	10 Sekolah	11 Sekolah	25.922.268.665	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		180 Sekolah	181 Sekolah	182 Sekolah	183 Sekolah	184 Sekolah	264.131.524.093	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Terbangunnya Pembangunan Fasilitas Parkir		5 Sekolah	6 Sekolah	7 Sekolah	8 Sekolah	9 Sekolah	4.227.737.827	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Kantin Sekolah		4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	7 Sekolah	8 Sekolah	3.202.539.832	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terehabnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		15 Sekolah	16 Sekolah	17 Sekolah	18 Sekolah	19 Sekolah	18.485.027.663	APBD		DINAS PENDIDIKAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Terehabnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer		3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	7 Sekolah	1.936.724.911	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Terehabnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	6.016.583.586	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terehabnya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		12 Sekolah	13 Sekolah	14 Sekolah	15 Sekolah	16 Sekolah	13.433.896.872	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terehabnya Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	1.217.096.258	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Pengadaan Mebel Sekolah		21 Sekolah	22 Sekolah	23 Sekolah	24 Sekolah	25 Sekolah	28.765.883.723	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Tersedianya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		26 Sekolah	27 Sekolah	28 Sekolah	29 Sekolah	30 Sekolah	240.395.654.807	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang		18 Sekolah	19 Sekolah	20 Sekolah	21 Sekolah	22 Sekolah	28.819.356.473	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Terlaksananya Penilaian Terhadap Kurikulum Satuan Pendidikan di SMA se Sumatera Barat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.117.162.078	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa 7 Cabang, KSN, KOSN, FL2SN, Lomba Debat Bahasa / bahasa indonesia, Parade Cinta Tanah Air, Cerdas Cermat TAP MPR, Lomba Mushabqah Tilawatil Quran		7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	19.146.848.376	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Fisik) di kelola SMA Negeri Se- Sumatera Barat		237 Sekolah	238 Sekolah	239 Sekolah	240 Sekolah	241 Sekolah	1.460.973.005.879	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah		3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	13.854.973.596	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunnya Fasilitas Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6.134.201.122	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Terbangunnya Fasilitas Ruang Praktik Siswa		5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	7.852.104.861	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Terbangunnya Fasilitas Ruang Laboratorium Komputer		3 sekolah	4 sekolah	5 sekolah	6 sekolah	7 sekolah	5.899.500.985	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya Fasilitas Ruang Perpustakaan Sekolah		3 sekolah	4 sekolah	5 sekolah	6 sekolah	7 sekolah	3.997.210.424	APBD		DINAS PENDIDIKAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Terbangunnya Fasilitas Ruang serba Guna/Aula	7 Sekolah	8 Sekolah	9 Sekolah	10 Sekolah	11 Sekolah	11.851.241.232	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	69 Sekolah	70 Sekolah	71 Sekolah	72 Sekolah	73 Sekolah	98.206.868.308	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Terbangunnya Fasilitas Parkir	5 Sekolah	6 Sekolah	7 Sekolah	8 Sekolah	9 Sekolah	1.894.490.466	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah	Terbangunnya Fasilitas Kantin Sekolah	6 Sekolah	7 Sekolah	8 Sekolah	9 Sekolah	10 Sekolah	1.152.681.102	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitas terhadap bangunan sekolah	3 sekolah	4 sekolah	5 sekolah	6 sekolah	7 sekolah	2.293.867.456	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna Aula	Terlaksananya rehabilitasi Ruang Serba Guna Aula sebagai Kenyamanan Siswa dalam Proses Belajar	10 sekolah	11 sekolah	12 sekolah	13 sekolah	14 sekolah	2.588.175.286	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebagai kenyamanan siswa dalam Proses belajar						9.577.992.032	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Terpenuhinya dan tersedianya Mebeler Kelas untuk siswa dan guru	18 sekolah	19 sekolah	20 sekolah	21 sekolah	22 sekolah	5.783.137.240	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik	2 Sekolah	3 Sekolah	4 Sekolah	5 Sekolah	6 Sekolah	580.191.281	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana pendidikan SMK	13 Sekolah	14 Sekolah	15 Sekolah	16 Sekolah	17 Sekolah	510.502.497.835	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang	13 Sekolah	14 Sekolah	15 Sekolah	16 Sekolah	17 Sekolah	31.672.722.398	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Terlaksananya Validasi KTSP Terlaksananya Kegiatan muatan Lokal Terlaksananya kegiatan Pendidikan Karakter Terlaksananya kegiatan Pendidikan Al-Quran Terlaksananya Penelusuran kelulusan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	5.163.816.119	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan LKS Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan FLS2N Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan O2SN Terlaksananya Kegiatan yang meningkatkan kemampuan siswa di bidang sains Terlaksananya kegiatan tahfidz di SMKN 1 Suliki kab. Limapuluh Kota Terlaksananya Kegiatan Pemahaman Siswa di bidang NAPZA	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	8.522.781.324	APBD		DINAS PENDIDIKAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 1.01.02.1.02.46				Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik) di kelola SMA Negeri Se- Sumatera Barat		112 Sekolah	113 Sekolah	114 Sekolah	115 Sekolah	116 Sekolah	860.088.947.008	APBD		DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 1.01.02.1.02.45				Terlaksananya Bimtek Pembentukan LSP P1 Terlaksananya SMK dan SLB Terlaksana kegiatan Rakor Kemitraan Terlaksananya Verifikasi TUK		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.014.655.329	APBD		DINAS PENDIDIKAN
04.06.01 Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.														
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ?15 tahun.														
04.07.01 Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Terlaksananya Penilaian Terhadap Kurikulum Satuan Pendidikan di SMA se Sumatera Barat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.117.162.078	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa 7 Cabang, KSN, KOSN, FL2SN, Lomba Debat Bahasa / bahasa indonesia, Parade Cinta Tanah Air, Cerdas Cermat TAP MPR, Lomba Mushabqah Tilawatil Quran		7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	19.146.848.376	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Terlaksananya Validasi KTSP Terlaksananya Kegiatan muatan Lokal Terlaksananya kegiatan Pendidikan Karakter Terlaksananya kegiatan Pendidikan Al-Quran Terlaksananya Penelusuran kelulusan		4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	5.163.816.119	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan LKS Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan FLS2N Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan O2SN Terlaksananya Kegiatan yang meningkatkan kemampuan siswa di bidang sains Terlaksananya kegiatan tahfidz di SMKN 1 Suliki kab. Limapuluh Kota Terlaksananya Kegiatan Pemahaman Siswa di bidang NAPZA		6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	8.522.781.324	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Evaluasi dan Validasi Implementasi KTSP SLB		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.339.612.931	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya LKS SDLB, SMPLB, dan SMALB Terlaksananya dan terpilihnya pemenang lomba FL2SN SLB Tingkat Provinsi dan persiapan Tingkat Nasional Terlaksananya dan terpilihnya pemenang lomba O2SN SLB Tingkat Provinsi dan persiapan Tingkat Nasional		3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	7.013.981.133	APBD		DINAS PENDIDIKAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas Terlaksananya Pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Penguatan Pengawas SMA, SMK dan SLB Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	7.865.990.579	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Bimbingan Teknis Informasi dan Teknologi Bagi Guru SMA, SMK dan SLB Terlaksananya Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi Tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun 2021 Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Berdasarkan Jenis Ketunaan (Tunagrahita dan Autis) Terlaksananya Peningkatan Komptensi Guru Teknologi Kejuruan Terlaksananya Seleksi Calon Kepala SMA, SMK, SLB dan Pengawas Sekolah Terlaksananya Training Of Trainer Musyawarah Guru Mata Pelajaran (TOT MGMP) SMA, SMK dan Kelompok Kerja Guru (KKG) SLB		6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	12.340.992.586	APBD		DINAS PENDIDIKAN
4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).														
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		180 Sekolah	181 Sekolah	182 Sekolah	183 Sekolah	184 Sekolah	264.131.524.093	APBD		DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebagai kenyamanan siswa dalam Proses belajar							9.577.992.032	APBD		DINAS PENDIDIKAN
4.a.1.[a] Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.														
4.b.1* Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.														
4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.														
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas Terlaksananya Pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Penguatan Pengawas SMA, SMK dan SLB Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	7.865.990.579	APBD		DINAS PENDIDIKAN
		1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Informasi dan Teknologi Bagi Guru SMA, SMK dan SLB Terlaksananya Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi Tingkat SMA, SMK, dan SLB		6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	12.340.992.586	APBD		DINAS PENDIDIKAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
dan Pendidikan Khusus	tahun 2021 Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Berdasarkan Jenis Ketunaan (Tunagrahita dan Autis) Terlaksananya Peningkatan Komptensi Guru Teknologi Kejuruan Terlaksananya Seleksi Calon Kepala SMA, SMK, SLB dan Pengawas Sekolah Terlaksananya Training Of Trainer Musyawarah Guru Mata Pelajaran (TOT MGMP) SMA, SMK dan Kelompok Kerja Guru (KKG) SLB										

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi
TUJUAN 5. MENCAIPI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.														
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan PPRG	Orang	40 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	250.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	330.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	550.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		[1] PKS; [2] kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	325.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.														
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.														
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.														
05.03.02 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.														
05.04.01 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.														
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.														
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Materi	-	-	2 materi	2 materi	-	260.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.02.02	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	[1] Jumlah SLTA-MA yang diadvokasi [2] Jumlah ormas yang diadvokasi	[1] SLTA [2] Ormas	[1] -SLTA [2]- Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	850.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat														PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02.1.02.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				Jumlah sekolah yang dilakukan implementasi pendidikan kependudukan	Sekolah	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.														
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Materi	-	-	2 materi	2 materi	-	260.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.02.02	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	[1] Jumlah SLTA-MA yang diadvokasi [2] Jumlah ormas yang diadvokasi	[1] SLTA [2] Ormas	[1] -SLTA [2]-Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	850.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.02.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah sekolah yang dilakukan implementasi pendidikan kependudukan	Sekolah	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.														
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan PPRG	Orang	40 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	250.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	330.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	550.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Sosialisasi kebijakan 2.08.02.1.01.04 Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi					[1] PKS; [2] kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	325.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.6.2* Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.														
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan PPRG	Orang	40 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	250.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	330.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	550.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		[1] PKS; [2] kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	325.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.a.1* (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.														
5.a.2* Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.														
5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.														
5.c.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.														
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan PPRG	Orang	40 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	250.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	330.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.03	Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	550.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.04	[1] PKS; [2] kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	325.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Materi	-	-	2 materi	2 materi	-	260.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	2.08.02.1.02.02	[1] Jumlah SLTA-MA yang diadvokasi [2] Jumlah ormas yang diadvokasi	[1] SLTA [2] Ormas	[1] 10 SLTA [2] Ormas	[1] 10 SLTA [2] Ormas	[1] 10 SLTA [2] Ormas	[1] 10 SLTA [2] Ormas	850.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.03	Jumlah sekolah yang dilakukan implementasi pendidikan kependudukan	Sekolah	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.														
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum		8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	8 dokumen, 2 lokasi, 3 laporan	19.639.285.927	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rumusan Kebijakan Pembinaan Keuangan dan Bisnis BUMD, Terlaksananya Rapat Koordinasi BUMD		4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	0	APBD		BIRO PEREKONOMIAN
6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.														
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			Terfasilitasimya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)		1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	3.183.439.750	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rumusan Kebijakan Pembinaan Keuangan dan Bisnis BUMD, Terlaksananya Rapat Koordinasi BUMD		4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	0	APBD		BIRO PEREKONOMIAN
06.03.01 Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman														
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			Terfasilitasimya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)		1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	3.183.439.750	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
	Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah		Sub kegiatan 1: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	kali	1	1	1	1	1	380.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
			Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	kab/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Sub kegiatan 2: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	fasilitas	1	1	1	1	1	14.351.467.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes	Kab/Kota	0	2	2	2	2	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rumusan Kebijakan Pembinaan Keuangan dan Bisnis BUMD, Terlaksananya Rapat Koordinasi BUMD		4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	0	APBD		BIRO PEREKONOMIAN
6.3.1.(a) Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman													
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)		1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	3.183.439.750	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)												
	Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sub kegiatan 1: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	kali	1	1	1	1	1	380.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	kab/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Sub kegiatan 2: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	fasilitas	1	1	1	1	1	14.351.467.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes	Kab/Kota	0	2	2	2	2	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rumusan Kebijakan Pembinaan Keuangan dan Bisnis BUMD, Terlaksananya Rapat Koordinasi BUMD		4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	0	APBD		BIRO PEREKONOMIAN
06.03.02 Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.													
6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku													
6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku													
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku							3.750.000.000	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Wilayah Sungai Masang - Pasaman	Dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Wilayah Sungai Sungai Silaut -	Dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tarusan													
	Jumlah dokumen penelitian zonasi air tanah pada WS kewenangan provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah dokumen inventarisasi penggunaan air tanah pada WS kewenangan provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah dokumen penyelidikan air tanah dengan metode geolistrik	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	Jumlah dokumen penelitian zona konservasi air tanah dalam pada Cekungan Air Tanah (CAT) pada WS kewenangan provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
06.04.01 Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.														
06.04.02 Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.														
6.4.2.(a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya														
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN													
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tersedianya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah		1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	955.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Terlaksananya monitoring pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah		30 Sumur Bor/Sumur Gali	30 Sumur Bor/Sumur Gali	30 Sumur Bor/Sumur Gali	30 Sumur Bor/Sumur Gali	30 Sumur Bor/Sumur Gali	433.689.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
6.4.2.(b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya														
6.5.1* Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).														
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)													
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi								200.000.000	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Keputusan Gubernur tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Keputusan Gubernur	1						0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Wilayah Sungai Masang - Pasaman										
				Jumlah Keputusan Gubernur tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Silaut - Tarusan	Keputusan Gubernur	1					0 APBD			DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
6.5.2* Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.														
6.6.1* Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.														
6.a.1 Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.														
6.b.1. Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.														
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)		1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	1 laporan 19 kab/kota	3.183.439.750	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rumusan Kebijakan Pembinaan Keuangan dan Bisnis BUMD, Terlaksananya Rapat Koordinasi BUMD		4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	0 APBD			BIRO PEREKONOMIAN

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
7.1.1* Rasio elektrifikasi.														
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN													
3.29.06.1.01	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	3.29.06.1.01.01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya penertiban usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			1 Dokumen				50.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tersedianya rekomendasi teknis Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen			50.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
	Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi										
3.29.06.1.02	Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		1 Dokumen			50.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	200.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya data pengendalian dan pengawasan izin operasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	300.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita.												
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN												
3.29.06.1.05	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal	3.29.06.1.05.01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh	Tersedianya Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam				1 Dokumen	50.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
dalam Negeri		Penanam Modal dalam Negeri	Modal Dalam Negeri										
3.29.06.1.06	Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terbangunnya Instalasi Listrik bagi Kelompok Masyarakat tidak Mampu yang dilewati jaringan listrik	1200 KK	1200 KK	1100 KK	1000 KK	800 KK	84.323.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya data dan informasi awal potensi energi		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	200.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
07.01.02 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.													
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN												
3.29.05.1.04	Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	109.699.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1) Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek dan diversifikasi produk 2) Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi dan	IKM	975 147	650 147	975 160	975 175	975 192	35.290.469.000	APBD	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			standardisasi produk industri (sertifikat halal, MD, SNI, Merk, HACCP)										
			3) Jumlah wirausaha baru sektor industri	orang	1136 orang	1355 orang	1500 orang	1700 orang	1800 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			INDUSTRI NON AGRO'							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM sentra kulit yang mendapatkan diversifikasi produk	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan diversifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil	IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengembangan produk olahan semen	IKM	50 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan produksi barang-barang dari bahan baku karet	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM sentra kerajinan yang mendapatkan bimbingan teknis pengolahan limbah kelapa	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengolahan sepatu	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	INDUSTRI AGRO'							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis HaKI bagi IKM	IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis peningkatan kualitas kemasan dan label	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan makanan ringan	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat standarisasi produk industri (Sertifikat halal, MD, sertifikat GMP, dan merk)	sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis CPPOB	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang bertambah kemampuannya dalam melakukan diversifikasi produk berbasis gambar	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan minuman	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan peningkatan kualitas VCO	IKM	30 IKM	35 IKM				0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UPTD PPM ATSIRI							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi minyak atsiri	IKM/WUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah enterpreneur yang mengikuti manajemen kewirausahaan minyak atsiri	WUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM minyak atsiri yang mengikuti sosialisasi standarisasi minyak atsiri		50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Penghasil minyak atsiri yang mengikuti temu usaha minyak atsiri			50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Minyak Atsiri yang mendapatkan pelatihan teknis dan fasilitasi uji labor minyak atsiri		50 IKM, 5 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah operator alat suling minyak atsiri yang berkompeten			10 orang	10 orang	15 orang	15 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan penunjang kegiatan pelayanan(2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)		3 alat (2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah rumahan alat suling 2 unit							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan dan aplikasi ekonomi digital minyak atsiri serta operasional pelayanan ekonomi digital			1 KEGIATAN	20 KM	40 IKM	40 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah fasilitas penelitian dan pengembangan minyak atsiri		1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium		0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Menjalin kerjasama dengan instansi peneliti minyak atsiri dan buyer minyak atsiri				1 MOU	1 MOU		0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UPTD LOGAM							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi prototipe teknologi tepat guna	orang	20 orang	150 orang	150 orang		150 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan rekayasa peralatan dan perkakas bantu mesin pengolahan rotan	IKM						0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat kompetensi pengelasan	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah rekayasa dan rancang bangun teknologi tepat guna yang dihasilkan	unit	1 unit		1 unit		1 unit	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan pelatihan rancang bangun dan perekayasaan alat teknologi tepat guna	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan bimbingan teknis, manajemen dan	IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			legalitas usaha perbengkelan										
			Jumlah IKM Pengolahan yang mendapatkan pelatihan penggunaan teknologi tepat guna	IKM	20 IKM			20 IKM		0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah enterpreneur IKM logam mesin yang mendapatkan bimtek produksi	orang	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH													
Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dilaksanakannya Inovensi Teknologi Terlaksananya Kompetisi Inovator Terlaksananya Pengembangan Teknologi di Masyarakat		5 Inovensi Teknologi, 1 kali, 3 rancang bangun	5 Inovensi Teknologi, 1 kali, 3 rancang bangun	5 Inovensi Teknologi, 1 kali, 3 rancang bangun	5 Inovensi Teknologi, 1 kali, 3 rancang bangun	5 Inovensi Teknologi, 1 kali, 3 rancang bangun	12.250.000.000	APBD		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terfasilitasinya Pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Terlaksananya penerapan inovasi dan teknologi		2 HaKI, 5 teknologi	2 HaKI, 5 teknologi	2 HaKI, 5 teknologi	2 HaKI, 5 teknologi	2 HaKI, 5 teknologi	11.100.000.000	APBD		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.													
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
Kegiatan 1: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Sub kegiatan 1: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasi dan disinkronisasi dalam pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab/Kota	0	19	19	19	19	1.690.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah media lingkungan yang dipantau		4	0	0	0	0	538.786.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan 3: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Sub Kegiatan 4: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas media lingkungan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk direhabilitasi	Ha	0	12	12	2	2	205.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah dokumen kelayakan dan DED rencana pemulihan	dokumen	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Sub kegiatan 1: Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	kali	1	1	1	1	1	380.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	kab/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Sub kegiatan 2: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasikan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	fasilitas	1	1	1	1	1	14.351.467.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes	Kab/Kota	0	2	2	2	2	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga.														
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN													
3.29.05.1.04	Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersedianya Perda Pengelolaan Energi			1 Dokumen				24.286.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.05.1.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	84.632.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.2.1* Bauran energi terbarukan.														
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN													
3.29.05.1.04	Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersedianya Perda Pengelolaan Energi			1 Dokumen				24.286.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.05.1.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	84.632.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	109.699.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
3.29.05.1.04.04				Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terbangunnya Infrastruktur Konservasi Energi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.250.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05.1.04.06				Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Konservasi Energi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	420.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.3.1* Intensitas energi primer.														
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN														
3.29.05.1.04	Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersedianya Perda Pengelolaan Energi			1 Dokumen				24.286.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.05.1.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	84.632.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terbangunnya Infrastruktur Konservasi Energi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.250.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.a.1 Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.														
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN dan UMKM yang Dilakukan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	PMDN / UMKM	7	7	8	9	10	530.496.920	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya	perusahaan PMA/PMDN	5	6	7	8	9	2.154.570.860	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	orang	400	400	400	400	400		0 APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Terlaksananya Forum Investasi Sumatera Barat	orang	100	100	100	100	100		0 APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
7.b.1* Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)														
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN													
3.29.05.1.04	Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersedianya Perda Pengelolaan Energi			1 Dokumen				24.286.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.05.1.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	84.632.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terbangunnya Infrastruktur Konservasi Energi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.250.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi
TUJUAN 8. MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.														
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terfasilitasi perluasan akses pasar koperasi Terlaksananya pembinaan usaha sektor riil menuju kemitraan Terlaksananya penataan manajemen dan perkuatan usaha koperasi Terlaksananya restrukturisasi usaha koperasi							15.730.105.662	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Dokumen data koperasi yang akurat Jumlah Koperasi baru Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan/pembinaan kelembagaan Terfasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi Terfasilitasinya peningkatan peran koperasi syariah							19.073.364.772	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Terfasilitasinya akses UMKM ke bank dan lembaga non bank Terfasilitasinya pendaftaran merk dan sertifikat halal UKM Terfasilitasinya perlindungan hukum dan konsultasi usaha bagi UKM Terlaksananya pembekalan keterampilan bagi wirausaha bau Terlaksananya pembinaan kelembagaan UKm di lokasi strategis							32.129.900.000	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Fasilitasi perluasan pasar produk UKM sumatera barat Terfasilitasinya pendampingan pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil menengah (PLUT-KUMKM) Terlaksananya pembinaan dan							60.040.650.000	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			pengembangan produk unggulan sumatera barat Terlaksananya pengembangan UKM kerajinan Terlaksananya peningkatan kapasitas kewirausahaan										
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL													
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersedianya materi promosi investasi Sumatera Barat	dokumen	1	1	1	1	1	1.188.964.600	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Keikutsertaan DPM & PTSP dalam Kegiatan Promosi Dalam Negeri dan atau Luar Negeri melalui pameran atau temu bisnis	Event	5	5	6	6	6	2.977.102.400	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Terfasilitasinya calon investor kelokasi proyek investasi di Sumatera Barat	dokumen laporan	1	2	2	2	2	0	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Tersebar nya informasi penanaman modal melalui media massa	kali	10	10	10	10	10	0	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL													
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN dan UMKM yang Dilakukan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	PMDN / UMKM	7	7	8	9	10	530.496.920	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya	perusahaan PMA/PMDN	5	6	7	8	9	2.154.570.860	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	orang	400	400	400	400	400	0	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
													PINTU
			Terlaksananya Forum Investasi Sumatera Barat	orang	100	100	100	100	100		0 APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan Ikan Kerapu Pada Kawasan Sentra Produksi	kawasan	5	5	5	5	5	10.630.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	TMMD, Kelembagaaan BBI, Pokdakan dan UPR ,Peningkatan SDM Forum Pengelolaan BBI Se-Sumatera Barat,Pengembangan Tambak Milinial Budidaya Udang Vaname							5.281.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Benih Ikan dan Benur Udang Vanname. (ekor/ tahun) [benih ikan uk. 10 cm dan Benur Udang PL8-PL10], pengembangan percontohan budidaya lobster, udang vaname dan kepiting bakau)	lokasi	2	2	2	2	2	10.000.000.000	APBD	Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Diversifikasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan	kab/kota	3	4	5	6	6	4.150.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pengembangan Produk Perikanan Non Komsumsi, Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan bagi pengolah UPI, Pelatihan Penerapan GMP/SSOP dalam sistem HACCP, Peningkatan Pelayanan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, Peningkatan Kapasitas KKMB, Pembinaan Pengelolaan Pasar Ikan	kab/kota	19	19	19	19	19	7.120.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Pengelolaan Investasi Pariwisata								0 APBD			DINAS PARIWISATA
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													
Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya		Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi								0 APBD			DINAS PARIWISATA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi											
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi									0 APBD		DINAS PARIWISATA
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri									0 APBD		DINAS PARIWISATA
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL													
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif									0 APBD		DINAS PARIWISATA
		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik									0 APBD		DINAS PARIWISATA
		Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif									0 APBD		DINAS PARIWISATA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar									0 APBD		DINAS PARIWISATA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula									0 APBD		DINAS PARIWISATA
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata									0 APBD		DINAS PARIWISATA
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif									0 APBD		DINAS PARIWISATA
											0 APBD		DINAS PARIWISATA
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	Kali	24	24	24	24	24	19.700.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah laporan pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	Laporan	2	2	2	2	2	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			uraian : 1) Tersedianya pakan ternak unggas yang berkualitas di UPTD ternak unggas	Kali	12	12	12	12	12	11.050.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			2) Tersedianya pakan ternak ruminansia yang berkualitas di UPTD ternak ruminansia	Kali	12	12	12	12	12	8.650.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang disediakan	Komoditi	8	8	8	8	8	332.024.326.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
(1) Penataan prasarana pertanian			1. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier	Ha	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			1. Terlaksananya Pengembangan Padi Organik , kopi dan Horti Organik	Ha	175	275	325	375	425	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
			3. Peningkatan kualitas dan akses Pemasaran hasil pertanian berupa	paket	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Fasilitasi Asosiasi Petani Komoditas Perkebunan										PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	4. Terlaksananya Fasilitasi kemitraan komoditas perkebunan	paket	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	5. Koordinasi dan penetapan harga TBS Kelapa Sawit	SK	24	24	24	24	24	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) UU No. 41/2009	Kab/kota	5	7	9	12	15	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Peningkatan luas pertanian organik untuk produk unggulan (padi, kopi, hortikultura)	Ha	175	275	325	375	425	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	7. Pengembangan Kampung Buah							0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kampung Durian	kampung	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kampung Manggis	kampung	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kampung Jeruk	kampung	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kampung Buah Naga	kampung	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	- Kampung Alpukat	kampung	5	5	5	5	5	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	8. Pengembangan kampung Sayur	kampung	10	10	10	10	10	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				9. Fasilitas Asosiasi Petani Komoditas Hortikultura	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
				10. Fasilitas kemitraan komoditas Hortikultura	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
				11. Pembinaan dan Penumbuhan UP3HP	paket	4	4	4	4	4	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
				12. Terlaksananya Pembangunan lanjutan gedung balai diklat pertanian	unit	1					0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
				13. Sinkronisasi dan Koordinasi terkait penetapan harga TBS Kelapa Sawit	SK	24	24	24	24	24	0	APBD		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
8.1.1.(a) PDB per kapita.														
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terfasilitasi perluasan akses pasar koperasi Terlaksananya pembinaan usaha sektor riil menuju kemitraan Terlaksananya penataan manajemen dan perkuatan usaha koperasi Terlaksananya restrukturisasi usaha koperasi							15.730.105.662	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Terfasilitasinya akses UMKM ke bank dan lembaga non bank Terfasilitasinya pendaftaran merk dan sertifikat halal UKM Terfasilitasinya perlindungan hukum dan konsultasi usaha bagi UKM Terlaksananya pembekalan keterampilan bagi wirausaha baru Terlaksananya pembinaan kelembagaan UKM di lokasi strategis							32.129.900.000	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Fasilitasi perluasan pasar produk UKM sumatera barat Terfasilitasinya pendampingan pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil menengah (PLUT-KUMKM) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk unggulan sumatera barat Terlaksananya pengembangan UKm kerajinan Terlaksananya peningkatan kapasitas kewirausahaan							60.040.650.000	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Operasional Kegiatan Pelabuhan Perikanan Wilayah I	lokasi	3	3	4	4	4	6.800.000.000	APBD	PPW I	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan Ikan Kerapu Pada Kawasan Sentra Produksi	kawasan	5	5	5	5	5	10.630.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	TMMD, Kelembagaaan BBI, Pokdakan dan UPR ,Peningkatan SDM Forum Pengelolaan BBI Se-Sumatera Barat,Pengembangan Tambak Milinial Budidaya Udang Vaname							5.281.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Benih Ikan dan Benur Udang Vanname. (ekor/ tahun) [benih ikan uk. 10 cm dan Benur Udang PL8-PL10], pengembangan percontohan budidaya lobster, udang vaname dan kepiting bakau)	lokasi	2	2	2	2	2	10.000.000.000	APBD	Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Personil (SDM) Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Laut dan Payau yang dilatih, In House Training	lokasi	2	2	2	2	2	1.190.000.000	APBD	Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													
Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL													
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula								0 APBD			DINAS PARIWISATA
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	Kali	24	24	24	24	24	19.700.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Jumlah laporan pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta		Laporan	2	2	2	2	2	0 APBD			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan										
			uraian : 1) Tersedianya pakan ternak unggas yang berkualitas di UPTD ternak unggas	Kali	12	12	12	12	12	11.050.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			2) Tersedianya pakan ternak ruminansia yang berkualitas di UPTD ternak ruminansia	Kali	12	12	12	12	12	8.650.000.000	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang disediakan	Komoditi	8	8	8	8	8	332.024.326.000	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH	Lokasi	10	10	10	10	10	2.045.000.000	APBD	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	Dokumen	10	10	10	10	10	9.456.500.000	APBD	DINAS KEHUTANAN
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR													
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pameran dagang internasional/nasional yang diikuti	event,kali	2 event	2 kali	2 kali	3 kali	3 kali	1.434.926.000	APBD	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI													
	Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri		Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah promosi produk industri kecil dan menengah Sumatera Barat yang diikuti dan dilaksanakan	event,kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	2.314.847.000	APBD	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi marketing digital	pelaku usaha	500 pelaku usaha					361.580.000	APBD	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
													PERDAGANGAN
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			Jumlah pelaku usaha yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui marketplace	pelaku usaha	500 pelaku usaha	500 pelaku usaha	500 pelaku usaha	500 pelaku usaha	500 pelaku usaha	1.489.640.000	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1) Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek dan diversifikasi produk 2) Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi dan standarisasi produk industri (sertifikat halal, MD, SNI, Merk, HACCP)	IKM	975 147	650 147	975 160	975 175	975 192	35.290.469.000	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			3) Jumlah wirausaha baru sektor industri	orang	1136 orang	1355 orang	1500 orang	1700 orang	1800 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			INDUSTRI NON AGRO'							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM sentra kulit yang mendapatkan diversifikasi produk	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan diversifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil	IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengembangan produk olahan semen	IKM	50 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan produksi barang-barang dari bahan baku karet	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM sentra kerajinan yang mendapatkan bimbingan teknis pengolahan limbah kelapa	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengolahan sepatu	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			INDUSTRI AGRO'							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis HaKI bagi IKM	IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis peningkatan kualitas kemasan dan label	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan makanan ringan	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat standarisasi produk industri (Sertifikat halal, MD, sertifikat GMP, dan merk)	sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis CPPOB	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang bertambah kemampuannya dalam melakukan diversifikasi produk berbasis gambir	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan minuman	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan peningkatan kualitas VCO	IKM	30 IKM	35 IKM				0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UPTD PPMATSIRI							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi minyak atsiri	IKM/WWUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah enterpreneur yang mengikuti manajemen kewirausahaan minyak atsiri	WWUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM minyak atsiri yang mengikuti sosialisasi standarisasi minyak atsiri		50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Penghasil minyak atsiri yang mengikuti temu usaha minyak atsiri			50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Minyak Atsiri yang mendapatkan pelatihan teknis dan fasilitasi uji labor minyak		50 IKM, 5 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	atsiri										
	Jumlah operator alat suling minyak atsiri yang berkompeten		10 orang	10 orang	15 orang	15 orang		0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan penunjang kegiatan pelayanan(2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)		3 alat (2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah rumahan alat suling 2 unit							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan dan aplikasi ekonomi digital minyak atsiri serta operasional pelayanan ekonomi digital		1 KEGIATAN	20 KM	40 IKM	40 IKM		0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah fasilitas penelitian dan pengembangan minyak atsiri		1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium		0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Menjalin kerjasama dengan instansi peneliti minyak atsiri dan buyer minyak atsiri				1 MOU	1 MOU		0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UPTD LOGAM							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi prototipe teknologi tepat guna	orang	20 orang	150 orang	150 orang		150 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan rekayasa peralatan dan perkakas bantu mesin pengolahan rotan	IKM						0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat kompetensi pengelasan	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah rekayasa dan rancang bangun teknologi tepat guna yang dihasilkan	unit	1 unit		1 unit		1 unit	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan pelatihan rancang bangun dan perekayasaan alat teknologi tepat guna	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan bimbingan teknis, manajemen dan legalitas usaha perbengkelan	IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM Pengolahan yang mendapatkan pelatihan penggunaan teknologi tepat guna	IKM	20 IKM			20 IKM		0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah enterpreneur IKM logam mesin yang mendapatkan bimtek produksi	orang	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA													
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan E-Katalog Lokal, Pelaksanaan E-Market Place lokal, Pembahasan Dokumen RUP, Pembahasan Finaliasi Dokumen RUP, Penyusunan Draf RUP, Penyusunan RUP Final		8 Komoditi, 3 Kategori, 1 Kegiatan, 1 Dokumen, 1 Dokumen	8 Komoditi, 3 Kategori, 1 Kegiatan, 1 Dokumen, 1 Dokumen	8 Komoditi, 3 Kategori, 1 Kegiatan, 1 Dokumen, 1 Dokumen	8 Komoditi, 3 Kategori, 1 Kegiatan, 1 Dokumen, 1 Dokumen	8 Komoditi, 3 Kategori, 1 Kegiatan, 1 Dokumen, 1 Dokumen	3.540.000.000	APBD		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
Kegiatan 5.02.04.1.01 Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	820.215.200	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	#NAME?		- 1 Pergub - 1 Inovasi	- 3 inovasi - 2 Pergub	- 3 inovasi - 2 Pergub	- 3 inovasi - 2 Pergub	- 3 inovasi - 2 Pergub	1.423.656.500	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		65 WP	70 WP	75 WP	80 WP	85 WP	14.142.302.676	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.													
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA													
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Perkada RTKD	Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	100.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Perusahaan	Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	114.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan	Orang	8,31	8,53	8,75	8,97	8,97	76.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur	[1] Kerjasama dengan swasta yang dilakukan		[1] 1 MoU dan PKS	[1] 1 MoU dan PKS	[1] 1 MoU dan PKS	[1] 1 MoU dan PKS	[1] 1 MoU dan PKS	1.783.943.500	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
	serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		[2] Kerjasama dengan Lintas Lembaga	MoU dan PKS	[2] 1 MoU dan PKS	[2] 1 MoU dan PKS	[2] 1 MoU dan PKS	[2] 1 MoU dan PKS	[2] 1 MoU dan PKS	0 APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Tenaga Kerja yang dinilai	Orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	2.625.000.000	APBD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Antar Kerja	Tenaga Kerja yang ditempatkan	Orang	6250	6250	6250	6250	6250	1.000.000.000	APBD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang disuluh dan dibimbing	Orang	250	250	250	250	250	1.250.000.000	APBD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	[1] Jumlah Pembinaan Petugas AKAD	Orang	[1] 50	[1] 50	[1] 50	[1] 50	[1] 50	2.000.000.000	APBD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			[2] Jumlah Peserta sosialisasi AKAD	Orang	[2] 200	[2] 250	[2] 300	[2] 350	[2] 350	0 APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			[3] Jumlah Peserta Workshop (AKAD, AKL dan AKAN)	Orang	[3] 100	[3] 150	[3] 200	[3] 250	[3] 250	0 APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja usaha mandiri	Orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	1.250.000.000	APBD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Informasi Pasr Kerja Online	Orang	15	15	15	15	15	1.250.000.000	APBD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Job Fair/Bursa Kerja	Persentase penyerapan pencari kerja terhadap lowongan yang tersedia di perusahaan peserta job fair	Persen	150	150	150	150	150	4.000.000.000	APBD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Pelindungan PMI (pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diliindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	300	300	300	300	300	3.500.000.000	APBD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyediaan layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah peserta sosialisasi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) calon pekerja migran (PMI)	Orang	1	1	1	1	1	8.600.000.000	APBD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang diberdayakan	Orang	100	100	100	100	100	3.000.000.000	APBD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah kepesertaan pekerja diperusahaan pada jaminan sosial dan dipenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja sesuai aturan	Perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin													
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang disuluh dan dibimbing	Orang	250	250	250	250	250	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	[1] Jumlah Pembinaan Petugas AKAD	Orang	[1] 50	[1] 50	[1] 50	[1] 50	[1] 50	2.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			[2] Jumlah Peserta sosialisasi AKAD	Orang	[2] 200	[2] 250	[2] 300	[2] 350	[2] 350	0	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			[3] Jumlah Peserta Workshop (AKAD, AKL dan AKAN)	Orang	[3] 100	[3] 150	[3] 200	[3] 250	[3] 250	0	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja usaha mandiri	Orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Informasi Pasr Kerja Online	Orang	15	15	15	15	15	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Job Fair/Bursa Kerja	Persentase penyerapan pencari kerja terhadap lowongan yang tersedia di perusahaan peserta job fair	Persen	150	150	150	150	150	4.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1) Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek dan diversifikasi produk 2) Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi dan standarisasi produk industri (sertifikat halal, MD, SNI, Merk, HACCP)	IKM	975 147	650 147	975 160	975 175	975 192	35.290.469.000	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			3) Jumlah wirausaha baru sektor industri	orang	1136 orang	1355 orang	1500 orang	1700 orang	1800 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			INDUSTRI NON AGRO'							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
											PERDAGANGAN
	Jumlah IKM sentra kulit yang mendapatkan diversifikasi produk	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan diversifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil	IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengembangan produk olahan semen	IKM	50 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan produksi barang-barang dari bahan baku karet	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM sentra kerajinan yang mendapatkan bimbingan teknis pengolahan limbah kelapa	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengolahan sepatu	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	INDUSTRI AGRO'							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis HaKI bagi IKM	IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis peningkatan kualitas kemasan dan label	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan makanan ringan	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat standarisasi produk industri (Sertifikat halal, MD, sertifikat GMP, dan merk)	sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis CPPOB	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah IKM yang bertambah kemampuannya dalam melakukan diversifikasi produk berbasis gambir	IKM	40 IKM					0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan minuman	IKM	40 IKM					0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan peningkatan kualitas VCO	IKM	30 IKM	35 IKM				0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UPTD PPM ATSIRI							0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi minyak atsiri	IKM/WWUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah enterpreneur yang mengikuti manajemen kewirausahaan minyak atsiri	WWUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM minyak atsiri yang mengikuti sosialisasi standarisasi minyak atsiri		50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Penghasil minyak atsiri yang mengikuti temu usaha minyak atsiri			50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Minyak Atsiri yang mendapatkan pelatihan teknis dan fasilitasi uji labor minyak atsiri		50 IKM, 5 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah operator alat suling minyak atsiri yang berkompeten			10 orang	10 orang	15 orang	15 orang	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan penunjang kegiatan pelayanan(2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)		3 alat (2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah rumahan alat suling 2 unit							0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan dan aplikasi ekonomi digital minyak atsiri serta		1 KEGIATAN	20 KM	40 IKM	40 IKM		0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8		
	operasional pelayanan ekonomi digital										PERDAGANGAN		
	Jumlah fasilitas penelitian dan pengembangan minyak atsiri		1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium		0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Menjalin kerjasama dengan instansi peneliti minyak atsiri dan buyer minyak atsiri		1 MOU			1 MOU		0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	UPTD LOGAM							0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Jumlah IKM dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi prototipe teknologi tepat guna	orang	20 orang	150 orang	150 orang	150 orang		0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan rekayasa peralatan dan perkakas bantu mesin pengolahan rotan	IKM						0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat kompetensi pengelasan	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Jumlah rekayasa dan rancang bangun teknologi tepat guna yang dihasilkan	unit	1 unit	1 unit			1 unit	0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan pelatihan rancang bangun dan perekayasaan alat teknologi tepat guna	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan bimbingan teknis, manajemen dan legalitas usaha perbengkelan	IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Jumlah IKM Pengolahan yang mendapatkan pelatihan penggunaan teknologi tepat guna	IKM	20 IKM	20 IKM				0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Jumlah enterpreneur IKM logam mesin yang mendapatkan bimtek produksi	orang	20	20	20	20	20	0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan													
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI												
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya		Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Terfasilitasi perluasan akses pasar koperasi	Terlaksananya pembinaan usaha sektor riil menuju				15.730.105.662	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Restrukturisasi Usaha	kemitraan Terlaksananya penataan manajemen dan perkuatan usaha koperasi Terlaksananya restrukturisasi usaha koperasi										
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Dokumen data koperasi yang akurat Jumlah Koperasi baru Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan/pembinaan kelembagaan Terfasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi Terfasilitasinya peningkatan peran koperasi syariah							19.073.364.772	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Terfasilitasinya akses UMKM ke bank dan lembaga non bank Terfasilitasinya pendaftaran merk dan sertifikat halal UKM Terfasilitasinya perlindungan hukum dan konsultasi usaha bagi UKM Terlaksananya pembekalan keterampilan bagi wirausaha baru Terlaksananya pembinaan kelembagaan UKM di lokasi strategis							32.129.900.000	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
08.04.01 Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.													
8.4.1.(a) Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan													
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								17.800.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		0 APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan	248 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT		0 APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan dan ternak kecil) yang diberdayakan										
	Jumlah pelatihan/Bimtek pengolahan, manajemen usaha dan pemasaran yang terlaksana		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah pembinaan, pameran produk olahan pangan lokal dan pertemuan koordinasi dengan Stakeholder terkait yang terlaksana		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah kelompok pangan lokal yang dibina	12 Kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	0	APBD		DINAS PANGAN
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan								4.659.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat yang dibina	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah kegiatan promosi produk kelompok tani dan pelaku usaha yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah kategori penilaian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara yang dilaksanakan	3 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	0	APBD		DINAS PANGAN
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							2.579.000.000	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah media cetak untuk promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah penyaluran bantuan bahan pangan alternatif pengganti beras yang dilaksanakan	1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional yang diikuti	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN

2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota								1.477.000.000	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah peningkatan kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan pada 19 kab/kota yang dilaksanakan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat provinsi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM/Aparatur Kabupaten/Kota Dalam Penyusunan Peta SKPG Pada 19 Kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah pemetaan situasi pangan dan gizi di Sumatera Barat yang dilaksanakan	-	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD	19 Kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah sumber daya manusia Analis Ketahanan Pangan dan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (Fungsional AKP, PMPH dan APHP)	20 orang	28 orang	32 orang	36 orang	40 orang	44 orang	0	APBD	19 kab/kota	DINAS PANGAN
			Jumlah pelatihan/Bimtek Fungsional, aparatur dan masyarakat	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah data/informasi data komoditi, lokasi, tanggal tanam, jadwal panen dan jumlah produksi	-	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	19 dokumen kab/kota	0	APBD		DINAS PANGAN
08.04.02 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).													
8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.													
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah		Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah perusahaan yang dibina terhadap pembayaran upah pekerja sesuai aturan yang berlaku	Perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	749.001.250	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)							292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran.

2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan	Orang	8,31	8,53	8,75	8,97	8,97	76.000.000.000	APBD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Antar Kerja	Tenaga Kerja yang ditempatkan	Orang	6250	6250	6250	6250	6250	1.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang disuluh dan dibimbing	Orang	250	250	250	250	250	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja usaha mandiri	Orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Informasi Pasr Kerja Online	Orang	15	15	15	15	15	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Job Fair/Bursa Kerja	Persentase penyerapan pencari kerja terhadap lowongan yang tersedia di perusahaan peserta job fair	Persen	150	150	150	150	150	4.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).

2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan	Orang	8,31	8,53	8,75	8,97	8,97	76.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang disuluh dan dibimbing	Orang	250	250	250	250	250	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja usaha mandiri	Orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Informasi Pasr Kerja Online	Orang	15	15	15	15	15	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Job Fair/Bursa Kerja	Persentase penyerapan pencari kerja terhadap lowongan yang tersedia di perusahaan peserta job fair	Persen	150	150	150	150	150	4.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
08.07.01 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).													
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA												
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Perkada RTKD	Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	100.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Perusahaan	Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	114.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur													
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA												
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Perkada RTKD	Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	100.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Perusahaan	Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	114.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
08.08.01 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.													
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
Pelindungan PMI (pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	300	300	300	300	300	3.500.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.													
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah kepesertaan pekerja diperusahaan pada jaminan sosial dan dipenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja sesuai aturan	Perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)													
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN													
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang wajib lapor (WLK) dilakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan.	Perusahaan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.919.500.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan	Perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	3.491.170.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
08.08.02 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.													
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah kepesertaan pekerja diperusahaan pada jaminan sosial dan dipenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja sesuai aturan	Perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN													
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang wajib lapor (WLK) dilakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan.	Perusahaan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.919.500.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.													
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi								0	APBD		DINAS PARIWISATA
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Pengelolaan Investasi Pariwisata								0	APBD		DINAS PARIWISATA
Pengelolaan Kawasan Stratgis Pariwisata Provinsi		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0	APBD		DINAS PARIWISATA
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													
Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis		Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0	APBD		DINAS PARIWISATA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pariwisata Provinsi													
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri								0 APBD			DINAS PARIWISATA
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL													
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula								0 APBD			DINAS PARIWISATA
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								0 APBD			DINAS PARIWISATA
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.													
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													
Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
		Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri								0 APBD			DINAS PARIWISATA
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri								0 APBD			DINAS PARIWISATA
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan							0 APBD			DINAS PARIWISATA
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata							0 APBD			DINAS PARIWISATA
			Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan							0 APBD			DINAS PARIWISATA
			Facilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata							0 APBD			DINAS PARIWISATA
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.													
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi							0 APBD			DINAS PARIWISATA
			Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi							0 APBD			DINAS PARIWISATA
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi							0 APBD			DINAS PARIWISATA
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi							0 APBD			DINAS PARIWISATA
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi							0 APBD			DINAS PARIWISATA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi									0	APBD		DINAS PARIWISATA
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi									0	APBD		DINAS PARIWISATA
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi									0	APBD		DINAS PARIWISATA
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi									0	APBD		DINAS PARIWISATA
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									0	APBD		DINAS PARIWISATA
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									0	APBD		DINAS PARIWISATA
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													
	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi							0	APBD		DINAS PARIWISATA
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi							0	APBD		DINAS PARIWISATA
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri							0	APBD		DINAS PARIWISATA
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri							0	APBD		DINAS PARIWISATA
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan							0	APBD		DINAS PARIWISATA
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan							0	APBD		DINAS PARIWISATA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Kemitraan Pariwisata														
Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan											0 APBD			DINAS PARIWISATA
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata											0 APBD			DINAS PARIWISATA
8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.														
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi								0 APBD			DINAS PARIWISATA
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri								0 APBD			DINAS PARIWISATA
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri								0 APBD			DINAS PARIWISATA
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik								0 APBD			DINAS PARIWISATA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar								0 APBD			DINAS PARIWISATA
8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa														
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rumusan Kebijakan Pembinaan Keuangan dan Bisnis BUMD, Terlaksananya Rapat Koordinasi BUMD		4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	0 APBD			BIRO PEREKONOMIAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026				
1					2	3	4					5	6	7	8
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD					Rumusan Kebijakan Pendirian BUMD, Terlaksananya Rapat Panitia Seleksi Komisaris/Direksi BUMD, Terpilihnya Komisaris/Direksi BUMD		4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	0 APBD			BIRO PEREKONOMIAN
8.10.1.(a) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.															
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Laporan Monitoring dan Evaluasi BUMD, Rumusan kebijakan penyertaan modal daerah pada BUMD dan perseroan lainnya, Terlaksananya rapat Pembinaan dan Evaluasi BUMD		180 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	2.500.000.000	APBD		BIRO PEREKONOMIAN
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Rumusan Kebijakan Pembinaan Keuangan dan Bisnis BUMD, Terlaksananya Rapat Koordinasi BUMD		4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	0 APBD			BIRO PEREKONOMIAN
8.a.1 Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.															
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Laporan Monitoring dan Evaluasi BUMD, Rumusan kebijakan penyertaan modal daerah pada BUMD dan perseroan lainnya, Terlaksananya rapat Pembinaan dan Evaluasi BUMD		180 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	2.500.000.000	APBD		BIRO PEREKONOMIAN
8.b.1 Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.															
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan	Orang	8,31	8,53	8,75	8,97	8,97	8,97	76.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang disuluh dan dibimbing	Orang	250	250	250	250	250	250	1.250.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi

TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
9.1.1* Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.														
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi			Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi		44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 11 ruas, 1 dokumen, 555 meter	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 11 ruas, 1 dokumen, 555 meter	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 11 ruas, 1 dokumen, 555 meter	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 11 ruas, 1 dokumen, 555 meter	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 11 ruas, 1 dokumen, 555 meter	752.542.000.000	APBD	BIDANG BINA MARGA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi		15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	9.342.727.627	APBD	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	28.965.753.526	APBD	UPTD Workshop dan Peralatan	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	60.061.714.351	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	59.256.849.674	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	50.732.531.069	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	52.440.941.791	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		1 dokumen, 118,98 km, 58,9 km	1 dokumen, 118,98 km	1 dokumen, 118,98 km	1 dokumen, 118,98 km	1 dokumen, 118,98 km	49.843.198.710	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	49.675.373.651	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.														
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi			Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi		44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 1 dokumen, 16 ruas, 11 ruas, 1 dokumen, 555 meter	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 555 meter	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 555 meter	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 555 meter	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 555 meter	752.542.000.000	APBD	BIDANG BINA MARGA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi		15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	9.342.727.627	APBD	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	28.965.753.526	APBD	UPTD Workshop dan Peralatan	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	60.061.714.351	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	59.256.849.674	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	50.732.531.069	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	52.440.941.791	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		1 dokumen, 118,98 km, 58,9 km,	1 dokumen, 58,9 km, 118,98 km	1 dokumen, 58,9 km, 118,98 km	1 dokumen, 58,9 km, 118,98 km	1 dokumen, 58,9 km, 118,98 km	49.843.198.710	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	49.675.373.651	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol.														
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi			Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi		44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2	44 dokumen, 1 dokumen, 3 ha, 2,25 ha, 2 dokumen, 2	752.542.000.000	APBD	BIDANG BINA MARGA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
					dokumen, 2 dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 11 ruas, 1 dokumen, 555 meter	dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 11 ruas, 1 dokumen, 555 meter	dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 11 ruas, 1 dokumen, 555 meter	dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 11 ruas, 1 dokumen, 555 meter	dokumen, 8 ruas, 2 ruas, 1 dokumen, 16 ruas, 1 dokumen, 11 ruas, 1 dokumen, 555 meter				
			Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi		15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	15 unit, 13 laporan, 10 unit	9.342.727.627	APBD	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	30 unit, 300 m, 30 m, 350 unit, 200 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 1 unit	28.965.753.526	APBD	UPTD Workshop dan Peralatan	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	1 dokumen, 115,6 km, 114,5 km	60.061.714.351	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	2 dokumen, 121,05 km, 137,95 km	59.256.849.674	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	2 dokumen, 104,4 km, 94,43 km	50.732.531.069	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	2 dokumen, 133,7 km, 87 km	52.440.941.791	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		1 dokumen, 118,98 km, 58,9 km	1 dokumen, 118,98 km, 58,9 km	1 dokumen, 118,98 km, 58,9 km	1 dokumen, 118,98 km, 58,9 km	1 dokumen, 118,98 km, 58,9 km	49.843.198.710	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	2 dokumen, 117,6 km, 93,64 km	49.675.373.651	APBD	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api.													
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN												
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	175.833.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usulan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah		0 Usulan	1 Usulan	0 Usulan	0 Usulan	0 Usulan	66.428.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Provinsi										
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		Jumlah usulan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		1 Usulan	1 Usulan	1 Usulan	1 Usulan	1 Usulan	303.273.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.													
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen pengawasan dan data dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.950.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkot yang melampaui Batas satu daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Tersosialisasinya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi kepada Masyarakat maupun Stakeholder terkait		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	480.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Jumlah Dokumen penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
9.1.2.(a) Jumlah bandara.														
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0	APBD		DINAS PARIWISATA
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi								0	APBD		DINAS PARIWISATA
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri								0	APBD		DINAS PARIWISATA
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri								0	APBD		DINAS PARIWISATA
9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan.														
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	355.363.000	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah dokumen Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.954.358.000	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	339.873.000	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.													
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN												
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah dokumen Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.954.358.000	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	339.873.000	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.													
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1) Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek dan diversifikasi produk 2) Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi dan standarisasi	IKM	975 147	650 147	975 160	975 175	975 192	35.290.469.000	APBD	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			produk industri (sertifikat halal, MD, SNI, Merk, HACCP)										
			3) Jumlah wirausaha baru sektor industri	orang	1136 orang	1355 orang	1500 orang	1700 orang	1800 orang	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			INDUSTRI NON AGRO'							0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM sentra kulit yang mendapatkan diversifikasi produk	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan diversifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil	IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengembangan produk olahan semen	IKM	50 IKM					0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan produksi barang-barang dari bahan baku karet	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM sentra kerajinan yang mendapatkan bimbingan teknis pengolahan limbah kelapa	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengolahan sepatu	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			INDUSTRI AGRO'							0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis HaKI bagi IKM	IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis peningkatan kualitas kemasan dan label	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan makanan ringan	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat standarisasi produk industri (Sertifikat halal, MD, sertifikat GMP, dan merk)	sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis CPPOB	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang bertambah kemampuannya dalam melakukan diversifikasi produk berbasis gambar	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan minuman	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan peningkatan kualitas VCO	IKM	30 IKM	35 IKM				0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UPTD PPMATSIRI							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi minyak atsiri	IKMWWUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah enterpreneur yang mengikuti manajemen kewirausahaan minyak atsiri	WUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM minyak atsiri yang mengikuti sosialisasi standarisasi minyak atsiri		50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Penghasil minyak atsiri yang mengikuti temu usaha minyak atsiri			50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Minyak Atsiri yang mendapatkan pelatihan teknis dan fasilitasi uji labor minyak atsiri		50 IKM, 5 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah operator alat suling minyak atsiri yang berkompeten			10 orang	10 orang	15 orang	15 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan penunjang kegiatan pelayanan(2 unit alat		3 alat (2 unit alat suling minyak atsiri	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)		dan 1 unit fraksinasi)								PERDAGANGAN
	Jumlah rumahan alat suling 2 unit							0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan dan aplikasi ekonomi digital minyak atsiri serta operasional pelayanan ekonomi digital		1 KEGIATAN	20 KM	40 IKM	40 IKM		0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah fasilitas penelitian dan pengembangan minyak atsiri		1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium		0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Menjalin kerjasama dengan instansi peneliti minyak atsiri dan buyer minyak atsiri				1 MOU	1 MOU		0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UPTD LOGAM							0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi prototipe teknologi tepat guna	orang	20 orang	150 orang	150 orang		150 orang	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan rekayasa peralatan dan perkakas bantu mesin pengolahan rotan	IKM						0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat kompetensi pengelasan	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah rekayasa dan rancang bangun teknologi tepat guna yang dihasilkan	unit	1 unit		1 unit		1 unit	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan pelatihan rancang bangun dan perekayasaan alat teknologi tepat guna	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan bimbingan teknis, manajemen dan legalitas usaha perbengkelan	IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Pengolahan yang mendapatkan pelatihan penggunaan	IKM	20 IKM			20 IKM		0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				teknologi tepat guna										PERDAGANGAN
				Jumlah enterpreneur IKM logam mesin yang mendapatkan bimtek produksi	orang	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.														
3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1) Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek dan diversifikasi produk 2) Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi dan standarisasi produk industri (sertifikat halal, MD, SNI, Merk, HACCP)	IKM	975 147	650 147	975 160	975 175	975 192	35.290.469.000	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				3) Jumlah wirausaha baru sektor industri	orang	1136 orang	1355 orang	1500 orang	1700 orang	1800 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				INDUSTRI NON AGRO'							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM sentra kulit yang mendapatkan diversifikasi produk	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan diversifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil	IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengembangan produk olahan semen	IKM	50 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan produksi barang-barang dari bahan baku karet	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM sentra kerajinan yang mendapatkan bimbingan teknis pengolahan limbah kelapa	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengolahan sepatu	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				INDUSTRI AGRO'							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis HaKI bagi IKM	IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis peningkatan kualitas kemasan dan label	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan makanan ringan	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat standarisasi produk industri (Sertifikat halal, MD, sertifikat GMP, dan merk)	sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis CPPOB	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang bertambah kemampuannya dalam melakukan diversifikasi produk berbasis gambir	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan minuman	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan peningkatan kualitas VCO	IKM	30 IKM	35 IKM				0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UPTD PPMATSIRI							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi minyak atsiri	IKM/WWUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah enterpreneur yang mengikuti manajemen kewirausahaan minyak atsiri	WUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM minyak atsiri yang mengikuti sosialisasi standarisasi minyak atsiri		50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Penghasil minyak atsiri yang mengikuti temu usaha			50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	minyak atsiri										PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Minyak Atsiri yang mendapatkan pelatihan teknis dan fasilitasi uji labor minyak atsiri		50 IKM, 5 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah operator alat suling minyak atsiri yang berkompeten		10 orang		10 orang	15 orang	15 orang	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan penunjang kegiatan pelayanan(2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)		3 alat (2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah rumahan alat suling 2 unit							0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan dan aplikasi ekonomi digital minyak atsiri serta operasional pelayanan ekonomi digital		1 KEGIATAN		20 KM	40 IKM	40 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah fasilitas penelitian dan pengembangan minyak atsiri		1 paket Perlengkapan laboratorium		1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Menjalin kerjasama dengan instansi peneliti minyak atsiri dan buyer minyak atsiri					1 MOU	1 MOU	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UPTD LOGAM							0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi prototipe teknologi tepat guna	orang	20 orang	150 orang	150 orang	150 orang		0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan rekayasa peralatan dan perkakas bantu mesin pengolahan rotan	IKM						0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat kompetensi pengelasan	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah rekayasa dan rancang bangun teknologi tepat guna yang dihasilkan	unit	1 unit	1 unit		1 unit		0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan pelatihan rancang bangun dan perekayasaan alat teknologi tepat guna	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM		0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan bimbingan teknis, manajemen dan legalitas usaha perbengkelan	IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM		0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM Pengolahan yang mendapatkan pelatihan penggunaan teknologi tepat guna	IKM	20 IKM			20 IKM			0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah enterpreneur IKM logam mesin yang mendapatkan bimtek produksi	orang	20	20	20	20	20		0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.														
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Antar Kerja	Tenaga Kerja yang ditempatkan	Orang	6250	6250	6250	6250	6250	1.000.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.														
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1) Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek dan diversifikasi produk 2) Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi dan standarisasi produk industri (sertifikat halal, MD, SNI, Merk, HACCP)	IKM	975 147	650 147	975 160	975 175	975 192	35.290.469.000	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				3) Jumlah wirausaha baru sektor industri	orang	1136 orang	1355 orang	1500 orang	1700 orang	1800 orang		0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				INDUSTRI NON AGRO'								0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM sentra kulit yang mendapatkan diversifikasi produk	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM		0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan diversifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil	IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM		0 APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengembangan produk olahan semen	IKM	50 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan produksi barang-barang dari bahan baku karet	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM sentra kerajinan yang mendapatkan bimbingan teknis pengolahan limbah kelapa	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengolahan sepatu	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	INDUSTRI AGRO'							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis HaKI bagi IKM	IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis peningkatan kualitas kemasan dan label	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan makanan ringan	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat standarisasi produk industri (Sertifikat halal, MD, sertifikat GMP, dan merk)	sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis CPPOB	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang bertambah kemampuannya dalam melakukan diversifikasi produk berbasis gambir	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan minuman	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah IKM yang mendapatkan peningkatan kualitas VCO	IKM	30 IKM	35 IKM				0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UPTD PPMATSIRI							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi minyak atsiri	IKM/WWUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah enterpreneur yang mengikuti manajemen kewirausahaan minyak atsiri	WWUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM minyak atsiri yang mengikuti sosialisasi standarisasi minyak atsiri		50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Penghasil minyak atsiri yang mengikuti temu usaha minyak atsiri			50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Minyak Atsiri yang mendapatkan pelatihan teknis dan fasilitasi uji labor minyak atsiri		50 IKM, 5 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah operator alat suling minyak atsiri yang berkompeten			10 orang	10 orang	15 orang	15 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan penunjang kegiatan pelayanan(2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)		3 alat (2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah rumahan alat suling 2 unit							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan dan aplikasi ekonomi digital minyak atsiri serta operasional pelayanan ekonomi digital			1 KEGIATAN	20 KM	40 IKM	40 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah fasilitas penelitian dan pengembangan minyak atsiri			1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Menjalin kerjasama dengan instansi peneliti minyak atsiri dan buyer minyak atsiri					1 MOU	1 MOU	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			UPTD LOGAM							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi prototipe teknologi tepat guna	orang	20 orang	150 orang	150 orang		150 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan rekayasa peralatan dan perkakas bantu mesin pengolahan rotan	IKM						0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat kompetensi pengelasan	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah rekayasa dan rancang bangun teknologi tepat guna yang dihasilkan	unit	1 unit		1 unit		1 unit	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan pelatihan rancang bangun dan perekayasaan alat teknologi tepat guna	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan bimbingan teknis, manajemen dan legalitas usaha perbengkelan	IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah IKM Pengolahan yang mendapatkan pelatihan penggunaan teknologi tepat guna	IKM	20 IKM				20 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah enterpreneur IKM logam mesin yang mendapatkan bimtek produksi	orang	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.													
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Terfasilitasinya akses UMKM ke bank dan lembaga non bank Terfasilitasinya pendaftaran merk dan sertifikat halal UKM Terfasilitasinya perlindungan hukum dan konsultasi usaha bagi UKM Terlaksananya pembekalan keterampilan bagi						32.129.900.000	APBD		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Kepentingan				wirausaha bau Terlaksananya pembinaan kelembagaan UKm di lokasi strategis										
9.4.1* Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.														
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
	Kegiatan 1: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Sub kegiatan 2: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab/Kota	0	19	19	19	19	590.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	laporan	1	0	0	0	0	65.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.4.1.(a) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.														
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
	Kegiatan 1: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Sub kegiatan 2: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab/Kota	0	19	19	19	19	590.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	laporan	1	0	0	0	0	65.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.4.1.(b) Intensitas emisi sektor industri.														
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
	Kegiatan 1: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Sub kegiatan 1: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasi dan disinkronisasi dalam pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab/Kota	0	19	19	19	19	1.690.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah media lingkungan yang dipantau		4	0	0	0	0	538.786.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Sub kegiatan 2: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab/Kota	0	19	19	19	19	590.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	laporan	1	0	0	0	0	65.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.														
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH													
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi			1.150.000.000	APBD		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian di sektor Perindustrian dan Perdagangan		1 rekomendasi	1 rekomendasi		1 rekomendasi	1 rekomendasi	1.775.000.000	APBD		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya penelitian di sektor pertanian, perkebunan dan pangan		1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	2.600.000.000	APBD		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Terlaksananya Penelitian Energi dan Sumberdaya Mineral			1 rekomendasi		1 rekomendasi		750.000.000	APBD		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penelitian tentang lingkungan hidup dan pangan		1 rekomendasi		1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1.435.000.000	APBD		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya Penelitian Kehutanan				1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1.600.000.000	APBD		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian Pekerjaan Umum			1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	2.100.000.000	APBD		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Terlaksananya Penelitian di sektor Perhubungan		1 rekomendasi			1 rekomendasi		675.000.000	APBD		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
9.5.2* Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa,dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.														
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH													
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Koordinasi, Konsultasi, Fasilitasi Kelitbangan dalam Pembangunan, Terlaksananya perumusan arahan dan kebijakan umum kelitbangan serta pertimbangan		1 Tahun, 1 Rumusan Kebijakan	1 Tahun, 1 Rumusan Kebijakan	1 Tahun, 1 Rumusan Kebijakan	1 Tahun, 1 Rumusan Kebijakan	1 Tahun, 1 Rumusan Kebijakan	2.600.000.000	APBD		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				pemanfaatan kegiatan kelitbangan oleh Majelis Pertimbangan Kelitbangan										
9.5.2.(a) Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).														
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH													
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	[1] Terlaksananya updating data kepegawaian [2] Terlaksananya Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	[1] dokumen [2] sistem	[1] 1 DUK [2] 5 sistem	[1] 1 DUK [2] 5 sistem	[1] 1 DUK [2] 5 sistem	[1] 1 DUK [2] 5 sistem	[1] 1 DUK [2] 5 sistem	1.166.160.000	APBD		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	[1] Jumlah dokumen tata naskah kepegawaian yang dikelola [2] Jumlah kartu identitas pegawai bagi Asn yang dikelola [3] Tersedianya laporan IP ASN Pemprov Sumatera Barat	[1] bundel [2] kartu [3] laporan	[1] 23000 bundel [2] 400 kartu [3] 1 laporan	[1] 23000 bundel [2] 400 kartu [3] 1 laporan	[1] 23000 bundel [2] 400 kartu [3] 1 laporan	[1] 23000 bundel [2] 400 kartu [3] 1 laporan	[1] 23000 bundel [2] 400 kartu [3] 1 laporan	1.683.500.000	APBD		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
9.a.1 Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.														
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI													
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi								1.200.000.000	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
				Jumlah Laporan potensi kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
9.b.1 Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.														
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1) Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek dan diversifikasi produk 2) Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi dan standarisasi produk industri (sertifikat halal, MD, SNI, Merk, HACCP)	IKM	975 147	650 147	975 160	975 175	975 192	35.290.469.000	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				3) Jumlah wirausaha baru sektor industri	orang	1136 orang	1355 orang	1500 orang	1700 orang	1800 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				INDUSTRI NON AGRO'							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM sentra kulit yang mendapatkan diversifikasi produk	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan diversifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil	IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	130 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengembangan produk olahan semen	IKM	50 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan produksi barang-barang dari bahan baku karet	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM sentra kerajinan yang mendapatkan bimbingan teknis pengolahan limbah kelapa	IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis pengolahan sepatu	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	INDUSTRI AGRO'							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis HaKI bagi IKM	IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis peningkatan kualitas kemasan dan label	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan makanan ringan	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat standarisasi produk industri (Sertifikat halal, MD, sertifikat GMP, dan merk)	sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	215 sertifikat	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis CPPOB	IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang bertambah kemampuannya dalam melakukan diversifikasi produk berbasis gambir	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah IKM yang mendapatkan diversifikasi produk olahan minuman	IKM	40 IKM					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mendapatkan peningkatan kualitas VCO	IKM	30 IKM	35 IKM				0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	UPTD PPMATSIRI							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi minyak atsiri	IKM/WUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah enterpreneur yang mengikuti manajemen kewirausahaan minyak atsiri	WUB	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM minyak atsiri yang mengikuti sosialisasi standarisasi minyak atsiri		50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Penghasil minyak atsiri yang mengikuti temu usaha minyak atsiri			50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah IKM Minyak Atsiri yang mendapatkan pelatihan teknis dan fasilitasi uji labor minyak atsiri		50 IKM, 5 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	50 IKM, 10 Sampel	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah operator alat suling minyak atsiri yang berkompeten			10 orang	10 orang	15 orang	15 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan penunjang kegiatan pelayanan(2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)		3 alat (2 unit alat suling minyak atsiri dan 1 unit fraksinasi)	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	Perlengkapan laboratorium	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah rumahan alat suling 2 unit							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah peralatan dan aplikasi ekonomi digital minyak atsiri serta operasional pelayanan ekonomi digital		1 KEGIATAN	20 KM	40 IKM	40 IKM		0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Jumlah fasilitas penelitian dan pengembangan minyak atsiri		1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium	1 paket Perlengkapan laboratorium		0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Menjalin kerjasama dengan instansi peneliti minyak atsiri dan buyer minyak atsiri		1 MOU1 MOU					0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				UPTD LOGAM							0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi prototipe teknologi tepat guna	orang	20 orang	150 orang	150 orang		150 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan rekayasa peralatan dan perkakas bantu mesin pengolahan rotan	IKM						0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat kompetensi pengelasan	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah rekayasa dan rancang bangun teknologi tepat guna yang dihasilkan	unit	1 unit	1 unit			1 unit	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan pelatihan rancang bangun dan perekayasaan alat teknologi tepat guna	IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM logam mesin yang mendapatkan bimbingan teknis, manajemen dan legalitas usaha perbengkelan	IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah IKM Pengolahan yang mendapatkan pelatihan penggunaan teknologi tepat guna	IKM	20 IKM	20 IKM				0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Jumlah enterpreneur IKM logam mesin yang mendapatkan bimtek produksi	orang	20	20	20	20	20	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9.b.1.(a) Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi														
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR													
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1		Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	754.704.000	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
(satu) daerah kabupaten/kota													
			Jumlah calon eksportir yang mengikuti bimtek ekspor	orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN													
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Verifikasi Mutu Produk	Jumlah produk yang diverifikasi mutu di kab/kota untuk dilakukan pengujian contoh di laboratorium penguji	komoditi ekspor, komoditi potensial	7 komoditi					407.289.400	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah komoditi potensial yang dipantau	komoditi		7 komoditi	7 komoditi	7 komoditi	7 komoditi	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah layanan pengujian mutu komoditi potensial	komoditi ekspor, komoditi potensial	7 komoditi	7 komoditi	7 komoditi	7 komoditi	7 komoditi	1.538.713.000	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah laboratorium penguji dapat diperpanjang akreditasinya	laboratorium	1 laboratorium	1 laboratorium	1 laboratorium	1 laboratorium	1 laboratorium	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah petugas yang mendapatkan pengembangan kompetensi	orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	0 APBD			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.													
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA													
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas							360.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.03.1.02.11	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah							0 APBD			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
10.1.1* Rasio Gini.														
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH													
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		1	1	1	1	1	679.943.327	APBD		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1	1	1	1	1	1.008.750.000	APBD		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.														
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
1.06.05.1.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	4.628.215.015	APBD		DINAS SOSIAL
10.1.1.(b) Jumlah desa tertinggal.														
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA													
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat		Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Terlaksananya Penataan desa				10 Desa		20 Desa	60.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA													
	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Terlaksananya FGD kegiatan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 2. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring kegiatan		1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang	1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang	1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang	1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang	1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang	1.587.132.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag) Bersama pada Kawasan Perdesaan 4. Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 5. Terlaksananya Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag) Bersama pada Kawasan Perdesaan										
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA													
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Pembinaan dan Monitoring ke Kab/Kota yang menyusun Perbup/Perwako		14 Kab/kota	14 Kab/kota	14 Kab/kota	14 Kab/kota	14 Kab/kota	135.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Terlaksananya Rapat Teknis		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	150.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri.													
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA													
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan,	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam	Terlaksananya Penataan desa				10 Desa		20 Desa	60.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat		rangka Penataan Desa											DAN DESA
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA													
Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal 2. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Indeks Desa Membangun Tahun 2021 3. Terlaksananya Rakor dan Evaluasi Data IDM untuk aparat Kab/Kota		1. 40?Desa Tertinggal 2. 14?Kab/Kota 3. 50?Orang	1. 40?Desa Tertinggal 2. 14?Kab/Kota 3. 50?Orang	1. 40?Desa Tertinggal 2. 14?Kab/Kota 3. 50?Orang	1. 40?Desa Tertinggal 2. 14?Kab/Kota 3. 50?Orang	1. 40?Desa Tertinggal 2. 14?Kab/Kota 3. 50?Orang	1.645.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1. Terlaksananya Acara Serah Terima dan Pelepasan Mahasiswa KKN-PPM 2. Terlaksananya Dukungan TMMD/N ke 110, 111 dan 112 3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi TMMD/N 4. Terlaksananya Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Program KKN-PPM 5. Terlaksananya Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Program KKN-PPM 6. Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis TMMD/N ke 110, 111 dan 112 7. Terlaksananya Rapat Koordinasi TMMD/N ke 110, 111 dan 112		1. 250?Orang 2. 5?Kab/Kota 3. 5?Kab/Kota 4. 18?Kab/Kota 5. 13?Perguruan Tinggi 6. 5?Kab/Kota 7. 250?Orang	1. 250?Orang 2. 5?Kab/Kota 3. 5?Kab/Kota 4. 18?Kab/Kota 5. 13?Perguruan Tinggi 6. 5?Kab/Kota 7. 250?Orang	1. 250?Orang 2. 5?Kab/Kota 3. 5?Kab/Kota 4. 18?Kab/Kota 5. 13?Perguruan Tinggi 6. 5?Kab/Kota 7. 250?Orang	1. 250?Orang 2. 5?Kab/Kota 3. 5?Kab/Kota 4. 18?Kab/Kota 5. 13?Perguruan Tinggi 6. 5?Kab/Kota 7. 250?Orang	1. 250?Orang 2. 5?Kab/Kota 3. 5?Kab/Kota 4. 18?Kab/Kota 5. 13?Perguruan Tinggi 6. 5?Kab/Kota 7. 250?Orang	5.100.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			1. Terlaksananya FGD kegiatan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 2. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring kegiatan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag) Bersama pada Kawasan Perdesaan 4. Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 5. Terlaksananya Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag) Bersama pada Kawasan Perdesaan		1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang					1.587.132.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang								
					1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang								
					1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang								
					1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang								
					1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang								
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA													
Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Pembinaan dan Monitoring ke Kab/Kota yang menyusun Perbup/Perwako		14 Kab/kota	14 Kab/kota	14 Kab/kota	14 Kab/kota	14 Kab/kota	135.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				Bimbingan Teknis terhadap Aparatur Desa terpilih tentang Manajemen Pemerintah Desa khususnya Regulasi terbaru Pemerintah Desa		200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	135.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.1.1.(d) Jumlah daerah tertinggal.														
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA													
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat		Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Terlaksananya Penataan desa				10 Desa		20 Desa	60.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA													
	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal 2. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Indeks Desa Membangun Tahun 2021 3. Terlaksananya Rakor dan Evaluasi Data IDM untuk aparat Kab/Kota		1. 40?Desa Tertinggal 2. 14?Kab/Kota 3. 50?Orang	1. 40?Desa Tertinggal 2. 14?Kab/Kota 3. 50?Orang	1. 40?Desa Tertinggal 2. 14?Kab/Kota 3. 50?Orang	1. 40?Desa Tertinggal 2. 14?Kab/Kota 3. 50?Orang	1. 40?Desa Tertinggal 2. 14?Kab/Kota 3. 50?Orang	1.645.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1. Terlaksananya Acara Serah Terima dan Pelepasan Mahasiswa KKN-PPM 2. Terlaksananya Dukungan TMMD/N ke 110, 111 dan 112 3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi TMMD/N 4. Terlaksananya Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Program KKN-PPM 5.		1. 250?Orang 2. 5?Kab/Kota 3. 5?Kab/Kota 4. 18?Kab/Kota 5. 13?Perguruan Tinggi 6. 5?Kab/Kota 7. 250?Orang	1. 250?Orang 2. 5?Kab/Kota 3. 5?Kab/Kota 4. 18?Kab/Kota 5. 13?Perguruan Tinggi 6. 5?Kab/Kota 7. 250?Orang	1. 250?Orang 2. 5?Kab/Kota 3. 5?Kab/Kota 4. 18?Kab/Kota 5. 13?Perguruan Tinggi 6. 5?Kab/Kota 7. 250?Orang	1. 250?Orang 2. 5?Kab/Kota 3. 5?Kab/Kota 4. 18?Kab/Kota 5. 13?Perguruan Tinggi 6. 5?Kab/Kota 7. 250?Orang	1. 250?Orang 2. 5?Kab/Kota 3. 5?Kab/Kota 4. 18?Kab/Kota 5. 13?Perguruan Tinggi 6. 5?Kab/Kota 7. 250?Orang	5.100.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Terlaksananya Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Program KKN-PPM 6. Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis TMMD/N ke 110, 111 dan 112 7. Terlaksananya Rapat Koordinasi TMMD/N ke 110, 111 dan 112										
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Terlaksananya FGD kegiatan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 2. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring kegiatan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Terlaksananya Pembinaan, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag) Bersama pada Kawasan Perdesaan 4.Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 5. Terlaksananya Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag) Bersama pada Kawasan Perdesaan		1. 8?Kab/Kota 2. 14?Kab/Kota 3. 14?Kab/Kota 4. 30?Orang 5. 50?Orang					1.587.132.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2022	2023	2024	2025	2026					
1			2	3	4					5	6	7	8	
Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Pembinaan dan Monitoring ke Kab/Kota yang menyusun Perbup/Perwako		14 Kab/kota	14 Kab/kota	14 Kab/kota	14 Kab/kota	14 Kab/kota	135.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Bimbingan Teknis terhadap Aparatur Desa terpilih tentang Manajemen Pemerintah Desa khususnya Regulasi terbaru Pemerintah Desa		200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	135.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.														
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA													
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Monev dan koordinasi pengelolaan keuangan Desa/nagari 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa		1. 6?kali 2. 2?kali	1. 6?kali 2. 2?kali	1. 6?kali 2. 2?kali	1. 6?kali 2. 2?kali	1. 6?kali 2. 2?kali	475.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1. Monev dan koordinasi pengelolaan aset Nagari/Desa 2. Terlaksananya Rapat Teknis identifikasi dan		1. 4?kali 2. 1?kali	1. 4?kali 2. 1?kali	1. 4?kali 2. 1?kali	1. 4?kali 2. 1?kali	1. 4?kali 2. 1?kali	175.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	1. Terlaksananya Sosialisasi Pembiayaan Desa yang berasal dari APBD Kab/Kota 2. Terlaksananya FGD Pembiayaan Desa oleh APBD Kabupaten/kota berdasarkan angka kemiskinan, luas wilayah dan topografi Desa 3. Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pembiayaan Desa		1. 14 Kab/Kota / 28 orang 2. 14 Kab/Kota / 28 orang 3. 14 Kab/kota	1. 14 Kab/Kota / 28 orang 2. 14 Kab/Kota / 28 orang 3. 14 Kab/kota	1. 14 Kab/Kota / 28 orang 2. 14 Kab/Kota / 28 orang 3. 14 Kab/kota	1. 14 Kab/Kota / 28 orang 2. 14 Kab/Kota / 28 orang 3. 14 Kab/kota	1. 14 Kab/Kota / 28 orang 2. 14 Kab/Kota / 28 orang 3. 14 Kab/kota	250.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			oleh Kabupaten/kota yang tepat waktu										
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa			1. Terikuti dan terfasilitasinya Promosi Produk BUMNag/BUMDes dalam Gelar TTG Tingkat Nasional 2. Terikuti dan terfasilitasinya Promosi Produk BUMNag/BUMDes dalam SUMBAR EXPO 3. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku BUMNag/BUMDes 4. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Potensi Desa melalui BUMNag/BUMDes 5. Terlaksananya Penilaian BUMNag/BUMDes Tingkat Provinsi Sumatera Barat 6. Terlaksananya Sosialisasi BUMDes/BUMNag 7. Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui BUMNag/BUMDes		1. 1?kali 2. 1?kali 3. 100?Orang 4. 92?Orang 5. 14?Kab./Kota 6. 158?Orang 7. 174?Orang 1. 1?kali 2. 1?kali 3. 100?Orang 4. 92?Orang 5. 14?Kab./Kota 6. 158?Orang 7. 174?Orang 1. 1?kali 2. 1?kali 3. 100?Orang 4. 92?Orang 5. 14?Kab./Kota 6. 158?Orang 7. 174?Orang 1. 1?kali 2. 1?kali 3. 100?Orang 4. 92?Orang 5. 14?Kab./Kota 6. 158?Orang 7. 174?Orang 1. 1?kali 2. 1?kali 3. 100?Orang 4. 92?Orang 5. 14?Kab./Kota 6. 158?Orang 7. 174?Orang 1. 1?kali 2. 1?kali 3. 100?Orang 4. 92?Orang 5. 14?Kab./Kota 6. 158?Orang 7. 174?Orang					1.550.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Terfasilitasinya Penilaian Posyantek Tingkat Nasional 2. Terlaksananya Penilaian Inovator dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat 3. Terlaksananya Gelar Teknologi		7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3. 2?kali 2. 19?Kab/Kota 1. 1?kali	7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3. 2?kali 2. 19?Kab/Kota 1. 1?kali	7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3. 2?kali 2. 19?Kab/Kota 1. 1?kali	7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3. 2?kali 2. 19?Kab/Kota 1. 1?kali	7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3. 2?kali 2. 19?Kab/Kota 1. 1?kali	1.600.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Terikutinya Gelar TTG Tingkat Nasional 4. Terlaksananya pelatihan Posyantek Tingkat Provinsi Sumatera Barat 5. Terlaksananya Penilaian KP-SPAMS Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat 6. Terlaksananya Penilaian Posyantek Tingkat Provinsi Sumatera Barat 7. Terlaksananya Sosialisasi KP-SPAMS Sumatera Barat										
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.													
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Terlaksananaya Pemberian Bantuan Keuangan ke Desa Bantuan Teknis dan Bantuan Pendampingan				10 Desa		0 APBD			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	1. Terlaksananya Sosialisasi Pembiayaan Desa yang berasal dari APBD Kab/Kota 2. Terlaksananya FGD Pembiayaan Desa oleh APBD Kabupaten/kota berdasarkan angka kemiskinan, luas wilayah dan topografi Desa 3. Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pembiayaan Desa oleh Kabupaten/kota		1. 14 Kab/Kota / 28 orang 2. 14 Kab/Kota / 28 orang 3. 14 Kab/kota	1. 14 Kab/Kota / 28 orang 2. 14 Kab/Kota / 28 orang 3. 14 Kab/kota	1. 14 Kab/Kota / 28 orang 2. 14 Kab/Kota / 28 orang 3. 14 Kab/kota	1. 14 Kab/Kota / 28 orang 2. 14 Kab/Kota / 28 orang 3. 14 Kab/kota	1. 14 Kab/Kota / 28 orang 2. 14 Kab/Kota / 28 orang 3. 14 Kab/kota	250.000.000 APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			yang tepat waktu										
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	1. Terikuti dan terfasilitasinya Promosi Produk BUMNag/BUMDes dalam Gelar TTG Tingkat Nasional 2. Terikuti dan terfasilitasinya Promosi Produk BUMNag/BUMDes dalam SUMBAR EXPO 3. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku BUMNag/BUMDes 4. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Potensi Desa melalui BUMNag/BUMDes 5. Terlaksananya Penilaian BUMNag/BUMDes Tingkat Provinsi Sumatera Barat 6. Terlaksananya Sosialisasi BUMDes/BUMNag 7. Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui BUMNag/BUMDes		1. 1?kali 2. 1?kali 3. 100?Orang 4. 92?Orang 5. 14?Kab./Kota 6. 158?Orang 7. 174?Orang	1. 1?kali 2. 1?kali 3. 100?Orang 4. 92?Orang 5. 14?Kab./Kota 6. 158?Orang 7. 174?Orang	1. 1?kali 2. 1?kali 3. 100?Orang 4. 92?Orang 5. 14?Kab./Kota 6. 158?Orang 7. 174?Orang	1. 1?kali 2. 1?kali 3. 100?Orang 4. 92?Orang 5. 14?Kab./Kota 6. 158?Orang 7. 174?Orang	1. 1?kali 2. 1?kali 3. 100?Orang 4. 92?Orang 5. 14?Kab./Kota 6. 158?Orang 7. 174?Orang	1.550.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	FGD tentang Peran BPD dalam Pemerintah Desa dan Sosialisasi Regulasi Desa dan BPD bagi BPD yang baru terpilih		100 orang dan 100 orang	100 orang dan 100 orang	100 orang dan 100 orang	100 orang dan 100 orang	100 orang dan 100 orang	250.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	1. Terfasilitasinya Penilaian Posyantek Tingkat Nasional 2. Terlaksananya Penilaian Inovator		7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3.	7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3.	7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3.	7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3.	7. 40?Orang 6. 19?kab/kota 5. 10?KP-SPAMS 4. 30?orang 3.	1.600.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Sumatera Barat 3. Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Terikutinya Gelar TTG Tingkat Nasional 4. Terlaksananya pelatihan PosyanteK Tingkat Provinsi Sumatera Barat 5. Terlaksananya Penilaian KP-SPAMS Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat 6. Terlaksananya Penilaian PosyanteK Tingkat Provinsi Sumatera Barat 7. Terlaksananya Sosialisasi KP-SPAMS Sumatera Barat								
10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.														
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)		Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	311.732.511	APBD		DINAS SOSIAL
1.06.05.1.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)			100%	100%	100%	100%	100%	4.628.215.015	APBD		DINAS SOSIAL
10.03.01 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.														
4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM														
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Output:	Pembayaran						0	APBD		BIRO HUKUM
				1. Jumlah perkara yang ditangani		10	10	10	10	10	2.439.390.000	APBD		BIRO HUKUM
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Output:	Pembayaran						0	APBD		BIRO HUKUM

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Jumlah perkara masyarakat miskin yang diberi bantuan advokasi hukum		16	16	16	16	16	16	16	16	2.950.650.000	APBD		BIRO HUKUM
	2. Jumlah LAPORAN RANHAM		3	3	3	3	3	3	3	3	0	APBD		BIRO HUKUM
	3. Jumlah permasalahan hukum lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibahas		5	4	4	4	4	4	4	4	0	APBD		BIRO HUKUM
10.3.1.(a) Indeks Kebebasan.														
10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).														
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM													
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Output:	Pembayaran						0	APBD		BIRO HUKUM
				1. Jumlah perkara yang ditangani		10	10	10	10	10	2.439.390.000	APBD		BIRO HUKUM
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Output:	Pembayaran						0	APBD		BIRO HUKUM
				1. Jumlah perkara masyarakat miskin yang diberi bantuan advokasi hukum		16	16	16	16	16	2.950.650.000	APBD		BIRO HUKUM
				2. Jumlah LAPORAN RANHAM		3	3	3	3	3	0	APBD		BIRO HUKUM
				3. Jumlah permasalahan hukum lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibahas		5	4	4	4	4	0	APBD		BIRO HUKUM
10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.														
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan PPRG	Orang	40 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	250.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
		Provinsi											PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	330.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	550.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		[1] PKS; [2] kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	325.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM													
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Output:	Pembayaran						0	APBD		BIRO HUKUM
			1. Jumlah perkara yang ditangani		10	10	10	10	10	2.439.390.000	APBD		BIRO HUKUM
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Output:	Pembayaran						0	APBD		BIRO HUKUM
			1. Jumlah perkara masyarakat miskin yang diberi bantuan advokasi hukum		16	16	16	16	16	2.950.650.000	APBD		BIRO HUKUM

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	2. Jumlah LAPORAN RANHAM		3	3	3	3	3	0	APBD		BIRO HUKUM
	3. Jumlah permasalahan hukum lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibahas		5	4	4	4	4	0	APBD		BIRO HUKUM

10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

10.04.01 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.

2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah		Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah perusahaan yang dibina terhadap pembayaran upah pekerja sesuai aturan yang berlaku	Perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	749.001.250	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Penetapan Upah Minimum (UMP)	SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)									292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)	Penetapan Upah Minimum Kab/Kota(UMK)	SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Penetapan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)									292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.

10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2022	2023	2024	2025	2026					
1			2	3	4					5	6	7	8	
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah kepesertaan pekerja diperusahaan pada jaminan sosial dan dipenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja sesuai aturan	Perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	292.756.125	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN														
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah pengaduan/kasus yang diselesaikan	Pengaduan/Kasus	1	1	1	1	1	1.125.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan	Perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	3.491.170.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
10.04.02 Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.														
10.05.01 Financial Soundness Indicator.														
10.5.1.(a) Indikator Kesehatan Perbankan.														
10.06.01 Proporsi anggota dan hak suara negara- negara berkembang di organisasi internasional.														
10.07.01 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.														
10.07.02 Jumlah negara yang mengimplementa- sikan kebijakan mi- gran yang baik.														
2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
	Pelindungan PMI (pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	300	300	300	300	300	3.500.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegritas secara	Jumlah perusahaan yang diberikan rekomendasi izin cabang	Perusahaan	50	50	50	50	50	1.750.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10.7.2.(a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.														
2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Pelindungan PMI (pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	300	300	300	300	300	3.500.000.000	APBD		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.													
10.07.03 Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.													
10.07.04 Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.													
10.a.1 Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/ berkembang dengan tarif nol persen.													
10.b.1 Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).													
10.c.1 Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.													

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi

TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
11.01.01 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.														
1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	1.04.03.01.01.	Pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Terbentuk, Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Sudah Mandiri	%	12,66	12,66	12,66	0	12,66		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.03.01.02.	Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyadaran Publik	%	12,66	12,66	12,66	0	12,66		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.03.01.03.	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan /permukiman kembali permukiman kumuh	Persentase Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	%	20	20	20	0	20		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.03.01.04.	Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman	Persentase Jumlah Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	%	4,75	4,75	4,75	0	4,75		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.03.01.05.	Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Persentase Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	%	4,75	4,75	4,75	0	4,75		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.03.01.06.	Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman	Persentase Jumlah Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	%	4,75	4,75	4,75	0	4,75		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.03.01.07.	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi masyarakat terdampak Program Pemugaran /peremajaan permukiman kumuh	Pelaksanaan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	%	4,75	4,75	4,75	0	4,75		0 APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.02.01.	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah dokumen site plan dan DED	%	12,66	12,66	12,66	98,73	12,66	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.03.02.03.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah RTLH pada Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.03.02.04.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalm kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Persentase Jumlah Kerjasama Perbaikan RTLH pada Kawasan Kumuh	%	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		.04.03.02.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemyelenggaraan pemugaran/peremajsaan /Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan /Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	%	20	20	20	0	20	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		.04.03.02.06.	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat Yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Jumlah Kepala Keluarga Yang Dibantu	%	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
.04.03.02.07. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha				Persentase Jumlah Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%	0,25	0,25	0,25	0,13	0,25	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
11.02.01 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas														
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Tersosialisasinya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi kepada Masyarakat maupun Stakeholder terkait		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	480.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan aksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen pengawasan dan data dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.950.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkot yang melampaui Batas satu daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Tersosialisasinya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi kepada Masyarakat maupun Stakeholder terkait		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	480.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyeleng garaan Angkutan aksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan			Jumlah Dokumen penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi										
11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum														
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen pengawasan dan data dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.950.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	480.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	APBD		DINAS PERHUBUNGAN
11.03.01 Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk														
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
1.04.02.1.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.02.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Tersedianya data lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	%	26	26	26	0	26	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH														
02.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	02.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase Luas perencanaan penggunaan tanah yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	%	55	60	70	75	80	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	02.10.10.1.01.02	Persentase Luas Pelaksanaan Konsolidasi tanah yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	%	55	60	70	75	80	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	02.10.10.1.01.03	Persentase Luas Pemetaan Zona Nilai Tanah yang dikoordinasikan	%	55	60	70	75	80	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk														
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1.04.02.1.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.02.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Tersedianya data lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	%	26	26	26	0	26	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.1.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.02.	Penyusunan Siteplan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya DED	%	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		1.04.02.1.03.02.	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	1. Dokumen serah terima rumah korban bencana	%	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				2. Dokumen serah terima rumah relokasi program provinsi	%	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
11.03.02 Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis														
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG													
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi)			Terselenggaranya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	116.654.192.044	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Terdapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.065.667.726	APBD	UPTD Pengawasan dan Pengendalian	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
													Bangunan	
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA														
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Sub kegiatan : Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan)			Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat		13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	5.247.728.152	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Terdapatnya penanganan masalah teknis keciptakarya		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3.307.694.256	APBD	UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU								300.000.000	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
			Jumlah Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Dokumen	1	1	1	1	1		0	APBD		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			Terlaksananya persetujuan substansi dan penetapan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat		1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	2.964.901.923	APBD	BIDANG TATA RUANG	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	5.009.951.937	APBD	BIDANG TATA RUANG	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		16 dokumen, 5 kali	16 dokumen, 5 kali	16 dokumen, 5 kali	16 dokumen, 5 kali	16 dokumen, 5 kali	2.949.422.371	APBD	BIDANG TATA RUANG	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	632.818.729	APBD	BIDANG TATA RUANG	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
11.04.01 Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)														
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Festival/pelindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan	wbtbi kali	5	5	5	5	5	10.000.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
				Terlaksananya Pencatatan, Penetapan, Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbl)		50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	5.000.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara	kali	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
				Terlaksananya Kemah Budaya	kali	1	1	1	1	1	2.350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Bimtek kepada penggiat sejarah	kali	1		2			300.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Bertambahnya ODCB di Sumatera Barat	ODCB	10	10	10	10	10	2.700.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			a.??? Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu.	Jumlah kajian/ penelitian koleksi	kajian	6	6	5	6	6	3.150.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
				Jumlah koleksi yang dikonservasi	koleksi	700	700	800	700	700	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
				Jumlah naskah kuno yang ditransliterasi	naskah	2	2	2	0	0	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
				Pendokumentasian koleksi dan label QR	koleksi	500	500	1000	500	500	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
				Terjemahan dan Entry Informasi Koleksi ke Bahasa Inggris	koleksi	1000	1000	1000	1000	0	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Lomba/Festival Tingkat daerah,	kali	3	3	3	3	3	4.600.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
				Terlaksananya Workshop Seni	kali/kesenian	5	5	5	5	5	1.850.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
				Terlaksanya Pameran dan Pergelaran karya Seni	kali	18	18	18	18	18	3.350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah yang dikelola/dilindungi	CB	11	16	21	26	31	4.500.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Lomba Nagari Madani se-Sumatera Barat	kali	1						0 APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Bimtek Pengamalan ABS-SBK Bagi Generasi Muda								0 APBD		DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Permuseuman	kali	2	2	2	2	2	3.000.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Pembentukan Tim Penilai Pendirian Museum Pemerintah di Kabupaten/Kota	Tim Provinsi	1	0	0	0	0	350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Pendampingan Calon Museum Baru	Calon Museum	3	3	3	3	3	1.900.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Registrasi Museum Nagari/Pemerintah	Museum	24	1	1	1	1	350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Terlaksananya Pemilihan Duta Budaya Sumatera Barat Tahun 2022	kali	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Riset terhadap kesenian yang hampir punah	dok	2	2	2	2	2	500.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kebudayaan	kali	3	3	3	3	3	3.305.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah									0 APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		Penetapan Cagar Budaya	Ditetapkan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	CB tidak bergerak	5	5	5	5	5	2.700.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Ditetapkan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	CB bergerak	10	10	10	10	10		0 APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		b.??? Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan	orang	10		10		10	450.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Lomba/Festival Tingkat daerah,	kali	3	3	3	3	3	4.600.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Terlaksananya Workshop Seni	kali/kesenian	5	5	5	5	5	1.850.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Pameran dan Pergelaran karya Seni	kali	18	18	18	18	18	3.350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah yang dikelola/dilindungi	CB	11	16	21	26	31	4.500.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Festival/pelindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan	wbtbi kali	5	5	5	5	5	10.000.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Pencatatan, Penetapan, Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbi)		50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	5.000.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara	kali	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Kemah Budaya	kali	1	1	1	1	1	2.350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Bimtek kepada penggiat sejarah	kali	1		2			300.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Bertambahnya ODCB di Sumatera Barat	ODCB	10	10	10	10	10	2.700.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		a.??? Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu.	Jumlah kajian/ penelitian koleksi	kajian	6	6	5	6	6	3.150.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Jumlah koleksi yang dikonservasi	koleksi	700	700	800	700	700	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Jumlah naskah kuno yang ditransliterasi	naskah	2	2	2	0	0	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Pendokumentasian koleksi dan label QR	koleksi	500	500	1000	500	500	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terjemahan dan Entry Informasi Koleksi ke Bahasa Inggris	koleksi	1000	1000	1000	1000	0	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)													
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Festival/pelindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan	wbtbi kali	5	5	5	5	5	10.000.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Terlaksananya Pencatatan, Penetapan, Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbl)		50 dicatat 10	50 dicatat 10	50 dicatat 10	50 dicatat 10	50 dicatat 10	5.000.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara	kali	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD	DINAS KEBUDAYAAN
	Terlaksananya Kemah Budaya	kali	1	1	1	1	1	2.350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
	1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Bimtek kepada penggiat sejarah	kali	1	2			300.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Bertambahnya ODCB di Sumatera Barat	ODCB	10	10	10	10	10	2.700.000.000	APBD	DINAS KEBUDAYAAN
	a.??? Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu.	Jumlah kajian/ penelitian koleksi	kajian	6	6	5	6	6	3.150.000.000	APBD	DINAS KEBUDAYAAN
	Jumlah koleksi yang dikonservasi	koleksi	700	700	800	700	700	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
	Jumlah naskah kuno yang ditransliterasi	naskah	2	2	2	0	0	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
	Pendokumentasian koleksi dan label QR	koleksi	500	500	1000	500	500	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
	Terjemahan dan Entry Informasi Koleksi ke Bahasa Inggris	koleksi	1000	1000	1000	1000	0	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksanannya Lomba/Festival Tingkat daerah,	kali	3	3	3	3	3	4.600.000.000	APBD	DINAS KEBUDAYAAN
	Terlaksananya Workshop Seni	kali/kesenian	5	5	5	5	5	1.850.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
	Terlaksanya Pameran dan Pergelaran karya Seni	kali	18	18	18	18	18	3.350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Revitalisasi Sarana dan Prasarana UPTD TAMAN BUDAYA	paket	5	5	5	5	5	1.600.000.000	APBD	DINAS KEBUDAYAAN
	Terlaksananya Temnu Karya Taman Budaya Tk. Nasional	kali	1	1	1	1	1	1.840.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
	Terlaksananya Temnu Karya Taman Budaya Tk. Regional	kali	1	1	1	1	1	1.350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah yang dikelola/dilindungi	CB	11	16	21	26	31	4.500.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		Terlaksananya Lomba Nagari Madani se-Sumatera Barat	kali	1					0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Bimtek Pengamalan ABS-SBK Bagi Generasi Muda							0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Terlaksananya Penatakelolaan Adat Istiadat	kab/kota	19					0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Bimbingan bagi Wali Nagari se- Sumatera Barat							0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Tersusunnya Konsep Nagari Madani		100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Lomba/Festival Tingkat daerah,	kali	3	3	3	3	3	4.600.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Workshop Seni	kali/kesenian	5	5	5	5	5	1.850.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Pameran dan Pergelaran karya Seni	kali	18	18	18	18	18	3.350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah yang dikelola/dilindungi	CB	11	16	21	26	31	4.500.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Festival/pelindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan	wbtbi kali	5	5	5	5	5	10.000.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Pencatatan, Penetapan, Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTBI)		50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	50 dicatat 10 penetapan	5.000.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara	kali	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
			Terlaksananya Kemah Budaya	kali	1	1	1	1	1	2.350.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi				Bimtek kepada penggiat sejarah	kali	1	2				300.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				Bertambahnya ODCB di Sumatera Barat	ODCB	10	10	10	10	10	2.700.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
a.??? Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu.				Jumlah kajian/ penelitian koleksi	kajian	6	6	5	6	6	3.150.000.000	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
				Jumlah koleksi yang dikonservasi	koleksi	700	700	800	700	700	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
				Jumlah naskah kuno yang ditransliterasi	naskah	2	2	2	0	0	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
				Pendokumentasian koleksi dan label QR	koleksi	500	500	1000	500	500	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
				Terjemahan dan Entry Informasi Koleksi ke Bahasa Inggris	koleksi	1000	1000	1000	1000	0	0	APBD		DINAS KEBUDAYAAN
11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang														
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang disusun (laporan)		1	1	1	1	1	262.154.443	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.05.02 Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar														
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana daerah tingkat provinsi yang disusun (dokumen)		-	-	1	-	-	414.715.950	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah lembaga bencana daerah yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)		20	20	20	20	20	262.154.443	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah perjanjian kerjasama yang ditetapkan (perjanjian kerjasama)		1	1	1	1	1	26.215.444	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem informasi kebencanaan yang disediakan (sistem)		1	1	1	1	1	804.320.241	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah publikasi data dan informasi kebencanaan yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	279.661.117	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi				Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	681.601.552	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana (kabupaten/kota)		19	19	19	19	19	491.382.288	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB														
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah lembaga bencana daerah yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)		20	20	20	20	20	262.154.443	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah perjanjian kerjasama yang ditetapkan (perjanjian kerjasama)		1	1	1	1	1	26.215.444	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem informasi kebencanaan yang disediakan (sistem)		1	1	1	1	1	804.320.241	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah publikasi data dan informasi kebencanaan yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	279.661.117	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.06.01 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota														
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL													
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			Terlaksananya pembangunan/ pengembangan TPA Sampah Regional		2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	3.017.843.760	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
	Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Sub kegiatan 1: Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	kali	1	1	1	1	1	380.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	kab/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Sub kegiatan 2: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasionalkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	fasilitas	1	1	1	1	1	14.351.467.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes	Kab/Kota	0	2	2	2	2	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya														
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL														
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			Terlaksananya pembangunan/ pengembangan TPA Sampah Regional		2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	3.017.843.760	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Sub kegiatan 2 : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah instansi yang dibina dalam pengelolaan lingkungan	instansi	0	19	19	19	19	617.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan hidup	kelompok masyarakat	0	5	5	5	5	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah anggota saka kalpataru	orang	100	0	0	0	0	1.363.730.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah bank sampah yang dibangun	paket	2	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah	kab/kota	19	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah	kelompok	75	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup	kali	25	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan	orang	90	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	event	2	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah sarana dan prasarana yang dibantu bagi pemukiman/kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah	paket	5	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN													
Kegiatan: Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Sub kegiatan 3: Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang dioperasikan/dipelihara	TPA	0	2	2	2	2	15.600.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah TPA sampah regional yang dioperasikan	TPA	2	0	0	0	0	3.216.434.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah TPA sampah regional yang dipelihara infrastrukturnya	TPA	2	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA sampah regional yang dipantau	laporan	4	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.6.1.(b) Persentase sampah nasional yang terkelola													
11.06.02 Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)													
11.6.2.(a) Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10													
11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara													
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
Kegiatan 1: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Sub kegiatan 1: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasi dan disinkronisasi dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab/Kota	0	19	19	19	19	1.690.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah media lingkungan yang dipantau		4	0	0	0	0	538.786.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.07.01 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.													
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			Terlaksananya persetujuan substansi dan penetapan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat		1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	2.964.901.923	APBD	BIDANG TATA RUANG	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	5.009.951.937	APBD	BIDANG TATA RUANG	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		16 dokumen, 5 kali	16 dokumen, 5 kali	16 dokumen, 5 kali	16 dokumen, 5 kali	16 dokumen, 5 kali	2.949.422.371	APBD	BIDANG TATA RUANG	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	632.818.729	APBD	BIDANG TATA RUANG	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua														
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG													
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			Terlaksananya persetujuan substansi dan penetapan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat		1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	2.964.901.923	APBD	BIDANG TATA RUANG	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	5.009.951.937	APBD	BIDANG TATA RUANG	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		16 dokumen, 5 kali	16 dokumen, 5 kali	16 dokumen, 5 kali	16 dokumen, 5 kali	16 dokumen, 5 kali	2.949.422.371	APBD	BIDANG TATA RUANG	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	632.818.729	APBD	BIDANG TATA RUANG	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
11.07.02 Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)														
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													
2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	2.14.02.1.02.06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Profil KKBPK	buku	-	1	1	1	1	460.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
													PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.01	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kebijakan ketahanan keluarga	Kebijakan	-	1	1	1	-	350.000.000	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.1.01.02	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Jumlah Prototype pembangunan keluarga	prototype	-	-	-	-	-	0	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis Pembinaan yang dilakukan	jenis	2	2	2	2	2	700.000.000	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.1.01.04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Sosialisasi pembinaan Genre	kali	-	5	5	5	5	400.000.000	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.1.01.05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah pembinaan ketahanan keluarga	kali	-	-	-	-	-	0	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
	2.14.04.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah pengelola dan pembina dan yang dibina	orang	38	50	50	50	50	470.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.07	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Penyediaan Materi PIK R	Materi	-	-	114	114	114	500.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11.7.2.(a) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir													
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)												
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.01	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kebijakan ketahanan keluarga	Kebijakan	-	1	1	1	-	350.000.000	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.1.01.02	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Jumlah Prototype pembangunan keluarga	prototype	-	-	-	-	-	0	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis Pembinaan yang dilakukan	jenis	2	2	2	2	2	700.000.000	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14.04.1.01.05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah pembinaan ketahanan keluarga	kali	-	-	-	-	-	0	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
														PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11.a.1 Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.														
11.a.1.(a) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS														
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP													
	Kegiatan 2: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Sub kegiatan 1: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah KLHS RTRW, RDTR, Kawasan Strategis Provinsi yang disusun dan ditinjau	dokumen	0				1	113.207.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP kab/kota	Kab/kota	0	19	19	19	19	236.156.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase pelaksanaan KLHS tata ruang	%	60	0	0	0	0	111.588.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.b.1* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030														
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi yang disusun/direview (dokumen)		-	1	-	1	-	834.212.860	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah pelatihan kebencanaan bagi relawan yang dilaksanakan (kali)		1	1	1	1	1	1.009.294.606	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah pelatihan kebencanaan bagi aparaturnya yang dilaksanakan (kali)		1	1	1	1	1	1.009.294.606	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan risiko bencana yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)		-	20	20	20	20	83.806.900	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah pertemuan/koordinasi/ event/pelatihan antar stakeholder dalam rangka pengelolaan risiko bencana (kali)		1	2	2	1	1	1.643.481.432	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah kerjasama antar lembaga dalam rangka pengelolaan risiko bencana (perjanjian kerjasama)		-	1	1	1	1	213.707.594	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah penguatan/peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana (KSB) yang dilakukan (kali)		10	10	10	10	10	2.621.544.430	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah penguatan/peningkatan kapasitas nagari tangguh bencana (DESTANA) yang dilakukan (kali)		10	10	10	10	10	7.864.633.292	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah peningkatan/ pengembangan kapasitas TRC Provinsi yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	786.463.329	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah koordinasi TRC Provinsi yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	222.831.277	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah dokumen rencana kontinjensi per jenis bencana yang disusun/direview (dokumen)		-	1	1	1	1	1.349.302.259	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) yang disusun/ direview (dokumen)		1	-	-	1	-	829.178.060	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana													
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana provinsi yang disusun (dokumen)	1	2	1	1	1	1.989.293.752	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di sekolah/kampus yang dilakukan (kali)	58	58	58	58	58	1.513.574.893	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan di masyarakat yang dilakukan (kali)	1	1	1	1	1	1.415.833.493	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
			1	1	1	1	1	151.357.490	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana daerah tingkat provinsi yang disusun (dokumen)	-	-	1	-	-	414.715.950	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah lembaga bencana daerah yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	20	20	20	20	20	262.154.443	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah perjanjian kerjasama yang ditetapkan (perjanjian kerjasama)	1	1	1	1	1	26.215.444	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem informasi kebencanaan yang disediakan (sistem)	1	1	1	1	1	804.320.241	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah publikasi data dan informasi kebencanaan yang dilakukan (kali)	1	1	1	1	1	279.661.117	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi yang disusun/direview (dokumen)	-	1	-	1	-	834.212.860	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah penguatan/peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana (KSB) yang dilakukan (kali)	10	10	10	10	10	2.621.544.430	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah penguatan/peningkatan kapasitas nagari tangguh bencana (DESTANA) yang dilakukan (kali)	10	10	10	10	10	7.864.633.292	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah peningkatan/ pengembangan kapasitas TRC Provinsi yang dilakukan (kali)	1	1	1	1	1	786.463.329	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah koordinasi TRC Provinsi yang dilakukan (kali)	1	1	1	1	1	222.831.277	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Penyusunan Rencana Kontinjensi				Jumlah dokumen rencana kontinjensi per jenis bencana yang disusun/direview (dokumen)		-	1	1	1	1	1.349.302.259	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				Jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) yang disusun/direview (dokumen)		1	-	-	1	-	829.178.060	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.c.1 -														
11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal														
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG													
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi)			Terselenggaranya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	116.654.192.044	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Terdapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.065.667.726	APBD	UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA													
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Sub kegiatan : Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan)			Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Keciptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat		13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	5.247.728.152	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Terdapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan		3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3.307.694.256	APBD	UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
12.1.1* Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan														
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								17.800.000.000	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal yang terlaksana	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah Kelompok Wanita Tani di Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sekitar dengan berbagai usaha tani (tanaman sayuran, buah, ikan dan ternak kecil) yang diberdayakan	248 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	100 KWT	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pelatihan/Bimtek pengolahan, manajemen usaha dan pemasaran yang terlaksana		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah pembinaan, pameran produk olahan pangan lokal dan pertemuan koordinasi dengan Stakeholder terkait yang terlaksana		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
			Jumlah kelompok pangan lokal yang dibina	12 Kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	0	APBD		DINAS PANGAN
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan								4.659.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
	Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat yang dibina	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	32 Gapoktan	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah kegiatan promosi produk kelompok tani dan pelaku usaha yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah kategori penilaian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara yang dilaksanakan	3 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	7 kategori	0	APBD		DINAS PANGAN
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							2.579.000.000	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah media cetak untuk promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah penyaluran bantuan bahan pangan alternatif pengganti beras yang dilaksanakan	1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional yang diikuti	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Jumlah peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)							806.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS PANGAN
	Jumlah media cetak untuk Pemasyarakatan Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang disediakan	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah rapat koordinasi dan sosialisasi, rapat koordinasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun											671.000.000	APBD		DINAS PANGAN
				Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan masyarakat yang tersedia	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	APBD		DINAS PANGAN
				Jumlah sosialisasi, rapat koordinasi dan pembahasan Pola Pangan Harapan (PPH) yang dilaksanakan	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	APBD		DINAS PANGAN
12.02.01 Jejak material (material footprint)														
12.02.02 Konsumsi material domestik (domestic material consumption)														
12.03.01 (a)? Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b)? Indeks sampah makanan (Food waste index)														
12.3.1.(a) Persentase sisa makanan														
12.4.1* Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.														
12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri														
12.4.1.(b) Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline														
12.4.2* (a)? Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)? Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.														
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
	Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Sub kegiatan 1: Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	kali	1	1	1	1	1	380.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	kab/kota	19	19	19	19	19	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Sub kegiatan 2: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasionalkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	fasilitas	1	1	1	1	1	14.351.467.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
				Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes	Kab/Kota	0	2	2	2	2	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.05.01 Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang														
12.5.1.(a) Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.														
12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya														
12.6.1(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.														
12.7.1* Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi														
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA													
	Pengeloaan Pengadaan Barang dan Jasa		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan E-Katalog Lokal, Pelaksanaan E-Market Place lokal, Pembahasan Dokumen RUP, Pembahasan Finaliasi Dokumen RUP, Penyusunan Draf RUP, Penyusunan RUP Final		8 Komoditi, 3 Kategori, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan, 1 Dokumen, 1 Dokumen	8 Komoditi, 3 Kategori, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan, 1 Dokumen, 1 Dokumen	8 Komoditi, 3 Kategori, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan, 1 Dokumen, 1 Dokumen	8 Komoditi, 3 Kategori, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan, 1 Dokumen, 1 Dokumen	8 Komoditi, 3 Kategori, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan, 1 Dokumen, 1 Dokumen	3.540.000.000	APBD		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Proses PBJ Melalui Kelompok Kerja		550 Paket	550 Paket	550 Paket	550 Paket	550 Paket	13.900.000.000	APBD		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
12.7.1(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah														
12.7.1(b) Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa														
12.08.01 Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.														
12.8.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup														
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
	Kegiatan 3: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Sub Kegiatan 4: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas media lingkungan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk direhabilitasi	Ha	0	12	12	2	2	205.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah dokumen kelayakan dan DED rencana pemulihan	dokumen	0	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Sub Kegiatan 5: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah dokumen rencana pemulihan yang disusun	dokumen	0	0	0	1	1	550.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.														
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
Pelaksanaan Otonomi Daerah		Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Kab/Kota yang dibina penyelenggaraan urusan pemerintahannya	kab/kota	19	19	19	19	19	19	7.250.000.000	APBD		BIRO PEMERINTAHAN
			Jumlah peringatan hari jadi provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan	kali	1	1	1	1	1	1	0	APBD		BIRO PEMERINTAHAN
			Jumlah peringatan hari otonomi daerah yang dilaksanakan	kali	1	1	1	1	1	1	0	APBD		BIRO PEMERINTAHAN
			Jumlah laporan SPM Provinsi dan Kab/Kota	laporan	1	1	1	1	1	1	0	APBD		BIRO PEMERINTAHAN
12.a.1* Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)														
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN													
3.29.05.1.04	Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	109.699.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terbangunnya Infrastruktur Konservasi Energi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.250.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
12.b.1 Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan														
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan								0	APBD		DINAS PARIWISATA
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata								0	APBD		DINAS PARIWISATA
			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif								0	APBD		DINAS PARIWISATA
12.b.1(a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development														
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWSATA													
	Pengelolaan Kawasan Stratgis Pariwisata Provinsi		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0	APBD		DINAS PARIWISATA
			Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0	APBD		DINAS PARIWISATA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0	APBD		DINAS PARIWISATA
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0	APBD		DINAS PARIWISATA
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0	APBD		DINAS PARIWISATA
								0	APBD		DINAS PARIWISATA
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0	APBD		DINAS PARIWISATA
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								0	APBD		DINAS PARIWISATA

12.c.1* (a)? Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b)? Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Lokasi yang berpotensi bencana dan/atau yang terdampak krisis akibat bencana tingkat Provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai standar		7	7	7	7	7	36.160.517.745	APBD		DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terselenggaranya layanan konseling	Kali	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD		RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana daerah tingkat provinsi yang disusun (dokumen)		-	-	1	-	-	414.715.950	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah lembaga bencana daerah yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)		20	20	20	20	20	262.154.443	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah perjanjian kerjasama yang ditetapkan (perjanjian kerjasama)		1	1	1	1	1	26.215.444	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem informasi kebencanaan yang disediakan (sistem)		1	1	1	1	1	804.320.241	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah publikasi data dan informasi kebencanaan yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	279.661.117	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	681.601.552	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana (kabupaten/kota)		19	19	19	19	19	491.382.288	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana yang disediakan (jenis)		2	2	2	2	2	2.262.794.857	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4					5	6	7	8
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah laporan data dan informasi bencana yang disusun (dokumen)		1	1	1	1	1	6.763.584.632	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana yang disediakan (unit)		1	1	1	1	1	1.572.926.658	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen JITU PASNA Provinsi yang disusun (dokumen)		1	1	1	1	1	706.506.224	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap capaian JITU PASNA Provinsi (laporan)		1	1	1	1	1	1.289.153.828	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi yang disusun/direview (dokumen)		-	1	-	1	-	834.212.860	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah pelatihan kebencanaan bagi relawan yang dilaksanakan (kali)		1	1	1	1	1	1.009.294.606	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah pelatihan kebencanaan bagi aparaturnya yang dilaksanakan (kali)		1	1	1	1	1	1.009.294.606	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan risiko bencana yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)		-	20	20	20	20	83.806.900	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah pertemuan/koordinasi/ event/pelatihan antar stakeholder dalam rangka pengelolaan risiko bencana (kali)		1	2	2	1	1	1.643.481.432	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah kerjasama antar lembaga dalam rangka pengelolaan risiko bencana (perjanjian kerjasama)		-	1	1	1	1	213.707.594	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah penguatan/peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana (KSB) yang dilakukan (kali)		10	10	10	10	10	2.621.544.430	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah penguatan/peningkatan kapasitas nagari tangguh bencana (DESTANA) yang dilakukan (kali)		10	10	10	10	10	7.864.633.292	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah peningkatan/ pengembangan kapasitas TRC Provinsi yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	786.463.329	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah koordinasi TRC Provinsi yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	222.831.277	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah dokumen rencana kontinjensi per jenis bencana yang disusun/direview (dokumen)		-	1	1	1	1	1.349.302.259	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah gladi kesiapsiagaan terhadap bencana tingkat provinsi yang dilakukan (kali)		1	1	1	1	1	917.540.551	APBD	Prov. Sumbar	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4					5	6	7	8
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) yang disusun/ direview (dokumen)		1	-	-	1	-	829.178.060	APBD	Prov. Sumbang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030											
13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana											
13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications											
13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun											
13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)											
13.2.2.(b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)											
13.03.01 Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.											
13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											
13.a.1 Jumlah dana yang disediakan dan mobilisasinya dalam USD per tahun terkait dengan keberlanjutan mobilisasi dana untuk mencapai komitmen 100 milyar USD sampai tahun 2025											
13.a.1.(a) Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim											
13.b.1 Jumlah negara- negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan nationally determined contributions, strategi jangka panjang, rencana nasional adaptasi, dan strategi yang dilaporkan dalam adaptation communications dan national communications											

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi

TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
14.01.01 (a)? Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)? kepadatan sampah plastik terapung														
14.1.1.(a) Presentase penurunan sampah terbuang ke laut														
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL													
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			Terlaksananya pembangunan/ pengembangan TPA Sampah Regional		2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	2 lokasi, 4 TPA	3.017.843.760	APBD	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Sub kegiatan 2 : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah instansi yang dibina dalam pengelolaan lingkungan	instansi	0	19	19	19	19	617.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan hidup	kelompok masyarakat	0	5	5	5	5	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah anggota saka kalpataru	orang	100	0	0	0	0	1.363.730.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah bank sampah yang dibangun	paket	2	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan sampah	kab/kota	19	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah	kelompok	75	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah peliputan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup	kali	25	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan	orang	90	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	event	2	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah sarana dan prasarana yang dibantu bagi pemukiman/kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah	paket	5	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN													
	Kegiatan: Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Sub kegiatan 1: Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen terkait pengelolaan sampah yang disusun	Dokumen	0	1	0	1	3	1.221.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Dokumen naskah akademis Ranperda yang disusun	dokumen	1	0	0	0	0	225.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Dokumen masterplan pengelolaa sampah provinsi sumatera barat dan dokumen studi kelayakan	dokumen	2	0	0	0	0	250.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				penerapan teknologi waste to energy yang disusun										HIDUP
			Sub kegiatan 3: Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang dioperasikan/diperlihara	TPA	0	2	2	2	2	15.600.000.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah TPA sampah regional yang dioperasikan	TPA	2	0	0	0	0	3.216.434.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah TPA sampah regional yang dipelihara infrastrukturnya	TPA	2	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA sampah regional yang dipantau	laporan	4	0	0	0	0	0	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Sub kegiatan 4: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi terkait penyediaan sarana dan prasarana di TPA regional yang dikoordinasi dan disinkronkan dalam penyediaannya	laporan	0	1	1	1	1	143.689.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			sub kegiatan 5: Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sarana dan prasarana penganganan sampah di TPA Regional yang diadakan	Paket	0	0	0	2	2	10.791.000	APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan														
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), Penyediaan sarana dan prasarana KKPD	kawasan	3	4	4	4	4	26.601.783.000	APBD	Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya monitoring bio fisik, penanaman mangrove, Rehabilitasi Terumbu Karang	kab/kota	7	7	7	7	7	8.300.000.000	APBD	DKP Provinsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1. Pengerukan Kolam Pelabuhan di PPI Carocok Tarusan, PPI Surantiah dan PPI Kambang , 2.Pembangunan Kantor PPI Surantiah,3. Pembangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis di PPI Surantiah, 4.Pengadaan Pabrik ES PPI Carocok Tarusan, 5. Pembangunan Balai Pertemuan Nelayan di PPI Surantiah, 6. Pembangunan Mess Petugas Pelabuhan PI Surantiah, 7. Pembangunan Turap dan Jetty PPI Surantiah	lokasi	4	4	4	4	4	31.000.000.000	APBD	PPW I	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Operasional Kegiatan Pelabuhan Perikanan Wilayah I	lokasi	3	3	4	4	4	6.800.000.000	APBD	PPW I	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pembangunan dan penyediaan prasarana pelabuhan Perikanan wilayah II (Rehabilitasi fasilitas untuk 4 PPI (bangis, Sasak, Tiku, Pasir Baru, pagar keliling utk 4 PPI, pabrik es di Sasak, mess nelayan PPI air Bangis, pembuatan dokumen lingkungan PPI tiku dan Pasir baru, fasilitas MCK utk 4 PPI, pemb pos jaga PPI pasir baru, pengerukan kolam pelabuhan)	lokasi	4	4	4	4	4	38.250.000.000	APBD	PPW II	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	(1). Operasional Kegiatan Pelabuhan Perikanan Wilayah II utk 4 PPI (2) pemberdayaan wanita nelayan utk 4 PPI (3) Bintek pelabuhan 4 PPI, (4) Master plan utk 4 PPI	lokasi	4	4	4	4	4	12.850.000.000	APBD	PPW II	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pembangunan dan penyediaan prasarana pelabuhan Perikanan wilayah III (sumur bor pengadaan air bersih, Genset pabrik es, perluasan dermaga, perbaikan jalan komplek, Mess, pagar keliling, cetakan es ,tiang tambat kapal , peralatan bengkel, MCK, rehab rumah nelayan, kendaraan operasional	lokasi	1	1	1	1	1	19.175.000.000	APBD	PPW III	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Operasional Kegiatan Pelabuhan Perikanan Wilayah III	lokasi	1	1	1	1	1	6.710.000.000	APBD	PPW III	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data Perikanan Tangkap	kab/kota	19	19	19	19	19	1.100.000.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana penangkap ikan, alat penangkap ikan, mesin tempel, tramel net, sarana bantu, pengadaan rumpon	unit	5340	5350	5360	5370	5380	109.314.979.000	APBD	Prov. Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap							0	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya restocking, pelestarian sumberdaya Perairan Umum, sarana penangkapan perairan umum	kab/kota	10	12	12	12	12	33.300.000.000	APBD	Prov. Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	sosialisasi Peraturan Perizinan Kapal Perikanan,	orang	60	90	90	90	90	1.070.000.000	APBD	Prov. Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Pelayanan Terpadu Perizinan Kapal Perikanan	kab/kota	7	7	7	7	7	1.625.000.000	APBD	Prov. Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Sosialisasi Perizinan Usaha budidaya air laut dan payau	orang	60	90	90	90	90	895.000.000	APBD	Prov. Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan Ikan Kerapu Pada Kawasan Sentra Produksi	kawasan	5	5	5	5	5	10.630.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	TMMD, Kelembagaaan BBI, Pokdakan dan UPR ,Peningkatan SDM Forum Pengelolaan BBI Se-Sumatera Barat,Pengembangan Tambak Milinial Budidaya Udang Vaname							5.281.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan praarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya	Pengembangan mutu dan peningkatan mutu benih							1.881.494.009	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
			lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan HPI, pembinaan dan Pengawasan OIKB,Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan lingkungan ikan, Pengujian Residu Produk Perikanan Budidaya	kab/kota	19	19	19	19	19	2.730.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	pelatihan dan Pembinaan CBIB, Pengadaan rumput laut dan Sarana Parasarana, Percontohan Budidaya Lobster, Percontohan Pengembangan Budidaya Kepiting Bakau, apartemen kepiting	kab/kota	5	7	8	9		19.900.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	a. Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Pokok UPTD (bak Pakan alami/Bak Tandon air Laut/rumah packing benih, sumur air tawar/gedung kantor/gedung laboratorium/mes karyawan/Mushollah Turap, dll) [DAK/APBD)	lokasi	2	2	2	2	2	13.650.000.000	APBD	Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Benih Ikan dan Benur Udang Vanname. (ekor/ tahun) [benih ikan uk. 10 cm dan Benur Udang PL8-PL10], pengembangan percontohan budidaya lobster, udang vaname dan kepiting bakau)	lokasi	2	2	2	2	2	10.000.000.000	APBD	Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Personil (SDM) Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Laut dan Payau yang dilatih, In House Training	lokasi	2	2	2	2	2	1.190.000.000	APBD	Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan dan pelestarian spesies endemik (jenis ikan)	lokasi	1	1	1	1	1	10.800.000.000	APBD	Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pameran Promosi Tk Provinsi dan Nasional, Peningkatan Pelayanan Informasi Pasar, Peningkatan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan, Peningkatan Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan,	kab/kota	19	19	19	19	19	9.500.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Diversifikasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan	kab/kota	3	4	5	6	6	4.150.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pengembangan Produk Perikanan Non Komsumsi, Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan bagi pengolah UPI, Pelatihan Penerapan GMP/SSOP dalam sistem HACCP, Peningkatan Pelayanan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, Peningkatan Kapasitas KKMB, Pembinaan Pengelolaan Pasar Ikan	kab/kota	19	19	19	19	19	7.120.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan sarana pengolahan Poklaksar , Gerakan memasyarakatkan makan ikan, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan), Peningkatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	kab/kota	19	19	19	19	19	13.880.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan laboratorium(Naik daya listrik, genset), Pengadaan alat-alat laboratorium (waterbath, inkubator,, alat uji lemak), Pengadaan alat-alat laboratorium lainnya (Meja preparasi, lemari jas lab , kursi labor lemari penyimpanan alat organoleptik), Pengadaan suku cadang alat Laboratorium (HPLC, AAS. alat laboratorium lainnya), Rehab kantor/ laboratorium /pagar dan cat gedung kantor	unit	1	1	1	1	1	5.860.962.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Survailen UPI yang mempunyai SKP, Pengawasan Sanitasi Kekerangan, Verifikasi UPI untuk rekomendasi SKP, Pengawasa Terpadu Pemakaian Bahan berbahaya, RSNi, Pengembangan Kapasitas PPMHP dan Temu teknis PPMHP, Penyediaan Bahan kimia, Inhouse Training pengujian Kimia, Mikrobiologi dan Organoleptik ,Pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan Laboratorium	kab/kota	10	12	12	12	15	4.460.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14.2.1.(a) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan														
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengawasan Wilayah Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil + Sosialisasi pulau keci	kab/kota	7	7	7	7	7	1.890.000.000	APBD	DKP Provinsi dan UPTD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya monitoring bio fisik, penanaman mangrove, Rehabilitasi Terumbu Karang	kab/kota	7	7	7	7	7	8.750.000.000	APBD	DKP Provinsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penanaman Pohon Pelindung Pantai	pohon	3000	4000	5000	6000	7000	3.150.000.000	APBD	DKP Provinsi dan UPTD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil								0	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya sekolah pantai, Pemilihan Putra Putri Maritim,Forum Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan Pesisir dlm rangka kesetaraan gender,Tracking ,Mangrove,bersih pantai,Peningkatan sarpras di pulau2 kecil	kab/kota	7	7	7	7	7	11.950.000.000	APBD	Prov. Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Forum Koordinasi Mitra Konservasi dan Peningkatan Kelembagaan peningkatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama	kab/kota	7	7	7	7	7	3.155.628.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan,Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan,Sosialisasi perlindungan nelayan,Asuransi Nelayan / Perlindungan Nelayan	kab/kota	7	7	7	7	7	3.165.000.000	APBD	DKP Provinsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), Penyediaan sarana dan prasarana KKPD	kawasan	3	4	4	4	4	26.601.783.000	APBD	Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya monitoring bio fisik, penanaman mangrove, Rehabilitasi Terumbu Karang	kab/kota	7	7	7	7	7	8.300.000.000	APBD	DKP Provinsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14.03.01 Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai														
14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman														
14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut														
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengawasan Wilayah Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil + Sosialisasi pulau keci	kab/kota	7	7	7	7	7	1.890.000.000	APBD	DKP Provinsi dan UPTD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya monitoring bio fisik, penanaman mangrove, Rehabilitasi Terumbu Karang	kab/kota	7	7	7	7	7	8.750.000.000	APBD	DKP Provinsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penanaman Pohon Pelindung Pantai	pohon	3000	4000	5000	6000	7000	3.150.000.000	APBD	DKP Provinsi dan UPTD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil								0	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya sekolah pantai, Pemilihan Putra Putri Maritim,Forum Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan Pesisir dlm rangka kesetaraan gender,Tracking ,Mangrove,bersih pantai,Peningkatan sarpras di pulau2 kecil	kab/kota	7	7	7	7	7	11.950.000.000	APBD	Prov. Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Forum Koordinasi Mitra Konservasi dan Peningkatan Kelembagaan peningkatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama	kab/kota	7	7	7	7	7	3.155.628.000	APBD	19 Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan,Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan,Sosialisasi perlindungan nelayan,Asuransi Nelayan / Perlindungan Nelayan	kab/kota	7	7	7	7	7	3.165.000.000	APBD	DKP Provinsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), Penyediaan sarana dan prasarana KKPD	kawasan	3	4	4	4	4	26.601.783.000	APBD	Sumbar	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya monitoring bio fisik, penanaman mangrove, Rehabilitasi Terumbu Karang	kab/kota	7	7	7	7	7	8.300.000.000	APBD	DKP Provinsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN													
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tersedianya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah		1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	955.000.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah	3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air	Terlaksananya monitoring pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah		30 Sumur Bor/Sumur	30 Sumur Bor/Sumur	30 Sumur Bor/Sumur	30 Sumur Bor/Sumur	30 Sumur Bor/Sumur	433.689.000	APBD		DINAS ENERGI DAN SUMBER

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
	Provinsi		Tanah			Gali	Gali	Gali	Gali	Gali				DAYA MINERAL
14.06.01 Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)														
14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha														
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Review RZWP3K, Penyusunan dokumen RZWP3K, Sosialisasi Perda dan Pergub kepada masyarakat, TKPRD , Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKPD	kab/kota	7	7	7	7	7	3.260.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Forum Koordinasi penanganan tindak pidana perikanan, Penyidikan Tindak Pidana Perikanan, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Diklat Personil Pengawas PerikananPengadaan Kapal Pengawas, Pos Pengawas untuk personil pengawasan	kab/kota	7	7	7	7	7	42.127.854.000	APBD	Padang	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Koordinasi, Pembinaan Pokmaswas Tk. Prov. Sumbar, Peningkatan Sarana Pokmaswas, Perlengkapan Pokmaswas	kab/kota	7	7	7	7	7	4.950.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Pengawasan Peredaran benih, CPIB pada unit Pembenihan, Pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	Kab/kota	19	19	19	19	19	2.700.000.000	APBD	Kab/Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)	kawasan	3	3	4	5	5	16.150.000.000	APBD		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14.07.01 Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)														
14.a.1 Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan														
14.b.1* Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil														
14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan														
14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi														
14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)														

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi

TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELLOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEJARAGAMAN HAYATI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI													
15.1.1* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan													
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Produksi yang tersedia	Unit	10	10	10	10	10	1.110.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Lindung yang tersedia	Laporan	10	10	10	10	10	1.910.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi (termasuk PNBP)	KPH	10	10	10	10	10	777.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan produksi	Unit	27	27	27	27	27	1.277.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung (termasuk PNBP)	KPH	10	10	10	10	10	778.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan lindung	Unit	20	20	20	20	20	1.031.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit KPHP yang dinilai		3	3	3	3	3	160.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit KPHL yang dinilai		7	7	7	7	7	358.100.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan hutan	Lokasi	10	10	10	10	10	1.022.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH	Lokasi	10	10	10	10	10	2.045.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	Dokumen	10	10	10	10	10	9.456.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pengada dan Pengekar benih dan/atau bibit		10	10	10	10	10	870.445.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah sertifikasi sumber benih		2	2	2	2	2	289.815.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah sertifikasi mutu benih		10	10	10	10	10	292.815.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah sertifikasi mutu bibit	Sertifikat	20	20	20	20	20	289.815.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	Unit	7	7	7	7	7	580.630.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	sub kegiatan : Jumlah dokumen rencana bisnis (desain tapak) yang tersusun	Dokumen	20	20	20	20	20	7.948.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	sub kegiatan : Panjang penataan blok/ pemeliharaan batas pada wilayah KPH yang terlaksana	Km	360	360	360	360	360	4.514.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH yang tersedia dan terpelihara	Unit	10	10	10	10	10	5.112.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek UPTD KPH yang tersusun		11	11	11	11	11	2.556.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah dokumen review rencana pengelolaan yang dilaksanakan		11	11	11	11	11	2.556.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	506.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang terbangun	Hektar	300	300	300	300	300	23.002.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah bangunan sipil teknis kehutanan	Unit	100	100	100	100	100	5.233.720.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah unit persemaian	Unit	1	1	1	1	1	1.770.440.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Kebun Bibit Rakyat yang terbangun		50	50	50	50	50	5.112.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Arboretum untuk pelestarian Sumber Daya Genetik	Unit	2	2	2	2	2	2.556.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan RHL	Dokumen	10	10	10	10	10	766.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5	Dokumen	1	1	1	1	1	766.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kasus Tindak Pidana Kehutanan yang tertangani	Kasus	5	5	5	5	5	1.689.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	Kali	160	160	160	160	160	7.601.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Peta Rawan Kerusakan Hutan	peta	1	1	1	1	1	2.125.780.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Satgas LMPHBN	Orang	450	450	450	450	450	6.403.700.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Kali	20	20	20	20	20	1.022.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Patroli, koordinasi, sinkronisasi Pencegahan Dan penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan pada Wilayah Kelola KPH.	Kali	150	150	150	150	150	6.134.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah masyarakat peduli api yang terfasilitasi.	Orang	150	150	150	150	150	766.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang terkendali.		20	20	20	20	20	526.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif	Komoditi	400	400	400	400	400	5.255.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun yang terkendali.		40	40	40	40	40	526.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
15.01.02 Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya													
15.1.2.(a) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)													
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA													
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Ekosistem		10	10	10	10	10	45.205.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Konservasi Ekosistem yang difasilitasi	Lokasi	10	10	10	10	10	69.468.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
15.02.01 Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari													
15.2.1.(a) Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju													
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Produksi yang tersedia	Unit	10	10	10	10	10	1.110.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Lindung yang tersedia	Laporan	10	10	10	10	10	1.910.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi (termasuk PNBP)	KPH	10	10	10	10	10	777.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan produksi	Unit	27	27	27	27	27	1.277.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung (termasuk PNBP)	KPH	10	10	10	10	10	778.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan lindung	Unit	20	20	20	20	20	1.031.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit KPHP yang dinilai		3	3	3	3	3	160.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit KPHL yang dinilai		7	7	7	7	7	358.100.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan hutan	Lokasi	10	10	10	10	10	1.022.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH	Lokasi	10	10	10	10	10	2.045.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	Dokumen	10	10	10	10	10	9.456.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit		10	10	10	10	10	870.445.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah sertifikasi sumber benih		2	2	2	2	2	289.815.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah sertifikasi mutu benih		10	10	10	10	10	292.815.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah sertifikasi mutu bibit	Sertifikat	20	20	20	20	20	289.815.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	Unit	7	7	7	7	7	580.630.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	sub kegiatan : Jumlah dokumen rencana bisnis (desain tapak) yang tersusun	Dokumen	20	20	20	20	20	7.948.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	sub kegiatan : Panjang penataan blok/ pemeliharaan batas pada wilayah KPH yang terlaksana	Km	360	360	360	360	360	4.514.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH yang tersedia dan terpelihara	Unit	10	10	10	10	10	5.112.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek UPTD KPH yang tersusun		11	11	11	11	11	2.556.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah dokumen review rencana pengelolaan yang dilaksanakan		11	11	11	11	11	2.556.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	506.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang terbangun	Hektar	300	300	300	300	300	23.002.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah bangunan sipil teknis kehutanan	Unit	100	100	100	100	100	5.233.720.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah unit persemaian	Unit	1	1	1	1	1	1.770.440.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Kebun Bibit Rakyat yang terbangun		50	50	50	50	50	5.112.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah Arboretum untuk pelestarian Sumber Daya Genetik	Unit	2	2	2	2	2	2.556.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan RHL	Dokumen	10	10	10	10	10	766.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5	Dokumen	1	1	1	1	1	766.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kasus Tindak Pidana Kehutanan yang tertangani	Kasus	5	5	5	5	5	1.689.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	Kali	160	160	160	160	160	7.601.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Peta Rawan Kerusakan Hutan	peta	1	1	1	1	1	2.125.780.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah satgas LMPHBN	Orang	450	450	450	450	450	6.403.700.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Kali	20	20	20	20	20	1.022.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Patroli, koordinasi, sinkronisasi Pencegahan Dan penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan pada Wilayah Kelola KPH.	Kali	150	150	150	150	150	6.134.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah masyarakat peduli api yang terfasilitasi.	Orang	150	150	150	150	150	766.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang terkendali.		20	20	20	20	20	526.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif	Komoditi	400	400	400	400	400	5.255.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun yang terkendali.		40	40	40	40	40	526.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan													
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	sub kegiatan : Jumlah dokumen rencana bisnis (desain tapak) yang tersusun	Dokumen	20	20	20	20	20	7.948.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	sub kegiatan : Panjang penataan blok/ pemeliharaan batas pada wilayah KPH yang terlaksana	Km	360	360	360	360	360	4.514.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH yang tersedia dan terpelihara	Unit	10	10	10	10	10	5.112.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek UPTD KPH yang tersusun		11	11	11	11	11	2.556.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah dokumen review rencana pengelolaan yang dilaksanakan		11	11	11	11	11	2.556.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	506.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang terbangun	Hektar	300	300	300	300	300	23.002.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah bangunan sipil teknis kehutanan	Unit	100	100	100	100	100	5.233.720.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah unit persemaian	Unit	1	1	1	1	1	1.770.440.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Kebun Bibit Rakyat yang terbangun		50	50	50	50	50	5.112.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Arboretum untuk pelestarian Sumber Daya Genetik	Unit	2	2	2	2	2	2.556.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan RHL	Dokumen	10	10	10	10	10	766.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5	Dokumen	1	1	1	1	1	766.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kasus Tindak Pidana Kehutanan yang tertangani	Kasus	5	5	5	5	5	1.689.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	Kali	160	160	160	160	160	7.601.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Peta Rawan Kerusakan Hutan	peta	1	1	1	1	1	2.125.780.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah satgas LMPHBN	Orang	450	450	450	450	450	6.403.700.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Kali	20	20	20	20	20	1.022.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Patroli, koordinasi, sinkronisasi Pencegahan Dan penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan pada Wilayah Kelola KPH.	Kali	150	150	150	150	150	6.134.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah masyarakat peduli api yang terfasilitasi.	Orang	150	150	150	150	150	766.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
15.4.1* Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi													
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA													
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Ekosistem		10	10	10	10	10	45.205.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Konservasi Ekosistem yang difasilitasi	Lokasi	10	10	10	10	10	69.468.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
15.4.2* Indeks tutupan hijau pegunungan													
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Produksi yang tersedia	Unit	10	10	10	10	10	1.110.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Lindung yang tersedia	Laporan	10	10	10	10	10	1.910.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi (termasuk PNBPN)	KPH	10	10	10	10	10	777.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan produksi	Unit	27	27	27	27	27	1.277.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung (termasuk PNBPN)	KPH	10	10	10	10	10	778.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan lindung	Unit	20	20	20	20	20	1.031.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit KPHP yang dinilai		3	3	3	3	3	160.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit KPHL yang dinilai		7	7	7	7	7	358.100.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan hutan	Lokasi	10	10	10	10	10	1.022.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH	Lokasi	10	10	10	10	10	2.045.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	Dokumen	10	10	10	10	10	9.456.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pengada dan Pongedar benih dan/atau bibit		10	10	10	10	10	870.445.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah sertifikasi sumber benih		2	2	2	2	2	289.815.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah sertifikasi mutu benih		10	10	10	10	10	292.815.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah sertifikasi mutu bibit	Sertifikat	20	20	20	20	20	289.815.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	Unit	7	7	7	7	7	580.630.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	sub kegiatan : Jumlah dokumen rencana bisnis (desain tapak) yang tersusun	Dokumen	20	20	20	20	20	7.948.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	sub kegiatan : Panjang penataan blok/ pemeliharaan batas pada wilayah KPH yang terlaksana	Km	360	360	360	360	360	4.514.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH yang tersedia dan terpelihara	Unit	10	10	10	10	10	5.112.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek UPTD KPH yang tersusun		11	11	11	11	11	2.556.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah dokumen review rencana pengelolaan yang dilaksanakan		11	11	11	11	11	2.556.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	506.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang terbangun	Hektar	300	300	300	300	300	23.002.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah bangunan sipil teknis kehutanan	Unit	100	100	100	100	100	5.233.720.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah unit persemaian	Unit	1	1	1	1	1	1.770.440.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Kebun Bibit Rakyat yang terbangun		50	50	50	50	50	5.112.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Arboretum untuk pelestarian Sumber Daya Genetik	Unit	2	2	2	2	2	2.556.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan RHL	Dokumen	10	10	10	10	10	766.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5	Dokumen	1	1	1	1	1	766.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kasus Tindak Pidana Kehutanan yang tertangani	Kasus	5	5	5	5	5	1.689.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	Kali	160	160	160	160	160	7.601.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah Peta Rawan Kerusakan Hutan	peta	1	1	1	1	1	2.125.780.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah satgas LMPHBN	Orang	450	450	450	450	450	6.403.700.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Kali	20	20	20	20	20	1.022.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Patroli, koordinasi, sinkronisasi Pencegahan Dan penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan pada Wilayah Kelola KPH.	Kali	150	150	150	150	150	6.134.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
			Jumlah masyarakat peduli api yang terfasilitasi.	Orang	150	150	150	150	150	766.500.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang terkendali.		20	20	20	20	20	526.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026				
1			2	3	4					5	6	7	8
		Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif	Komoditi	400	400	400	400	400	5.255.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun yang terkendali.		40	40	40	40	40	526.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
15.5.1* Indeks Daftar Merah													
(Red-list index)													
15.6.1* Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata													
15.07.01 Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal													
15.7.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL													
15.8.1* Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)													
15.09.01 (a)? Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan													
(b)? integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi													
15.9.1.(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis													
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA													
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Ekosistem		10	10	10	10	10	45.205.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
		Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Konservasi Ekosistem yang difasilitasi	Lokasi	10	10	10	10	10	69.468.000.000	APBD		DINAS KEHUTANAN
15.a.1 (a)? Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan													
(b)? pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi													
dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati													
15.a.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan													
15.b.1 (a)? Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan													
(b)? pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi													
dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati													
15.b.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan													
15.c.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap													
15.c.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL													

Matriks 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi

TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
16.01.01 Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.														
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.														
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peraturan Gubernur tentang Pemantauan Orang Asing yang disusun		1					1.000.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Deseminasi pencegahan paham radikalisme dan potensi aksi terorisme		3	3	3	3	3	1.250.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi	kali	1	2	2	2	2	1.500.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	kali	5	5	5	5	5	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat tim Pemantauan Orang Asi	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data dan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Buku pemetaan potensi konflik di daerah	buku	1	1	1	1	1	4.000.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Data keberadaan orang asing di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data permasalahan strategis daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Informasi potensi penyebaran paham radikalisme dan potensi aksi teror di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Laporan rencana aksi terpadu penanganan konflik	laporan	3	3	3	3	3	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rapat Koordinasi Tim Forkopimda	kali	4	4	4	4	4	9.200.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Tim Forkopimda	kali	12	12	12	12	12	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data dan informasi isu strategis di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.01.02 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.														
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.														
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peraturan Gubernur tentang Pemantauan Orang Asing yang disusun		1					1.000.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Deseminasi pencegahan paham radikalisme dan potensi aksi terorisme		3	3	3	3	3	1.250.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi	kali	1	2	2	2	2	1.500.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	kali	5	5	5	5	5	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat tim Pemantauan Orang Asi	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Data dan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Buku pemetaan potensi konflik di daerah	buku	1	1	1	1	1	4.000.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data keberadaan orang asing di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data permasalahan strategis daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Informasi potensi penyebaran paham radikalisme dan potensi aksi teror di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Laporan rencana aksi terpadu penanganan konflik	laporan	3	3	3	3	3	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rapat Koordinasi Tim Forkopimda	kali	4	4	4	4	4	9.200.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Tim Forkopimda	kali	12	12	12	12	12	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data dan informasi isu strategis di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.01.03 Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.														
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.														
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peraturan Gubernur tentang Pemantauan Orang Asing yang disusun		1					1.000.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Deseminasi pencegahan paham radikalisme dan potensi aksi terorisme		3	3	3	3	3	1.250.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi	kali	1	2	2	2	2	1.500.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
				Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	kali	5	5	5	5	5	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat tim Pemantauan Orang Asing	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data dan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Buku pemetaan potensi konflik di daerah	buku	1	1	1	1	1	4.000.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data keberadaan orang asing di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data permasalahan strategis daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Informasi potensi penyebaran paham radikalisme dan potensi aksi teror di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Laporan rencana aksi terpadu penanganan konflik	laporan	3	3	3	3	3	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rapat Koordinasi Tim Forkopimda	kali	4	4	4	4	4	9.200.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Tim Forkopimda	kali	12	12	12	12	12	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data dan informasi isu strategis di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya.														
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Peraturan Daerah tentang maksiat yang disusun	0	1					3.200.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	kali	4	6	6	6	6	4.250.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Penguatan Forum Kerukunan Umat Bearagama di Daerah	kali	6	6	6	6	6	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Penguatan dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi di Daerah	kali	2	2	2	2	2	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pembinaan Pencegahan Perbuatan Maksiat	kali	2	2	2	2	2	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pembinaan Pencegahan Penyebaran Aliran Sesat/Terlarang	kali	2	2	2	2	2	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama	kali	2	3	4	4	4	9.800.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat tim Forum Kerukunan Umat Beragama	kali	6	6	6	6	6	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Koordinasi Penguatan dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi	kali	2	2	2	2	2	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Dokumen Rencana Aksi Daerah tentang P4GN	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Daerah tentang P4GN di daerah	kali	2	3	4	4	5	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Laporan hasil koordinasi dan pembinaan penguatan forum kerukunan umat beragama di daerah	laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Laporan hasil koordinasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di daerah	laporan	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Data Aliran Kepercayaan Yang Menyimpang di Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	2.000.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data Penyalahgunaan Narkoba di Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data potensi konflik antar umat beragama di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peraturan Gubernur tentang Pemantauan Orang Asing yang disusu		1					1.000.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Deseminasi pencegahan paham radikalisme dan potensi aksi terorisme		3	3	3	3	3	1.250.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
			Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
		8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi	kali	1	2	2	2	2	1.500.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	kali	5	5	5	5	5	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat tim Pemantauan Orang Asi	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data dan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Buku pemetaan potensi konflik di daerah	buku	1	1	1	1	1	4.000.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data keberadaan orang asing di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data permasalahan strategis daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Informasi potensi penyebaran paham radikalisme dan potensi aksi teror di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Laporan rencana aksi terpadu penanganan konflik	laporan	3	3	3	3	3	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rapat Koordinasi Tim Forkopimda	kali	4	4	4	4	4	9.200.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Tim Forkopimda	kali	12	12	12	12	12	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Data dan informasi isu strategis di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.02.01 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir														
16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.														
16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya														
16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.														
16.02.03 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.														
16.03.01 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.														
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.														
16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi														
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM													
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Output:	Pembayaran						0	APBD		BIRO HUKUM
				1. Jumlah perkara yang ditangani		10	10	10	10	10	2.439.390.000	APBD		BIRO HUKUM
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Output:	Pembayaran						0	APBD		BIRO HUKUM
				1. Jumlah perkara masyarakat miskin yang diberi bantuan advokasi hukum		16	16	16	16	16	2.950.650.000	APBD		BIRO HUKUM
				2. Jumlah LAPORAN RANHAM		3	3	3	3	3	0	APBD		BIRO HUKUM
				3. Jumlah permasalahan hukum lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibahas		5	4	4	4	4	0	APBD		BIRO HUKUM
16.3.1.(c) Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.														
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM													
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Output:	Pembayaran						0	APBD		BIRO HUKUM
				1. Jumlah perkara yang ditangani		10	10	10	10	10	2.439.390.000	APBD		BIRO HUKUM
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Output:	Pembayaran						0	APBD		BIRO HUKUM
				1. Jumlah perkara masyarakat miskin yang diberi bantuan advokasi hukum		16	16	16	16	16	2.950.650.000	APBD		BIRO HUKUM
				2. Jumlah LAPORAN RANHAM		3	3	3	3	3	0	APBD		BIRO HUKUM
				3. Jumlah permasalahan hukum lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibahas		5	4	4	4	4	0	APBD		BIRO HUKUM
16.03.02 Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.														
16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.														
16.03.03 Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.														
16.3.3 (a) Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)														
16.04.01 Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).														
16.04.02 Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.														
16.05.01 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.														
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).														
16.05.02 Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.														
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.														
16.6.1.(a) Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.														
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI													
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peserta Bimtek Agen Perubahan				-			1.919.777.166	APBD		BIRO ORGANISASI
				Penyusunan Draft Road Map RB		-	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah Peserta Bimtek Pokja 8 Area Manajemen		30 Orang	-		30 orang		0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Kab/Kota yang dibina/Asistensi		18 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Sosialisasi Road Map RB		104 Orang	104 Orang	104 Orang			0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Dokumen Pergub Road Map RB Pemprov. Sumbar 2021-2026		1 Dokumen	-	-			0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Dokumen Monev Pergub Road Map RB Pemprov. Sumbar 2021-2026		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Pembahasan Materi RB OPD			51 OPD	51 OPD	51 OPD	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Sosialisasi RB		-	-	-	-	150 orang	0	APBD		BIRO ORGANISASI
			Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Pemantauan Pelaksanaan Budaya Kerja		1 Pergub					1.307.200.400	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja		1 Pergub	-				0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Sosialisasi Pergub Budaya Kerja		60 Orang	60 Orang		19 Kab/Kota		0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah OPD yang mengikuti Monev Pergub Budaya Kerja			51 OPD		51 OPD		0	APBD		BIRO ORGANISASI
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.097.564.197	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Kab/Kota yang dibina Implementasi SAKIPnya		-	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah yang disusun		-	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan		2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta yang ditingkatkan Pemahamannya tentang SAKIP (OPD dan Kab/Kota)		-	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching /asistensi Dokumen SAKIPnya		2 Kab/Kota	6 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta yang ditingkatkan pemahamannya tentang SAKIP (Tim Penguatan SAKIP Provinsi)		30 Orang	30 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Percepatan Implementasi SAKIP Prov. Sumbar			110 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Implementasi SAKIP			51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	0	APBD		BIRO ORGANISASI
			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan							2.296.992.996	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam		4 Perangkat Daerah	10 Perangkat	10 Perangkat	10 Perangkat	10 Perangkat	0	APBD		BIRO ORGANISASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Penyusunan Probis			Daerah	Daerah	Daerah	Daerah				
				Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan SOP		4 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kabupaten/Kota		6 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	0	APBD		BIRO ORGANISASI
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							3.476.741.147	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Inovasi Layanan Publik yang diinput dalam sistem		50 Inovasi	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Digitalisasi Pelayanan Publik		110 orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan		50 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP yang Menerapkan SIPP		20 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan		20 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi		20 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI													
	2.?? Pendampingan dan Asistensi		a. ? Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan Dan Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	5.049.809.945	APBD		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			b. ? Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Kegiatan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	1	1	1	5.408.286.870	APBD		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			c. ?? Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	4	4	4	4	4	5.888.754.714	APBD		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			d. ? Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Penegakan Integritas	Laporan	2	2	2	2	2	5.212.831.648	APBD		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ? B														
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI													
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Kelembagaan Perangkat Daerah		1 Ranperda /Ranpergub					356.067.164	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Kelembagaan Perangkat Daerah			1 Ranperda /Ranpergub	1 Ranperda /Ranpergub	1 Ranperda /Ranpergub	1 Ranperda /Ranpergub	1.723.866.470	APBD		BIRO ORGANISASI
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten /Kota	Laporan Ranperda Kab/Kota yang difasilitasi		1 Dok					370.205.950	APBD		BIRO ORGANISASI
				Persentase Jumlah Rekomendasi Penataan Kelembagaan yang Dikeluarkan			80%	100%	100%	100%	1.733.752.600	APBD		BIRO ORGANISASI
			Penataan Analisis Jabatan	Tersusunnya Penataan Jabatan Perangkat Daerah dan Pembinaan Penataan Jabatan Pada Kab/Kota		1 Laporan					356.043.450	APBD		BIRO ORGANISASI
				Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan Penataan			80%	90%	100%	100%	1.738.128.000	APBD		BIRO ORGANISASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jabatan										
				Persentase Perangkat Daerah yang telah dibina Penataan Jabatan			80%	90%	100%	100%	0	APBD		BIRO ORGANISASI
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peserta Bimtek Agen Perubahan				-			1.919.777.166	APBD		BIRO ORGANISASI
				Penyusunan Draft Road Map RB		-	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Bimtek Pokja 8 Area Manajemen		30 Orang	-		30 orang		0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Kab/Kota yang dibina/Asistensi		18 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Sosialisasi Road Map RB		104 Orang	104 Orang	104 Orang			0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Dokumen Pergub Road Map RB Pemprov. Sumbang 2021-2026		1 Dokumen	-	-			0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Dokumen Monev Pergub Road Map RB Pemprov. Sumbang 2021-2026		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Pembahasan Materi RB OPD			51 OPD	51 OPD	51 OPD	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Sosialisasi RB		-	-	-	-	150 orang	0	APBD		BIRO ORGANISASI
			Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Pemantauan Pelaksanaan Budaya Kerja		1 Pergub					1.307.200.400	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja		1 Pergub	-				0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Sosialisasi Pergub Budaya Kerja		60 Orang	60 Orang		19 Kab/Kota		0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah OPD yang mengikuti Monev Pergub Budaya Kerja			51 OPD		51 OPD		0	APBD		BIRO ORGANISASI
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.097.564.197	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Kab/Kota yang dibina Implementasi SAKIPnya		-	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah yang disusun		-	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan		2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta yang ditingkatkan Pemahamannya tentang SAKIP (OPD dan Kab/Kota)		-	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching /asistensi Dokumen SAKIPnya		2 Kab/Kota	6 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta yang ditingkatkan pemahamannya tentang SAKIP (Tim Penguatan SAKIP Provinsi)		30 Orang	30 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Percepatan Implementasi SAKIP Prov.			110 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0	APBD		BIRO ORGANISASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Sumbar										
				Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Implementasi SAKIP			51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	0	APBD		BIRO ORGANISASI
			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan							2.296.992.996	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan Probis		4 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan SOP		4 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kabupaten/Kota		6 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	0	APBD		BIRO ORGANISASI
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							3.476.741.147	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Inovasi Layanan Publik yang diinput dalam sistem		50 Inovasi	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Digitalisasi Pelayanan Publik		110 orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan		50 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP yang Menerapkan SIPP		20 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan		20 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi		20 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ? B														
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI													
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peserta Bimtek Agen Perubahan				-			1.919.777.166	APBD		BIRO ORGANISASI
				Penyusunan Draft Road Map RB		-	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Bimtek Pokja 8 Area Manajemen		30 Orang	-		30 orang		0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Kab/Kota yang dibina/Asistensi		18 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Sosialisasi Road Map RB		104 Orang	104 Orang	104 Orang			0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Dokumen Pergub Road Map RB Pemprov. Sumbar 2021-2026		1 Dokumen	-	-			0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Dokumen Monev Pergub Road Map RB Pemprov. Sumbar 2021-2026		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Pembahasan Materi RB OPD			51 OPD	51 OPD	51 OPD	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Sosialisasi RB		-	-	-	-	150 orang	0	APBD		BIRO ORGANISASI
			Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Pemantauan Pelaksanaan Budaya Kerja		1 Pergub					1.307.200.400	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja		1 Pergub	-				0	APBD		BIRO ORGANISASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah Peserta Sosialisasi Pergub Budaya Kerja		60 Orang	60 Orang		19 Kab/Kota		0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah OPD yang mengikuti Monev Pergub Budaya Kerja			51 OPD		51 OPD		0	APBD		BIRO ORGANISASI
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.097.564.197	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Kab/Kota yang dibina Implementasi SAKIPnya		-	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah yang disusun		-	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan		2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta yang ditingkatkan Pemahamannya tentang SAKIP (OPD dan Kab/Kota)		-	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching /asistensi Dokumen SAKIPnya		2 Kab/Kota	6 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta yang ditingkatkan pemahamannya tentang SAKIP (Tim Penguatan SAKIP Provinsi)		30 Orang	30 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Percepatan Implementasi SAKIP Prov. Sumbar			110 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Implementasi SAKIP			51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	0	APBD		BIRO ORGANISASI
			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan							2.296.992.996	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan Probis		4 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan SOP		4 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kabupaten/Kota		6 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	0	APBD		BIRO ORGANISASI
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							3.476.741.147	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Inovasi Layanan Publik yang diinput dalam sistem		50 Inovasi	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Digitalisasi Pelayanan Publik		110 orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan		50 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP yang Menerapkan SIPP		20 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan		20 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi		20 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI													
	2.?? Pendampingan dan Asistensi		a.? Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan Dan Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	5.049.809.945	APBD		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			b.? Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Kegiatan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	1	1	1	5.408.286.870	APBD		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			c.?? Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	4	4	4	4	4	5.888.754.714	APBD		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			d.? Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Penegakan Integritas	Laporan	2	2	2	2	2	5.212.831.648	APBD		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
16.06.02 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.														
16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pembangunan Rumah Sakit	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung IGD Terpadu	Gedung	1					130.000.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
		1.02.02.1.01.03		Tersedianya DED Gedung Hostel	Dokumen		1				1.000.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
				Tersedianya DED Gedung Rawat Ibu dan Anak	Dokumen			1			1.000.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
				Tersedianya DED Gedung Rawat Inap Penyakit Jantung, Mata, THT dan Paru	Dokumen				1		1.000.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
				Tersedianya DED Gedung Rawat Jalan	Dokumen					1	1.500.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
				Terlaksananya Pembangunan gedung Hostel	Gedung			1			75.000.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
				Terlaksananya Pembangunan gedung Rawat Inap Ibu dan Anak	Gedung				1		100.000.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
				Terlaksananya Pembangunan Gedung R. Inap Jantung, THT dan Paru	Gedung					1	125.000.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.10.1.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah fasilitas pengembangan rs yang terbangun	Unit	3	2	0	1	1	10.500.000.000	APBD		RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SAANIN
		1.02.02.10.1.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang terbangun	Unit	1	2	1	1	0	8.500.000.000	APBD		RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SAANIN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
		1.02.02.10.1.05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rumah Dinas Yang Dikembangkan	Unit	-	-	-	3	0	1.500.000.000	APBD		RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. Saanin
		1.02.02.10.1.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terpeliharanya Fasilitas Gedung RS	Unit	4	2	1	-	1	35.500.000.000	APBD		RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. Saanin
		1.02.02.10.1.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Penunjang Medik yang tersedia	Unit	42	27	16	15	16	19.700.000.000	APBD		RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. Saanin
		1.02.02.10.1.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Terlaksananya sarana pendukung	Unit		1	1			800.000.000	APBD		RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. Saanin
		1.02.02.10.1.12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Terlaksananya prasarana pendukung	Unit	-	-	-	-	1	500.000.000	APBD		RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. Saanin
		1.02.02.10.1.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan dan alat penunjang medik yang tersedia	Unit	1	-	-	-	-	600.000.000	APBD		RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. Saanin
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah sakit	Teraksananya Pengembangan Rumah sakit		1	8				569.055.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		unit/set	160/	170/	160/	152/	140/	190.000.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
					unit/set	20	30	25	20	25	0	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
		1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		bulan	12	12	12	12	12	75.000.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit			3	1	1	1		344.124.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Unit	1	1	1	1	1	159.570.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
		1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan		Unit	0	1	0	0	0	30.000.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
		1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya		Paket	2	2	2	2	2	91.576.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
		1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makan dan Minum Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Paket	4	1	12.274	1	1	61.930.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terselenggaranya layanan konseling	Kali	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD		RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. Saanin
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.03	Pengadaan A;at/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terlaksananya Pembenahan Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet di RS	unit		1				150.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. Achmad Mochtar Bukittingi
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin RS Klas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah dan Provinsi	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya penilaian /survey Akreditasi RS	kegiatan	1			1		700.000.000	APBD		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. Achmad Mochtar Bukittingi
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL													
	Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-		Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan	Terlaksananya Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Rasio	82,60 / 3.40	82,75/ 3.41	82,90/ 3.43	83,05/ 3.45	83,20 / 3.47	613.772.000	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
	Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		dan Non Perizinan Penanaman Modal											PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Laporan Audit Mutu Pelayanan	laporan	1	1	1	1	1	0	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terfasilitasinya izin SIPSAKATO yang tidak sesuai dengan SOP	Izin/non izin	18	18	18	18	18	2.558.444.000	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Terfasilitasinya/ termediasinya pengaduan izin yang bermasalah yang dilaporkan langsung maupun di kanal resmi Lapor SP4N	Pengaduan	10	10	10	10	10	0	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	kali	1	1	1	1	1	0	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/insentif Daerah	pertemuan	-	-	-	1	1	239.042.000	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin dan Non Izin Yang Diterbitkan	Izin/ non izin	1.850	2.000	2.200	2.400	2.500	4.341.597.000	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	85	85,52	86,38	87,27	88,13	0	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Adanya Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Informasi	Sistem	1	1	1	1	1	0	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Terlaksananya Forum PTSP	orang	75	75	75	75	75	0	APBD	PADANG	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI													
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							3.476.741.147	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Inovasi Layanan Publik yang diinput dalam sistem		50 Inovasi	-	-	-	-	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah Peserta Digitalisasi Pelayanan Publik		110 orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan		50 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP yang Menerapkan SIPP		20 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan		20 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI
				Jumlah UKPP yang mengikuti		20 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	75 UKPP	0	APBD		BIRO ORGANISASI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Kompetisi										
16.07.01 Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.														
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).														
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan PPRG	Orang	40 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	250.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	330.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	550.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		[1] PKS; [2] kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	325.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Materi	-	-	2 materi	2 materi	-	260.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.02.02	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	[1] Jumlah SLTA-MA yang diadvokasi [2] Jumlah ormas yang diadvokasi	[1] SLTA [2] Ormas	[1] -SLTA [2]- Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	850.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.02.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah sekolah yang dilakukan implementasi pendidikan kependudukan	Sekolah	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
														KELUARGA BERENCANA
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.10	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	jumlah Advokasi dan sosialisasi	kali	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	jumlah Advokasi dan sosialisasi	kali	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah pembinaan dan pengawasan	kali	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).														
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan PPRG	Orang	40 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	250.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	330.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	550.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		[1] PKS; [2] kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	325.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Materi	-	-	2 materi	2 materi	-	260.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.02.02	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	[1] Jumlah SLTA-MA yang diadvokasi [2] Jumlah ormas yang diadvokasi	[1] SLTA [2] Ormas	[1] -SLTA [2]- Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	[1] 10 SLTA [2] 2 Ormas	850.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.02.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah sekolah yang dilakukan implementasi pendidikan kependudukan	Sekolah	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.10	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	jumlah Advokasi dan sosialisiasi	kali	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	jumlah Advokasi dan sosialisiasi	kali	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah pembinaan dan pengawasan	kali	-	-	-	-	-	0	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16.07.02 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.														
16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi														
16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan														
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK													
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Bimbingan Teknis Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terlaksana	kali	2	2	2	2	2	20.981.298.497	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
				Pendidikan Politik Masyarakat yang terlaksana	kali	12	12	12	12	12	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar yang telaksana	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Verifikasi Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Bantuan Keuangan Partai Politik yang terealisasi	%	100	100	100	100	100	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rapat Kerja Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	kali	4	4	4	4	4	2.550.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Koordinasi Perkembangan Politik Daerah	kali	2	2	2	2	2	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Tim Perkembangan Politik Daerah	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Laporan hasil koordinasi perkembangan politik dan demokrasi di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan mum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan perkembangan politik di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1.890.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.7.2.(c) Indeks Kesetaraan														
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan PPRG	Orang	40 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	250.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	330.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
														KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi		Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	19 Kab/ Kota	550.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.02.1.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi		[1] PKS; [2] kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	[1] 2 PKS; [2] 1 kali	325.000.000	APBD		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK													
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bimbingan Teknis Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terlaksana	kali	2	2	2	2	2	20.981.298.497	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pendidikan Politik Masyarakat yang terlaksana	kali	12	12	12	12	12	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar yang telaksana	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Verifikasi Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Bantuan Keuangan Partai Politik yang terealisasi	%	100	100	100	100	100	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rapat Kerja Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	kali	4	4	4	4	4	2.550.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Koordinasi Perkembangan Politik Daerah	kali	2	2	2	2	2	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Rapat Tim Perkembangan Politik Daerah	kali	4	4	4	4	4	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Laporan hasil koordinasi perkembangan politik dan demokrasi di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	0	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
		8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan mum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan perkembangan politik di daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1.890.000.000	APBD		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.08.01 Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara- negara berkembang di Organisasi Internasional.														
16.8.1.(a.) Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.														
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.														
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Kebijakan Teknis Yang Ditetapkan	dokumen	0	1	1	1	1	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen data penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	dokumen	1	1	1	1	1	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah dokumen regulasi terkait tata kelola yang ditetapkan	dokumen	1	1	2	1	1	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah perjanjian Kerjasama Terkait Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	PKS	1	1	1	1	1	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	dokumen	0	0	0	0	0	85.428.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	kali	4	4	4	4	4	309.533.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Aparatur mengikuti sosialisasi peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	orang	1	1	1	1	1	250.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Komunikasi. Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, informasi dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	orang	1	1	1	1	1	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Rapat koordinasi terkait Pendaftaran penduduk	kali	2	2	2	2	2	250.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah stakehokder yang mendapatkan layanan konsultasi terkait pendaftaran penduduk	jenis stakeholder	0	2	2	2	2	63.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dinas Dukcapil Kab/ Kota yang dibina terkait pendaftaran penduduk	kab/kota	19	19	19	19	19	500.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah aparaturn mengikuti Bimtek terkait pendaftaran penduduk	Orang	76	76	76	76	76	500.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis Yang Ditetapkan	dokumen	0	1	1	1	1	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah regulasi terkait tata kelola pencatatan sipil	dokumen	1	2	2	2	2	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan peristiwa penting	PKS	1	[1] - [2] 19	[1] - [2] 19	[1] - [2] 19	[1] - [2] 19	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil diKabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan Kab/ Kota yang difasilitasi	unit	1	1	1	1	1	138.272.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang disusun	dokumen	2	0	0	0	0	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil	kali	3	2	3	3	3	376.689.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	orang	1	2	2	2	2	250.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Komunikasi. Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, informasi dan edukasi terkait Pencatatan Sipil	orang	1	1	1	1	1	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Rapat koordinasi terkait Pencatatan Sipil	kali	2	2	2	2	2	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah stakeholder yang mendapatkan layanan konsultasi terkait Pencatatan Sipil	jenis stakeholder	0	2	2	2	2	68.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dinas Dukcapil Kab/ Kota yang dibina terkait Pencatatan Sipil	kab/kota	19	19	19	19	19	500.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah aparatur mengikuti Bimtek terkait Pencatatan Sipil	Orang	38	38	38	38	38	500.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.														
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis Yang Ditetapkan	dokumen	0	1	1	1	1	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah regulasi terkait tata kelola pencatatan sipil	dokumen	1	2	2	2	2	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan peristiwa penting	PKS	1	[1] - [2] 19	[1] - [2] 19	[1] - [2] 19	[1] - [2] 19	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil diKabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan Kab/ Kota yang	unit	1	1	1	1	1	138.272.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				difasilitasi										PENCATATAN SIPIL
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang disusun	dokumen	2	0	0	0	0	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil	kali	3	2	3	3	3	376.689.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	orang	1	2	2	2	2	250.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Komunikasi. Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, informasi dan edukasi terkait Pencatatan Sipil	orang	1	1	1	1	1	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Rapat koordinasi terkait Pencatatan Sipil	kali	2	2	2	2	2	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah stakehokder yang mendapatkan layanan konsultasi terkait Pencatatan Sipil	jenis stakeholder	0	2	2	2	2	68.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dinas Dukcapil Kab/ Kota yang dibina terkait Pencatatan Sipil	kab/kota	19	19	19	19	19	500.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah aparatur mengikuti Bimtek terkait Pencatatan Sipil	Orang	38	38	38	38	38	500.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun														
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis Yang Ditetapkan	dokumen	0	1	1	1	1	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah regulasi terkait tata kelola pencatatan sipil	dokumen	1	2	2	2	2	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan peristiwa penting	PKS	1	[1] - [2] 19	[1] - [2] 19	[1] - [2] 19	[1] - [2] 19	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil diKabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan Kab/ Kota yang difasilitasi	unit	1	1	1	1	1	138.272.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang disusun	dokumen	2	0	0	0	0	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil	kali	3	2	3	3	3	376.689.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi terkait	orang	1	2	2	2	2	250.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
				Pencatatan Sipil										PENCATATAN SIPIL
			Komunikasi. Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, informasi dan edukasi terkait Pencatatan Sipil	orang	1	1	1	1	1	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Rapat koordinasi terkait Pencatatan Sipil	kali	2	2	2	2	2	125.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah stakeholder yang mendapatkan layanan konsultasi terkait Pencatatan Sipil	jenis stakeholder	0	2	2	2	2	68.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dinas Dukcapil Kab/ Kota yang dibina terkait Pencatatan Sipil	kab/kota	19	19	19	19	19	500.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah aparaturnya mengikuti Bimtek terkait Pencatatan Sipil	Orang	38	38	38	38	38	500.000.000	APBD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.10.01 Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.														
16.10.1.(a) Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.														
16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).														
16.10.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.														
16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.														
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.01	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Tersedianya regulasi kebijakan teknis bidang IKP							450.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tersedianya Dokumen rekomendasi Hasil monitoring opini dan aspirasi publik							1.450.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.03	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Tersedianya rekomendasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan daerah yang terindikasi krisis							850.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedia rilis dan video kegiatan pemerintah							3.250.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengadaan infrastruktur baliho, videotron dan terlaksananya diseminasi/sosialisasi							23.010.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Rakor PPID, Workshop PPID, Vakasi DIP dan DIP							2.750.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	Publikasi pada media cetak, media elektronik, media online, media sosial dan media luar ruang							6.000.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Bintek jurnalistik rakor pembina KIM dan Media Tradisional se Sumatera Barat							2.000.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.09	Manajemen komunikasi krisis	Tersedianya dokumentasi terkait kebijakan komunikasi krisis							750.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
		2.16.02.1.01.10	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Pranata humas yang mengikuti Bimtek							1.100.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tersedia dukungan administrasi KI dan persentase sengketa informasi yang terselesaikan							14.000.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terbinanya hubungan dengan media dan komunitas dan terpilihnya media tradisional terbaik							2.150.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif														
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.01	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Tersedianya regulasi kebijakan teknis bidang IKP							450.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tersedianya Dokumen rekomendasi Hasil monitoring opini dan aspirasi publik							1.450.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.03	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Tersedianya rekomendasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan daerah yang terindikasi krisis							850.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedia rilis dan video kegiatan pemerintah							3.250.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengadaan infrastruktur baliho, videotron dan terlaksananya diseminasi/sosialisasi							23.010.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Rakor PPID, Workshop PPID, Vakasi DIP dan DIP							2.750.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	Publikasi pada media cetak, media elektronik, media online, media sosial dan media luar ruang							6.000.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Bintek jurnalistik rakor pembina KIM dan Media Tradisional se Sumatera Barat							2.000.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.09	Manajemen komunikasi krisis	Tersedianya dokumentasi terkait kebijakan komunikasi krisis							750.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.10	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Pranata humas yang mengikuti Bimtek							1.100.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tersedia dukungan administrasi KI dan persentase sengketa informasi yang terselesaikan							14.000.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terbinanya hubungan dengan media dan komunitas dan terpilihnya media tradisional terbaik							2.150.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
16.10.2.(b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.														
16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.														
16.b.1 Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.														

[illegible]

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemerintah Daerah untuk Mencapai Rencana Capaian Provinsi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.														
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	820.215.200	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	#NAME?		- 1 Pergub - 1 Inovasi	- 3 inovasi - 2 Pergub	- 3 inovasi - 2 Pergub	- 3 inovasi - 2 Pergub	- 3 inovasi - 2 Pergub	1.423.656.500	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	#NAME?		- 2 Kali - 2 jenis	- 2 Kali - 3 jenis	- 2 Kali - 2 jenis	- 2 Kali - 2 jenis	- 2 Kali - 2 jenis	2.779.430.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	- .Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak - Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang disediakan - Jumlah stiker road tax yang disediakan		- 1.150.000 lembar - 2 unit	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	5.570.397.524	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	#NAME?		- 216 WP - 5 WP	- 234 WP - 5 WP	- 234 WP - 5 WP	- 234 WP - 5 WP	- 234 WP - 5 WP	2.150.182.250	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola		- 5 Dokumen - 3 aplikasi	- 5 Dokumen	- 5 Dokumen	- 5 Dokumen	- 5 Dokumen	2.682.902.700	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah NPWPD WP yang ditetapkan				-	-	-	0	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani			8 WP	8 WP	8 WP	8 WP	430.000.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.200.000.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		65 WP	70 WP	75 WP	80 WP	85 WP	14.142.302.676	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah surat permohonan yang diproses			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		400.000.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.12	Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah pengawasan yang dilakukan		18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	2.471.594.400	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	#NAME?		- 12 kali - 12 kali - 12 kali	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	2.031.142.750	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	400.000.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	820.215.200	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	#NAME?		- 1 Pergub - 1 Inovasi	- 3 inovasi - 2 Pergub	- 3 inovasi - 2 Pergub	- 3 inovasi - 2 Pergub	- 3 inovasi - 2 Pergub	1.423.656.500	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	#NAME?		- 2 Kali - 2 jenis	- 2 Kali - 3 jenis	- 2 Kali - 2 jenis	- 2 Kali - 2 jenis	- 2 Kali - 2 jenis	2.779.430.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	- .Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak - Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang disediakan - Jumlah stiker road tax yang disediakan		- 1.150.000 lembar - 2 unit	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	5.570.397.524	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	#NAME?		- 216 WP - 5 WP	- 234 WP - 5 WP	- 234 WP - 5 WP	- 234 WP - 5 WP	- 234 WP - 5 WP	2.150.182.250	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola		- 5 Dokumen - 3 aplikasi	- 5 Dokumen	- 5 Dokumen	- 5 Dokumen	- 5 Dokumen	2.682.902.700	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah NPWPD WP yang ditetapkan				-	-	-	0	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani			8 WP	8 WP	8 WP	8 WP	430.000.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.200.000.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		65 WP	70 WP	75 WP	80 WP	85 WP	14.142.302.676	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah surat permohonan yang diproses			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		400.000.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.12	Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah pengawasan yang dilakukan		18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	2.471.594.400	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	#NAME?		- 12 kali - 12 kali - 12 kali	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	2.031.142.750	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	400.000.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.														
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	820.215.200	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	#NAME?		- 1 Pergub - 1 Inovasi	- 3 inovasi - 2 Pergub	- 3 inovasi - 2 Pergub	- 3 inovasi - 2 Pergub	- 3 inovasi - 2 Pergub	1.423.656.500	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
		5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	#NAME?		- 2 Kali - 2 jenis	- 2 Kali - 3 jenis	- 2 Kali - 2 jenis	- 2 Kali - 2 jenis	- 2 Kali - 2 jenis	2.779.430.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	- Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak - Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang disediakan - Jumlah stiker road tax yang disediakan		- 1.150.000 lembar - 2 unit	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	5.570.397.524	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	#NAME?		- 216 WP - 5 WP	- 234 WP - 5 WP	- 234 WP - 5 WP	- 234 WP - 5 WP	- 234 WP - 5 WP	2.150.182.250	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola		- 5 Dokumen - 3 aplikasi	- 5 Dokumen	- 5 Dokumen	- 5 Dokumen	- 5 Dokumen	2.682.902.700	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah NPWPD WP yang ditetapkan				-	-	-	0	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani			8 WP	8 WP	8 WP	8 WP	430.000.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.200.000.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		65 WP	70 WP	75 WP	80 WP	85 WP	14.142.302.676	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah surat permohonan yang diproses			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		400.000.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.12	Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah pengawasan yang dilakukan		18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	2.471.594.400	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	#NAME?		- 12 kali - 12 kali - 12 kali	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	2.031.142.750	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	400.000.000	APBD		BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.02.01 Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara- negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/ Komite Bantuan Pembangunan.														
17.2.1.(a) Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB														
17.03.01 Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.														
17.03.02 Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.														
17.3.2.(a) Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.														
17.4.1* Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.														
17.05.01 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara- negara berkembang termasuk negara- negara kurang berkembang														
17.06.01 Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya														
17.6.1.(a) Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga														
17.6.1.(b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)														
17.07.01 Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.														
17.8.1* Persentase pengguna internet														
17.09.01 Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara- Selatan, Selatan- Selatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang														
17.9.1.(a) Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026				
1				2		3	4					5	6	7	8
17.9.1.(b) Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular															
17.10.01 Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).															
17.10.1(a) Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati															
17.11.01 Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.															
17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas															
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR														
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pameran dagang international/nasional yang diikuti	event,kali	2 event	2 kali	2 kali	3 kali	3 kali	1.434.926.000	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	754.704.000	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Jumlah calon eksportir yang mengikuti bimtek ekspor	orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	0	APBD		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
17.12.01 Rata-rata tarif terbobot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.															
17.13.1* Tersedianya Dashboard Makroekonomi.															
17.14.01 Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.															
17.15.01 Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.															
17.16.01 Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.															
17.17.01 Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).															
17.17.1.(a) Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.															
17.17.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).															
17.17.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.															
17.18.01 Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs															
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1	1	1	1	1	1.008.750.000	APBD		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		1	1	1	1	1	915.000.000	APBD		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
17.18.1.(a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.															
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya buku Profil Daerah		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	8.360.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
				Tersedianya buku SBDA		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
				Tersedianya buku PDRB Prov Sumbar		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
				Tersedianya Buku Statistik Sektoral Provinsi		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI,	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
														INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Tersedianya Buku Statistik Sektoral Dinas Kominfo Provinsi		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Jumlah Survey Statistik Sektoral		2 survey	2 survey	2 survey	2 survey	2 survey	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Petugas Statistik Sektoral yang dilatih		100	150	150	200	200	1.584.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya buku Metadata Statistik Sektoral		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1.712.500.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan Sosialisasi/Rakor / Workshop yang dilaksanakan		5	6	6	7	8	2.200.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.05	Pengembangan Infrastruktur			1	1	1	1	1	1.925.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			1	1	1	1	1	1.500.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
17.18.1.(b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.														
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL													
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya buku Profil Daerah		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	8.360.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Tersedianya buku SBDA		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Tersedianya buku PDRB Prov Sumbar		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Tersedianya Buku Statistik Sektoral Provinsi		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Tersedianya Buku Statistik Sektoral Dinas Kominfo Provinsi		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Jumlah Survey Statistik Sektoral		2 survey	2 survey	2 survey	2 survey	2 survey	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam	Jumlah Petugas Statistik Sektoral yang dilatih		100	150	150	200	200	1.584.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI,

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
			Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi											INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya buku Metadata Statistik Sektoral		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1.712.500.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satistik Sektoral	Jumlah kegiatan Sosialisasi/Rakor / Workshop yang dilaksanakan		5	6	6	7	8	2.200.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.05	Pengembangan Infrastruktur			1	1	1	1	1	1.925.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			1	1	1	1	1	1.500.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
17.18.2* Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.														
17.18.3* Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.														
17.19.01 Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.														
17.19.1.(a) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.														
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL													
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya buku Profil Daerah		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	8.360.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Tersedianya buku SBDA		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Tersedianya buku PDRB Prov Sumbar		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Tersedianya Buku Statistik Sektoral Provinsi		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Tersedianya Buku Statistik Sektoral Dinas Kominfo Provinsi		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Jumlah Survey Statistik Sektoral		2 survey	2 survey	2 survey	2 survey	2 survey	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Petugas Statistik Sektoral yang dilatih		100	150	150	200	200	1.584.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya buku Metadata Statistik Sektoral		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1.712.500.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satistik Sektoral	Jumlah kegiatan Sosialisasi/Rakor / Workshop yang dilaksanakan		5	6	6	7	8	2.200.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI,

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026				
1				2	3	4					5	6	7	8
														INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.05	Pengembangan Infrastruktur			1	1	1	1	1	1.925.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			1	1	1	1	1	1.500.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
17.19.1.(b) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.														
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL													
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya buku Profil Daerah		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	8.360.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Tersedianya buku SBDA		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Tersedianya buku PDRB Prov Sumbang		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Tersedianya Buku Statistik Sektoral Provinsi		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Tersedianya Buku Statistik Sektoral Dinas Kominfo Provinsi		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
				Jumlah Survey Statistik Sektoral		2 survey	2 survey	2 survey	2 survey	2 survey	0	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Petugas Statistik Sektoral yang dilatih		100	150	150	200	200	1.584.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya buku Metadata Statistik Sektoral		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1.712.500.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satistik Sektoral	Jumlah kegiatan Sosialisasi/Rakor / Workshop yang dilaksanakan		5	6	6	7	8	2.200.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.05	Pengembangan Infrastruktur			1	1	1	1	1	1.925.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			1	1	1	1	1	1.500.000.000	APBD		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
17.19.02 Proporsi negara yang a)? melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan														

[illegible]

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN
2023-2026.

**Lampiran 2 : Rencana Kerja Program/Kegiatan
Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun
2022-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka

Telp. / Fax. (0755) 31161

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN													
1.1.1*		Tingkat kemiskinan ekstrim											
		Program : Administrasi Pemer	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Pemerintah Desa	Indeks	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	7.610.178.937	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Pemerintah Desa	Indeks	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	7.610.178.937	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Sub kegiatan :											
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	74	74	74	74	74	1.599.000.000	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	35	37	40	42	45	923.723.096	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakat Nagari dan Lembaga Adat Nagari	Persentase	100	100	100	100	100	8.965.420.635	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakat Nagari dan Lembaga Adat Nagari	Persentase	100	100	100	100	100	8.965.420.635	APBD	Kabupaten Solok	DPMN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Sub kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	35	38	40	42	44	712.257.759	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari	Persentase	100	100	100	100	100	8.965.420.635	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari	Persentase	100	100	100	100	100	8.965.420.635	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Sub kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	10	15	20	25	30	964.647.091	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Program : Administrasi Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Budaya Lokal yang Dikembangkan, Jumlah lembaga adat yang difasilitasi	Kelompok	40	70	80	85	90	1.384.942.847	APBD	Kabupaten Solok	DISPARBU D
		Kegiatan :Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sumber daya manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina	Orang	25	25	25	25	25	1.154.442.847	APBD	Kabupaten Solok	DISPARBU D
		Sub kegiatan :Pembinaan Sumber Daya Manusia, lembaga dan Pranata Adat	Jumlah SDM lembaga dan Pranata adat yang dibina	Kelompok	40	40	45	45	50	219.416.385	APBD	Kabupaten Solok	DISPARBU D
		Program : Administrasi Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Budaya Lokal yang Dikembangkan, Jumlah lembaga adat yang difasilitasi	Kelompok	40	70	80	85	90	1.384.942.847	APBD	Kabupaten Solok	DISPARBU D
		Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten solok	Jumlah SDM Kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	105	110	115	120	130	1.295.801.998	APBD	Kabupaten Solok	DISPARBU D
		Sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	30	30	35	35	40	411.620.945	APBD	Kabupaten Solok	DISPARBU D

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Kegiatan: Rehabilitasi sosial dasar penyandang sibilas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Persentase	91,66	100	100	100	100	2.685.839.026		Kab. Solok	DINSOS
		Sub Kegiatan: Penyediaan Alat Bantu	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu praga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	Orang		10				10.000.000		Kab. Solok	DINSOS
		Sub Kegiatan: Penyediaan permakaman	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaman sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Orang		500				75.000.000		Kab. Solok	DINSOS
		Sub Kegiatan: Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Orang		120				79.500.000		Kab. Solok	DINSOS
		Sub Kegiatan: pemberian pelayanan Penulusuran Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	Orang		50				92.500.000		Kab. Solok	DINSOS
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	%	98	98,25	98,5	98,75	99	732.579.592.883	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	99,59%	99,61%	99,63%	99,65%	99,67%	470.935.786.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	sekolah	364	364	364	364	364	1.500.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	%	98	98,25	98,5	98,75	99	732.579.592.883	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Kegiatan: Pengeloaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	97,30%	97,50%	97,89%	98,50%	99,00%	234.845.768.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	sekolah	73	73	73	73	73	3.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas	%	5	5	5	5	5	36.092.736.449	APBD	Kab Solok	DKUKMPP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya kapasitas UKM dalam pengembangan usaha	UMKM	240	264	290	319	351				DKUKMPP
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	240	264	290	319	351	44.125.000.000			DKUKMPP
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase sentra industri yang difasilitasi	Persentase	2	4	6	8	10	8.019.131.458			DKUKMPP
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											DKUKMPP
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	1	1	1	1.383.287.150			DKUKMPP
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1.500.000.000			DKUKMPP
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikendalikan	%	100	100	100	100	100	376.757.176			DPMPTSPN aker
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin yang diterbitkan	%	1	1	1	1	5				DPMPTSPN aker
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	1	1	1	134.500.000			DPMPTSPN aker

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG	2022			2023	2024	2025	2026					
		Program : Administrasi Pemer	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Pemerintah Desa	Indeks	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	7.610.178.937	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Pemerintah Desa	Indeks	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	7.610.178.937	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	74	74	74	74	74	1.599.000.000	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Ratio Akseptor KB	Persentase	74,55	74,90	75,25	75,35	75,45	4.026.680.920	DAK	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Aat dan obat serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Balai Penyuluh	14	14	14	14	14	4.026.680.920	DAK	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Sub.Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	orang	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.026.680.920	DAK	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Program: Pemenuhan HAK Anak	Capaian Kabupaten layak anak	Angka	650	700	700	750	800	373.251.275		Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan: Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintahan dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokaasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	Kecamatan	2	2	2	2	3	240.244.553		Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintahan, non pemerintahab, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten /kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi		3				53.413.400		Kabupaten Solok	DPPKBP3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Sub Kegiatan: Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1				28.926.000		Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Program Perlindungan Khusus anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	Persentase	100	100	100	100	100	146.825.000	DAK	Kab.Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	kegiatan	1	1	1	1	1	146.825.000	DAK	Kab.Solok	DPPKBP3A
		Sub.Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	kegiatan	1	1	1	1	1	146.825.000	DAK	Kab.Solok	DPPKBP3A
		Program: Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan	Rasio	0,0002	0,00018	0,00017	0,00016	0,00015	266.278.340	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	Persentase Layanan Pengaduan Bagi Korban KTP/A Yang Terlayani	Persentase	100	100	100	100	100	266.278.340	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kab/kota yang mendapat layanan pengaduan	orang	20	20	20	20	20	266.278.340	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Program: Peningkatan kualitas keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan	Persentase	100	100	100	100	100	331.957.172		Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan: Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	Persentase	100	100	100	100	100	331.957.166		Kabupaten Solok	DPPKBP3A

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program: Pengelolaan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persentase	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	6.555.854.776			Dinas Perikanan dan Pangan
		Kegiatan: Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	Paket	10	35	35	35	35	6.555.854.776			Dinas Perikanan dan Pangan
		Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia				35			57.827.800			
		Program: Peningkatan Derivikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH	Skor	85,5	86	86,5	87	87,5	1.009.868.012			Dinas Perikanan dan Pangan
		Kegiatan: Pelaksanaan pencapaian target konsumsi perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	persentase pemenuhan konsumsi pangan perkapita/Tahun	Persentase	50,5	60	60,5	61	61,5	379.206.250			Dinas Perikanan dan Pangan
		Sub Kegiatan: Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengakaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan		1				-			Dinas Perikanan dan Pangan
		Program: Pengelolaan Sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah ketersediaan pangan Utama (Beras) Perkapita	Kg/Kapita/Th n	620,8	633	645,2	657,4	669,82	4.057.219.073			Dinas Perikanan dan Pangan
		Kegiatan: Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/Kota	persentase pemenuhan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase	86,49	89,19	91,89	94,59	100	4.057.218.773			Dinas Perikanan dan Pangan
		Sub Kegiatan: Penyediaan Infrastruktur lumbung pangan	jumlah lumbung pangan yang tersedia	Unit		1				38.393.500			Dinas Perikanan dan Pangan
		Program: Pengawasan keamanan pangan	Jumlah Pangan Segar yang Aman dikonsumsi masyarakat	Komiditi	10	10	10	10	10	776.120.519			Dinas Perikanan dan Pangan
		Kegiatan: Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten /kota	persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	Persentase	100	100	100	100	100	776.120.519			Dinas Perikanan dan Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Sub Kegiatan: Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota	jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen		1				34.552.600		Dinas Perikanan dan Pangan
		Program: Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Persentase	2	2	2	2	2	32.193.554.195		Dinas Pertanian
		Kegiatan: Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah prasarana pertanian yang dibangun	Unit								Dinas Pertanian
		Sub Kegiatan: Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit		8				1.942.000.000		Dinas Pertanian
		Sub Keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		7				3.907.900.000		Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktifitas Komoditi Pertanian	Persentase	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	26.949.079.768		Dinas Pertanian
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	persentase sumber daya genetik (SDG) hewan dan tumbuhan yang dikelola dan dimanfaatkan	Persentase								Dinas Pertanian
		Sub Kegiatan: penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	VUB		1				25.000.000		Dinas Pertanian
		Sub Kegiatan: peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen		1				73.440.502		Dinas Pertanian
		Sub Kegiatan: pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen		1				55.897.320		Dinas Pertanian
		Kegiatan: Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan penggunaan benih/bibit unggul dan pakan ternak yang berkualitas	Persentase								Dinas Pertanian
		Sub Kegiatan: pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pacar/tanaman skala kecil	jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Laporan		1				215.395.200		Dinas Pertanian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEKUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK		INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											Dinas Pertanian
		Sub Kegiatan: Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Laporan		1				15.000.000			Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani yang Produktif	Persentase	19	19	19	19	19	3.606.545.688			Dinas Pertanian
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian											Dinas Pertanian
		Pertanian di Kecamatan dan Desa Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		14				120.918.400			Dinas Pertanian
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		14				77.746.500			Dinas Pertanian
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit		4				27.318.400			Dinas Pertanian
		Program : Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Persentase	10	15	20	25	30	1.679.252.754	APBD	Kabupaten Solok	DISPARBU D
		Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Persentase	10	15	20	25	30	1.679.252.753	APBD	Kabupaten Solok	DISPARBU D
		Sub kegiatan : Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	orang	85	85	90	90	100	555.687.045	APBD	Kabupaten Solok	DISPARBU D
		Program: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang dikembangkan	Persentase	15	25	15	10	5	35.088.959.709	APBD	Kabupaten Solok	DISPARBU D
		Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang dikembangkan	Persentase	15	25	15	10	5	35.088.959.709	APBD	Kabupaten Solok	DISPARBU D
		Sub Kegiatan : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota	Jumlah destinasi pariwisata Kab/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan	Lokasi	3	3	3	3	3	627.879.710	APBD	Kabupaten Solok	DISPARBU D

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak	%	51,18	55,00	61,00	66,00	71,50	41.084.173.302			Dinas PUPR Kab. Solok
	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak	%	51,18	55,00	61,00	66,00	71,50	41.084.173.302			Dinas PUPR Kab. Solok
	Sub Kegiatan: Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	39.645	47.574	57.089	68.507	82.208	7.840.825.309			Dinas PUPR Kab. Solok
	Sub Kegiatan: Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	800	960	1.152	1.382	1.659	33.243.347.994			Dinas PUPR Kab. Solok
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum terlindungi	%	79,27	80,27	82,27	84,27	86,27	38.434.136.513			Dinas PUPR Kab. Solok
	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Terlindungi	%	79,27	80,27	82,27	84,27	86,27	38.434.136.513			Dinas PUPR Kab. Solok
	Sub Kegiatan: Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	liter/ detik	330	350	370	395	415	38.434.136.513			Dinas PUPR Kab. Solok
	PROGRAM PENYELENGGAR	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	61,8	63,8	65,8	67,8	69,8	341.175.068.797			Dinas PUPR Kab. Solok
	Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Mantap dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	61,8	63,8	65,8	67,8	69,8	341.175.068.797			Dinas PUPR Kab. Solok
	Sub Kegiatan: Pembangunan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	13	16	17	19	21	145.914.447.447			Dinas PUPR Kab. Solok
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi secara berkala	km	4,80	5,28	5,81	6,39	7,03	165.509.447.041			Dinas PUPR Kab. Solok
	Sub Kegiatan: Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	m	120,00	100,00	110,00	121,00	133,10	15.358.518.609			Dinas PUPR Kab. Solok
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	km	247,00	237,00	260,70	286,77	315,45	14.392.655.700			Dinas PUPR Kab. Solok
	Sub Kegiatan: Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m		0				-			Dinas PUPR Kab. Solok

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m		10 M							
		Program: Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	Persentase	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2	99.590.888.808			Dinas PUPR Kab. Solok
		Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas di kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	Persentase	44,2	48,2	50,3	54,1	58	26.681.615.272			Dinas PUPR Kab. Solok
		Sub Kegiatan: Normalisasi/Restorasi Sungai	panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	Km		1				121.228.800			Dinas PUPR Kab. Solok
		Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas di kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	Persentase	44,2	48,2	50,3	54,1	58	72.909.273.536			Dinas PUPR Kab. Solok
		Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi			83				200.844.000			Dinas PUPR Kab. Solok
		Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Permukaan	panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara			28				8.400.000			Dinas PUPR Kab. Solok
1.2.1*		Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur											
		Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) PMKS yang Mendapatkan Bantuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	694.997.388	APBD	Kab. Solok	DINSOS
		Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	694.997.388	APBD	Kab. Solok	DINSOS
		Sub kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang		24582				57.500.000			DINSOS
1.2.2*		Persentase laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam											
		Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) PMKS yang Mendapatkan Bantuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	694.997.388	APBD	Kab. Solok	DINSOS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK		INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	345.842.300	APBD	Kab. Solok	BPBD
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	4	6	5	7	250.000.000	APBD	Kab. Solok	BPBD
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	2	2	4	2	5	400.000.000	APBD	Kab. Solok	BPBD
1.5.4*		Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana											
		Program : Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	14.153.310.378	APBD	Kab. Solok	BPBD
		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	345.842.300	APBD	Kab. Solok	BPBD
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	1	1	2	1	250.000.000	APBD	Kab. Solok	BPBD
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	4	3	2	1	300.000.000	APBD	Kab. Solok	BPBD
1.a.1*		Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan											
		Program : Administrasi Pemer	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Pemerintah Desa	Indeks	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	7.610.178.937	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Pemerintah Desa	Indeks	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	7.610.178.937	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Sub kegiatan :											
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	74	74	74	74	74	1.599.000.000	APBD	Kabupaten Solok	DPMN

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG/	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program : Program pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama perkapita	kg/kap/thn	620,8	633	645,2	657,4	669,82	4.057.219.073	APBD		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Kegiatan : Keg. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pemenuhan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase	86,49	89,19	91,89	94,59	100	4.057.218.773	APBD		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Sub kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit		1				38.393.500	APBD		DINAS PERIKANAN DAN
		Program : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	Skor	85,5	86	86,5	87	87,5	1.009.868.012	APBD		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Kegiatan : Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase	10	10	10	10	10	406.661.762	APBD		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Sub kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan		2				15.065.250	APBD		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Sub Keg : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit		2				15.000.300	APBD		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
2.1.2*		Prevalensi penduduk dengan dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan											
		Program :Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	Persentase	14,86	13,51	12,16	10,81	9,46	1.246.941.310	APBD		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Kegiatan :Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenang an Kabupaten/ Kota	Jumlah Bantuan paket Bahan Pangan	Paket	100	100	100	100	100	1.246.941.310	APBD		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Sub kegiatan: Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1				22.903.000	APBD		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Kegiatan : Keg. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang disusun	Dokumen		1	1	1	1	80.000.000	APBD		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Sub kegiatan: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen		1				25.000.000	APBN		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
2.2.1*		<i>Prevalensi Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinkes
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinkes
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gisi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	2.421.408.000			Dinkes
2.2.2*		<i>Prevalensi Wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinkes
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinkes

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gisi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	2.421.408.000		Dinkes
2.2.2.(a)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh sektor Pola Pangan Harapan										
		Program :Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	Skor	85,5	86	86,5	87	87,5	1.009.868.012	APBD	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penurunan Fluktuasi Harga	Persentase	0,5	0,2	0,5	0,3	0,6	216.000.000	APBD	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Sub kegiatan: Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan		2				15.065.250	APBD	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Program : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	Skor	85,5	86	86,5	87	87,5	1.009.868.012	APBD	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Kegiatan : Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase	10	10	10	10	10	406.661.762	APBD	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Sub kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan		2				15.065.250	APBD	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		Sub Keg : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit		2				15.000.300	APBD	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
2.2.3*		Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun										
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760		Dinkes
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760		Dinkes
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6.849	7.840	7.797	7.746	7.746	4.769.815.050		Dinkes

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG	2022			2023	2024	2025	2026					
2.3.1*		Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan											
2.3.1.(a)		Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan											
2.3.2*		Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor											
2.4.1*		Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan											
2.4.1.(a)		Proporasi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan											
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan prasarana pertanian	%	2	2	2	2	2	941.946.200	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		Kegiatan: Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Indeks penanaman	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	941.946.200	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		Sub Kegiatan: Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B yang dikelola	Dokumen	-	1	1	1	1	941.946.200	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
2.5.1*		Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan difasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang											
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan Produktifitas Komoditi Pertanian	%	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	14.267.588.249	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		kegiatan:Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan yang dikelola dan dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	14.267.588.249	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub kegiatan :Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	1	1	1	1.885.877.303	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan: Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	1	1	1	12.381.710.946	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penggunaan benih/bibit unggul dan pakan ternak yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	6.831.473.849	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Sub kegiatan :Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak ,Bahan Pakan /Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak,bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	laporan	1	2	2	2	2	6.831.473.849	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang beresiko punah											
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan Produktifitas Komoditi Pertanian	%	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	982.166.286	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	kegiatan:Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan yang dikelola dan dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	982.166.286	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan:Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Ternak	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian	VUB	1	1	1	1	1	982.166.286	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
2.a.1*	Indeks Orientasi Pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah											
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian											
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian											
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan											
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA												
3.1.1*	Angka kematian Ibu (AKI)											
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6.849	7.840	7.797	7.746	7.746	4.769.815.050			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6,849	7.483	7.442	7.394	7.394	4.960.781.100			Dinas Kesehatan
3.1.2*		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) difasilitasi kesehatan											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6.849	7.483	7.442	7.394	7.394	4.960.781.100			Dinas Kesehatan
3.2.1*		(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEKUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/	2022			2023	2024	2025	2026					
3.3.2*		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	2.198.354.950			Dinas Kesehatan
3.3.3*		Kejadian Malaria per 1000 orang											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	1	1	1	6.005.899.900			Dinas Kesehatan
3.3.3.(a)		Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria											
		Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Nagari Siaga	%	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25	3.759.856.152			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif, Preventif Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Keluarga ber PHBS	%	100	100	100	100	100	1.569.561.064			Dinas Kesehatan

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
3.4.1.(b)		Prevalensi tekanan darah tinggi										
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760		Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760		Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatka Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	70.856	86.746	87.543	88.329	88.329	292.105.000		Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun										
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760		Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760		Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	195.517	249.035	250.706	252.293	252.293	293.041.100		Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30.140	40.727	42.001	43.313	43.313	1.288.424.500		Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	1	1	1	622.737.500		Dinas Kesehatan
03.04.02		Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri										
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760		Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760		Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK		INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Sub kegiatan : Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	785	806	811	815	815	357.814.600			Dinas Kesehatan
03.05.01		Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	25	25	25	25	25	425.727.500			Dinas Kesehatan
3.5.1.(a)		Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	25	25	25	25	25	425.727.500			Dinas Kesehatan
3.5.1.(b)		Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6,849	7.483	7.442	7.394	7.394	4.960.781.100			Dinas Kesehatan
		Program : Pengendalian Pend	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,93	0,81	0,69	0,57	0,45	412.359.900	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunkan angka TFR	Dokumen	1	1	1	1	1	412.359.900	APBD	Kabupatrn Solok	DPPKBP3A
		Sub Kegiatan : Penyedian data dan informasi keluarga	Jumlah data dan Informasi data yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	412.359.900	APBD	Kabupatrn Solok	DPPKBP3A
3.7.2.(a)		Total Fertility Rate (TFR)											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6,849	7.483	7.442	7.394	7.394	4.960.781.100			Dinas Kesehatan
		Program : Pengendalian Pend	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,93	0,81	0,69	0,57	0,45	412.359.900	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkira	Persentase	100	100	100	100	100	412.359.900	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Sub Kegiatan : Penyedian data dan informasi keluarga	Jumlah data dan Informasi data yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	412.359.900	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
3.8.1*		Cakupan pelayanan kesehatan esensial											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	7.297.048.550			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	2.595.070.709			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	6.224.982.500			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	Dokumen	1	1	1	1	1	1.672.605.000			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1	1	1	1	361.295.000			Dinas Kesehatan
3.8.1.(a)		<i>Unmet Nees Pelayanan Kesehatan</i>											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Dokumen	1	1	1	1	1	1.342.988.900			Dinas Kesehatan
		Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Nagari Siaga	%	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25	3.759.856.152			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Lintas Sektor Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kab/Kota yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	1.569.561.064			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1.375.000.000			Dinas Kesehatan
		Program : Pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,93	0,81	0,69	0,57	0,45	351.200.000	APBD	Kabupatrn Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan	Persentase	100	100	100	100	100	351.200.000	APBD	Kabupatrn Solok	DPPKBP3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Sub kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	Laporan	1	1	1	1	1	351.200.000	APBD	Kabupatrn Solok	DPPKBP3A
3.8.2*		Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan											
3.8.2.(a)		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	47.374.371.000			Dinas Kesehatan
03.09.01		Angka kematian akibat rumah tangga dan populasi udara ambien											
03.09.02		Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi, tidak aman, dan tidak higienis											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	2.595.070.709			Dinas Kesehatan
03.09.03		Angka kematian akibat keracunan											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kejadian Luar Biasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	1	1	1	1	19.824.656.500			Dinas Kesehatan
3.a.1*		Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Angka Kesakitan	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan : Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	195.517	249.035	250.706	252.293	252.293	293.041.100			Dinas Kesehatan
3.b.1*		Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan yang menerapkan Standar pelayanan Minimal	Persentase	100	100	100	100	100	323.778.082.760			Dinas Kesehatan
		Sub kegiatan :Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1	1	1	1	361.295.000			Dinas Kesehatan
3.b.2*		Total Official Development Assistant (ODA) untuk											
3.b.3*		Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan											
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760			Dinas Kesehatan

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK		INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
4.1.1 (a)		Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minuman dalam : (i) membaca, (ii) matematika											
4.1.2*		Tingkat penyelesaian pendidikan SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat											
		Program Pengelolaan	Angka Partisipasi Sekolah	%	98	98,25	98,5	98,75	99	732.579.592.883	APBN &	Kab Solok	Disdikpora
		Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	99,59%	99,61%	99,63%	99,65%	99,67%	470.935.786.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Sub Kegiatan:								470.935.786.000			
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB yang dibangun	Unit	1	1	1	1	1	12.500.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun	ruang	10	10	10	10	10	15.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	ruang	5	5	5	5	5	5.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	ruang	10	10	10	10	10	5.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah dibangun	ruang	5	5	5	5	5	10.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	paket	90	90	90	90	90	45.235.786.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang dibangun	unit	10	10	10	10	10	5.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	ruang	5	5	5	5	5	5.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab	ruang	5	5	5	5	5	5.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang direhab	ruang	5	5	5	5	5	5.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhab	ruang	5	5	5	5	5	5.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	paket	90	90	90	90	90	45.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang direhab	Unit	5	5	5	5	5	5.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	paket	20	20	20	20	20	10.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang tersedia	paket	5	5	5	5	5	2.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang tersedia	paket	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang tersedia	paket	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	15.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Persentase Bangunan Gedung dan Ruangan yang dipelihara/rehab	%	100	100	100	100	100	5.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara	%	100	100	100	100	100	15.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persentase Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dipelihara	%	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima beasiswa (biaya personil)	siswa	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah paket Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	paket	20	20	20	20	20	10.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	sekolah	364	364	364	364	364	1.500.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang melaksanakan tindak lanjut dan Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	sekolah	364	364	364	364	364	750.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang dilakukan pembinaan minat, bakat nya	siswa	400	400	400	400	400	1.200.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang tersedia	orang	250	250	250	250	250	2.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan pengembangannya	orang	80	80	80	80	80	5.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	sekolah	364	364	364	364	364	3.500.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	sekolah	364	364	364	364	364	220.000.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah personil yang ditingkatkan kapasitas dalam mengelola dana BOS	orang	10	10	10	10	10	750.000.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEKUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK		INDIKATOR SDG/PROG/KEG/			2022	2023	2024	2025	2026				
												Kab Solok	Disdikpora
		Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	97,30%	97,50%	97,89%	98,50%	99,00%	234.845.768.000	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora
		Sub Kegiatan:											
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB yang dibangun	Unit	1	1	1	1	1	12.500.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun	ruang	1	1	1	1	1	11.600.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	ruang	1	1	1	1	1	5.500.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	ruang	1	1	1	1	1	5.500.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah dibangun	ruang	1	1	1	1	1	6.200.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun	ruang	1	1	1	1	1	6.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serbaguna/ aula yang dibangun	ruang	1	1	1	1	1	5.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah asrama sekolah yang diibangun	Unit	1	1	1	1	1	5.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun	Unit	1	1	1	1	1	5.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir yang dibangun	m2	1	1	1	1	1	4.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah yang dibangun	Unit	1	1	1	1	1	2.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana, dan utilitas sekolah yang dibangun	buah	1	1	1	1	1	25.345.768.000		Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhab	Unit	1	1	1	1	1	2.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab	ruang	1	1	1	1	1	15.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru yang direhab	ruang	1	1	1	1	1	2.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang direhab	ruang	6	0	0	0	0	5.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah direhab	ruang	10	0	0	0	0	19.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhab	ruang	3	0	0	0	0	5.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serbaguna/ aula yang direhab	ruang	38	0	0	0	0	15.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana, dan utilitas sekolah yang direhab	paket	125	0	0	0	0	25.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEKUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK		INDIKATOR SDG/PROG/KEG/			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket Mebel sekolah yang tersedia	paket	10	0	0	0	0	5.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah paket perlengkapan sekolah yang tersedia	paket	4.000	0	0	0	0	10.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah paket perlengkapan siswa yang tersedia	paket	1.000	0	0	0	0	1.500.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Persentase bangunan gedung dan ruangan yang dipelihara	%	100	100	100	100	100	7.500.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase sarana, prasara dan utilitas sekolah yang dipelihara	%	100	100	100	100	100	13.200.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah perlengkapan dasar buku teks peserta didik yang tersedia	buah	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah paket perlenkapan peserta didik yang tersedia	paket	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	5.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah paket alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	paket	0	0	0	0	7	3.500.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	sekolah	73	73	73	73	73	3.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang dilakukan pembinaan minat, bakat, dan kreativitasnya	siswa	180	180	180	180	180	2.500.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	Jumlah PTK yang tersedia	orang	120	120	120	120	120	2.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK yang dilakukan pengembangan karirnya	orang	100	100	100	100	100	3.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	sekolah	73	73	73	73	73	3.000.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS	sekolah	73	73	73	73	73	80.800.000.000		Kab Solok	Disdikpora
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah personil yang ditingkatkan kapasitas dalam mengelola dana BOS	orang	10	10	10	10	10	750.000.000		Kab Solok	Disdikpora
4.1.2.(a)		Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat											
		Program: Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	%	98	98,25	98,5	98,75	99	732.579.592.883	APBN & APBD	Kab Solok	Disdikpora

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG				2022	2023	2024	2025	2026				
4.c.1*		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan											
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN													
5.1.1*		Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi											
		Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada APBD	Persentase	0,0128	0,0133	0,0137	0,014	0,0143	385.804.500	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah SKPD atau Lembaga yang melaksanakan perencanaan penganggaran yang responsif gender	SKPD	18	18	18	18	18	385.804.500	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Sub kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan Pembangunan responsif gender PPRG kewenangan Kab/kota	SKPD	19	26	34	37	40	385.804.500	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
5.2.1*		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan											
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Rasio	0,0002	0,00018	0,00017	0,00016	0,00015	316.223.000	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pengaduan Bagi Korban KTP/A Yang Terlayani	Persentase	100	100	100	100	100	316.223.000	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Sub.Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kab/kota yang mendapat layanan pengaduan	orang	20	20	20	20	20	316.223.000	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
5.2.2*		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan											
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Rasio	0,0002	0,00018	0,00017	0,00016	0,00015	316.223.000	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkungan daerah kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-				APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Sub Keg Sub Kegiatan AdvokasiKebakan dan Pendampngan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi dan Pendampngan Kasus Kekrasan Terhadap Perempuan danAnak Yang Dtangani								APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
5.3.1*		Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum											
05.03.02		Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C menurut											
05.04.01		Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi											
5.5.1*		Proporsi kursi yang diduduki perempuan (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah											
		Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada APBD	Persentase	0,0128	0,0133	0,0137	0,014	0,0143	385.804.500	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan Pemberdayaaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi pada Organisasi	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonominada	Persentase	0	100	100	0	0	50.000.000			DPPKBP3A
		Sub Keg : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial	1	1	1	1	1	1	-			DPPKBP3A

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
5.6.2*		Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi											
		Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	1,05	0,81	0,69	0,57	0,45	778.203.750	DAU	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Persentase Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Persentase	100	100	100	100	100	778.203.750	DAU	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Sub Kegiatan Penyediaan dan pengembangan Materi Pendidikan kependudukan jalur Pendidikan Formal sesuai Isu lokal	Jumlah Dokumen Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	778.203.750	DAU	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
5.b.1*		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam											
5.c.1*		Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan											
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA													
6.1.1*		Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman											
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum terlindungi	%	79,27	80,27	82,27	84,27	86,27	38.434.136.513			Dinas PUPR Kab. Solok
		Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Terlindungi	%	79,27	80,27	82,27	84,27	86,27	38.434.136.513			Dinas PUPR Kab. Solok

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Sub Kegiatan: Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	liter/ detik	330	350	370	395	415	38.434.136.513		Dinas PUPR Kab. Solok
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak	%	51,18	55,00	61,00	66,00	71,50	41.084.173.302		Dinas PUPR Kab. Solok
		Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak	%	51,18	55,00	61,00	66,00	71,50	41.084.173.302		Dinas PUPR Kab. Solok
		Sub Kegiatan: Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	39.645	47.574	57.089	68.507	82.208	7.840.825.309		Dinas PUPR Kab. Solok
		Sub Kegiatan: Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	800	960	1.152	1.382	1.659	33.243.347.994		Dinas PUPR Kab. Solok
6.2.1*		Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun										
		Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	473.817.597.760	APBD	Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	323.778.082.760	APBD	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen		1				468.831.038		Dinas Kesehatan
		Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Nagari Siaga	%	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25	3.759.856.152		Dinas Kesehatan
		Kegiatan : Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif, Preventif Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Keluarga ber PHBS	%	100	100	100	100	100	1.569.561.064		Dinas Kesehatan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Kegiatan: Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penggunaan benih/bibit unggul dan pakan ternak yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	7.245.217.124	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		Sub kegiatan: Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak ,Bahan Pakan /Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak,bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	laporan	2	2	2	2	2	6.831.473.849	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		Sub kegiatan: Pengawasan Peredaran Bahan Pakan / Pakan, Benih / Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Bahan Pakan / Pakan, Benih / Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kecamatan	14	14	14	14	14	413.743.275	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		Kegiatan: Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumber dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain	Persentase peningkatan populasi ternak sapi	%	0	2	0	2	0	150.000.000	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		Sub kegiatan: Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah ternak yang disediakan	Ekor	0	5		5		150.000.000	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan prasarana pertanian	%	2	2	2	2	2	52.467.409.652	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		Kegiatan: Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	Unit	163	98	22	23	22	52.467.409.652	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		Sub Kegiatan: Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan Irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	12	35	3	3	2	11.368.714.763	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		Sub Kegiatan: Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan embung pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	-	-	3	3	3	741.946.200	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		Sub Kegiatan: Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	150	60	12	13	12	37.581.448.351	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		Sub Kegiatan: Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit	Jumlah dam parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit		3	2	2	2	1.379.368.984	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
		Sub Kegiatan: Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage	Jumlah long storage yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit			1	2	2	561.131.354	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan: Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara pertanian lainnya	Unit	1	-	1		1	834.800.000	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Luas Serangan OPT	%	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1.475.386.946	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan	%	100	100	100	100	100	1.475.386.946	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan: Pengendalian Organisme Pengganggu Tanamn (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	Ha	5	5	5	5	5	940.979.523	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan: Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani.	Ha	500	500	500	500	500	534.407.424	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Program Penyuluh Pertanian	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani Yang Produktif	%	19	19	19	19	19	4.505.765.167	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Kegiatan: Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	%	100	100	100	100	100	4.505.765.167	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan penyuluh pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	14	14	14	14	14	1.742.637.231	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan: Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan/Nagari yang meningkat kapasitasnya	Unit	14	14	14	14	14	558.564.958	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan: Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Unit	14	14	14	14	14	1.820.767.679	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan: Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	Unit	2	-	2	2	2	383.795.300	APBD	Kabupaten Solok	Dinas Pertanian
	Program : Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Persentase	10	15	20	25	30	1.679.252.754	APBD	Kabupaten Solok	DISPARBU D

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
08.08.01		Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran											
8.8.1.(a)		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3											
08.08.02		Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait											
8.9.1*		Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB											
8.9.1.(a)		Jumlah wisatawan mancanegara											
8.9.1.(b)		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara											
8.9.1.(c)		Jumlah devisa sektor pariwisata											
8.10.1*		Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											
8.10.1.(a)		Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit											
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas	%	5	5	5	5	5	36.092.736.449	APBD	Kab Solok	DKUKMPP
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya kapasitas UKM dalam pengembangan usaha	UMKM	240	264	290	319	351				DKUKMPP
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	240	264	290	319	351	44.125.000.000			DKUKMPP
8.a.1		Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan											
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas	%	5	5	5	5	5	36.092.736.449	APBD	Kab Solok	DKUKMPP
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya kapasitas UKM dalam pengembangan usaha	UMKM	240	264	290	319	351				DKUKMPP

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikendalikan	%	100	100	100	100	100	376.757.176			DPMPTSPN aker
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin yang diterbitkan	%	1	1	1	1	5				DPMPTSPN aker
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	1	1	1	134.500.000			DPMPTSPN aker
9.2.1.(a)		Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur										
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikendalikan	%	100	100	100	100	100	376.757.176			DPMPTSPN aker
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin yang diterbitkan	%	1	1	1	1	5				DPMPTSPN aker
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	1	1	1	134.500.000			DPMPTSPN aker

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
9.2.2*		Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur										
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikendalikan	%	100	100	100	100	100	376.757.176		DPMPTSPN aker
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin yang diterbitkan	%	1	1	1	1	5			DPMPTSPN aker
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	1	1	1	134.500.000		DPMPTSPN aker
9.3.1*		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri										
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikendalikan	%	100	100	100	100	100	376.757.176		DPMPTSPN aker
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana	%	1	1	1	2	6			DPMPTSPN aker
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	1	1	1	2.121.000.000		DPMPTSPN aker
9.3.2*		Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit										
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikendalikan	%	100	100	100	100	100	376.757.176		DPMPTSPN aker

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana	%	1	1	1	2	6				DPMPTSPN aker
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	1	1	1	2.121.000.000			DPMPTSPN aker
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur											
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikendalikan	%	100	100	100	100	100	376.757.176			DPMPTSPN aker
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin yang diterbitkan	%	1	1	1	1	5				DPMPTSPN aker
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	1	1	1	134.500.000			DPMPTSPN aker
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri											
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikendalikan	%	100	100	100	100	100	376.757.176			DPMPTSPN aker
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin yang diterbitkan	%	1	1	1	1	5				DPMPTSPN aker

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	1	1	1	134.500.000			DPMP TSPN aker
9.4.1.(b)		Intensitas emisi sektor industri										
9.5.1*		Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB										
9.5.2		Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan										
9.5.2(a)		Proporsi sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)										
9.a.1		Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan biaya resmi)										
9.b.1		Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan										
9.b.1.(a)		Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi										
9.c.1*		Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>										
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA												
10.1.1*		Rasio Gini										
10.1.1.(a))		Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur										
10.1.1.(b))		Jumlah desa tertinggal										
		Program : Peningkatan Kerjas	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase	52	57	62	67	72	296.210.670	APBD	Kabupaten Solok DPMN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase	52	57	62	67	72	296.210.670	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
	Sub kegiatan : Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5	7	8	9	10	132.433.621	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
	Program : Penataan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	10	11,11	12,5	14,28	16,67	1.991.038.628	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	10	11,11	12,5	14,28	16,67	1.991.038.628	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
	Sub kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	4	4	4	4	4	1.127.042.587	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
	Sub kegiatan : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	4	4	4	4	4	1.748.193.856	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri											
	Program : Peningkatan Kerjas	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase	52	57	62	67	72	296.210.670	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
	Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase	52	57	62	67	72	296.210.670	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
	Sub kegiatan : Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5	7	8	9	10	132.433.621	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
	Program : Penataan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	10	11,11	12,5	14,28	16,67	1.991.038.628	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	10	11,11	12,5	14,28	16,67	1.991.038.628	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
	Sub kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	4	4	4	4	4	1.127.042.587	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
	Sub kegiatan : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	4	4	4	4	4	1.748.193.856	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal											
	Program : Peningkatan Kerjas	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase	52	57	62	67	72	296.210.670	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
	Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase	52	57	62	67	72	296.210.670	APBD	Kabupaten Solok	DPMN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Sub kegiatan : Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5	7	8	9	10	132.433.621	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Program : Penataan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	10	11,11	12,5	14,28	16,67	1.991.038.628	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	10	11,11	12,5	14,28	16,67	1.991.038.628	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Sub kegiatan : Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	4	4	4	4	4	1.127.042.587	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Sub kegiatan : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	4	4	4	4	4	1.748.193.856	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
10.1.1.(e)		Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal											
		Program : Peningkatan Kerjas	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase	52	57	62	67	72	296.210.670	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase	52	57	62	67	72	296.210.670	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Sub kegiatan : Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5	7	8	9	10	132.433.621	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Program : Penataan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	10	11,11	12,5	14,28	16,67	1.991.038.628	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	10	11,11	12,5	14,28	16,67	1.991.038.628	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Sub kegiatan : Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	4	4	4	4	4	1.127.042.587	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
10.1.1.(f)		Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal											
		Program : Peningkatan Kerjas	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase	52	57	62	67	72	296.210.670	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase	52	57	62	67	72	296.210.670	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Sub kegiatan : Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5	7	8	9	10	132.433.621	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Program : Penataan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	10	11,11	12,5	14,28	16,67	1.991.038.628	APBD	Kabupaten Solok	DPMN
		Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	10	11,11	12,5	14,28	16,67	1.991.038.628	APBD	Kabupaten Solok	DPMN

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
10.b.1		Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain)											
10.c.1		Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan											
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN													
11.01.01		Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau yang tidak layak											
		Program : Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang terlayani dan menjadi layak huni	%	100	100	100	100	100	3.742.683.488			DPRKPP
		Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang mendapat sosialisasi	%	27	27	27	27	27	699.000.000			DPRKPP
		Sub kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	Orang	200	220	240	260	280	699.000.000			DPRKPP
		Program : Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang terlayani dan menjadi layak huni	%	100	100	100	100	100	3.742.683.488			DPRKPP
		Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang terlayani	%	27	27	27	27	27	2.724.683.488			DPRKPP
		Sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang terehabilitasi	Unit	7	10	10	10	10	1.539.158.350			DPRKPP
		Program : Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang terlayani dan menjadi layak huni	%	100	100	100	100	100	3.742.683.488			DPRKPP
		Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang terlayani	%	27	27	27	27	27	2.724.683.488			DPRKPP

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEKUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK		INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
11.4.1.(a)		Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)											
11.5.1*		Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	14.153.310.378	APBD	Kab. Solok	BPBD
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	1.804.035.200	APBD	Kab. Solok	BPBD
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1	1	1	1	1	500.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Paket	25	20	60	25	50	500.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	-	1	2	-	-	350.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	30	30	40	30	60	450.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Persentase						7.131.141.189	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Paket	1	1	1	1	1	750.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	345.842.300			BPBD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	5	5	5	5	5	325.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
11.05.02		Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar											
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	14.153.310.378			BPBD
		Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	601.642.325			BPBD
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi,(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	200	400	600	500	400	950.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	1.804.035.200			BPBD
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Paket	50	40	30	-	40	400.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	2	-	3	-	2	700.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana	Dokumen	3	4	2	3	4	500.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Persentase						7.131.141.189			BPBD
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	Paket	-	20	40	50	60	600.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEKUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK		INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana											
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	3	1	2	300.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
11.5.2.(a)		Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB											
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	14.153.310.378			BPBD
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	1.804.035.200			BPBD
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	-	2	2	6	10	450.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase						345.842.300			BPBD
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	-	1	1	-	3	250.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Paket	-	1	1	1	1	250.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
11.06.01		Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota											
11.6.1.(a)		Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Jumlah sampah yang tertangani	Ton	6200 Ton	6300 Ton	6400 Ton	6500 Ton	6600 Ton	Rp. 625.000.000,00	APBD	Kab Solok	DLH
		Program: Pengelolaan persampahan	Persentase Sampah Yang Terangkut ke TPA	Persentase	13,97	15,25	16,65	18,18	19,32	10.403.529.038	APBD	Kab Solok	DLH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
13.1.2*		Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction</i> 2015-2030											
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	14.153.310.378			BPBD
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	1.804.035.200			BPBD
		<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	-	-	-	1	-	350.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</i>	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	6	3	2	2	4	475.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana	Persentase						7.131.141.189			BPBD
		<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Paket	-	-	1	1	1	150.000.000	APBN APBD	Kab Solok	BPBD
13.1.3*		Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan											
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	14.153.310.378			BPBD
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan							1.804.035.200			BPBD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEKUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK		INDIKATOR SDG/PROG/KEG/TPB			2022	2023	2024	2025	2026				
14.06.01		Tingkat pelaksanaan dan instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)											
14.6.1.(a)		Persentase kepatuhan pelaku usaha											
14. 07.01		Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)											
14.a.1		Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan											
14.b.1*		Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan											
14.b.1.(a)		Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan											
14.b.1.(b)		Jumlah nelayan yang terlindungi											
14.c.1*		Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)											
TUJUAN 15. MELINDUNGSI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUSAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHLILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI													
15.1.1*		Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan											
		Program :											
		Kegiatan :											
		Sub kegiatan :											
		Program :											
		Kegiatan :											
		Sub kegiatan :											
		Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
15.c.1.(a))		Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL										
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT ANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELAMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN												
16.01.01		Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin										
		Program :										
		Kegiatan :										
		Sub kegiatan :										
		Program :										
		Kegiatan :										
		Sub kegiatan :										
		Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)										
16.1.1.(a))		Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir										
16.01.02		kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur, dan penyebab kematian										
16.1.2.(a))		kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk										
16.01.03		Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan										
		Program Perindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Rasio	0,0002	0,00018	0,00017	0,00016	0,00015	385.804.500	DAU	Kabupaten Solok DPPKBP3A
		Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pengaduan Bagi Korban KTP/A Yang Terlayani	Persentase	100	100	100	100	100	385.804.500	DAU	Kabupaten Solok DPPKBP3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
		Sub.Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kab/kota yang mendapat layanan pengaduan	orang	20	20	20	20	20	385.804.500	DAU	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
16.1.3.(a)		Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											
		Program Perindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Rasio	0,0002	0,00018	0,00017	0,00016	0,00015	385.804.500	DAU	Kab.Sol	DPPKBP3A
		Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Layanan Pengaduan Bagi Korban KTP/A Yang Terlayani	Persentase	100	100	100	100	100	385.804.500	DAU	Kab.Sol	DPPKBP3A
		Sub.Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kab/kota yang mendapat layanan pengaduan	orang	20	20	20	20	20	385.804.500	DAU	Kab.Sol	DPPKBP3A
16.02.01		Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau psikologis dari orang tua/ibu											
		Program Perlindungan Khusus anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	Persentase	100	100	100	100	100	146.825.000	DAK	Kab.Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	kegiatan	1	1	1	1	1	146.825.000	DAK	Kab.Solok	DPPKBP3A
		Sub.Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	kegiatan	1	1	1	1	1	146.825.000	DAK	Kab.Solok	DPPKBP3A
16.2.1.(a)		Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir											
		Program Perlindungan Khusus anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	Persentase	100	100	100	100	100	1.287.965.088	DAK	Kabupaten Solok	DPPKBP3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEKUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK		INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase Korban KIA dan TPPO yang ditangani dan mendapatkan layanan Perlindungan Khusus	Persentase	100	100	100	100	100	352.671.554	DAK	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Sub.Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	kegiatan	1	1	1	1	1	-	DAK	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
16.2.1.(b)		Prevelensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mangalami kekerasan sepanjang hidupnya											
		Program: Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	Persentase	100	100	100	100	100	716.053.050	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota	Persentase anak yang mendapat layanan pendampingan dan perlindungan kekerasan	%	100%	100%	100%	100%	100%	716.053.050	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan ka/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan						716.053.050	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
16.02.03		Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun											
		Program: Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan	Rasio	0,0002	0,00018	0,00017	0,00016	0,00015	266.278.340	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A
		Kegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota	Persentase Layanan Pengaduan Bagi Korban KTP/A Yang Terlayani	Persentase	100	100	100	100	100	266.278.340	APBD	Kabupaten Solok	DPPKBP3A

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG				2022	2023	2024	2025	2026				
16.03.03		Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian											
16.3.3.(a)		Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)											
16.04.01		Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$)											
16.04.02		Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan yang asal senjata serta konteksnya telah diacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional											
16.05.01		Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir											
16.5.1.(a)		Indeks Perilaku Anti korupsi (IPAK)											
16.05.02		Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas selama 12 bulan terakhir											
16.6.1*		Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui											
16.6.1.(a)		Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP											
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Persentase	6,64	100	100	100	100	9.041.847.566			BKD
		pengelolaan barang milik daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	Persentase	6,64	100	100	100	100	9.041.847.566			BKD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEKUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK		INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
16.10.2.(a)		Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif											
16.10.2.(b)		Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi											
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	Persentase	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	9.297.057.941	APBD	KAB.SOLOK	DISKOMINFO
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Skor	65	70	75	80	85	9.297.057.941			DISKOMINFO
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	60	65	70	80	85				
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	248	250	252	254	256	637.593.655	APBD	KAB.SOLOK	DISKOMINFO
16.a.1*		Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles											
16.b.1		Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional											
16.b.1.(a)		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional											
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITAISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN													

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGUATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR SDG/PROG/KEG	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK					2022	2023	2024	2025	2026				
17.1.1*		Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya											
		Program Pengelolaan Pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase	6,64	6,56	6,48	6,41	6,33	10.710.346.309			BKD
		Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase	6,64	6,56	6,48	6,41	6,33	10.710.346.309			BKD
		Sub kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen		2				295.248.000			BKD
		Sub Kegiatan :Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit		10				101.942.000			BKD
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		5				150.039.000			BKD
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen		12				248.085.000			BKD
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen		1823				200264000			BKD
17.1.1.(a)		Rasio penerimaan pajak terhadap PDB											
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap per	%	6,64	6,56	6,48	6,41	6,33	10.710.346.309	APBD	Kab. Solok	BKD
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap per	%	6,64	6,56	6,48	6,41	6,33	3.829.587.595	APBD	Kab. Solok	BKD
		Sub kegiatan :											
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen		2				295.248.000			BKD
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit		10				101.942.000			BKD
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		5				150.039.000			BKD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEKUATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKA T DAERAH
KODE REK		INDIKATOR SDG/PROG/KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang Tertangani	Persentase	100	100	100	100	100	1.216.873.873			Disdukcapil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	98.031.342			Disdukcapil
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen		1				8.070.000			Disdukcapil

Pt KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



NAFRI, ST, MT, MSc
NIP. 19790517 200501 1 008

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PASAMAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026					
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN													
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		Juta Pekerja						65,9		APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Kegiatan	12	15	18	20	22		2.226.500.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Kegiatan	2	7	9	10	10		1.708.500.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	2	4	5	5	6		1.106.500.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	2	3	4	5	4		602.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS	LKPS	1	5	6	6	7		518.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	1	5	6	6	9		518.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan secara AKL, AKAD dan AKAN	%	0,72	1	1	1	1		905.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan secara AKL, AKAD, dan AKAN	%	0,72	1	1	1	1		485.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Penyediaan Sumberdaya Pelayanan Antarkerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	3	3	3	3	3		440.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang		35	41	50	50		45.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang	50	50	60	70	70		420.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	25	25	27	30	30		420.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase harmonisasi hubungan industrial	%	26	26	26	26	26		1.075.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang telah diakui oleh pemerintah	Dokumen	2	4	5	7	10		435.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	30	70	85	85	90		435.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Kasus	5	10	11	12	15		640.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	3	6	6	6	10		225.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	20	40	40	50	80		415.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan TK
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program keluarga harapan	Menurunnya rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH	Rumah Tangga	12457	11957	11457	10957	10457			APBN	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	% PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	%	45	45	45	50	50		8.330.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang di kelola	DTKS	35429	35.429	35.429	35.429	35.429		4.165.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	135730	20.000	15.750	15.750	1.000		2.400.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	35429	20.000	15.750	15.750	1.000		255.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	22021	22.021	22.021	22.021	22.021		300.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	12688	12.688	12.688	12.688	12.688		1.210.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.												
	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		%	68,85	68,87	68,9	68,95	68,98		750.000.000			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan			84	86	88	90	95	27.790.000.000			
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.			52	53	55	58	60	23.550.000.000			
	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.		%	90	92	94	96	96				
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN			20	30	40	50	60	33.100.000.000			
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	Persen	79	80	81	82	82,2		APBD/APBN	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	%	100	100	100	100	100	223.981.347.702			
		APK SMP	%	100	100	100	100	100				
		APK PAUD	%	91	92	93	94	95				
		Persentase Lembaga PNF Yang Terakreditasi	%	65	70	75	80	85				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pesersentase Sekolah Menengah Pertama Yang Terakreditasi Dengan Nilai Minimal Baik	%	77,4	79,3	80,5	81	83	111.990.673.851	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah	Ruang	6	6	4	2	2	4.000.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun	Ruang	2	2	2	2	1	3.600.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana dan Parasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Dibangun	Unit	4	4	2	2	1	2.340.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Ruang	10	5	5	5	5	4.200.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Ruang	6	4	2	2	2	3.200.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	Paket	4	4	2	2	2	2.800.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	11174	11375	11578	11790	11990	60.660.673.851	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Perengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks Yang Diterima Peserta Didik	Buku	9000	9000	9000	9000	9000	3.500.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	Paket	100	100	100	100	100	3.500.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	3316	3356	3396	3436	3476	2.500.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama Yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	39	39	39	39	39	1.500.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	50	50	50	50	50	1.250.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	274	274	274	274	274	16.440.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapat Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	255	258	260	267	270	1.000.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	39	39	39	39	39	750.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	39	39	39	39	39	750.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Pendidikan
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	persen	1	0,5	0	0	0		APBD/APBN	Kab.Pasaman	BPBD
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	100	100	100	100	100	10.660.000.000	APBD	Kab.Pasaman	BPBD
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentasi penanganan bencana sesuai SDM	%	100	100	100	100	100	6.000.000.000	APBD	Kab.Pasaman	BPBD
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2	2	2	2	2	6.000.000.000	APBD	Kab.Pasaman	BPBD
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentasi penanganan bencana sesuai SDM	bulan	12	12	12	12	12	4.660.000.000	APBD	Kab.Pasaman	BPBD
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	2	2	2	2	2	1.880.000.000	APBD	Kab.Pasaman	BPBD
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	2	2	2	2	2	2.780.000.000	APBD	Kab.Pasaman	BPBD
1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah		Nagari	7	7	7	6	6		APBD/APBN	Kab.Pasaman	BPBD
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	100	100	100	100	100	12.840.000.000	APBD	Kab.Pasaman	BPBD
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentasi kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	850.000.000			
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	1	850.000.000			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	11.990.000.000			
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	1	850.000.000			
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	80	150	150	200	200	2.000.000.000			
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yg ikut Pelatihan Jitu Pasna, Jumlah Unit Rumah yg didata dan Jumlah Dokumen	Orang	30	40	50	60	70	2.810.000.000			
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	30	30	30	30	30	3.760.000.000			
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	6	7	7	7	7	2.134.606.000			
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga		30	30	30	30	435.394.000			
1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial		Persen	23	28	33	38	48		APBD/AP BN	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penangan bencana	%	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD/AP BN	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	%	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD/AP BN	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	50	50	50	50	125.000.000	APBD/AP BN	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	50	50	50	50	125.000.000	APBD/AP BN	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	12	12	12	12	12	125.000.000	APBD/AP BN	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	12	12	12	12	12	125.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	%	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung siaga	1	1	1	1	1	125.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	33	33	33	33	33	625.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial		Persen	37	42	47	52	57		APBD/AP BN	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penangan bencana	%	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	%	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	50	50	50	50	125.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	50	50	50	50	125.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	12	12	12	12	12	125.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	12	12	12	12	12	125.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Sosial
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELLAPARAN, MENCAPI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN												
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).		Persen	90,5	89,1	88,4	88,2	87,6		APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE NAGARI MANDIRI PANGAN	%	40	45	51	56	62	1.190.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/Kota	Nagari	5	5	6	6	6	1.190.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	11	11	11	11	11	410.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	1	1	1	1	1	400.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	1	1	1	1	1	380.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Konsumsi Beras	Kg/Kapita/ Tahun	124	123	123	122	122	4.250.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Buku	2	2	2	2	2	1.925.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	12	12	12	12	12	275.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penyediaan Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	1	1	1	1	270.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	12	12	12	12	12	320.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	18	18	18	18	18	470.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	10	10	10	10	10	160.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	1	1	1	1	1	320.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga		200	200	200	200	110.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten	Jumlah Cadangan Pangan daerah	Ton	100	110	110	110	110	1.300.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1	275.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	15	15	15	15	15	1.025.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Jumlah diversifikasi bahan pangan	Skor PPh	76,4	76,5	76,5	76,5	76,5	1.025.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	400.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2	2	2	2	2	625.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	Persen	82	82	83	83	83	750.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota	Pasar Kecamatan / Nagari	12	15	18	21	22	750.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	585.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen				1	1	165.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.		Persen	6	6	5	5	4		APBD	Kab. Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Nagari Rawan Pangan	Nagari	2	2	2	2	2	260.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Buku Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Buku	1	1	1	1	1	260.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	1	1	1	260.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	KK	100	100	100	100	100	650.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1	650.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).									APBD	Kab. Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Nagari Rawan Pangan	Nagari	2	2	2	2	2	910.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Buku Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Buku	1	1	1	1	1	260.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	1	1	1	260.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	KK	100	100	100	100	100	650.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1	650.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Perikanan dan Pangan
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.		Persen	36,2	34,1	32	29,9	27,8		APBD/Prov/APBN	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	%	75,00	80,00	80,00	85,00	95,00	2.000.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5.800	5.800	5.800	5.800	5800	2.000.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA												
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		Per 1000	8,23	7,23	6,23	5,23	4,23		APBD/APBN	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	%	75,00	80,00	80,00	85,00	95,00	4.500.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	100	4.500.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5.230	5.230	5.230	5.230	5230	2.000.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	26.021	26.021	26.021	26.021	26021	2.500.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
3.2.2 (b)	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi		Persen	95	95	95	95	95		APBD/AP BN	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	%	75,00	80,00	80,00	85,00	95,00	1.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	4	4	4	4	4	1.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		Per 100.000	160	160	160	160	160		APBD/AP BN	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	%	75	80	80	85	95	2.000.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	100	2.000.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	4.922	4.922	4.922	4.922	4922	2.000.000.000	APBD	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
										APBD	Kab.Pasaman	Dinas Kesehatan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.		Persen	68,85	68,87	68,9	68,95	68,98		APBD/AP BN	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Peserta KB Baru dan KB Aktif yang dilakukan	Kali	1740	1740	1740	1740	1740	3.735.260.800	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	3.735.260.800	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	23	23	23	23	23	214.006.600	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	11335	11335	11335	11335	11335	3.521.254.200	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	0	0	0	0	0	260.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	183	183	183	183	183	7.366.542.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	276	276	276	276	276	50.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang / PUS	0	0	50142	50142	50142	124.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern		Persen	22	22,15	22,3	22,45	22,75		APBD/AP BN	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Peserta KB Baru dan KB Aktif yang dilakukan	Kali	1740	1740	1740	1740	1740	3.735.260.800	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	3.735.260.800	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	23	23	23	23	23	214.006.600	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	11335	11335	11335	11335	11335	3.521.254.200	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	0	0	0	0	0	260.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	183	183	183	183	183	7.366.542.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	276	276	276	276	276	50.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang / PUS	0	0	50142	50142	50142	124.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		Persen	96	97	98	99	100		APBD/AP BN	Kab. Pasaman	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	%	75,00	80,00	80,00	85,00	95,00	189.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	100	189.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5	5	5	5	5	189.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA												
4.1.1. (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B		Persen	84	84	84	84	84		APBD/AP BN	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	%	100	100	100	100	100		APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
		APK SMP	%	100	100	100	100	100		APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
		APK PAUD	%	91	92	93	94	95		APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
		Persentase Lembaga PNF Yang Terakreditasi	%	65	70	75	80	85		APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pesersentase Sekolah Dasar Yang Terakreditasi Dengan Nilai Minimal Baik	%	75	80	85	90	90	37.310.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penambahan ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah	Ruang	6	3	3	3	2	3.180.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Yang Telah Dibangun	Ruang	4	4	4	4	4	2.400.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah ang Telah Dibangun	Ruang	4	4	4	4	4	3.800.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana dan Parasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Dibangun	Unit	5	4	4	4	4	3.360.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Yang Direhabilitasi Sedang / Berat	Ruang	30	15	15	15	15	12.600.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Ruang	2	2	2	2	2	1.400.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Parsarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi	Unit	12	6	6	3	6	4.620.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	Paket	6	5	4	4	2	4.200.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	249	249	249	249	249	750.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	249	249	249	249	249	1.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B		Persen	74,7	74,9	75,7	76,7	78,8		APBD/AP BN	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	%	100	100	100	100	100	21.640.000.000			
		APK SMP	%	100	100	100	100	100		APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
		APK PAUD	%	91	92	93	94	95				
		Persentase Lembaga PNF Yang Terakreditasi	%	65	70	75	80	85				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pesersentase Sekolah Menengah Pertama Yang Terakreditasi Dengan Nilai Minimal Baik	%	77,4	79,3	80,5	81	83	21.640.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah	Ruang	6	6	4	2	2	4.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun	Ruang	2	2	2	2	1	3.600.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana dan Parasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Dibangun	Unit	4	4	2	2	1	2.340.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Ruang	10	5	5	5	5	4.200.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Ruang	6	4	2	2	2	3.200.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	Paket	4	4	2	2	2	2.800.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	39	39	39	39	39	750.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	39	39	39	39	39	750.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat		Persen	113,4	113,5	113,6	113,7	113,8		APBD/AP BN	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	%	100	100	100	100	100	10.620.000.000			
		APK SMP	%	100	100	100	100	100		APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
		APK PAUD	%	91	92	93	94	95				
		Persentase Lembaga PNF Yang Terakreditasi	%	65	70	75	80	85				
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi baik	%	60	65	70	75	80	10.620.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan Yang Telah Dibangun	Jumlah Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan Yang Telah Dibangun	Unit	1	1	1	1	1	900.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana, Parasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan Yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan Yang Telah Dibangun	Unit	1	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan Yang Direhabilitasi Sedang / Berat	Unit	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1476	1476	1476	1476	1476	7.500.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	12	18				100.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	65	70	72	75	80	250.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal / Kesetaraan Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	12	18	18	18	18	250.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Sekolah non Formal / Kesetaraan Yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	20	20	20	20	20	120.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
4.1.1. (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 Tahun		Tahun	7,85	7,91	8	8,1	8,23		APBD/AP BN	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								462.550.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
		APK SD	%	100	100	100	100	100	-	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
		APK SMP	%	100	100	100	100	100	-	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
		APK PAUD	%	91	92	93	94	95	-	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
		Persentase Lembaga PNF Yang Terakreditasi	%	65	70	75	80	85	-	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pesersentase Sekolah Dasar Yang Terakreditasi Dengan Nilai Minimal Baik	%	75	80	85	90	90	277.860.326.149	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penambahan ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah	Ruang	6	3	3	3	2	3.180.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Yang Telah Dibangun	Ruang	4	4	4	4	4	2.400.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah ang Telah Dibangun	Ruang	4	4	4	4	4	3.800.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana dan Parasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Dibangun	Unit	5	4	4	4	4	3.360.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Yang Direhabilitasi Sedang / Berat	Ruang	30	15	15	15	15	12.600.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Ruang	2	2	2	2	2	1.400.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Parsarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi	Unit	12	6	6	3	6	4.620.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	Paket	6	5	4	4	2	4.200.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	37636	38147	38654	39171	39676	194.760.326.149	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	Paket	5	5	5	5	5	1.250.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	48	48	48	48	48	1.250.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar Yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	249	249	249	249	249	1.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	60	60	60	60	60	1.500.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	634	634	634	634	634	38.040.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapat Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	410	420	425	430	435	1.750.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	210	220	225	230	230	1.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	249	249	249	249	249	750.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	249	249	249	249	249	1.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pesersentase Sekolah Menengah Pertama Yang Terakreditasi Dengan Nilai Minimal Baik	%	77,4	79,3	80,5	81	83	111.990.673.851	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah	Ruang	6	6	4	2	2	4.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun	Ruang	2	2	2	2	1	3.600.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana dan Parasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Dibangun	Unit	4	4	2	2	1	2.340.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Ruang	10	5	5	5	5	4.200.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Ruang	6	4	2	2	2	3.200.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	Paket	4	4	2	2	2	2.800.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	11174	11375	11578	11790	11990	60.660.673.851	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks Yang Diterima Peserta Didik	Buku	9000	9000	9000	9000	9000	3.500.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia	Paket	100	100	100	100	100	3.500.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	3316	3356	3396	3436	3476	2.500.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama Yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	39	39	39	39	39	1.500.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	50	50	50	50	50	1.250.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	274	274	274	274	274	16.440.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapat Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	255	258	260	267	270	1.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	39	39	39	39	39	750.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	39	39	39	39	39	750.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pesersentase PAUD yang terakreditasi dengan nilai minimal Baik	%	65	67	70	73	75	62.079.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD Yang Telah Dibangun	Ruang	2	2	2	2	2	1.800.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana, Parasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Yang Telah Dibangun	Unit	10	10	10	10	10	1.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangnan Sarana, Parsarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Unit	2	2	2	2	2	150.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD Yang Tersedia	Paket	8	8	8	8	8	1.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	9586	9686	9786	9886	9986	32.300.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD Yang Tersedia	Paket	13	13	13	13	13	995.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD Yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	55	60	65	70	70	250.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Tersedia Pada PAUD	Orang	1000	1000	1000	1000	1000	24.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapat Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	50	50	50	50	50	375.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	25	25	25	25	25	89.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD Yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	310	310	310	310	310	120.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi baik	%	60	65	70	75	80	10.620.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan Yang Telah Dibangun	Unit	1	1	1	1	1	900.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana, Parasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan Yang Telah Dibangun	Unit	1	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan Yang Direhabilitasi Sedang / Berat	Unit	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1476	1476	1476	1476	1476	7.500.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	12	18				100.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	65	70	72	75	80	250.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal / Kesetaraan Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	12	18	18	18	18	250.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Sekolah non Formal / Kesetaraan Yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	20	20	20	20	20	120.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		%	72	73	73	74	75	20% per Tahun	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	%	100	100	100	100	100	62.079.000.000			
		APK SMP	%	100	100	100	100	100		APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pendidikan
		APK PAUD	%	91	92	93	94	95				
		Persentase Lembaga PNF Yang Terakreditasi	%	65	70	75	80	85				
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang terakreditasi dengan nilai minimal Baik	%	65	67	70	73	75	62.079.000.000			
	Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD Yang Telah Dibangun	Ruang	2	2	2	2	2	1.800.000.000			
	Pembangunan Sarana, Parasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Yang Telah Dibangun	Unit	10	10	10	10	10	1.000.000.000			
	Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangnan Sarana, Parsarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Unit	2	2	2	2	2	150.000.000			
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD Yang Tersedia	Paket	8	8	8	8	8	1.000.000.000			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	9586	9686	9786	9886	9986	32.300.000.000			
	Penyediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD Yang Tersedia	Paket	13	13	13	13	13	995.000.000			
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD Yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	55	60	65	70	70	250.000.000			
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Tersedia Pada PAUD	Orang	1000	1000	1000	1000	1000	24.000.000.000			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapat Fasilitas Kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	50	50	50	50	50	375.000.000			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	25	25	25	25	25	89.000.000			
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD Yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	310	310	310	310	310	120.000.000			
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN												
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan		kebijakan	50	60	70	80	90		APBD	Kab. Pasaman	DPP-PA
	PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	lembaga	30	30	30	30	30	1.655.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPP-PA
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan lembaga Pengarusutamaan gender (PUG)	lembaga	30	30	30	30	30	795.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPP-PA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100	100	100	100	100	145.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPP-PA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100	100	100	100	100	120.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPP-PA
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	120.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPP-PA
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	250	250	250	250	250	410.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPP-PA
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.			0	0	0	0	0		APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-PA
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan pengaduan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	100	100	100	100	775.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-PA
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan kekerasan	orang	20	20	20	20	20	275.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-PA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	50	50	50	50	50	150.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-PA
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	60	50	50	50	50	125.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-PA
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten /Kota	orang	20	20	20	20	20	275.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-PA
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	20	20	20	20	20	150.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-PA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	10	10	10	10	10	125.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-PA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi	lembaga	5	5	5	5	5	225.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-PA
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	350	350	350	350	350	225.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-PA
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	0	0	0	0	0	-	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-PA
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	0	0	0	0	0	-	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-PA
5.3.1.b	Angka kelahiran pada pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)		%	11	11	11	11	11		APBD- APBN	Kabupaten Pasaman	DPP-KB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Peserta KB Baru dan KB Aktif yang dilakukan	Kali	1740	1740	1740	1740	1740	174.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-KB
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	174.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-KB
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	276	276	276	276	276	50.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-KB
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang / PUS	0	0	50142	50142	50142	124.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-KB
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.			8,6	8,6	10	10	10		APBD	Kabupaten Pasaman	DP3AP2KB
	PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	lembaga	30	30	30	30	30	705.000.000			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan calon Anggota Legislatif Pemilu,pejabat struktural di Lembaga Eksekutif, dan Perempuan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi.	persen	30	30	30	30	30	705.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DP3AP2KB
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100	100	100	100	100	180.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DP3AP2KB
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	5	5	5	5	5	525.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DP3AP2KB
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.			6,5	7	7,5	8	8,5		APBD	Kabupaten Pasaman	DPP-PA
	PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	lembaga	30	30	30	30	30	705.000.000			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan calon Anggota Legislatif Pemilu,pejabat struktural di Lembaga Eksekutif, dan Perempuan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi.	persen	30	30	30	30	30	705.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DP3AP2KB
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100	100	100	100	100	180.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DP3AP2KB
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	5	5	5	5	5	525.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DP3AP2KB
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		%	13,60	13,00	12,60	12,00	11,30		APBD- APBN	Kabupaten Pasaman	DPP-PA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Peserta KB Baru dan KB Aktif yang dilakukan	Kali	1740	1740	1740	1740	1740	3.735.260.800	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	3.735.260.800	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	23	23	23	23	23	214.006.600	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	11335	11335	11335	11335	11335	3.521.254.200	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	0	0	0	0	0	260.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	183	183	183	183	183	7.366.542.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	276	276	276	276	276	50.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang / PUS	0	0	50142	50142	50142	124.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian Penduduk dan KB
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA												
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.											
6.1.1.a	Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak		%	84	86	88	90	95				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah tangga mendapatkan akses air minum	%	82	84	86	88	90	28.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah tangga terlayani air bersih	SR	800	550	950	700	700	28.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	4	4	4	5	5	900.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	200	150	300	100	100	3.540.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	liter/ detik	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	4.330.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok Masyarakat yang Menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	Kelompok Masyarakat	10	10	15	10	10	550.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	6	3	5	4	4	2.380.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Perluasan Sambungan Rumah Melalui Jaringan Perpipaan	SR	600	400	650	600	600	16.300.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
6.1.1.b	Kapasitas perasaan air baku untuk melayani rumah tangga perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau- pulau		m3/detik	85,83	85,83	99,72	99,72	105,27				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah tangga mendapatkan akses air minum	%	82	84	86	88	90	28.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah tangga terlayani air bersih	SR	800	550	950	700	700	28.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	4	4	4	5	5	900.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	200	150	300	100	100	3.540.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	liter/ detik	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	4.330.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok Masyarakat yang Menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	Kelompok Masyarakat	10	10	15	10	10	550.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	6	3	5	4	4	2.380.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG				2022	2023	2024	2025	2026				
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Perluasan Sambungan Rumah Melalui Jaringan Perpipaan	SR	600	400	650	600	600	16.300.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
6.1.1.c	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan			%	78	80	82	84	85				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah tangga mendapatkan akses air minum	%	82	84	86	88	90	28.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Rumah tangga terlayani air bersih	SR	800	550	950	700	700	28.000.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	4	4	4	5	5	900.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	200	150	300	100	100	3.540.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	liter/ detik	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	4.330.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat		Jumlah kelompok Masyarakat yang Menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	Kelompok Masyarakat	10	10	15	10	10	550.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan		Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	6	3	5	4	4	2.380.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Perluasan Sambungan Rumah Melalui Jaringan Perpipaan	SR	600	400	650	600	600	16.300.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak			%	52	53	55	58	60		APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Rumah tangga bersanitasi layak	%	50	52	55	60	62	23.550.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Ai Limbah Domestik Dalam Daerah Kabuaten/ Kota		Jumlah Rumah tangga bersanitasi layak	SR	500	500	600	650	750	23.550.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	500	500	600	650	750	500.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	10	10	10	10	10	500.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		Kapasitas IPLT terbangun	M3/hari	500	500	600	650	750	22.550.000.000	APBD	Kab. Pasaman	DPUPR
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai air baku			Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat				
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Rumah layak huni	Unit	150	150	150	150	150	1.570.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPRP2LH
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100	1.570.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPRP2LH
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	6	8	8	8	10	995.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPRP2LH
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	1	1	1	1	1	575.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPRP2LH
6.5.1.a*	Jumlah rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)			ada	ada	ada	ada	ada	ada				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase kegiatan penataan ruang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	4.050.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/ Kota		Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	1	1	1	1	1	2.170.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	1	150.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1.650.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	1	1	1	1	370.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota		Instansi yang dikoordinasikan		4	4	4	4	4	620.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	0	0	0	180.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	440.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	%	90	90	90	90	90	790.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	410.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	1	1	1	1	1	380.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase rekomendasi aspek tata ruang yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	470.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakkan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakkan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	25	25	30	35	30	470.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
6.5.1.c*	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk		WS	1WS(WS Masang - Pasaman)	1WS(WS Masang - Pasaman)	1WS(WS Masang - Pasaman)	1WS(WS Rokan)	1WS(WS Rokan)	1.000.000.000			
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Kawasan Pemanfaat Air	%	67	76	80	84	88	92.000.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamanan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Daerah Bebas Banjir yang ditangani	%	76	78	81	84	88	52.350.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	15	15	15	15	15	670.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan	Km	1	1	1	1	1	15.000.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan tebing yang ditingkatkan	Km	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	23.600.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	0,9	0,9	1,5	0,9	0,9	8.750.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang dipelihara	Km	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	4.330.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Daerah Irigasi Yang terairi	%	70	70	75	80	85	39.650.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	10	10	10	10	10	650.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi permukaan yang direhabilitasi.	Km	5	5	5,5	5	5	19.250.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung irigasi yang direhabilitasi	Bendung	6	6	7	6	6	15.450.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	1	1	1	1	1	4.300.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPUPR
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA												
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.											
07.01.02	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.											
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.											
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.											
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.											
7.3.1*	Intensitas energi primer.											
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara- negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.											
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)											
TUJUAN 8. MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAKUNTUK SEMUA												
8.3.1.(a)	Persentase Tenaga Kerja Formal											
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Kegiatan	12	15	18	20	22	2.226.500.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Kegiatan	2	7	9	10	10	1.708.500.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	2	4	5	5	6	1.106.500.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	2	3	4	5	4	602.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS	LKPS	1	5	6	6	7	518.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	1	5	6	6	9	518.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI												
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya pengaman informasi dan jaringan komunikasi sandi	persen	70	75	80	90	100	625.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	70	75	80	90	100	625.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	2	2	2	2	2	190.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1	190.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	2	2	2	2	2	120.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	-	6	6	4	7	125.000.000	APBD	Kab. Pasaman	Dinas Komunikasi dan Informatika
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGERA												
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.		Desa	4	5	6	6	7				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peran lembaga pemberdayaan masyarakat	%	70	75	80	90	100	2.950.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peran lembaga pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari	%	70	75	80	90	100	2.950.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	3	3	3	3	3	375.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	524	525	527	530	532	475.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	1	1	1	250.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3	3	3	3	3	450.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	1	1	1	250.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	6	6	6	6	6	950.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga		30	30	30	30	100.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga		30	30	30	30	100.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.											
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase harmonisasi hubungan industrial	%	26	26	26	26	26	1.075.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang telah diakui oleh pemerintah	Dokumen	2	4	5	7	10	435.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	30	70	85	85	90	435.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Kasus	5	10	11	12	15	640.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	3	6	6	6	10	225.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	20	40	40	50	80	415.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN												
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau		%	89	90,38	91,06	91,75	92,44				
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rumah layak huni	Unit	150	150	150	150	150	1.570.000.000			
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100	1.570.000.000			
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	6	8	8	8	10	995.000.000			
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	1	1	1	1	1	575.000.000			
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			0,5	0,5	0	0	0				
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	100	100	100	100	100	4.660.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	BPBD
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentasi penanganan bencana sesuai SDM	bulan	12	12	12	12	12	4.660.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	BPBD
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	2	2	2	2	2	1.880.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	BPBD
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	2	2	2	2	2	2.780.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	BPBD
11.5.1.a	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)			170	170	150	145	140				
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana		100	100	100	100	100	850.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	BPBD
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentasi kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	850.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	BPBD
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	1	850.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	BPBD
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN												
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.			7500	8500	9500	10500	11500				
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	100	100	100	100	100	10.900.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	%	100	100	100	100	100	10.900.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Potensi Timbulan Sampah RT dan Sampah sejenis Sampah RT	Ton	9138	9969	10800	11631	12461	1.029.154.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	paket	3	3	3	3	3	9.870.846.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA												
13.1.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang											
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	100	100	100	100	100	850.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	BPBD
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentasi kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	850.000.000		Kabupaten Pasaman	BPBD
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	1	850.000.000		Kabupaten Pasaman	BPBD
TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELLOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKANPENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHLANGAN KEANEJARAGAMAN HAYATI												
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis			Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat				
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	765.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPRKP2LH
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	765.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPRKP2LH
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang Dirawat	Ha	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	765.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DPRKP2LH
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT ANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBAGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUNKEMBAKAAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN												
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.			Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun				
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	presentase daerah yang berpotensi konflik sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat diredam	%	100	100	100	100	100	5.525.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	data/dokumen potensi konflik	Dokumen	2	2	2	2	2	5.525.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	200	200	200	200	200	3.425.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	12	12	12	2.100.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.			Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Terkelolanya Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	100	573.500.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	10.476.100.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	971.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	971.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	37	37	37	37	37	294.500.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	37	37	37	37	37	294.500.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	37	37	37	37	37	420.200.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	37	37	37	37	37	420.200.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	2	2	2	2.745.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2	2	2	2.745.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	2	2	2	2	422.400.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	1	6	6	6	1.192.300.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	% SP2D yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	3.860.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	16.112	16.400	16.600	16.800	17.000	1.620.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	518	518	518	518	518	1.425.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	12	12	12	12	575.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	240.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	3.508.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	37	37	37	37	37	740.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	444	444	444	444	444	390.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	18	18	18	18	18	348.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	2	2	2	2	295.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran ggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	4	4	4	585.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	1	1	1	210.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	1	1	1	425.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	320.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	37	37	37	37	37	195.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran dana transfer ke Nagari	%	100	100	100	100	100	555.655.900.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	100	100	100	100	100	519.833.900.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12	12	12	12	12	27.500.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	100	100	100	100	100	8.322.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	% Optimalisasi Pengelolaan BMD	%	100	100	100	100	100	3.285.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen BMD	%	100	100	100	100	100	3.285.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	290.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	7	7	7	7	9	440.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	2	2	2	190.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	4	4	4	4	4	370.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	1.350.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	444	444	444	444	444	250.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	2	2	2	2	395.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Porsi PAD terhadap total pendapatan	%	10	10	10	10	10	4.292.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan PAD	%	100	100	100	100	100	4.292.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	873.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	2	2	2	2	2	1.010.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	804.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	159.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	100	100	100	100	100	1.200.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	206.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2					40.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan Keuangan Ddaerah
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks reformasi birokrasi kementerian/lembaga pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) $RB \geq B$			B	B	BB	BB	BB				
	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	%	100	100	100	100	100	4.820.680.164	APBD	Kabupaten Pasaman	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	50	24	24	24	24	1.621.180.164	APBD	Kabupaten Pasaman	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	3	1	1	1	1	722.250.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	1	1	1	678.900.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	1	1	1	1	749.250.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	3	3	3	3	3	1.049.100.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		%	8,6	8,6	8,6	10	10				
	PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	lembaga	30	30	30	30	30	705.000.000			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan calon Anggota Legislatif Pemilu, pejabat struktural di Lembaga Eksekutif, dan Perempuan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi.	persen	30	30	30	30	30	705.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DP3AP2KB
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100	100	100	100	100	180.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DP3AP2KB
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	5	5	5	5	5	525.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DP3AP2KB
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).											
	PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	lembaga	30	30	30	30	30	705.000.000			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan calon Anggota Legislatif Pemilu, pejabat struktural di Lembaga Eksekutif, dan Perempuan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi.	persen	30	30	30	30	30	705.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DP3AP2KB
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100	100	100	100	100	180.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DP3AP2KB
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	5	5	5	5	5	525.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	DP3AP2KB
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITAISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN												
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.			Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Porsi PAD terhadap total pendapatan	%	10	10	10	10	10	4.292.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan PAD	%	100	100	100	100	100	4.292.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	873.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	2	2	2	2	2	1.010.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	804.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	159.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	100	100	100	100	100	1.200.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	206.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2					40.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		%	1,1	1,4	2	2,3	3	7.750.000.000			Badan keuangan daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Porsi PAD terhadap total pendapatan	%	10	10	10	10	10	4.292.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan PAD	%	100	100	100	100	100	4.292.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	873.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	2	2	2	2	2	1.010.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	804.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	159.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	100	100	100	100	100	1.200.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	206.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2					40.000.000	APBD	Kabupaten Pasaman	Badan keuangan daerah

Lampiran 2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR TPB
KABUPATEN/KOTA : LIMA PULUH KOTA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN												
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.											
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	% peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas		50%	55%	60%	62%	65%	26.120.252.550	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.	Pengawasan Pemanfaatan Pupuk, Pestisida dan Alsintan		13 Keca mata n	13 Keca mata n	13 Keca mata n	13 Keca matan	13 Keca mata n	17.623.582.849	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penguunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi.	Pengawasan Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida		13 Keca mata n	13 Keca mata n	13 Keca mata n	13 Keca matan	13 Keca mata n	1.602.605.800	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		Rapat monitoring dan pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasan pestisida		50 oran g	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang				Dinas Tanhorbun
		Rapat koordinasi penyaluran		30 oran g	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		pupuk bersubsidi										
		Sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi		40 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang				Dinas Tanhorbun
		Monitoring, Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasan pestisida		13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan				Dinas Tanhorbun
		Pelatihan pembuatan pupuk organik		30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang				Dinas Tanhorbun
		Rapat koordinasi pupuk organik		30 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang				Dinas Tanhorbun
		Terlaksananya pengadaan sarana pendukung pengolahan pupuk organik		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit				Dinas Tanhorbun
		Tersedianya pupuk pendukung kegiatan SL PTT Jagung Adopsi Jarsip Menuju IP 400		39 unit SL	39 unit SL	39 unit SL	39 unit SL	39 unit SL				Dinas Tanhorbun
		Alat Pengolah Pupuk Organik		17 Unit	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan becak motor		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		cultivator		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		pelatihan operator		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pembinaan		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		upja										
		alat pengolahan gambir		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		alat tanam jagung		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		corn sheller		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		pengadaan gedung bengkel alsintan		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan mesin potong rumput		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		power threaser		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		pengadaan sarana pendukung pengolahan pupuk organik		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Traktor roda dua		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		rapat koordinasi pupuk organik		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		rapat pembinaan dan pengawas an alsintan		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.	Pengawasan Pemanfaatan Alsintan		13 Keca mata n	13 Keca mata n	13 Keca mata n	13 Keca matan	13 Keca mata n	16.020.977.049	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		Pengadaan traktor roda 2		28 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan power thresher		3 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan cultivator (5 unit DBHCH)		39 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengadaan Corn Seller		4 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan Becak Motor		4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan Alat mesin pasca panen (Alat Pengolahan Gambir)		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan alat tanam jagung		1 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan mesin pemotong rumput		-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan mesin pompa air		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit				Dinas Tanhorbun
		Operasional traktor besar		10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha				Dinas Tanhorbun
		Pembinaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)		13 Klp UPJA	13 Klp UPJA	13 Klp UPJA	13 Klp UPJA	13 Klp UPJA				Dinas Tanhorbun
		Pelatihan Operator Alat Mesin Pertanian		135 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang				Dinas Tanhorbun
		Pertemuan Pembinaan keltan penerima bantuan hibah alsintan		150 orang	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pertemuan Monev Pemanfaatan Alsintan		135 orang	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pelayanan		13	13	13	13 kali	13				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Bengkel Alat Mesin Pertanian		kali	kali	kali		kali				
		Pengadaan Lemari Penyimpanan Perkakas bengkel Alsintan		5 Unit	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan Peralatan RMU (DAK)		1 Pake t	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan Sarana Pendukung Smart Green House (DAK)		1 Pake t	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Tersedianya alat tanam Jagung pendukung kegiatan SL PTT Jagung Adopsi Jarsip Menuju IP 400		117 Unit	117 Unit	117 Unit	117 Unit	117 Unit				Dinas Tanhorbun
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	% peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas		50%	55%	60%	62%	65%	26.120.252.550	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDG		7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	8.496.669.702	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Sub Kegiatan : Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Pemurnian (pendaftaran varietas) benih tanhortbun		1 variet as	1 variet as	1 variet as	1 variet as	1 variet as	4.960.737.309	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		Jumlah penyediaan		12.400	12.400 Kg	12.400 Kg	12.400 Kg	12.400 Kg				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		benih sumber tanaman pangan		Kg								
		Jumlah pemurnian varietas lokal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		1 Varietas	1 Varietas	1 Varietas	1 Varietas	1 Varietas				Dinas Tanhorbun
		Jumlah uji adaptasi varietas lokal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		-	-	-	1 kali	1 kali				Dinas Tanhorbun
		Jumlah pelepasan varietas lokal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		-	1 Varietas	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Jumlah pemeliharaan kebun induk gambir		75 Batang	75 Batang	75 Batang	75 Batang	75 Batang				Dinas Tanhorbun
		Jumlah penyediaan saprodi untuk pemanfaatan lahan tidur komoditi jagung hibrida		10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha				Dinas Tanhorbun
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Penyediaan Benih Tanhortbun		7 komoditi	7 komoditi	7 komoditi	7 komoditi	7 komoditi	3.535.932.392	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		Jumlah		2340	2340	2340	2340	2340				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		penyediaan tanaman Pangan		kg	kg	kg	kg	kg				
		Jumlah penyediaan bibit tanaman hortikultura		2.000 Bata ng	2.000 Bata ng	2.000 Bata ng	2.000 Bata ng	2.000 Bata ng				Dinas Tanhorbun
		Jumlah penyediaan bibit tanaman perkebunan		5.000 Bata ng	5.000 Bata ng	5.000 Bata ng	5.000 Bata ng	5.000 Bata ng				Dinas Tanhorbun
	Program : Pengelolaan Pendidikan											Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		370	370	370	370	370				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia		21	21	21	21	21				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		1	1	1	1	1				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		366	366	366	366	366				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3						Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil	Jumlah			3	3						Dinas Pendidikan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik										Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Perlengkapan dasar buku teks peserta didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				57	57	57				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia		6	15	3						Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		1	1	1	1	1				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		57	57	57	57	57				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	3.250.700.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	2.925.700.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi	orang	102 orang	96 orang	105 orang	140 orang	132 orang	1.829.060.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pada Tahun n										
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	2.270.455.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	-	-	70 orang	70 orang	60 orang	760.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan Bina Kelompok	%	79	81	83	85	87	5,998,985,377	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	Dinas Perikanan
	Sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Pembudidaya Ikan	Kelompok	547	559	562	567	574	781,999,952			Dinas Perikanan
	Sub kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Jumlah Kelompok Perikanan	Kelompok	547	559	562	567	574	672,165,420			Dinas Perikanan
	Sub kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Cakupan Bina Kelompok	%	79	81	83	85	87	1,952,605,140			Dinas Perikanan
	Sub kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Jumlah Kelompok Perikanan	Kelompok	547	559	562	567	574	2,592,214,865			Dinas Perikanan
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi	ton/tahun	45.843	47.218	48.635	50.094	51.597	15,199,666,154	DAU	KABUPATE N LIMA	Dinas Perikanan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Perikanan yang Unggul									PULUH KOTA	
	Sub kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	44.9 81,2 2	47.21 8	48.63 5	50.09 4	51.59 7	1,370,031,599			Dinas Perikanan
	Sub kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah penyakit Ikan	%	15	15	20	20	20	453,963,690			Dinas Perikanan
	Sub kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	45.8 43	47.21 8	48.63 5	50.09 4	51.59 7	194,959,804			Dinas Perikanan
	Sub kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	meningkatnya Luas Lahan	Ha	20	20	20	20	20	7,049,515,716			Dinas Perikanan
	Sub kegiatan : Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidaya Ikan di Darat	meningkatnya Luas Lahan	Ha	20	20	20	20	20	526,899,183			Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	%/ tahun	5	5	5	5	5	5,548,940,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	Dinas Perikanan
	Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok	%	79	81	83	85	87	482,538,127	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	Dinas Perikanan
	Sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Cakupan Bina Kelompok	%	79	81	83	85	87	143,192,170			Dinas Perikanan
	Sub kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelembagaan Perikanan yang aktif	Kelompok	81	83	85	87	89	339,345,958			Dinas Perikanan
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta JKN		90%	98%	100%	100%	100%		DAU, DBH CHT	Kabupaten Lima Puluh	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
											Kota	
	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	%	15	20	25	30	35	8,900,000,000		KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Tersfasilitasinya pelaku usaha mikro.	kegiatan	4	4	4	4	4	8,900,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Sub Kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	UMKM	35	35	35	35	35	2,639,990,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	UMKM	35	35	35	35	35	2,045,600,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	UMKM	35	35	35	35	35	2,015,500,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	UMKM	0	50	50	50	50	137,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program : Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	%	15	20	25	30	35	5,781,000,000			Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM	kegiatan	10	10	10	10	10	5,781,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	kegiatan	10	10	10	10	10	5,781,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Keswan
	Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya Persentase Populasi dan	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Keswan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Produksi Ternak yang Berkualitas										
	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya pengadaan ternak untuk kelompok	Kelompok	5	5	5	5	5	8.856.734.400	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan
	Program : Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang di Berdayakan	%	95%	95%	95%	95%	95%	11.980.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan SosialDaerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	%	95%	95%	95%	95%	95%	11.980.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Peningkatan KemampuanPotensi Sumber KesejahteraanSosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RLTH) Pengadaan Bangunan Warung Binaan Sosial (Warbinsos), Jumlah Pemberian BantuanUEP Fakir Miskin dan UEP KUBE	Orang	25 RLT H, 1 kali Sosi alisa si, 1 Unit Warb insos , 50 KPM dan 5 Klpk	25 RLT H, 1 kali Sosia lisasi, 1 Unit Warb insos , 50 KPM dan 5 Klpk	25 RLT H, 1 kali Sosia lisasi, 1 Unit Warb insos , 50 KPM dan 5 Klpk	25 RLTH, 1 kali Sosial isasi, 1 Unit Warb insos, 50 KPM dan 5 Klpk	25 RLTH , 1 kali Sosial isasi, 1 Unit Warb insos, 50 KPM dan 5 Klpk	2.740.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Persentase Rehabilitasi	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial UEP bagi Lansia	Orang	2.000 Orang Permakanan Lansia dan 30 Orang UEP Lansia	2.000 Orang Permakanan Lansia dan 30 Orang UEP Lansia	2.000 Orang Permakanan Lansia dan 30 Orang UEP Lansia	2.000 Orang Permakanan Lansia dan 30 Orang UEP Lansia	2.000 Orang Permakanan Lansia dan 30 Orang UEP Lansia	12.000.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
	Program : Pengelolaan Pendidikan											Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		370	370	370	370	370				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa		21	21	21	21	21				Dinas Pendidikan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		yang Tersedia										
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		1	1	1	1	1				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		366	366	366	366	366				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3						Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			3	3						Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Perlengkapan dasar buku teks peserta didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				57	57	57				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia		6	15	3						Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		1	1	1	1	1				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOS sekolah	Jumlah		57	57	57	57	57				Dinas Pendidikan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	menengah pertama	Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS										Kebudayaan
	Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	3.250.700.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
	Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase terlaksananya pengukuran produktifitas tingkat daerah Kab. 50 Kota	%	-	-	100%	100%	100%	150.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	dokumen	-	-	1 doku men	1 doku men	1 doku men	150.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta JKN		90%	98%	100%	100%	100%		DAU, DBH CHT	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program : Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan Keswan
	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/Petr	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan Keswan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		nakan										
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan petani	Orang	16	16	16	16	16	1.664.998.467	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan
	Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	8.813.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	%	95%	95%	95%	95%	95%	8.038.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	2.137.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
	Program : Pengelolaan Pendidikan											Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											Dinas Pendidikan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		370	370	370	370	370				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia		21	21	21	21	21				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		366	366	366	366	366				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3						Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			3	3						Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Perlengkapan dasar buku teks peserta didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				57	57	57				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia		6	15	3						Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan		1	1	1	1	1				Dinas Pendidikan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Ujian										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		57	57	57	57	57				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		1	1	1	1	1			Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	-	-	70 orang	70 orang	60 orang	760.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	%/ tahun	5	5	5	5	5	5,548,940,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Tangkap	ton/ Tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	5,066,401,873	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Tangkap	ton/ Tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	872,982,577			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase	%/ tahun	3	3	3	3	3	21,806,717,000	DAU	KABUPATE	DINAS PERIKANAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Peningkatan Produksi Budidaya									N LIMA PULUH KOTA	
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	45.843	47.218	48.635	50.094	51.597	15,199,666,154	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	juta ekor benih	450.000.000	460.000.000	470.000.000	480.000.000	490.000.000	2,353,016,652			
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	KG/ Kapita/ Tahun, dan %/ tahun	38,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	3,606,320,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061			
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta JKN		90%	98%	100%	100%	100%		DAU,DBH CHT	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner										
	Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan diUPTD	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terlaksananya peningkatan produktivitas ternak dan pelayanan kesehatan hewan	Pelayan	1500	1500	1500	1500	1500	7.837.949.517	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	8.813.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	%	95%	95%	95%	95%	95%	8.038.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	2.137.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.											
	Program : Hubungan Industrial	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	434.606.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota	Persentase menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	259.566.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	-	-	100 orang	100 orang	150 orang	38.460.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	%	100 %	100%	100%	100%	100%	17.991.250.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase peningkatan	%	100 %	100%	100%	100%	100%	17.991.250.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab. 50 Kota										
	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	11 kelo mpok	15 kelo mpok	14 kelo mpok	14 kelom pok	14 kelom pok	13.300.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	8.813.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	%	95%	95%	95%	95%	95%	8.038.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	KPM	24.994 KPM	24.994 KPM	24.994 KPM	24.994 KPM	24.994 KPM	800.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		9,000,000,000	5,589,200,000	5,482,400,000	5,400,000,000	5,400,000,000	37,990,901,600	DAU, DBH CHT	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program : Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	'Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	3.757.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi	Jiwa	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKS 17.874 Jiwa	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	912.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Hubungan Industrial	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	434.606.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	175.040.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	59.980.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	%	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78	738.300.000.000	DAU/ DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)	KM	628,23	645,85	660,17	676,47	691,33	738.300.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (km)	KM	7	5,6	10	10,2	10,2	103.304.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan sesuai standar (km)	KM	9,5	7	18	18	17	77.500.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi (km)	KM	12,4	13,5	21	21	21	197.026.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi (km)	KM	7	0	0	0	0	8.000.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (km)	KM	10	13	14	14	14	192.000.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (km)	KM	14	16,5	17	18	18	29.000.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun (unit)	Unit	4	6	5	5	5	102.770.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yang diganti (unit)	Unit	2	0	0	0	0	6.000.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi (Unit)	Unit	10	12	14	7	6	18.500.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara (Unit)	Unit	5	0	0	0	0	1.200.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan dan jembatan yang ditanggulangi secara darurat (m)	M	25	0	0	0	0	3.000.000.000			Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)	%	44	46	48	50	52	26.094.470.000	DAU/ DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase primer yg terbangun (m)	M	4232	4866,8	5597	6436	7402	26.094.470.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang terbangun (km)	KM	3	6	6	6	6,6	17.444.470.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan (km)	KM	0,6	1	1	1	1,6	6.100.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang terpelihara (km)	KM	2	2	2	2	2,5	2.550.000.000			Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Persentase	%	83,1	84,72	86,42	88,22	90,12	47.631.000.000	DAU/ DAK	Kab. Lima	Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sistem Penyediaan Air Minum	rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)		2							Puluh Kota	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Rumah	440	450	460	460	460	47.631.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Rumah	200	200	200	200	200	20.600.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Rumah	240	250	260	260	260	27.031.000.000			Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	%	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85	56.421.000.000	DAU/ DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi	Rumah	58.926	59.076	59.231	59.386	59.541	56.421.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		yang layak (rumah)										
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	Rumah	145	150	155	155	155	56.421.000.000			Dinas PUPR
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)	%	55	60	65	70	75	19.761.360.000	DAU/ DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang terkelola (ton)	Ton	200	230	240			19.761.360.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (unit)	Unit	1	1	1	1	1	11.105.650.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi (unit)	Unit	0	0	1	0	1	400.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (unit)	Unit	0	0	1	1	1	3.600.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang tersedia (unit)	Unit	3	3	5	5	6	4.655.710.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	%	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52	258.457.000.000	DAU/ DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara (%)	%	80,12	81,25	82,36	83,49	84,62	36.595.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara (embung)	Embung	4	5	6	6	8	11.300.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi (kawasan)	Kawasan	17	18	19	15	15	25.295.000.000			Dinas PUPR
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang terkelola (%)	%	80,60	81,22	81,84	82,46	83,08	221.862.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan (jaringan irigasi)	Jaringan Irigasi	26	36	32	40	42	50.862.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)	Jaringan Irigasi	20	27	28	30	32	159.000.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang	Jaringan Irigasi	40	40	40	40	40	12.000.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		terpelihara (jaringan irigasi)										
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.											
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	%	100	100	100	100	100	803.240.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi (kasus)	Kasus	3	3	3	3	3	803.240.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang difasilitasi (kasus)	Kasus	2	2	2	2	3	362.580.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi penyelesaiannya	Kasus	2	2	2	2	1	440.660.000			Dinas PUPR
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan	%	30	25	25	20	-	1.255.090.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		tanah untuk pembangunan (%)										
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi	Kasus	2	2	2	2	2	1.255.090.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Penerima Santunan Tanah yang difasilitasi (orang)	Orang	5	5	5	5	0	635.090.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Sub Kegiatan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (kasus)	Kasus	2	2	2	2	0	620.000.000			Dinas PUPR
	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)	%	20	20	20	20	20	2.583.060.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah	Jumlah Subjek dan	Objek	2	2	2	2	2	1.853.790.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi										
	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah yang difasilitasi	Objek	2	2	2	2	2	485.600.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah yang difasilitasi	Rekomen dasi	2	2	2	2	2	610.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria yang terlaksana		2	2	2	2	2	473.210.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah		0	2	2	2	2	284.980.000			Dinas PUPR
	Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Ganti Kerugian Tanah		2	2	2	2	2	729.270.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Daerah Kabupaten/Kota	Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi										
	Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang difasilitasi (pemilik)	Pemilik	2	2	2	2	2	470.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SK Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	SK		2	2	2	2	259.270.000			Dinas PUPR
	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)	%	20	20	20	20	20	918.970.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Ulayat yang ditetapkan yang difasilitasi		5	5	5	5	5	918.970.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Batas Tanah Ulayat yang		0	2	2	2	2	298.410.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		dipetakan										
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah ulayat yang telah diakui dan dikukuhkan Masyarakat Hukum Adat		2	2	2	2	2	305.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Ulayat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	SK	2	2	2	2	2	315.560.000			Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)	%	20	20	20	20	20	1.117.670.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian masalah tanah kosong	%	2	2	2	2	2	379.460.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Masalah Tanah Kosong yang diselesaikan	Kasus	2	2	2	2	2	379.460.000			Dinas PUPR
	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang telah dimanfaatkan	%	2	2	2	2	2	738.210.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang telah didata (kapling)	Kapling	2	2	2	2	2	378.210.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Tanah Kosong yang dimanfaatkan (kapling)	Kapling	2	2	2	2	2	360.000.000			Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)	%	40	50	60	70	80	1.019.490.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase izin yang diterbitkan	%	20	20	20	20	0	1.019.490.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Pemberian Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	Izin	4	10	10	10	10	489.490.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pengendalian pemanfaatan tanah negara	Persentase pemanfaatan tanah negara yang sesuai peruntukan (%)	%	40	50	60	70	80	530.000.000			Dinas PUPR
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	%	20	20	20	0	20	760.300.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang difasilitasi (kapling)	Kapling	2	2	2	0	0	760.300.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah perencanaan penggunaan tanah yang dibuat (dokumen)	Dokumen	1	1	1	0	1	330.300.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Zona Nilai	Dokumen	1	1	1	0	1	215.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Tanah yang dibuat (dokumen)										
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Kabupaten yang telah dikonsolidasi (kapling)	Kapling	1	1	1	0	1	215.000.000			Dinas PUPR
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.											
	Program : Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang di Berdayakan	%	95%	95%	95%	95%	95%	11.980.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	%	95%	95%	95%	95%	95%	11.980.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan Pemilihan Pilar-pilar Berprestasi	Orang	81 Orang PSM	81 Orang PSM	81 Orang PSM	81 Orang PSM	81 Orang PSM	2.250.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan Pemilihan Pilar-Pilar Berprestasi	Orang	13 Orang TKSK	13 Orang TKSK	13 Orang TKSK	13 Orang TKSK	13 Orang TKSK	840.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.											
	Program : Pengelolaan Pendidikan											Dinas Pendidikan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		370	370	370	370	370				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia		21	21	21	21	21				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		1	1	1	1	1				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		366	366	366	366	366				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3						Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			3	3						Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Perlengkapan dasar buku teks peserta didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				57	57	57				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan	Jumlah Alat		6	15	3						Dinas Pendidikan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	peraga siswa	Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia										Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		1	1	1	1	1				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		57	57	57	57	57				Dinas Pendidikan Kebudayaan
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta JKN		90%	98%	100%	100%	100%		DAU,DBH CHT	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program : Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	'Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	3.757.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi	Jiwa	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKS 17.874 Jiwa	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	912.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	8.813.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	%	95%	95%	95%	95%	95%	8.038.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH)	KPM	16.898 KPM	16.898 KPM	16.898 KPM	16.898 KPM	16.898 KPM	1.851.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.											
	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.											DPPKBP3A Dinas Sosial
	Program : Pengarusutamaan Gender dan	Indeks	%	95,8	95,85	95,90	95,95	96				DPPKBP3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pemberdayaan Perempuan	Pembanguan Gender		0								
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	%	80,75	80,80	80,85	90	90,10				DPPKBP3A
	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap perempuan dan kelompok perempuan	Kec	13	13	13	13	13	767.945.882	DAU		DPPKBP3A
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	%	95%	95%	95%	95%	95%	8.038.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Bantuan UEP untuk WRSE dan KTK	Orang	25 KTK 25 WRS, 50 UEP KTK dan WRS E	25 KTK 25 WRS, 50 UEP KTK dan WRS E	25 KTK 25 WRS, 50 UEP KTK dan WRS E	25 KTK 25 WRS, 50 UEP KTK dan WRS E	25 KTK 25 WRS, 50 UEP KTK dan WRS E	3.250.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELLAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN												
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	81,108,060	89,218,866	98,140,753	107,954,828	118,750,311	568,907,417	DAU, DAK NF	Kab.Limapuluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	%	15	16	17	18	20	5.887.589.956	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Skor	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	1.957.029.412	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya kegiatan advokasi optimalisasi pemanfaatan di Nagari	Nagari	3	3	3	3	4	219.827.075	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.											
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan dalam mewujudkan Kemandirian dan	%	17%	33%	50%	67%	83%	1.730.303.000	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Kedaulatan Pangan Masyarakat										
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Teridentifikasi nya wilayah Kecamatan yang Rawan Pangan dan Tahan Pangan	Buku	1	1	1	1	1	238.400.000	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
	Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Teridentifikasi nya wilayah kecamatan yang rentan rawan pangan berdasarkan peta FSVA	Buku	1	1	1	1	1	238.400.000	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	81,108,060	89,218,866	98,140,753	107,954,828	118,750,311	568,907,417	DAU, DAK NF	Kab.Limapuluh Kota	Dinas Kesehatan
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada anak dibawah Lima Tahun/Balita	Persentase Stunting	%	7,29	6,29	5,29	4,29	3,29	568,907,417	DAK NF (BOK Stunting)	Kab.Limapuluh Kota	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.											
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase	%	17%	33%	50%	67%	83%	1.730.303.000	DAU	Kabupaten	Dinas Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		penanganan daerah rawan pangan dalam mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat									Lima Puluh Kota	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Teratasinya Kerawanan Pangan Daerah	%	90	80	70	60	50	1.131.903.000	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten	Kali	7	9	10	11	13	260.800.000	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
	Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Terdistribusinya bantuan makanan untuk penanggulangan kejadian rawan pangan	Balita	150	150	150	150	150	871.103.000	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	% wasting	%	5,62	5,12	4,62	4,12	3,62	568,907,417	DAK NF (BOK Stunting)	Kab.Limapuluh Kota	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).											
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	%	15	16	17	18	20	5.887.589.956	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka	Tercapainya Skor Pola	Skor	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	1.957.029.412	DAU	Kabupaten Lima Puluh	Dinas Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kecukupan Gizi	Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)									Kota	
	Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Tercapainya Skor PPH berdasarkan AKG	Skor	81,82	81,88	81,94	82	82	297.081.847	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	81,108,060	89,218,866	98,140,753	107,954,828	118,750,311	568,907,417	DAU, DAK NF	Kab.Limapuluh Kota	Dinas Kesehatan
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.											
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah pendu-duk usia pro-duktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	258321	258481	271405	284975	299224	1,324,263,045	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	%/ tahun	5	5	5	5	5	5,548,940,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Tangkap	ton/ Tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	5,066,401,873	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Tangkap	ton/ Tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	872,982,577			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	%/ tahun	3	3	3	3	3	21,806,717,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	45.843	47.218	48.635	50.094	51.597	15,199,666,154	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	juta ekor benih	450.000.000	460.000.000	470.000.000	480.000.000	490.000.000	2,353,016,652			
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	KG/ Kapita/ Tahun, dan %/ tahun	38,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	3,606,320,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	%/ tahun	5	5	5	5	5	5,548,940,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Tangkap	ton/ Tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	5,066,401,873	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Tangkap	ton/ Tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	872,982,577			
	Program : Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan	%	4	6	8	10	12				Dinas PeternakanKeswan
	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/Peternakan	%	4	6	8	10	12				Dinas PeternakanKeswan
	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Kecamatan	13	13	13	13	13	862.609.028	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PeternakanKeswan
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan											
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	2.270.455.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab.	%	100 %	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		50 Kota										
	Sub Kegiatan : Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	-	-	70 orang	70 orang	60 orang	760.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	3.250.700.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase terlaksananya pengukuran produktifitas tingkat daerah Kab. 50 Kota	%	-	-	100%	100%	100%	150.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	KG/ Kapita/ Tahun, dan %/ tahun	38,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	3,606,320,000	DAU	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan	Jumlah Produksi Hasil	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061	DAU	KABUPATEN LIMA	DINAS PERIKANAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Olahan Perikanan									PULUH KOTA	
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061			
	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	392,818,420	DAU	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penarapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	392,818,420			
	Kegiatan : Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	38,5	39	39,5	40	40,5	2,480,585,519	DAU	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	38,5	39	39,5	40	40,5	1,190,484,879			
	Sub kegiatan : Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	38,5	39	39,5	40	40,5	1,290,100,640			
	Program : Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan	%	4	6	8	10	12				Dinas PeternakanKeswan
	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/Peternakan	%	4	6	8	10	12				Dinas PeternakanKeswan
	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembentukan dan	Kecamatan	13	13	13	13	13	862.609.028	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PeternakanKeswan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		penyelenggara sekolah lapang kelompok tani										
02.04.01	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.											
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas		70	72	75	78	80	84.314.533.500	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian		1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	3.227.533.500	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengawasan Pelaksanaan Perda LP2B		1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	788.137.500	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		Pengawasan Pelaksanaan Perda LP2B		1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men				Dinas Tanhorbun
		Sosialisasi Perda LP2B		15 kali	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	2.439.396.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Pengembangan Prasarana, 'Sarana, Kawasan dan 'Komoditas Perkebunan	Master plan kawasan jagung		1 Doku men	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Master plan kawasan jeruk		-	-	1 Doku men	-	-				Dinas Tanhorbun
		Master plan kawasan sayuran		-	-	-	1 Doku men	-				Dinas Tanhorbun
		Master plan kawasan										Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		gambir										
		Master plan kawasan prasarana jalan pertanian		-	1 Doku men	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Sosialisasi Masterplan kawasan pertanian		-	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali				Dinas Tanhorbun
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembanguna n Prasarana Pertanian		15 jenis					81.087.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani		125 Ha	125 Ha	125 Ha	125 Ha		26.513.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani										Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Jaringan Irigasi Tersier										Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Irigasi Tanah Dalam	Pembanguna n Sumur Bor										Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Irigasi tanah dangkal	Irigasi sumur bor										Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Irigasi Perpipaan	Irigasi Perpipaan										Dinas Tanhorbun
	2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian							4.200.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Embung	Pembanguna n Embung										Dinas Tanhorbun
	- Rehab Embung	Rehab Embung										Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							37.830.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani										Dinas Tanhorbun
	- Rehab Jalan Usaha Tani	Rehab Jalan Usaha Tani										Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Jalan Produksi	Jalan Produksi										Dinas Tanhorbun
	- Rehab Jalan Produksi	Rehab Jalan Produksi										Dinas Tanhorbun
	4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit Pertanian							2.125.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Dam Parit	Pembangunan Dam Parit										Dinas Tanhorbun
	- Rehab Dam Parit	Rehab Dam Parit										Dinas Tanhorbun
	5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		10 jenis prasarana	10 jenis prasarana				2.904.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	- Rehab Labor Hortikultura dan sarana pendukungnya	Rehab Labor Kultur jaringan			1 unit							Dinas Tanhorbun
	- Rehab gudang peralatan bengkel alsintan dan sarana pendukungnya	Rehab gudang peralatan bengkel alsintan		1 unit								Dinas Tanhorbun
	- Rehab gudang benih pangan	Rehab gudang benih				1 unit						Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		pangan										
	- Pembangunan desa mandiri benih	Pembanguna n gudang benih desa mandiri benih		1 unit	1 unit	1 unit						Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan rumah bibit Hortikultura	rumah bibit hortikultura			1 Unit							Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan rumah bibit Perkebunan	rumah bibit perkebunan		1 Unit								Dinas Tanhorbun
	- Pengembangan Lahan Pangan	Lahan pengembanga n komoditi pangan		100 Ha	100 Ha	100 Ha	30 Ha					Dinas Tanhorbun
	- Pengembangan Lahan Horti	Lahan pengembanga n komoditi horti		30 Ha	25 Ha	25 Ha	5 Ha					Dinas Tanhorbun
	- Pengembangan Lahan Perkebunan	Lahan pengembanga n komoditi perkebunan						25 Ha				Dinas Tanhorbun
	Pembangunan jaringan irigasi tersier											Dinas Tanhorbun
	Pembangunan irigasi tanah dalam											Dinas Tanhorbun
	Pembangunan jalan produksi											Dinas Tanhorbun
	6. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh		3	3	3	4	13	7.515.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	- Rehab BPP	Rehab BPP		5	2	1	1	1				Dinas Tanhorbun
	- Rehab BPP Model	Rehab BPP Model					1					Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan/ Rehab Pagar BPP	Pembanguna n/ Rehab Pagar BPP		4	1	1	1	1				Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan prasarana pendukung BPP Lainnya	Pembanguna n/rehab jalan BPP		1	1	1	1	1				Dinas Tanhorbun
	- Pemeliharaan gedung kantor BPP	Pengecatan gedung BPP						11				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.											Dinas Tanhorbun Dinas Pangan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas		70	72	75	78	80	84.314.533.500	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian		1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	3.227.533.500	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengawasan Pelaksanaan Perda LP2B		1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	788.137.500	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		Pengawasan Pelaksanaan Perda LP2B		1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men				Dinas Tanhorbun
		Sosialisasi Perda LP2B		15 kali	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	2.439.396.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Pengembangan Prasarana, 'Sarana, Kawasan dan 'Komoditas Perkebunan	Master plan kawasan jagung		1 Doku men	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Master plan kawasan jeruk		-	-	1 Doku men	-	-				Dinas Tanhorbun
		Master plan kawasan sayuran		-	-	-	1 Doku men	-				Dinas Tanhorbun
		Master plan kawasan gambir										Dinas Tanhorbun
		Master plan kawasan		-	1 Doku	-	-	-				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		prasarana jalan pertanian			men							
		Sosialisasi Masterplan kawasan pertanian		-	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali				Dinas Tanhorbun
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembanguna n Prasarana Pertanian		15 jenis					81.087.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani		125 Ha	125 Ha	125 Ha	125 Ha		26.513.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani										Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Jaringan Irigasi Tersier										Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Irigasi Tanah Dalam	Pembanguna n Sumur Bor										Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Irigasi tanah dangkal	Irigasi sumur bor										Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Irigasi Perpipaan	Irigasi Perpipaan										Dinas Tanhorbun
	2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian							4.200.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Embung	Pembanguna n Embung										Dinas Tanhorbun
	- Rehab Embung	Rehab Embung										Dinas Tanhorbun
	3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaan							37.830.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Jalan Usaha Tani										
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani										Dinas Tanhorbun
	- Rehab Jalan Usaha Tani	Rehab Jalan Usaha Tani										Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Jalan Produksi	Jalan Produksi										Dinas Tanhorbun
	- Rehab Jalan Produksi	Rehab Jalan Produksi										Dinas Tanhorbun
	4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit Pertanian							2.125.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan Dam Parit	Pembangunan Dam Parit										Dinas Tanhorbun
	- Rehab Dam Parit	Rehab Dam Parit										Dinas Tanhorbun
	5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		10 jenis prasarana	10 jenis prasarana				2.904.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	- Rehab Labor Hortikultura dan sarana pendukungnya	Rehab Labor Kultur jaringan			1 unit							Dinas Tanhorbun
	- Rehab gudang peralatan bengkel alsintan dan sarana pendukungnya	Rehab gudang peralatan bengkel alsintan		1 unit								Dinas Tanhorbun
	- Rehab gudang benih pangan	Rehab gudang benih pangan				1 unit						Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan desa mandiri benih	Pembangunan gudang benih desa		1 unit	1 unit	1 unit						Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		mandiri benih										
	- Pembangunan rumah bibit Hortikultura	rumah bibit hortikultura			1 Unit							Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan rumah bibit Perkebunan	rumah bibit perkebunan		1 Unit								Dinas Tanhorbun
	- Pengembangan Lahan Pangan	Lahan pengembangan komoditi pangan		100 Ha	100 Ha	100 Ha	30 Ha					Dinas Tanhorbun
	- Pengembangan Lahan Horti	Lahan pengembangan komoditi horti		30 Ha	25 Ha	25 Ha	5 Ha					Dinas Tanhorbun
	- Pengembangan Lahan Perkebunan	Lahan pengembangan komoditi perkebunan						25 Ha				Dinas Tanhorbun
	Pembangunan jaringan irigasi tersier											Dinas Tanhorbun
	Pembangunan irigasi tanah dalam											Dinas Tanhorbun
	Pembangunan jalan produksi											Dinas Tanhorbun
	6. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh		3	3	3	4	13	7.515.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	- Rehab BPP	Rehab BPP		5	2	1	1	1				Dinas Tanhorbun
	- Rehab BPP Model	Rehab BPP Model					1					Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan/ Rehab Pagar BPP	Pembangunan/ Rehab Pagar BPP		4	1	1	1	1				Dinas Tanhorbun
	- Pembangunan prasarana pendukung BPP Lainnya	Pembangunan/rehab jalan BPP		1	1	1	1	1				Dinas Tanhorbun
	- Pemeliharaan gedung kantor BPP	Pengecatan gedung BPP						11				Dinas Tanhorbun
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.											Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	% peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas		50%	55%	60%	62%	65%	26.120.252.550	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDG		7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	8.496.669.702	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Sub Kegiatan : Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Pemurnian (pendaftaran varietas) benih tanhortbun		1 variet as	1 variet as	1 variet as	1 variet as	1 variet as	4.960.737.309	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		Jumlah penyediaan benih sumber tanaman pangan		12.400 Kg	12.400 Kg	12.400 Kg	12.400 Kg	12.400 Kg				Dinas Tanhorbun
		Jumlah pemurnian varietas lokal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		1 Varietas	1 Varietas	1 Varietas	1 Varietas	1 Varietas				Dinas Tanhorbun
		Jumlah uji adaptasi varietas lokal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan					1 kali	1 kali				Dinas Tanhorbun
		Jumlah pelepasan varietas lokal tanaman pangan, hortikultura			1 Varietas							Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		dan perkebunan										
		Jumlah pemeliharaan kebun induk gambir		75 Bata ng	75 Bata ng	75 Bata ng	75 Batan g	75 Batan g				Dinas Tanhorbun
		Jumlah penyediaan saprodi untuk pemanfaatan lahan tidur komoditi jagung hibrida		10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha				Dinas Tanhorbun
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Penyediaan Benih Tanhortbun		7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	3.535.932.392	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		Jumlah penyediaan tanaman Pangan		2340 kg	2340 kg	2340 kg	2340 kg	2340 kg				Dinas Tanhorbun
		Jumlah penyediaan bibit tanaman hortikultura		2.000 Bata ng	2.000 Bata ng	2.000 Bata ng	2.000 Batan g	2.000 Batan g				Dinas Tanhorbun
		Jumlah penyediaan bibit tanaman perkebunan		5.000 Bata ng	5.000 Bata ng	5.000 Bata ng	5.000 Batan g	5.000 Batan g				Dinas Tanhorbun
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.											
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	Persenta sepeningkata n saranape ternakan Yang Berkualitas	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Keswan
	Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya Persentase Populasi dan Produksi Ternak yang Berkualitas	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Keswan
	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak	Terlaksanany	Kelompo	5	5	5	5	5	8.856.734.400	APBD	Kab. Lima	Dinas Peternakan dan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	a pengadaan ternak untuk kelompok	k								Puluh Kota	Keswan
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.											
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	%	15	16	17	18	20	5.887.589.956	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan	Meningkatnya penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Masyarakat dalam Menstabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	%	14	16	16	18	21	1.996.309.554	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
	Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya laporan analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM tingkat Kabupaten	Buku	1	1	1	1	1	84.027.500	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA												
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).											
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	jiwa	6215	6526	6852	7195	7554	306.190.500	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/alat penunjang medic Fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas penunjang kesehatan yang disediakan	buah	7	6	3	2	1	11.614.000.000	DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah pendu-duk usia pro-duktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2583 21	2584 81	2714 05	28497 5	2992 24	1,324,263,045	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	jiwa	2566 6	2695 0	2829 7	29712	3119 7	306.190.500	DAU, DAK NF	Kabupaten Lima Puluh Kota (Dinkes, Puskesmas, RS)	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		standar										
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas penunjang kesehatan yang disediakan	buah	7	6	3	2	1	11.614.000.000	DAK	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	jiwa	6150	6457	6780	7119	7475	306.190.500	DAU, DAK NF	Kabupaten Lima Puluh Kota (Dinkes, Puskesmas, RS)	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas penunjang kesehatan yang disediakan	buah	7	6	3	2	1	11.614.000.000	DAK	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Jumlah kasus baru HIV yang ditemukan	1000 Penduduk	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18				Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		dalam 1 tahun										
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV (Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar)	orang	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	483.015.000	APBD / APBN / GF	Lima Puluh Kota (Dinkes, Puskesmas, RS)	Dinas Kesehatan
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Jumlah Kasus TB yang ditemukan dalam 1 Tahun	100.000 Penduduk	290	287	284	281	281				Dinas Kesehatan
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	6.137	6.137	6.137	6.137	6.137	402.577.000	APBD / APBN / GF	Kabupaten Lima Puluh Kota (Dinkes, Puskesmas, RS)	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		(Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai Standar)										
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Jumlah Dokumen hasil pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular)	Dokumen	1	1	1	1	1	1.092.932.000	APBD / APBN / GF	Kabupaten Lima Puluh Kota (Dinkes, Puskesmas, RS)	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Cakupan API (Annual Parasit Insiden per Puskesmas	1000 Penduduk	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	0	Bukan Lokus DAK NF	Kabupaten Lima Puluh Kota (Dinkes, Puskesmas, RS)	Dinas Kesehatan
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.	Cakupan Kabupaten Kota yang eliminasi	Kabupaten/Kota	Sudah dapat	0			Dinas Kesehatan				Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Malaria		sertifikat Eliminasi tahun 2014								
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Cakupan Insidens Hepatitis B Dalam 1 Tahun	%	1,39 %	1,24 %	1,09 %	0,98%	0,87 %	0			Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Jumlah Kasus Filariasis dan Kusta yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	0			Dinas Kesehatan
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.	Cakupan Kabupaten Kota yang eliminasi Kusta	Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	0			Dinas Kesehatan
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Cakupan Kabupaten Kota yang eliminasi Filariasis	Kabupaten/Kota	Sudah dapat sertifikat Eliminasi Tahun 2017	0							Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.											Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
)												
	Program : Pemberdayaan Bidang Kesehatan Masyarakat	% Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan yang Terlaksana		60 %	65%	67%	68%	70 %				Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Pelaksanaan sehat Dalam Rangka Promotif/ Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PHBS di Masyarakat		60 %	65%	67 %	68%	70 %				Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaran Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Buah	5	5	5	5	5	281.404.878	DAU, DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah pende-rita hipertensi yang mendapat pelayanan ke-sehatan sesuai standar	Orang	72102	72204	72302	72405	72503	322.713.315	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan	Jumlah	Orang	2601	2646	2689	2701	2735	391.154.740	DAU, DAK	Kabupaten	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	pende-rita DM yang mendapat pelayanan ke-sehatan sesuai standar									Lima Puluh Kota	
03.04.02	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	527	527	580	586	592	456.978.990	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	6201	64444	6485	6502	6521	273.359.600	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
03.05.01	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	25	25	25	25	25	232.546.171	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah	Orang	4200	4903	4952	4963	4972	506.518.760	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis											Dinas Kesehatan
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	25	25	25	25	25	232.546.171	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	25	25	25	25	25	232.546.171	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah penduduk usia pro-duktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	258321	258481	271405	284975	299224	1,324,263,045	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
03.06.01	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.											Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan
	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	Rasio	2,97	2,82	2,68	2,55	2,42	501.598.000	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Perhubungan
	Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	501.598.000			Dinas Perhubungan
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Razia Angkutan Umum yang terlaksana	Kali	4	12	14	14	16	501.598.000			Dinas Perhubungan
	Program Pemenuhan Upaya Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk											Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		90,000,000	95,195,000	103,527,100	120,000,000	120,000,000	617,881,600	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.											Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.											Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	%	73,50	74,30	74,50	74,80	75				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	%	26,30	26,70	27,1	27,5	28,2				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah pelayanan KB MKJP	Kec	13	13	13	13	13	1.182.473.652	DAU, DAK		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah sosialisasi KB dan Kespro di Faskes	Kali	13	13	13	13	13	123.250.000	DAU, DAK		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah pendu-duk usia pro-duktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2583 21	2584 81	2714 05	28497 5	2992 24	1,324,263,045	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	jiwa	6215	6526	6852	7195	7554	306190.500	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan	Jumlah ibu	jiwa	6215	6526	6852	7195	7554	306190.500	DAU, DAK	Kabupaten	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kesehatan Ibu Hamil	hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar									Lima Puluh Kota	
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	jiwa	6215	6526	6852	7195	7554	306190.500	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	jiwa	6150	6457	6780	7119	7475	306.190.500	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	jiwa	25666	26950	28.297	29.712	31.197	306.190.500	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	jiwa	11105	11228	11789	12379	12998	447.295.000	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	jiwa	25666	26950	28.297	29.712	31.197	306.190.500	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	jiwa	11105	11228	11789	12379	12998	447.295.000	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi	jiwa	72.102	72.204	72.302	72.405	72.503	274.638.915	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar										
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	jiwa	2601	2646	2689	2701	2735	330.390.340	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	jiwa	527	527	580	586	592	380.889.290	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang yang terduga TB yang mendapat pelayanan kesehatan	jiwa	6025	6137	6142	6153	6182	349.480.000	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		sesuai standar										
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang yang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	jiwa	7712	7785	7793	7796	7799	397.545.000	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.8.1.[a	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.											Dinas Kesehatan
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu ersalin yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar	orang	6165	6473	6796	7136	7493	10.727.799.500	DAU dan DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta		90%	98%	100%	100%	100%		DAU,DBH CHT	Kabupaten Lima Puluh	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Jaminan Kesehatan Masyarakat									Kota	
3.8.2.[a	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).											Dinas Kesehatan
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta JKN		90%	98%	100%	100%	100%		DAU,DBH CHT	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
03.09.01	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.											Dinas Kesehatan
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB)		1	1	1	1	1	318.125.000	APBD/DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
03.09.02	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.											Dinas Kesehatan
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil		1	1	1	1	1	318.125.000	APBD/DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB)										
03.09.03	Angka kematian akibat keracunan.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB)		1	1	1	1	1	318.125.000	APBD/DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah pendu-duk usia pro-duktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	258321	258.481	258.481	271405	284.975	1.182.587.045	DAU, DAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan surveilan kesehatan	buah	1	1	1	1	1	528.722.100	DAU	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub kegiatan Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	buah	1	1	1	1	1	100,000,000	DAU	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.											Dinas Kesehatan
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Fasilitas layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub kegiatan Pengadaan Obat dan Vaksin	Persentase ketersediaan obat dan BMHP	persen	96	97	98	98	100	19.800.000.000,-	DAU	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.											Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standar tenaga kesehatan	100	100	100	100	100	100	91.505.300	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB)		1	1	1	1	1	318.125.000	APBD/DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
3.d.2	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.											Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi	buah	1	1	1	1	1	542.000.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar										
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA												
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program : Pengelolaan Pendidikan											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		370	370	370	370	370				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia		21	21	21	21	21				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		1	1	1	1	1				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola		366	366	366	366	366				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Dana BOS										
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik		4	4	4	4	4				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		2	2	2	2	2				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberiaan Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		2	2	2	2	2				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan			3	3						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Peserta Didik yang Tersedia										
	Sub Kegiatan : Perlengkapan dasar buku teks peserta didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				57	57	57				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia		6	15	3						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		1	1	1	1	1				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		57	57	57	57	57				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik		4	4	4	4	4				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1	1	2	2	2				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga	Jumlah		1	1	2	2	2				Dinas Pendidikan dan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi										Kebudayaan
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program : Pengelolaan Pendidikan											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		370	370	370	370	370				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia		21	21	21	21	21				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		1	1	1	1	1				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah		366	366	366	366	366				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Dasar yang Mengelola Dana BOS										
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik		4	4	4	4	4				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		2	2	2	2	2				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberiaan Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		2	2	2	2	2				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			3	3						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Perlengkapan dasar buku teks peserta didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				57	57	57				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia		6	15	3						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		1	1	1	1	1				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		57	57	57	57	57				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik		4	4	4	4	4				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah		1	1	2	2	2				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pertama										
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		1	1	2	2	2				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program : Pengelolaan Pendidikan											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		1	1	1	1	1				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		1	1	1	1	1				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program : Pengelolaan pendidikan											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kegiatan : Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi sedang / berat gedung/ ruang kelas / ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang telah Direhabilitasi Sedarang/Berat										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung / Ruang Guru PAUD (TK Pembina)										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pengadaan mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi										
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN												
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.											DPPKB P3A
	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	%	95,80	95,85	95,90	95,95	96				DPPKB P3A
	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	%									DPPKB P3A
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	Kali	7	7	7	7	7	453.970.049	DAU		DPPKB P3A
		Jumlah advokasi dan	Kali	10	15	20	25	30				DPPKB P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		koordinasi, yang dilaksanakan terhadap jumlah kebijakan yang disusun										
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum serta PUG	Kali	1	1	1	1	1	377.717.872	DAU		DPPKB P3A
		Jumlah workshop, bimtek, pelatihan, sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum	Kali	4	5	10	10	10				DPPKB P3A
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase anggaran yang responsif gender (ARG) pada belanja langsung APBD Kabupaten	%	5	5,56	6,1	6,7	7,3	463.217.548	DAU		DPPKB P3A
		Jumlah sosialisasi terhadap peran perencana (subag Program) dalam PUG	Kali	1	2	2	2	8				DPPKB P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		dan PPRG										
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											DPPKB P3A
	Program : Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				DPPKB P3A
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT		0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029				DPPKB P3A
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	diseminasi data kekerasan bagi lembaga P2TP2A, K3N , PUSPAGA, WCC Koordinasi kegiatan ke kecamatan sinkronisasi kegiatan ke provinsi sosialisasi peraturan perundangan sosialisasi TPPO	kali kali kali kali kal	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1.392745.295	DAU, DAK		DPPKB P3A
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100				DPPKB P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		pelayanan										
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Kali		13	13	13	13	30.000.000	DAU, DAK		DPPKB P3A
												DPPKB P3A
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				DPPKB P3A
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	0,068	0,067	0,050	0,033	0,017				DPPKB P3A
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pendampingan	Bulan	12	12	12	12	12	80.000.000	DAU, DAK		DPPKB P3A
	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	%	100	100	100	100	100				DPPKB P3A
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali	915.142.537	DAU, DAK		DPPKB P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi		2 Kali 45 Kali	45 Kali	45 Kali	Kali	45 Kali				
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.											DPPKB P3A
	Program : Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT		0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	diseminasi data kekerasan bagi lembaga P2TP2A, K3N, PUSPAGA, WCC Koordinasi kegiatan ke kecamatan sinkronisasi kegiatan ke provinsi sosialisasi	kali kali kali kal	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1.392745.295	DAU, DAK		

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		peraturan perundangan sosialisasi TPPO										
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Kali		13	13	13	13	30.000.000	DAU, DAK		
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	0,068	0,067	0,050	0,033	0,017				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pendampingan	Bulan	12	12	12	12	12	80.000.000	DAU, DAK		
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum											DPPKB P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	umur 18 tahun.											
	Program : Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT		0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	diseminasi data kekerasan bagi lembaga P2TP2A, K3N , PUSPAGA, WCC Koordinasi kegiatan ke kecamatan sinkronisasi kegiatan ke provinsi sosialisasi peraturan perundangan sosialisasi TPPO	kali kali kali kali kal	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1.392745.295	DAU, DAK		
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap	Jumlah	Kali		13	13	13	13	30.000.000	DAU, DAK		

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan										
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pendampingan	Bulan	12	12	12	12	12	80.000.000	DAU, DAK		
05.03.02	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.											DPPKB P3A
	Program : Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT		0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029				
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	diseminasi data kekerasan bagi lembaga P2TP2A, K3N, PUSPAGA, WCC Koordinasi kegiatan ke kecamatan sinkronisasi	kali kali kali kali kal	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1.392745.295	DAU, DAK		

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		kegiatan ke provinsi sosialisasi peraturan perundangan sosialisasi TPPO										
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	0,068	0,067	0,050	0,033	0,017				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pendampingan	Bulan	12	12	12	12	12	80.000.000	DAU, DAK		
05.04.01	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.											DPPKB P3A
	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.											DPPKB P3A
	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	%	95,80	95,85	95,90	95,95	96				
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	%	80,75	80,80	80,85	90	90,10				
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.											DPPKB P3A
	Program : Pengarusutamaan Gender dan	Indeks	%	95,8	95,85	95,90	95,95	96				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pemberdayaan Perempuan	Pembanguna n Gender		0								
	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pecepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	%									
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	Kali	7	7	7	7	7	453.970.049	DAU		
		Jumlah advokasi dan koordinasi, yang dilaksanakan terhadap jumlah kebijakan yang disusun	Kali	10	15	20	25	30				
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum serta PUG	Kali	1	1	1	1	1	377.717.872	DAU		
		Jumlah workshop, bimtek, pelatihan, sosialisasi terkait peran perempuan dibidang	Kali	4	5	10	10	10				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		sosial, politik dan hukum										
	Sub Kegiatan : Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase anggaran yang responsif gender (ARG) pada belanja langsung APBD Kabupaten	%	5	5,56	6,1	6,7	7,3	463.217.548	DAU		
		Jumlah sosialisasi terhadap peran perencana (subag Program) dalam PUG dan PPRG	Kali	1	2	2	2	8				
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.											DPPKB P3A BKPSDM
	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	%	95,80	95,85	95,90	95,95	96				DPPKB P3A
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	%	80,75	80,80	80,85	90	90,10				DPPKB P3A
	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap perempuan dan kelompok perempuan	Kec	13	13	13	13	13	767.945.882	DAU		DPPKB P3A
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks	Indeks	68	70	75	80	85	7.075.000.000	DAU	Kabupaten	BKPSDM

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit		Kurang	Baik	Baik	Baik	Baik			Limapuluh Kota	
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Kenaikan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit	%	3	2	5	5	5	7.075.000.000	DAU	Kabupaten Limapuluh Kota	BKPSDM
	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Pelantikan dan Mutasi Pegawai	Orang	200	200	200	200	200	1.425.000.000	DAU	Kabupaten Limapuluh Kota	BKPSDM
	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembinaan Karir	Orang	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.650.000.000	DAU	Kabupaten Limapuluh Kota	BKPSDM
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.											DPPKB P3A
	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	%	73,50	74,30	74,50	74,80	75				
	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	%	26,30	26,70	27,1	27,5	28,2				
	Sub Kegiatan : Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah lokasi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas	Kec			13	13	13	30.000.000	DAU, DAK		

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Kesehatan dan Kelompok Kegiatan										
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.											DPPKB P3A
	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	%	73,50	74,30	74,50	74,80	75				
	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	%	26,30	26,70	27,1	27,5	28,2				
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah pelayanan KB MKJP	Kec	13	13	13	13	13	1.182.473.652	DAU, DAK		
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.											
	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	%	95,80	95,85	95,90	95,95	96				
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	%	80,75	80,80	80,85	90	90,10				
	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap perempuan dan kelompok	Kec	13	13	13	13	13	767.945.882	DAU		

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		perempuan										
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.											DPPKB P3A
	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	%	95,80	95,85	95,90	95,95	96				
	Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perempuan yang berpartisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	%	53	64	68	71	71				
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan Organisasi Perempuan	Organisasi	3	3	3	3	3	5.580.085.839	DAU		
		Jumlah lomba-lomba dalam rangka pembinaan Organisasi Perempuan	Keg	9	9	9	9	9				
		Jumlah peringatan hari besar	Keg	2	2	2	2	2				
		Jumlah rapat koordinasi	Kali	20	20	20	20	20				
		Jumlah sosialisasi	Kali	3	3	3	3	3				
		Jumlah seminar	Kali	10	10	10	10	10				
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan	Jumlah kegiatan advokasi	Kali			6	6	6	60.000.000			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Ekonomi											
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.											DPPKB P3A
	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.											DPPKB P3A
	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	%	95,80	95,85	95,90	95,95	96				
	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan percepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	%									
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	Kali	7	7	7	7	7	453.970.049	DAU		
		Jumlah advokasi dan koordinasi, yang dilaksanakan terhadap jumlah kebijakan yang disusun	Kali	10	15	20	25	30				
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum serta PUG	Kali	1	1	1	1	1	377.717.872	DAU		

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Jumlah workshop, bimtek, pelatihan, sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum	Kali	4	5	10	10	10				
	Sub Kegiatan : Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase anggaran yang responsif gender (ARG) pada belanja langsung APBD Kabupaten	%	5	5,56	6,1	6,7	7,3	463.217.548	DAU		
		Jumlah sosialisasi terhadap peran perencana (subag Program) dalam PUG dan PPRG	Kali	1	2	2	2	8				
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA												
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.											
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	%	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12	47.631.000.000	DAU/ DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air	Rumah	440	450	460	460	460	47.631.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		bersih (rumah)										
	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Rumah	200	200	200	200	200	20.600.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Rumah	240	250	260	260	260	27.031.000.000			Dinas PUPR
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.											Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	%	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85	56.421.000.000	DAU/ DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	Rumah	58.926	59.076	59.231	59.386	59.541	56.421.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga	Rumah	145	150	155	155	155	56.421.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)										
06.04.01	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.											Dinas LHPP
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (poin)	poin	64,55	64,85	64,95	65	65,12			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)	lokasi	18	20	22	24	26			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1. Jumlah Titik Pantau Badan Air Kewenangan Kabupaten (titik) 2. Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara (titik)	titik	1. 14 2. 4	1. 16 2. 4	1. 18 2. 4	1. 20 2. 4	1. 22 2. 4	298.400.000	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya											Dinas LHPP
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (poin)	poin	64,55	64,85	64,95	65	65,12			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)	lokasi	18	20	22	24	26			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Jumlah Parameter Pengujian Kualitas Lingkungan	1. Paramet er 2. orang	1. 10 2. 6	1. 14 2. 8	1. 18 2. 10	1. 22 2. 12	1. 26 2. 14	4.581.890.000	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Terakreditasi (parameter) 2. Personil Pengelolaan Lingkungan yang berkualifikasi (orang)										
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).											Dinas LHPP
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.											
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.											Dinas LHPP Dinas PUPR
6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.											Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	%	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12	47.781.000.000	DAU/ DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Rumah	440	450	460	460	460	47.781.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (dokumen)	Dokumen	0	0	0	0	1	150.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan	Rumah	200	200	200	200	200	20.600.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)										
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Rumah	240	250	260	260	260	27.031.000.000			Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	%	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85	56.421.000.000	DAU/ DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	Rumah	58.926	59.076	59.231	59.386	59.541	56.421.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	Rumah	145	150	155	155	155	56.421.000.000			Dinas PUPR
6.b.1.	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.											Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga	%	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12	47.781.000.000	DAU/ DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		yang memperoleh akses air minum (%)										
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Rumah	440	450	460	460	460	47.781.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (dokumen)	Dokumen	0	0	0	0	1	150.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Rumah	200	200	200	200	200	20.600.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	Rumah	240	250	260	260	260	27.031.000.000			Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh	%	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85	56.421.000.000	DAU/ DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		akses sanitasi yang layak (%)										
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	Rumah	58.926	59.076	59.231	59.386	59.541	56.421.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	Rumah	145	150	155	155	155	56.421.000.000			Dinas PUPR
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA												
TUJUAN 8. MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA												
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.											
	PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN	% peningkatan kelas kelompok tani		4%	6%	8%	10%	12%	29.770.675.782	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelas Kelompok Tani		26 Kelo mpok Tani	26 Kelo mpok Tani	26 Kelo mpok Tani	26 Kelom pok Tani	26 Kelo mpok Tani	29.770.675.782	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kelas BPP		2 BPP	2 BPP	1 BPP	1 BPP	1 BPP	5.861.348.824	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		1. Review Penyuluh		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali				Dinas Tanhorbun
		2. Pelatihan Peningkatan Akses dan Layanan Pasar		7 kali	6 kali							Dinas Tanhorbun
		3. Training Penyuluh		312 kali	312 kali	312 kali	312 kali	312 kali				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		4. Penyusunan Programa Kecamatan		13 Doku men	13 Doku men	13 Doku men	13 Doku men	13 Doku men				Dinas Tanhorbun
		Pelatihan Penyuluh		4 Kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali				Dinas Tanhorbun
		6. Penyusunan SOP Penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		3 Doku men	3 Doku men	3 Doku men	3 Doku men	3 Doku men				Dinas Tanhorbun
		7. Demplot Percontohan BPP		13 lokasi	13 lokasi	13 lokasi	13 lokasi	13 lokasi				Dinas Tanhorbun
		8. Penilaian Penyuluh dan BPP		2 kategori	2 kategori	2 kategori	2 kategori	2 kategori				Dinas Tanhorbun
		9. Operasional Penyuluh Pertanian		13 Keca mata n	13 Keca mata n	13 Keca mata n	13 Keca matan	13 Keca mata n				Dinas Tanhorbun
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok yang Terfasilitasi		160K elom pok	96 Kelo mpok	96 Kelo mpok	96 Kelom pok	96 Kelo mpok	6.960.032.383	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		1. Bimtek penguatan kapasitas manajerial kelembagaan petani		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit				Dinas Tanhorbun
		2. Studi Komparatif		2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali				Dinas Tanhorbun
		3. Penilaian Insan Pertanian		5 Kate gori	5 Kate gori	5 Kate gori	5 Kateg ori	5 Kateg ori				Dinas Tanhorbun
		4. Pembinaan dan		1 doku	1 doku	1 doku	1 doku	1 doku				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Penguatan Gapoktan/LK MA/PUAP/LM 3		men	men	men	men	men				
		5. Sosialisasi Kelembagaan Petani/Penyuluhan		13 kali	13 kali	13 kali	13 kali	13 kali				Dinas Tanhorbun
		6. Penas Tani		1 Kali			1 Kali					Dinas Tanhorbun
		7. Peda Tani				1 Kali						Dinas Tanhorbun
		8. Temu Tani		11 kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali				Dinas Tanhorbun
		9. Operasional Kostratani (DAK Non Fisik)		13 BPP	13 BPP	13 BPP	13 BPP	13 BPP				Dinas Tanhorbun
		10. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok				Dinas Tanhorbun
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan sarana prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelas BPP		2 BPP	2 BPP	1 BP	1 BP	1 BP	4.628.445.575	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		Pengadaan Pakaian Kerja Petugas/Penyuluhan		105 stel				105 stel				Dinas Tanhorbun
		Sarana Administrasi BPP			13 BPP							Dinas Tanhorbun
		Alat Ubinan		40 Unit								Dinas Tanhorbun
		Perangkat Uji Tanah Sawah		6 Unit	13 Unit		13 Unit					Dinas Tanhorbun
		PUTK dan PUP			26 Unit		26 Unit					Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		PH Meter Tanah dan Air				26 Unit						Dinas Tanhorbun
		Sepeda Motor Penyuluhan		25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				Dinas Tanhorbun
		Kendaraan Roda 4 Penyuluhan		2 unit								Dinas Tanhorbun
		Buku Kerja Petani/Penyuluhan		2481 Buah								Dinas Tanhorbun
		Demonstrasi Alsintan		4 Kali								Dinas Tanhorbun
		Peralatan Demonstrasi		84 Unit								Dinas Tanhorbun
		Megaphone		26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit				Dinas Tanhorbun
		Speaker Aktif		26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit				Dinas Tanhorbun
	Sub Kegiatan Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Sekolah Lapang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan		120 Keltan	80 Keltan	80 Keltan	80 Keltan	80 Keltan	12.320.849.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	%	100 %	100%	100%	100%	100%	17.991.250.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	17.991.250.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan	dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	20.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Industri										
	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	26 Merek/Halal, 40 IKM	26 Merek/Halal, 60 IKM	26 Merek/Halal, 60 IKM	20 Merek/Halal, 60 IKM	20 Merek/Halal, 60 IKM	1.975.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	11 kelompok	15 kelompok	14 kelompok	14 kelompok	14 kelompok	13.300.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	1 laporan, 20 IKM	1 laporan, 80 IKM	1 laporan, 80 IKM	1 laporan, 60 IKM	1 laporan, 60 IKM	2.400.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	296.250.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase	%	100	100%	100%	100%	100%	208.080.000	Dana Transfer	Kab.Lima	Dinas Perindustrian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kab/Kota	fasilitasi penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten berbasis (SIINAS)		%						Umum	Puluh Kota	Tenaga kerja
	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	208.080.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	dokumen	100 unit izin	100 unit izin	150 unit izin	150 unit izin	150 unit izin	97.040.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,	Jumlah Dokumen	dokumen	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapora	1 lapor	111.040.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		an	an	an	n	an				
	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	%	100 %	100%	100 %	100%	100%	2.050.020.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	%	100 %	100%	100%	100%	100%	2.050.020.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		di Kab. 50 Kota										
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	319.180.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Desiminasi, Publikasi Data informasi dan analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	dokumen	3 event , 30 IKM, 1 kali	3 event , 30 IKM, 1 kali	3 event , 30 IKM, 1 kali	3 event, 30 IKM, 1 kali	3 event, 30 IKM, 1 kali	1.730.840.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	%/ tahun	5	5	5	5	5	5,548,940,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Tangkap	ton/ Tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	5,066,401,873	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Tangkap	ton/ Tahun	3.70 0	3.900	4.100	4.300	4.500	872,982,577			
	Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Tangkap	ton/ Tahun	3700	3.900	4.100	4.300	4.500	2,533,222,987			
	Sub kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Tangkap	ton/ Tahun	3700	3.900	4.100	4.300	4.500	1,660,196,309			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	%/ tahun	3	3	3	3	3	21,806,717,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	45.8 43	47.21 8	48.63 5	50.09 4	51.59 7	15,199,666,154	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ekor benih	450. 000. 000	460.0 00.00 0	470.0 00.00 0	480.0 00.00 0	490.0 00.00 0	2,353,016,652			
	Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	45.8 43	47.21 8	48.63 5	50.09 4	51.59 7	3,251,279,510			
	Sub kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	44.9 81,2 2	47.21 8	48.63 5	50.09 4	51.59 7	1,370,031,599			
	Sub kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah penyakit Ikan	%	15	15	20	20	20	453,963,690			
	Sub kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	45.8 43	47.21 8	48.63 5	50.09 4	51.59 7	194,959,804			
	Sub kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	meningkatnya Luas Lahan	Ha	20	20	20	20	20	7,049,515,716			
	Sub kegiatan :	meningkatnya	Ha	20	20	20	20	20	526,899,183			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidaya Ikan di Darat	Luas Lahan										
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	KG/ Kapita/ Tahun, dan %/ tahun	38,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	3,606,320,000	DAU	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061	DAU	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061			
	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	%	15	20	25	30	35	8,900,000,000		KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro.	kegiatan	4	4	4	4	4	8,900,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Sub Kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	UMKM	35	35	35	35	35	2,639,990,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	UMKM	35	35	35	35	35	2,045,600,000		KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	UMKM	35	35	35	35	35	2,015,500,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	UMKM	0	50	50	50	50	137,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program : Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	%	15	20	25	30	35	5,781,000,000			Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM	kegiatan	10	10	10	10	10	5,781,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan	Jumlah Unit Usaha Mikro	kegiatan	10	10	10	10	10	5,781,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknolog									KOTA	dan Menengah
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Keswan
	Kegiatan : Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase populasi dan produksi ternak yang berkualitas	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Keswan
	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Pelaksanaan IB	Dosis	5000	5000	5000	5000	5000	12.391.601.867	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan
8.1.1.(a)	PDB per kapita.											
	PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN	% peningkatan kelas kelompok tani		4%	6%	8%	10%	12%	29.770.675.782	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelas Kelompok Tani		26 Kelo mpok Tani	26 Kelo mpok Tani	26 Kelo mpok Tani	26 Kelom pok Tani	26 Kelo mpok Tani	29.770.675.782	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kelas BPP		2 BPP	2 BPP	1 BPP	1 BPP	1 BPP	5.861.348.824	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		1. Review Penyuluh		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali				Dinas Tanhorbun
		2. Pelatihan Peningkatan Akses dan Layanan Pasar		7 kali	6 kali							Dinas Tanhorbun
		3. Training Penyuluh		312 kali	312 kali	312 kali	312 kali	312 kali				Dinas Tanhorbun
		4. Penyusunan Programa Kecamatan		13 Doku men	13 Doku men	13 Doku men	13 Doku men	13 Doku men				Dinas Tanhorbun
		Pelatihan Penyuluh		4 Kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali				Dinas Tanhorbun
		6. Penyusunan SOP Penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		3 Doku men	3 Doku men	3 Doku men	3 Doku men	3 Doku men				Dinas Tanhorbun
		7. Demplot Percontohan BPP		13 lokasi	13 lokasi	13 lokasi	13 lokasi	13 lokasi				Dinas Tanhorbun
		8. Penilaian Penyuluh dan BPP		2 kategori	2 kategori	2 kategori	2 kategori	2 kategori				Dinas Tanhorbun
		9. Operasional Penyuluh Pertanian		13 Kcamatan	13 Kcamatan	13 Kcamatan	13 Kcamatan	13 Kcamatan				Dinas Tanhorbun
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok yang Terfasilitasi		160Kelompok	96Kelompok	96Kelompok	96Kelompok	96Kelompok	6.960.032.383	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		1. Bimtek penguatan kapasitas manajerial		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		kelembagaan petani										
		2. Studi Komparatif		2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali				Dinas Tanhorbun
		3. Penilaian Insan Pertanian		5 Kategori	5 Kategori	5 Kategori	5 Kategori	5 Kategori				Dinas Tanhorbun
		4. Pembinaan dan Penguatan Gapoktan/LKMA/PUAP/LM3		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				Dinas Tanhorbun
		5. Sosialisasi Kelembagaan Petani/Penyuluhan		13 kali	13 kali	13 kali	13 kali	13 kali				Dinas Tanhorbun
		6. Penas Tani		1 Kali			1 Kali					Dinas Tanhorbun
		7. Peda Tani				1 Kali						Dinas Tanhorbun
		8. Temu Tani		11 kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali				Dinas Tanhorbun
		9. Operasional Kostratani (DAK Non Fisik)		13 BPP	13 BPP	13 BPP	13 BPP	13 BPP				Dinas Tanhorbun
		10. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok				Dinas Tanhorbun
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan sarana prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelas BPP		2 BPP	2 BPP	1 BP	1 BP	1 BP	4.628.445.575	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		Pengadaan Pakaian Kerja Petugas/Penyuluhan		105 stel				105 stel				Dinas Tanhorbun
		Sarana			13							Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Administrasi BPP			BPP							
		Alat Ubinan		40 Unit								Dinas Tanhorbun
		Perangkat Uji Tanah Sawah		6 Unit	13 Unit		13 Unit					Dinas Tanhorbun
		PUTK dan PUP			26 Unit		26 Unit					Dinas Tanhorbun
		PH Meter Tanah dan Air				26 Unit						Dinas Tanhorbun
		Sepeda Motor Penyuluhan		25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				Dinas Tanhorbun
		Kendaraan Roda 4 Penyuluhan		2 unit								Dinas Tanhorbun
		Buku Kerja Petani/Penyuluh		2481 Buah								Dinas Tanhorbun
		Demonstrasi Alsintan		4 Kali								Dinas Tanhorbun
		Peralatan Demonstrasi		84 Unit								Dinas Tanhorbun
		Megaphone		26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit				Dinas Tanhorbun
		Speaker Aktif		26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit				Dinas Tanhorbun
	Sub Kegiatan Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Sekolah Lapang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan		120 Keltan	80 Keltan	80 Keltan	80 Keltan	80 Keltan	12.320.849.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	
	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	%	100 %	100%	100%	100%	100%	17.991.250.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase peningkatan penyusunan	%	100 %	100%	100%	100%	100%	17.991.250.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		dan evaluasi pembangunan industri Kab. 50 Kota										
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	20.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	26 Merek/Halal, 40 IKM	26 Merek/Halal, 60 IKM	26 Merek/Halal, 60 IKM	20 Merek/Halal, 60 IKM	20 Merek/Halal, 60 IKM	1.975.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	11 kelompok	15 kelompok	14 kelompok	14 kelompok	14 kelompok	13.300.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	dokumen	1 laporan, 20 IKM	1 laporan, 80 IKM	1 laporan, 80 IKM	1 laporan, 60 IKM	1 laporan, 60 IKM	2.400.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Industri										
	Sub Kegiatan : Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	296.250.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	%/ tahun	5	5	5	5	5	5,548,940,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Tangkap	Ton/tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	5,066,401,873	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Tangkap	Ton/tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	872,982,577			
	Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Tangkap	Ton/tahun	3700	3.900	4.100	4.300	4.500	2,533,222,987			
	Sub kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Tangkap	Ton/tahun	3700	3.900	4.100	4.300	4.500	1,660,196,309			
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	%/ tahun	5	5	5	5	5	5,548,940,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Tangkap	Ton/tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	5,066,401,873	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Tangkap	Ton/tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	872,982,577			
	Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Tangkap	Ton/tahun	3700	3.900	4.100	4.300	4.500	2,533,222,987			
	Sub kegiatan :	Jumlah	Ton/tahun	3700	3.900	4.100	4.300	4.500	1,660,196,309			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Tangkap	n									
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	KG/ Kapita/ Tahun, dan %/ tahun	38,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	3,606,320,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061			
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro.	kegiatan	4	4	4	4	4	8,900,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Sub Kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	UMKM	35	35	35	35	35	2,639,990,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	UMKM	35	35	35	35	35	2,045,600,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	UMKM	35	35	35	35	35	2,015,500,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	UMKM	0	50	50	50	50	137,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Program : Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	%	15	20	25	30	35	5,781,000,000			Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM	kegiatan	10	10	10	10	10	5,781,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi	kegiatan	10	10	10	10	10	5,781,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknolog										
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Keswan
	Kegiatan : Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase populasi dan produksi ternak yang berkualitas	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Keswan
	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Pelaksanaan IB	Dosis	5000	5000	5000	5000	5000	12.391.601.867	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.											Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	2.270.455.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui	orang	-	-	70 orang	70 orang	60 orang	760.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		program Perluasan Kesempatan Kerja										
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin											Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	2.270.455.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	-	-	70 orang	70 orang	60 orang	760.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	3.250.700.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase terlaksananya pengukuran produktifitas tingkat daerah Kab. 50 Kota	%	-	-	100%	100%	100%	150.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya	dokumen	-	-	1 doku men	1 doku men	1 doku men	150.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah										
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan											Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	%	15	20	25	30	35	8,900,000,000		KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro.	kegiatan	4	4	4	4	4	8,900,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Sub Kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	UMKM	35	35	35	35	35	2,639,990,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Program : Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	%	15	20	25	30	35	5,781,000,000			Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		n										
	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM	kegiatan	10	10	10	10	10	5,781,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Sub Kegiatan: Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	kegiatan	10	10	10	10	10	5,781,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	%	15	20	25	30	35	8,900,000,000		KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro.	kegiatan	4	4	4	4	4	8,900,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	UMKM	0	50	50	50	50	137,000,000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.											Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas	Persentase	%	100	100%	100%	100%	100%	3.250.700.000	Dana Transfer	Kab.Lima	Dinas Perindustrian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Tenaga Kerja	peningkatan pelatihan tenaga kerja		%						Umum	Puluh Kota	Dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase terlaksananya pengukuran produktifitas tingkat daerah Kab. 50 Kota	%	-	-	100%	100%	100%	150.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	dokumen	-	-	1 doku men	1 doku men	1 doku men	150.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Program : Hubungan Industrial			100 %	100%	100%	100%	100%	434.606.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	175.040.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar		1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	59.980.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan										
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.											Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	2.270.455.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	-	-	70 orang	70 orang	60 orang	760.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.											Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	2.270.455.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja	orang	-	-	70 orang	70 orang	60 orang	760.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja										
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).											
	Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	3.250.700.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	2.925.700.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	orang	102 orang	96 orang	105 orang	140 orang	132 orang	1.829.060.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
08.07.01	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).											Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan DPPKBP3A
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				DPPKBP3A
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap	Persentase	%	0,06	0,067	0,050	0,033	0,017				DPPKBP3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	penurunan kekerasan terhadap anak		8								
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pendampingan	Bulan	12	12	12	12	12	80.000.000	DAU, DAK		DPPKBP3A
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur											
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	0,068	0,067	0,050	0,033	0,017				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pendampingan	Bulan	12	12	12	12	12	80.000.000	DAU, DAK		
08.08.01	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.											Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Program : Hubungan Industrial	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh	%	100%	100%	100%	100%	100%	434.606.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Kota										
	Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota	Persentase menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	259.566.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	-	-	100 orang	100 orang	150 orang	38.460.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.											Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Program : Hubungan Industrial	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	434.606.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota	Persentase menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,	%	100 %	100%	100%	100%	100%	259.566.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		dan Penutupan Perusahaan di Kab. 50 Kota										
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	59.980.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang- undangan negara terkait.											Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Program : Hubungan Industrial	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	434.606.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan Perusahaan yang Memiliki	%	100 %	100%	100%	100%	100%	175.040.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kab. 50 Kota										
	Sub Kegiatan : Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	9 perusahaan	5 perusahaan	6 perusahaan	5 perusahaan	10 perusahaan	57.780.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.											Dinas Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	%	15	20	25	30	35	19.835.800.800.-	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata Kab.Lima Puluh Kota	%	20	20	20	20	20	6.844.401.300.-	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Sub Kegiatan Pengembangan daya tarik wisata kab/kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,	Destinasi	5	5	5	5	5	6,466,816,291.-	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pemantapan, Revitalisasi)										
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata	%	20	20	20	20	20	5.557.325.718.-	APBD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Reabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan kawasan wisata strategis Pariwisata Kab/Kot	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi	1	1	1	1	1	8,019,236,882.-	APBD/BKK Propinsi	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata	%	20	20	20	20	20	7.434.073.782.-	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota		Destinasi	1	1	1	1	1	5,243,524,918	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan promosi wisata yang berkualitas	%	12	15	17	20	25	17.313.187.080.-	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya promosi wisata dalam dan luar negeri	%	20	20	20	20	20	17.313.187.080.-	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam Maupun Luar Negri Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata	laporan	8	8	8	8	8	14,488,609,952	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Baik Dalam dan Luar Negeri										
	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar negri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	1	1	1	1	808,829,644	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas sumber daya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)	%	33.78	37.83	43.24	45.95	50	7.277.330.000.-	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif	%	20	20	20	20	20	7.277.330.000.-	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	orang	50	50	50	50	50	1,937,515,500	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta	orang	280	250	300	300	300	5,648,424,500	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata										
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.											Dinas PerdaganganKoperasi Usaha Kecil Dan Menengah
8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.											Dinas PerdaganganKoperasi Usaha
8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.											Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	3.250.700.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	2.925.700.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	orang	102 orang	96 orang	105 orang	140 orang	132 orang	1.829.060.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI												
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.											Dinas Perhubungan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Indeks	0,53	0,52	0,51	0,51	0,5	225.000.000	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Perhubungan
	Kegiatan : Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	%	100	100	100	100	100	225.000.000			
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data penumpang angkutan umum	Laporan	1	1	1	1	1	225.000.000			
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.											
	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	%	100 %	100%	100%	100%	100%	17.991.250.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	17.991.250.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	20.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	26 Merek/Halal, 40 IKM	26 Merek/Halal, 60 IKM	26 Merek/Halal, 60 IKM	20 Merek/Halal, 60 IKM	20 Merek/Halal, 60 IKM	1.975.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	11 kelompok	15 kelompok	14 kelompok	14 kelompok	14 kelompok	13.300.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	1 laporan, 20 IKM	1 laporan, 80 IKM	1 laporan, 80 IKM	1 laporan, 60 IKM	1 laporan, 60 IKM	2.400.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	296.250.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.											Dinas PerdaganganKoperasi

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
												Usaha Kecil Dan Menengah Dinas PerdaganganKoperasi Usaha Kecil Dan Menengah
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.											Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	2.270.455.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	-	-	70 orang	70 orang	60 orang	760.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.											Dinas PerdaganganKoperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dinas PerdaganganKoperasi Usaha Kecil Dan Menengah
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.											Dinas PerdaganganKoperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dinas PerdaganganKoperasi

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
												Usaha Kecil Dan Menengah
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.											DLHPP
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (poin)	poin	91,01	91,15	91,29	91,43	91,57			Kabupaten Lima Puluh Kota	DLHPP
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)	lokasi	18	20	22	24	26			Kabupaten Lima Puluh Kota	DLHPP
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi, Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	236.690.000	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	DLHPP
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.											Bapelitbang
	Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	65	75	85	95	105	-			Bapelitbang
	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penerapan kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah dilaksanakan pada perangkat daerah	Persentase	30	30	-	-	-	-			Bapelitbang
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kajian Penelitian tentang Pengembangan Bidang Pariwisata	Kajian	1	1	-	-	-	420.535.000,-	DAU		Bapelitbang
	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penerapan	Persentase	30	30	30	-	-	-			Bapelitbang

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah dilaksanakan pada perangkat daerah										
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Rakor Litbang Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kajian	1	1	-	-	-	420.535.000,-	DAU		Bapelitbang
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kajian tentang Penelitian/ Pengembangan an Bidang Perikanan	Laporan	-	-	1	-	-	285.000.000,-	DAU		Bapelitbang
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kajian tentang Penelitian/ Pengembangan an Bidang Persampahan	Kajian	1	1	-	-	-	420.535.000,-	DAU		Bapelitbang
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).											BKPSDM
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit	Indeks	68 Kurang	70 Baik	75 Baik	80 Baik	85 Baik	4.000.000.000	DAU	Kabupaten Limapuluh Kota	BKPSDM
	Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN	Persentase Kenaikan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit	%	3	2	5	5	5	4.000.000.000	DAU	Kabupaten Limapuluh Kota	BKPSDM
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rasio Pegawai Berpendidikan	Orang	250	250	250	250	250	4.000.000.000	DAU	Kabupaten Limapuluh Kota	BKPSDM

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Tinggi										
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGERA												
10.1.1*	Rasio Gini.											
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	2.270.455.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	-	-	70 orang	70 orang	60 orang	760.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	KG/ Kapita/ Tahun, dan %/ tahun	38,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	3,606,320,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan	%/ tahun	3	3	3	3	3	21,806,717,000	DAU	KABUPATE N LIMA	DINAS PERIKANAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Produksi Budidaya									PULUH KOTA	
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	45.8 43	47.21 8	48.63 5	50.09 4	51.59 7	15,199,666,154	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ekor benih	450. 000. 000	460.0 00.00 0	470.0 00.00 0	480.0 00.00 0	490.0 00.00 0	2,353,016,652			
	Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	45.8 43	47.21 8	48.63 5	50.09 4	51.59 7	3,251,279,510			
	Sub kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	44.9 81,2 2	47.21 8	48.63 5	50.09 4	51.59 7	1,370,031,599			
	Sub kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah penyakit Ikan	%	15	15	20	20	20	453,963,690			
	Sub kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	45.8 43	47.21 8	48.63 5	50.09 4	51.59 7	194,959,804			
	Sub kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	meningkatnya Luas Lahan	Ha	20	20	20	20	20	7,049,515,716			
	Sub kegiatan : Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidaya Ikan di Darat	meningkatnya Luas Lahan	Ha	20	20	20	20	20	526,899,183			
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	KG/ Kapita/ Tahun, dan %/ tahun	38,5 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5 %/ta hun	39 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5 %/tah un	39,5 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5 %/tah un	40 KG/ Kapita / Tahun , dan 5 %/tah un	40,5 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5 %/tah un	3,606,320,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061	DAU	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061			
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta JKN		90%	98%	100%	100%	100%		DAU,DBH CHT	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan diUPTD	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terlaksananya peningkatan produktivitas ternak dan pelayanan kesehatan hewan	Pelayanan	1500	1500	1500	1500	1500	7.837.949.517	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program : Program Perlindungan dan Jaminan	Persentase	%	85%	85%	85%	85%	85%	8.813.200.000	DAU	Kab. Lima	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sosial	Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial									Puluh Kota	
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	%	95%	95%	95%	95%	95%	8.038.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	2.137.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	100%	100%	100%	100%	100%	2.270.455.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja
	Sub Kegiatan : Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	-	-	70 orang	70 orang	60 orang	760.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian Tenaga kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026					
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	%/ tahun	5	5	5	5	5	5,548,940,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN	
	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Tangkap	Ton/tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	5,066,401,873	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN	
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Tangkap	Ton/tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	872,982,577				
	Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Tangkap	Ton/tahun	3700	3.900	4.100	4.300	4.500	2,533,222,987				
	Sub kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Tangkap	Ton/tahun	3700	3.900	4.100	4.300	4.500	1,660,196,309				
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	%/ tahun	3	3	3	3	3	21,806,717,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN	
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	45.843	47.218	48.635	50.094	51.597	15,199,666,154	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN	
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ekor benih	450.000.000	460.000.000	470.000.000	480.000.000	490.000.000	2,353,016,652				
	Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	45.843	47.218	48.635	50.094	51.597	3,251,279,510				
	Sub kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	44.981,22	47.218	48.635	50.094	51.597	1,370,031,599				
	Sub kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah penyakit Ikan	%	15	15	20	20	20	453,963,690	15	15	20	20

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026					
	Sub kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul				ton/tahun	45.843		47.218	48.635	50.094
	Sub kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembudidayaan Ikan di Darat	Perlindungan Lahan untuk		meningkatnya	Luas Lahan			Ha	20		20	20	20
	Sub kegiatan : Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Air untuk Pembudidayaan Ikan		meningkatnya	Luas Lahan			Ha	20		20	20	20
	Sub kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	45.843	47.218	48.635	50.094	51.597	194,959,804				
	Sub kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	meningkatnya Luas Lahan	Ha	20	20	20	20	20	7,049,515,716				
	Sub kegiatan : Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	meningkatnya Luas Lahan	Ha	20	20	20	20	20	526,899,183				
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	KG/ Kapita/ Tahun, dan %/ tahun	38,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	39,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	40,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/tahun	3,606,320,000	DAU	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN	
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061	DAU	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	DINAS PERIKANAN	
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061				
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap	%/ tahun	5	5	5	5	5	5,548,940,000	DAU	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	Dinas Perikanan	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Tangkap	ton/tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	5,066,401,873	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	Dinas Perikanan
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Tangkap	ton/tahun	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	872,982,577			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya	%/ tahun	3	3	3	3	3	21,806,717,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	Dinas Perikanan
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	ton/tahun	45.843	47.218	48.635	50.094	51.597	15,199,666,154	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	Dinas Perikanan
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan yang Unggul	juta ekor benih	450.000.000	460.000.000	470.000.000	480.000.000	490.000.000	2,353,016,652			
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	KG/ Kapita/ Tahun, dan %/ tahun	38,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/ tahun	39 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/ tahun	39,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/ tahun	40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/ tahun	40,5 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/ tahun	3,606,320,000	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	Dinas Perikanan
	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061	DAU	KABUPATE N LIMA PULUH KOTA	Dinas Perikanan
	Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton/tahun	365	375	385	395	405	732,916,061			
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan											Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta JKN		90%	98%	100%	100%	100%		DAU,DBH CHT	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Kesehatan
	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan diUPTD	%	4	6	8	10	12				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terlaksananya peningkatan produktivitas ternak dan pelayanan kesehatan hewan	Pelayan	1500	1500	1500	1500	1500	7.837.949.517	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	8.813.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	%	95%	95%	95%	95%	95%	8.038.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan	Kecamat	13 Keca	13 Keca	13 Keca	13 Keca	13 Keca	2.137.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS		mata n	mata n	mata n	matan	mata n				
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.											DPMDN
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	33.929.024.500	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	%	58	61	63	66	68	33.929.024.500	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/ monitoring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan	Nagari	39	42	55	79	79	875.000.000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	
		Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai	Nagari	45	55	65	79	79				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		ketentuan										
		Jumlah nagari dengan status swadaya	Nagari	2	1	0	0	0				
		Jumlah nagari dengan status swasembada	Nagari	28	29	30	31	31				
		Persentase nagari dengan status mandiri	%	5	8	10	12	14				
		Persentase nagari dengan status tertinggal	%	2,5	1,25	0	0	0				
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.											DPMDN
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	33.929.024.500	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%	58	61	63	66	68	33.929.024.500	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/monitoring penyusunan profil nagari selama tahun	Nagari	39	42	55	79	79	875.000.000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		berjalan										
		Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan	Nagari	45	55	65	79	79				
		Jumlah nagari dengan status swadaya	Nagari	2	1	0	0	0				
		Jumlah nagari dengan status swasembada	Nagari	28	29	30	31	31				
		Persentase nagari dengan status mandiri	%	5	8	10	12	14				
		Persentase nagari dengan status tertinggal	%	2,5	1,25	0	0	0				
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.											DPMDN
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	33.929.024.500	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%	58	61	63	66	68	33.929.024.500	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/m onitoring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan	Nagari	39	42	55	79	79	875.000.000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	
		Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan	Nagari	45	55	65	79	79				
		Jumlah nagari dengan status swadaya	Nagari	2	1	0	0	0				
		Jumlah nagari dengan status swasembada	Nagari	28	29	30	31	31				
		Persentase nagari dengan status mandiri	%	5	8	10	12	14				
		Persentase nagari dengan status tertinggal	%	2,5	1,25	0	0	0				
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.											DPMDN
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	33.929.024.500	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan	Persentase	%	58	61	63	66	68	33.929.024.500	DAU	KAB LIMA	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/monitoring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan	Nagari	39	42	55	79	79	875.000.000	DAU	KAB LIMA PULUH KOTA	
		Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan	Nagari	45	55	65	79	79				
		Jumlah nagari dengan status swadaya	Nagari	2	1	0	0	0				
		Jumlah nagari dengan status swasembada	Nagari	28	29	30	31	31				
		Persentase nagari dengan status mandiri	%	5	8	10	12	14				
		Persentase nagari dengan status tertinggal	%	2,5	1,25	0	0	0				
10.1.1.(	Persentase penduduk miskin di daerah											Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
f)	tertinggal.											
	Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	8.813.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	%	95%	95%	95%	95%	95%	8.038.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	2.137.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.											Dinas Sosial
	Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	8.813.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	%	95%	95%	95%	95%	95%	8.038.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	2.137.200.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
10.03.01	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.											
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.											Badan Kesbangpol
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).											Badan Kesbangpol Satpol PP
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.											Badan Kesbangpol Satpol PP
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											Bagian Hukum Sekretariat Daerah
10.04.01	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.											Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program : Hubungan Industrial	Persentase	%	100	100%	100%	100%	100%	434.606.000	Dana Transfer	Kab.Lima	Dinas Perindustrian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		fasiliasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota		%						Umum	Puluh Kota	dan Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	175.040.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	59.980.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.											Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Hubungan Industrial	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	434.606.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	175.040.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
	Sub Kegiatan : penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	59.980.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
10.07.01	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara											Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	tujuan.											
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	2.270.455.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
	Sub Kegiatan : Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	150.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
10.07.02	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.											Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	2.270.455.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
	Sub Kegiatan : Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	-	-	70 orang	70 orang	60 orang	760.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara											Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	RI dengan negara tujuan penempatan.											
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	2.270.455.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
	Sub Kegiatan : Perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	-	-	70 orang	70 orang	60 orang	760.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.											Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	%	100 %	100%	100%	100%	100%	2.270.455.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	%	100 %	100%	100%	100%	100%	1.018.610.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
	Sub Kegiatan : Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	150.000.000	Dana Transfer Umum	Kab.Lima Puluh Kota	
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN												
11.01.0	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang											Dinas LHPP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
1	tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.											
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha kewenangan daerah yang ditangani (%)	%	29,05	30,35	31,05	32,95	34,25				Dinas LHPP
	Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	unit	275	300	325	350	375				Dinas LHPP
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar	unit	275	300	325	350	375	38.777.081.000	APBD		Dinas LHPP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Kawasan Permukiman Kumuh engan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (unit)										
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											Dinas LHPP
	Program : Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	%	65	67,25	70	72,5	75				Dinas LHPP
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh (unit)	unit	264	264	264	264	264				Dinas LHPP
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1. Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi /bansos peningkatan rumah bagi MBR (unit) 2. Jumlah rumah layak huni yang dibangun / bansos rumah bagi MBR (unit)	unit	264	264	264	264	264	30.049.530.000	APBD		Dinas LHPP
11.03.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan											Dinas LHPP Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis											
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	%	70	75	80	85	90	5.640.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan (dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	2.640.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase kemajuan proses Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (%)	%	75	100	100	100	100	720.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RRTR yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi atau ditetapkan (RRTR)	RRTR	1	1	1	1	1	690.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kebijakan penataan ruang yang ditetapkan	Peraturan	1	1	1	1	1	490.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		(peraturan)										
	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penataan Ruang (orang)	Orang	30	30	30	30	30	740.000.000			Dinas PUPR
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada (dokumen)	Dokumen	3	6	8	11	14	2.510.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan RRTR Kabupaten (dokumen)	Dokumen	2	3	2	3	3	2.510.000.000			Dinas PUPR
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan (lokasi)	Lokasi	2	2	2	2	2	490.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan penataan ruang yang terlaksana (lokasi)	Lokasi	1	1	1	1	1	490.000.000			Dinas PUPR
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya											Dinas LHPP Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	%	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85	20.951.360.000	DAU/ DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		(%)										
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dikelola (ton)	Ton	200	230	240			20.951.360.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi,dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi,dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disusun (dokumen)	Dokumen	1	0	0	0	0	400.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (unit)	Unit	1	1	1	1	1	11.105.650.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi (unit)	Unit	0	0	1	0	1	400.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (unit)	Unit	0	0	1	1	1	3.600.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang tersedia (unit)	Unit	3	3	5	5	6	4.655.710.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana	Jumlah peserta	Orang	40	0	60	60	60	790.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Sosialisasi dan Pemberdayaa n Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (orang)										
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola											Dinas LHPP Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah (%)	%	73	82	71	70	70				Dinas LHPP
	Kegiatan : Persentase Penanganan Sampah (%)	Persentase Penanganan Sampah (%)	%	50,5	51,01	56,11	61,72	67,89				Dinas LHPP
	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah wilayah perkotaan yang tertangani (ton/hari)	ton/hari	17,94	21,02	24,1	27,18	30,2	6.542.270.000	APBD		Dinas LHPP
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	%	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85	20.951.360.000	DAU/ DAK	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang terkelola (ton)	Ton	200	230	240			20.951.360.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi,dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi,dan Teknis Sistem	Dokumen	1	0	0	0	0	400.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disusun (dokumen)										
	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (unit)	Unit	1	1	1	1	1	11.105.650.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi (unit)	Unit	0	0	1	0	1	400.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (unit)	Unit	0	0	1	1	1	3.600.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang tersedia (unit)	Unit	3	3	5	5	6	4.655.710.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah peserta Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Orang	40	0	60	60	60	790.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		(orang)										
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara											Dinas LHPP
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (poin)	poin	91,01	91,15	91,29	91,43	91,57				Dinas LHPP
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)	lokasi	18	20	22	24	26				Dinas LHPP
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	236.690.000	APBD		Dinas LHPP
11.07.01	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.											Dinas LHPP
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua											Dinas LHPP
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Perentase Kawasan kehati yang terkelola (%)	%	5,07	5,09	5,11	5,13	5,15				Dinas LHPP
	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas wilayah perkotaan (%)	%	5,07	5,09	5,11	5,13	5,15				Dinas LHPP
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Luas pembangunan RTH publik wilayah perkotaan (m2) 2. Operasi dan Pemeliharaan	m2	1.000	1100	1210	1331	1464	119.578.040.000	APBD		Dinas LHPP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		RTH publik wilayah perkotaan (m2)										
11.07.02	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)											DPPKB P3A
	Program : Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Kali		13	13	13	13				
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		pelayanan pada unit layanan terpadu										
	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	0,068	0,067	0,050	0,033	0,017				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pendampingan	Bulan	12	12	12	12	12	80.000.000	DAU, DAK		
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											DPPKB P3A
	Program : Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT		0,0036	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	diseminasi data kekerasan bagi lembaga P2TP2A, K3N , PUSPAGA, WCC Koordinasi kegiatan ke kecamatan singkronisasi kegiatan ke provinsi sosialisasi peraturan	kali kali kali kali kal	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1 45 40 1 1	1.392745.295	DAU, DAK		

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		perundangan sosialisasi TPPO										
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Kali		13	13	13	13	30.000.000	DAU, DAK		
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	0,068	0,067	0,050	0,033	0,017				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pendampingan	Bulan	12	12	12	12	12	80.000.000	DAU, DAK		
	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	%	100	100	100	100	100				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasu s 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasu s 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasu s 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasu s 2 Kali 2 Kali 45 Kali	915.142.537	DAU, DAK		
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.											Dinas PUPR
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS											
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	%	70	75	80	85	90	6.650.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkannya Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan (dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	2.640.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase kemajuan proses	%	75	100	100	100	100	720.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (%)										
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RRTR yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi atau ditetapkan (RRTR)	RRTR	1	1	1	1	1	690.000.000			
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kebijakan penataan ruang yang ditetapkan (peraturan)	Peraturan	1	1	1	1	1	490.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penataan Ruang (orang)	Orang	30	30	30	30	30	740.000.000			Dinas PUPR
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada (dokumen)	Dokumen	3	6	8	11	14	2.510.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen	2	3	2	3	3	2.510.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		penyusunan RRTR Kabupaten (dokumen)										
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai (lokasi)	Lokasi	20	20	20	20	20	1.010.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Investasi yang diterbitkan (rekomendasi)	Rekomen dasi	6	5	5	5	5	1.010.000.000			Dinas PUPR
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan (lokasi)	Lokasi	2	2	2	2	2	490.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan penataan ruang yang terlaksana (lokasi)	Lokasi	1	1	1	1	1	490.000.000			Dinas PUPR
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal											Dinas PUPR
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	%	71	75	77	80	85	163.625.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	Unit	18	25	32	39	46	163.625.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,	Jumlah Pertimbangan Teknis perencanaan	Dokumen	3	3	3	4	5	2.483.000.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	serta Implementasi SIMBG	Bangunan yang dikeluarkan (dokumen)										
	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)	Unit	6	7	7	7	7	161.142.000.000			Dinas PUPR
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	%	55	60	65	70	75	8.691.210.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas PUPR
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang tertata		3	6	10	14	19	8.691.210.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Penyusunan yang disusun (dokumen)	Dokumen	2	2	2	2	3	760.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1	1	1	1	1	570.000.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan		3	3	4	4	5	3.378.500.000			Dinas PUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		dan Lingkungan										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1	2	2	2	3	2.941.160.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Masyarakat dibina dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan (orang)	Orang	30	30	30	30	30	541.550.000			Dinas PUPR
	Sub Kegiatan Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang termonitoring penataan/pemeliharaannya (%)	%	50	55	60	65	70	500.000.000			Dinas PUPR
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN												
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											Dinas Tanhorbun Dinas Pangan
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	% peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas		50%	55%	60%	62%	65%	26.120.252.550	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.	Pengawasan Pemanfaatan Pupuk, Pestisida dan Alsintan		13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	17.623.582.849	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi.	Pengawasan Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida		13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	1.602.605.800	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Rapat monitoring dan pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasan pestisida		50 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang				Dinas Tanhorbun
		Rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi		30 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang				Dinas Tanhorbun
		Sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi		40 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang				Dinas Tanhorbun
		Monitoring, Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasan pestisida		13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan				Dinas Tanhorbun
		Pelatihan pembuatan pupuk organik		30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang				Dinas Tanhorbun
		Rapat koordinasi pupuk organik		30 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang				Dinas Tanhorbun
		Terlaksananya pengadaan sarana pendukung pengolahan pupuk organik		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit				Dinas Tanhorbun
		Tersedianya pupuk pendukung		39 unit SL	39 unit SL	39 unit SL	39 unit SL	39 unit SL				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		kegiatan SL PTT Jagung Adopsi Jarsip Menuju IP 400										
		Alat Pengolah Pupuk Organik		17 Unit	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan becak motor		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		cultivator		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		pelatihan operator		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pembinaan upja		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		alat pengolahan gambir		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		alat tanam jagung		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		corn sheller		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		pengadaan gedung bengkel alsintan		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan mesin potong rumput		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		power threaser		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		pengadaan sarana pendukung pengolahan pupuk organik		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Traktor roda dua		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		rapat koordinasi pupuk organik		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		rapat pembinaan		-	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		dan pengawasan alsintan										
												Dinas Tanhorbun
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.	Pengawasan Pemanfaatan Alsintan		13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	16.020.977.049	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		Pengadaan traktor roda 2		28 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan power thresher		3 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan cultivator (5 unit DBHCH)		39 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan Corn Seller		4 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan Becak Motor		4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan Alat mesin pasca panen (Alat Pengolahan Gambir)		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan alat tanam jagung		1 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan mesin pemotong rumput		-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan mesin pompa air		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit				Dinas Tanhorbun
		Operasional traktor besar		10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha				Dinas Tanhorbun
		Pembinaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)		13 Klp UPJA	13 Klp UPJA	13 Klp UPJA	13 Klp UPJA	13 Klp UPJA				Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pelatihan Operator Alat Mesin Pertanian		135 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang				Dinas Tanhorbun
		Pertemuan Pembinaan keltan penerima bantuan hibah alsintan		150 orang	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pertemuan Monev Pemanfaatan Alsintan		135 orang	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pelayanan Bengkel Alat Mesin Pertanian		13 kali	13 kali	13 kali	13 kali	13 kali				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan Lemari Penyimpanan Perkakas bengkel Alsintan		5 Unit	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan Peralatan RMU (DAK)		1 Paket	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Pengadaan Sarana Pendukung Smart Green House (DAK)		1 Paket	-	-	-	-				Dinas Tanhorbun
		Tersedianya alat tanam Jagung pendukung kegiatan SL PTT Jagung Adopsi Jarsip Menuju IP 400		117 Unit	117 Unit	117 Unit	117 Unit	117 Unit				Dinas Tanhorbun
												Dinas Tanhorbun
	Program : Penyediaan dan Pengembangan	%		50%	55%	60%	62%	65%	26.120.252.550	APBD	Kab. Lima	Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sarana Pertanian	peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas									Puluh Kota	
	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDG		7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	8.496.669.702	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
	Sub Kegiatan : Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Pemurnian (pendaftaran varietas) benih tanhortbun		1 variet as	1 variet as	1 variet as	1 variet as	1 variet as	4.960.737.309	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		Jumlah penyediaan benih sumber tanaman pangan		12.400 Kg	12.400 Kg	12.400 Kg	12.400 Kg	12.400 Kg				Dinas Tanhorbun
		Jumlah pemurnian varietas lokal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		1 Varietas	1 Varietas	1 Varietas	1 Varietas	1 Varietas				Dinas Tanhorbun
		Jumlah uji adaptasi varietas lokal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan					1 kali	1 kali				Dinas Tanhorbun
		Jumlah pelepasan varietas lokal tanaman pangan, hortikultura dan			1 Varietas							Dinas Tanhorbun

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		perkebunan										
		Jumlah pemeliharaan kebun induk gambir		75 Bata ng	75 Bata ng	75 Bata ng	75 Batan g	75 Batan g				Dinas Tanhorbun
		Jumlah penyediaan saprodi untuk pemanfaatan lahan tidur komoditi jagung hibrida		10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha				Dinas Tanhorbun
												Dinas Tanhorbun
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Penyediaan Benih Tanhortbun		7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	7 komo diti	3.535.932.392	APBD	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Tanhorbun
		Jumlah penyediaan tanaman Pangan		2340 kg	2340 kg	2340 kg	2340 kg	2340 kg				Dinas Tanhorbun
		Jumlah penyediaan bibit tanaman hortikultura		2.000 Bata ng	2.000 Bata ng	2.000 Bata ng	2.000 Batan g	2.000 Batan g				Dinas Tanhorbun
		Jumlah penyediaan bibit tanaman perkebunan		5.000 Bata ng	5.000 Bata ng	5.000 Bata ng	5.000 Batan g	5.000 Batan g				Dinas Tanhorbun
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	%	15	16	17	18	20	5.887.589.956	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Skor	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	1.957.029.412	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pemberdayaan Masyarakat dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Terlaksananya kegiatan advokasi optimalisasi pemanfaatan di Nagari		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1.440.120.490	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
		- Terlaksananya pendampingan kelompok KRPL, pertemuan kelompok sekolah lapang dan pembinaan		3 Nagari	3 Nagari	3 Nagari	3 Nagari	4 Nagari				
		- Terlaksananya penyaluran bantuan rumah pembibitan, sarana dan benih, bibit		3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	4 Kelompok				
		- Tersedianya promosi		1 Rim	1 Rim	1 Rim	1 Rim	1 Rim				
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan											Dinas Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	%	15	16	17	18	20	5.887.589.956	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan	Meningkatnya penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Masyarakat	%	14	16	16	18	21	1.996.309.554	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		dalam Menstabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										
	Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya laporan analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM tingkat Kabupaten	Buku	1	1	1	1	1	84.027.500	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Pangan
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.											
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/alat penunjang medic Fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya a pengadaan alat kesehatan /alat penunjang medic fasilitas pel.kes	paket	6.94 5.01 0.00 0	7.945 .010. 000	8.945 .010. 000	9.945. 010.0 00	10.94 5.010 .000		DAK		Dinas Kesehatan
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri											Dinas Kesehatan Dinas Pangan Dinas Perdagangan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan kesehatan Masyarakat											Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/alat penunjang medic Fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya a pengadaan alat kesehatan /alat penunjang	paket	6.94 5.01 0.00 0	7.945 .010. 000	8.945 .010. 000	9.945. 010.0 00	10.94 5.010 .000		DAK		Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		medic fasilitas pel.kes										
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline											
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.											Dinas LHPP
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	%	18	21	24	27	30			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)	usaha / kegiatan	30	40	50	60	70			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
	Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan	usaha / kegiatan	30	40	50	60	70	673.340.000	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026					
		dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)											
12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.											Dinas LHPP	
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah (%)	%	73	82	71	70	70			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP	
	Kegiatan : Persentase Penanganan Sampah (%)	Persentase Penanganan Sampah (%)	%	50,5	51,01	56,11	61,72	67,89			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP	
	Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kapasitas pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sampah (ton/tahun)	ton / tahun	11.651	13.981	16.777	20.133	24.159	2.198.070.000	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP	
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya											Dinas LHPP	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	%	82	85,5	89	92,5	96			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP	
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak	dokumen	220	220	220	220	220			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026					
		Lingkungan (Dokumen)											
	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah usaha/kegiatan yang mempunyai Izin Lingkungan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan	usaha / kegiatan	19	26	33	40	47	1.604.340.000	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP	
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.											Dinas LHPP	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	%	82	85,5	89	92,5	96			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP	
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)	dokumen	220	220	220	220	220			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah upgrading Penilai Kelayakan Lingkungan	orang	30	30	30	30	30	656.480.000	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		(orang)										
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development											Dinas Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	%	15	20	25	30	35	19.835.800.800.-	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata Kab.Lima Puluh Kota	%	20	20	20	20	20	6.844.401.300.-	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Sub Kegiatan Pengembangan daya tarik wisata kab/kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Destinasi	5	5	5	5	5	6,466,816,291.-	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata	%	20	20	20	20	20	5.557.325.718.-	APBD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Reabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan kawasan wisata strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Destinasi	1	1	1	1	1	8,019,236,882.-	APBD/BKK Propinsi	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Kabupaten/Kota										
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata	%	20	20	20	20	20	7.434.073.782.-	ABPD	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Reabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan kawasan wisata strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi	1	1	1	1	1	8,019,236,882.-	APBD/BKK Propinsi	Kabupaten Lima puluh Kota	Disparpora
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA												
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	%	29,3	30,6	31,9	33,2	34,5				DLHPP
	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kot	unit	20	25	30	40	45				DLHPP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		a (unit rumah)										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	unit	20	25	30	40	45	4.500.000.000	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	DLHPP
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)											DLHPP
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (poin)	poin	91,01	91,15	91,29	91,43	91,57			Kabupaten Lima Puluh Kota	DLHPP
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)	lokasi	18	20	22	24	26			Kabupaten Lima Puluh Kota	DLHPP
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	236.690.000	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	DLHPP
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim											DLHPP
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat (%)	%	33	50	67	83	100			Kabupaten Lima Puluh Kota	DLHPP
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan	Kelompok	28	28	28	28	28			Kabupaten Lima Puluh Kota	DLHPP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	an yang dibina dan dilatih dalam rangka PPLH (kelompok)										
	Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat/Jorong yang melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Proklam (Jorong)	jorong	3	4	5	6	6	925.040.000	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	DLHPP
13.b.1	Jumlah negara- negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan nationally determined contributions, strategi jangka panjang, rencana nasional adaptasi, dan strategi yang dilaporkan dalam adaptation communications dan national communications											
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana	Jiwa	160	-	-	-	-				BPBD
	Program :Penanggulangan Bencana	Penurunan Indeks Resiko Bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	%	10.6 90.2 75.2 000	3.886 .323. 000	4.274 .955. 300	4.702. 450.8 30	5.172 .695. 913		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Pada Daerah Rawan	%	410. 641. 200	59.30 00.20 0	65.31 8.220	71.85 0.942	79.03 5.046		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Bencana yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (100%)										
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen KRB(Peta Resiko Bencana dan Kajian Resiko Bencana)	Dokumen	356.659.200						APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik per Jenis Bencana	Unit	53.982.000	59.380.200	65.318.220	71.850.042	79.035.046		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (100%)	%	7.758.097.400	2.308.594.240	2.539.453.664	2.793.399.030	3.072.738.933		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
		Persentase Realisasi Pemulihan Objek Pasca Bencana								APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Penanggulang	Dokumen	241.803.000						APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		an Bencana										
	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang Mengikuti Pelatihan PB Banjir dan Longsor	Orang	125.083.000	137.591.300	151.350.430	166.485.473	183.134.020		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1. Jasa Piket Pos Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan an Bencana (PUSDALOPS PB) dan TRC	Bulan	659.015.000	724.916.500	797.408.150	877.148.965	964.863.862		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
		2. Jumlah Item Sarana dan Prasarana Penanggulangan an Bencana yang di Rawat, Servis dan Diganti Suku Cadangnya								APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Item Saran dan Prasarana Penanggulangan an Bencana yang diadakan(alat angkut darat, alat angkut apung, alat Komunikasi, alat/perkakas, alat studio/pemetaan, alat	Paket	214.153.000	235.568.300	259.125.130	285.037.643	313.541.407		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		keamanan/perindungan, barang pakai habis)										
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Survey, Verifikasi, monitoring, evakuasi dan pelaporan kerugian akibat bencana dan pelaksanaan program penanggulangan Bencana	Dokumen	145.484.400	160.032.840	176.036.124	193.639.730	213.003710		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
										APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbentuknya Nagari Tangguh Bencana	Nagari	79.308.00	87.238.800	95.962.680	105.558.948	116.114.843		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah OK (Orang Kegiatan) peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)	OK	5.475.586.000	700.000.000	770.000.000	847.000.000	931.700.000		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
		Jumlah perbaikan peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca	Paket							APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Bencana yang dilakukan										
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Beckhoe Loader) Pemeliharaan dan Operasional Alat	Unit							APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Diklat Peningkatan Kapasitas TRC dan PUSDALOPS	Diklat	87.9 90.0 00	96.78 9.000	106.4 67.90 0	117.1 14.69 0	128.8 26.15 9		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon)	Dokumen	297. 680. 000						APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Gladi Lapang)	OK	151. 325. 000	166.4 57.50 0	183.1 03.25 0	201.4 13.57 5	221.5 54.93 3		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	280. 670. 000						APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
										APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh	%	1.75 0.67 7.00 0	850.4 03.00 0	935.4 43.30 0	1.028. 987.6 30	1.131 .886. 393		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (100%)										
	Sub Kegiatan : Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah ZoonosisPrioritas	Jumlah Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis yang ditindak lanjuti	%	250.000.000	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya respon cepat darurat bencana sebelum tanggap darurat diberlakukan	%	61.730.000	67.903.000	74.693.300	82.162.630	90.378.893		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	%	400.000.000	100.000.000	110.000.000	171.000.000	133.100.000		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket logistic dan Kelengkapan lainnya bagi penduduk Terdampak bencana dan tempat penampungan sementara	Paket	681.097.000	300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	SAKDB (Sistem Aktivasi Komando	%	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Darurat Bencana)										
	Sub Kegiatan : Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Kali	282.850.000	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
										APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	770.859.600	667.945.560	734.740.116	808.214.128	889.035.540		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen tentang Regulasi Penanggulangan Bencana Banjir	Regulasi	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Masyarakat yang tergabung dalam pembentukan kelompok Siaga Bencana	Orang	125.346.600	137.881.260	151.669.386	166.836.325	183.519.957		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan bersama dan kemitraan bersama institusi lain	Kali	70.513.000	77.564.300	85.320.730	93.852.803	103.238.083		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pemanfaatan	Jumlah Alat	Unit	300.	150.0	165.0	181.5	199.6		APBD KAB	LIMA	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sistem Informasi Kebencanaan	Early Warning System (EWS) Antisipasi Bencana Banjir		000.000	00.000	00.000	00.000	50.000			PULUH KOTA	
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Dokumen Monev Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Terhadap Masyarakat yang berada di Daerah Rawan Bencana	Dokumen	75.000.00	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500		APBD KAB	LIMA PULUH KOTA	
TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN												
TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI												
15.01.02	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya											Dinas LHPP
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis											Dinas LHPP
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Perentase Kawasan kehati yang terkelola (%)	%	5,07	5,09	5,11	5,13	5,15			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas wilayah perkotaan (%)	%	5,07	5,09	5,11	5,13	5,15			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Dokumen rencana pengelolaan kehati (Dokumen)	dokumen		1				359.000.000	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
15.b.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk											Dinas LHPP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan											
	(b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi											Dinas LHPP
	dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati											Dinas LHPP
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Perentase Kawasan kehati yang terkelola (%)	%	5,07	5,09	5,11	5,13	5,15			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas wilayah perkotaan (%)	%	5,07	5,09	5,11	5,13	5,15			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kelompok masyarakat pemelihara kawasan kehati yang dibina (Kelompok)	Kelompok	3	4	5	6	7	594.590.000	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan											Dinas LHPP
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Perentase Kawasan kehati yang terkelola (%)	%	5,07	5,09	5,11	5,13	5,15			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
	Kegiatan :Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas wilayah perkotaan (%)	%	5,07	5,09	5,11	5,13	5,15			Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan	unit	2	3	4	5	6	179.050.000	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas LHPP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		kehati (unit)										
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT ANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBAGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN												
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.											Dinas Sosial Badan Kesbangpol Satpol PP
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
16.01.02	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.											
	Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di	Persentase (%)	80	80	85	85	90	1.829.600.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Daerah										
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	Persentase (%)	80	80	85	85	90	1.829.600.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan	Orang	720	720	720	720	720	1.829.600.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.											
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
16.01.03	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.											
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		antar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.											
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak	60 Kasus ABH/ Anak	60 Kasus ABH/ Anak	60 Kasus ABH/ Anak	60 Kasus ABH/ Anak	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
				Terlantar	Terlantar	Terlantar	tar	Terlantar				
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.											
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
16.02.01	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir											
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasu s 2 Kali Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasu s 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasu s 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasu s 2 Kali 2 Kali 45 Kali	915.142.537	DAU, DAK		DPPKBPA
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi	Jumlah	Kasus	60	60	60	60	60	420.000.000	DAU	Kab. Lima	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikas Keluarga		Kasus ABH/Anak Terlarntar	Kasus ABH/Anak Terlarntar	Kasus ABH/Anak Terlarntar	Kasus ABH/Anak Terlarntar	Kasus ABH/Anak Terlarntar			Puluh Kota	
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.											
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 45 Kali	915.142.537	DAU, DAK		DPPKBPA
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pelayanan Rehabilitasi Sosial									Puluh Kota	
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya											
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	0,068	0,067	0,050	0,033	0,017				DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah bulan pendampinga	Bulan	12	12	12	12	12	80.000.000	DAU, DAK		DPPKBPA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kewenangan Kabupaten/Kota	n										
	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi	50 Kali 50 Kasus 2 Kali Jumlah 45 Kali	50 Kali 50 Kasu s 2 Kali Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasu s 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasu s 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasu s 2 Kali 2 Kali 45 Kali	915.142.537	DAU, DAK		DPPKBPA
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikas Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlarntar	60 Kasus ABH/ Anak Terlarntar	60 Kasus ABH/ Anak Terlarntar	60 Kasus ABH/ Anak Terlarntar	60 Kasus ABH/ Anak Terlarntar	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.											
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi	50 Kali 50 Kasus 2 Kali Jumlah Pendampingan 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali Kali 2 Kali 45 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 2 Kali 45 Kali	915.142.537	DAU, DAK		DPPKBPA
	Program : Perlindungan Perempuan	Cakupan	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu										
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Kali		13	13	13	13	30.000.000	DAU, DAK		DPPKBPA
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikas Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
16.02.03	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											Dinas Sosial Badan Kesbangpol Satpol PP DPPKBPA
	Program : Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi	Kali		13	13	13	13	30.000.000	DAU, DAK		DPPKBPA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		perempuan korban kekerasan										
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 45 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 45 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 45 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 45 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 45 Kali 45 Kali	915.142.537	DAU, DAK		DPPKBPA
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Panti Sosial	Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											
	Program : Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				DPPKB P3A
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100	100				DPPKB P3A
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	Kali		13	13	13	13	30.000.000	DAU, DAK		DPPKB P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan										
	Program : Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				DPPKB P3A
	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	%	100	100	100	100	100				DPPKB P3A
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Ke Kecamatan Jumlah Pendampingan Kasus Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi	50 Kali 50 Kasus 2 Kali Jumlah Pendampingan 45 Kali Kasus Jumlah Rapat Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sinkronisasi Kegiatan Ke Propinsi	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	50 Kali 50 Kasus 2 Kali 2 Kali 45 Kali	915.142.537	DAU, DAK		DPPKB P3A
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Sosial										
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	60 Kasus ABH/ Anak Terlan tar	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
16.03.01	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.											
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		ngan Pengemis di Luar Panti Sosial										
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikas Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	60 Kasus ABH/ Anak Terlan	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	Persentase (%)	80	80	85	85	90	625.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	Persentase (%)	80	80	85	85	90	625.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi	Orang	120	120	120	120	120	625.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.											
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Persentase	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									Puluh Kota	
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi											
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi	Jumlah	Kasus	60	60	60	60	60	420.000.000	DAU	Kab. Lima	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga		Kasus ABH/ Anak Terlantar	Kasus ABH/ Anak Terlantar	Kasus ABH/ Anak Terlantar	Kasus ABH/ Anak Terlantar	Kasus ABH/ Anak Terlantar			Puluh Kota	
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.											
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
16.03.03	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.											
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pelayanan Rehabilitasi Sosial									Puluh Kota	
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	85%	85%	85%	85%	85%	23.744.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Kasus	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	60 Kasus ABH/ Anak Terlantar	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Dinas Sosial
	Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	Persentase (%)	80	80	85	85	90	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	Persentase (%)	80	80	85	85	90	420.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi	Jumlah	Laporan	12	12	12	12	12	420.000.000	DAU	Kab. Lima	Badan Kesbangpol

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan									Puluh Kota	
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).											Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV		82%	83%	84%	85%	86%	18.528.834.761	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal		80%	80%	80%	80%	80%	15.240.797.261	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil audit kinerja		4 laporan kinerja dan 60 laporan evaluasi	4 laporan kinerja dan 60 laporan evaluasi	4 laporan kinerja dan 60 laporan evaluasi	4 laporan kinerja dan 60 laporan evaluasi	4 laporan kinerja dan 60 laporan evaluasi	2.896.687.500	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan		12 Laporan	12 Laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	2.846.687.500	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja		25 Laporan	25 Laporan	115 laporan	115 laporan	115 laporan	3.019.563.136	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan		25 Laporan	25 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	209.768.125	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah		45	45	20	20	20	2.192.066.000	DAU	Kabupaten	Inspektorat

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		laporan pengawasan desa		Laporan	Laporan	laporan	laporan	laporan			Lima Puluh Kota	
	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan kerjasam pengawasan internal		1 Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	899.006.250	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah kegiatan kerjasam pengawasan internal		1 Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2.597.018.750	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Kegiatan Penyeleggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		95%	0,95	0,95	0,95	0,95	3.868.037.500	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penyelesaian kerugian negara/daerah		1 Laporan	1 Laporan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	6 Kegiatan	1.073.807.500	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Diterbitkan		15 Laporan	15 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	2.794.230.000	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	5.410.254.200	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang		95%	95%	95%	95%	0,95	1.469.153.350	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										
	Sub Kegiatan Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya dokumen SPIP OPD		1 Kegiatan	1 Kegiatan	43 OPD	43 OPD	43 OPD	774.138.750	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Sub Kegiatan Perumusan kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya dokumen Kapabilitas APIP		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	695.014.600	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan Pendampingan dan Asistensi		95%	95%	95%	95%	95%	3.941.100.850	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	719.171.875	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi OPD Sampel		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.358.476.250	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Indeks Reformasi Birokrasi OPD Sampel		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	794.105.625	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Indeks Reformasi Birokrasi OPD Sampel		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.069.347.100	DAU	Kabupaten Lima Puluh Kota	Inspektorat
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.											
	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		DAU		Badan Keuangan
	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penganggara n yang tepat	%	95	95	95	95	95		DAU		Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran										
	Sub Kegiatan :											Badan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	4	4	4	4	875.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	4	4	4	4	850.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	43	43	43	43	700.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	43	43	43	43	725.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	43	43	43	43	500.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	43	43	43	43	600.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Dokumen	6	6	6	6	6	925.000.000	DAU		Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		APBD										
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Pera	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	6	6	6	6	6	950.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	4	4	4	4	4	125.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	6	6	6	6	6	125.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	6	6	6	6	6	375.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	1	1	1	1	125.000.000	DAU		Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	86	86	86	86	86	375.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Perbendaharaan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu	%	95	95	95	95	95				Badan Keuangan
	Sub Kegiatan :											Badan Keuangan
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	12	12	12	12	1.127.500.000	DAU		Badan Keuangan
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	172	172	172	172	172	125.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	12	12	12	12	12	122.500.000	DAU		Badan Keuangan
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	12	12	12	12	362.500.000	DAU		Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	Laporan	12	12	12	12	12	487.500.000	DAU		Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)										
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	2	2	2	2	2	175.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Dokumen	4	4	4	4	4	362.500.000	DAU		Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait										
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	298.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Kegiatan :Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	%	95	95	95	95	95		DAU		Badan Keuangan
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Laporan	2	2	2	2	2	310.026.000	DAU		Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pendapatan-LO, dan Beban										
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	4	4	4	4	4	154.300.500	DAU		Badan Keuangan
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	4	4	4	4	4	482.214.500	DAU		Badan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Laporan	2	2	2	2	2	534.650.500	DAU		Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		APBD Kabupaten/Kota										
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	2	2	2	2	94.848.000	DAU		Badan Keuangan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	64.098.000	DAU		Badan Keuangan
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	1	1	1	139.223.000	DAU		Badan Keuangan
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	Dokumen	1	1	1	1	1	474.689.000	DAU		Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pemerintah Daerah										
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	86	86	86	86	86	576.285.500	DAU		Badan Keuangan
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	24	24	24	24	24	146.621.000	DAU		Badan Keuangan
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		DAU									Badan Keuangan
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Nagari	79	79	79	79	79	813.277.692.500	DAU		Badan Keuangan
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Nagari	79	79	79	79	79	17.500.000.000	DAU		Badan Keuangan
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Nagari	79	79	79	79	79	27.293.496.785	DAU		Badan Keuangan
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan		DAU									Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Daerah											
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	12	12	12	12	12	1.465.650.000	DAU		Badan Keuangan
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	129	129	129	129	129	1.088.750.000	DAU		Badan Keuangan
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		DAU									Badan Keuangan
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD diselenggarakan sesuai dengan regulasi (Perda, Perkada, dan SK Kada), transparan, akuntabel,	%	95	95	95	95	95		DAU		Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		efisien, berkepastian hukum, dan memberikan nilai tambah bagi Pemda										
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	285.662.500	DAU		Badan Keuangan
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	180.251.000	DAU		Badan Keuangan
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	392.700.500	DAU		Badan Keuangan
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	631.888.000	DAU		Badan Keuangan
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	407.852.000	DAU		Badan Keuangan
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	1.032.217.500	DAU		Badan Keuangan
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik	Laporan	12	12	12	12	12	506.911.000	DAU		Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah										
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	337.498.500	DAU		Badan Keuangan
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	280.086.000	DAU		Badan Keuangan
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	4	4	4	4	4	412.409.500	DAU		Badan Keuangan
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	2	2	2	2	357.763.000	DAU		Badan Keuangan
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Kegiatan : Penataan Organisasi											Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Persentase (%)	100	100	100	100	100	550.929.333	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB $\geq$ B											
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Kegiatan : Penataan Organisasi											Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase (%)	10	20	30	45	65	277.934.251	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
16.06.02	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.											
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Kegiatan : Penataan Organisasi											Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase (%)	80	80	80	80	80	199.380.413	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.											Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Kegiatan : Penataan Organisasi											Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan : Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Jumlah Instansi	10	16	21	31	42	393.917.390	APBD	Kabupaten Lima Puluh Kota	
16.7.1.(	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
a)	Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).											
	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	%	95,80	95,85	95,90	95,95	96				DPPKBPA
	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pecepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah	%									DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	Kali	7	7	7	7	7	453.970.049	DAU		DPPKBPA
		Jumlah advokasi dan koordinasi, yang dilaksanakan terhadap jumlah kebijakan yang disusun	Kali	10	15	20	25	30				DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum serta PUG	Kali	1	1	1	1	1	377.717.872	DAU		DPPKBPA
		Jumlah workshop, bimtek, pelatihan, sosialisasi	Kali	4	5	10	10	10				DPPKBPA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum										
	Sub Kegiatan : Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase anggaran yang responsif gender (ARG) pada belanja langsung APBD Kabupaten	%	5	5,56	6,1	6,7	7,3	463.217.548	DAU		DPPKBPA
		Jumlah sosialisasi terhadap peran perencana (subag Program) dalam PUG dan PPRG	Kali	1	2	2	2	8				DPPKBPA
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).											
	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender										DPPKBPA
	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pecepatan PUG melalui PPRG di Perangkat Daerah										DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait										DPPKBPA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		pelaksanaan PUG										
		Jumlah advokasi dan koordinasi, yang dilaksanakan terhadap jumlah kebijakan yang disusun										DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum serta PUG										DPPKBPA
		Jumlah workshop, bimtek, pelatihan, sosialisasi terkait peran perempuan dibidang sosial, politik dan hukum										DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase anggaran yang responsif gender (ARG) pada belanja langsung APBD Kabupaten										DPPKBPA
		Jumlah sosialisasi terhadap peran										DPPKBPA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		perencana (subag Program) dalam PUG dan PPRG										
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit	Indeks	68 Kurang	70 Baik	75 Baik	80 Baik	85 Baik	12.075.000.000	DAU	Kabupaten Limapuluh Kota	BKPSDM
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Kenaikan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit	%	3	2	5	5	5	7.075.000.000	DAU	Kabupaten Limapuluh Kota	BKPSDM
	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Pelantikan dan Mutasi Pegawai	Orang	200	200	200	200	200	1.425.000.000	DAU	Kabupaten Limapuluh Kota	BKPSDM
	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembinaan Karir	Orang	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.650.000.000	DAU	Kabupaten Limapuluh Kota	BKPSDM
	Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN	Persentase Kenaikan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit	%	3	2	5	5	5	5.000.000.000	DAU	Kabupaten Limapuluh Kota	BKPSDM
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Pejabat Yang Mengikuti Diklat Struktural	Orang	15	15	15	15	15	5.000.000.000	DAU	Kabupaten Limapuluh Kota	BKPSDM
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi											Badan Kesbangpol
	Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Persentase Pelaksanaan	Persentase (%)	80	80	85	85	90	1.112.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Pendidikan Politik										
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, wakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	Persentase (%)	80	80	85	85	90	1.112.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan	Orang	200	200	200	200	200	1.112.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan											Badan Kesbangpol
	Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	Persentase (%)	80	80	85	85	90	645.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, wakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	Persentase (%)	80	80	85	85	90	645.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi	Orang	120	120	120	120	120	645.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
16.7.2.(c)	Indeks Kesenjangan											Badan Kesbangpol
	Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	Persentase (%)	80	80	85	85	90	425.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, wakil dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	Persentase (%)	80	80	85	85	90	425.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Laporan	12	12	12	12	12	425.000.000	DAU	Kab. Lima Puluh Kota	Badan Kesbangpol
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.											Dinas Duk Capil
	Program : Pencatatan Sipil		%	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	Rp. 1.781.790.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan dan Kelurahan	Dinas Duk Capil
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan sipil (Keg. Ini Di Renstra Tidak ada tapi di Renja dan Di DPA Tahun 2022 ada)											
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (Sub Keg. Ini Di Renstra											
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.											Dinas Duk Capil
	Program : Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	Rp. 1.781.790.000	APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan dan Kelurahan	Dinas Duk Capil
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan sipil (Keg. Ini Di Renstra Tidak ada tapi di Renja dan Di DPA Tahun 2022 ada)											
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (Sub KEG. Ini Di Renstra Tidak ada tapi di Renja dan Di DPA Tahun 2022 ada)											
16.10.1 .(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).											
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum									Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Satpol PP
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Satpol PP
	Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pengiriman PNS untuk mengikuti pelatihan dasar Satpol PP	Orang	3	15	30	30	30	850.000.000	Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Satpol PP
16.10.1 .(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.											DPPKBPA
	Program : Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100	100				DPPKBPA
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan	Kali		13	13	13	13	30.000.000	DAU, DAK		DPPKBPA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan										
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITAISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN												
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.											Badan Keuangan
	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah											Badan Keuangan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah											Badan Keuangan
	Sub Kegiatan :											Badan Keuangan
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	466.220.500	PAD		Badan Keuangan
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	595.363.500	PAD		Badan Keuangan
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	13	13	13	13	13	701.150.000	PAD		Badan Keuangan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	1	1	1	1	1	3.882.363.000	PAD		Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Pajak Daerah										
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	600.190.000	PAD		Badan Keuangan
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	367.322.000	PAD		Badan Keuangan
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	OP	100	100	100	100	100	629.500.000	PAD		Badan Keuangan
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	250	250	250	250	250	584.783.000	PAD		Badan Keuangan
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	40	40	40	40	40	114.281.500	PAD		Badan Keuangan
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	5	5	5	5	5	455.057.000	PAD		Badan Keuangan
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	4	4	4	4	4	1.568.194.000	PAD		Badan Keuangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah										
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	20	20	20	20	20	113.925.000	PAD		Badan Keuangan
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12	12	-	PAD		Badan Keuangan
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	4	4	4	4	413.324.000	PAD		Badan Keuangan
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	443.320.000	PAD		Badan Keuangan
17.18.1 (a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											Dinas Komunikasi dan Informasi Bapelitbang
	Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Indeks kualitas perencanaan	Persentase	73	75	78	80	85				Bapelitbang
	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Indeks kualitas	Persentase	73	75	78	80	85				Bapelitbang

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pembangunan Daerah	perencanaan pada dimensi Kelengkapan dan Kualitas Dokumen (Data Dukung, Inovasi dan Konsistensi Dok. Perencanaan)										
	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data	Dokumen	1	1	1	1	1	394.076.000,-	DAU		Bapelitbang
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen SIPD Database	Dokumen	1	1	1	1	1	638.133.000,-	DAU		Bapelitbang
17.19.2 .(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).											Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program : Pencatatan Sipil											Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan sipil (Keg. Ini Di Renstra Tidak ada tapi di Renja dan Di DPA Tahun 2022 ada)											
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (Sub Keg. Ini Di Renstra Tidak ada tapi di Renja dan Di DPA Tahun 2022 ada)	1. Dokumen akta kelahiran 2. Dokumen akta kelahiran	Dokumen	7500 200	7500 250	7500 325	7500 330	7500 350	Rp. 1.781.790.000			
17.18.1 .(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											Dinas Komunikasi dan Informasi Bapelitbang

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Perangkat Daerah
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Indeks kualitas perencanaan	Persentase	73	75	78	80	85				Bapelitbang
	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan pada dimensi Kelengkapan dan Kualitas Dokumen (Data Dukung, Inovasi dan Konsistensi Dok. Perencanaan)	Persentase	73	75	78	80	85				Bapelitbang
	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen profil daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	628.110.000	DAU		Bapelitbang

Sarilamak, Oktober 2022



RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

KABUP
ATEN/K
OTA :
PADAN
G

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN												
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.											
	Program : Kawasan Permukiman											
	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman											
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh b. Jumlah kegiatan pendampingan pelaksanaan DAK Air Minum Kota Padang c. Jumlah kegiatan pendampingan pelaksanaan Pamsimas Kota Padang d. Jumlah Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Program Sanimas IDB di Kota Padang e. Jumlah pendampingan pelaksanaan DAK sanitasi Kota Padang f. Jumlah kegiatan pendampingan program HALS	a. Laporan b. Kegiatan c. Kegiatan d. Kegiatan e. Kegiatan f. Kegiatan	- 1 1 1 - -	2 - 1 - - 1	2 - 1 - - 1		-	5.360.624.100	APBD dan APBN	Kota Padang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Renstra Dperkim 2021-2024 dan Estimasi 2025-2026)
	Program : Kawasan Permukiman											
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	a. Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar b. Jumlah Infrastruktur sanitasi layak dilingkungan kawasan permukiman (APBD) c. Jumlah Infrastruktur air minum layak dilingkungan kawasan permukiman (APBD) d. Jumlah Infrastruktur sanitasi layak dilingkungan kawasan permukiman (DAK) e. Jumlah rumah yang terlayani sarana Infrastruktur jaringan air minum dan sanitasi yang memadai di lingkungan kawasan pemukiman (PAMSIMAS) f. Jumlah rumah yang terlayani sarana Infrastruktur jaringan air minum yang memadai di lingkungan kawasan permukiman (DAK) g. Jumlah Infrastruktur sanitasi layak di lingkungan kawasan permukiman (HALS) h. Jumlah pemugaran/peremajaan PSU kawasan kumuh	a. Ha b. unit c. lokasi/SR d. SR e. SR f. unit g. unit h. lokasi	- 45 4 720 57 806 - 3	20 412 48 - - - 38 6	25,01 300 200 - 85 - 500 5		-	60.178.415.836	APBD dan APBN	Kota Padang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Renstra Dperkim 2021-2024 dan Estimasi 2025-2026)
	Program : Kawasan Permukiman											
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	unit rumah	60	50	55	-	-	23.483.000.000	APBD dan APBN	Kota Padang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak huni Besersa PSU	Dokumen	1	1	1	-	-	1.500.000.000	APBD	Kota Padang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)											
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kenantingan	Persentase usaha mikro Kelompok Rumah Tangga Miskin Produktif yang difasilitasi Pemberdayaan	persen (%)	40	40	40	-	-				
	Sub Kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	1000	1000	1000	-	-		APBD	Kota Padang	DISKOP UKM
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	1040	1040	1040	-	-		APBD	Kota Padang	DISKOP UKM
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	100	200	220	-	-		APBD	Kota Padang	DISKOP UKM
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan	Orang	100	100	100	-	-		APBD	Kota Padang	DISKOP UKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM											
	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil											
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	350	200	200	-	-		APBD	Kota Padang	DISKOP UKM
	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Strategis yang di akomodir	Usulan	99	308	100			757.000.000	APBD Kota Padang	Kota Padang	Bagian Kesra
	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat											
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat											
	Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja											
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi											
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Tercapainya calon wirausaha baru, - Berkurangnya jumlah pengangguran	8 Paket	122	144	160	-	-	1.200.000.000	APBD	PADANG	DISNAKERIN
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Dokumen	#####	#####	#####	-	-		APBD	RSUD dr. Rasidin Padang	RSUD dr. Rasidin Padang
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
	Program: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang disediakan							17.755.219.017	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
	Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							17.755.219.017	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bibit manggis yg didistribusikan pada kawasan tematik	btng	3430	4000	4000	-	-	3.784.819.017	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit perkebunan yang distribusikan	btg kakao	1000	3000	3000	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Jumlah sarana pendukung pertanian yang digunakan	item	16	0	2	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang difasilitasi pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK	keltan	265	0	0	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sosialisasi pupuk bersubsidi	kali	7						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok yang mengolah UPPO		0						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah pelatihan SL-GAP tanaman buah		0						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang diberikan bantuan benih sayuran dan pupuk		0						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kebun bibit yang dilakukan pengembangan bibit buah buahan	unit	1						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bantuan bibit yang diberikan	btg kakao	1950						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit untuk perluasan areal perkebunan yang dikembangkan	btg/5ha	6375						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bantuan sambung pucuk	batang	1000						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bantuan sambung samping kakao	batang	500						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit tanaman perkebunan	btg	6375						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah SL jajar legowo yang diberikan	kali	5						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bantuan benih padi yang diberikan	kg	1400						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kampung tematik manggis yang dikembangkan	kec	1						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kampung tematik manggis yang dikembangkan								APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kampung tematik tanaman perkebunan yang dikembangkan								APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Pembangunan dan pengembangan sentra produksi tanaman hias dikampung tematik flori								APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
										APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah persentase Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							13.970.400.000	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah penyediaan pupuk kompos yang distribusikan pada kawasan desa organik	TON		15	15	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah penyediaan sarana pada kawasan desa organik	Ball		6	6	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah penyediaan bibit perkebunan (Coklat dan Kopi)	btg		3000	3000	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sarana perkebunan (pupuk)	kg		600	600	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Luas tanah yang dibutuhkan untuk pembibitan ternak dan Pertanian	m²		1300	1300	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Penumbuhan Kelompok Penangkar Benih Padi yang fasilitasi pelabelan dan sertifikasi benih	kel		10	10	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang diberikan bantuan benih padi dan Pupuk	kel		25	25	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang difasilitasi pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK	kel		265	265	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sosialisasi pupuk bersubsidi	kali		0	0	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok yang mengolah UPPO	kel		50	50	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah petani UP3HP komoditi perkebunan yang dilatih dan dibina	kel		30	30	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah petani UP3HP komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih dan dibina	kel		20	20	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Jumlah Unit Usaha PPHP komoditi Peternakan yang dilatih dan dibina	unit usaha		20	20	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang diberikan bantuan benih sayuran dan pupuk	keltan		10	10	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit untuk perluasan areal perkebunan yang dikembangkan	btg/5ha		6375	6375	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sosialisasi AUP dan sosialisasi UPJA yang dilakukan	kali		1	1	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
	Program: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								2.454.322.630			
	Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Satu Daerah Dalam Daerah Kabupaten/Kota Lain								2.454.322.630			
	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang didistribusikan kepada kelompok	ekor	2518	1107	350	-	-	2.454.322.630			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							-	2.287.919.836			
	Kegiatan: Pembangunan Prasarana Pertanian		3					-	2.287.919.836			
	Sub Kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dilaksanakan	Unit	2	2	2	-	-	1.537.919.836			
	Sub Kegiatan Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah kandang ternak yang teregister dan direhabilitasi	unit	10	10	10	-	-	750.000.000			
	Program : Pengelolaan Pendidikan											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Non Formal/kesetaraan											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			25 lembaga	28 lembaga	28 lembaga	-	-	16.535.399.400,00	APBD	Kota Padang	Disdikbud
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			623 orang	762 orang	762 orang	-	-	3.435.000.000,00	APBD	Kota Padang	Disdikbud
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			334 orang	347 orang	347 orang	-	-	2.752.500.000,00	APBD	Kota Padang	Disdikbud
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
	Program : Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	65	70	75	-	-	42.702.950.814			
	Kegiatan :Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Yang Dibina	Orang	4927	4927	4927	-	-	42.702.950.814			
	Sub Kegiatan :							-				
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bansos yang disalurkan	paket	4223	4500	4500	-	-	32.145.723.528			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pilar-pilar sosial yang meningkat kapasitasnya	orang	40	126	126	-	-	9.130.506.121			
		Jumlah Karang Taruna, Yayasan (Panti Asuhan) yang dinilai	Kelompok	41	41	41	-	-				
		Jumlah LK2S yang diberdayakan	Lembaga	1	1	1	-	-				
		Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan hari bersejarah	kegiatan	3	3	3	-	-				
		Jumlah kegiatan perayaan dalam rangka HKSN	kegiatan	1	1	1	-	-				
		Jumlah kegiatan strategis yang dilaksanakan	paket	500	500	500	-	-				
		Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna yang diberdayakan	Kelompok	11	11	11	-	-				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 dan Family Care Unit (FCU) yang diberdayakan	Lembaga	1	1	1	-	-	1.426.721.165			
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase penduduk Rentan Sosial yang meningkat fungsi sosialnya	%	100	100	100	-	-	12.134.665.883			
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Dasar	orang	1213	1214	1214	-	-	12.134.665.883			
	Sub Kegiatan :						-	-				
	Penyediaan Permakanaan	Jumlah lanjut usia terlantar yang diberi makanan bergizi	Orang	110	110	110	-	-	2.271.859.015			
		Jumlah anak terlantar diluar panti yang diberi makanan bergizi	Orang	700	700	700	-	-				
		Jumlah Janda Perintis kemerdekaan yang diberi makanan bergizi	Orang	21	14	14	-	-				
		Jumlah Penyandang disabilitas Berat dan Trauma Yang diberikan makanan bergizi	Orang	75	75	75	-	-				
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penderita psikotik miskin terlantar yang dikirim ke Panti Sosial Bina Laras Bengkulu untuk dibina	orang	6	6	6	-	-	6.841.477.106			
		Jumlah penyandang disabilitas mengikuti lomba HDI	orang	150	150	150	-	-				
		Jumlah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpenuhi Kebutuhan Operasionalnya	lembaga	1	1	1	-	-				
		Jumlah Gelandangan/ Pengemis yang dilatih/dibina	orang	40	40	40	-	-				
		Jumlah anak jalanan yang dilatih/dibina	orang		20	20	-	-				
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah anak jalanan yang dibina fisik dan mentalnya	Orang	30	30	30	-	-	976.819.590			
							-	-				
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah wirausaha lanjut usia miskin yang dibantu meningkatkan usahanya	orang	14	15	15	-	-	2.044.510.172			
		Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas yang diberikan bantuan untuk meningkatkan usahanya	UEP	10	10	10	-	-				
		Jumlah layanan rujukan yang diberdayakan	unit	1	1	1	-	-				
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penduduk miskin yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	%	0,03	0,03	0,03	-	-	9.251.980.516			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin cakupan daerah Kota yang dikelola	data	443222	443222	443222	-	-	9.251.980.516			
	Sub Kegiatan :											
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data penduduk miskin yang diverifikasi dan validasi untuk masuk database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS)	ruta						3.373.699.235			
	Pegelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KPM yang diberikan pendampingan BPNT	KK	34027	32236	30709	-	-	1.533.032.262			
		Jumlah penduduk miskin penerima JKN yang diverifikasi dan divalidasi	jiwa	223755	212567	201939	-	-				
		Jumlah calon penerima bantuan hibah dan bantuan sosial yang diverifikasi dan divalidasi	KPM				-	-				
		Jumlah peserta sosialisasi yang memahami BPNT	orang		126	126	-	-				
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga?	Jumlah KPM PKH yang diberikan pendampingan	KK	19830	19830	19830	-	-	3.120.859.630			
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KUBE fakir miskin yang berdaya/ mapan	kelompok	50	50	50	-	-	1.224.389.389			
		Jumlah peserta bimtek yang memahami e- Warong	orang	78	78	78	-	-				
		Jumlah UEP fakir miskin yang produktif	unit	20	20	20	-	-				
							-	-				
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase terjaminnya kebutuhan dasar hidup penduduk beresiko darurat sosial	%	100	100	100	-	-	3.604.272.921			
	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan bantuan untuk terjaminnya kebutuhan dasar penduduk korban bencana alam dan bencana sosial	jenis	28	28	28	-	-	3.604.272.921			
	Sub Kegiatan :						-	-				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang didistribusikan kepada kelompok	ekor	2518	1107	350	-	-	2.454.322.630			
	Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Indeks Ketahanan Pangan	%	85	86	87	-	-	300.000.000	APBD	Kota Padang	Dinas Perikanan dan Pangan
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Indeks Ketahanan Pangan	%	85	86	87	-	-	300.000.000	APBD	Kota Padang	Dinas Perikanan dan Pangan
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.	Jumlah anak balita yang memiliki status gizi TB/U dibawah - 2SD	%	<18%	<17%	<14%				DAK	Kota Padang	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Jumlah anak balita yang memiliki status gizi BB/TB dibawah - 2SD	%	<5%	<5%	<5%				DAK	Kota Padang	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).											
	Porgram : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat									DAK	Kota Padang	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	84	85	86	-	-	232.295.500	APBD	Kota Padang	Dinas Perikanan dan Pangan
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	84	85	86	-	-	232.295.500	APBD	Kota Padang	Dinas Perikanan dan Pangan
							-	-				
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Jumlah ibu hamil dengan kadar hemoglobin <12 mmHG	%	<18%	<17%	<16%						
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan											
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan											
	Program : Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang diterima oleh kelompok tani	%	100	100	100	-	-	naik	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah lokasi pelayanan penyuluhan pertanian	Kecamtan	11	11	11	-	-	naik	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
	Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah bimtek petani bagi pelaku agribisnis	orang	40	40	60	-	-	naik	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bimtek bagi petani /pengurus kelembagaan petani	orang	51	51	60	-	-	naik	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah peternak yang dilatih	orang	100	100	150	-	-	naik	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah peternak yang difasilitasi asuransinya	peternak	300	300	300	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.	Jumlah jenis sarana pertanian yang diadakan	jenis						3.784.819.017	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah jenis sarana pertanian yang diadakan	jenis						3.784.819.017	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit manggis yg didistribusikan pada kawasan tematik	btng	3430	4000	4000	-	-	3.784.819.017	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit perkebunan yang distribusikan	btg kakao	1000	3000	3000	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sarana pendukung pertanian yang digunakan	item	16	0	2	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang difasilitasi pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK	keltan	265	0	0	0	0		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sosialisasi pupuk bersubsidi	kali	7						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok yang mengolah UPPO		0						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah pelatihan SL-GAP tanaman buah		0						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Jumlah kelompok tani yang diberikan bantuan benih sayuran dan pupuk		0						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kebun bibit yang dilakukan pengembangan bibit buah buahan	unit	1						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bantuan bibit yang diberikan	btg kakao	1950						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit untuk perluasan areal perkebunan yang dikembangkan	btg/5ha	6375						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bantuan sambung pucuk	batang	1000						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bantuan sambung samping kakao	batang	500						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit tanaman perkebunan	btg	6375						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah SL jajar legowo yang diberikan	kali	5						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bantuan benih padi yang diberikan	kg	1400						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kampung tematik manggis yang dikembangkan	kec	1						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kampung tematik manggis yang dikembangkan								APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kampung tematik tanaman perkebunan yang dikembangkan								APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Pembangunan dan pengembangan sentra produksi tanaman hias dikampung tematik flori								APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah persentase Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							13.970.400.000	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah penyediaan pupuk kompos yang distribusikan pada kawasan desa organik	TON		15	15	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah penyediaan sarana pada kawasan desa organik	Ball		6	6	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah penyediaan bibit perkebunan (Coklat dan Kopi)	btg		3000	3000	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sarana perkebunan (pupuk)	kg		600	600	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Luas tanah yang dibutuhkan untuk pembibitan ternak dan Pertanian	m²		1300	1300	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Penumbuhan Kelompok Penangkar Benih Padi yang fasilitasi pelabelan dan sertifikasi benih	kel		10	10	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang diberikan bantuan benih padi dan Pupuk	kel		25	25	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang difasilitasi pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK	kel		265	265	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sosialisasi pupuk bersubsidi	kali		0	0	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok yang mengolah UPPO	kel		50	50	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah petani UP3HP komoditi perkebunan yang dilatih dan dibina	kel		30	30	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah petani UP3HP komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih dan dibina	kel		20	20	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Unit Usaha PPHP komoditi Peternakan yang dilatih dan dibina	unit usaha		20	20	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang diberikan bantuan benih sayuran dan pupuk	keltan		10	10	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit untuk perluasan areal perkebunan yang dikembangkan	btg/5ha		6375	6375	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sosialisasi AUTP dan sosialisasi UPJA yang dilakukan	kali		1	1	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
	Program: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								2.454.322.630		KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Satu Daerah Dalam Daerah Kabupaten/Kota Lain								2.454.322.630		KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang didistribusikan kepada kelompok	ekor	2518	1107	350	-	-	2.454.322.630		KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
#####	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.											
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.											
	Program: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian										
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian										
	Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dilaksanakan	unit	8	2	2			1.008.697.434			
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.											
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.											
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.											
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.											
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.											
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.											
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA												
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).											
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan											
	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota											
	Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	1	1	1			6.263.141.600	APBN, APBD	Kota Padang	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota											
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	1	1	1			2.014.161.700	APBN, APBD	Kota Padang	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	(a) persentase persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	%	100	100	100				APBN, APBD	Kota Padang	Dinas Kesehatan
		(b) persentase persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100				APBN, APBD	Kota Padang	Dinas Kesehatan
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	(a) menurunnya kasus kematian Balita	orang	101	98	95				APBN, APBD	Kota Padang	Dinas Kesehatan
		(b) menurunnya kasus kematian Bayi	orang	93	96	93				APBN, APBD	Kota Padang	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya kasus Kematian Neonatal	orang	74	71	68	-	-		APBN, APBD	Kota Padang	Dinas Kesehatan
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	ODHA On ARV	%	50	50	55				APBN, APBD	Kota Padang	Dinas Kesehatan
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Success Rate TB	%	88	89	90				APBN, APBD	Kota Padang	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	PE pada 20 kasus, pemberian OAM	kasus	20	20	20				APBN, APBD	Kota Padang	Dinas Kesehatan

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
#####	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											
	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dana yang dibutuhkan Jumlah aplikasi smart city usulan perangkat daerah yang dilaksanakan Persentase jumlah aplikasi smart city sesuai standar dan dikelola dengan baik, Persentase kehadiran jumlah peserta pelatihan SDM TIK Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	Persentase Pengelolaan e- Government di Lingkup Pemerintah Kota	100%	100%	100%				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	KOMINFO
4.4.1.(a))	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.											
#####	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.											
4.6.1.(a))	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.											
#####	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.											
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).											
4.a.1.[a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.											
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.											
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.											
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN												
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.											
	Program :Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	persen	50	50	75						
	Kegiatan : Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah dan kewenangan kabupaten/kota	persentase lembaga PUG yang aktif	persen	75	75	75						
	Sub Kegiatan : koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah perwako dan perda PUG yang di susun	dokumen	0	2	0			100.000.000	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
	Sub Kegiatan : koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta Rakor PUG	orang	100	200	200			276.514.550	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta bimtek PUG	orang	110	110	110			631.013.100	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
	Sub Kegiatan : Sosialisasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG			0	100	100						
	Kegiatan : Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan	persen	40	40	50						
	Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah nominasi pemilihan perempuan tangguh dan inspiratif	orang	22	22	22			592.644.600	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
		Jumlah peserta calon anggota legislatif perempuan yang mengikuti pembekalan	orang	0	100	100						
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase capaian Pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan sesuai standar oleh P2T2A	persen	100	100	100						
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang telah dilakukan pembinaan tentang pencegahan kekerasan perempuan	kel	104	104	104						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	orang	200	500	500			285.426.350	APBD	Kota padang	DP3AP2KB
		Jumlah peserta workshop pengurus lembaga layanan	orang	60	60	60						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan Kasus perempuan yang di tangani	kasus	40	35	30			214.560.150	APBD	Kota padang	DP3AP2KB
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan yang disediakan bagi korban kekerasan	persen	100	100	100						
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga penyuluh dan pendamping P2T2A	orang	2	2	2			435.144.300	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
		Jumlah peserta sosialisasi penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan	orang	80	100	120						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang dilatih	orang	15	15	15			160.590.000	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus oleh lembaga yang di tunjuk	persen	100	100	100						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rumah aman yang di sediakan bagi perempuan korban kekerasan	rumah	20	20	20			204.057.050	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapat pembinaan	persen	40	50	50						
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase TP PKK yang aktif	persen	100	100	100						
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan dan peserta bimtek Gerakan PKK		300	400	500			1.937.214.081	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
		Jumlah peserta Jambore		50	50	50						
		Jumlah kelompok masyarakat yang dinilai tk. Kota		22	22	22						
		Jumlah kelompok masyarakat yang dinilai tk. Propinsi		6	6	6						
		Jumlah kelompok masyarakat yang dinilai tk. Nasional		1	1	1						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang aktif	persen	100	100	100						
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi OPD, PKK Kec dan kelurahan	kali	5	5	5			1.110.916.142	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
		Jumlah peringatan hari bersejarah perempuan	kali	3	3	3						
		Jumlah peserta Gebyar Kader PKK se Kota Padang	orang	500	500	500						
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyajikan data terpilah	persen	50	50	60						

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data oleh perangkat daerah	persen	100	100	100						
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil gender dan anak	buku	60	60	60			202.691.797	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pererta bimtek/pelatihan pengumpulan , pengelolaan, analisis dan penyajian data gender dan anak	orang	0	50	50			120.000.000	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator penilaian KLA yang terpenuhi	persen	80	85	85						
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah kota Padang yang ramah anak	lembaga	50	55	60						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	Jumlah peserta pelatihan konvensi Hak Anak	orang	80	80	80			464.148.650	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi gugus Tugas KLA	kali	7	7	7						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan layak anak yang aktif	kel	22	33	44						
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang melakukan Psiko Edukasi melalui Puspaga	orang	250	200	200			822.922.825	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
		Jumlah tenaga Psikolog dan Administrasi di PUSPAGA	orang	3	3	3						
		Jumlah tenaga layanan pengasuhan anak	orang	4	4	4						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi KLA	orang	100	100	100			1.196.647.400	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
		Jumlah puskesmas yang di review sebagai puskesmas ramah anak	puskesmas	23	23	23						
		Jumlah pembinaan yang dilakukan di kec dan Kelurahan Layak Anak	kali	22	22	22						
		Jumlah peserta pelatihan sekolah ramah anak	orang	200	200	200						
		Jumlah peserta pelatihan 2P bagi Forum Anak	orang	50	50	50						
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah peserta Capacity Building bagi Forum Anak	orang	50	50	50			747.060.675	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
		Jumlah Peserta peringatan Hari Anak Nasional Tk. Kota	orang	300	300	300						
		Jumlah Peserta Semiloka bagi Komunitas Peduli Anak	orang	0	60	80						
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Semiloka Bagi Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) Kota Padang	orang	0	50	50			350.000.000	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	persen	100	100	100						
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang telah dilakukan pembinaan tentang pencegahan kekerasan anak	kel	104	104	104						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	kali	0	3	3			280.000.000	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
		Jumlah Peserta TOT Penguatan bagi SDM Lembaga Layanan	orang	0	50	50						
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan yang tersedia	lembaga	107	107	107						
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga penyuluh dan pendamping P2TP2A	orang	2	2	2			526.545.700	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
		Jumlah peserta pelatihan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak	orang	25	25	25						
		Jumlah peserta sosialisasi penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak	orang	50	50	50						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penanganan kasus anak	kali	16	16	16			1.140.225.000	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PATBM yang aktif di Kota Padang	persen	35	40	45						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah peserta sosialisasi PATBM	orang	0	550	550			389.428.000	APBD	Kota Padang	DP3AP2KB
		Jumlah peserta bimtek PATBM	orang	104	104	104						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).											
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.											
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.											
6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.											
6.b.1.	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.											
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA												
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.											
#####	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.											
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.											
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.											
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.											
7.3.1*	Intensitas energi primer.											
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.											
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)											
TUJUAN 8. MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA												
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.											
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI											
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri											
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran yang dilakukan	9 Kali	#####	#####	#####			2.903.219.982	APBD	Kota Padang	Dinas Perdagangan
	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pedagang yang dibina	11 Kelompok	#####	#####	#####			3.005.902.920	APBD	Kota Padang	Dinas Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR											
	Kegiatan Penyerenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah kerjasama yang dilakukan	2 negara	#####	#####	#####			337.359.050	APBD	Kota Padang	Dinas Perdagangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pembinaan yang dilakukan	50 orang	#####	#####	#####			354.721.200	APBD	Kota Padang	Dinas Perdagangan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar yang dilakukan	11 Kec	#####	#####	#####			1.117.066.054	APBD	Kota Padang	Dinas Perdagangan
8.1.1.(a)	PDB per kapita.											
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	%	20	20	20	-	-	31.999.332.930	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata	%	20	20	20	-	-	1.100.000.000	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Daya tarik wisata dengan tahapan pengembangan	Lokasi	4	4	4	-	-	800.000.000	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan Daya Tarik Wisata	dokumen	8	8	8	-	-	300.000.000	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata	%	20	20	20	-	-	30.622.207.930	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata	dokumen	4	6	8	-	-	4.035.160.500	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikembangkan	Lokasi	4	4	4	-	-	10.221.231.750	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata	Unit	4	4	4	-	-	11.365.815.680	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	laporan	3	3	3	-	-	5.000.000.000	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penetapan tanda daftar usaha pariwisata	%	20	20	20	-	-	277.125.000	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah monitoring pelaku usaha pariwisata yang mempunyai izin	kali	360	380	400	-	-	277.125.000	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata	%	20	20	20	-	-	12.229.425.310	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	%	20	20	20	-	-	12.229.425.310	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	dokumen	5	5	5	-	-	1.167.907.200	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	laporan	3	4	3	-	-	4.625.961.900	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	dokumen	10	50	50	-	-	648.903.750	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	dokumen	3	10	15	-	-	5.786.652.460	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (e-kraf) usahanya	%	9,5	10	10,5	-	-	3.734.689.425	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	%	20	20	20	-	-	2.973.752.925	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Laporan	3	3	3	-	-	1.777.077.925	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Orang	160	160	160	-	-	1.196.675.000	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekraf	Pesentase Kapasitas Pelaku Ekraf yang dikembangkan	%	20	20	20	-	-	760.936.500	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Pelatihan,Bimtek dan Pendampingan Ekraf	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan Bimtek dan Pendampingan Ekraf	Orang	40	40	40	-	-	760.936.500	APBD	Kota Padang	Dinas Pariwisata
	Program: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah jenis sarana pertanian yang diadakan	jenis				-		17.755.219.017	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah jenis sarana pertanian yang diadakan	jenis						17.755.219.017	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bibit manggis yg didistribusikan pada kawasan tematik	btng	3430	4000	4000	-	-	3.784.819.017	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit perkebunan yang distribusikan	btg kakao	1000	3000	3000	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sarana pendukung pertanian yang digunakan	item	16	0	2	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang difasilitasi pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK	keltan	265	0	0	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sosialisasi pupuk bersubsidi	kali	7						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok yang mengolah UPPO		0						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah pelatihan SL-GAP tanaman buah		0						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang diberikan bantuan benih sayuran dan pupuk		0						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kebun bibit yang dilakukan pengembangan bibit buah buahan	unit	1						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bantuan bibit yang diberikan	btg kakao	1950						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit untuk perluasan areal perkebunan yang dikembangkan	btg/5ha	6375						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bantuan sambung pucuk	batang	1000						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bantuan sambung samping kakao	batang	500						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit tanaman perkebunan	btg	6375						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah SL jajar legowo yang diberikan	kali	5						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bantuan benih padi yang diberikan	kg	1400						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kampung tematik manggis yang dikembangkan	kec	1						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kampung tematik manggis yang dikembangkan								APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kampung tematik tanaman perkebunan yang dikembangkan								APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Pembangunan dan pengembangan sentra produksi tanaman hias dikampung tematik flori								APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
										APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah persentase Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							13.970.400.000	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah penyediaan pupuk kompos yang distribusikan pada kawasan desa organik	TON		15	15	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah penyediaan sarana pada kawasan desa organik	Ball		6	6	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah penyediaan bibit perkebunan (Coklat dan Kopi)	btg		3000	3000	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sarana perkebunan (pupuk)	kg		600	600	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Luas tanah yang dibutuhkan untuk pembibitan ternak dan Pertanian	m²		1300	1300	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Penumbuhan Kelompok Penangkar Benih Padi yang fasilitasi pelabelan dan sertifikasi benih	kel		10	10	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang diberikan bantuan benih padi dan Pupuk	kel		25	25	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang difasilitasi pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK	kel		265	265	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).											
#####	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).											
8.7.1.(a))	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur											
#####	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.											
8.8.1.(a))	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.											
#####	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang- undangan negara terkait.											
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.											
8.9.1.(a))	Jumlah wisatawan mancanegara.											
8.9.1.(b))	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.											
8.9.1.(c))	Jumlah devisa sektor pariwisata.											
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.											
8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.											
8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.											
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI												
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
9.1.1.(a))	Kondisi mantap jalan kota											
	B.1	Program : Penyelenggaraan Jalan	Prosentase Penuhan infrastruktur kebinamargaan	Persen								
		Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persen								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
#####	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.											
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/ berkembang dengan tarif nol persen.											
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).											
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.											
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN												
#####	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.											
	Program : Kawasan Permukiman											
	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman											
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh b. Jumlah dokumen inventarisasi dan verifikasi terhadap data pendukung SPM Bidang sanitasi dan air minum c. Jumlah dukungan pelaksanaan kegiatan P2KP/Kotaku d. Jumlah rapat/koordinasi kawasan permukiman kumuh e. Jumlah dokumen inventarisasi capaian kumuh	a. Laporan b. Dokumen c. Kegiatan d. Koordinasi e. Dokumen	- 1 1 4 1	1 1 1 2 2	1 1 1 2 2		0 0	12.236.308.050	APBD dan APBN	Kota Padang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Renstra Dperkim 2021-2024 dan Estimasi 2025-2026)
	Program : Kawasan Permukiman											
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	unit rumah	60	50	55	-	-	23.483.000.000	APBD dan APBN	Kota Padang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak huni Besersa PSU	Dokumen	1	1	1	-	-	1.500.000.000	APBD	Kota Padang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh b. Jumlah kegiatan pendampingan pelaksanaan DAK Air Minum Kota Padang c. Jumlah kegiatan pendampingan pelaksanaan Pamsimas Kota Padang d. Jumlah Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Program Sanimas IDB di Kota Padang e. Jumlah pendampingan pelaksanaan DAK sanitasi Kota Padang f. Jumlah kegiatan pendampingan program HALS	a. Laporan b. Kegiatan c. Kegiatan d. Kegiatan e. Kegiatan f. Kegiatan	- 1 1 - 1 -	2 - 1 - - 1	2 - 1 - - 1		- -	5.360.624.100	APBD dan APBN	Kota Padang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Renstra Dperkim 2021-2024 dan Estimasi 2025-2026)

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	a. Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar b. Jumlah Infrastruktur sanitasi layak dilingkungan kawasan permukiman (APBD) c. Jumlah Infrastruktur air minum layak dilingkungan kawasan permukiman (APBD) d. Jumlah Infrastruktur sanitasi layak dilingkungan kawasan permukiman (DAK) e. Jumlah rumah yang terlayani sarana Infrastruktur jaringan air minum dan sanitasi yang memadai di lingkungan kawasan permukiman (PAMSIMAS) f. Jumlah rumah yang terlayani sarana Infrastruktur jaringan air minum yang memadai di lingkungan kawasan permukiman (DAK) g. Jumlah Infrastruktur sanitasi layak di lingkungan kawasan permukiman (HALS) h. Jumlah pemugaran/peremajaan PSU kawasan kumuh	a. Ha b. unit c. lokasi/SR d. SR e. SR f. unit g. unit h. lokasi	- 45 4 720 57 806 - 3	20 412 48 - - - 38 6	25,01 300 200 - 85 - 500 5	-	-	60.178.415.836	APBD dan APBN	Kota Padang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Renstra Dperkim 2021-2024 dan Estimasi 2025-2026)
	Program :Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh											
	Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	5	5	5	-	-	6.755.000.000	APBD	Kota Padang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh de3ngan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen	1	1	1	-	-	250.000.000	APBD	Kota Padang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											
#####	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			#####	#####	#####	-	-	98.785.840.965	PAD	Kota Padang	Dishub
	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			#####	#####	#####	0	0	98.785.840.965	PAD	Kota Padang	Dishub
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik											
	Program: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1). Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk. 2) Tingkat fatalitas kecelakaan. 3) Persentase sarana angkutan kota yang berkualitas										
	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah angkutan umum masal trans padang yang beroperasi dengan baik	unit	#####	#####	#####	-	-	100.606.791.965	PAD	Kota Padang	Dishub
	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah angkutan umum masal trans padang yang disediakan	unit	#####	#####	#####	0	0	98.785.840.965	PAD	Kota Padang	Dishub

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan	Dokumen	#####	#####	#####	-	-	1.820.951.000	PAD	Kota Padang	Dishub
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum											
	Program: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1). Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk. 2) Tingkat fatalitas kecelakaan. 3) Persentase sarana angkutan kota yang berkualitas										
	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah angkutan umum masal trans padang yang beroperasi dengan baik	unit	65	75	75	-	-	177.852.965.889	PAD	Kota Padang	Dishub
	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah angkutan umum masal trans padang yang disediakan	unit	65	75	75	-	-	174.792.014.889	PAD	Kota Padang	Dishub
	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan	Dokumen	1	1	1	-	-	3.060.951.000	PAD	Kota Padang	Dishub
#####	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk											
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk											
#####	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis											
#####	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)											
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)											
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
	Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											
	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun sampai di sah kan secara legal	Dokumen	1	2	2	-	-	546.122.000	APBD	KOTA PADANG	BPBD
	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	15000	20000	20000	-	-	2.787.848.492	APBD	KOTA PADANG	BPBD
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						-	-				
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen RPB yang disusun	Dokumen	1	1	1	-	-	477.000.000	APBD	KOTA PADANG	BPBD
	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	40	45	45	-	-	2.362.900.000	APBD	KOTA PADANG	BPBD
	Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	3	1	1	-	-	5.810.411.980	APBD	KOTA PADANG	BPBD

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkungan kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	28.122	28.122	28.122						DLH (Target Renstra tahun 2019-2024)
#####	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)											
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.											
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS											
	Program : Penyelenggaraan Penata Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Persen									
	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tatab Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten /Kota	Persen									
	Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen Legalisasi Perda RDTR	dokumen	#####			-	-	498.206.000	APBD	Kota Padang	DPUPR
	Program : Penyelenggaraan Penata Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persen									
	Kegiatan : Validasi Data Tanah Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tanah Cadangan Pengganti (ICP)	Jumlah dokumen data tanah fasum, fasos TCP dan RTH Kota Padang yang akurat	Berkas									
	Sub Kegiatan : Pelayanan Implementasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Berkas Pelayanan Implementasi Perencanaan Tata Ruang KRK -PRK	dokumen	#####	#####	#####	-	-	1.082.640.000	APBD	Kota Padang	DPUPR
	Program : Penyelenggaraan Penata Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen									
	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Prosentasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Persen									
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	dokumen	#####	#####	#####	-	-	2.021.196.200	APBD	Kota Padang	DPUPR
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana											
11.c.1	-											
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal											
	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum											
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota											
	Sub Kegiatan : Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sidang Tipiring dan Pentelesaian Kasus	Kasus	55	40	200	-	-	8.547.978.250,00	APBD	SATPOL PP	
	Kegiatan : Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota						-			APBD	SATPOL PP	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati	Jumlah Kasus yang ditangani oleh Sekber PPNS	Kasus	55	40	200	-	-	5.125.077.693,00	APBD	SATPOL PP	
	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum											
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota											
	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Anggota Satpol PP dalam Penanggulangan Keamanan Kota	Orang	400	400	560	-	-	259.298.065.499,00	APBD	SATPOL PP	
	Sub Kegiatan : Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertibn dan Penanganan Unjuk Rasa dan kerusuhan masa.	Jumlah Operasi Keamanan dan Ketertiban yang dilakukan	Kali	72	84	84	-	-	37.204.669.289,00	APBD	SATPOL PP	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan yang terkena dampak penegakan perda dan perkada	Tahun	1	1	1	-	-	149.209.000,00	APBD	SATPOL PP	
	Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah ASN yang menguasai latihan penanggulangan bencana PHH, SAR, Beladiri dan Berganda	Orang	400	200	470	-	-	7.711.051.026,00	APBD	SATPOL PP	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Linmas dan Siskamling perkelurahan yang dilakukan	Kelurahan	104	104	104	-	-	3.390.677.478,00	APBD	SATPOL PP	
		Jumlah peserta dan undangan upacara HUT Satpol PP dan Satuan Hansip / Linmas	Peserta		250	850	-	-	2.092.582.212,00	APBD	SATPOL PP	
							-					
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN												
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											
	Program: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang disediakan							3.784.819.017	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
	Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bibit manggis yg didistribusikan pada kawasan tematik	btng	3430	4000	4000	-	-	3784819017	APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit perkebunan yang distribusikan	btg kakao	1000	3000	3000	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sarana pendukung pertanian yang digunakan	item	16	0	2	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang difasilitasi pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK	keltan	265	0	0	-	-		APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah sosialisasi pupuk bersubsidi	kali	7						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok yang mengolah UPPO		0						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah pelatihan SL-GAP tanaman buah		0						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang diberikan bantuan benih sayuran dan pupuk		0						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kebun bibit yang dilakukan pengembangan bibit buah buahan	unit	1						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bantuan bibit yang diberikan	btg kakao	1950						APBD	KOTA PADANG	DINAS PERTANIAN

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											
	Sub Kegiatan : Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	1	1 -	-		404.076.800	APBD	KOTA PADANG	BPBD
	Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1	1 -	-		2.898.843.400	APBD	KOTA PADANG	BPBD
	Sub Kegiatan : Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	1	1 -	-		157.109.750	APBD	KOTA PADANG	BPBD
	Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang						355.530.650	APBD	KOTA PADANG	BPBD
	Program : Pengelolaan Pendidikan											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	-	-	900.000.000,00	APBD	Kota Padang	Disdikbud
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>											
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana											
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report (BUR)</i> dan <i>National Communications</i>											
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun											
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)											
	Program :PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	dokumen	0	1	1			100.000.000	APBD		DLH (Target Renstra 2019 s/d 2024
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)											
#####	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.											
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											
13.a.1	Jumlah dana yang disediakan dan mobilisasinya dalam USD per tahun terkait dengan keberlanjutan mobilisasi dana untuk mencapai komitmen 100 milyar USD sampai tahun 2025											
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (<i>budget tagging</i>) untuk pendanaan perubahan iklim											
13.b.1	Jumlah negara- negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan <i>nationally determined contributions</i> , strategi jangka panjang, rencana nasional adaptasi, dan strategi yang dilaporkan dalam adaptation communications dan national communications											

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
#####	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya											
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)											
#####	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari											
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju											
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan											
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi											
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan											
15.5.1*	Indeks Daftar Merah											
	(Red-list index)											
15.6.1*	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata											
#####	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal											
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											
15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)											
#####	(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan											
	(b) integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi											
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis											
15.a.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan											
	(b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi											
	dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati											
15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan											
15.b.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan											
	(b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi											
	dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati											
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan											
15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap											
15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT ANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN												

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
#####	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.											
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)											
#####	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).											
#####	Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.											
#####	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.											
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).											
#####	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.											
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.											
	Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	Persen	100	100	100						BPKAD
	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kota Padang	Persen	100	100	100			9.786.675.745,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	300	300	300			1.275.121.608,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	300	300	300			1.611.290.011,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	52	52			592.018.822,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	52	52			513.345.149,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	52	52			1.010.560.891,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	52	52			940.233.588,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	700	700	700			1.368.719.677,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	500	500	500			1.277.602.750,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	360	360	360			585.260.265,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen		25	25			198.349.646,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen		45	45			234.810.182,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen		15	15			179.363.156,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	Opini atas laporan keuangan	-	WTP	WTP	WTP	-	-	711.028.400,00	APBD	Padang	Inspektorat

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
#####	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.											
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).											
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).											
#####	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.											
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi											
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan											
16.7.2.(c)	Indeks Kesenjangan											
#####	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara- negara berkembang di Organisasi Internasional.											
16.8.1.(a.)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.											
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.											
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun											
#####	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.											
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.											
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).											
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.											
16.10.2.*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.											
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif											
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.											
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.											
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITAISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN												
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.											
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pekerjaan rehab sarana perdagangan	19 lokasi	#####	#####	#####			28.570.563.816	APBD	Kota Padang	Dinas Perdagangan
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.											
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.											
	Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	Persen	100	100	100						BPKAD
	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kota Padang	Persen	100	100	100			9.786.675.745,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	300	300	300			1.275.121.608,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	300	300	300			1.611.290.011,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	52	52			592.018.822,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	52	52			513.345.149,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	52	52			1.010.560.891,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	52	52			940.233.588,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	700	700	700			1.368.719.677,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	500	500	500			1.277.602.750,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	360	360	360			585.260.265,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen		25	25			198.349.646,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen		45	45			234.810.182,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
	Sub Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen		15	15			179.363.156,00	PAD	KOTA PADANG	BPKAD
#####	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara- negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/ Komite Bantuan Pembangunan.											
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB											
#####	Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment/ FDI</i>), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.											
	Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nilai PMA	US \$	#####	#####	#####	-	-	500.000,00	APBD	Padang	DPMP TSP

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
#####	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.											
#####	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).											
17.17.1 .(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.											
17.17.1 .(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).											
17.17.1 .(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Jumlah Nilai PMDN	Juta Rp.						2.332.095.700,00	APBD	Padang	
	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal											
	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota											
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal											
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal											
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal											
#####	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs											
17.18.1 .(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											
17.18.1 .(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											
17.18.2 *	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.											
17.18.3 *	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.											
#####	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.											
17.19.1 .(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	persen	#####	#####	#####	-	-	1.088.252.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	persen	#####	#####	#####	-	-	1.088.252.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Survey Statistik Sektoral Publikasi Daerah Dalam Angka dan Profil Kota	Survey Dokumen	#####	#####	#####			465.638.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17.19.1 .(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
#####	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan	1. Persentase cakupan penerbitan akta kelahiran	Persentase	97	98	99	-	-	1.272.865.259,00	APBD	Kota Padang	Disdukcapil
	b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	2. Persentase Cakupan penerbitan akta kematian	Persentase	100	100	100	-	-		APBD	Kota Padang	Disdukcapil
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.						-	-				
17.19.2 . (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>).	Jumlah data registrasi kelahiran	Data	12000	25000	26000	-	-	250.000.000,00	APBD	Kota Padang	Disdukcapil
		Jumlah data registrasi kematian	Data	500	1500	1500	-	-				

CATATAN : PROGRAM KEGIATAN PADA RPJMD KOTA

MATRIK PROGRAM KEGIATAN UNTUK MENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (RAD TPB) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022-2026

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUNAN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN												
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.											Dinas Sosial
	Program : Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan NAPZA di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	40	50	60	70	80	6,584,060,000.00	APBD	Kab. Agam	Dinas Sosial
	Kegiatan :Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan NAPZA yang tertangan	ORANG	1126	2253	2265	2265	2265				Dinas Sosial
	Program :PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Apikasi	2	2	2	2	2	3,402,730,000.00			Dinas Sosial
	Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase terpenuhinya pemeliharaan anak-anak terlantar	%	0	0	100	100	100				Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	orang	43420	43420	43330	43330	43330				
												Dinas Sosial
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan	perusahaan	2	2	2	2	2	10,079,700,000.00			Dinas Sosial
	kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota	orang	353	353	353	353	353				
	Kegiatan :Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasinya pengumpulan sumbangan	%	0	100	100	100	100				
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	20	40	50	60	70	6,534,060,000.00			Dinas Sosial
		Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang tertangan	%	20	40	50	60	70				
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah gelandangan atau pengemis diluar panti yang tertangan	orang	0	0	50	50	50				
	kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah lanjut usia yang tertangan	orang	227	227	227	227	227				
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis											Dinas Sosial
	Program : Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan NAPZA di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	40	50	60	70	80	6,584,060,000.00	APBD	Kab. Agam	Dinas Sosial
	Kegiatan :Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan NAPZA yang tertangan	ORANG	1126	2253	2265	2265	2265				Dinas Sosial
	Program :PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Apikasi	2	2	2	2	2	3,402,730,000.00			Dinas Sosial

	Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase terpenuhinya pemeliharaan anak-anak terlantar	%	0	0	100	100	100				Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	orang	43420	43420	43330	43330	43330				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan	perusahaan	2	2	2	2	2	10,079,700,000.00			Dinas Sosial
	kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota	orang	353	353	353	353	353				
	Kegiatan :Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasinya pengumpulan sumbangan	%	0	100	100	100	100				
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	20	40	50	60	70	6,534,060,000.00			Dinas Sosial
		Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang tertangani	%	20	40	50	60	70				
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah gelandangan atau pengemis diluar panti yang tertangani	orang	0	0	50	50	50				
	kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah lanjut usia yang tertangani	orang	227	227	227	227	227				
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi											Dinas Sosial
	Program : Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan NAPZA di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	40	50	60	70	80	6,584,060,000.00	APBD	Kab. Agam	Dinas Sosial
	Kegiatan :Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan NAPZA yang tertangani	ORANG	1126	2253	2265	2265	2265				Dinas Sosial
	Program :PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Apikasi	2	2	2	2	2	3,402,730,000.00			Dinas Sosial
	Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase terpenuhinya pemeliharaan anak-anak terlantar	%	0	0	100	100	100				Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	orang	43420	43420	43330	43330	43330				
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	20	40	50	60	70	6,534,060,000.00			Dinas Sosial
		Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang tertangani	%	20	40	50	60	70				
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah gelandangan atau pengemis diluar panti yang tertangani	orang	0	0	50	50	50				
	kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah lanjut usia yang tertangani	orang	227	227	227	227	227				
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.											
	Program : Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan NAPZA di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	40	50	60	70	80	6,584,060,000.00	APBD	Kab. Agam	Dinas Sosial

	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan NAPZA yang tertangani	ORANG	1126	2253	2265	2265	2265				Dinas Sosial
												Dinas Sosial
	Program : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Apikasi	2	2	2	2	2	3,402,730,000.00			Dinas Sosial
	Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase terpenuhinya pemeliharaan anak-anak terlantar	%	0	0	100	100	100				Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	orang	43420	43420	43330	43330	43330				
												Dinas Sosial
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan	perusahaan	2	2	2	2	2	10,079,700,000.00			Dinas Sosial
	kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota	orang	353	353	353	353	353				
	Kegiatan : Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasinya pengumpulan sumbangan	%	0	100	100	100	100				
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	20	40	50	60	70	6,534,060,000.00			Dinas Sosial
		Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang tertangani	%	20	40	50	60	70				
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah gelandangan atau pengemis diluar panti yang tertangani	orang	0	0	50	50	50				
	kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah lanjut usia yang tertangani	orang	227	227	227	227	227				
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan.											Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama	773,328,080,000.00			Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	226,293,894,841	DAU		Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.											DPMPTSP- Naker
	Program : Hubungan Industrial											
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online	Dokumen	5	4	5	4	4	461,000,000	DAU	Kab. Agam	
	Sub Kegiatan : Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Dokumen	5	4	5	4	4	461,000,000	DAU	Kab. Agam	

	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur dan Skala Upah, dan LKS Bipatrit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	Dokumen	5	4	5	4	4	461,000,000	DAU	Kab. Agam	
	Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Kasus	40	35	40	36	30	111,000,000	DAU	Kab.Agam	
	Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	40	35	40	36	30	111,000,000	DAU	Kab.Agam	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Perusahaan	4	2	2	3	2	55,000,000	DAU	Kab.Agam	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Perusahaan	50	45	40	35	30	55,000,000	DAU	Kab.Agam	
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.											Dinas Kesehatan, DPUTR
1.03.06	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistik Air Limbah.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	77.57	81	83	85	87	10,806,000.06	DAU, DAK	KAB.AGAM	PUTR
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistik Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi layak dan aman.	SR	489								
	Sub Kegiatan : Pembangunan /Penyediaan Sistik Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota.	Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya	Unit	1								
		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Nagari Salareh Aia Kecamatan	Unit	290								
		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Nagari Sitalang Kecamatan Ampek	Unit	202								
		Pengadaan Truk Tinja Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung	Unit	1								
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Operasional Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi	Bulan	12								
		Garasi Truk Tinja	M2	33								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi										
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Persen	75 persen	79 persen	83 persen	87 persen	91 persen	3,574,100,000	APBD	Kab. Agam	
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencnana	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana	Persen	74.96 persen	76.16 persen	77.36 persen	78.56 persen	79.77 persen	3,574,100,000	APBD	Kab. Agam	
	Sub Kegiatan Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen										
	Sub Kegiatan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Laoran Kaili Cepat Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi										
	Sub Kegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.											Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, DPMN, Dinas Pariwisata Pemuda dan
	Program : Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan NAPZA di luar panti yang terpenuhi	%	40	50	60	70	80	6,584,060,000.00	APBD	Kab. Agam	Dinas Sosial
	Kegiatan :Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan NAPZA yang terdapat	ORANG	1126	2253	2265	2265	2265				Dinas Sosial
												Dinas Sosial
	Program :PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Apikasi	2	2	2	2	2	3,402,730,000.00			Dinas Sosial
	Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase terpenuhinya pemeliharaan anak-anak terlantar	%	0	0	100	100	100				Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	orang	43420	43420	43330	43330	43330				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan	perusahaan	2	2	2	2	2	10,079,700,000.00			Dinas Sosial
	kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota	orang	353	353	353	353	353				
	Kegiatan :Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasinya pengumpulan sumbangan	%	0	100	100	100	100				
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	20	40	50	60	70	6,534,060,000.00			Dinas Sosial
		Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang terdapat	%	20	40	50	60	70				
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah gelandangan atau pengemis diluar panti yang tertangani	orang	0	0	50	50	50				
	kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah lanjut usia yang tertangani	orang	227	227	227	227	227				

1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.												Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
	Program :PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Apikasi	2	2	2	2	2	3,402,730,000.00				Dinas Sosial
	Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase terpenuhinya pemeliharaan anak-anak terlantar	%	0	0	100	100	100					Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	orang	43420	43420	43330	43330	43330					
													Dinas Sosial
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan	perusahaan	2	2	2	2	2	10,079,700,000.00				Dinas Sosial
	kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota	orang	353	353	353	353	353					
	Kegiatan :Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasinya pengumpulan sumbangan	%	0	100	100	100	100					
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pemenuhan Standar Pelayanan											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar											
	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	sekolah	21 sekolah	21 sekolah	21 sekolah	21 sekolah	21 sekolah	2,306,525,501	DAU/DAK	Kab.Agam		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah Dasar yang dibangun	sekolah	50 sekolah	50 sekolah	50 sekolah	50 sekolah	50 sekolah	34,524,664,560	DAU/DAK	Kab.Agam		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama											
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan WC dan Washtafel bagi siswa dan guru SMPN 3 Ampek Angkek	Sekolah	1 Unit	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	3,165,464,102	DAU/DAK	Kab.Agam		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
		Pembuatan Wastafel Sekolah SMP Se Kecamatan Tanjung Mutiara	Sekolah	1 Unit	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah					
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama					
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat padakelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.												Dinas Sosial
	Program :PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Apikasi	2	2	2	2	2	3,402,730,000.00				Dinas Sosial
	Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase terpenuhinya pemeliharaan anak-anak terlantar	%	0	0	100	100	100					Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	orang	43420	43420	43330	43330	43330					
													Dinas Sosial
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan	perusahaan	2	2	2	2	2	10,079,700,000.00				Dinas Sosial
	kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota	orang	353	353	353	353	353					

[illegible]

	Program : Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need) (%)	Persen	15,82	14,79	13,76	12,73	12,5	4,450,000,000	DAK BOKB/DAU	Kab Agam (16 Kec)	
	Kegiatan : Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi sereta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kab/kota	Jumlah Akseptor yang dilayani	Orang	2000	2000	3000	3000	3500	11,785,000,000	DAK BOKB/DAU		
	Sub Kegiatan :Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan Kb ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan Kb ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	laporan	25	25	30	30	35	72,050,000	DAK dan DAU	16 Kecamatan	
	Sub Kegiatan :Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	laporan	1	12	12	12	12	424,560,000	DAK dan DAU	16 Kecamatan	
	Sub Kegiatan :Peningkatan kepesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	1981	2081	2181	2281	2381	4,932,720,000	DAK dan DAU	16 Kecamatan	
	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur (15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.											
	Program : Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need) (%)	Persen	15,82	14,79	13,76	12,73	12,5	4,450,000,000	DAK BOKB/DAU	Kab Agam (16 Kec)	
	Kegiatan : Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi sereta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kab/kota	Jumlah Akseptor yang dilayani	Orang	2000	2000	3000	3000	3500	11,785,000,000	DAK BOKB/DAU		
	Sub Kegiatan :Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan Kb ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan Kb ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	laporan	25	25	30	30	35	72,050,000	DAK dan DAU	16 Kecamatan	
	Sub Kegiatan :Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	laporan	1	12	12	12	12	424,560,000	DAK dan DAU	16 Kecamatan	
	Sub Kegiatan :Peningkatan kepesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	1981	2081	2181	2281	2381	4,932,720,000	DAK dan DAU	16 Kecamatan	
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	8460 orang	8348 orang	8275 orang	8248 orang		2,010,561,500	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	43093 orang	42640 orang	42254 orang	41931 orang		10,988,423,500	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
2.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.											Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				

	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	8460 orang	8348 orang	8275 orang	8248 orang		2,010,561,500	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
2.2.2.(a)	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.										Dinas Kesehatan	
2.2.3*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.										Dinas Kesehatan	
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga TB yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1710 orang	1709 orang	1709 orang	1709 orang	1709 orang	1,858,415,500	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
2.3.1*	Kejadian Malaria per 1000 orang.										Dinas Kesehatan	
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	42,192,188,305	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
2.3.1 (a)	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.										Dinas Kesehatan	
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	42,192,188,305	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
2.3.2*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.										Dinas Kesehatan	
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	42,192,188,305	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
2.4.1	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b)										Dinas Kesehatan	
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				

	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	42,192,188,305	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
2.4.1(a)	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.											Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	42,192,188,305	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
2.5.1*	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.											Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	42,192,188,305	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
2.5.2*	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.											Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	Rp 9,361,111,108.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	Rp 2,178,797,352.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	Rp 2,713,772,964.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2.a.1*	Prevalensi tekanan darah tinggi.											Dinkes, Dinsos, Disdik, Disparpora

	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	88,974	89,341				820,000,000	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.											DINKES
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
2.a.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.											Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	Rp 9,361,111,108.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	Rp 2,178,797,352.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	Rp 2,713,772,964.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2.b.1*	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan											Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
2.c.1*	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis											Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	690 orang	1150 orang	1150 orang	1150 orang	1150 orang	2,914,628,000	DAU	Dinas Kesehatan	

	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.												inas Sosial
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama					
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	690 orang	1150 orang	1150 orang	1150 orang	1150 orang	2,914,628,000	DAU		Dinas Kesehatan	
	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.												Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	Rp 9,361,111,108.00	DAU		Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	Rp 2,178,797,352.00	DAU		Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	Rp 2,713,772,964.00	DAU		Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.												Dinas Kesehatan, Dishub
	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.												DPPKBP3A, DINKES
r	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.												DPPKBP3A
	Total Fertility Rate (TFR).												DPPKBP3A
	Program Pengendalian Penduduk	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	67,5	68	68,5	69	69,65	4,350,000,000	DAK BOKB/DAU		Kab Agam (16 Kec)	
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang di Mutakhirkan	KK	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	900,000,000	DAK BOKB			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	1	1	1	1	1	28,200,000	DAK BOKB			

	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need) (%)	Persen	15,82	14,79	13,76	12,73	12,5	4,450,000,000	DAK BOKB/DAU	Kab Agam (16 Kec)	
	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru	Orang	8200	8200	8200	8200	8200	1,781,151,000	DAK BOKB/DAU		
	Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	3	3	3	3	3	383,950,000	DAK BOKB/DAU		
	Sub Kegiatan : Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	6	9	9	9	9	21,875,000	DAK BOKB	9 Organisasi	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Mini Lokakarya Kecamatan	Jumlah laporan mekanisme operasional program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Rapat koordinasi Mini lokakarya (Minilok)	Laporan	192	192	192	192	192	1,248,000,000	DAK BOKB	16 Kecamatan	
	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.											Dinas Kesehatan
	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.											DPPKBP3A
	Program Pengendalian Penduduk	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	67,5	68	68,5	69	69,65	4,350,000,000	DAK BOKB/DAU	Kab Agam (16 Kec)	
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang di Mutakhirkan	KK	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	900,000,000	DAK BOKB		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	1	1	1	1	1	28,200,000	DAK BOKB		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need) (%)	Persen	15,82	14,79	13,76	12,73	12,5	4,450,000,000	DAK BOKB/DAU	Kab Agam (16 Kec)	
	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru	Orang	8200	8200	8200	8200	8200	1,781,151,000	DAK BOKB/DAU		
	Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	3	3	3	3	3	383,950,000	DAK BOKB/DAU		
	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.											Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).											DINKES, DINSOS
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				

	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	226,293,894,841	DAU	Dinas Kesehatan	
	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.											Dinas Kesehatan, LH
	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.											Dinas Kesehatan, PUTR
	Angka kematian akibat keracunan.											Dinas Kesehatan
	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.											DINKES, KESBANGPOL, SATPOL
	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.											Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2,381,490,500	DAU	Dinas Kesehatan	
	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.											Dinas Kesehatan
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara											Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UK	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	1 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	36,940,910,602	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.											Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas Yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensi	orang		50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	1,493,800,000	DAU	Dinas Kesehatan	
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.											Dinas Kesehatan
	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.											Dinas Kesehatan
	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.											Dinas Kesehatan

TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).												Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama					
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	9646 orang	9587 orang	9528 orang	9462 orang		5,732,116,320	DAU/DAK	Dinas Kesehatan		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	9207 orang	9151 orang	9095 orang	9032 orang		15,633,551,308	DAK	Dinas Kesehatan		
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.												Dinas Kesehatan, DPPKBP3A
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.												Dinas Kesehatan, DPPKBP3A
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama					
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	8460 orang	8348 orang	8275 orang	8248 orang		2,010,561,500	DAU/DAK	Dinas Kesehatan		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	43093 orang	42640 orang	42254 orang	41931 orang		10,988,423,500	DAU/DAK	Dinas Kesehatan		
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.												Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama					
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	8460 orang	8348 orang	8275 orang	8248 orang		2,010,561,500	DAU/DAK	Dinas Kesehatan		
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.												Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama					
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	76 orang	83 orang	83 orang	83 orang	83 orang	965,000,000	DAU/DAK	Dinas Kesehatan		
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.												Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama					

	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga TB yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1710 orang	1709 orang	1709 orang	1709 orang	1709 orang	1,858,415,500	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.											Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	42,192,188,305	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.											Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	42,192,188,305	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.											Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	42,192,188,305	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b)											Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	42,192,188,305	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.											Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				

	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	42,192,188,305	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.											Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	42,192,188,305	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.											Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.											Dinkes, Dinsos, Disdik, Disparpora
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.											DINKES
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
3.4.2	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.											Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan											Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis											Dinas Kesehatan
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	690 orang	1150 orang	1150 orang	1150 orang	1150 orang	2,914,628,000	DAU	Dinas Kesehatan	
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.											inas Sosial
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.											Dinas Kesehatan
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.											Dinas Kesehatan, Dishub
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
2.15.02.2.02	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alat Kelengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum)	%	65	70	75	80	85		DAU	KAB. AGAM	

2.15.02.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alat Kelengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum)	%	65	70	75	80	85		DAU	KAB. AGAM	
2.15.02.2.03	Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Kenyamanan Pengguna Jasa Angkutan	%	70	75	80	85	90		DAU	KAB. AGAM	
2.15.02.2.03.03	Sub Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang tipe C	%	70	75	80	85	90		DAU	KAB. AGAM	
2.15.02.2.05	Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Kondisi Kendaraan yang laik Jalan	%	95	97	100	100	100		DAU	KAB. AGAM	
2.15.02.2.05.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	95	97	100	100	100		DAU	KAB. AGAM	
2.15.02.2.06	Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Rehabilitasi Perlengkapan Jalan	%	60	65	70	75	80		DAU	KAB. AGAM	
2.15.02.2.06.02	Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	%	60	65	70	75	80		DAU	KAB. AGAM	
2.15.02.2.06	Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Performa Lalu Lintas	%	85	89	90	90	92		DAU	KAB. AGAM	
2.15.02.2.06.02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	%	85	89	90	90	92		DAU	KAB. AGAM	
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.											DPPKBP3A, DINKES
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.											DPPKBP3A
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).											DPPKBP3A
	Program Pengendalian Penduduk	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	67,5	68	68,5	69	69,65	4,350,000,000	DAK BOKB/DAU	Kab Agam (16 Kec)	
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang di Mutakhirkan	KK	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	900,000,000	DAK BOKB		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	1	1	1	1	1	28,200,000	DAK BOKB		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need) (%)	Persen	15,82	14,79	13,76	12,73	12,5	4,450,000,000	DAK BOKB/DAU	Kab Agam (16 Kec)	

	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru	Orang	8200	8200	8200	8200	8200	1,781,151,000	DAK BOKB/DAU		
	Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa	Dokumen	3	3	3	3	3	383,950,000	DAK BOKB/DAU		
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.											Dinas Kesehatan
3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.											DPPKBP3A
	Program Pengendalian Penduduk	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	67,5	68	68,5	69	69,65	4,350,000,000	DAK BOKB/DAU	Kab Agam (16 Kec)	
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang di Mutakhirkan	KK	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	900,000,000	DAK BOKB		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	1	1	1	1	1	28,200,000	DAK BOKB		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need) (%)	Persen	15,82	14,79	13,76	12,73	12,5	4,450,000,000	DAK BOKB/DAU	Kab Agam (16 Kec)	
	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru	Orang	8200	8200	8200	8200	8200	1,781,151,000	DAK BOKB/DAU		
	Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	Dokumen	3	3	3	3	3	383,950,000	DAK BOKB/DAU		
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.											Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).											DINKES, DINSOS
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	226,293,894,841	DAU	Dinas Kesehatan	
3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.											Dinas Kesehatan, LH
3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.											Dinas Kesehatan, PUTR
3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.											Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.											DINKES, KESBANGPOL, SATPOL
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%				

[illegible]

TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

[illegible]

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pemenuhan Standar Pelayanan										
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Sekolah										
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mengikuti ujian sekolah dan asesmen siswa SD se Kabupaten Agam	Siswa	9800 Siswa	9800 Siswa	9800 Siswa	9800 Siswa	9800 Siswa	628,000,000	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pelatihan Penyusunan Soal Ujian Sekolah	Mapel	10 Mapel	10 Mapel	10 Mapel	10 Mapel	10 Mapel	1,032,394,309	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
		Jumlah Sekolah yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran	Sekolah	65 Sekolah	65 Sekolah	65 Sekolah	65 Sekolah	65 Sekolah				
		Terlaksananya Asesmen Nasional SMP	Sekolah	65 sekolah	65 sekolah	65 sekolah	65 sekolah	65 sekolah				
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.											Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPPKBPA
	Program : PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	100	100	100	100	100	-	-	-	
	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK penerima layanan	orang	50	50	50	50	50	3,285,140,000	DAK	Kab.Agam	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	14	14	14	14	14				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pemenuhan Standar Pelayanan										
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peningkatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	%	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung TK Negeri dan Swasta Kab. Agam	Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	4,497,253,288	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah pengadaan Wastavel TK PAUD	Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	3,630,733,154	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
	Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah siswa Miskin Pendidikan anak usia Dini yang di beri	Siswa	200 Org	400 Orang	600 Orang	800 Orang	1000 Orang	3,286,038,004	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan APE luar dan dalam, dalam rangka	Lembaga	5 Lembaga	10 Lembaga	15 Lembaga	20 Lembaga	25 Lembaga	875,571,251	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
	Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik yang mendapatkan Pendidikan profesi guru , pelatihan terhadap guru pembelajaran untuk memenuhi standar kompetensi, penilaian angka kredit tenaga pendidik, seleksi , seleksi Tenaga pendidik	Orang	400 Orang	500 Orang	600 Orang	700 Orang	800 Orang	301,119,928	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang menerima BOP	Lembaga	352 lembaga	352 lembaga	352 lembaga	352 lembaga	352 lembaga	31,508,349,272	Hibah	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah											Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pemenuhan Standar Pelayanan										
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peningkatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	%	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung TK Negeri dan Swasta Kab. Agam	Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	4,497,253,288	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah pengadaan Wastavel TK PAUD	Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	3,630,733,154	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam

[illegible]

4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).												DISDIK DAN DISKOMINFO
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peningkatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	%	100	100	100	100	100					
	Sub Kegiatan : Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung TK Negeri dan Swasta Kab. Agam	Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	4,497,253,288	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam	
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah pengadaan Wastavel TK	Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	3,630,733,154	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah siswa Miskin Pendidikan anak usia Dini yang di beri	Siswa	200 Org	400 Orang	600 Orang	800 Orang	1000 Orang	3,286,038,004	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan APE luar dan dalam, dalam rangka peningkatan sarana prasarana yang memadai.	Lembaga	5 Lembaga	10 Lembaga	15 Lembaga	20 Lembaga	25 Lembaga	875,571,251	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam	
	Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik yang mendapatkan Pendidikan profesi guru , pelatihan terhadap guru pembelajaran untuk memenuhi standar kompetensi, penilaian angka kredit tenaga pendidik, seleksi , seleksi Tenaga pendidik berprestasi	Orang	400 Orang	500 Orang	600 Orang	700 Orang	800 Orang	301,119,928	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang menerima BOP	Lembaga	352 lembaga	352 lembaga	352 lembaga	352 lembaga	352 lembaga	31,508,349,272	Hibah	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar											
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mengikuti ujian sekolah dan asesmen siswa SD se Kabupaten Agam	Siswa	9800 Siswa	9800 Siswa	9800 Siswa	9800 Siswa	9800 Siswa	628,000,000	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pelatihan Penyusunan Soal Ujian Sekolah	Mapel	10 Mapel	10 Mapel	10 Mapel	10 Mapel	10 Mapel	1,032,394,309	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam	
		Jumlah Sekolah yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran	Sekolah	65 Sekolah	65 Sekolah	65 Sekolah	65 Sekolah	65 Sekolah					
		Terlaksananya Asesmen Nasional SMP	Sekolah	65 sekolah	65 sekolah	65 sekolah	65 sekolah	65 sekolah					
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar											
	Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidikan yang mendapatkan Pendidikan profesi guru , pelatihan terhadap guru pembelajaran untuk memenuhi standar kompetensi, penilaian angka kredit tenaga pendidik, seleksi dan Diklat kepala sekolah dasar, seleksi Tenaga pendidik	Orang	3180 Orang	3180 Orang	3180 Orang	3180 Orang	3180 Orang	1,442,180,415	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama											
	Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru penilaian angka kredit tenaga pendidik	Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	2,136,317,529	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan	

[illegible]

	Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidikan yang mendapatkan Pendidikan profesi guru , pelatihan terhadap guru pembelajaran untuk memenuhi standar kompetensi, penilaian angka kredit tenaga pendidik, seleksi dan Diklat kepala sekolah dasar, seleksi Tenaga pendidik	Orang	3180 Orang	3180 Orang	3180 Orang	3180 Orang	3180 Orang	1,442,180,415	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama										
	Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru penilaian angka kredit tenaga pendidik	Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	2,136,317,529	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan
		Jumlah guru seleksi dan diklat kepala sekolah	Orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang				
		Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Guru Pembelajar untuk memenuhi standar kompetensi	Orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang				
		Jumlah Guru yang mengikuti Seleksi Tendik Berprestasi	Orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang				
		Jumlah Kepala Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang mengikuti pelatihan kepala sekolah dan pengawas untuk memenuhi Standar Kompetensi	Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang				
		Jumlah Pendidik Yang Mendapatkan Pendidikan Profesi Guru	Orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang				
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepala Sekolah TK, SD, SMP Se Kecamatan Palupuah	Orang	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan				
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepala Sekolah TK, SD, SMP Se Kecamatan Tilatang Kamang	Orang	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peningkatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini										
	Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru PAUD yang mendapatkan peningkatan kompetensi se kecamatan Tanjung Raya	Orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	301,119,928	DAU	Kab.Agam	Dinas Pendidikan
		Jumlah pendidikan yang mendapatkan Pendidikan profesi guru , pelatihan terhadap guru pembelajaran untuk memenuhi	Orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang				
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepala TK, SD dan SMP se kecamatan	Orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang				
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN												
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.											DPPKBP3A
	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Persentase	6,65	8,20	10,25	12,82	16,02	3,502,404,600	APBD	Kab.Agam	
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mempunyai dokumen GAB dan GBS	OPD	52	52	52	52	52	1,482,404,600	APBD	Kab.Agam	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	2	2	2	457,404,600	APBD	Kab.Agam	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	2	2	2	450,000,000	APBD	Kab.Agam	
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	425,000,000	APBD	Kab.Agam	
	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	150,000,000	APBD	Kab.Agam	
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											DPPKBP3A,
	Program : PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	persen	100	100	100	100	100	2,950,000,000	APBD/DAK		
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Bimtek	Orang	150	150	150	150	150	620,000,000	APBD/DAK	Kab.Agam	
		Jumlah MOU	MOU	5	5	5	5	5				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	413,864,800	APBD	Kab.Agam	
	Program : Perlindungan Perempuan	Presentase perempuan korban kekerasan dan tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatka layanan Komperhensif	persentase	100	100	100	100	100	514,919,000	APBD		
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kasus perempuan yang ditangani	Kasus	10	10	10	10	10	514,919,000			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	128,349,000			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	646,280,000			
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi kasus perempuan	Layanan	3	3	3	3	3	300,000,000			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	10	15	15	15	15	300,000,000			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penyajian Data Gender dan Anak	Persentase	100	100	100	100	100	455,960,000			
	Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Gender dan anak yang dicetak	buku	100	100	100	100	100	455,960,000			

	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	50	100	100	100	100	100,000,000			
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.											DPPKBP3A
	Program : PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	100	100	100	100	100	2,950,000,000	APBD/DAK		
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Bimtek	Orang	150	150	150	150	150	620,000,000	APBD/DAK	Kab.Agam	
		Jumlah MOU	MOU	5	5	5	5	5				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	413,864,800	APBD	Kab.Agam	
	Program : Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	persentase	100	100	100	100	100	514,919,000	APBD	Kab.Agam	
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kasus perempuan yang ditangani	Kasus	10	10	10	10	10	514,919,000			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	128,349,000			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	646,280,000			
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi kasus perempuan	Layanan	3	3	3	3	3	300,000,000			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	10	15	15	15	15	300,000,000			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penyajian Data Gender dan Anak	Persentase	100	100	100	100	100	455,960,000			
	Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Gender dan anak yang dicetak	buku	100	100	100	100	100	455,960,000			
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	50	100	100	100	100	100,000,000			
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.											DPPKBP3A
	Program : Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	persentase	100	100	100	100	100	514,919,000	APBD	Kab.Agam	
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kasus perempuan yang ditangani	Kasus	10	10	10	10	10	514,919,000			

	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	128,349,000			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	646,280,000			
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi kasus perempuan	Layanan	3	3	3	3	3	300,000,000			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	10	15	15	15	15	300,000,000			
5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.											DPPKBP3A
	Program : Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan Komperhensif	persentase	100	100	100	100	100	514,919,000	APBD	Kab.Agam	
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	100	100	100	100	500,000,000			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penyajian Data Gender dan Anak	Persentase	100	100	100	100	100	455,960,000			
	Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Gender dan anak yang dicetak	buku	100	100	100	100	100	455,960,000			
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	50	100	100	100	100	100,000,000			
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.											DPPKBP3A
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan pilar kualitas keluarga.	Persen	50	50	60	66	83,3	950,000,000	APBD		
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang melaksanakan PPRG	Organisasi	15	15	15	15	15	550,000,000			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan pendampingan Keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	450,000,000			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	3	3	3	3	3	500,000,000			

	Sub Kegiatan : Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	2	2	2	450,000,000			
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Organisasi	19	19	19	19	19	350,000,000			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	80	100	100	100	150,000,000			
	Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	150,000,000			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	10	15	15	15	15	100,000,000			
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.											DPPKBP3A Sekretariat Dewan
	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Persentase	6,65	8,20	10,25	12,82	16,02	3,502,404,600	APBD	Kab.Agam	
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mempunyai dokumen GAB dan GBS	OPD	52	52	52	52	52	1,482,404,600	APBD	Kab.Agam	
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	425,000,000	APBD	Kab.Agam	
	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	150,000,000	APBD	Kab.Agam	
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang dilatih dibidang politik dan ekonomi	Orang	100	100	100	100	100	638,374,000	APBD		
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	45	45	45	45	45	210,000,000	APBD		
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	3	3	3	3	3	150,000,000	APBD		
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Organisasi	15	15	15	15	15	350,000,000	APBD		

	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	19	19	19	19	19	350,000,000	APBD		
5.5.2'	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.											DPPKBP3A
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Persentase	6,65	8,20	10,25	12,82	16,02	3,502,404,600	APBD	Kab Agam	
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mempunyai dokumen GAB dan GBS	OPD	52	52	52	52	52	1,482,404,600	APBD	Kab Agam	
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	425,000,000	APBD	Kab Agam	
	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	150,000,000	APBD	Kab Agam	
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang dilatih dibidang politik dan ekonomi	Orang	100	100	100	100	100	638,374,000			
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	45	45	45	45	45	210,000,000			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonom	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	3	3	3	3	3	150,000,000			
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Organisasi	19	19	19	19	19	350,000,000			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	19	19	19	19	19	350,000,000			
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.											DPPKBP3A
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan pilar kualitas keluarga.	Persen	50	50	60	66	83,3	950,000,000	APBD		
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang melaksanakan PPRG	Organisasi	15	15	15	15	15	550,000,000			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	450,000,000			

	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	3	3	3	3	3	500,000,000			
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	2	2	2	450,000,000			
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Organisasi	19	19	19	19	19	350,000,000			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	80	100	100	100	150,000,000			
	Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	150,000,000			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	10	15	15	15	15	100,000,000			
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Organisasi	15	15	15	15	15	450,000,000			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	80	100	100	100	150,000,000			
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	150,000,000			
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	10	15	15	15	15	100,000,000			
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.											DPPKBP3A
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan pilar kualitas keluarga.	Persen	50	50	60	66	83.3	950,000,000	APBD		
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang melaksanakan PPRG	Organisasi	15	15	15	15	15	550,000,000			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	450,000,000			
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	3	3	3	3	3	500,000,000			

	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	2	2	2	450,000,000			
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Organisasi	19	19	19	19	19	350,000,000			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	80	100	100	100	150,000,000			
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	150,000,000			
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	10	15	15	15	15	100,000,000			
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Organisasi	15	15	15	15	15	450,000,000			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	80	100	100	100	150,000,000			
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	150,000,000			
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	10	15	15	15	15	100,000,000			
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.											Dinas Pertanian DPPKBP3A
	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Persentase	6,65	8,20	10,25	12,82	16,02	3,502,404,600	APBD		Kab.Agam
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mempunyai dokumen GAB dan GBS	OPD	52	52	52	52	52	1,482,404,600	APBD		Kab.Agam
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	2	2	2	457,404,600			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	2	2	2	450,000,000	APBD		Kab.Agam

	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian	Ha	1200	1200	1200	1200	1200	121,251,871,230			
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen Action Plan pengembangan kawasan pertanian yang diterbitkan	Dokumen	1	1		1	1		APBD	Kab.Agam	Dinas Pertanian
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.											DPPKBP3A, Bagian Hukum
	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Persentase	6,65	8,20	10,25	12,82	16,02	3,502,404,600	APBD	Kab.Agam	
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang dilatih dibidang politik dan ekonomi	Orang	100	100	100	100	100	638,374,000			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonom	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	3	3	3	3	3	150,000,000			
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Organisasi	15	15	15	15	15	350,000,000			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	19	19	19	19	19	350,000,000			
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.											DISKOMINFO
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.											DPPKBP3A
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Persentase	6,65	8,20	10,25	12,82	16,02	3,502,404,600			
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mempunyai dokumen GAB dan GBS	OPD	52	52	52	52	52	1,482,404,600	APBD		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	2	2	2	80,000,000			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	2	2	2	100,000,000			
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	150,000,000			
	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	150,000,000			

TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.											Dinas Kesehatan, PUTR
	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	6,124,243,420	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layal	%	81.7	90	95	100	100	41,411,000,000			DPUTR
	Kegiatan: Penyediaan Prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat	Panjang jaringan perpipaan air bersih yang terpasang jumlah RT MBR yang	m	25000	40000	55000	55000	55000	41,411,000,000			
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman,											Dinas Kesehatan, PUTR
1.03.06	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistik Air Limbah.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	77.57	81	83	85	87	10,806,000.06	DAU. DAK	KAB.AGAM	PUTR
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistik Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi layak dan aman.	SR	489								
	Sub Kegiatan : Pembangunan /Penyediaan Sistik Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota.	Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya	Unit	1								
		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang	Unit	290								
		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Nagari Sitalang Kecamatan Ampek Nagari	Unit	202								
		Pengadaan Truk Tinja Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung	Unit	1								
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi/Peningkatan/PerluasanSistem Pengelolaan Air LimbahDomestik Terpusat Skala Kota	Operasional Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi	Bulan	12								
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi/Peningkatan/PerluasanSarana dan Prasarana IPLT	Garasi Truk Tinja	M2	33								
		Jumlah kebutuhan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang di sediakan	Paket	1								
		Operasional IPLT	Bulan	12								
		Pemeliharaan IPLT	M1	133								
		Pengawasan Garasi Truk Tinja	Dokumen	1								
		Perencanaan Garasi Truk Tinja	Dokumen	1								
		Perencanaan Tempat Cuci Truk Tinja	Dokumen	1								
		Tempat Cuci Truk Tinja	M1	133								

	Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Grade Akreditasi Puskesmas	unit utama	4 unit utama	5 unit utama	7 unit utama	10 unit utama	12 unit utama				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	6,124,243,420	DAU/DAK	Dinas Kesehatan	
	termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.											Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)										
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	sekolah	21 sekolah	21 sekolah	21 sekolah	21 sekolah	21 sekolah	2,306,525,501	DAU/DAK	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah Dasar yang di bangun	sekolah	50 sekolah	50 sekolah	50 sekolah	50 sekolah	50 sekolah	34,524,664,560	DAU/DAK	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama										
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan WC dan Washtafel bagi siswa dan guru SMPN 3 Ampek Angkek	Sekolah	1 Unit	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	3,165,464,102	DAU/DAK	Kab.Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
		Pembuatan Wastafel Sekolah SMP Se Kecamatan Tanjung Mutiara	Sekolah	1 Unit	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah				
6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman											DPUTR, DLH, PERKIM
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman											DPUTR, DLH, PERKIM
6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.											DPUTR, LH
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku											DPUTR, LH
	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang terpelihara	SR	489								
	Sub : Kegiatan Normalisasi dan Restorasi Sungai	Normalisasi Batang Tikalak	M3	875								
		Normalisasi sungai aua	M3	200								
		Normalisasi Sungai Baruah	M3	200								
		Normalisasi Sungai Batang Agam	M3	1077								
		Jorong Salo Baruah Nagari Salo										
		Normalisasi Sungai Batang Katiek	M3	1500								
		Normalisasi Sungai Batang Sigaga	M3	200								
		Normalisasi sungai Batang Silasih	M3	200								
		Normalisasi Sungai Kalamparik	M3	300								
		Normalisasi Sungai Lakuak Bareno Nagari koto Malintang	M3	200								
		Normalisasi Sungai Lurah Panta	M3	300								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara- negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.												
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)												Bagian SDA
	Program : Percepatan	Meningkatnya Jumlah Pembangkit Listrik yang bersumber dari energi terbarukan	kWh	0.5	0.7	0.8	0.9	1	75,000,000	APBD	Interkoneksi Sumatra	Bagian SDA	
TUJUAN 8. MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA													
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.												BAGIAN PEREKONOMIAN
r	PDB per kapita.												PEREKONOMIAN, BPS, BAPPEDA, OPD
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.												DPMTSP-NAKER, BPS, OPD
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang mendapatkan kesempatan kerja	%	55	60	65	70	75					
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja												
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	Orang	2.500	2.650	2.700	2.800	2.900	293,000,000	DAU	Kab. Agam		
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin												DPMTSP-NAKER, BPS, OPD
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang mendapatkan kesempatan kerja	%	55	60	65	70	75					
	Kegiatan : Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten / Kota												
	Sub Kegiatan : Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Paket	6	10	12	14	15	4,650,000,000	DAU	Kab. Agam		
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan												DPMTSP-NAKER, BPS, OPD
8.4.1	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.												DLH, Bagian SDA
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan												DPKP
	- Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap	ton	8120	8140	8160	8170	8180					
	- Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah nelayan kecil yang terfasilitasi sarana kenelayanannya	wilayah	2	2	2	2	2	3,075,000,000	DAU	Kab. Agam		DPKP
	- Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah nelayan kecil yang terfasilitasi sarana kenelayanannya	Orang	0	75	75	75	75	20,000,000	DAK, DAU	Kab. Agam		DPKP
	- Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah tempat pelelangan ikan yang tersedia	unit	0	1	1	1	1	95,000,000	DAU	Kab. Agam		DPKP
	- Kegiatan : Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah kab/kota	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar	TDP	5	10	20	30	40	25,000,000	DAY	Kab. Agam		DPKP
	- Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	30,000	30,250	30,500	30,750	31,000					DPKP
	- Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah unit usaha budidaya yang memiliki izin usaha/tanda daftar	unit usaha	10	10	10	10	10	240,000,000	DAU	Kab. Agam		DPKP
	- Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Produktivitas rata-rata pembudidayaan ikan	ton/orang/tahun	2.65	2.95	3.18	3.40	3.61	2,674,560,000	DAU	Kab. Agam		DPKP

	- Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidayaan ikan yang terfasilitasi/terlayani sarana prasarana penunjang kawasan budidaya	pembudidaya	1,260	1,300	1,350	1,400	1,500	3,855,440,000	DAK, DAU	Kab. Agam	DPKP
	- Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan	orang	308	318	328	338	348				DPKP
	- Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran yang terdaftar	NIB	10	10	10	10	10	107,000,000	DAU	Kab. Agam	DPKP
	- Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha yang memenuhi standar keamanan pangan	unit/tahun	5	5	5	5	5	821,000,000	DAU	Kab. Agam	DPKP
	- Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah ikan yang dipasarkan dalam daerah	ton	27,140	27,640	28,140	28,640	29,140	2,009,500,000	DAK, DAU	Kab. Agam	DPKP
8.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).											DPKP
	- Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap	ton	8120	8140	8160	8170	8180				
	- Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah nelayan kecil yang terfasilitasi sarana kenelayannya	wilayah	2	2	2	2	2	3,075,000,000	DAU	Kab. Agam	DPKP
	- Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah nelayan kecil yang terfasilitasi sarana kenelayannya	Orang	0	75	75	75	75	20,000,000	DAK, DAU	Kab. Agam	DPKP
	- Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah tempat pelelangan ikan yang tersedia	unit	0	1	1	1	1	95,000,000	DAU	Kab. Agam	DPKP
	- Kegiatan : Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah kab/kota	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar	TDP	5	10	20	30	40	25,000,000	DAU	Kab. Agam	DPKP
	- Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	30,000	30,250	30,500	30,750	31,000				DPKP
	- Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah unit usaha budidaya yang memiliki izin usaha/tanda daftar	unit usaha	10	10	10	10	10	240,000,000		Kab. Agam	DPKP
	- Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Produktivitas rata-rata pembudidayaan ikan	ton/orang/tahun	2.65	2.95	3.18	3.40	3.61	2,674,560,000		Kab. Agam	DPKP
	- Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidayaan ikan yang terfasilitasi/terlayani sarana prasarana penunjang kawasan budidaya	pembudidaya	1,260	1,300	1,350	1,400	1,500	3,855,440,000		Kab. Agam	DPKP
	- Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan	orang	308	318	328	338	348				DPKP
	- Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran yang terdaftar	NIB	10	10	10	10	10	107,000,000		Kab. Agam	DPKP
	- Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha yang memenuhi standar keamanan pangan	unit/tahun	5	5	5	5	5	821,000,000		Kab. Agam	DPKP
	- Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah ikan yang dipasarkan dalam daerah	ton	27,140	27,640	28,140	28,640	29,140	2,009,500,000		Kab. Agam	DPKP
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.											DPKP
	Program :Program Hubungan Industrial											DPMPTSP Naker
	Kegiatan : Penhgesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	Dokumen	5	4	5	4	4	461,000,000	DAU	Kab.Agam	

8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.												DPMPTSP Naker
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang mendapatkan kesempatan kerja	%	55	60	65	70	75					
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja												
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	Orang	2.500	2.650	2.700	2.800	2.900	293,000,000	DAU	Kab. Agam		
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.												DPMPTSP Naker
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang mendapatkan kesempatan kerja	%	55	60	65	70	75					
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja												
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	Orang	2.500	2.650	2.700	2.800	2.900	293,000,000	DAU	Kab. Agam		
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).												DPMPTSP Naker
8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).												DPMPTSP Naker
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur												DPMPTSP Naker
8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.												DPMPTSP Naker
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.												DPMPTSP Naker
8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.												DPMPTSP Naker
	Program :Program Hubungan Industrial												
	Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota												
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Perusahaan	4	2	2	3	2	55,000,000	DAU	s		
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.												DISPARPORA,
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang dikelola	buah	35	38	41	44	47	97,219,620,000				
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata	Keg	5	5	5	5	5	6,250,000,000				
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara	unit	4	4	4	4	4	2,280,000,000	DAU/DAK			

TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.											DPMN
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.											PUTR
1.03.10	Program : Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	80	82	84	86	88	379,397,000.30	DAU. DAK	KAB.AGAM	PUTR
	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Bertambahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	3.40								
		Bertambahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	unit	22								
		Bertambahnya persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	6.88								
		Bertambahnya persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Km	52.01								
	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Anak Aia Dadok - Rimbo Talang (R.10.001)	Km	3.7								
		Anak Aia Duku - Bukik Malintang (R.11.034)	km	1								
		Anak Aie Dadok - Rimbo Talang (R.10.001)	Km	2.51								
		Aspal Hotmix Jalan Lingkar Bukik Apik (NR)	km	0.13								
		Aspal Jalan Durian Gadang Sungai Nibuang Tikur Selatan Jorong Sungai Nibuang Nagari Tikur Selatan Kecamatan Tanjung Muliara	Km	0.9								
		Aspal Lapan jalan Simpang Baruah Andaleh (R.01.044)	km	0.3								
		Bahu Jalan Simpang Lundang - Koto Tuo (R.02.004)	Km	0.2								
		Bancah Paku menuju Batu Hampar Nagari Kampung Tengah (NR)	Km	1								
		Batas Kota - Sp. Koto Panjang (Widening) (R.03.006)	Km	5.5								
		Batu Palano - Ladang Laweh (R.14.009)	km	1.9								
		Box Culvert Simaruok	meter	6								
		Cor Bahu Jalan Pasar Rabaa - Koto Kaciak	Km	0.5								
		Dam bahu Jalan Pasar Rabaa - Koto Kaciak	Km	0.5								
		Dam Bahu Jalan Sungai Janiah, Jorong Ujung padang Nagari Kampong Tengah (R.10.007)	Km	0.6								
		Durian Kapeh - Labuhan (R.11.022)	Km	6.52								
		Durian Kapeh - Sp. Rajang Cacang Tinggi (R.11.023)	km	4								
		Gunung Antokan - Padang Mardani (R.11.044)	Km	3								
		Hotmix jalan pakan kami - monggeng	km	3.3								
		Jalan 100 Janjang Jorong 100 Janjang, Kab. Agam, Candung, Canduang Koto Laweh (R.13.012)	Km	2								

Jl. Sp. Tigo Batu Palano - Ladang Laweh (Hotmix) (R.14.007)	Km	2								
Jl. Syekh Sulaiman Arrasuli (Hotmix) (R.10.087)	Km	1.1								
Jl. Tandikek (Widening) (R.10.029)	Km	1.3								
Kajai Pisik - Proyek (R.10.016)	Km	5.42								
Koto Malintang - Koto Marapak (R.01.022)	Km	1.2								
Koto Panjang - Sungai Sariak (R.01.069)	Km	0.6								
Kubang Putih - V Suku (R.05.025)	Km	1.5								
Kubu Panampuang - Lurah (R.02.022)	Km	1								
Lanjutan Aspal dari Labuhan menuju Subang-subang (R.11.022)	Km	7								
Lanjutan Aspal Hotmix Jalan Pasanehan Mata Air - Kunto Jorong Koto Malintang Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kalabau (R.10.023)	Km	0.5								
Lanjutan Aspal Jalan Padang Panji menuju Koto Ilalang Durian Kapeh Tikui Utara Kec. Tanjung Mutiara (R.10.024)	Km	0.7								
Lanjutan Pengecoran Bahu Jalan Simpang Ampek - Simpang Kacang, Nagari Magek (R.02.013)	Km	0.2								
Padang Tongga - Batu Rubiah (R.10.012)	Km	0.98								
Pasar Batu Kambiang - Rimbo Tengah Kec. Ampek Nagari (R.15.013)	Km	1								
Pasar Batu Kambiang - Sp. Puduang (R.15.012)	Km	2								
Pasar Bawan - Kp. Pili (R.15.008)	Km	2.75								
Pasar Palupuah - Lurah Dalam (R.04.005) (Lanjutan)	Km	2								
Pelebaran Jalan Hamka (R.10.043)	Km	2.2								
Pelebaran Jalan Maninjau Muko-muko (Museum Buya Hamka) (R.09.001) (Lanjutan)	Km	10								
Pembangunan Bahu Jalan Jorong Ranah, Sungai Landia IV Koto (R.06.006)	Km	0.7								
Pembangunan Hotmix Jalan Gadih Angik Jorong Masang Timur (R.11.044)	Km	0.2								
Pembangunan Hotmix Jalan Paladangan - Damar Bancah Jorong Balai Satu Malalak (NR)	Km	0.75								
Pembangunan Jalan Kabupaten Tikui Utara - Jorong Durian Kapeh - Sungai Sirih - Ujuang Guguk Ketek (R.11.037)	Km	2.4								

Pembangunan Jalan Lingkar Baruah Andaleh (R.01.044)	Km	0.6								
Pembuatan DAM Penahan jalan dan pengecoran bahu jalan di ~~senaniam~~ ~~semaniam~~ jalan kinantan	Km	0.3								
Pengaspalan dan Penedaman Jalan Kelok 35 sampai Simpang SMP (R.07.004)	Km	3.35								
Pengaspalan / Hotmix Jalan dari Padang Lua - Ladang Laweh	Km	1.6								
Pengaspalan Hotmix Jalan Lingkar Paninggiran Ateh (R.04.019) (~~lanutan~~)	Km	0.3								
Pengaspalan Jalan Alahan Kasai Dusun I Paraman Bayur Jorong Batu Hampar, Kampung Tengah (R.10.059)	Km	0.944								
Pengaspalan jalan bancah paku mudiak (NR)	Km	0.65								
Pengaspalan Jalan dari Batui - Salimpariak (R.05.016)	Km	1.67								
Pengaspalan Jalan Lariang - Kampuang Melayu (R.04.012)	Km	0.35								
Pengaspalan Jalan Lingkar Dusun Dagang Saiyo Nagari Bawan (R.15.021)	Km	1								
Pengaspalan Jalan Lingkar Sariak dari Jorong Pasa Kubang Tabek melalui Sariak Ateh sampai Lukok	Km	1.3								
Pengaspalan Jalan Lingkar Syech Moh. Yusuf (R.03.028)	Km	0.6								
Pengaspalan Jalan Lubuk Larangan menuju Jawi Tanyak Nagari Bawan (R.15.008)	Km	3								
Pengaspalan jalan padang tarok nagari batu palano (R.14.008, R.14.007, dan R.14.012)	Km	2.1								
Pengaspalan jalan tabek barawak patalangan kapalo koto (R.14.017 dan NR)	Km	2.35								
Pengaspalan Simpang Jago-jago ke Benteng Andaleh (R.07.024)	Km	1								
Pengawasan Teknis Jalan	Km	5								
Pengecoran Bahu Jalan Simpang Lubuak - Koto Nan Gadang, Nagari Kamang Hilis (R.12.023)	Km	0.2								
Penedaman pinggir jalan Kabupaten Gantiang Sampai ~~dengan~~ Batu Kudo (R.09.014)	Km	0.25								
Perencanaan Jalan	Paket	7								
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	79.1								
Perumahan Pinang Permai Kampung Pinang, Kab Agam, Lubuk Basung, Kampung Pinang	Km	0.4								
Puti Pincuran (R.10.142)	Km	1.2								
Rehabilitasi Badan Jalan Sp. Sei. Cubadak - Sp. Ujung Guguk (R.01.019)	Km	1								
Rehab Jalan Campago - Limo Badak (R.16.002)	Km	2								

Rehab Jalan Kabupaten, Sariak - Batu Kudo, Nagari Koto Gadang VI Koto (R.09.011)	Km	1.172							
Rehap/perbaikan ruas jalan Jorong Cicawan, Paninjauan, Tanjung Raya (R.09.012)	Km	1.5							
Rehap/perbaikan Ruas Jalan Koto Kaciak-Balai Belo, Simpang Kandi-Kubu, Tanjung Raya (R.09.012)	Km	2							
Rigid Beton Jalan Simpang Bawah Kubang - Simpang Korong untuk memperlancar transportasi	Km	0.7							
Ruas Jalan Kabupaten dari Jorong Balai Selasa sampai Jorong Pasar Durian Nagari Kampung Pinang (R.10.023)	Km	3.4							
Sawah Dangka - Pasa Kapau (R.03.011)	Km	1.7							
Simpang Batu Bajolang Tarok manggeng, Kab. Agam, Candung, Bukik Batabuah (R.13.034 & R.13.035)	Km	0.6							
Simpang Batu Bajolang Tarok manggeng, Kab. Agam, Candung, Bukik Batabuah (R.13.034 & R.13.035)	Km	1.23							
Simp. Aua - Simp. Aur Mesjid (R.03.028)	Km	0.6							
SP. Anak Aie Kumayan - Anak Aie Kumayan (R.10.053)	Km	4.37							
Sp. Babukik - Hilir Babukik (R.12.011)	Km	0.95							
Sp. Banda Gadang - Padang Tui (R.11.008)	Km	2							
SP. Banda Gadang - Padang Tui (R.11.008)	Km	1.62							
Sp. Banto - Sp. Lungguk Muto (R.02.035)	Km	1							
SP. Batu Tagak - Bukik Bulek (R.13.012)	Km	1.78							
Sp. Biaro - Sp. Pintu Koto (R.02.009)	Km	7.5							
SP. Durian Tinggalang - Anak Aie Kumayan (R.15.001)	Km	1.62							
Sp. Dusun Tigo Banda Gadang - Padang Tui (R.11.007)	Km	2.4							
SP. Dusun Tigo Banda Gadang - Padang Tui (R.11.007)	Km	1.3							
Sp. Jambu Aia - Ranah (R.02.049)	Km	1.2							
SP. Kacang - Simarasok (R.01.035)	Km	1.6							
Sp. Koto Tinggi - Sp. Mesjid Koto Tinggi (R.01.029)	Km	1.6							
Sp. Labuah Gambuang - Pasar Koto Baru (Bronjong) (R.01.058)	Km	0.5							
Sp. Padang Koto Batuang - Jembatan BW (R.15.002)	Km	1							
SP. Padang Koto Batuang - Jembatan BW (R.15.002)	Km	3.85							

		Sp. Panta - Batas Kota (R.07.003)	Km	3								
		Sp. Sei Pua - Limo Kampuang (R.14.018)	Km	2.2								
		Sp. Sungai Sirah - Bukik Batu Apuang (R.11.037)	Km	2.6								
		Sp. Tareh - Limo Suku (R.14.021)	Km	0.5								
		Survey Kondisi Jalan	Paket	4								
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	Bukik Lurah - Sp. Tabek Gadang (R.03.001)	Km	1.6								
		Cor Bahu Jalan Pos Satpam PTMA - Gadih angik jorong Ujuang labuang, Kab Agam	Km	1.8								
		Jalan yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Tahun	1								
		Panjang jalan yang di rehabilitasi	Km	10								
		Pemeliharaan Wilayah Timur	Paket	2								
		Pengaspalan jalan penghubung antara jorong batuang dengan jorong sawah rang selayan (R.09.002)	km	0.6								
		Pengaspalan jalan penghubung di sawah liek (R.09.005)	km	1.1								
		Perbaikan aspal jalan dan bahu jalan jorong batuang dengan jorong panji (R.09.003 dan 09.002)	km	3.3								
		Perbaikan bahu jalan pengaspalan ulang dan saluran drainase jorong kampung jambu nagari bayua(R.09.006; R09.012; R.09.003)	km	4.3								
		Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	79.1								
		Sp. Tanjung Alam - Sp. Pintu Koto (R.02.013)	Km	7.8								
	Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Jembatan Anak Aie Baru (J.267)	Meter	13								
		Jembatan Banda Baru Kec. Lubuk Basung	Meter	9								
		Jembatan Banda Rakik Kubang Putihah	Meter	35								
		Jembatan dalam Kondisi Baik	%	45								
		Jembatan Kp. Pili Kec. Ampek Nagari (J.286)	Meter	11								
		Jembatan Labuhan 2 (J.270)	Meter	12.5								
		Jembatan Molon Tiku	Meter	8								
		Jembatan Padang Jariang Kec. Ampek Nagari (J.40)	Meter	12								

[illegible]

9.1.2.(c)	Jumlah pelabuan strategis.												DISHUB
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.												DISPERINDAGKOP
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.												DISPERINDAGKOP
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.												DISPERINDAGKOP
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.												DISPERINDAGKOP
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.												DISPERINDAG
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.												Perekonomian, Disperindagkop
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor												DLH
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.												DLH
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.												BAPPEDA
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa,dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.												BAPPEDA, BKPSDM
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).												BKPSDM
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN		55%	58%	62%	66%	70%					BKPSDM
	Pengembangan Kompetensi ASN												BKPSDM
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		61 org	111 org	100 org	100 org	100 org	1,658,820,000	APBD		Kab. Agam	BKPSDM
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.												DPUTR
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.												
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi												
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .												Diskominfo
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGERA													
10.1.1*	Rasio Gini.												Bagian Perekonomian
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.												Dinas Sosial
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.												DPMN
	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	nagari	11	34	57	82	82	1,809,720,000.00				
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	%	100	100	100	100	100	2,156,000,000.00				
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah jenis kerjasama antar nagari	jenis	2	3	4	5	6	1,625,000,000.00				
	kegiatan : Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	%	100	100	100	100	100	1,954,000,000.00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan												
	juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)												
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau												PERKIM,DPUTR, Dinkes
40575	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terdistribusi menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas												Dishub
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik												Dishub
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum												Dishub
40603	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk												Perkim
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk												Perkim
40604	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis												PUTR
40634	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase lembaga adat yang menerapkan tradisi adat (%)											
	Kegiatan : Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Lembaga Adat di Kabupaten Agam											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Balai Adat yang direnovasi	Gedung	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,022,033,516	DAU	Kab.Agam		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang ditetapkan											
	Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cagar Budaya di Kabupaten Agam											
	Sub Kegiatan : Pelindungan Cagar Budaya	1. Jumlah benda Cagar Budaya yang di pelihara	Unit	60 CB	60 CB	60 CB	60 CB	60 CB	727,480,000	DAU	Kab.Agam		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam
		2. Jumlah Cagar Budaya yang terdata dan terverifikasi	Unit	60 CB	60 CB	60 CB	60 CB	60 CB					
		3. Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Kab. Agam yang terseleksi	Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang					
		4. Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman dan Cagar Budaya yang di fasilitasi	Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang					
		5. Pemasangan CCTV Museum Rumah Kelahiran Buva Hamka	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket					
		6. Jumlah Peserta Workshop Cagar Budaya	Orang	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org					
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan Museum (orang)											
	Kegiatan : Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Museum di Kabupaten Agam											
	Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	1. Jumlah Koleksi Museum yang di kelola	Buah	62 Koleksi	62 Koleksi	62 Koleksi	62 Koleksi	62 Koleksi	1,145,358,266	DAU	Kab.Agam		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Agam

[illegible]

	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Persen	75 persen	79 persen	83 persen	87 persen	91 persen	3,574,100,000	APBD	Kab. Agam	
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana	Persen	74.96 persen	76.16 persen	77.36 persen	78.56 persen	79.77 persen	3,574,100,000	APBD	Kab. Agam	
	Sub Kegiatan Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen										
	Sub Kegiatan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
	Sub Kegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
40665	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar											BPBD
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Persen	75 persen	79 persen	83 persen	87 persen	91 persen	1,086,710,000	APBD	Kab. Agam	
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tertatanya sistem dasar penanggulangan bencana	Persen	100	100	100	100	100	1,086,710,000	APBD	Kab. Agam	
	Sub Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P)	dokumen									
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB											BPBD
40695	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota											DLH, PUTR
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya											DLH, PUTR
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah kabupaten	%	51	58	60	65	70				
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	%	36	41	42	46	49				
		Persentase Pengurangan Sampah	%	15	17	18	19	21				
	Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten kota	Persentase Pengelolaan Sampah kabupaten	%	51	58	60	65	70				
	Sub Kegiatan Pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Persentase Pengelolaan Sampah kabupaten	%	51	58	60	65	70				
	Sub Kegiatan Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	15	17	18	19	21				

[illegible]

11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030											BPBD
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Persen	75 persen	79 persen	83 persen	87 persen	91 persen	3,264,700,000	APBD	Kab. Agam	
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana	Persen	74.96 persen	76.16 persen	77.36 persen	78.56 persen	79.77 persen	3,264,700,000	APBD	Kab. Agam	
	Sub Kegiatan Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	dokumen	1								
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada	orang		50							
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Persen	75 persen	79 persen	83 persen	87 persen	91 persen	14,581,630,000	APBD	Kab. Agam	
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	14,581,630,000	APBD	Kab. Agam	
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana										
	Sub Kegiatan Pengendalian operasi dan penyediaan sarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota										
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas										
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya										
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi										
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana											BPBD
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Persen	75 persen	79 persen	83 persen	87 persen	91 persen	3,264,700,000	APBD	Kab. Agam	
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana	Persen	74.96 persen	76.16 persen	77.36 persen	78.56 persen	79.77 persen	3,264,700,000	APBD	Kab. Agam	
	Sub Kegiatan Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	dokumen	1								

11.c.1	-																		
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal																		DPUTR
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN																			
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan																		DPKP
	- Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras	kg/perkapita/tahun	113	112	111	110	108											
	- Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok atau pangan lainnya dalam stabilitas pasokan dan harga pangan	komoditi	3	3	3	3	3	2,586,250,000	DAU		Kab.Agam							DPKP
	- Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/kota	Jumlah cadangan pangan daerah	ton	12	17	22	25	25	942,380,000	DAU		Kab.Agam							DPKP
	- Kegiatan : Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah	Tersedianya harga minimum pangan daerah	dokumen	1	1	1	1	1	126,000,000	DAU		Kab.Agam							DPKP
	- Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan	Angka kecukupan energi	kkal/kapita/h	2100	2100	2100	2100	2100	3,057,000,000	DAU		Kab.Agam							DPKP
		kecukupan protein	gr/kapita/hari	57	57	57	57	57											DPKP
	- Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan	orang	308	318	328	338	348											DPKP
	- Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran yang terdaftar	NIB	10	10	10	10	10	107,000,000	DAU		Kab. Agam							DPKP
	- Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha yang memenuhi standar keamanan pangan	unit/tahun	5	5	5	5	5	821,000,000	DAU		Kab. Agam							DPKP
	- Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah ikan yang dipasarkan dalam daerah	ton	27,140	27,640	28,140	28,640	29,140	2,009,500,000	DAK, DAU		Kab. Agam							DPKP
12.02.01	Jejak material (material footprint)																		DPKP
12.02.02	Konsumsi material domestik (domestic material consumption)																		DPKP
	- Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras	kg/perkapita/tahun	113	112	111	110	108											DPKP
	- Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok atau pangan lainnya dalam stabilitas pasokan dan harga pangan	komoditi	3	3	3	3	3	2,586,250,000	DAU		Kab.Agam							DPKP
	- Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/kota	Jumlah cadangan pangan daerah	ton	12	17	22	25	25	942,380,000	DAU		Kab.Agam							DPKP
	- Kegiatan : Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah	Tersedianya harga minimum pangan daerah	dokumen	1	1	1	1	1	126,000,000	DAU		Kab.Agam							DPKP
	- Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka kecukupan energi	kkal/kapita/h	2100	2100	2100	2100	2100	3,057,000,000	DAU		Kab.Agam							DPKP
		kecukupan protein	gr/kapita/hari	57	57	57	57	57											DPKP
	- Program : Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya keamanan pangan segar	persen	30	35	40	45	50											DPKP
	- Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Jumlah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	kelompok	15	20	25	30	35	2,328,000,000	DAU		Kab.Agam							DPKP
	- Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap	ton	8120	8140	8160	8170	8180											DPKP
	- Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah nelayan kecil yang terfasilitasi sarana kenelayanannya	wilayah	2	2	2	2	2	3,075,000,000	DAU		Kab. Agam							DPKP
	- Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah nelayan kecil yang terfasilitasi sarana kenelayanannya	Orang	0	75	75	75	75	20,000,000	DAK, DAU		Kab. Agam							DPKP
	- Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah tempat pelelangan ikan yang tersedia	unit	0	1	1	1	1	95,000,000	DAU		Kab. Agam							DPKP

[illegible]

12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya												DLH
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.												DLH
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi												DLH, DISPERINDAGKOP
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah												DLH, DISPERINDAGKOP
12.7.1(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa												DLH
41122	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.												Dinas Pendidikan
12.8.1(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup												DLH, DISPERINDAGKOP
12.8.1(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.												DPMPTSP, Dinkes, Capil, Dinas Pendidikan
	Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase keterlibatan dan peranserta masyarakat dalam PPLH	%	100	100	100	100	100	243,000,000				
	Kegiatan Pemberian Penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan	%	100	100	100	100	100		DAU	Kab Agam		
	Sub Kegiatan Penilaian kinerja masyarakat /dunia usaha/pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH	Persentase sekolah yang peduli terhadap kelestarian lingkungan	%	15	17	19	21	23		DAU			
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)												Bagian SDA
12.b.1	Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan												Bakeuda
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development												
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang dikelola	buah	35	38	41	44	47	97.219.620,000				
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata	Keg	5	5	5	5	5	6.250.000,000				
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara	Unit	4	4	4	4	4	2.280.000,000	DAU/DAK			
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata	Keg	4	4	4	5	5	58.250.000,000				
	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Pembuatan DED Taman Safari dan Cable Car, Pembuatan Dokumen Izin Lingkungan/AmdalTaman Safari dan Cable Car , Pembuatan FS/Studi Kelayakan Cable Car dan Taman Safari,Pembuatan Masterplan Taman Safari dan Cable Car, lanjutan Pembuatan Dokumen AmdalBandar Mutiara, Amdal Tapian Kuala Nagari Sungai	Dok	4	8	4	4	4	7.300.000,000	DAU			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Sub Kegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Persen	75 persen	79 persen	83 persen	87 persen	91 persen	1,086,710,000	APBD	Kab. Agam	
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tertatanya sistem dasar penanggulangan bencana	Persen	100	100	100	100	100	1,086,710,000	APBD	Kab. Agam	
	Sub Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P)	dokumen									
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report (BUR)</i> dan <i>National Communications</i>											DLH
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun											DLH
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)											DLH
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)											DLH
13.03.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) <i>kegiatan pendidikan nasional</i> , (b) <i>kurikulum</i> , (c) <i>pendidikan umum</i>											Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase tahapan silabus muatan lokal										
	Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Peningkatan Layanan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal										
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaksanaan BinteK Penyusunan Kompetensi dasar pendidik dalam penyusunan kurikulum Muatan Lokal		3 Mapel	3 Mapel	3 Mapel	3 Mapel	3 Mapel	1,288,610,000	DAU	Kab. Agam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											Dinas Pendidikan
13.a.1	Jumlah dana yang disediakan dan mobilisasinya dalam USD per tahun terkait dengan keberlanjutan mobilisasi dana untuk mencapai komitmen 100 milyar USD sampai tahun 2025											
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (<i>budget tagging</i>) untuk pendanaan perubahan iklim											DLH
13.b.1	Jumlah negara- negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan <i>nationally determined</i>											
TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN												
14.01.01	(a) Indeks eutrofikasi pesisir dan (b) kepadatan sampah plastik terapung											DLH, DPKP
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah kabupaten	%	51	58	60	65	70				
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	%	36	41	42	46	49				
		Persentase Pengurangan Sampah	%	15	17	18	19	21				
	Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten kota	Persentase Pengelolaan Sampah kabupaten	%	51	58	60	65	70				

	Sub Kegiatan Pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Persentase Pengelolaan Sampah kabupaten	%	51	58	60	65	70				
	Sub Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	15	17	18	19	21				
	Sub Kegiatan Sarana Prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/kota	Persentase Penanganan Sampah	%	36	41	42	46	49				
r	Persentase penurunan sampah terbuang ke laut											DLH, DPKP
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah kabupaten	%	51	58	60	65	70				
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	%	36	41	42	46	49				
		Persentase Pengurangan Sampah	%	15	17	18	19	21				
	Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten kota	Persentase Pengelolaan Sampah kabupaten	%	51	58	60	65	70				
	Sub Kegiatan Pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Persentase Pengelolaan Sampah kabupaten	%	51	58	60	65	70				
	Sub Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	15	17	18	19	21				
	Sub Kegiatan Sarana Prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/kota	Persentase Penanganan Sampah	%	36	41	42	46	49				
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan											DLH, DPKP
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan											DPKP
14.03.01	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai											DLH, DPKP
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman											DPKP
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut											DPKP
14.06.01	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)											DPKP
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha											DLH, Disperindagkop, DPMPSTSP
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Persentase ketaatan peanggunjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	27	30	33	35	37	162,000,000	DAU	Kab Agam	

[illegible]

15.6.1*	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata													DLH
42186	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal													
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL													
15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)													
42248	(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan													DLH
	(b) integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi													DLH
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis													DLH
15.a.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan													DLH
	(b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati													DLH
15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan													DLH
15.b.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan													DLH
	(b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi													DLH
	dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati													DLH
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan													DLH
15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap													
15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL													
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT ANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBAGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES Keadilan untuk semua, dan membangun KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN														
16.01.01	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.													Satpol PP,Kesbang Pol
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%						
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	Rp 9,361,111,108.00	DAU		Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
r	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.													Satpol PP, KESBANGPOL
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%						

	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	Rp 9,361,111,108.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
42371	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.											Satpol PP, KESBANGPOL
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	Rp 9,361,111,108.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	Rp 2,178,797,352.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.											Satpol PP, KESBANGPOL
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	Rp 9,361,111,108.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	Rp 2,178,797,352.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
42372	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi											Satpol PP, KESBANGPOL
	atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.											Satpol PP, KESBANGPOL
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%				

[illegible]

42403	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18												Satpol PP, KESBANGPOL
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	Rp 9,361,111,108.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.												Satpol PP, KESBANGPOL
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	Rp 9,361,111,108.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
16.03.01	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.												Satpol PP, KESBANGPOL
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.												Satpol PP, KESBANGPOL
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	Rp 9,361,111,108.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	Rp 2,178,797,352.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	Rp 2,713,772,964.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		

[illegible]

	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1,043,593,020,000	APBD		Bakeuda
	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	umlah dokumen anggaran dan pendapatan yang ditetapkan dengan regulasi daerah	buah	6 buah	6 buah	6 buah	6 buah	6 buah				Bakeuda
	Sub Kegiatan: oordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	oordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah asistansi RKA OPD	buah	52	52	52	52	52				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah Asistansi DPAOPD	buah	52	52	52	52	52				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah regulasi daerah terkait penyusunan APBD, 2 Perda, 2 Perbup	dokumen	4	4	4	4	4				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perbup terkait penyusunan APBD yang disusun, 2 Perbup	dokumen	2	2	2	2	2				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah rapat koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	kegiatan	5	5	5	5	5				Bakeuda
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.											Bakeuda
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1,043,593,020,000	APBD		Bakeuda
	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	umlah dokumen anggaran dan pendapatan yang ditetapkan dengan regulasi daerah	buah	6 buah	6 buah	6 buah	6 buah	6 buah				Bakeuda
	Sub Kegiatan: oordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	oordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah asistansi RKA OPD	buah	52	52	52	52	52				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah Asistansi DPAOPD	buah	52	52	52	52	52				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah regulasi daerah terkait penyusunan APBD, 2 Perda, 2 Perbup	dokumen	4	4	4	4	4				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perbup terkait penyusunan APBD yang disusun, 2 Perbup (standar biaya)	dokumen	2	2	2	2	2				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah rapat koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	kegiatan	5	5	5	5	5				Bakeuda
	Kegiatan :Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase proses	%	100%	100%	100%	100%	100%				Bakeuda
	Sub Kegiatan:Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah regulasi yang disusun (Perda tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah) Jumlah rekon kasda dengan Bank Negeri	dokumen	1	1	1	1	1				Bakeuda

	Sub Kegiatan:Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah rekon pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer dengan OPD	kali	12	12	12	12	12				Bakeuda
	Sub Kegiatan:Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen BKU Kasda yang disusun Jumlah Dokumen Lembar Konfirmasi Transfer yang disusun Jumlah Laporan Harian Kasda yang disampaikan Jumlah Laporan PFK yang disusun	dokumen dokumen kali	40 4 2	12 264 12	12 264 12	12 264 12	12 264 12				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D yang diterbitkan	lembar	3800	3800	3800	3800	3800				Bakeuda
	Kegiatan :Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan daerah yang disusun	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis				Bakeuda
	Sub Kegiatan:Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	12	12	12	12	12				Bakeuda
	Sub Kegiatan:Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan bulanan, semesteran terkait pertanggungjawab an keuangan	dokumen	18	14 1 44	14 1 44	14 1 44	14 1 44				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi terkait pertanggungjawaban APBD yang disusun (1 Perda, 1Perbup)	dokumen	2	2	2	2	2				Bakeuda
	Sub Kegiatan:Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah rapat penyusunan tanggapan/ tindak lanjut LHP BPK Jumlah sidang majelis penyelesaian kerugian daerah yang diadakan	paket kali	1	1 3	1 3	1 3	1 3				Bakeuda
	Sub Kegiatan:Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah regulasi tentang akuntansi dan pelaporan keuangan	dokumen	1	2	2	2	2				Bakeuda
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah fasilitasi periode pembayaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintahan nagari	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket				Bakeuda
	Sub Kegiatan:Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah fasilitasi pembayaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintahan nagari, dana desa	paket	1	1	1	1	1				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak	paket	1	1	1	1	1				Bakeuda
	Sub Kegiatan:Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan dana bagi hasil yang dilaksanakan	pakt	1	1	1	1	1				Bakeuda
	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	jumlah sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan yang dikelola	paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket				Bakeuda

	Sub Kegiatan: Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi yang dikelola (SIPD, E-Monev, BPHTB Online, SP2D Online)	Aplikasi	5	5	5	5	5				Bakeuda
	Sub Kegiatan: Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	paket	1	1	1	1	1				Bakeuda
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ 8											BAKEUDA, Organisasi
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100	100	100	100	100	429,876,472	APBD	Kabupaten Agam	Organisasi
	Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah dengan RB baik	persen									
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	dokumen									
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	3,744,605,650	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%		DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota yang di tetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	10 dokumen	4 Dok dan 55 Dok	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2,771,500,650	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Kegiatan analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase		100%	100%	100%	100%		DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	dokumen		7 Dok	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	560,770,000	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terevaluasinya perencanaan pembangunan daerah	Persentase		100%	100%	100%	100%		DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen		8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	412,335,000	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra / Renja)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	2,284,278,800	DAU	Kab. Agam	Bappeda

	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%		DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang di koordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	45 dok	3 dok	45 dok	45 dok	45 dok	1,079,279,100	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang Infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%		DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi, asistensi, monitoring evaluasi, dan harmonisasi dokumen perencanaan OPD lingkup bidang. Jumlah Penyusunan dokumen RKP, SSK dan penyusunan perda kawasan kumuh	Jumlah OPD dan Jumlah dokumen	11 OPD dan 3 Dokumen	8 dokumen	11 dok	11 dok	11 dok	1,204,999,700	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang di gunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan daan peningkatan kinerja	Persentase	100%	100%					DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum yang	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%		DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahn umum	Laporan	5 Laporan	3 laporan	4 Laporan 2 kajian	4 Laporan 2 kajian	4 Laporan 2 kajian	2,016,078,800	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase terfasilitasinya pengembangan inovasi OPD	Persentase		100%	100%	100%	100%		DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Laporan		3 laporan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	539,999,900	DAU	Kab. Agam	Bappeda
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB $\geq$ B											Inspektorat, Organisasi
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100	100	100	100	100	429,876,472	APBD	Kabupaten Agam	Organisasi

	Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah dengan RB baik	persen									
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	dokumen									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Persentase	82%	85%	85%	85%	85%	25,284,532,530	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%		DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Bappeda	bulan	14 Bulan	31 Orang	35 orang	39 orang	40 orang	17,166,963,283	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu pemenuhan pembayaran honorarium tenaga PTT (3 orang PTT dan 2 Orang Kontrak). Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	bulan	12 bulan 12 bulan	10 laporan	24 orang 6 orang	24 orang 6 orang	24 orang 6 orang	1,442,826,000	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%		DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	49,611,540	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Paket		2 paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	428,627,051	DAU		Bappeda
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan ATK, Benda Pos, Peralatan dan kebersihan.	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	150,042,400	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang di sediakan	paket	1 paket	5 paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	144,322,400	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	Laporan / Kegiatan	12 Laporan dan 150 kegiatan	12 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1,870,368,650	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%		DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket Kursi yang disediakan, Jumlah Paket Meja yang disediakan, luas partisi yang di sediakan	Unit	12 unit 6 unit 15 M2	1 paket	6 buah	8 buah	12 buah	222,764,000	DAU	Kab. Agam	Bappeda

	Sub kegiatan pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan AC ruangan Jumlah Pengadaan Komputer/Laptop Jumlah Pengadaan Printer, Jumlah pengadaan filing kabinet, Jumlah pengadaan LCD	Unit	4 unit 3 unit 2 unit 2 unit 2 unit	18 Unit	2 unit 4 unit 2 unit 1 unit	2 unit 4 unit 2 unit 1 unit	2 unit 4 unit 2 unit 1 unit	851,180,000.00	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyewaan gedung	Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	43,930,000	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%		DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, air dan listrik yang di bayarkan	Laporan	12 Laporan	4 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1,487,266,516	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga operator keuangan yang di bayarkan upah kerjanya Jumlah Tenaga Sopir yang dibayarkan upah kerjanya, Jumlah tenaga pertamanan yang dibayarkan upah kerjanya , Jumlah tenaga kebersihan yang di bayarkan upah kerjanya , Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayarkan upah kerjanya	Orang	2 orang 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang	12 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	891,924,000	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang di pelihara	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%		DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas /jabatan/operasional yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	Unit	2 unit	9 unit	12 bulan 2 unit	12 bulan 2 unit	12 bulan 2 unit	218,761,000	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub kegiatan pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang di pelihara	Unit			3 unit	3 unit	3 unit	17,380,000	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara Jumlah Komputer/Laptop yang di pelihara, Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10 unit 20 unit 25 unit	30 unit	10 unit 20 unit 25 unit	10 unit 20 unit 25 unit	10 unit 20 unit 25 unit	98,670,000	DAU	Kab. Agam	Bappeda
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan jumlah tenaga mekanik listrik yang dibayarkan upahnya	Unit	1 unit 10 hari	1 unit	12 bulan 1 unit 3 Orang/bulan	12 bulan 1 unit 3 Orang/bulan	12 bulan 1 unit 3 Orang/bulan	199,895,690	DAU	Kab. Agam	Bappeda
16.06.02	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.											DPMPSTSP, Capil, Dinkes, Organisasi

	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebijakan dibidang pelayanan publik dan tatalaksana yang terlaksana	persen	83.5	84	84.5	85	85.5	1,079,777,864	APBD	Kabupaten Agam	Organisasi
	Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah dengan RB baik	persen									
	Sub Kegiatan : Fasilitas Pelayanan Publik	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	laporan									
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.											Semua OPD
42552	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.											BKPSDM
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persentase Perempuan yang duduk di lembaga Legislatif	Persen	8.9	8.9	30%	30%	30%				DPPKBP3A, Setwan
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Persentase	6,65	8,20	10,25	12,82	16,02				
	Kegiatan :Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang dilatih dibidang politik dan ekonomi	Orang	100	100	100	100	100		DAU	Kab Agam	
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen									
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).											BAGIAN ORGANISASI
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN		55%	58%	62%	66%	70%				BKPSDM
	Mutasi dan Promosi ASN											BKPSDM
	Pengelolaan Promosi ASN	jumlah Assesment yang dilaksanakan dan Jumlah pengisian JPTP melalui panel serta Jumlah sidang Bapperjakat yang dilaksanakan			6 Kali 1 Kegiatan 2 Kegiatan	6 Kali 1 Kegiatan 2 Kegiatan	6 Kali 1 Kegiatan 2 Kegiatan	6 Kali 1 Kegiatan 2 Kegiatan	1,479,169,150	APBD	Kab. Agam	BKPSDM
16.07.02	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.											
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi											KesbangPol
	Program penguatan Ideologi Pancasila dan karakterkebangsaan	rogram penguatan Ideologi Pancasila dan karakterkebangsaan	%	10	10	10	10	10	371,000,000.00			
	Program pemberdayaan dan pengawasan Ormas	Persentase organisasi masyarakat dengan kinerja baik	%	10	10	10	10	10	703000000			
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan											KesbangPol
	Program penguatan Ideologi Pancasila dan karakterkebangsaan	rogram penguatan Ideologi Pancasila dan karakterkebangsaan	%	10	10	10	10	10	371,000,000.00			

	Program pemberdayaan dan pengawasan Ormas	Persentase organisasi masyarakat dengan kinerja baik	%	10	10	10	10	10	703000000			
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan											KesbangPol
16.08.01	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara- negara berkembang di Organisasi Internasional											
16.8.1.(a.)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.											DISDUKCAPIL
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, KIA, Surat Pindah)	%	93,86%	95	97	99	99	10.410.208.000			
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak)	%	92	94	96	98	99	471.970.000			
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.											DISDUKCAPIL
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, KIA, Surat Pindah)	%	93,86%	95	97	99	99	10.410.208.000			
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak)	%	92	94	96	98	99	471.970.000			
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun											DALDUK CAPIL
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, KIA, Surat Pindah)	%	93,86%	95	97	99	99	10.410.208.000			
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak)	%	92	94	96	98	99	471.970.000			
16.10.01	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.											Kesbang Pol
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	Rp 9,361,111,108.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	Rp	2,178,797,352.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	Rp	2,713,772,964.00	DAU	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
16.10.1 (a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.												Diskominfo
16.10.1 (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).												Kesbang Pol
	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	jumlah rapat koordinasi pantau ATHG, pengawasan orang asing, dan tenaga kerja asing dan rapat koordinasi penanganan konflik sosial	%	60	60	65	70	70		2,952,000,000.00			
16.10.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.												Kesbang Pol
	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	jumlah rapat koordinasi pantau ATHG, pengawasan orang asing, dan tenaga kerja asing dan rapat koordinasi penanganan konflik sosial	%	60	60	65	70	70		2,952,000,000.00			
16.10.2 *	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau												
	jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.												Diskominfo
16.10.2 (a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif												Diskominfo
16.10.2 (b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.												Diskominfo
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.												Kesbang Pol
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional												Kesbang Pol
16.b.1. (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.												KESBANGPOL
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITAISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN													
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		%	6.68%	7.36%	7.34%	7.36%	7.35%					Bakeuda
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kemandirian Keuangan Daerah	%	7,8	9,5	10,7	11,7	13.00%		49,922,000,000.00			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%					
	Sub Kegiatan: Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah kebijakan teknis pengembangan pendapatan daerah yang disusun	paket	1	1	1	1	1					

	Sub Kegiatan: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kebijakan teknis pengembangan pendapatan daerah yang disusun	paket	1	2 Perda 8 SK	13 Perbup 8 SK	8 SK	8 SK				
	Sub Kegiatan: Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang kebijakan pajak daerah	paket	1	2	1	1	1				
	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang diadakan	paket	1	1 aplikasi 1 unit	1 aplikasi 1 unit	1 aplikasi 1 unit	1 aplikasi 1 unit				
	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak	kegiatan	1	2	2	2	2				
	Sub Kegiatan: Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	1	1	1	1	1				
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHT)	Jumlah kegiatan penilaian wajib pajak dan objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	paket	2	2	2	2	2				
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah kegiatan penetapan wajib pajak daerah yang ditetapkan	kegiatan	1	1	1	1	1				
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Jumlah kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	kegiatan	1	1	1	1	1				
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	kegiatan	1	6	6	6	6				
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen kelengkapan penagihan yang dicetak Operasional penagihan	kegiatan	2	3	3	3	3				
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan serta memberikan penghargaan	kegiatan	2	2	2	2	2				
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	kegiatan	2	2	2	2	2				
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.											BAKEUDA
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kemandirian Keuangan Daerah	%	7,8	9,5	10,7	11,7	13.00%	49,922,000,000.00			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
	Sub Kegiatan: Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah kebijakan teknis pengembangan pendapatan daerah yang disusun	paket	1	1	1	1	1				
	Sub Kegiatan: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kebijakan teknis pengembangan pendapatan daerah yang disusun	paket	1	2 Perda 8 SK	13 Perbup 8 SK	8 SK	8 SK				
	Sub Kegiatan: Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang kebijakan pajak daerah	paket	1	2	1	1	1				
	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang diadakan	paket	1	1 aplikasi 1 unit	1 aplikasi 1 unit	1 aplikasi 1 unit	1 aplikasi 1 unit				

	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak	kegiatan	1	2	2	2	2				
	Sub Kegiatan: Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	1	1	1	1	1				
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHT)	Jumlah kegiatan penilaian wajib pajak dan objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	paket	2	2	2	2	2				
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	umlah kegiatan penetapan wajid pajak daerah yang ditetapkan	kegiatan	1	1	1	1	1				
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Jumlah kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	kegiatan	1	1	1	1	1				
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	kegiatan	1	6	6	6	6				
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen kelengkapan penagihan yang dicetak Operasional penagihan	kegiatan	2	3	3	3	3				
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasasn serta memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak	kegiatan	2	2	2	2	2				
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	kegiatan	2	2	2	2	2				
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.											BAKEUDA
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kemandirian Keuangan Daerah	%	7,8	9,5	10,7	11,7	13,00%	49,922,000,000.00			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
	Sub Kegiatan: Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah kebijakan teknis pengembangan pendapatan daerah yang disusun	paket	1	1	1	1	1				
	Sub Kegiatan: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kebijakan teknis pengembangan pendapatan daerah yang disusun	paket	1	2 Perda 8 SK	13 Perbup 8 SK	8 SK	8 SK				
	Sub Kegiatan: Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang kebijakan pajak daerah	paket	1	2	1	1	1				
	Sub Kegiatan:Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	paket	1	1 aplikasi 1 unit	1 aplikasi 1 unit	1 aplikasi 1 unit	1 aplikasi 1 unit				
	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak	kegiatan	1	2	2	2	2				
	Sub Kegiatan: Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	1	1	1	1	1				
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHT)	Jumlah kegiatan penilaian wajib pajak dan objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	paket	2	2	2	2	2				
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	umlah kegiatan penetapan wajid pajak daerah yang ditetapkan	kegiatan	1	1	1	1	1				

	Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Jumlah kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	kegiatan	1	1	1	1	1				
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	kegiatan	1	6	6	6	6				
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen kelengkapan penagihan yang dicetak Operasional penagihan	kegiatan	2	3	3	3	3				
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan serta memberikan penghargaan	kegiatan	2	2	2	2	2				
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	kegiatan	2	2	2	2	2				
17.02.0 1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara- negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/ Komite Bantuan											BAKEUDA
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB											BAKEUDA
17.03.0 1	Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment/ FDI</i>) , bantuan pembangunan dan											DPMP TSP Naker
	Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.											Bagian Perekonomian
17.03.0 2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.											Bagian Perekonomian
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (<i>dalam US dollars</i>) terhadap PDB.											
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.											
17.05.0 1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara- negara berkembang termasuk negara- negara kurang berkembang											
17.06.0 1	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya											Diskominfo
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) terhadap total rumah tangga											Diskominfo
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Fiber optic yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Agam hanya untuk OPD di pusat Pemerintahan (Lubuk Basung)										Diskominfo
17.07.0 1	Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.											Diskominfo
17.8.1*	Persentase pengguna internet											DISKOMINFO
17.18.0 1	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs	Presentase indikator-indikator statistik yang memenuhi indikator-indikator SDGs	Persen	70	80	90	95	100				Bappeda, Diskominfo
	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	840,000,000	APBD	Agam	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral lingkup daerah	Persen	100	100	100	100	100	982,025,000	APBD	Agam	

	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah FGD yang dilaksanakan, jumlah nagari statistik yang dibina, jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan, jumlah survey, kompilasi statistik sektoral dan analisis data statistik sektoral yang dilaksanakan, persentase survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1,084,025,000	APBD	Agam	
17.09.0 1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara- Selatan, Selatan- Selatan dan Triangular) yang <u>dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang</u>											
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST											
17.9.1.(b)	Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular											
17.10.0 1	Rata-rata tarif terbobot dunia <i>Free Trade Agreement (FTA)</i> .											
17.10.1 (a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati											
17.11.0 1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.											
17.11.1 (a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas											Disperindagkop
17.12.0 1	Rata-rata tarif terbobot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan <u>negara berkembang pulau kecil</u>											
17.13.1 *	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.											Bappeda
17.14.0 1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan <u>berkelanjutan</u> .											Bappeda
17.15.0 1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.											Bappeda
17.16.0 1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.											
17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).											
17.17.1 (a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.											BAKEUDA
17.17.1 (b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).											BAKEUDA
17.17.1 (c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.											BAKEUDA
17.18.0 1	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs											Bappeda, Diskominfo
17.18.1 (a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											Bappeda, Diskominfo
	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	840,000,000	APBD	Agam	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral lingkup daerah	Persen	100	100	100	100	100	982,025,000	APBD	Agam	

	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah FGD yang dilaksanakan, jumlah nagari statistik yang dibina, jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan, jumlah survey, kompilasi statistik sektoral dan analisis data statistik sektoral yang dilaksanakan, persentase survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1,084,025,000	APBD	Agam	
17.18.1 (b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											Bappeda, Diskominfo
	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	840,000,000	APBD	Agam	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral lingkup daerah	Persen	100	100	100	100	100	982,025,000	APBD	Agam	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah FGD yang dilaksanakan, jumlah nagari statistik yang dibina, jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan, jumlah survey, kompilasi statistik sektoral dan analisis data statistik sektoral yang dilaksanakan, persentase survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1,084,025,000	APBD	Agam	
17.18.2 *	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.											Bappeda, Diskominfo
17.18.3 *	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.											Bappeda, Diskominfo
17.19.0 1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.											Bappeda, Diskominfo
17.19.1 (a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.											Bappeda, Diskominfo
	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	rekomendasi kegiatan statistik.	Persen	100	100	100	100	100	840,000,000	APBD		
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral lingkup daerah	Persen	100	100	100	100	100	982,025,000	APBD		
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah FGD yang dilaksanakan, jumlah nagari statistik yang dibina, jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan, jumlah survey, kompilasi statistik sektoral dan analisis data statistik sektoral yang dilaksanakan, persentase survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1,084,025,000	APBD		
17.19.1 (b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.											Bappeda, Diskominfo
	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	rekomendasi kegiatan statistik.	Persen	100	100	100	100	100	840,000,000	APBD		
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral lingkup daerah	Persen	100	100	100	100	100	982,025,000	APBD		

	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah FGD yang dilaksanakan, jumlah nagari statistik yang dibina, jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan, jumlah survey, kompilasi statistik sektoral dan analisis data statistik sektoral yang dilaksanakan, persentase survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1 Kali, 16 Nagari, 2 Kali, 9 kegiatan, 100 persen	1,084,025,000	APBD		
17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan											Perkim
	b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.											Disduk Capil
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, KIA, Surat Pindah)	%	93,86%	95	97	99	99	10.410.208.000			
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak)	%	92	94	96	98	99	471.970.000			
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.											Perkim
17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>).											DISDUKCAPIL
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, KIA, Surat Pindah)	%	93,86%	95	97	99	99	10.410.208.000			
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak)	%	92	94	96	98	99	471.970.000			

Lampiran 1.

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN: TANAH DATAR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
	Program: Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian											
	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota											
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Luasan Pengembangan Kawasan Tana- man Padi Salibu	Ha	60	65	65	65	65	2.862.000.000,-	APBD	Kab. Tanah Datar	Dinas Pertanian
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.											
	Program: Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian											
	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota											
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Luas Pengem- bangan kawasan bawang merah lokal	Unit	7	3	3	2	2	737.000.000,-	APBD	Kab. Tanah Datar	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah penye- diaan bibit/benih unggul berlabel (sertifikasi Benih Hortikultura)	Komoditi	4	4	4	4	4	1.170.000.000,-	APBD	Kab. Tanah Datar	Dinas Pertanian
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.											
	Program: Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian											
	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengendalian Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Penga- daan bibit, pakan dan Pelatihan pelestarian itik Pitalah sebagai Plasma Nutfah	Paket	3	3	3	3	3	732.000.000,-	APBD	Kab. Tanah Datar	Dinas Pertanian
	Kegiatan: Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota Lain											
	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penga- daan ternak, pakan, pelatihan peternakan utk. masyarakat	Paket	3	3	3	3	3	5.244.999.925,-	APBD	Kab. Tanah Datar	Dinas Pertanian

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	2.365.240.000,-	DAU dan DAK	Kab. Tanah Datar	Dinas Kesehatan
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.											
	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Penemuan Suspek dan Kasus HIV	Kasus	100	100	100	100	100	829.250.000,-	DAU dan DAK	Kab. Tanah Datar	Dinas Kesehatan
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.											
	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Penemuan Suspek dan Kasus TBC	Kasus	100	100	100	100	100	647.200.000,-	DAU dan DAK	Kab. Tanah Datar	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.											
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.											
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.											
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.											

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
3.8.2.[a	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).											
	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan		100	100	100	100	100	221.913.893.500,-	DAU dan DAK	Kab. Tanah Datar	Dinas Kesehatan
03.09.01	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.											
03.09.02	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.											
03.09.03	Angka kematian akibat keracunan.											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.											
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.											
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.											
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.											
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.											
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.											
3.d.2	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.											
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA												
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											
	Literasi :											
	- SD	%		10	15	20	25	30				
	- SMP	%		12,5	17,5	22.5	27.5	32,5				
	Numerasi :											
	- SD	%		5	10	15	20	25				
	- SMP	%		9,32	14,32	19,32	24,32	29,32				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Pengelolaan Pendidikan											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	Paket	4	4	4	4	4	20.615.000.000,-	DAU/DAK	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar dan Ujian Bagi Peserta	Terselenggaranya proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Satuan Pendidikan	305	305	305	305	305	3.661.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/ lomba akademi dan non akademik	Peserta Didik	200	200	200	200	200	3.949.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Orang	2900	2900	2900	2900	2900	5.399.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan sekolah	Satuan Pendidikan	305	305	305	305	305	2.209.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	Paket	9	9	9	9	9	4.186.000.000,-	DAU/DAK	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar dan Ujian Bagi Peserta	Terselenggaranya proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Satuan Pendidikan	1000	1000	1000	1000	1000	5.189.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/ lomba akademi dan non akademik	Peserta Didik	200	200	200	200	200	4.049.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	56	56	56	56	56	65.000.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya kapasitas pengelola dana BOS sekolah menengah pertama dengan baik	Orang	10	10	10	10	10	400.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang TU yang direhab	Ruang	1	1	1	1	1	1.000.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang Kepala Sekolah yang direhab	Ruang	1	1	1	1	1	1.000.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini											
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	Ruang	2	2	2	2	2	1.000.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	Unit	8	8	8	8	8	1.500.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang terehab	Ruang		1	1	1	1	600.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang terehab	Ruang		1	2	2	2	1.400.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Perlengkapan Siswa PAUD yang tersedia	Unit	1	1	1	1	1	500.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD yang tersedia	Peserta Didik	20	20	20	20	20	250.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dana BOP PAUD yang tersedia	Satuan Pendidikan	400	400	400	400	400	27.500.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.											
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.											
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.											
4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).											
04.04.01	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.											
04.06.01	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		%	100	100	100	100	100				
	Program : Pengelolaan Pendidikan											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan											
	Sub. Kegiatan Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru non formal/kesetaraan	Gedung/ruang kelas/ ruang guru non formal /kesetaraan yang terbangun	Ruang	1	1	1	1	1	1.000.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang terbangun	Unit	1	1	1	1	1	750.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
	Pengadaan Mebel	Mebel yang diadakan	Paket	1	1	1	1	1	300.000.000,-	DAU	Kab. Tanah Datar	Dinas Dikbud.
TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				TARGET TAHUNAN					INDIKATIF			

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).											
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.											
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.											
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.											
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN												
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.											
	Program: Pengurustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan											
	Kegiatan: Pelembagaan Pengurustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Terlaksananya advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengurustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	39	39	39	39	39	150.000.000,-	APBD	Kab. Tanah Datar	Dinas Sosial PPPA
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.											

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku											
06.04.01	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.											
06.04.02	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediannya.											
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya											
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya											
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).											
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.											
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.											
6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.											
6.b.1.	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.											
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA												
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.											
	Program :.....											
	Kegiatan :											
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.											
07.01.02	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.											
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.											
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.											
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.											
7.3.1*	Intensitas energi primer.											
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.											
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
10.07.01	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.											
10.07.02	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.											
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.											
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.											
10.07.03	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.											
10.07.04	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.											
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.											
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).											
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.											
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN												
11.01.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.		Kecamatan	14	14	14	14	14				
	Program: Kawasan Permukiman											
	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman											
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh								200.000.000,-	APBD	Kab. Tanah Datar	Dinas Perkim LH
	Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											
	Sub Kegiatan : Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh								125.892.000,-	APBD	Kab. Tanah Datar	Dinas Perkim LH
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								866.000.000,-	DAK	Kab. Tanah Datar	Dinas Perkim LH
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh								500.000.000.-	DAK	Kab. Tanah Datar	Dinas Perkim LH
	Kegiatan: Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								1.002.819.410	APBD	Kab. Tanah Datar	Dinas Perkim LH
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											
11.02.01	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas											
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik											
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum											
11.03.01	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk											
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk											
11.03.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis											
11.04.01	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)											
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)											
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
11.05.02	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar											
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB											
11.06.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotan yang dihasilkan oleh suatu kota											
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya											

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.											
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)											
12.b.1	Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan											
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development											
12.c.1*	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.											
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA												
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>											
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana											
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report (BUR)</i> dan National Communications											
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun											

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan											
14.03.01	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai											
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman											
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut											
14.06.01	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha											
14.07.01	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)											
14.a.1	Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan											
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil											
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan											
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi											
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)											
TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELLOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEJARAGAMAN HAYATI												
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan											
	Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)											
	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								3.649.673.237	APBD	Kab. Tanah Datar	Dinas Perkim LH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026					
	formal maupun informal, berdasarkan jenismekanisme penyelesaian.												
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access toJustice Index)												
16.04.0 1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluarnegeri (dalam US\$).												
16.04.0 2	Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yangsejalan dengan instrumen internasional.												
16.05.0 1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.												
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).												
16.05.0 2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memilikikontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.												
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.		Rp.	1.298.735.563.234	1.405.133.410.000	1.560.527.618.000	1.621.119.831.000	1.621.119.831.000	7.506.636.253.234,-	APBD	Kab. Tanah Datar	Badan Keuangan Daerah	
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yangmendapat opini WTP.	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		APBD	Kab. Tanah Datar	Badan Keuangan Daerah	
	Program: Pengelolaan Keuangan Daerah									12.759.579.945,-	APBD	Kab. Tanah Datar	Badan Keuangan Daerah
	Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									7.381.081.926,-	APBD	Kab. Tanah Datar	Badan Keuangan Daerah
	Kegiatan: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									2.297.760.700,-	APBD	Kab. Tanah Datar	Badan Keuangan Daerah
	Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									2.168.432.669	APBD	Kab. Tanah Datar	Badan Keuangan Daerah
	Kegiatan: Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah									912.304.650	APBD	Kab. Tanah Datar	Badan Keuangan Daerah
	Program: Pengelolaan Barang Milik Daerah									5.868.335.779.134	APBD	Kab. Tanah Datar	Badan Keuangan Daerah
TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				TARGET TAHUNAN					INDIKATIF				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TABEL RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (RAD TPB) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022-2026

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG											
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN												
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.											
DPMD (Tingkat Kemiskinan Ekstrim)	Program : PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase nagari yang tertata	%	100	100	100	100	100	878.909.513	DAU	Padang Pariaman	DPMD
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah penyelenggaraan penataan Nagari	%	100	100	100	100	100	878.909.513	DAU	Padang Pariaman	DPMD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Nagari yang memiliki Sarana dan Prasarana yang layak	Nagari	5	10	10	15	15	194.254.054	DAU	Padang Pariaman	DPMD
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pengembang an Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	%	68	70	72	74	75	5.753.800.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	PersentasePotensi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) terlaksana	%	50	53	55	57	60	405,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Sub. Kegiatan :											
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Peningkatan sumber pembangkit listrik di wilayah terpencil yang terlaksana	KK	5	5	6	6	6	235,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Peningkatan subsidi bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan listrik dari PLN dan non PLN yg terlaksana	KK	5	5	5	6	6	170,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT								0			
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumbar Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Persentase Potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif	%	100	100	100	100	100	5.348.800.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Sub. Kegiatan:											
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang diberdayakan	orang	103	103	103	103	103	1,520,000,000	DADU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan	orang	17	17	17	17	17	585,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah KUBE	kube	2	10	10	10	10	917,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	yang diberi bantuan										P3A
		Jumlah peserta Bimtek calon penerima bantuan KUBE	orang	100	100	100	100	100	229,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Tersalurkannya Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan (Sembako)	kali	36	36	36	36	36	265,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertemuan Pengurus Karang Taruna yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	383,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Peringatan Bulan Bhakti Karang Taruna yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	400,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Jumlah bintek LKKS yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	150,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Pakaian Seragam Pengurus LKKS	Paket	1	1	1	1	1	100,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Rapat Pengurus LKKS yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	174,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Rapat Koordinasi dengan Jejaring Kerja dan Mitra	Kali	1	2	2	2	2	162,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Kerja LKKS yang dilaksanakan										
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Sosialisasi LK3 yng dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	100,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Rapat LK3 yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	186,800,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Jumlah Kasus permasalahan rumah tangga yang tertangani melalui LK3	Orang	20	40	40	40	40	164,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Monev LK3 yang dilakukan	kali	2	2	2	2	2	179,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Program : REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bantuan dan Bimbingan sosial	%	90	92	95	98	100	5.661.500.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Kegiatan :										PD.PRM	DINSOS P3A
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan dibantu kebutuhan dasarnya	%	90	92	95	98	100	4.521.500.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Sub Kegiatan :									DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar yang dibantu	orang	30	50	50	50	50	416.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		pemenuhan kebutuhan dasarnya (permakanan)										
	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya (pakaian)	orang	30	50	50	50	50	386.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang diberikan ke Penyandang Disabilitas(Tongkat, Kursi Roda dan lainnya)	orang	10	10	15	15	20	170,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	biaya Pekerja Sosial Profesional/ Pegawai Dinas Sosial yang melakukan Reunifikasi/pe mulangan kembali ke keluarga	Kali / tahun	2	2	2	2	2	145,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah para penyandang cacat yang diberikan bantuan dan dididik dan dilatih	orang	10	20	20	20	20	241,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Pengembang an sarana prasarana public yang	sarana	3	3	4	4	5	350,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		ramah disabilitas yang dilakukan										
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Bimbingan sosial yang diberikan kepada untuk disabilitas, lansia, anak terlantar, gelandangan dan pengemis	kali /ahun	2	2	2	2	2	167,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Jumlah Lansia Terlantar yang diberi bantuan	orang	25	40	40	40	40	406,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial	orang	10	10	10	10	10	210,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		biaya transpor anak terlantar, lansia, Penyandang Disabilitas	orang	10	10	10	10	10	210,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	biaya transpor anak terlantar, lansia, Penyandang Disabilitas	orang	10	10	10	10	10	210,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase pemberian data dan pengaduan mengenai Penyandang	%	100	100	100	100	100	225,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pendampingan kepada lansia, anak terlantar, disabilitas, gelandangan dan pengemis berupa penyelamatan dan evakuasi, pemulihan kondisi fisik, pemulihan kondisi psikologis, pemulihan kondisi sosial, intervensi krisis, advokasi, rujukan dan pengurusan Jenazahnya	Orang	10	10	10	10	10	210,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Bantuan sosial bagi lansia, anak terlantar dan Penyandang Disabilitas lainnya	orang	10	10	10	10		143.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		berupa paket sembako, uang sembako dan kebutuhan lainnya.										
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan penelusuran keluarga	orang	10	10	10	10	10	210.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Pemberian Layanan Rujukan	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan layanan rujukan	orang	10	10	10	10	10	210,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Kegiatan :											
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	1,140,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah eks PSK, anak yg berhadapan	orang	20	25	25	25	25	350,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		dgn hukum, orang gila yang dididik dan dilatih dan diberi bantuan usaha										
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Upacara Peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan	orang	1 kali	300	300	300	300	285,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Upacara Ziarah Hari Pahlawan yang dilaksanakan	kali	1	1	1	1	1	105,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Bantuan Pakaian Kerja Veteran	paket	1	1	1	1	1	150,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Pemberian Bantuan Paket Sembako bagi Anggota Veteran	kali	2	2	2	2	2	250,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
										DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	%	10	12	14	16	18	4.221..000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Kegiatan:									DAU	PD.PRM	DINSOS

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
												P3A
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlaantar yang tertangani	%	55	60	63	65	67	360.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Sub Kegiatan :											
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penjemputan atau penyelamatan terhadap anak terlantar yang tertangani	kali	4	4	4	4	4	180.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan layanan rujukan	kali	4	4	4	4	4	180.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Kegiatan :											
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	70	73	75	78	80	4.221.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Sub Kegiatan:											
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlaantar yang tertangani	%	100	100	100	100	100	360.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penjemputan atau penyelamatan	kali	2	2	2	2	2	180.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		terhadap anak terlantar yang tertangani										
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan layanan rujukan	Kali	2	2	2	2	2	180.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	900.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Bimbingan teknis bagi petugas kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	303.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Pengolahan data fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten	Buku DTKS Tahun 2021	Dokumen	1	1	1	1	1	108.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah SDM PKH yang terfasilitasi	orang	67	67	67	67	67	1.950.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar.	orang	15	15	15	15	15	210.000.000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.											
	Program : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan	Persen	10%	12%	14%	16%	18%	4,221,000,000		Kabupaten Padang Pariaman	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial										Perlindungan Anak
	Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlaantar yang tertangani	Persen	55%	60%	63%	65%	67%	300,000,000			
	Sub Kegiatan : Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penjemputan atau penyelamatan terhadap anak terlantar yang tertangani	Kali	4kali	4kali	4kali	4kali	4kali	180,000,000			
	Sub Kegiatan : Rujukan Anak-Anak Terlantar	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan layanan rujukan	Kali	4kali	4kali	4kali	4kali	4kali	180,000,000			
	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana		70%	73%	75%	78%	80%	4,221,000,000			
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlaantar yang tertangani		100 %	100%	100%	100%	100%	360,000,000			
	Sub Kegiatan : Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penjemputan atau penyelamatan		2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	180,000,000			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		terhadap anak terlanter yang tertangani										
	Sub Kegiatan : Rujukan Anak-Anak Terlanter	biaya Pekerja Sosial Profesional/Pegawai Dinas Sosial yang melakukan layanan rujukan		2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	180,000,000			
	Sub Kegiatan : Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlanter								0			
	Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilaksanakan		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	900,000,000			
		Bimbingan teknis bagi petugas kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	303,000,000			
	Sub Kegiatan : Pengolahan data fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten	Buku DTKS Tahun 2021		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	138,000,000			
	Sub Kegiatan : Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah SDM PKH yang terfasilitasi		67 orang	67 orang	67 orang	67 orang	67 orang	1,950,000,000			
	Sub Kegiatan : Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar.		15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	210,000,000			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Outcome : Presentase Penurunan Kasus kekerasan dan Perlindungan terhadap perempuan		35%	37%	38%	39%	40%	1,002,000,000			
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana		100 %	100%	100%	100%	100%	278,000,000			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan nagari yang teradvokasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari yang dilakukan		6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	278,000,000			
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang		100 %	100%	100%	100%	100%	489,000,000			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Memerlukan Koordinasi yang di laksanakan										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani dan dilakukan Penjangkauan		10 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	245,000,000			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan terhadap layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan.		20 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	244,000,000			
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan		100 %	100%	100%	100%	100%	235,000,000			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								0			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber	Jumlah		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	235,000,000			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi Pengurus Lembaga Layanan P2TP2A dan PUSPAGA yang dilaksanakan										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								0			
	Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								0			
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.											
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.											
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.											
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.											
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.											
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.											
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana											
	Program : PENANGANAN BENCANA	Persentase Tertanggulangi Korban		100 %	100%	100%	100%	1				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Bencana Alam										
	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial		100 %	100%	100%	100%	100%				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	Jumlah bantuan logistik (Makanan) bagi korban bencana yang diberikan		100 paket	100 paket	100 paket	100 paket	100 paket				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah bantuan logistik (Sandang) bagi korban bencana yang diberikan		100 paket	100 paket	100 paket	100 paket	100 paket				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang tersedia		15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali				
	Sub Kegiatan : Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Survey Rumah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang dilakukan		2 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit				
	Kegiatan : Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota	Jumlah bantuan sosial dan		1 Orang	1 Orang	2 orang	2 orang	2 orang				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		rehabilitasi rumah korban bencana yang dilakukan										
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Menyediakan Konselator untuk mendampingi korban bencana		100 %	100%	100%	100%	100%				
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Output : Presentase Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota yang terlaksana		2x	2x	2x	2x	2x				
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.											
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.											
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.											
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN												
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).											
	Program : Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Rasio kelompok tani yang menggunakan		80%	85%	90%	95%	100%			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		alsintan										an Pangan
		Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun	Persentase(%)	40%	45%	50%	55%	60%			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah pelepasan bibit/benih bersertifikat	Varietas	1 varietas	0 varietas	0 varietas	0 varietas	0 varietas			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan	Persentase(%)	80%	85%	90%	95%	100%	11,914,887,382		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah poktan penghasil benih/bibit tanaman hortikultura yang dibina	Poktan	2 Poktan	2 Poktan	2 Poktan	2 Poktan	2 Poktan	815,000,000		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah poktan pertanian organik yang dibina	Poktan	8 Poktan	8 Poktan	8 Poktan	8 Poktan	8 Poktan			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah monitoring kegiatan peningkatan produksi pertanian	Kali	200 kali	200 kali	200 kali	200 kali	200 kali			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Jumlah poktan pengolahan tanaman perkebunan (kelapa) yang dibina	Poktan	1 Poktan	1 Poktan	1 Poktan	1 Poktan	1 Poktan			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah poktan seribu desa mandiri benih (SDMB) yang dibina	Poktan	5 poktan	5 poktan	5 poktan	5 poktan	5 poktan			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah poktan penangkar benih tanaman pangan yang dibina	Poktan	7 Poktan	8 Poktan	9 Poktan	9 Poktan	9 Poktan			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah pembinaan/pelatihan terhadap poktan pelaksana intensifikasi tanaman pangan	Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah alsintan yang diadakan	Unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	11,099,887,382		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah pendampingan penyaluran bantuan alsintan dana		30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		APBN dan APBD										Pangan
		Jumlah alsintan yang diperbaiki		5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah brigade tanam yang dioperasionalkan		50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah fasilitas pengolahan kelapa yang difasilitasi		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah poktan yang difasilitasi sarana pasca panen dan pengolahan hasil		1 Poktan	1 Poktan	1 Poktan	1 Poktan	1 Poktan			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah fasilitas agribisnis tanaman perkebunan yang difasilitasi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi		34 kali	34 kali	34 kali	34 kali	34 kali	425,000,000		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
											Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program : Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana		92%	93%	94%	95%	96%	20,211,812,212		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase peningkatan pembangunan /rehabilitasi jalan pertanian per tahun		5%	5%	5%	5%	5%			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif		23.50%	35.20%	47.00%	58.82%	70.5%			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan		80%	85%	90%	95%	100%	755,000,000		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengendalian perda LP2B		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	330,000,000		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	-Jumlah operasional kegiatan DAK		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Bidang Pertanian										Ketahanan Pangan
	Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prasarana pertanian		65%	70%	75%	80%	85%	19,456,812,212		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun/rehabilitasi		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1,350,000,000		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun/direhabilitasi		4 KM	5 KM	4 KM	4 KM	3,5 KM	4,493,585,284		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun/direhabilitasi		6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	3,744,012,500		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang terfasilitasi kebutuhan operasionalnya		17 BPP	17 BPP	17 BPP	17 BPP	17 BPP	7,969,214,428		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pertanian lainnya yang dibangun/rehabilitasi		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1,900,000,000		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Jumlah dokumen studi kelayakan (Feasibility Study) Food Estate		1 dokumen	0	0	0	0			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan		350 Ha	400 Ha	450 Ha	500 Ha	550 Ha	1,072,268,619		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan		350 Ha	400 Ha	450 Ha	400 Ha	550 Ha	1,072,268,619		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Jumlah hama tanaman perkebunan (tupai) yang dikendalikan		5000 ekor	5000 ekor	5000 ekor	5000 ekor	5000 ekor	1,072,268,619		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		- Jumlah obat-obatan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diadakan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		- Jumlah areal lahan sawah yang terfasilitasi utk mengikuti program AOTP		1.000 Ha	1.000 Ha	1.000 Ha	1.000 Ha	1.000 Ha			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
											Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program : Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kelas kelompok tani		34 Poktan	34 Poktan	34 Poktan	34 Poktan	34 Poktan	1,179,695,082		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kelas kelompok tani		34 Poktan	34 Poktan	34 Poktan	34 Poktan	34 Poktan	1,179,695,082		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	- Jumlah penyuluh pertanian yang dilatih		60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	387,500,000		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		- Jumlah program penyuluhan yang tersusun		104 dokumen	104 dokumen	104 dokumen	104 dokumen	104 dokumen			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		- Jumlah kategori penilaian yang		4 kategori	4 kategori	4 kategori	4 kategori	4 kategori			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		dilombakan pada kelembagaan penyuluhan										Ketahanan Pangan
		- Jumlah Pos Penyuluhan Pertanian Nagari (Posluhnag) yang dikembangkan		10 Posluhnag	10 Posluhnag	10 Posluhnag	10 Posluhnag	10 Posluhnag			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		- Jumlah Penas Tani dan Hari Krida Pertanian yang dilaksanakan		1 Kali	2 Kali	1 Kali	2 Kali	1 Kali			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- Jumlah petani yang dilatih		100 petani	100 petani	100 petani	100 petani	100 petani	200,000,000		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		- Jumlah kelompok tani yang diproses peningkatan kelasnya		34 Poktan	34 Poktan	34 Poktan	34 Poktan	34 Poktan				
		- Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan petani		3 kategori	3 kategori	3 kategori	3 kategori	3 kategori			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan konstratani (DAK Non		204 dokumen	204 dokumen	204 dokumen	204 dokumen	204 dokumen	592,195,082		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Fisik)										an Pangan
	Program : Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (PPH)		88.90	89.30	89.70	90.10	90.50	3,267,513,798		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari)		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Ketersediaan protein (Gram/kap/hari)		55.66	56.47	57.28	58.09	58.90			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi nilai koefisien harga pangan pokok		≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	335,500,000		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan neraca bahan makanan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	48,000,000		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pasar yang dipantau dan dianalisis		7 pasar kecamatan	7 pasar kecamatan	7 pasar kecamatan	7 pasar kecamatan	7 pasar kecamatan	167,500,000		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan	- Jumlah		8	8	8	8	8	120,000,000		Kab. Padang	Dinas

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	dan Jaringan Distribusi Pangan	kelompok lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dibina/didampingi		Poktan	Poktan	Poktan	Poktan	Poktan			Pariaman	Pertanian dan Ketahanan Pangan
		- Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang dibina/didampingi		6 Poktan	6 Poktan	6 Poktan	6 Poktan	6 Poktan			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Peningkatan rasio cadangan pangan		10%	20%	40%	60%	80%	571,669,908		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP) yang diadakan		6,4 Ton	8 Ton	8 Ton	8 Ton	15 Ton	571,669,908		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor pola pangan harapan (PPH) yang ideal		88.90	89.30	89.70	90.10	90.50	2,360,343,890		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Laporan pola pangan harapan (PPH)		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	60,000,000		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan P2L		2 Poktan	2 Poktan	2 Poktan	2 Poktan	2 Poktan	2,300,343,890		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		- Jumlah lomba cipta menu yang dilaksanakan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		- Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan P2L		1 KWT	1 KWT	10 KWT	10 KWT	10 KWT			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		- Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan P2L (DAK Non Fisik)		2 Poktan	2 Poktan	2 Poktan	2 Poktan	2 Poktan			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		- Jumlah Hari Pangan Sedunia (HPS) yang dilaksanakan		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		- Jumlah jambore PKK yang dilaksanakan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program : Pengawasan keamanan pangan	Persentase peningkatan pangan segar		80%	85%	90%	95%	100%	235,597,132		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		asal tumbuhan untuk dikonsumsi										Ketahanan Pangan
	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terawasnya keamanan pangan segar asal tumbuhan		100 %	100%	100%	100%	100%	235,597,132		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan jajanan anak sekolah		4 SD	4 SD	4 SD	4 SD	4 SD	52,613,701		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah pasar dan sekolah yang uji sampel jajanan		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji keamanan pangan		20 sampel	25 sampel	30 sampel	35 sampel	40 sampel	182,983,431		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.											
	Program : Pengawasan keamanan pangan	Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi		80%	85%	90%	95%	100%	235,597,132		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terawasinya keamanan pangan segar asal tumbuhan		100 %	100%	100%	100%	100%	235,597,132		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan jajanan anak sekolah		4 SD	4 SD	4 SD	4 SD	4 SD	52,613,701		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah pasar dan sekolah yang uji sampel jajanan		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji keamanan pangan		20 sampel	25 sampel	30 sampel	35 sampel	40 sampel	182,983,431		Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
											Kab. Padang Pariaman	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
2.2.1*	<i>Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.</i>											
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan		80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU dan DAK	Kab.Padang Pariaman	
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU dan DAK	Kab.Padang Pariaman	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pervalensi Balita Stunting	%	18,4	16	14	14	14	17.636.205.000	DAU dan DAK	Kab.Padang Pariaman	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes
2.2.2*	<i>Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.</i>	<i>Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.</i>	<i>Persentase</i>	7,5%	7,3%	7%	7%	7%		DAU dan DAK	Kab.Padang Pariaman	Dinas Kesehatan & DPPKB
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan		80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU dan DAK	Kab.Padang Pariaman	Bidang Kesehatan Masyarakat

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	MASYARAKAT											kat Dinkes
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU dan DAK	Kab.Padag Pariaman	Bidang Kesehata n Masyarakat Dinkes
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	P prevalensi Balita Stunting	%	18,4	16	14	14	14	17.636.205.000	DAU dan DAK	Kab.Padag Pariaman	Bidang Kesehata n Masyarakat Dinkes
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).											
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.											
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan											
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan											
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.											
02.04.01	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.											
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.											
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.											
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.												
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.												
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.												
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.												
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA													
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).												
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU dan DAK	Kab. Padang Pariaman	DINKES
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU dan DAK	Kab. Padang Pariaman	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Penurunan angka kematian ibu			7 Orang	6 Orang	5 Orang	4 Orang	3 Orang	250.774.615	DAU dan DAK	Kab. Padang Pariaman	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.												
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.												
	Program : PROGRAM	Persentase			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU dan DAK	Kab. Padang	DINKES

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian SPM Bidang Kesehatan										Pariaman	
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU dan DAK	Kab. Padang Pariaman	Bidang Kesmas DINKES
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Penurunan angka kematian balita			4 Orang	3 Orang	2 Orang	1 Orang	-	251.278.285	DAU dan DAK	Kab. Padang Pariaman	Bidang Kesmas DINKES
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Penurunan angka kematian bayi			47 Orang	46 orang	45 Orang	44 Orang	43 Orang	212.701.684	DAU dan DAK	Kab. Padang Pariaman	Bidang Kesmas DINKES
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1. Cakupan KN Lengkap 2. Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi	% %		73,4 86,6	80	85	90	100	40.000.000	DAU	Padang Pariaman	DINKES
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU dan DAK	Kab. Padang Pariaman	DINKES
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU dan DAK	Kab. Padang Pariaman	Bidang Kesmas DINKES

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pesertase neonatal komplikasi yang ditangani			100 %	100%	100%	100%	100%	212.701.684	DAU dan DAK	Kab. Padang Pariaman	Bidang Kesmas DINKES
		Persentase kunjungan neonatal lengkap			100 %	100%	100%	100%	100%				
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.										DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Insident HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Per 100.000 pddk		0.20/1 000 pend ud uk	0.19/1 000 pend ud uk	0.18/1 000 pend ud uk	0.17/1 000 pend ud uk	0.16/1000 pend ud uk	419.725.625	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.												
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	MASYARAKAT												
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Sub Program: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Case Notifikasi Rate TB per 100.000 penduduk'	Per 100.000 pddk		331	328	324	-	-	434.988.375	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.												
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen		80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen		80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Sub Kegiatan: Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penemuan kasus malaria	Per 1.000 pddk		<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk	<1 per 1000 pddk	190.784.375	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.												
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Capaian SPM Bidang			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
	Sub Kegiatan: Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kecamatan yang mencapai Eliminasi Malaria			17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	190.784.375	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.												
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah deteksi dini Hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko			95%	100%	100%	100%	100%	419.725.625	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan										DAU DAN	PADANG	DINAS

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.										APBN	PARIAMAN	KESEHA TAN
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Sub Kegiatan: Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)			18 Orang	17 Orang	16 Orang	15 Orang	14 Orang	190.784.375	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.										DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan: Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kecamatan dengan eliminasi Kusta			17 Kcamatan	17 Kcamatan	17 Kcamatan	17 Kcamatan	17 Kcamatan	190.784.375	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.										DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kabupaten Kota dengan Eliminasi Filariasis			1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	190.784.375	DAU DAN APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.										DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	MASYARAKAT												
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase merokok pada usia 10-18 tahun			8,9%	8,8%	8,7%	8,7%	8,7%	257.397.164	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.										DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi			35%	30%	25%	25%	24,3 %	357.259.919	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.												
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Obesitas pada usia > 18 tahun			22%	22%	22%	22%	22%	275.927.627	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
03.04.02	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.												
03.05.01	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.												
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis												
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan layanan			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100 %	100%	100%	100%	100%	228.941.250	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Fasilitas Layanan Kesehatan yang Sudah IPWL di SK kan oleh Kemenkes	Pusk		100	100	100	100	100		DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.												
03.06.01	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.												
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.												
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.												
3.7.2.[a]	<i>Total Fertility Rate (TFR).</i>												
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan layanan			80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											TAN
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Total Fertility Rate (TFR)			2,38 %	2,35 %	2,33 %	2,30 %	2,28 %	209.016.518	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.												
3.8.1.[a	<i>Unmet Need Pelayanan Kesehatan.</i>												
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan			80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063			
	Kegiatan: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan			75%	75%	75%	75%	75%	1.594.957.375			
	Sub Kegiatan: Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan			13%	12%	11%	10%	9,91 %	906.225.782			
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran												

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	rumah tangga atau pendapatan.												
3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan nasional	%	74,5	80	85	90	95	9.000.000.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN	
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat												
	Kegiatan : : Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota												
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan nasional	%	74,5	80	85	90	95	6.343.805.400	DAU	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN	
03.09.01	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.												
03.09.02	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.												
03.09.03	Angka kematian akibat keracunan.												
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.												
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan		80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN	
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHA TAN	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Merokok Pada Usia > 15 Tahun			8,9%	8,8%	8,7%	8,7%	8,7%	275.927.627	DAU dan APBN	PADANG PARIAMAN	DINAS KESEHATAN
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	1. ersentase Bayi Mendapat Imunisasi HB0, BCG, DPT-HB-Hib 1-3, Polio 1-4, MR1, PCV	%		95%	95%	95%	95%	95%	425.000.000	APBD dan APBN	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kesehat an
		2. ersentase Baduta Mendapat Imunisasi Lanjutan DPT-HB-Hib 4, Polio 1-4, MR2	%		95%	95%	95%	95%	95%				
		3. ersentase Anak Sekolah Mendapat Imunisasi (setiap jenis antigen dan setiap tingkatan kelas)	%		80%	80%	80%	80%	80%				
		4. ersentase Ibu Hamil mendapat Td2	%		70%	70%	70%	70%	70%				
		Persentase Masyarakat mendapatkan Vaksinasi Covid 19	%										
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat												
	Kegiatan : Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota												
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.												
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan												

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.												
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.												
	PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			65%	70%	75%	80%	85%	3.254.283.307	APBD dan APBN	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kesehata n
	Kegiatan: Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang diberikan			65%	70%	75%	80%	85%	801.294.375	APBD dan APBN	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kesehata n
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan dan praktek mandiri swasta yang diawasi			63	75	75	80	80	381.568.750	APBD dan APBN	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kesehata n
	Sub Kegiatan: Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di fasyankes yang mempunyai SIP			850	850	900	900	950	419.725.625	APBD dan APBN	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kesehata n
	Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Perentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia			65%	70%	75%	80%	85%	1.154.892.044	APBD dan APBN	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kesehata n

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	Kabupaten/Kota	Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											
	Sub: Kegiatan: Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar			47 %	59 %	71 %	83 %	83%	419.725.625	APBD dan APBN	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kesehata n
		Jumlah tenaga Kesehatan secara Teknis			47 Tena ga	59 Tena ga	71 Tena ga	83 Tena ga	85 Tena ga		APBD dan APBN	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kesehata n
	PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			65%	70%	75%	80%	85%	3.254.283.307	APBD dan APBN	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kesehata n
	Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			65%	70%	75%	80%	85%	1.154.892.044	APBD dan APBN	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kesehata n
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah komulatif penempatan baru dan pemulangan			20%	20%	25%	25%	25%	442.121.619	APBD dan APBN	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kesehata n

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
	sesuai Standar	tenaga kesehatan pada penugasan khusus											
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.												
3.d.2	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.												
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA													
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.												
	Program :												
	Kegiatan :												
	Sub Kegiatan :												
	Program :												
	Kegiatan :												
	Sub Kegiatan :												
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)												
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.												
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.												
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan	persen		70.96	56.31	60.61	45.69	64.30	450.735.924.995	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Pendidikan Dasar										
	Kegiatan :											
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar	persen	58.28	58.27	58.82	58.14	59.45	299.342.500	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Sub Kegiatan :											
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Ujian Akhir Sekolah (SD).	Satuan Pendidikan	408 SP	408 SP	408 SP	408 SP	408 SP	403.000.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Kegiatan :											
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		60.95	62.56	64.23	65.95	67.75	115.945.000.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Sub Kegiatan :											
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah Penyelenggara Ujian Sekolah SMP/MTs Padang Pariaman.	Satuan Pendidikan	89 SP	89 SP	89 SP	89 SP	89 SP	247.000.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.											
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.											
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.											
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	persen	70.96	56.31	60.61	45.69	64.30	98.811.667.663	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Kegiatan :											
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI	%	54,80%	52,20%	59,70%	62,30%	65,00%	13.116.840.000	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Sub Kegiatan :											
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru TK/PAUD/MDA/Pesantren Dibangun.	Paket	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2.540.360.000	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas TK/PAUD.	Paket	42 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	7.252.480.000	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	persen	70.96	56.31	60.61	45.69	64.30	450.735.924.995			
	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Pengelolaan dan	%	54,80%	52,20%	59,70%	62,30%	65,00%	299.342.500.000			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Kebutuhan PAUDNI										
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah TK/PAUD : 1. TK/PAUD Terpadu VII Koto. 2. TK/PAUD. Pembina Kabupaten. 3. TK/PAUD Pembina Kecamatan dan 4. PAUD Swasta BOP.	siswa	7.956	7.956	7.956	7.956	7.956	23.910.000.000	DAK Non Fisik/Hibah	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Kebutuhan Operasional 1. TK/PAUD Terpadu VII. 2. TK /PAUD Pembina Kabupaten. 3. TK/PAUD Pembina Kecamatan	Bulan	12	12	12	12	12	940.000.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.											
	Program : Pengelolaan Pendidikan								450.735.924.995			
	Kegiatan :											
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	54,80%	52,20%	59,70%	62,30%	65,00%	15.170.000.000			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan :											
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa 1. Paket A 2. Paket B. 3. Paket C. SKB Sungai Limau	siswa	195	195	195	195	195	1.625.000.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).											
04.04.01	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.		angka	APM SD : 94,77 APK SMP : 96	APM SD : 94,86 APK SMP : 97	APM SD : 94,96 APK SMP : 98	APM SD : 95,05 APK SMP : 99	APM SD : 95,15 APK SMP : 100				
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	%	70,96%	56,31%	60,61%	45,69%	64,30%	98.811.667.663			
	Kegiatan :											
	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan	%	58,28%	58,27%	58,82%	58,14%	59,45%	49.175.933.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Sekolah Dasar										
	Sub Kegiatan :											
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru SD.	Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1.428.000.000	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Pembangunan Srana Prasarana dan Untilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasaran dan Untilitas Sekolah Dasar.	Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	19.010.684.000	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah, Buku, TIK dan Media Pendidikan (SD).	Paket	2 Paket	15 Paket	10 Paket	7 Paket	5 Paket	5.995.000.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	persen	70.96	56.31	60.61	45.69	64.30	450.735.924.995			
	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar	persen	58,28%	58,27%	58,82%	58,14%	59,45%	299.342.500.000			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Pembelajaran Disekolah Dasar	SISWA	49.225 siswa	49.225 Org/siswa	49.225 Org/siswa	49.225 Org/siswa	49.225 Org/siswa	221.512.500.000	DAK Non Fisik/Hibah	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Bantuan BOS										
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen PPBD dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar (TK/PAUD, SD, dan SMP)	Kegiatan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	270.000.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	%	70,96%	56,31%	60,61%	45,69%	64,30%	98.811.667.663			
	Kegiatan :											
	2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio	60,95%	62,56%	64,23%	65,95%	67,75%	53.807.709.668	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Sub Kegiatan :											
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah Yang Dibangun.	Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4.157.264.000	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana / Ruang Inklusif	Paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6.080.000.000	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Utilitas dan sarana	Paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	2.247.431.208	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Prasarana Sekolah Menengah Pertama yang direhabilitasi.										
	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Mobiluer Sekolah Menengah Pertama (SMP).	Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	583.000.000	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Computer/Laptop Yang dibutuhkan Untuk Pelaksanaan Pembelajaran dan Ujian Sekolah.	Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3.047.480.000	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	persen	70.96	56.31	60.61	45.69	64.30	450.735.924.995			
	Kegiatan: Penglolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persen	60,95%	62,56%	64,23%	65.95%	67,75%	115.945.000.000			
	Penyediaan Baiaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Pembelajaran	siswa	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	93.626.500.000	DAK Non Fisik/Hibah	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		di SMP diberikan BOS.										
04.06.01	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.											
	Program : Pengelolaan Pendidikan			70.96	56.31	60.61	45.69	64.30	450.735.924.995			
	Kegiatan :											
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	%	54,80%	52,20%	59,70%	62,30%	65,00%	15.170.000.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Sub Kegiatan :											
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa 1. Paket A 2. Paket B. 3. Paket C. SKB Sungai Limau	siswa	195	195	195	195	195	1.625.000.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.											
04.07.01	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.											
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air,	Sekolah kondisi Baik	%	SD :96 SMP	SD :97 SMP: 86	SD :98 SMP:	SD :99 SMP:	SD :100 SMP:				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).			: 84		90	95	97				
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar	%	70,9 6%	56,31 %	60,61 %	45,69 %	64,30 %	98.811.667.663			
	Kegiatan :											
	3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar	%	58,2 8%	58,27 %	58,82 %	58,14 %	59,45 %	49.175.933.000	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Sub Kegiatan :											
	Rehabilitasi Sedang Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban yang Direhab.	paket	20	20	20	20	20	1.800.000.000	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Kegiatan :											
	4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio	60,9 5%	62,56 %	64,23 %	65,95 %	67,75 %	53.807.709.668	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Sub Kegiatan :											
	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Utilitas dan sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama yang direhabilitasi.	paket	5	5	5	5	5	2.247.431.208	DAK	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.											
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.											
	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	94.2	95.6	97.1	98.5	100				
	Program : Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar, TK/PAUD dan Pendd. Nonformal/Ke setaraan.	%	54,80%	52,20%	59,70%	62,30%	65,00%	660.000.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Kegiatan :											
	Pemerataan Kwantitas Dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rasio Penghitungan dan Pemetaan / Panetapan PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	54,80%	52,20%	59,70%	62,30%	65,00%	660.000.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD
	Sub Kegiatan :											
	Penghitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Penghitungan dan Pemetaan / Penetapan PAK Pegawai, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Padang Pariaman.	orang	850	750	750	750	750	385.000.000	DAU	PADANG PARIAMAN	DISDIKBUD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN													
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.												
	Program : PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak											DINSOS P3A
	Kegiatan :												DINSOS P3A
	Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan											DINSOS P3A
	Sub Kegiatan :												DINSOS P3A
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi PUG yang dilakukan	kali	2	2	2	2	2	366,000,000	DAU	PD.PRM		DINSOS P3A
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk	kali	2	2	2	2	2	531,000,000	DAU	PD.PRM		DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		PPRG yang dilaksanakan										
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Bimtek dan sosialisai PUG dan PPRG bagi lembaga pemerintah yang terlaksana	kali	2	2	2	2	2	116,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	%	35	35	35	40	40	611,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kader perempuan partai peserta pemilu yang mengikuti Bimtek	%	35	35	35	40	40	114,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Penyuluhan dan pembinaan hak-hak perempuan yang dilaksanakan	kali	2	2	2	2	2	201,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Jumlah perempuan pada	orang	20	20	20	20	20	171,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		organisasi wanita yang diberikan pembinaan										
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah advokasi dan pendampingan yang dilakukan	kali	2	2	2	2	2	125,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	1,766,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pemberdayaan Perempuan yang mengikuti Bimbingan Manajemen Usaha	orang	30	30	30	30	30	375,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Jaringan Organisasi Perempuan	%	100	100	100	100	100	145,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Terlaksananya Sekolah	nagari	30	30	30	30	30	616,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Perempuan di Nagari										
		Jejaring Antar Lembaga Peduli Perempuan dan Anak yang dilaksanakan	tahun	1	1	1	1	1	170,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
		Peningkatan Hari Ibu Kartini dan Perempuan Inspiratif yang dilaksanakan	kali	1	1	1	1	1	308,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan	kali	1	1	1	1	1	152,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Outcome : Presentase Penurunan Kasus kekerasan dan Perlindungan terhadap perempuan	%	35	37	38	39	40	1,002,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	278,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		ta yang Terlaksana										
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan nagari yang teradvokasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari yang dilakukan	kecamatan	6	6	6	6		278,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi yang di laksanakan	%	100	100	100	100	100	489,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani dan dilakukan Penjangkauan	orang	10	12	12	12	12	245,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	orang	20	30	30	30	30	244,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		terhadap layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan.										
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	235,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								0	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan bagi Pengurus Lembaga Layanan P2TP2A dan PUSPAGA yang dilaksanakan	kali	2	2	2	2	2	235,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								0	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								0	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas	%	100	100	100	100	100	1,584,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Keluarga										
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	975,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi kepada lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat, Peguruan tinggi dan dunia Usaha yang dilaksanakan	kali	3	3	4	4	4	260,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor	kali	2	2	2	2	2	240,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek bagi kelompok PEKKA(Perempuan Kepala	kali	5	5	5	5	5	455,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Keluarga) yang dilaksanakan										
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100		473,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas kepada lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat,	kali	2	2	2	2		140,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Peguruan tinggi dan dunia Usaha										
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek bagi Lembaga Layanan di Tingkat Kecamatan dan Nagari yang dilakukan	Kecamatan nagari	5 Kecamatan 15 nagari	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan		181,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Lembaga Layanan dan Gugus Tugas PPA yang dilakukan	kali	2	2	2	2		152,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-					DINSOS P3A
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota											DINSOS P3A
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Terpenuhi Data Gender Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100		209,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	%	100	100	100	100		209,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota										
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data terpilah gender dan anak yang disusun	dok	1	1	1	1		209,000,000	DAU	PD.PRM	DINSOS P3A
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.											
05.03.02	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.											
05.04.01	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.											
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.											
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.											
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.											
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.											
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.											
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.											
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA												
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.											
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		90%	92%	95%	97%	100%	101.000.000.000	APBD/APBD PROP/APBN	Pdg Paraiaaman	DPUPR
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembang		90%	92%	95%	97%	100%	101.000.000.000	APBD/APBD PROP/APBN	Pdg Paraiaaman	DPUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
	Sub Kegiatan :											
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang tersusun		4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	5.000.000.000	APBD/APBD PROP/APBN	Pdg Paraiaaman	DPUPR
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang terbangun		800 SR	900 SR	900 SR	1000 SR	800 SR	22.000.000.000	APBD/APBD PROP/APBN	Pdg Paraiaaman	DPUPR
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang terbangun		700 SR	800 SR	900 SR	1000 SR	800 SR	21.000.000.000	APBD/APBD PROP/APBN	Pdg Paraiaaman	DPUPR
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang terbangun		800 SR	900 SR	900 SR	1000 SR	800 SR	22.000.000.000	APBD/APBD PROP/APBN	Pdg Paraiaaman	DPUPR
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan		700 SR	800 SR	900 SR	1000 SR	800 SR	21.000.000.000	APBD/APBD PROP/APBN	Pdg Paraiaaman	DPUPR
	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan	Jumlah SPAM		200	200	200	200	200	5.000.000.000	APBD/APBD	Pdg	DPUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dibangun		SR	SR	SR	SR	SR		PROP/APBN	Paraiaman	
	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		200 SR	200 SR	200 SR	200 SR	200 SR	5.000.000.000	APBD/APBD PROP/APBN	Pdg Paraiaman	DPUPR
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.											
	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan		80%	85%	90%	95%	100%	294.477.189.063	DAU APBN DAN DAU BOK	KAB. PADANG PARIAMAN	DINKES
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		80%	85%	90%	95%	100%	24.586.477.874	DAU APBN DAN DAU BOK	KAB. PADANG PARIAMAN	DINKES
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pesentase korong dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan	%	40	50	60	70	80	157.547.829	DAU APBN DAN DAU BOK	KAB. PADANG PARIAMAN	DINKES

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
06.03.01	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman											
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman											
06.03.02	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.											
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku											
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku											
06.04.01	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.											
06.04.02	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediaannya.											
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya											
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya											
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).											
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.											
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.											
6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.											
6.b.1.	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.											
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA												
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.											
07.01.02	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.											
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.											
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.											
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.											
7.3.1*	Intensitas energi primer.											
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.											
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)											
TUJUAN 8. MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA												
DPMD	Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyaraka ta n, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	%	100	100	100	100	100	7.537.826.294	DAU	Padang Pariaman	DPMD
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaa n Nagari dan Lembaga Adat	%	100	100	100	100	100	7.537.826.294	DAU	Padang Pariaman	DPMD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Nagari yang telah memanfaatkan TTG	Nagari	10	10	15	25	35	437.686.047	DAU	Padang Pariaman	DPMD
	Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	%	100	100	100	100	100	7.537.826.294	DAU	Padang Pariaman	DPMD
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	%	100	100	100	100	100	7.537.826.294			
	Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Nagari yang telah dibina Anggota BPDnya	Nagari	75	75	85	85	100	1.196.411.841			
DPMD (pemulihan Ekonomi)	Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	%	100	100	100	100	100	7.537.826.294			
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	persentasi Nagari yang memiliki	%	100	100	100	100	100	7.537.826.294			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat										
(pemulihan Ekonomi)	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Nagari yang dengan UEM aktif	Nagari	25	25	30	35	35	387.686.147			
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
8.1.1.(a)	PDB per kapita.											
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.											
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin											
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan											
08.04.01	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.											
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											
08.04.02	<i>Konsumsi material domestik (domestic material consumption)</i> .											
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.											
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	kelamin dan kelompok umur.											
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.											
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).											
08.07.01	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).											
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur											
08.08.01	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.											
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.											
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang- undangan negara terkait.											
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.											
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.											
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.											
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.											
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.											
8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.											
8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.											
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI												
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang		67%	69%	71%	73%	75%	2.135.359.740.000	APBD/APBD PROP/APBN		DPUPR
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten		80%	90%	90%	90%	90%		APBD/APBD PROP/APBN		DPUPR
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	"Jumlah dokumen rencana, kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang tersusun"		4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	5.000.000.000	APBD/APBD PROP/APBN		DPUPR
	"Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan"	Luas tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan		10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	110.000.000.000	APBD/APBD PROP/APBN		DPUPR
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun		29,98 Km	29,98 Km	29,98 Km	29,98 Km	29,98 Km	289.800.000.000	APBD/APBD PROP/APBN		DPUPR
	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan ter rehabilitasi/ditingkatkan		25,69 Km	25,69 Km	25,69 Km	25,69 Km	25,69 Km	449.418.760.000	APBD/APBD PROP/APBN		DPUPR
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kondisi baik		263,73	263,73 Km	263,73 Km	263,73 Km	263,73 Km	39.560.100.000	APBD/APBD PROP/APBN		DPUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		dan sedang yang terpelihara		Km								
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan kondisi rusak ringan yang terpelihara		125,21 Km	125,21 Km	125,21 Km	125,21 Km	125,21 Km	939.080.880.000	APBD/APBD PROP/APBN		DPUPR
	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang terbangun		100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	150.000.000.000	APBD/APBD PROP/APBN		DPUPR
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang terehabilitasi		190 m	190 m	190 m	190 m	190 m	95.000.000.000	APBD/APBD PROP/APBN		DPUPR
	Pembangunan Flyover	Panjang flyover yang terbangun		30 m						APBD/APBD PROP/APBN		DPUPR
	"Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat"	Jumlah alat berat yang dioperasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan bencana/tanggap darurat		12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	20.000.000.000	APBD/APBD PROP/APBN		DPUPR
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi jalan/jembatan		2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	7.500.000.000	APBD/APBD PROP/APBN		DPUPR
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional											
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.											
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.											
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.											
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.											
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.											
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.											
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.											
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.											
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.											
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.											
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.											
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.											
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.											
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.											
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.											
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).											
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.											
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.											
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi											
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .											
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGERA												
10.1.1*	Rasio Gini.											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.											
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.											
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.											
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.											
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.											
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.											
10.03.01	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.											
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.											
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).											
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.											
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											
10.04.01	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.											
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.											
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Ketenagakerjaan.											
10.04.02	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.											
10.05.01	<i>Financial Soundness Indicator.</i>											
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.											
10.06.01	Proporsi anggota dan hak suara negara- negara berkembang di organisasi internasional.											
10.07.01	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.											
10.07.02	Jumlah negara yang mengimplementa- sikan kebijakan mi- gran yang baik.											
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.											
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.											
10.07.03	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.											
10.07.04	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.											
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/ berkembang dengan tarif nol persen.											
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara- negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).											
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.											
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN												
11.01.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.											
	Program :.....											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :.....											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											
	PROGRAM Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni		0,14	0,15	0,16	0,17	0,185	30.881.703.334			
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	900.000.000			
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	Jumlah rumah di lokasi rawan bencana		100	100	100	100	100	300.000.000			
		Jumlah rumah yang terkena relokasi program Kabupaten/Kota		100	100	100	100	100				
									-			
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase terlaksananya Pembinaan		100	100	100	100	100	100.000.000			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus										
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah bulan terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni		12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	50.000.000			
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	500.000.000			
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah bulan terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik		12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	125.000.000			
	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah bulan terlaksananya		12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	125.000.000			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		anya Penguata n dan Pembina an kepada BLU/BU MD untuk Penyelenggar aan Rumah Sederhana										
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembanguna n dan Pengembang an Perumahan		12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	125.000.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumaha n Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/R umah Susun Umum		12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	125.000.000			
	Fasilitasi Pemenuha n Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah bulan terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan		12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	175.000.000			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik										
11.02.01	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas											
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik											
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum											
11.03.01	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk											
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk											
11.03.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis											
11.04.01	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)											
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)											
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
11.05.02	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	terhadap pelayanan dasar											
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB											
11.06.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota											
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya											
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola											
11.06.02	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)											
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10											
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara											
11.07.01	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.											
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua											
11.07.02	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)											
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.											
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS											
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	strategi nasional penanggulangan bencana											
11.c.1	-											
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal											
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN												
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											
	Program :.....											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :.....											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
12.02.01	Jejak material (material footprint)											
12.02.02	Konsumsi material domestik (domestic material consumption)											
12.03.01	(a) Indeks kehilangan makanan (<i>Food loss index</i>); dan (b) Indeks sampah makanan (<i>Food waste index</i>)											
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan											
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.											
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri											
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline											
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.											
12.05.01	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.											
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya											
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.											
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi											
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah											
12.7.1(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa											
12.08.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.											
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.											
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)											
12.b.1	Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan											
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development											
12.c.1*	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.											
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA												
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang											
	Program :.....											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>											
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana											
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report (BUR)</i> dan National Communications											
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun											
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)											
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)											
13.03.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.											
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											
13.a.1	Jumlah dana yang disediakan dan mobilisasinya dalam USD per tahun terkait dengan keberlanjutan mobilisasi dana untuk mencapai komitmen 100 milyar USD sampai tahun 2025											
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (<i>budget tagging</i>) untuk pendanaan perubahan iklim											
13.b.1	Jumlah negara- negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	<i>nationally determined contributions</i> , strategi jangka panjang, rencana nasional adaptasi, dan strategi yang dilaporkan dalam adaptation communications dan national communications											
TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN												
14.01.01	(a) Indeks eutrofikasi pesisir dan (b) kepadatan sampah plastik terapung											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut											
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan											
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan											
14.03.01	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai											
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman											
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut											
14.06.01	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha											
14.07.01	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
14.a.1	Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan											
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil											
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan											
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi											
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)											
TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEJARAGAMAN HAYATI												
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
15.01.02	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya											
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)											
15.02.01	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari											
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju											
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan											
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan											
15.5.1*	Indeks Daftar Merah											
	(Red-list index)											
15.6.1*	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata											
15.07.01	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal											
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											
15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)											
15.09.01	(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan											
	(b) integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi											
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis											
15.a.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan											
	(b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi											
	dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati											
15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan											
15.b.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan											
	(b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi											
	dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati											
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	secara berkelanjutan											
15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap											
15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT ANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBNAGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN												
16.01.01	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.											
DPMD (kelembagaan)	Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat yang aktif	%	100	100	100	100	100	7.537.826.294	DAU	Padang Pariaman	DPMD
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	%	100	100	100	100	100	7.537.826.294	DAU	Padang Pariaman	DPMD
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Nagari yang meiliki BUM Nag	Nagari	77	77	77	77	77	190.831.498	DAU	Padang Pariaman	DPMD
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.											
16.01.02	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.											
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.											
16.01.03	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.											
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.											
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.											
16.02.01	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir											
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.											
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya											
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.											
16.02.03	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											
16.03.01	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.											
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	terakhir yang melaporkan kepada polisi.											
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi											
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.											
16.03.02	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.											
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.											
16.03.03	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.											
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)											
16.04.01	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).											
16.04.02	Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.											
16.05.01	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.											
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).											
	Program : PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Outcome: Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek	%	93	93	93	93	93	1.208.809.800	APBD	Padang Pariaman	BKPSDM
		Outcome: Persentase	%	92	92	92	92	92				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		peningkatan terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS										
		Outcome: Persentase peningkatan dokumen ASN yang tersampaikan	%	75	75	75	75	75				
		Outcome: Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN	%	73	73	73	73	73				
	Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	%	86	88	89	90	95	1.208.809.800	APBD	Padang Pariaman	BKPSDM
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Pelaksanaan Assesment Centr bagi ASN Kab. Padang Pariaman	Kali	2	2	2	2	2	1.208.809.800	APBD	Padang Pariaman	BKPSDM
	Program : Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Persen									
	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampinga	Persen									

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		n dan asistensi yang dilakukan										
	Sub Kegiatan : Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	1	1	1	694.967.414	DAU	Padang Pariaman	Inspektoral
	Sub Kegiatan : Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang dilaksanakan	Perangkat Daerah	10	10	10	10	10	764.563.357	DAU	Padang Pariaman	Inspektoral
16.05.02	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.											
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.											
	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pengawasan yang dilakukan	Persen									
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal	Persen									

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi SPIP dan monitoring	Perangkat Daerah	44	44	44	44	44	982.677.086	DAU	Padang Pariaman	Inspektorat
	Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu lakip LPPD yang dilakukan	Perangkat Daerah	44	44	44	44	44	916.633.909	DAU	Padang Pariaman	Inspektorat
	Program : Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Persen									
	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	Persen									
	Sub Kegiatan : Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi yang dilaksanakan	Perangkat Daerah	10	10	10	10	10	443.113.640	DAU	Padang Pariaman	Inspektorat
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.											
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B											
	<i>Program:</i>											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	<i>Persentase Terpenuhi</i>	%	100	100	100	100	100	21.278.594.748,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	KOTA	Pelayanan Pemerintahan Daerah										
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A				
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100				
	Kegiatan 1:											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	%	92	94	96	98	100	367.198.943,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Sub Kegiatan:											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Renja, Renja P, RKA, RKAP, DPA, DPAP	Dokumen	6	6	6	7	6	195.025.252,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, Lap Capkin, Perjanjian Kinerja	Dokumen	4	4	4	4	4	172.173.691,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Kegiatan 2:											
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan	%	100	100	100	100	100	15.621.145.477,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Perangkat Daerah										
	Sub Kegiatan:											
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	Orang	30	30	30	30	30	14.807.650.728,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Orang	26	26	26	26	26	775.133.736,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Lap Keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	2	2	2	38.361.013,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Kegiatan 3:											
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	1.050.809.485,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Buah	200	200	200	200	200	32.610.783,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Unit	6	6	6	6	6	228.275.482,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Kantor										
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan Peralatan kebersihan kantor	Buah	200	200	200	200	200	39.132.940,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Exemplar	1800	1800	1800	1800	1800	43.637.736,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Porsi/ Kotak	600	700	750	800	800	94.069.820,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Orang Hari	1050	1050	1050	1050	1050	613.082.724,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Kegiatan 4:											
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	%	82	84	86	88	90	950.418.568,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Sub Kegiatan:											
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2	Unit	5	1	2	2	2	665.416.166,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Paket	6	2	2	2	2	123.596.959,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	2	1	-	-	128.809.168,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tempat Parkir	-	1	-	-	-	32.596.275,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Kegiatan 5:											
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	1.809.898.467,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Sub Kegiatan:											
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang di arsipkan	Arsip Surat	500	500	500	500	500	81.526.958,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	489.161.748,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Perawatan	Bulan	12	12	12	12	12	97.832.350,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Orang	14	14	14	14	14	1.141.377.411,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Kegiatan 6:											
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100	100	569.363.236,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Sub Kegiatan:											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	12	14	14	14	15	293.497.050,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	Gedung/ Tahun	1	1	1	1	1	155.528.854,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	14	15	16	16	16	120.337.332,00	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Kantor atau Bangunan lainnya										
	PROGRAM:											
	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas perencanaan	%	100 %	100%	100%	100%	100%		DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Kegiatan 1:											
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah tepat waktu	%	100 %	100%	100%	100%	100%	4.077.415.549	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Sub Kegiatan:											
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah / Kecamatan	-	-	27 Perangkat Daerah, 17 kec	-	27 Perangkat Daerah, 17 kec	51.219.916	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Pendampingan Kegiatan DAK N+1	Laporan	1	1	1	1	1	163.053.918	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Forum Konsultasi Publik	Forum	1	1	2	2	1	195.664.699	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Laporan Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	260.886.265	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kec dan Kab	Laporan	1	1	1	1	1	260.886.265	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bahan Pelaksanaan Musrenbang	Dokumen	1	1	1	1	1	65.221.567	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Kec dan Kab										
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RPJPD,Dok Ranc Teknokratik RPJMD) Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD, Dokumen RKPD Perubahan	Dokumen (RKPD, RKPD Perubahan)	2	3	3	4	3	3.080.482.919	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Kegiatan 2:											
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase ketersediaan database yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan	%	85%	90%	92%	94%	96%	609.348.702	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen data-informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	Dokumen	1	1	1	1	1	174.550.943	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Perangkat daerah dan kec yang mempergunakan Aplikasi SIPD	Perangkat Daerah, Kec	27 Perangkat Daerah, 17 kec	27 Perangkat Daerah, 17 kec	27 Perangkat Daerah, 17 kec	27 Perangkat Daerah, 17 kec	27 Perangkat Daerah, 17 kec	260.246.816	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Dokumen	1	1	1	1	1	174.550.943	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	persentase pencapaian target sasaran program pada dokumen perencanaan	%	85	90	92	94	96	523.652.829	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi RPJMD, Dokumen Evaluasi RKPD	Dokumen	2	2	2	2	2	523.652.829	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	%	92	93	94	95	95	5.192.890.558	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Kegiatan 1:											
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	1.963.698.115	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan:											
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perangkat Daerah yang mendukung Data Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	8	8	8	8	8	436.377.365	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dan dokumen pendukung Bidang Pemerintahan	Dokumen Renja	8	8	8	8	8	130.913.207	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Monev yang mendukung Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	8	8	8	8	8	218.188.678	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pendampingan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	8	8	8	8	8	87.275.471	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perangkat Daerah yang mendukung Data Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	8	8	8	8	8	436.377.358	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dan Dokumen Pendukung Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Renja	9	9	9	9	9	349.101.886	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Monev yang mendukung Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	9	9	9	9	9	130.913.207	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pendampingan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah	9	9	9	9	9	174.550.943	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Bidang Pembangunan Manusia										
	Kegiatan 2:											
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	100	100	100	100	1.658.233.957	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Sub Kegiatan:											
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perangkat Daerah yang mendukung Data Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	436.377.358	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dan Dokumen Pendukung Bidang Perekonomian	Dokumen Renja	6	6	6	6	6	130.913.207	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Monev yang mendukung	Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	130.913.207	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Perekonomian	Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian										
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pendampingan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	130.913.207	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perangkat Daerah yang mendukung Data Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	261.826.415	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dan Dokumen Pendukung Bidang SDA	Dokumen Renja	6	6	6	6	6	130.913.207	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Monev yang mendukung Evaluasi Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	218.188.678	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Bidang SDA										
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Pendampingan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	218.188.678	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Kegiatan 3:											
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	1.570.958.486	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Sub Kegiatan:											
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perangkat Daerah yang mendukung Data Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	5	5	5	5	5	436.377.358	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dan	Dokumen Renja	5	5	5	5	5	130.913.207	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Dokumen Pendukung Bidang Infrastruktur										
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Monev yang mendukung Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	5	5	5	5	5	218.188.678	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Pendampingan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	5	5	5	5	5	130.913.207	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perangkat Daerah yang mendukung Data Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kecamatan	17	17	17	17	17	174.550.943	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Bidang	Dokumen Renja	17 Dok Renja Kecamatan	17 Dok Renja Kecamatan	17 Dok Renja Kecamatan	17 Dok Renja Kecamatan	17 Dok Renja Kecamatan	174.550.943	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Kewilayahan		17 Dok Rens tra Keca mata n	Dok Renst ra Keca mata n	Dok Rens tra Keca mata n	Dok Renst ra Keca matan	Dok Renst ra Keca mata n				
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Monev yang mendukung Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kecamat an	17	17	17	17	17	174.550.943	DAU	Padang Pariaman	Bapelitba ngda
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Pendampingan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kecamat an	17	17	17	17	17	130.913.207	DAU	Padang Pariaman	Bapelitba ngda
	PROGRAM:											
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%	70	75	80	85	90	5.584.401.919	DAU	Padang Pariaman	Bapelitba ngda
	Kegiatan 1:											
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang	%	100	100	100	100	100	1.113.152.671	DAU	Padang Pariaman	Bapelitba ngda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		dibutuhkan daerah bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk pembangunan daerah										
	Sub Kegiatan:											
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	jumlah RIK yang dilaksanakan		0	0	0	0	0	0	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah fasilitasi/pelaksanaan/evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	0	0	0	1	193.384.974	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah fasilitasi/pelaksanaan/evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	0	0	0	0	68.461.724	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah fasilitasi/pelaksanaan/evaluasi	Dokumen	1	0	0	0	1	261.846.700	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa										
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah fasilitasi/pelaksanaan/evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Dokumen	0	1	0	0	0	130.385.103	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah fasilitasi/pelaksanaan/evaluasi penelitian yang dilaksanakan	Dokumen	0	1	0	0	0	130.385.101	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah fasilitasi/pelaksanaan/evaluasi penelitian yang dilaksanakan	Dokumen	1	0	0	0	0	68.461.724	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah fasilitasi/pelaksanaan/evaluasi penelitian yang dilaksanakan	Dokumen	1	0	0	0	0	68.461.724	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Indeks Daya Saing Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	191.765.621	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		yang Disusun										
	Kegiatan 2:											
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Sosial dan Kependudukan untuk pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	1.570.948.653	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Sub Kegiatan:											
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	0	0	1	0	1	256.099.577	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	0	1	0	0	0	130.385.101	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	0	0	0	1	0	128.807.537	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Kajian/Penelitian	Dokumen	0	1	0	0	0	130.385.101	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		an dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga										
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	0	0	0	1	0	128.807.537	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	0	0	0	0	136.923.449	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1	0	0	0	0	136.923.449	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	1	0	0	0	0	136.923.449	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	0	1	0	0	0	130.385.101	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	0	1	0	0	1	255.308.352	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Kegiatan 3:											
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	1.313.338.465	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Sub Kegiatan:											
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	0	1	0	0	1	255.308.352	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	0	1	0	0	268.099.775	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Badan	Dokumen	0	0	1	0	0	131.176.326	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Usaha Milik Daerah										
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	0	0	1	0	265.730.986	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	0	0	0	0	1	124.923.251	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	0	1	0	0	131.176.326	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen (RKPD, RKPD Perubahan)	1	0	0	0	0	136.923.449	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Kegiatan 4:											
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100	100	100	100	1.586.962.130	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Sub Kegiatan:											
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kajian/Penelitian	Dokumen	0	1	0	0	0	130.385.101	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi										
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Pembinaan Inovasi Daerah	Inovasi	100	120	130	140	150	496.368.571	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Diseminasi dan Publikasi Inovasi yang dilaksanakan Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kali	1	1	1	1	1	549.981.336	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan yang diselenggarakan	Kali	1	1	1	1	1	326.107.832	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Paten yang di daftar	Paten	0	2	0	3	0	84.119.290	DAU	Padang Pariaman	Bapelitbangda
	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan	Kategori	B	BB	BB	BB	BB	517.609.031	DAU	Padang Pariaman	Sekretariat Daerah (Bag Organisa

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		RB										si)
	Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah dengan nilai sakip A ke atas	Persen	45	50	55	60	65	517.609.031	DAU	Padang Pariaman	Sekretari at Daerah (Bag Organisa si)
		Nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP hasil evaluasi Kemenpan	Nilai	11,75	12	12,25	12,50	12,75				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LAKIP Kabupatye n Padang Pariaman yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	517.609.031	DAU	Padang Pariaman	Sekretari at Daerah (Bag Organisa si)
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B											
	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Kategori	B	BB	BB	BB	BB	494.587.259	DAU	Padang Pariaman	Sekretari at Daerah (Bag Organisa si)
	Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah dengan nilai sakip A ke atas	Persen	45	50	55	60	65	494.587.259	DAU	Padang Pariaman	Sekretari at

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
												Daerah (Bag Organisa si)
		Nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP hasil evaluasi Kemenpan	Nilai	11,75	12	12,25	12,50	12,75				
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dibina	OPD dan Kecamatan	44 OPD & Kecamatan	44 OPD & Kecamatan	44 OPD & Kecamatan	44 OPD & Kecamatan	44 OPD & Kecamatan	494.587.259	DAU	Padang Pariaman	Sekretariat Daerah (Bag Organisa si)
	Program : PENGELOLAAN ARSIP											
	Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	OPD	40	40	40	40	40	177.500.000,-	DAU	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengelolaan, pemeliharaan, dan penyusutan	peserta	40	40	40	40	40	152.500.000,-	DAU	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		arsip dinamis OPD (Pencipta arsip)/sosialisasi tata kelola kearsipan										
	Sub Kegiatan : Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang diawasi dan diaudit dalam pengelolaan kearsipan dinamis	OPD	25	25	25	25	25	177.500.000	DAU	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Kegiatan : Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah pengolahan arsip dan preservasi arsip statis di depo arsip	Tahun	1	1	1	1	1	150.000.000,-	DAU	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Kegiatan : Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi, Akses, dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Arsip	20	20	20	25	25	167.500.000,-	DAU	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program : PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP											
	Kegiatan : Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun											
	Sub Kegiatan : Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah JRA yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati	JRA	10	10	10	10	10	167.500.000,-	DAU	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan yang memiliki retensi dibawah 10 tahun kearsipan	Berkas	10	15	20	25	30	125.000.000,-	DAU	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Kegiatan : Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip akibat bencana yang terkumpul dan teridentifikasi	Berkas	10	15	20	25	30	125.000.000,-	DAU	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Kegiatan : Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan											
	Sub Kegiatan : Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Nagari Pemekaran yang dibina tata kelola kearsipannya	Nagari	25	25	25	25	25	150.000.000,-	DAU	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Kegiatan : Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah keberadaan dan keutuhan arsip yang sesuai NSPK	Berkas Arsip	50	50	50	50	50	125.000.000,-	DAU	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Sub Kegiatan : Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang dialih mediakan	Berkas	300	350	400	400	400	167.500.000,-	DAU	Kab. Padang Pariaman	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program : PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP											
	Kegiatan : Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan :Penyusunan dan Penetapan SOP	Jumlah SOP	SOP	15	15	15	15	15	125.000.000,-	DAU	Kab. Padang	Dinas

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun									Pariaman	Kearsipan dan Perpustakaan
16.06.02	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.											
	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Persen	100 %	100%	100%	100%	100%	1.033.893.683	DAU	Padang Pariaman	Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)
	Kegiatan : Penataan Organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,30	83,45	83,60	84,75	84,90	1.033.893.683	DAU	Padang Pariaman	Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah perangkat daerah yang dibina	OPD & Kec	44 OPD & Kec	44 OPD & Kec	44 OPD & Kec	44 OPD & Kec	44 OPD & Kec	1.033.893.683	DAU	Padang Pariaman	Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.											
	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Persen	100 %	100%	100%	100%	100%	1.033.893.683	DAU	Padang Pariaman	Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)
	Kegiatan : Penataan Organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,30	83,45	83,60	84,75	84,90	1.033.893.683	DAU	Padang Pariaman	Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah perangkat daerah yang dibina	OPD & Kec	44 OPD & Kec	44 OPD & Kec	44 OPD & Kec	44 OPD & Kec	44 OPD & Kec	1.033.893.683	DAU	Padang Pariaman	Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)
16.07.01	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.											
	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Persen	100 %	100%	100%	100%	100%	633.396.005	DAU	Padang Pariaman	Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)
	Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tepat tugas dan fungsinya	Persen	55%	60%	70%	80%	90%	633.396.005	DAU	Padang Pariaman	Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen data informasi jabatan yang tersedia per perangkat daerah	Dokumen	3	1	1	3	4	633.396.005	DAU	Padang Pariaman	Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)
		Jumlah dokumen pembentukan organisasi										

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
		perangkat daerah yang sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunan										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).											
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).											
16.07.02	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.											
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi											
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan											
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan											
16.08.01	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara- negara berkembang di Organisasi Internasional.											
16.8.1.(a.)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.											
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.											
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun											
16.10.01	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.											
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	dan awak media.											
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).											
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.											
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.											
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif											
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.											
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.											
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITAISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN												
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.											
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.											
17.02.01	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara- negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/ Komite Bantuan Pembangunan.											
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB											
17.03.01	Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment/ FDI</i>), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.											
17.03.02	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.											
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (<i>dalam US dollars</i>) terhadap PDB.											
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.											
17.05.01	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara- negara berkembang termasuk negara- negara kurang berkembang											
17.06.01	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya											
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) terhadap total rumah tangga											
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)											
17.07.01	Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.											
17.8.1*	Persentase pengguna internet											
17.09.01	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara- Selatan, Selatan- Selatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST											
17.9.1.(b)	Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular											
17.10.01	Rata-rata tarif terbobot dunia <i>Free Trade Agreement (FTA)</i> .											
17.10.1(a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati											
17.11.01	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.											
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas											
17.12.01	Rata-rata tarif terbobot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.											
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.											
17.14.01	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.											
17.15.01	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.											
17.16.01	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.											
17.17.01	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).											
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.											
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).											
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.											
17.18.01	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs											
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan,											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.											
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.											
17.19.01	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.											
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.											
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.											
17.19.02	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan											
	b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.											
	Program : Pencatatan Sipil								1.450.590.000	DAU	Padang Pariaman	disdukcapil
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	%	95	96	97	98	99	440.060.000	DAU	Padang Pariaman	disdukcapil
	Sub Kegiatan : Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kali	-	-	1	2	2	59.580.000	DAU	Padang Pariaman	disdukcapil
	Sub Kegiatan : Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan langsung yang dilakukan	Nagari	103	103	103	103	103	285.480.000	DAU	Padang Pariaman	disdukcapil
	Sub Kegiatan : Penyajian Data Kependudukan	Jumlah data	Dokumen	-	-	-	1	-	60.000.000	DAU	Padang	disdukcapil

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERAN GKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
	yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	kependudukan pencatatan sipil yang disajikan									Pariaman	pil
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.											
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>).											
	Program : Pengelolaan Profil Kependudukanj		Buku	3	3	3	3	3	107.273.000	DAU	Padang Pariaman	disdukcapil
	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan		Dokumen	1	1	2	1	1	107.273.000	DAU	Padang Pariaman	disdukcapil
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku Profil kependudukan Kab. Padang Pariaman yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	60.333.000	DAU	Padang Pariaman	disdukcapil

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	Orang									
	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Bantuan Sosial	Orang	36	36	36	36	36	265.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan Alat Bantu	Orang	50	50	50	50	50	240.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitas Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya yang mendapat Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan Bantuan Permakanan	Orang	50	50	50	50	50	208.014.920	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Persentase PPKS yang ditangani	Persen									
	Kegiatan : Rehabilitas Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya yang mendapat Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan Bantuan Permakanan	Orang	50	50	50	50	50	208.014.920	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Yang Tervalidasi	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS, BPNT dan PBI JKN Yang Tervalidasi	Persen	100	0	0	0	0	250.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.											
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang ditangani	Persen									
	Kegiatan : Rehabilitas Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya yang mendapat Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan Bantuan Permakanan	Orang	50	50	50	50	50	208.014.920	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan memiliki jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Yang Tervalidasi	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS, BPNT dan PBI JKN Yang Tervalidasi	Persen	100	0	0	0	0	250.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase ketersediaan pendamping pemberdayaan sosial	Persen	20	40	60	80	100				
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM PSKS yang ditingkatkan Kemampuannya	Persen	100	100	100	100	100				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang ditingkatkan kemampuannya dalam usaha kesejahteraan sosial	Lembaga	3	3	3	3	3	550.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kasus Keluarga Bermasalah yang didampingi dan difasilitasi	Kasus	15	15	15	15	15	150.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.											
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	Jiwa	45.625	45.625	45.625	45.625	45.625	98.987.565.600	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.											
	Program Hubungan Industrial	Persentase Pencegahan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Hubungan Industrial	%	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tatakelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit), BPJS, SP/SB yang tercatat)	%	15,38	17,95	17,95	17,95	17,95				
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang menerapkan tatakelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit), BPJS, SP/SB yang tercatat)	Perusahaan	0	10	10	10	10	400.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Disnakertrans
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.											
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses air minum layak	%	80,05	82,5	85	88,5	90			Solok Selatan	DPUTRP
	Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang dikelola	%	100	100	100	100	100			Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipa di Kawasan Pedesaan	Jumlah sambungan Rumah (SR) spam pedesaan yang dibangun	SR	800	500	400	300	2000	2.136.785.000	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan :Peningkatan spam jaringan perpipa di kawasan perkotaan	Jumlah sambungan Rumah (SR) spam Perkotaan yang dibangun	SR	1000	800	800	800	800	5.741.000.000	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipa di Kawasan Pedesaan	Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman (sambungan jaringan air minum/pamsimas dan hibah air minum pedesaan)	SR	800	800	800	800	800	14.667.158.750	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan : Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	1800	1250	1250	1250	1250	22.500.000.000	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Akses sanitasi layak	%	53,8	55,1	56,3	58,2	60		APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah MCK yang di kelola	%	50	55	56	58	60		APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan : Pembangunan/ Penyediaan Sub sistem pengolahan setempat	Jumlah MCK yang dibangun	Unit	5	5	5	5	5	5.433.539.000	APBD	Solok Selatan	DPUTRP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pembangunan /Penyediaan Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	IPAL Kombinasi MCK dan penunjang	Unit	2	2	2	4	4	12.614.586.000	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.											
	Program : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan	%	0	50	50	50	50			Solok Selatan	PUTRP
	Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	100	100	100	100			Solok Selatan	PUTRP
	Sub Kegiatan : Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	Kasus	0	5	5	5	5	200.000.000	APBD	Solok Selatan	PUTRP
	Program: Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan	%	100	100	100	100	100			Solok Selatan	PUTRP
	Kegiatan : Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen permasalahan pertanahan yang telah dilaksanakan	Dokumen	3	3	3	3	3			Solok Selatan	PUTRP
	Sub Kegiatan : Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	15	15	15	15	15	136.025.000	APBD	Solok Selatan	PUTRP
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	1,5	1,5	1,5	26.083.975.000	APBD	Solok Selatan	PUTRP
		Jumlah dokumen penyerahan hasil pengadaan tanah	Dokumen	3	2	2	2	2				
		Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan	Ha	3	2	2	2	2				
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.											
	Program : Penanggulangan Bencana	% jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana	Persentase	36	37	38	39	40				
		% penduduk terdampak bencana yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100				
		% daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya	Persentase	80	80	80	80	80				
	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persentase	36	37	38	39	40				
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	0	0	0	1	0	300.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana	Orang	500	1000	2000	2000	2000	352.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	% penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25				
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun	Dokumen	0	1	0	0	0	515.310.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk yang memperoleh pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	100	100	100	100	100	460.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Petugas Pusdalops PB yang Difasilitasi	Orang	23	23	23	23	23	1.947.780.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
		- Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	Item	2	2	2	2	2		APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang disediakan untuk masyarakat di daerah rawan bencana	Item	0	0	0	1	1	95.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah sungai rawan bencana yang disurvey	Sungai	5	5	5	5	5	150.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah destana yang dibentuk	Destana	0	1	1	1	1	700.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
		Jumlah destana yang dibina	Destana	6	6	7	8	9		APBD	Solok Selatan	BPBD
		Jumlah KSB yang dibina	KSB	10	10	10	9	8		APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Laporan	2	5	5	5	5	2.643.487.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
		Jumlah Dokumen Perencanaan/ Pengawasan Pekerjaan Rehab Rekon yang Disusun	Dokumen	6	0	0	0	0				
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga TRC Kabupaten yang dibina/ dibentuk	Orang	35	35	35	35	35	719.393.400	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penyusunan Rencana Kontigensi	Jumlah dokumen rencana kontigensi yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	825.000.000	APBD		BPBD
	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% penduduk terdampak bencana yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100				
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persentase	100	100	100	100	100	1.907.375.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persentase	100	100	100	100	100	300.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Item	16	16	16	16	16	1.775.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang ditata	Persen	100	100	100	100	100				
	Penguatan Kelembagaan Bencana	Jumlah rapat kelembagaan bencana kabupaten/ kota	Kali	2	2	2	2	2	210.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.											
	Program : Penanggulangan Bencana	% jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana	Persentase	36	37	38	39	40				
		% penduduk terdampak bencana yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100				
		% daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya	Persentase	80	80	80	80	80				
	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persentase	36	37	38	39	40				
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	0	0	0	1	0	300.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana	Orang	500	1000	2000	2000	2000	352.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	% penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun	Dokumen	0	1	0	0	0	515.310.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk yang memperoleh pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	100	100	100	100	100	460.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Petugas PUSDALOPS PB yang Difasilitasi	Orang	23	23	23	23	23	1.947.780.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
		- Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	Item	2	2	2	2	2		APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang disediakan untuk masyarakat di daerah rawan bencana	Item	0	0	0	1	1	95.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah sungai rawan bencana yang disurvei	Sungai	5	5	5	5	5	150.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah destana yang dibentuk	Destana	0	1	1	1	1	700.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
		Jumlah destana yang dibina	Destana	6	6	7	8	9		APBD	Solok Selatan	BPBD
		Jumlah KSB yang dibina	KSB	10	10	10	9	8		APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Laporan	2	5	5	5	5	2.643.487.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
		Jumlah Dokumen Perencanaan/ Pengawasan Pekerjaan Rehab Rekon yang Disusun	Dokumen	6	0	0	0	0				
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga TRC Kabupaten yang dibina/ dibentuk	Orang	35	35	35	35	35	719.393.400	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penyusunan Rencana Kontigensi	Jumlah dokumen rencana kontigensi yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	825.000.000	APBD		BPBD
	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% penduduk terdampak bencana yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100				
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persentase	100	100	100	100	100	1.907.375.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persentase	100	100	100	100	100	300.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Item	16	16	16	16	16	1.775.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang ditata	Persen	100	100	100	100	100				
	Penguatan Kelembagaan Bencana	Jumlah rapat kelembagaan bencana kabupaten/ kota	Kali	2	2	2	2	2	210.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											
	Program : Penanggulangan Bencana	% jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana	Persentase	36	37	38	39	40				
		% penduduk terdampak bencana yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100				
		% daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya	Persentase	80	80	80	80	80				
	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persentase	36	37	38	39	40				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	0	0	0	1	0	300.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana	Orang	500	1000	2000	2000	2000	352.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	% penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25				
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun	Dokumen	0	1	0	0	0	515.310.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk yang memperoleh pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	100	100	100	100	100	460.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Petugas Pusdalops PB yang Difasilitasi	Orang	23	23	23	23	23	1.947.780.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
		- Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	Item	2	2	2	2	2		APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang disediakan untuk masyarakat di daerah rawan bencana	Item	0	0	0	1	1	95.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah sungai rawan bencana yang disurvei	Sungai	5	5	5	5	5	150.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah destana yang dibentuk	Destana	0	1	1	1	1	700.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
		Jumlah destana yang dibina	Destana	6	6	7	8	9		APBD	Solok Selatan	BPBD
		Jumlah KSB yang dibina	KSB	10	10	10	9	8		APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Laporan	2	5	5	5	5	2.643.487.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
		Jumlah Dokumen Perencanaan/ Pengawasan Pekerjaan Rehab Rekon yang Disusun	Dokumen	6	0	0	0	0				
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga TRC Kabupaten yang dibina/ dibentuk	Orang	35	35	35	35	35	719.393.400	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penyusunan Rencana Kontigensi	Jumlah dokumen rencana kontigensi yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	825.000.000	APBD		BPBD
	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	% penduduk terdampak bencana yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100				
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persentase	100	100	100	100	100	1.907.375.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persentase	100	100	100	100	100	300.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Item	16	16	16	16	16	1.775.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang ditata	Persen	100	100	100	100	100				
	Penguatan Kelembagaan Bencana	Jumlah rapat kelembagaan bencana kabupaten/ kota	Kali	2	2	2	2	2	210.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana											
	Program : Penanggulangan Bencana	% jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana	Persentase	36	37	38	39	40				
		% penduduk terdampak bencana yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100				

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.											
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian										
	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemakaian Bibit bersertifikat (bantuan Bibit)	persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan :Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luasan Pemakaian Bibit Unggul tanaman / Jumlah pelaksanaan Inseminasi Buatan	Ha	206/2500	0/3000	0/3000	0/3000	0/3000	1.559.044.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan :Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Hewan/Tanaman	Jumlah Luasan Pemakaian bibit unggul	Ha		6320	6579	7045	7105	1.908.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian
	Kegiatan : Penyediaan Benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 daerah kabupaten/kota lainnya	Persentase Pelaksanaan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Persen	100	100	100	100	100	75.341.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan : Pengadaan benih /bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten kota lain	Jumlah ternak sapi dan unggas yang didistribusikan	ekor	500/2000	625/0	1050/0	835/0	835/0	75.000.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan : Pengadaan Hiajuan Pakan Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten lain	Jumlah Luasan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Ha	25	25	25	25	25	341.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian
	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses air minum layak	%	80,05	82,5	85	88,5	90				
	Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang dikelola	%	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan: Pembangunan spam jaringan perpipaan dikawasan pedesaan	Jumlah sambungan Rumah (SR) spam pedesaan yang dibangun	SR	800	500	400	300	2000	512.435.000	APBD	SOLOK SELATAN	PUTRP
	Sub Kegiatan: Peningkatan spam jaringan perpipaan dikawasan perkotaan	Jumlah sambungan Rumah (SR) spam Perkotaan yang dibangun	SR	1000	800	800	800	800	1.331.000.000	APBD	SOLOK SELATAN	PUTRP
	Sub Kegiatan: Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman (sambungan jaringan air minum/pamsimas dan hibah air minum pedesaan)	SR	800	800	800	800	800	3.189.633.750	APBD	SOLOK SELATAN	PUTRP
	Sub Kegiatan: Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	1800	1250	1250	1250	1250	22.500.000.000	APBD	SOLOK SELATAN	PUTRP
	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah											
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah MCK yang di kelola	%	50	55	56	58	60				
	Sub Kegiatan : Pembangunan/ Penyediaan Sub sistem pengolahan setempat	Jumlah MCK yang dibangun	Unit	5	5	5	5	5	5.433.539.000	APBD	SOLOK SELATAN	PUTRP
	Sub Kegiatan: Pembangunan /Penyediaan Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	IPAL Kombinasi MCK dan penunjang	Unit	2	2	2	4	4	12.614.586.000	APBD	SOLOK SELATAN	PUTRP
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	59,68	63,48	67,28	72,28	75	234.846.000.000	APBD	SOLOK SELATAN	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI	Persen	100	102,25	105,75	108,35	110				
		APK SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100				
		APM SD/MI	Persen	99,5	99,75	100	100	100				
		APM SMP/MTs	Persen	77,25	80,75	82,35	84,35	85				
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98,25	99,15	99,75	100	100				

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	kkcl/kapita/tahun	77	78	79	83	85				
	Sub Keg Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Ton	5	10	10	10	10	1.040.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian dan KP
	Sub Keg Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Pengembangan Pangan Pekarangan	Kecamatan	7	7	7	7	7	1.797.928.000	APBD	Solok Selatan	Dinas Pertanian dan KP
	Sub Keg Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga	Jumlah Ketersediaan, Harga dan Pasokan Pangan di	Komoditi	9	9	9	9	9	595.000.000	APBD	Solok	Dinas
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Nagari Rawan Pangan Yang Ditangani	%									
	Keg. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penanganan Kerawanan Pangan	7	7	7	7	7	7				
	Sub Keg Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Penerima dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan	KK	250	275	285	290	296	585.000.000	APBD	Solok Selatan	DINAS Pertanian dan KP
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.											
	PROGRAM PEMENUHAN USAHA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Balita Stunting	Persen	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan gizi	Orang	405	405	405	405	405	607.594.310	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera	Persen	32,5	35,1	37,3	39,6	41,2				
	Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Organisasi	7	7	7	7	7				
	Sub Kegiatan : Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi masyarakat dalam pergerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	Jumlah sosialisasi / pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga terhadap organisasi masyarakat yang dilakukan	Kegiatan	7	7	7	7	7	130.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Akseptor KB aktif	Persen	81,95	82,25	82,4	82,75	83,25				
	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Persen	100	100	100	100	100				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah sarana dan distribusi sarana KIE Program KKBPK yang tersedia dan didistribusikan	Paket	1	1	1	1	1	80.600.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
	Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang	Jumlah kegiatan promosi KIE Program KKBPK	Kegiatan	4	4	4	4	4	890.675.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK MELALUI rakorcam, Rakordes dan Minilok di setiap kecamatan	Kali	7	7	7	7	7	855.428.400	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluhan KKBPK yang tersedia pengelolaan operasionalnya	Unit	7	7	7	7	7	1.447.500.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Penguatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya yang berperan serta dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Organisasi	7	7	7	7	7	83.280.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Kali	7	7	7	7	7	2.012.630.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45				
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah yang dipetakan	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dibuat	Laporan	12	12	12	12	12	150.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.											
	PROGRAM PEMENUHAN USAHA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Balita Stunting	Persen	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan gizi	Orang	405	405	405	405	405	607.594.310	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).											
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	kkcl/kapita/tahun	78	79	83	84	86		APBD	Solok Selatan	DINAS Pertanian dan KP
	Sub Keg Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Pengembangan Pangan Pekarangan	Kecamatan	7	7	7	7	7	1.797.928.000	APBD	Solok Selatan	DINAS Pertanian dan
	Sub Keg Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Ketersediaan, Harga dan Pasokan Pangan di Pasar	Komoditi	9	9	9	9	9	595.000.000	APBD	Solok Selatan	DINAS Pertanian dan
	Sub Keg Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kot a	Jumlah Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Ton	5	5	10	10	10	1.040.000.000	APBD	Solok Selatan	DINAS Pertanian dan

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.											
	PROGRAM PEMENUHAN USAHA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bayi Baru Lahir Umur 0-28 Hari yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	954	954	954	954	954	337.580.500	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Kesehatan
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.											
	PROGRAM PEMENUHAN USAHA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Kasus HIV	Per 10 Ribu Penduduk	0,11	0,1	0,08	0,08	0,07				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Orang Terduga Beresiko Terinveksi Virus HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505	145.044.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Kesehatan
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.											
	PROGRAM PEMENUHAN USAHA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kasus Baru TB BTA+	Per 100 Ribu Penduduk	26	25	24	23	22				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Penderita TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	26	25	24	23	22	268.741.100	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.											
	PROGRAM PEMENUHAN USAHA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	API Malaria	Per 1.000 Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas	5	5	5	5	5	1.320.261.100	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Kesehatan
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.											
	PROGRAM PEMENUHAN USAHA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	API Malaria	Per 1.000 Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas	5	5	5	5	5	1.320.261.100	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan											
	Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa											
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.											
	PROGRAM PEMENUHAN USAHA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Surveilans Kesehatan	Puskesmas	8	8	8	8	8	213,875,000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Kesehatan
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.											
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Persen	32	39	45	50	50				
	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM	Orang	30	30	30	30	30	508,000,000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Kesehatan
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.											
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.											
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.											
3.d.2	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.											

TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	59,68	63,48	67,28	72,28	75	234.846.000.000	APBD	SOLOK SELATAN	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI	Persen	100	102,25	105,75	108,35	110				
		APK SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100				
		APM SD/MI	Persen	99,5	99,75	100	100	100				
		APM SMP/MTs	Persen	77,25	80,75	82,35	84,35	85				
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98,25	99,15	99,75	100	100				
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	Persen	99,75	100	100	100	100				
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.											
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	59,68	63,48	67,28	72,28	75	234.846.000.000	APBD	SOLOK SELATAN	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI	Persen	100	102,25	105,75	108,35	110				
		APK SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100				
		APM SD/MI	Persen	99,5	99,75	100	100	100				
		APM SMP/MTs	Persen	77,25	80,75	82,35	84,35	85				
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98,25	99,15	99,75	100	100				
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	Persen	99,75	100	100	100	100				
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.											
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	59,68	63,48	67,28	72,28	75	234.846.000.000	APBD	SOLOK SELATAN	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI	Persen	100	102,25	105,75	108,35	110				
		APK SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100				
		APM SD/MI	Persen	99,5	99,75	100	100	100				
		APM SMP/MTs	Persen	77,25	80,75	82,35	84,35	85				
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98,25	99,15	99,75	100	100				
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	Persen	99,75	100	100	100	100				
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.											
	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang diterima di dunia kerja atau berwirausaha	%	40	45	50	60	65				
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih dan bersertifikasi	orang	208	160	160	160	160				

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	59,68	63,48	67,28	72,28	75	234.846.000.000	APBD	SOLOK SELATAN	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI	Persen	100	102,25	105,75	108,35	110				
		APK SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100				
		APM SD/MI	Persen	99,5	99,75	100	100	100				
		APM SMP/MTs	Persen	77,25	80,75	82,35	84,35	85				
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98,25	99,15	99,75	100	100				
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	Persen	99,75	100	100	100	100				
04.06.01	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	59,68	63,48	67,28	72,28	75	234.846.000.000	APBD	SOLOK SELATAN	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI	Persen	100	102,25	105,75	108,35	110				
		APK SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100				
		APM SD/MI	Persen	99,5	99,75	100	100	100				
		APM SMP/MTs	Persen	77,25	80,75	82,35	84,35	85				
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98,25	99,15	99,75	100	100				
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	Persen	99,75	100	100	100	100				
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	59,68	63,48	67,28	72,28	75	234.846.000.000	APBD	SOLOK SELATAN	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI	Persen	100	102,25	105,75	108,35	110				
		APK SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100				
		APM SD/MI	Persen	99,5	99,75	100	100	100				
		APM SMP/MTs	Persen	77,25	80,75	82,35	84,35	85				
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98,25	99,15	99,75	100	100				
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	Persen	99,75	100	100	100	100				
04.07.01	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	59,68	63,48	67,28	72,28	75	234.846.000.000	APBD	SOLOK SELATAN	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI	Persen	100	102,25	105,75	108,35	110				
		APK SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100				
		APM SD/MI	Persen	99,5	99,75	100	100	100				
		APM SMP/MTs	Persen	77,25	80,75	82,35	84,35	85				
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98,25	99,15	99,75	100	100				
		Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	Persen	99,75	100	100	100	100				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD, SMP)	Persen	11,17	19,55	27,93	33,52	39,11	800	APBD		
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik :							1300	APBD		
		SD/MI	Persen	93,65	94,35	95,25	96,15	97				
		SMP/MTs	Persen	96,00	96,75	97	97,75	98				

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.											
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.											
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik :							1300	APBD		
		SD/MI	Persen	93,65	94,35	95,25	96,15	97				
		SMP/MTs	Persen	96,00	96,75	97	97,75	98				
		Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikat	Persen	91,67	95,75	100	100	100				
		Persentase Pengawas yang bersertifikat	Persen	46,43	75,25	80,25	100	100				
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN												
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.											
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender	Rasio	54,15	55,3	57	58,5	60				
	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD Reponsif Gender	Persen	36,36	54,54	72,72	90	100				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten Kota	Kali	10	10	10	10	10	180.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
	Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kali	5	5	5	5	5	150.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan terhadap Anak yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Jumlah Kegiatan Forum anak yang terselenggara	Kegiatan	1	1	1	1	1	155.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	Rasio	0,018	0,012	0,009	0,005	0,005				
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten kota	Kali	5	6	20	25	25	305.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang responsif Gender	Persen	36,36	54,54	72,72	90	100				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kab/kota	Jumlah data gender dan anak yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	145,000,000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan terhadap Anak yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Jumlah Kegiatan Forum anak yang terselenggara	Kegiatan	1	1	1	1	1	155000000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	Rasio	0,018	0,012	0,009	0,005	0,005				
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten kota	Kali	5	6	20	25	25	305.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang responsif Gender	Persen	36,36	54,54	72,72	90	100				
	Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kab/kota	Jumlah data gender dan anak yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	145.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.											
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	Rasio	0,018	0,012	0,009	0,005	0,005				
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten kota	Kali	5	6	20	25	25	305.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
05.03.02	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.											
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	Rasio	0,018	0,012	0,009	0,005	0,005				
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten kota	Kali	5	6	20	25	25	305.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.											
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.											
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.											
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA												
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.											
	Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses air minum layak	%	80,05	82,5	85	88,5	90				
	Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang dikelola	%	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah sambungan Rumah (SR) spam pedesaan yang dibangun	SR	800	500	400	300	2000	2.136.785.000	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan :Peningkatan spam jaringan perpipaan dikawasan perkotaan	Jumlah sambungan Rumah (SR) spam Perkotaan yang dibangun	SR	1000	800	800	800	800	5.741.000.000	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman (sambungan jaringan air minum/pamsimas dan hibah air minum pedesaan)	SR	800	800	800	800	800	14.667.158.750	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan : Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	1800	1250	1250	1250	1250	22.500.000.000	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.											
	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah											
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah MCK yang di kelola	%	50	55	56	58	60				
	Sub Kegiatan : Pembangunan/ Penyediaan Sub sistem pengolahan setempat	Jumlah MCK yang dibangun	Unit	5	5	5	5	5	5.433.539.000	APBD	SOLOK SELATAN	PUTRP
	Sub Kegiatan: Pembangunan /Penyediaan Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala pemukiman	IPAL Kombinasi MCK dan penunjang	Unit	2	2	2	4	4	12.614.586.000	APBD	SOLOK SELATAN	PUTRP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
08.07.01	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).											
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur											
08.08.01	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.											
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.											
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.											
	Program :Program Hubungan Industrial	Persentase Pencegahan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Hubungan Industrial	%	100	100	100	100	100		APBD	Kab. Solok Selatan	Disnakertrans
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tatakelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit), BPJS, SP/SB yang tercatat)	%	15,38	17,95	17,95	17,95	17,95		APBD	Kab. Solok Selatan	Disnakertrans
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang menerapkan tatakelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit), BPJS, SP/SB yang tercatat)	Perusahaan	0	10	10	10	10	400.000.000			Disnakertrans
	Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tatakelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit, BPJS, SP/SB yang tercatat)	%	15,38	17,95	17,95	17,95	17,95		APBD	Kab. Solok Selatan	Disnakertrans
	Sub Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pencegahan perselisihan antar Serikat Pekerja/Buruh dalam satu perusahaan	Kali	10	10	10	10	10	160.000.000	APBD	Kab.Solok Selatan	Disnakertrans
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.											
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.											
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.											
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.											
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	objek	12	13	14	15	15				
	Keg. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Dikelola	destinasi	12	13	14	15	15				
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata yang dilengkapi sarana prasarana pengelolaannya	objek	5	5	5	5	5	550.000.000	APBD-DAK	Solok Selatan	DisBudparpora
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Dipasarkan	destinasi	12	13	14	15	15	888.651.759	APBD	Solok Selatan	DisBudparpora

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Keg. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	kali	2	5	6	7	8	888.651.759	APBD	Solok Selatan	DisBudparpora
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi dan Pemasaran yang dilaksanakan/diikuti	event	2	5	6	7	8	888.651.759	APBD	Solok Selatan	DisBudparpora
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.											
8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.											
8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.											
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI												
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.											
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.											
	Program : Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	44,46	47,1	49,74	52,39	55				
		Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	%	80	82	85	88	90				
	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang	Km	523,80	554,90	586,00	617,22	647,97				
		Jumlah Jembatan Kabupaten kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	Unit	202,00	207,00	215,00	222,00	227,00				
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan yang disusun	Dokumen	4	10	6	6	6	4.143.261.000	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan : Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen data base jalan dan Jembatan yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2.723.245.000	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Km	10	10	4	4	4	6.808.141.500	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang ditingkatkan	Km	20	33,17	33,17	33,17	33,17	217.602.535.891	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di rehab	Km	4,033	9,333	5,667	6,0	34,465	51.697.616.364	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan rang dipelihara secara rutin	Km	30	32	32	32	32	9.000.000.000	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang dibangun	Unit	4	4	4	4	4	113.170.354.751	APBD	Solok Selatan	DPUTRP
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang di rehab	Unit	4	4	4	4	4	9.562.555.479	APBD	Solok	DPUTRP

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Terlaksananya Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan	Usaha dan/atau kegiatan									
		Terlaksananya Pengendalian emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	objek binaan									
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pengembangan teknologi Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kelompok	15	15	15	15	15	650.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Perkim LH
		Kelompok KSDA	Kelompok	6	7	8	9	10				
		Kampung iklim	Jorong	4	5	6	7	8				
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.											
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.											
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).											
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.											
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.											
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi											
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.											
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA												
10.1.1*	Rasio Gini.											
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.											
	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Nagari Pemekaran	Nagari	3	3	3	3	3				
		Persentase Nagari Mandiri	Persen	21,28	29,73	36,17	42,55	48,94				
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	Persen	100	100	100	100	100				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah nagari pemekaran yang difasilitasi	Nagari	0	5	5	5	5	185.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial, PMD/N
	Sub Kegiatan : Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi Tata Kewilayahannya	Nagari	0	5	5	5	5	167.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial, PMD/N
	Sub Kegiatan : Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Regulasi yang ditetapkan tentang penataan Kewenangan nagari	Dokumen	0	1	1	1	1	170.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial, PMD/N
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase nagari lengkap administrasi pemerintahan nagari (Perencanaan, Keuangan, dan Aset)	Persen	70	75	80	85	90				
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang dibina dalam pengelolaan administrasi pemerintahan	Nagari	47	47	47	47	47	1.070.049.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial, PMD/N
	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa	Nagari	47	47	47	47	47	78.666.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial, PMD/N
	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan	Nagari	47	47	47	47	47	118.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial, PMD/N
		Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Aset Desa										
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.											
	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Nagari Pemekaran	Nagari	3	3	3	3	3				
		Persentase Nagari Mandiri	Persen	21,28	29,73	36,17	42,55	48,94				
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah nagari pemekaran yang difasilitasi	Nagari	0	5	5	5	5	185.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial, PMD/N
	Sub Kegiatan : Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi Tata Kewilayahannya	Nagari	0	5	5	5	5	167.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial, PMD/N
	Sub Kegiatan : Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Regulasi yang ditetapkan tentang penataan Kewenangan nagari	Dokumen	0	1	1	1	1	170.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial, PMD/N
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase nagari lengkap administrasi pemerintahan nagari (Perencanaan, Keuangan, dan Aset)	Persen	70	75	80	85	90				
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang dibina dalam pengelolaan administrasi pemerintahan	Nagari	47	47	47	47	47	1.070.049.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial, PMD/N
	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa	Nagari	47	47	47	47	47	78.666.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial, PMD/N
	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan	Nagari	47	47	47	47	47	118.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Sosial, PMD/N
		Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Aset Desa										
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.											
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan nagari (LPMN) aktif	Persen	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemberdayaan dan keuangan Aktif	Persen	60	75	80	90	100				

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
10.07.02	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migrasi yang baik.											
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.											
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.											
10.07.03	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.											
10.07.04	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.											
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/ berkembang dengan tarif nol persen.											
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terilah berdasarkan negara- negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).											
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.											
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN												
11.01.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											
	PROGRAM : KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan Rehabilitasi dan pembangunan RTLH pada kawasan permukiman kumuh	%	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7				
	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terbitnya izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Dokumen	1	0	0	0	0				
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan kawasan pemukiman dan kawasan kumuh	Dokumen	1	0	0	0	0	400.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Perkim LH
	Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	kawasan	0	0	0	0	0				
	Sub Kegiatan : Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Tersedianya data untuk lokasi perumahan dan kawasan kumuh	kawasan	1	0	0	0	0	100.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Perkim LH

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase lembaga adat aktif	Persen	100	100	100	100	100		APBD	Solok selatan	DisBudparpora
	Keg. Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kebudayaan Daerah	sanggar	13	13	15	16	16		APBD	Solok selatan	DisBudparpora
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah event tradisi budaya	event	6	6	6	6	6	1.489.015.400	APBD	Solok selatan	DisBudparpora
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
11.05.02	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar											
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB											
11.06.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota											
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya											
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola											
	PROGRAM : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan Layanan Persampahan	%	75	80	100	100	100				
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	%	5	5	5	5	5				
		Persentase timbulan sampah yang ditangani	%	35	40	45	50	55				
	Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Pengurangan sampah di TPS 3R	ton	1500	1500	3000	3000	3000	874.026.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Perkim LH
		Jumlah Pengurangan timbulan sampah di Nagari	ton	9400	9400	9400	9400	9400				
		Jumlah Produk ramah lingkungan yang teregister	ton	11	30	40	50	60				
	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	ton	14600	16425	18250	20075	21900	10.900.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Perkim LH
		Jumlah Pengurangan sampah di TPA	ton	6000	6000	6000	6000	6000				
	Sub Kegiatan :Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok Peduli Sampah aktif	kelompok	4	5	6	7	8	750.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Perkim LH
		Pelatihan persampahan	kelompok	15	15	0	0	15				
	Sub Kegiatan :Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	Unit	14	20	12	11	9	3.250.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Perkim LH
11.06.02	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)											
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10											
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara											
	PROGRAM: PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indek Kualitas Udara	%	67,56	67,59	67,62	67,65	67,68				

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal											
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN												
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Produktifitas hasil Pertanian	Ton/Ha							APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian dan KP
	Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100		APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian dan KP
	Sub Kegiatan : Pengelolaan lahan pangan pertanian berkelanjutan LP2B kawasan pertanian pangan berkelanjutan KP2B dan lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan LCP2B	Jumlah Luasan kawasan LP2B, KP2B dan LCP2B sesuai lokasi ditetapkan	Ha	8921,55	8921,55	8921,55	8921,55	8921,55	364.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian dan KP
	Sub Kegiatan : Penyusunan Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B	Ditetapkannya kawasan LP2B Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian	Ha	7000					50.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian dan KP
	PROGRAM: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Ton							APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian
	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemakaian Bibit bersertifikat (bantuan Bibit)	persen	100	100	100	100	100		APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan :Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luasan Pemakaian Bibit Unggul tanaman / Jumlah pelaksanaan Inseminasi Buatan	Ha	206/2500	0/3000	0/3000	0/3000	0/3000	1.559.044.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan :Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Hewan/Tanaman	Jumlah Luasan Pemakaian bibit unggul	Ha		6320	6579	7045	7105	1.908.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Dinas Pertanian
12.02.01	Jejak material (material footprint)											
12.02.02	Konsumsi material domestik (domestic material consumption)											
12.03.01	(a) Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b) Indeks sampah makanan (Food waste index)											
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan											
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.											

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
12.b.1	Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau aspek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan											
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development											
12.c.1*	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.											
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA												
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang											
	Program : Penanggulangan Bencana	% jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana	Persentase	36	37	38	39	40				
		% penduduk terdampak bencana yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100				
		% daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya	Persentase	80	80	80	80	80				
	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persentase	36	37	38	39	40				
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	0	0	0	1	0	300.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana	Orang	500	1000	2000	2000	2000	352.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	% penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25				BPBD
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun	Dokumen	0	1	0	0	0	515.310.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk yang memperoleh pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	100	100	100	100	100	460.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Petugas Pusdalops PB yang Difasilitasi - Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	Orang Item	23 2	23 2	23 2	23 2	23 2	1.947.780.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang disediakan untuk masyarakat di daerah rawan bencana	Item	0	0	0	1	1	95.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah sungai rawan bencana yang disurvei	Sungai	5	5	5	5	5	150.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah destana yang dibentuk Jumlah destana yang dibina	Destana Destana	0 6	1 6	1 7	1 8	1 9	700.000.000	APBD	Solok Selatan	BPBD

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan											
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan											
14.03.0 1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai											
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman											
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut											
14.06.0 1	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha											
14.07.01	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)											
14.07.01	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)											
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun	2159,15	2342,678	2541,805	3613	2776,8588				
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya Yang Dibina	Kelompok									
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Calon Induk melalui seleksi benih kerjasama dgn UPT Pusat Kementerian kelautan untuk BBI perikanan	ekor	2000	2000	2000	2000	2000	259.998.800	APBD	Solok Selatan	Dinas Pertanian dan KP
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok pembudidaya yg dibina	Pokdakan	20	25	30	35	40				
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Unit Pembenihan (BBI dan UPR)	Unit	17	19	20	25	35	3.768.900.000	APBD	Solok Selatan	Dinas Pertanian dan KP
		Jumlah Unit Pembangunan/Rehabilitasi Kolam	Kelompok/Paket	19	21	25	27	27				
		Jumlah Pengadaan Mesin Pakan Ikan	Kelompok/Paket	2	2	2	2	2				
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPTD BBI Perikanan yang disediakan operasionalnya	unit	2	2	2	2	2	2.975.060.000	APBD	Solok Selatan	Dinas Pertanian dan KP

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT ANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBNAGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI												
16.01.01	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.											
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.											
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100				
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah anggota Satpol-PP yang melaksanakan piket pada tempat-tempat penting dan strategis	Orang	37	33	33	33	33	4.290.700.300	APBD	Kab. Solok Selatan	Satpol PP, Damkar
		Jumlah patroli wilayah/patroli rutin, penertiban dan operasi gabungan	Kali	60	70	70	70	70				
		Jumlah pengawalan dan pengamanan kepala daerah serta pejabat lainnya dan pengamanan kegiatan dan hari-hari nasional	Kali	50	60	65	70	70				
16.01.02	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.											
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.											
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100				
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah anggota Satpol-PP yang melaksanakan piket pada tempat-tempat penting dan strategis	Orang	37	33	33	33	33	4.290.700.300	APBD	Kab. Solok Selatan	Satpol PP, Damkar
		Jumlah patroli wilayah/patroli rutin, penertiban dan operasi gabungan	Kali	60	70	70	70	70				
		Jumlah pengawalan dan pengamanan kepala daerah serta pejabat lainnya dan pengamanan kegiatan dan hari-hari nasional	Kali	50	60	65	70	70				
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Cakupan penanganan pelanggaran perda/perkada	Kasus	0	25	30	25	25	260.099.900	APBD	Kab. Solok Selatan	Satpol PP, Damkar
16.01.03	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.											
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.											
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100				
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah anggota Satpol-PP yang melaksanakan piket pada tempat-tempat penting dan strategis	Orang	37	33	33	33	33	4.290.700.300	APBD	Kab. Solok Selatan	Satpol PP, Damkar
		Jumlah patroli wilayah/patroli rutin, penertiban dan operasi gabungan	Kali	60	70	70	70	70				
		Jumlah pengawasan dan pengamanan kepala daerah serta pejabat lainnya dan pengamanan kegiatan dan hari-hari nasional	Kali	50	60	65	70	70				
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.											
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100				
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah anggota Satpol-PP yang melaksanakan piket pada tempat-tempat penting dan strategis	Orang	37	33	33	33	33	4.290.700.300	APBD	Kab. Solok Selatan	Satpol PP, Damkar
		Jumlah patroli wilayah/patroli rutin, penertiban dan operasi gabungan	Kali	60	70	70	70	70				
		Jumlah pengawasan dan pengamanan kepala daerah serta pejabat lainnya dan pengamanan kegiatan dan hari-hari nasional	Kali	50	60	65	70	70				
16.02.01	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir											
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.											
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya											
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan terhadap Anak yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Jumlah Kegiatan Forum anak yang terselenggara	Kegiatan	1	1	1	1	1	155,000,000	APBD	Kab. Solok Selatan	DP2KB, PP & PA
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.											
16.02.03	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18- 29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18- 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100				

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100				
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah anggota Satpol-PP yang melaksanakan piket pada tempat-tempat penting dan strategis	Orang	37	33	33	33	33	4.290.700.300	APBD	Kab. Solok Selatan	Satpol PP, Damkar
		Jumlah patroli wilayah/patroli rutin, penertiban dan operasi gabungan	Kali	60	70	70	70	70				
		Jumlah pengawasan dan pengamanan kepala daerah serta pejabat lainnya dan pengamanan kegiatan dan hari-hari nasional	Kali	50	60	65	70	70				
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Cakupan penanganan pelanggaran perda/perkada	Kasus	0	25	30	25	25	260.099.900	APBD	Kab. Solok Selatan	Satpol PP, Damkar
16.3.3(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)											
16.04.01	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).											
16.04.02	Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.											
16.05.01	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.											
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).											
16.05.02	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.											
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.											
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.											
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA PPAS Awal 2022	Dokumen	2	2	2	2	2	1.386.127.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	tersusunnya KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022	Dokumen	2	2	2	2	2	1.373.410.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersusunnya DPA SKPD	SKPD	33	33	33	33	33	280.373.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPPA SKPD	SKPD	33	33	33	33	33	303.663.500	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Perda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2021 tepat waktu sesuai aturan dan terdistribusinya APBD TA 2021 ke pihak terkait	Dokumen	2	2	2	2	2	2.702.476.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
		Tersusunnya Ranperda tentang APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Perubahan APBD tahun 2021	Dokumen	2	2	2	2	2		APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD Perubahan Th Anggaran 2021 tepat waktu sesuai aturan dan terdistribusinya APBD 2021	Dokumen	2	2	2	2	2	2.597.734.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
		Tersusunnya Ranperbup Solok Selatan tentang Perubahan pertama penjabaran APBD TA 2021	Dokumen	2	2	2	2	2		APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perbup Standar Harga, Standar Biaya, Hak Keuangan DPRD, KKD, dan HSPK	Perbup	5	5	5	5	5	1.587.643.300	APBD	Solok Selatan	BPKD
		Meningkatnya Pemahaman Pejabat Pengelola Keuangan Daerah terkait Regulasi Terbaru	Dokumen	5	5	5	5	5		APBD	Solok Selatan	BPKD
		Tersusunnya Regulasi tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen	5	5	5	5	5		APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	SKPD	5	5	5	5	5	250.000.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah											
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersedianya laporan realisasi dan konsolidasi dana transfer/DAK sesuai JUKNIS.	Laporan	2	2	2	2	2	338.250.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Prosentase akurasi data gaji pegawai yang dapat diakses melalui sistem aplikasi gaji.	Persen	100	100	100	100	100	881.684.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SP2D yang telah diterbitkan dan disahkan BUD.	Dokumen	8000	8000	8000	8000	8000	1.836.825.960	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan keuangan daerah dan pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan daerah	persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan: Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan konsolidasi SKPD,BLUD	Dokumen	2	2	2	2	2	1.129.958.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Ranperda tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	1	1	1	1.116.491.000	APBD	Solok Selatan	BPKD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya RANPERDA tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.	Dokumen	1	1	0	1	1	587.156.410	APBD	Solok Selatan	BPKD
		Tersusunnya Standar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan.	Dokumen	3	3	0	0	1		APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya SISDUR tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	304.085.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah bintek penyusunan laporan keuangan daerah	Event	1	1	1	1	1	1.257.858.500	APBD	Solok Selatan	BPKD
		persentase penerapan aplikasi dalam sistem penatausahaan keuda	persen	100	100	100	100	100		APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	kali			4	4	4	210.000.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanj, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah OPD yg melakukan rekonsiliasi dan verifikasi aset	OPD			33	33	33	330.000.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	Jumlah OPD yg melaksanakan kordinasi penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, tri dan semester	OPD			33	33	33	190.000.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan keu BLUD	Event			1	1	1	230.000.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian persentase penyaluran danan transfer dan BTT	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan: Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase bantuan keuangan yg telah disalurkan	Persen	100	100	100	100	100	376.800.000	APBD	Solok Selatan	BPKD
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	65	70	80	85	90				
	Kegiatan Penataan Organisasi	Nilai Sakip dari Komponen Pelaporan	Nilai	9,9	10	10,1	10,2	10,3				
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	685.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Bagian Organisasi
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)	Persen	84	86	88	89	90				
	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu (RKPD, RKPD P, RPJMD, RPJPD)	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	4	4	4	4	4	4.898.759.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Bappeda
	Kegiatan : Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	0	1	1	1	172.304.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Bappeda
	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi dan Pengendalian	Persen	100	100	100	100	100				
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusun dan telaporkannya capaian pembangunan daerah (IKU,IKK dan DAK)	Dokumen	3	3	3	3	3	292.018.000	APBD	Kab. Solok Selatan	Bappeda
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	Persen	82	84	86	88	90				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.											
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif											
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.											
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.											
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITAISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN												
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.											
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.											
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian target pajak dan retribusi	%	98	98	98	98	98				
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian target pajak dan retribusi daerah	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	Sub Kegiatan: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah regulasi tentang pajak dan retribusi daerah yang disusun	Regulasi	15	2	2	2	2	319.216.500	APBD	Kab. Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang kebijakan pajak daerah	Kali			4	4	4	450.000.000	APBD	Kab. Solok Selatan	BPKD
		Jenis iklan pajak daerah yang dipasang di jalan	Jenis			5	5	5		APBD	Kab. Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak pendataan dan evaluasi NJOP PBB P2	Kecamatan	4	4	4	4	4	1.621.792.000	APBD	Kab. Solok Selatan	BPKD
	Sub Kegiatan: Penagihan Pajak Daerah	Jumlah realisasi pbb p2, pbb p3 dan bphtb	Milyar	8	8	8	8	8	1.513.831.000	APBD	Kab. Solok Selatan	BPKD
		Jumlah wajib pajak pbb p2, dan bphtb yang telah dilakukan pemungutan	OP	9000	9000	9000	9000	9000		APBD	Kab. Solok Selatan	BPKD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN												
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.											
	Program : Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	%	113	11.7							Dinas Pendidikan
		APMSMP	%	51	64							
		Persentase Lulusan SD hafidz alQuran minimal juz 30	%	25								
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		5.955	741							
	Sub Kegiatan :											
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia (Unit)	unit	1	3							
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik (Peserta Didik)	orang	5446	-							
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah		2.44	306							
	Sub Kegiatan :											
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (Paket)	paket	0	0							
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik (Peserta Didik)	orang	2185	-							
	Kegiatan :Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		3.15	2 958	5						
	Sub Kegiatan:											
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP (Satuan Pendidikan)	satuan	120	360							
	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan		214	719							
	Sub Kegiatan:											
	Pengelolaan dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/ kesetaraan yang mengelola dana BOP (satuan pendidikan)		2	6							
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	96	96							Dinkes, Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase rujukan yang dikeluarkan RSUD	%	≤ 4,25	≤ 4,25							
		Tingkat kepuasan pasien/ pengunjung	%	81	81							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan		30	30							
		Jumlah layanan kesehatan yang disediakan		30	30							
	Sub Kegiatan :											
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang terlayani	orang	100	0							
		Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	1263							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	120 5							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar	%	100	0							
		Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)	orang	0	1110							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	orang	95	0							
		Jumlah pelayanan kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	394 4							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	orang	100	0							
		Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	995 7							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	232 65							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	23265							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	144 5							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	0	498							
		Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (jumlah)	orang	0	0							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah Pasien gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (jumlah)	orang	0	248							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Case Detection Rate (CDR) TB		70	0							
		Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	557	0							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV	kasus	100	0							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	1284							
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dibayarkannya jaminan BPJS ketenagakerjaan pegawai honor dan kontrak	bulan	12	0							
		Dibayarkannya jaminan kecelakaan kematian pegawai honor kontrak	bulan	12	0							
		Dibayarkannya jaminan kecelakaan kerja pegawai honor dan kontrak	bulan	12	0							
		Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota Sawahlunto	orang	20000	0							
		Jumlah peserta jaminan kesehatan SUMBAR Sakato	orang	13003	0							
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (dokumen)	dokumen	0	4							
	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman	%	80	85							DPUPR
	Kegiatan: Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	persentase kualitas permukiman kumuh yang ditingkatkan	%	87	90							
	Sub Kegiatan											
	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah RTLH Yang diperbaiki	unit	30								
	Program: Rehabilitasi Sosial	Persentase penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi	%	100	100							DinsosPMDPP A
	Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang terfasilitasi	orang	310	315							
	Sub Kegiatan:											
	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar dan penyanggah cacat yang diberi permakanan	orang	0	105							
		Jumlah lansia miskin non produktif yang tersantuni (orang)	orang	160	160							
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah anak terlantar yang diberi transportasi	orang	0	18							
		Jumlah penyanggah cacat yang diberi alat bantu	orang	10	27							

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas keluarga	kegiatan	12	12							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hakm Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	lembaga	2	2							
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina 1	lembaga	95	100							DinsosPMDPP A
	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan desa	lembaga	4	4							
	Sub Kegiatan:											
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kegiatan TTG yang terfasilitasi dan ter Petakan	kegiatan	2	4							
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah yang direhabilitasi	%	85	90							DPUPR
	Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban		9	25							
	Sub Kegiatan:											
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban bencana yang direhab	unit	9	0							
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan permukiman	%	80	85							DPUPR
	Kegiatan: Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Yang di Tata	kawasan	16	49							
	Sub Kegiatan:											
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana pencegahan dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	dokumen	16	49							
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kualitas Permukiman Kumuh Yang ditingkatkan	%	87	90							
	Sub Kegiatan:											
	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	unit	72	250							
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah RTLH dan PSU yang diperbaiki	unit	-	-							
		Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dlm perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	dokumen	26	-							
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh Yang ditangani		72,9 3	19, 1							DKP2LH

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan: Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH Yang diperbaiki di Luar Kawasan Kumuh	unit	6	-							
	Sub Kegiatan:											
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH Yang diperbaiki di Luar Kawasan Kumuh	unit	6	-							
		Jumlah Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang diperbaiki	unit	12								
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang tertata	%	80	85							DKP2LH
	Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan Yang Tertata	unit	19	68							
	Sub Kegiatan:											
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jumlah prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang tertata	unit	19	-							
		Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	unit	-	68							
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sarana prasarana air minum dalam kondisi baik (%)	%	91	91							
	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih	unit	780	2.131							
	Sub Kegiatan:											
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana PDAM yang terehabilitasi	unit	-	1							
		Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	unit	-	3							
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang terehabilitasi (lokasi)	lokasi	7	23							
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase luas permukiman yang tertata	%	78,34	79,34							DPUPR

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	jumlah sarana yang disediakan	kelompok	15	15							
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian											DKP3
	Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Pupuk Bersubsidi yang Disalurkan	%	95	95							
		Persentase Kelompok Penerima Sarana yang Didampingi	%	100	100							
	Sub Kegiatan:											
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana yang difasilitasi	unit	5	7							
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		-	4							
	Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan Kabupaten/Kota	Produktifitas Padi	%	5,18	5,19							
		Produktifitas Karet	%	1,28	1,28							
		roduktifitas Kakao	%	1,13	1,13							
	Sub Kegiatan:											
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luas Lahan yang Tingkatkan Kualitasnya		55	15							
		Luas Lahan yang Direvitalisasi		15	-							
		Jumlah Luas Tanaman Perkebunan Yang dipelihara		30	10							
				1	1							
	Kegiatan: Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 daerah kab/kota lain											
	Sub Kegiatan:											
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumberdaya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			-	-							
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase santri rumah/pondok tahfizdz yang hafidz minimal 1 jus dalam setahun (persen)	%	30	30							Setdako (Kesra)
		ersentase imam masjid yang berkualitas (persen)	%	15	15							
	Kegiatan: Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat (bulan)	bulan	12	12							
	Sub Kegiatan:											
	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Honor guru TPQ/TPSQ, Imam dan Muazin Masjid Nagari, Gharim Masjid dan mushalla, dan Penyelenggara Jenazah (orang), Mahasiswa yang diberi reward)	Jumlah guru TPQ/TPSQ, Imam dan Muazin Masjid Nagari, Gharim Masjid dan mushalla, dan Penyelenggara Jenazah yang difasilitasi (orang)	orang	635	635							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Terlaksananya kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan (bulan)	bulan	12	12							Setdako (Perek)
	Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terselenggaranya kegiatan perekonomian (bulan)	bulan	12	12							
	Sub Kegiatan:											
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan pelaksanaan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi)	pelaksanaan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi (laporan)	laporan	4	4							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
	Program : Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	%	113	11.7							Dinas Pendidikan
		APMSMP	%	51	64							
		Persentase Lulusan SD hafidz alQuran minimal juz 30	%	25								
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		5.95 5	741							
	Sub Kegiatan :											
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia (Unit)	unit	1	3							
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik (Peserta Didik)	orang	5446	-							
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah		2.44 3	306							
	Sub Kegiatan :											
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (Paket)	paket	0	0							
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik (Peserta Didik)	orang	2185	-							
	Kegiatan :Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		3.15 2	958 5							
	Sub Kegiatan:											
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP (Satuan Pendidikan)	satuan	120	360							
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	96	100							Dinkes, Pengendalian Penduduk dan KB

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		pesentase rujukan yang dikeluarkan RSUD	%	≤4,25	0							
		Tingkat kepuasan pasien (pengunjung)		81	n/a							
	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan untuk UKM dan UKP yang disediakan		30	30							
		Jumlah layanan kesehatan yang disediakan		30	30							
	Sub Kegiatan :											
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang terlayani	orang	100	100							
		Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	126 3							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	120 5							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar		100	0							
		Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)	orang	0	111 0							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	orang	95	0							
		Jumlah pelayanan kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	394 4							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	orang	100	0							
		Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	995 7							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	orang	100	0							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Jumlah Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	232 65							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	232 65							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	144 5							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	0	498							
		Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (jumlah)	orang	0	0							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah Pasien gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (jumlah)	orang	0	248							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Case Detection Rate (CDR) TB		70	0							
		Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	557	0							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV	kasus	100	0							
		Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	128 4							
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dibayarkannya jaminan BPJS ketenagakerjaan pegawai honor dan kontrak	bulan	12	0							
		Dibayarkannya jaminan kecelakaan kematian pegawai honor kontrak	bulan	12	0							
		Dibayarkannya jaminan kecelakaan kerja pegawai honor dan kontrak	bulan	12	0							
		Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota Sawahlunto	orang	20000	0							
		Jumlah peserta jaminan kesehatan SUMBAR Sakato	orang	13003	0							
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (dokumen)	dokumen	0	4							
	Program: Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi	%	100	100							DinsosPMDPPA
	Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang terfasilitasi	orang	310	315							
	Sub Kegiatan:											
	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar dan penyandang cacat yang diberi permakanan	orang	0	105							
		Jumlah lansia miskin non produktif yang tersantuni (orang)	orang	160	160							
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah anak terlantar yang diberi transportasi	orang	0	18							
		Jumlah penyandang cacat yang diberi alat bantu	orang	10	27							
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan, pengemis masyarakat yang terfasilitasi	keluarga	70	70							
		Jumlah penyandang cacat yang diberi bimbingan sosial	orang	0	4							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak berkebutuhan khusus yang diberi bantuan transportasi ke sekolah (orang)	orang	74	77							
		Jumlah laporan KPM yang mendapatkan bantuan PKH	laporan	0	12							
		Jumlah Penyandang cacat berat yang diberi kebutuhan dasar	orang	0	20							
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah bantuan uang tunai untuk lansia (orang)	orang	127	209							
	Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang tertangani	orang	225	673							
	Sub Kegiatan:											
	Penyediaan Permakanan	jumlah lansia miskin non produktif yang tersantun	orang	0	160							
		jumlah laporan keluarga fakir miskin yang mendapatkan KUBE	laporan	0	12							
		jumlah laporan kpm yang mendapatkan BNPT	laporan	0	12							
		Jumlah penyandang disabilitas yang diberi bantuan permakanan (orang)	orang	25	25							
	pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah bantuan uang tunai untuk lansia (orang)	orang	127	209							
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan	%	100	100							DinsosPMDPP A
	Kegiatan: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan pemenuhan hak anak	bulan	12	12							
	Sub Kegiatan:											
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas keluarga	kegiatan	12	12							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hakm Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	lembaga	2	2							
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina 1	lembaga	95	100							DinsosPMDPP A
	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan desa	lembaga	4	4							
	Sub Kegiatan:											
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kegiatan TTG yang terfasilitasi dan ter Petakan	kegiatan	2	4							

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jumlah prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang tertata	unit	19	-							
		Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	unit	-	68							
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sarana prasarana air minum dalam kondisi baik (%)	%	91	91							DPUPR
	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih	unit	780	2.131							
	Sub Kegiatan:											
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana PDAM yang terehabilitasi	dokumen	-	1							
		Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	dokumen	-	3							
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang terehabilitasi (lokasi)	lokasi	7	23							
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase luas permukiman yang tertata	%	78,34	79,34							DPUPR
	Kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	unit	73	537							
	Sub Kegiatan:											
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana perkotaan dan permukiman yang terbangun dan terpelihara	unit	73	537							
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase air limbah yang ditangani	%	90	88							DPUPR
	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi (Unit)	unit	216	648							
	Sub Kegiatan:											
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah bangunan limbah terpusat yang dibangun (Unit)	unit	70	89							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	100	100							Kecamatan Lembah Segar
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		kegiatan	6	6							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan:											
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Kota di Kecamatan yang difasilitasi	kegiatan	4	4							
		Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi (bulan)	program	12	36							
		Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi (Program)	program	10	10							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	100	100							Kecamatan Barangin
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang di Fasilitasi	kegiatan	5	5							
	Sub Kegiatan:											
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Aparatur DPC LPM Kecamatan yang difasilitasi	orang	1	12							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi	kegiatan	6	5							
		Jumlah operasional DPCLPM yang difasilitasi	bulan	12								
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	PERSENTASE ANGKATAN KERJA YANG BERKUALITAS	%	80	80							Diskoperindag
	Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi	%	60	65							
		Persentase peserta pelatihan yang membuka wirausaha baru	%	10	10							
	sub kegiatan:											
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan Auto CAD yang bersertifikat	orang	16	32							
		Jumlah peserta pelatihan menjahit yang bersertifikat	orang	32	64							
		Jumlah peserta pelatihan otomotif yang bersertifikat	orang	16	32							
		Jumlah peserta pelatihan tata boga yang bersertifikat	orang	16	32							
		Jumlah peserta pelatihan teknisi AC Split yang bersertifikat	orang	16	32							
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang		96							
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60%	%	30	60							Diskoperindag
	Kegiatan: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	%	74	74							
		Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya	unit	5	5							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan:											
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi	unit	120	240							
	Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah UMKM yang bersertifikat	unit	105	210							
	Sub Kegiatan:											
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah UMKM yng bersertifikasi kewirausahaan	unit	105	210							
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya	%	1.8	2							Diskoperindag
	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil	%	50	50							
	Sub Kegiatan:											
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil	%	50	50							
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dekranasda yang dikelola		12	36							
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan	ton	207, 5	622, 5							DKP3
	Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	roduktifitas Produksi Ikan		5,32	16							
	Sub Kegiatan:											
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana yang diadakan	paket	1	3							
		Jumlah Prasarana yang dipelihara	paket	3	3							
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	paket	-	1							
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian											DKP3
	Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Pupuk Bersubsidi yang Disalurkan	%	95	95							
		Persentase Kelompok Penerima Sarana yang Didampingi	%	100	100							
	Sub Kegiatan:											
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana yang difasilitasi	jenis	5	7							
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		-	4							
	Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan Kabupaten/Kota	Produktifitas Padi	ton	5,18	5,19							
		Produktifitas Karet	ton	1,28	1,28							
		roduktifitas Kakao	ton	1,13	1,13							
	Sub Kegiatan:											
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luas Lahan yang Tingkatkan Kualitasnya	Ha	55	15							

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.											
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosia	%	100	100							DinsosPMDPP A
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	orang	3071	3071							
	Sub Kegiatan :											
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah laporan hasil pemutakhiran data fakir miskin dan PMKS	laporan	2	4							
		Jumlah petugas pengelola pemutakhiran data	orang	1	1							
		Jumlah laporan penyaluran bantuan sembak	laporan	12	12							
		Jumlah laporan penyaluran bantuan KUBE	laporan	12	12							
		Jumlah laporan bantuan sembako	laporan	12	12							
	Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi	%	100	100							BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Kegiatan : Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kot a	Persentase korban bencana alam yang mendapatkan bantuan (%)	%	100	100							
	Sub Kegiatan :											
	Penyediaan Permakanan	Jumlah bantuan paket sembako korban bencana yang disediakan	paket	12	12							
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan alam dan sosial kabupaten/kot a	Persentase anggota tagana yang aktif	%	100	100							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan :											
	Koordinasi , sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah taruna siaga yang terfasilitasi	orang	29	29							
		Jumlah petugas pengelola bantuan penanggulangan bencana	orang	1	1							
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.											
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dibayarkannya jaminan BPJS ketenagakerjaan pegawai honor dan kontrak	bulan	12	0							
		Dibayarkannya jaminan kecelakaan kematian pegawai honor kontrak	bulan	12	0							
		Dibayarkannya jaminan kecelakaan kerja pegawai honor dan kontrak	bulan	12	0							
		Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota Sawahlunto	orang	20000	0							
		Jumlah peserta jaminan kesehatan SUMBAR Sakato	orang	13003	0							
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (dokumen)	dokumen	0	4							
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.											
	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	program	8	10							Diskoperindag
	Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	%	100	100							
	Sub Kegiatan :											
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembuatan Peraturan Perusahaan	orang	-	100							
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	unit	-	10							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.											
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.											
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.											
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.											
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											Dinkes, Pengendalian Penduduk dan KB
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota											
	Sub Kegiatan:											
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV	%	100	0							
		Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	1284							
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.											
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	-							Dinkes, Pengendalian Penduduk dan KB
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota											
	Sub Kegiatan:											
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Case Detection Rate (CDR) TB	%	70	0							
		Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	557							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.											
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.											
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.											
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.											
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.											
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.											
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.											
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.											
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinkes, Pengendalian Penduduk dan KB
	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan :											
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		orang	100	0							
	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)		orang	0	144 5							
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.											
03.04.02	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.											
03.05.01	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.											
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis											
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.											
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.											
03.06.01	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.											
	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	%	30	49							Dinas Perhubungan
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase angka kecelakaan lalu lintas perseribu kendaraan	%	3	3							
	Sub Kegiatan:											
	Uji Coba dan sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalin untuk jaringan jalan propinsi	kegiatan	12	-							

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.											
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.											
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.											
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.											
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA												
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.											
	Program : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota											Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
	Sub Kegiatan :											
	RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDGs)	%		98	0							
	RT yang memilki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	%		85	0							
	Program :PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sarana prasarana airminum dalam kondisi baik (%)	%	91	91							Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih	unit	780	2131							
	Sub Kegiatan :											
	Supervisi Pembangunan/Pen ingkatan/ Perluasan/Perbaik an SPAM	Jumlah bangunan SPAM yang dibangun dan diperbaiki (Unit)	unit	12	17							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang- undangan negara terkait.											
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.											
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.											
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (ORANG)	orang	-	1.300. 000							Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Rombongan Wisata (Rombongan)	rombongan	-	70							
	Sub Kegiatan :											
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jenis Media Promosi	jenis	3	6							
		Jumlah teknologi informasi yang dikelola	jenis	3	6							
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Lomba Fotografi dan videografi yang dilaksanakan (event)	event	4	6							
		Jumlah Peserta Event Fotografi dan videografi	orang	4	550							
		Jumlah event promosi pariwisata yang diikuti (event)	event	6	12							
		Jumlah group peserta SIMFes yang tampil (group)	group	7	7							
		Jumlah Event hari jadi Kota Sawahlunto yang dilaksanakan (event)	event	1	2							
		Jumlah Festival Prof M.Yamin yang diselenggarakan (event)	event	1	1							
		Operasional Tourism nformation Center (Bulan)	bulan	12	12							
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik	dokumen	1	1							
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Persentase MoU aktif yang dihasilkan (%)	%	80	40							
		Jumlah Peserta Famtrip yang difasilitasi (orang)	orang	30	45							
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.											
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (ORANG)	orang	-	1.300. 000							Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Rombongan Wisata (Rombongan)	rombongan	-	70							
	Sub Kegiatan :											
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jenis Media Promosi	jenis	3	6							
		Jumlah teknologi informasi yang dikelola	jenis	3	6							
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Lomba Fotografi dan videografi yang dilaksanakan (event)	event	4	6							
		Jumlah Peserta Event Fotografi dan videografi	orang	4	550							
		Jumlah event promosi pariwisata yang diikuti (event)	event	6	12							
		Jumlah group peserta SIMFes yang tampil (group)	group	7	7							
		Jumlah Event hari jadi Kota Sawahlunto yang dilaksanakan (event)	event	1	2							
		Jumlah Festival Prof M.Yamin yang diselenggarakan (event)	event	1	1							
		Operasional Tourism nformation Center (Bulan)	bulan	12	12							
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik	dokumen	1	1							
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Persentase MoU aktif yang dihasilkan (%)	%	80	40							
		Jumlah Peserta Famtrip yang difasilitasi (orang)	orang	30	45							
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.											
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (ORANG)	orang	-	1.300. 000							Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Rombongan Wisata (Rombongan)	rombongan	-	70							
	Sub Kegiatan :											
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jenis Media Promosi	jenis	3	6							
		Jumlah teknologi informasi yang dikelola	jenis	3	6							
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Lomba Fotografi dan videografi yang dilaksanakan (event)	event	4	6							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (Paket)	paket	0	0							
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik (Peserta Didik)	orang	2185	-							
	Kegiatan :Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		3.15 2	958 5							
	Sub Kegiatan:											
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP (Satuan Pendidikan	satuan	120	360							
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											Dinkes, Pengendalian Penduduk dan KB
	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan :											
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang terlayani	orang	100	0							
		Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	126 3							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	120 5							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar	%	100	0							
		Jumlah bayi baru lahir yang ditangani sesuai standar (jumlah)	orang	0	111 0							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah anak usian 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	orang	95	0							
		Jumlah pelayanan kesehatan balita yang dilayani sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah Balita yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	394 4							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	orang	100	0							
		Jumlah Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	995 7							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	232 65							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	232 65							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	100	0							
		Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	144 5							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	0	498							
		Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (jumlah)	orang	0	0							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	100	0							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Jumlah Pasien gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (jumlah)	orang	0	248							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Case Detection Rate (CDR) TB	%	70	0							
		Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	557	0							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV	kasus	100	0							
		Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (jumlah)	orang	0	128 4							
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dibayarkannya jaminan BPJS ketenagakerjaan pegawai honor dan kontrak	bulan	12	0							
		Dibayarkannya jaminan kecelakaan kematian pegawai honor kontrak	bulan	12	0							
		Dibayarkannya jaminan kecelakaan kerja pegawai honor dan kontrak	bulan	12	0							
		Jumlah peserta jaminan kesehatan Kota Sawahlunto	orang	20000	0							
		Jumlah peserta jaminan kesehatan SUMBAR Sakato	orang	13003	0							
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (dokumen)	dokumen	0	4							
	Program: Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi	%	100	100							DinsosPMDPP A
	Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang terfasilitasi	orang	310	315							
	Sub Kegiatan:											
	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar dan penyandang cacat yang diberi permakanan	orang	0	105							
		Jumlah lansia miskin non produktif yang tersantuni (orang)	orang	160	160							
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah anak terlantar yang diberi transportasi	orang	0	18							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Jumlah penyandang cacat yang diberi alat bantu	orang	10	27							
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan, pengemis masyarakat yang terfasilitasi	keluarga	70	70							
		Jumlah penyandang cacat yang diberi bimbingan sosial	orang	0	4							
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak berkebutuhan khusus yang diberi bantuan transportasi ke sekolah (orang)	orang	74	77							
		Jumlah laporan KPM yang mendapatkan bantuan PKH	laporan	0	12							
		Jumlah Penyandang cacat berat yang diberi kebutuhan dasar	orang	0	20							
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah bantuan uang tunai untuk lansia (orang)	orang	127	209							
	Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang tertangani	orang	225	673							
	Sub Kegiatan:											
	Penyediaan Permakanan	jumlah lansia miskin non produktif yang tersantun	orang	0	160							
		jumlah laporan keluarga fakir miskin yang mendapatkan KUBE	laporan	0	12							
		jumlah laporan kpm yang mendapatkan BNPT	laporan	0	12							
		Jumlah penyandang disabilitas yang diberi bantuan permakanan (orang)	orang	25	25							
	pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah bantuan uang tunai untuk lansia (orang)	orang	127	209							
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan	%	100	100							DinsosPMDPP A
	Kegiatan: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan pemenuhan hak anak		12	12							
	Sub Kegiatan:											
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas keluarga	kegiatan	12	12							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hakm Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	lembaga	2	2							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina 1	lembaga	95	100							DinsosPMDPP A
	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan desa	lembaga	4	4							
	Sub Kegiatan:											
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kegiatan TTG yang terfasilitasi dan ter Petakan	kegiatan	2	4							
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah yang direhabilitasi	%	85	90							DPUPR
	Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban	unit	9	25							
	Sub Kegiatan:											
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban bencana yang direhab	unit	9	0							
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan permukiman	%	80	85							DPUPR
	Kegiatan: Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Yang di Tata	kawasan	16	49							
	Sub Kegiatan:											
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana pencegahan dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	dokumen	16	49							
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kualitas Permukiman Kumuh Yang ditingkatkan	%	87	90							
	Sub Kegiatan:											
	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	unit	72	250							
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah RTLH dan PSU yang diperbaiki		-	-							
		Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dlm perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	dokumen	26	-							
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh Yang ditangani		72,9 3	19, 1							DKP2LH
	Kegiatan: Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH Yang diperbaiki di Luar Kawasan Kumuh	unit	6	-							
	Sub Kegiatan:											
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH Yang diperbaiki di Luar Kawasan Kumuh	unit	6	-							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Jumlah Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang diperbaiki	unit	12								
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang tertata	%	80	85							DKP2LH
	Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan Yang Tertata	unit	19	68							
	Sub Kegiatan:											
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jumlah prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang tertata	unit	19	-							
		Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	unit	-	68							
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sarana prasarana air minum dalam kondisi baik (%)	%	91	91							DPUPR
	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih	unit	780	2.131							
	sub kegiatan:											
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana PDAM yang terehabilitasi	unit	-	1							
		Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	unit	-	3							
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang terehabilitasi (lokasi)	lokasi	7	23							
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase luas permukiman yang tertata	%	78,34	79,34							DPUPR
	Kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	unit	73	537							
	Sub Kegiatan:											
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana perkotaan dan permukiman yang terbangun dan terpelihara	unit	73	537							
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase air limbah yang ditangani	%	90	88							DPUPR

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi (Unit)	unit	216	648							
	Sub Kegiatan:		unit									
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah bangunan limbah terpusat yang dibangun (Unit)	unit	70	89							
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	10 0	10 0							Kecamatan Lembah Segar
	Kegiatan: Pemberdayaan Kelurahan											
	Sub Kegiatan:											
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan											Kecamatan Barangin
	Kegiatan: Pemberdayaan Kelurahan											
	Sub Kegiatan:											
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja											Diskoperindag
	Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi											
	Sub Kegiatan:											
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60%	%	30	60							Diskoperindag
	Kegiatan: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	%	74	74							
		Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya	unit	5	5							
	Sub Kegiatan:											
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi	unit	120	240							
	Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah UMKM yang bersertifikat	unit	105	210							
	Sub Kegiatan:											
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah UMKM yng bersertifikasi kewirausahaan	unit	105	210							
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya	%	1.8	2							Diskoperindag
	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil	%	50	50							
	Sub Kegiatan:											
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil	%	50	50							

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dekranasda yang dikelola		12	36							
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan		622, 5	207, 5							DKP3
	Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	roduktifitas Produksi Ikan		5,32	16							
	Sub Kegiatan:											
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana yang diadakan		1	3							
		Jumlah Prasarana yang dipelihara		3	3							
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	1							
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian											DKP3
	Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Pupuk Bersubsidi yang Disalurkan	%	95	95							
		Persentase Kelompok Penerima Sarana yang Didampingi	%	100	100							
	Sub Kegiatan:											
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana yang difasilitasi	unit	5	7							
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		-	4							
	Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan Kabupaten/Kota	Produktifitas Padi	ton	5,18	5,19							
		Produktifitas Karet	ton	1,28	1,28							
		roduktifitas Kakao	ton	1,13	1,13							
	Sub Kegiatan:											
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luas Lahan yang Tingkatkan Kualitasnya	Ha	55	15							
		Luas Lahan yang Direvitalisasi	Ha	15	-							
		Jumlah Luas Tanaman Perkebunan Yang dipelihara	Ha	30	10							
				1	1							
	Kegiatan: Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 daerah kab/kota lain											
	Sub Kegiatan:											
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumberdaya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			-	-							
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase santri rumah/pondok tahfizd yang hafidz minimal 1 jus dalam setahun (persen)	%	30	30							Setdako (Kesra)
		ersentase imam masjid yang berkualitas (persen)	%	15	15							

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
10.07.01	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.											
10.07.02	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migrasi yang baik.											
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.											
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.											
10.07.03	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.											
10.07.04	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.											
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/ berkembang dengan tarif nol persen.											
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).											
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.											
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN												
11.01.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan permukiman	%	80	85							DPUPR
	Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kualitas Permukiman Kumuh Yang ditingkatkan	%	87	90							
	Sub Kegiatan:											
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	unit	72	250							
	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Jumlah RTLH dan PSU yang diperbaiki	unit	-	26							

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	operasional persampahan yang difasilitasi	bulan	12	-							
		jumlah sampah yang dipilah,dikumpulkan, diangkut,diolah,diproses akhir di TPA/TPST/SPA kab/Kota	sampah	-	6950							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	jumlah sarana dan prasarana sampah yang diadakan	unit	7	-							
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat,provinsi maupun pihak lain di luas kab/kota untuk pengelolaan sampah kab/kota . Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada Jakstrada	dokumen	-	1							
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sampah yang dilaksanakan		-	-							
		Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan Akhir		-	18							
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola											
		Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah	%	76	77							Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											
		Persentase Sampah berkurang dengan timbulan sampah	%	21	22							
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	%	97	99							
	Sub Kegiatan:											
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	operasional persampahan yang difasilitasi	bulan	12	-							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	jumlah kampung iklim yang terbentuk	lokasi	2	-							
		jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor LH yang dilaksanakan	dokumen	-	1							
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)											
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	%	75	75							Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan LH	kegiatan	75	75							
	Sub Kegiatan:											
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	jumlah kampung iklim yang terbentuk	lokasi	2	-							
		jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor LH yang dilaksanakan	dokumen	-	1							
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)											
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	%	75	75							Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan LH	kegiatan	75	75							
	Sub Kegiatan:											
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	jumlah kampung iklim yang terbentuk	lokasi	2	-							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera KM 2 Pulau Punjung

Website : bappeda.dharmasrayakab.go.id email : bappeda.dharmasrayakab.go.id

Pulau Punjung, 9 Januari 2023 M

16 Jumadil Akhir 1444 H

Nomor : 050/ 03 /Bappeda – 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Matrik Program Kegiatan
untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(RAD TPB) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022-2026

Kepada
Yth. Bpk. **Kepala Bappeda**
Provinsi Sumatera Barat
di-
Padang

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 005/601/X/P2EPD/Bappeda-2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Pengisian Matrik Program Kegiatan untuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026, maka bersama ini kami sampaikan matrik dimaksud sebagaimana Terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diaturkan terima kasih


Kepala,
*** H. PARYANTO, S.Sos, MT**
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP : 19690609 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Bapak Sekretaris Daerah di Pulau Punjung
3. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung.

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/ KOTA : DHARMASRAYA

KODE REK	TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim.											
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	Persen	-	70,00	80,00	82,00	82,00	206.906.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tervelivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya	80 persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	100 persen	206.906.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	Persen	-	70,00	80,00	82,00	82,00	206.906.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tervelivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya	80 persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	100 persen	206.906.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	Persen	-	70,00	80,00	82,00	82,00	206.906.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tervelivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya	80 persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	100 persen	206.906.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	Persen	-	70,00	80,00	82,00	82,00	206.906.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tervelivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya	80 persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	100 persen	206.906.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	Persen	-	70,00	80,00	82,00	82,00	206.906.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tervelivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya	80 persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	100 persen	206.906.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	persen	-	-	-	-	-	221.335.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama	3 PP/PKB	3 PP/PKB	3 PP/PKB	3 PP/PKB	3 PP/PKB	3 PP/PKB	97.564.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Transnaker
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang terselesaikan	15 kasus	15 kasus	20 kasus	30 kasus	40 kasus	50 kasus	123.771.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Transnaker
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	2.754.748.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.179.748.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	2.754.748.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.179.748.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS	4.8 persen	4.8 persen	5.30 persen	5.40 persen	5.50 persen	5.60 persen	29.709.542.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase kepesertaan KB	persen	-	70,00	80,00	85,00	90,00	11.960.585.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program <i>Bangsa Kencana</i>	85 persen	85 persen	85 persen	90 persen	100 persen	85 persen	4.913.250.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
1.4.1.(d)	<i>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</i>									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani jaringan <i>pipa air minum</i>	Persen	59,00	59,86	65,00	70,00	70,00	7.406.690.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan dan Non Perpipaan	1669	1669	1368	1422	1868	1518	7.406.690.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas PUPR
1.4.1.(e)	<i>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</i>									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan <i>air limbah domestik</i>	Persen	87,25	90,00	92,00	95,00	95,00	13.105.210.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	615	615	850	950	751	751	13.105.210.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas PUPR
1.4.1.(f)	<i>Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.</i>									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni	Persen	85,00	85,85	88,65	91,45	91,45	19.008.912.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								139.280.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								501.098.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								18.368.534.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.4.1.(g)	<i>Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.</i>									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas <i>baik</i>	Persen	-	83,33	85,33	90,33	93,33	274.250.896.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	132.777.746.800,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pendidikan
1.4.1.(h)	<i>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat.</i>									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas <i>baik</i>	Persen	-	83,33	85,33	90,33	93,33	274.250.896.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	106.833.473.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pendidikan
1.4.1.(i)	<i>Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat.</i>									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.4.1.(j)	<i>Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.</i>									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP-el	persen	-	100,00	100,00	-	100,00	457.985.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk								59.575.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Dukcapil
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk									APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Dukcapil
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								398.410.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Dukcapil
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Dukcapil
1.4.1.(k)	<i>Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.</i>									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase/ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	33.462.896.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	6503 Orang	6503 Orang	5000 Orang	6500 Orang	6500 Orang	6500 Orang	262.375.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BPBD
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap <i>bencana</i>	6503 Orang	6503 Orang	5000 Orang	6500 Orang	65000 Oran	6500 Orang	31.923.020.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BPBD
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi <i>korban bencana</i>	4530 Orang	4530 Orang	500 Orang	650 Orang	550 Orang	550 Orang	1.029.333.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BPBD
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar <i>penanggulangan bencana</i>	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	248.167.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BPBD
1.5.1.(a)	<i>Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.</i>									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase daerah pasca bencana yang <i>dipulihkan</i>	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	811.513.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	811.513.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana <i>Kab/Kota</i>	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
1.5.1.(b)	<i>Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.</i>									APBD kab	Kab. Dharmasraya	

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
1.5.1(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.5.1(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase/ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	33.462.896.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6503 Orang	6503 Orang	5000 Orang	6500 Orang	65000 Oran	6500 Orang	31.923.020.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BPBD
1.5.1(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase/ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	33.462.896.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	6503 Orang	6503 Orang	5000 Orang	6500 Orang	6500 Orang	6500 Orang	262.375.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BPBD
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6503 Orang	6503 Orang	5000 Orang	6500 Orang	65000 Oran	6500 Orang	31.923.020.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BPBD
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4530 Orang	4530 Orang	500 Orang	650 Orang	550 Orang	550 Orang	1.029.333.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BPBD
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	248.167.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BPBD
1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Nagari rawan Pangan yang tertangani	nagari	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1.080.485.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Rawan Pangan yang tertangani	0 KK	0 KK	200 KK	200 KK	200 KK	200 KK	1.080.485.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.1.1(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang beredar dimasyarakat	70	-	-	75,00	80,00	85,00	175.131.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	5 Kecamatan	5 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	175.131.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.1.2(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang beredar dimasyarakat	70	-	-	75,00	80,00	85,00	175.131.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	5 Kecamatan	5 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	175.131.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Nagari rawan Pangan yang tertangani	nagari	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1.080.485.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pangan dan I
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Rawan Pangan yang tertangani	0 KK	0 KK	200 KK	200 KK	200 KK	200 KK	1.080.485.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pangan dan I
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang beredar dimasyarakat	70	-	-	75,00	80,00	85,00	175.131.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	5 Kecamatan	5 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	175.131.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pangan dan I
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
2.2.2(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan kapasitas kelompok penyedia pangan utama dan lainnya	kelompok	-	-	20,00	40,00	60,00		APBD kab	Kab. Dharmasraya	

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan Sarana Penyediaan Pangan (Paket/Klp)	0 Paket/Klp	0 Paket/Klp	7 Paket/Klp	7 Paket/Klp	7 Paket/Klp	7 Paket/Klp		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pangan dan I
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Akses Pangan masyarakat	0	-	70,00	75,00	80,00	80,00	1.097.902.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kenaikan Harga Pangan Pokok	<10 Persen	<10 Persen	<10 Persen	<10 Persen	<10 Persen	<10 Persen	296.353.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pangan dan I
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	0 Persen	0 Persen	17 Persen	27 Persen	37 Persen	47 Persen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pangan dan I
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya	91 Skor	91 Skor	92 Skor	93 Skor	94 Skor	95 Skor	801.549.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pangan dan I
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Nagari rawan Pangan yang tertangani	nagari	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1.080.485.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pangan dan I
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Rawan Pangan yang tertangani	0 KK	0 KK	200 KK	200 KK	200 KK	200 KK	1.080.485.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pangan dan I
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang beredar dimasyarakat	70	-	-	75,00	80,00	85,00	175.131.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	5 Kecamatan	5 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	175.131.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pangan dan I
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani memiliki alat pertanian	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	10.452.258.250,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang mendapat bantuan Sarana pendukung pertanian	10 kelompo	10 kelompo	10 kelompo	10 kelompo	10 kelompo	30 kelompo	176.865.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pertanian
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	produktifitas sawit	4,6 Ton/Ha	4,6 Ton/Ha	4,7 Ton/Ha	4,8 Ton/Ha	4,9 Ton/Ha	5 Ton/Ha	3.456.882.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pertanian
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT)	0 Persen	0 Persen	30 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	942.760.750,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pertanian
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00		APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00		APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani memiliki alat pertanian	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	10.452.258.250,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang mendapat bantuan Sarana pendukung pertanian	10 kelompo	10 kelompo	10 kelompo	10 kelompo	10 kelompo	30 kelompo	176.865.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pertanian
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	produktifitas sawit	4,6 Ton/Ha	4,6 Ton/Ha	4,7 Ton/Ha	4,8 Ton/Ha	4,9 Ton/Ha	5 Ton/Ha	3.456.882.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pertanian
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT)	0 Persen	0 Persen	30 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	942.760.750,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pertanian
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase sawah teraliri irigasi	persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	18.880.195.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	- Dok	- Dok	0 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	294.435.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pertanian
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	23 Unit	23 Unit	23 Unit	26 Unit	26 Unit	24 Unit	18.585.760.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pertanian
2.a.1	Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.a.2	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.b.1	Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.b.2	Subsidi ekspor pertanian.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.c.1	Indikator anomali harga pangan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.3.2	Kejadian TB per 1000 orang									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.4.1	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur < 18 tahun.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang meruqikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.5.1(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.5.1(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	2.754.748.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	1.575.000.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	2.754.748.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	1.575.000.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur > 15 tahun dalam satu tahun terakhir.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	persen	50,00	60,00	70,00	72,00	70,00	2.683.723.300,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Pkt	0 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	19 Pkt	19 Pkt	19 Pkt	17 Pkt	16 Pkt	16 Pkt	1.164.258.300,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Meningkatnya Pengelolaan Terminal Tipe C	0 Pkt	0 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Th	1 Th	1 Th	1 Th	1 Th	1 Th	895.355.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	2 Keg	2 Keg		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan ANDALALIN Kabupaten/Kota	0 Keg	0 Keg	3 Keg	2 Keg	2 Keg	1 Keg		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Perhubungan

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	624.110.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum Orang atau Barang	1 Th	1 Th	1 Th	1 Th	1 Th	1 Th		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Documen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Trayek	0 Dok	0 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Perhubungan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	-	-	-	-	927.000.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	terbitnya jukla/juknis kegiatan	70 persen	70 persen	75 persen	80 persen	85 persen	90 persen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								927.000.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase kepesertaan KB	persen	-	70,00	80,00	85,00	90,00	11.960.585.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangsa Kencana	85 persen	85 persen	85 persen	90 persen	100 persen	85 persen	4.913.250.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase kemampuan petugas penyuluh KB dalam menjalankan program Bangsa Kencana	95 persen	95 persen	95 persen	95 persen	0 persen	95 persen	660.000.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhi kebutuhan Alokon di semua Faskes	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	4.249.835.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemahaman organisasi kemasyarakatan terhadap program Bangsa Kencana	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	90 persen	0 persen	2.137.500.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
3.7.1.(a)	Anaka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	-	-	-	-	927.000.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	terbitnya jukla/juknis kegiatan	70 persen	70 persen	75 persen	80 persen	85 persen	90 persen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKIP) cara modern).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	-	-	-	-	927.000.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	terbitnya jukla/juknis kegiatan	70 persen	70 persen	75 persen	80 persen	85 persen	90 persen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	-	-	-	-	927.000.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	terbitnya jukla/juknis kegiatan	70 persen	70 persen	75 persen	80 persen	85 persen	90 persen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		0	0	-	-	-	-	927.000.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	terbitnya jukla/juknis kegiatan	70 persen	70 persen	75 persen	80 persen	85 persen	90 persen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk pend									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS	4.8 persen	4.8 persen	5.30 persen	5.40 persen	5.50 persen	5.60 persen	29.709.542.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antenatal care (pemeriksaan lengkap) / K4	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	65.065.260.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.9.1	Angka kematian akibat tangga dan polusi udara ambien.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.a. 1*	Persentase merokok pada penduduk umur > 15 tahun.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.b. 1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS	4.8 persen	4.8 persen	5.30 persen	5.40 persen	5.50 persen	5.60 persen	29.709.542.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah RS Terakreditasi	unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	95.301.127.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS	4.8 persen	4.8 persen	5.30 persen	5.40 persen	5.50 persen	5.60 persen	29.709.542.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.b.2	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.c. 1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	persen	70,00	70,00	80,00	90,00	100,00	7.649.990.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	716.925.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan tenaga di fasyankes sesuai dengan standar	60 persen	60 persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	642.095.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti diklat fungsional	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	15 persen	15 persen	6.290.970.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Kesehatan
3.d.1	Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	Persen	-	83,33	85,33	90,33	93,33	274.250.896.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	124.465.649.778
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	132.777.746.800,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	106.833.473.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	29.505.676.200,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	Persen	-	83,33	85,33	90,33	93,33	274.250.896.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	124.465.649.778
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	132.777.746.800,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	Persen	-	83,33	85,33	90,33	93,33	274.250.896.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	124.465.649.778
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	106.833.473.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.1.1.(d)	Anaka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	Persen	-	83,33	85,33	90,33	93,33	274.250.896.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	124.465.649.778
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	132.777.746.800,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.1.1.(e)	Anaka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	Persen	-	83,33	85,33	90,33	93,33	274.250.896.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	124.465.649.778
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	106.833.473.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.1.1.(f)	Anaka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >15 tahun.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.2.1	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	Persen	-	83,33	85,33	90,33	93,33	274.250.896.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	124.465.649.778
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	29.505.676.200,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	Persen	-	83,33	85,33	90,33	93,33	274.250.896.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	124.465.649.778

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	29.505.676.200,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	persen	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00		APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perda/Perbup tentang SPBE	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	977.698.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Komunikasi
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur > 15 tahun.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15 -59 tahun.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.a. 1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.b. 1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.c. 1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dengan kondisi ruang kelas baik	Persen	-	83,33	85,33	90,33	93,33	274.250.896.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	124.465.649.778
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	132.777.746.800,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	106.833.473.220,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD dengan kondisi ruang kelas baik	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	29.505.676.200,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	125.950.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	1.077.205.721
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen	125.950.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	Persen	-	95,00	96,00	97,00	97,00	409.250.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	2.726.925.387
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20 persen	20 persen	30 persen	55 persen	70 persen	85 persen		APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	3.651.455.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada layanan pemberdayaan perempuan	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	225.605.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								3.425.850.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	3.651.455.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada layanan pemberdayaan perempuan	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	225.605.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								3.425.850.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.2.1(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	3.651.455.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada layanan pemberdayaan perempuan	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	225.605.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								3.425.850.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	3.651.455.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada layanan pemberdayaan perempuan	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	225.605.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								3.425.850.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	3.651.455.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								3.425.850.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.3.1(b)	Anaka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase perlindungan Anak	persen	-	-	75,00	80,00	85,00	2.265.004.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								738.810.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.153.214.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								372.980.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase kepesertaan KB	persen	-	70,00	80,00	85,00	90,00	11.960.585.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangsa Kencana	85 persen	85 persen	85 persen	90 persen	100 persen	85 persen	4.913.250.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinsosp3appkb
5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.a.1	(1)Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.1.1(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.1.1(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.1.1(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	59,00	59,86	65,00	70,00	70,00	7.406.690.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan dan Non Perpipaan	1669	1669	1368	1422	1868	1518	7.406.690.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas PUPR
6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	87,25	90,00	92,00	95,00	95,00	13.105.210.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	615	615	850	950	751	751	13.105.210.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas PUPR
6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	87,25	90,00	92,00	95,00	95,00	13.105.210.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	615	615	850	950	751	751	13.105.210.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas PUPR
6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	59,86	-	62,00	65,00	65,00	38.911.752.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								18.022.347.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								20.889.405.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidroloal dan klimatolal yang dilakukan updating dan revitalisasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	59,86	-	62,00	65,00	65,00	38.911.752.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								18.022.347.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								20.889.405.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumber daya air yang operasional.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosiinya.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6. a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6. b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
7.2.1*	Bauran energi terbarukan									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
7.3.1*	Intensitas energi primer.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
7.a.1	Termobilisasikan dana per tahun (US \$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$100 Miliar.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
7.b.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang mengalami peningkatan produktivitas usaha	Koperasi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	0		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Koperasi, Us
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		0	0	-	-	-	-		APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPPTSP sesuai peruntukannya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	719.930.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	719.930.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Penanaman I
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	persen	-	-	5,00	10,00	15,00		APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Alat Tangkap	0 Orang	0 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pangan dan I
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumbuhan Kelembagaan Nelayan Kecil	0 Kelompok	0 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pangan dan I
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	destinasi	1,00	1,00	3,00	2,00	4,00	339.810.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								339.810.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase sawah terailiri irigasi	persen	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	18.880.195.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	- Dok	- Dok	0 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	294.435.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pertanian
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	23 Unit	23 Unit	23 Unit	26 Unit	26 Unit	24 Unit	18.585.760.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		0 persen						4.299.862.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus penyakit hewan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	535.487.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pertanian
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	paket	32,43	35,00	19,00	16,00	13,00	138.694.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0	0	0	0	0	0	138.694.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Koperasi, Us
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM	IKM	6,50	8,00	175,00	216,00	257,00	2.921.350.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	0	2.921.350.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Koperasi, Us
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pengangguran yang Kompeten dan Sudah Bekerja	Persen	-	62,50	75,00	75,00	78,00	203.336.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	9 Paket Pel	9 Paket Pel	12 Paket Pel	16 Paket Pel	18 Paket Pel	20 Paket Pel	203.336.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Transnaker
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pengangguran yang Kompeten dan Sudah Bekerja	Persen	-	62,50	75,00	75,00	78,00	203.336.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	9 Paket Pel	9 Paket Pel	12 Paket Pel	16 Paket Pel	18 Paket Pel	20 Paket Pel	203.336.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Transnaker
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.4.1	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)	persen	41,36	42,56	43,19	44,36	45,12	595.931.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia	400 Lowong	400 Lowong	500 Lowong	550 Lowong	600 Lowong	650 Lowong	233.370.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Transnaker
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar di Sisnaker	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	362.561.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Transnaker
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon PMI/PMI yang dilindungi	20 Orang	20 Orang	30 Orang	40 Orang	50 Orang	60 Orang		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Transnaker
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
8.8.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	persen	-	-	-	-	-	221.335.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama	3 PP/PKB	3 PP/PKB	3 PP/PKB	3 PP/PKB	3 PP/PKB	3 PP/PKB	97.564.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Transnaker
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang terselesaikan	15 kasus	15 kasus	20 kasus	30 kasus	40 kasus	50 kasus	123.771.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Transnaker
8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	destinasi	1,00	1,00	3,00	2,00	4,00	339.810.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								339.810.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	destinasi	1,00	1,00	3,00	2,00	4,00	339.810.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								339.810.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.10.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	51,25	53,00	57,00	60,00	60,00	291.003.583.155,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan Mantap	40	40	45	45	50	55	291.003.583.155,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas PUPR
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	-	55,00	60,00	65,00	65,00	37.570.240.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1.050.440.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkannya RPPLH Kabupaten	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	143.316.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	inovasi	41,25	42,00	45,00	47,00	47,00	755.870.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	30 persen	30 persen	35 persen	40 persen	45 persen	50 persen	429.482.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Bappeda
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan	81 inovasi	81 inovasi	60 inovasi	60 inovasi	70 inovasi	80 inovasi	326.388.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Bappeda
9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
10.1.1*	Koefisien Gini.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.			2						APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri			6						APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama	nagari	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	172.066.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa								172.066.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	persen	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00	3.619.170.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								3.619.170.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Pemberdaya
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.5.1	Financial Soundness Indicator.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni	Persen	85,00	85,85	88,65	91,45	91,45	19.008.912.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								139.280.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								501.098.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								18.368.534.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten/kota).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase/ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	33.462.896.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	6503 Orang	6503 Orang	5000 Orang	6500 Orang	6500 Orang	6500 Orang	262.375.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BPBD
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6503 Orang	6503 Orang	5000 Orang	6500 Orang	65000 Oran	6500 Orang	31.923.020.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BPBD
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4530 Orang	4530 Orang	500 Orang	650 Orang	550 Orang	550 Orang	1.029.333.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BPBD
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	248.167.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BPBD
11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0			-	-	-	-	167.250.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								167.250.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	persen	78,31	80,00	82,00	84,00	86,00	2.989.960.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengurangan sampah	10 persen	10 persen	12 persen	14 persen	16 persen	18 persen	2.989.960.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan t
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terfasilitasi	5 usaha an/	5 usaha an/	5 usaha an/	5 usaha an/	5 usaha an/	5 usaha an/atau kegiatan		APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan t
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumber daya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.2.1	Jejak material (material footprint).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.2.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.4.1	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.4.2	Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	usaha/kegia	29,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	79.965.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	2 usaha ke	2 usaha ke	5 usaha ke	20 usaha ke	20 usaha ke	20 usaha ke	79.965.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan t
12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.7.1	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.8.1	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
12.c.1	Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
13.a.1	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perer									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.1.1	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.6.1	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara -negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peninjauan akses pendanaan usaha nelayan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	

KODE REK	TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpolah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.3.1.(b)	Jumlah arang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	dokumen	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3.564.438.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								3.284.538.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								279.900.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	dokumen	-	0,20	0,20	0,20	0,20	3.451.062.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								725.800.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi								2.725.262.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
										APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan anggaran tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	579.790.683.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	9.597.000.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BKD
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase penyerapan anggaran	90 persen	90 persen	92 persen	93 persen	95 persen	96 persen	2.175.015.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BKD
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	LKPD tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.329.220.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BKD
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase realisasi bantuan keuangan	95 persen	95 persen	95 persen	95 persen	95 persen	95 persen	564.711.970.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BKD
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								977.478.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.471.645.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	75 persen	75 persen	77 persen	79 persen	81 persen	83 persen	2.471.645.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BKD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	persen	19,35	20,00	22,00	23,00	23,00	3.398.633.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase realisasi PAD	1,5 persen	1,5 persen	1,8 persen	2 persen	2,5 persen	2,75 persen	3.398.633.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	BKD

KODE REK	TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				2022	2023	2024	2025	2026				
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian sasaran RPJMD	persen	-	90,00	73,00	90,00	90,00	2.940.511.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan RKPD sesuai tatacara dan tahapan yang berlaku	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.673.793.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Bappedda
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan yang berkualitas	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	162.868.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Bappedda
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	37 OPD	103.849.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Bappedda
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.783.369.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	415.577.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Bappedda
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	95 persen	95 persen	90 persen	90 persen	95 persen	95 persen	385.850.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Bappedda
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.981.942.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Bappedda
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap	indeks	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	35.066.995.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	3,00 sedang	3,00 sedang	3,30 sedang	3,35 sedang	3,40 sedang	3,41 sedang	3.217.180.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Sekretariat Daerah
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam	indeks	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.917.838.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik	301 pkt/keg	301 pkt/keg	515 pkt/keg	611 pkt/keg	713 pkt/keg	718 pkt/keg	2.001.488.000,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Sekretariat Daerah
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap	indeks	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	35.066.995.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	3,00 sedang	3,00 sedang	3,30 sedang	3,35 sedang	3,40 sedang	3,41 sedang	3.217.180.500,00	APBD kab	Kab. Dharmasraya	Sekretariat Daerah
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau adjudikasi non litigasi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/ atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.6.2	Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	

TUJUAN TPB/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/ PROG/ KEG/ SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.10.1	Rata-rata tarif terbebott dunia Free Trade Agreement (FTA).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbebott di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.18.1	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRuSa).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.18.2.(a)	Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).									APBD kab	Kab. Dharmasraya	
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.									APBD kab	Kab. Dharmasraya	

KOTA: BUKITTINGGI

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.											BPBD Dinas Sosial
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											BPBD
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana											BPBD Bapelitbang/ EkoSDA
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								Bapelitbang
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.											Bapelitbang/ PPM
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	5								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	2								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pemerintahan (RPJPJ, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pemerintahan	Dokumen	14					70.533.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pembangunan Manusia (RPJPJ, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pembangunan Manusia yang Dikordinir Penyusunannya	Dokumen	8					44.805.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pembangunan Manusia (RPJPJ, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bid.Pembangunan Manusia	SKPD	10					32.350.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pembangunan Manusia (RPJPJ, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dg RKPD/RPJMD pada Bid. Pembangunan Manusia	Laporan	7					74.854.000	APBD	Bukittinggi	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.											Bapelitbang/ PPM
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	5								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	2								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pemerintahan (RPJPJ, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pemerintahan	Dokumen	14					70.533.000	APBD	Bukittinggi	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.											Disdikbud
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Terakreditasi A	%	79,15	84,25	89,55	94,75	100				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Dasar Terakreditasi A	%	75	80	85	90	95				
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan proses belajar mengajar	Sekolah	24	33	42	51	60	248.490.600	APBD	Bukittinggi	
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Terakreditasi A	%	79,15	84,25	89,55	94,75	100				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Terakreditasi A	%	55	60	65	70	75				
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang melaksanakan proses belajar mengajar	Sekolah	6	7	8	9	10	143.465.000	APBD	Bukittinggi	
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.											Disdikbud
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Terakreditasi A	%	79,15	84,25	89,55	94,75	100				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Sekolah PAUD Terakreditasi A	%	10	15	20	25	30				
	Sub Kegiatan : Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru yang dibangun	Satuan Pendidikan	0	0	6	0	6	5.400.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana & Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana & utilitas yang dibangun	Satuan Pendidikan	2 lembaga	0	2 paket	2 paket	2 paket	2.850.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah sarpras & utilitas (ruang kelas) TKN 1 Bukittinggi yg direhab	Satuan Pendidikan	0	0	0	1 paket	0	100.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru	Satuan Pendidikan	0	0	2	2	2	2.700.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana & Utilitas PAUD	Jumlah kendaraan roda 2 TKN 1 Bukittinggi yg dipelihara	Unit	0	0	1	1	1	11.820.000	APBD	Bukittinggi	
		Jumlah kendaraan roda 4 TKN 1 Bukittinggi & TKN Pembina yg dipelihara	Unit	0	0	2	2	2	61.200.000	APBD	Bukittinggi	
		Jumlah APE yg dipelihara	Paket	0	0	0	0	1	5.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah alat rumah tangga yg dibeli	Paket	0	0	0	2	0	600.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD	Paket	0	0	2	0	0	600.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah biaya personil peserta didik PAUD utk lembaga PAUD Negeri	Orang	0	0	315	320	350	268.742.210	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yg dibeli	Lembaga	0	0	116	116	116	1.533.152.280	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah sekolah yg melaksanakan proses belajar mengajar	Satuan Pendidikan	60	60	60	60	60	21.481.030.623	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOS PAUD	Jumlah satuan PAUD yg menerima BOP	Satuan Pendidikan	117	117	117	117	117	11.511.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga yg ikut peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD bagi lembaga PAUD	Satuan Pendidikan	116	116	116	116	116	167.890.250	APBD	Bukittinggi	
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.											DKK
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.											Disdikbud
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Terakreditasi A	%	79,15	84,25	89,55	94,75	100				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Sekolah PAUD Terakreditasi A	%	10	15	20	25	30				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah biaya personil peserta didik PAUD utk lembaga PAUD Negeri	Orang	0	0	315	320	350	268.742.210	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yg dibeli	Lembaga	0	0	116	116	116	1.533.152.280	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah sekolah yg melaksanakan proses belajar mengajar	Satuan Pendidikan	60	60	60	60	60	21.481.030.623	APBD	Bukittinggi	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOS PAUD	Jumlah satuan PAUD yg menerima BOP	Satuan Pendidikan	117	117	117	117	117	11.511.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga yg ikut peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD bagi lembaga PAUD	Satuan Pendidikan	116	116	116	116	116	167.890.250	APBD	Bukittinggi	
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.											Disdikbud
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Terakreditasi A	%	79,15	84,25	89,55	94,75	100				
	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sekolah Kesetaraan Terakreditasi A	%	50	60	70	80	90				
	Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan utk SPNF SKB	Orang	300	300	300	300	300	476.197.800	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yg mengikuti workshop kurikulum 13 & kurikulum di masa Pandemi Covid 19	Lembaga	5	5	5	5	5	125.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah lembaga kesiapan satuan pendidikan dlm proses belajar mengajar di satuan pendidikan nonformal	Lembaga	5	5	5	5	5	138.500.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah yg dilaksanakan pembinaan kelembagaan & manajemennya	Lembaga	4	4	4	4	4	4.365.155.472	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yg menerima BOP kesetaraan	Lembaga	4	4	4	4	4	6.053.112.500	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP pendidikan kesetaraan bagi SPNF SKB dan PKBM	Kegiatan	1	1	1	1	1	100.734.150	APBD	Bukittinggi	
4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).											Bapelitbang
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program Antar Dokumen Perencanaan	Persentase	100	100	100	100	100				
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Analisis Tematik yang Dilaksanakan	Dokumen	5								
		Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Tk. Provinsi/Pusat yg Ditindaklanjuti	Rekomendasi	2								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pembangunan Manusia yang Dikordinir Penyusunannya	Dokumen	8					44.805.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bid.Pembangunan Manusia	SKPD	10					32.350.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dg RKPD/RPJMD pada Bid. Pembangunan Manusia	Laporan	7					74.854.000	APBD	Bukittinggi	
04.04.01	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											Diskominfo
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											Diskominfo
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.											Disdikbud
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Terakreditasi A	%	79,15	84,25	89,55	94,75	100				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Dasar Terakreditasi A	%	75	80	85	90	95				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan: Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yg dibeli	Paket	15	20	25	30	35	4.464.960.000	APBD	Bukittinggi	
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Sekolah Terakreditasi A	%	79,15	84,25	89,55	94,75	100				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama Terakreditasi A	%	55	60	65	70	75				
	Sub Kegiatan: Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yg dibeli	Paket	7	9	11	13	15	2.676.976.000	APBD	Bukittinggi	
04.06.01	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.											Disdikbud
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	%	79,15	84,25	89,55	94,75	100				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Sekolah Kesetaraan Akreditasi A	%	50%	60%	70%	80%	90%				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	jumlah Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan untuk SPNF SKB	Orang	300	300	300	300	300	476.197.800	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang mengikuti Workshop Kurikulum 13 dan Kurikulum di masa Pandemi Covid 19	Lembaga	5	5	5	5	5	125.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga kesiapan satuan Pendidikan dalam Proses belajar mengajar di satuan Pendidikan Non Formal	Lembaga	5	5	5	5	5	138.500.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemennya	Lembaga	4	4	4	4	4	4.365.155.472	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menerima BOP Kestaraan	Lembaga	4	4	4	4	4	6.053.112.500	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP	jumlah pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan bagi SPNF SKB dan PKBM	Kegiatan	1	1	1	1	1	100.734.150	APBD	Bukittinggi	
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.											Disdikbud
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A		79,15%	84,25%	89,55%	94,75%	100%				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A		75%	80%	85%	90%	95%				
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah	Sekolah	10	15	18	22	25	82.404.574.552	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas yang disediakan untuk sekolah	Sekolah	3	4	5	6	7	15.346.067.520	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang disediakan untuk sekolah	Sekolah	5	7	9	11	13	3.581.699.904	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah Mebel Sekolah yang dibeli	Paket	25	28	35	40	45	15.828.088.365	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Sekolah	jumlah Perlengkapan Sekolah yang dibeli	Paket	15	20	25	30	35	4.464.960.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sekolah	7	9	11	13	15	5.493.540.000	APBD	Bukittinggi	
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A		79,15%	84,25%	89,55%	94,75%	100%				Disdikbud
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Mengah Akreditasi A		55%	60%	65%	70%	75%				
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah	Paket	5	6	8	10	12	114.875.000.000	APBD	Bukittinggi	

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A		79,15%	84,25%	89,55%	94,75%	100%				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A		75%	80%	85%	90%	95%				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dana BOS yang Dikelola	Bulan	12	12	12	12	12	44.797.500.000	APBD	Bukittinggi	
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A		79,15%	84,25%	89,55%	94,75%	100%				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Menengah Akreditasi A		55%	60%	65%	70%	75%				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS yang Dikelola	Bulan	12	12	12	12	12	28.352.500.000	APBD	Bukittinggi	
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A		79,15%	84,25%	89,55%	94,75%	100%				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Sekolah PAUD Akreditasi A		10%	15%	20%	25%	30%				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dana BOP yang Dikelola	Bulan	12	12	12	12	12	11.625.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Program : Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A		79,15%	84,25%	89,55%	94,75%	100%				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Sekolah Kesetaraan Akreditasi A		50%	60%	70%	80%	90%				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	Dana BOP yang Dikelola	Bulan	12	12	12	12	12	3.679.000.000	APBD	Bukittinggi	
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.											Disdikbud
	Program : Pengembangan Kurikulum	persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	80,00%				
	Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan		1 Kurikulum	1 Kurikulum	1 Kurikulum	1 Kurikulum	1 Kurikulum				
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun	Naskah	9	9	9	9	9	655.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jumlah Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Naskah	9	9	9	9	9	655.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sekolah	80	80	80	80	80	860.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jumlah pelatihan kemampuan guru dalam Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Sekolah	80	80	80	80	80	1.362.147.000	APBD	Bukittinggi	
	Program : Pengembangan Kurikulum	persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	80,00%				
	Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan		1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum				
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang disusun	Lembaga	107	107	107	107	107	117.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Lembaga	107	107	107	107	107	118.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Lembaga	107	107	107	107	107	335.780.500	APBD	Bukittinggi	
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.			0	0	0	0	0	-	0		Disdikbud

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
8.1.1.(a)	PDB per kapita.											Bapelitbang/ EKO SDA DPMPTSP TK DKUKMP
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											Bapelitbang
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA											
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yg mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. Perekonomian	SKPD	4					48.760.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. SDA	SKPD	3					30.023.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.											Bapelitbang/ EKO SDA DPMPTSP TK DKUKMP
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA											
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yg mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. Perekonomian	SKPD	4					48.760.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. SDA	SKPD	3					30.023.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin											Bapelitbang/ EKO SDA DPMPTSP TK DKUKMP
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA											
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yg mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. Perekonomian	SKPD	4					48.760.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. SDA	SKPD	3					30.023.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan											Dinas KUKMP
08.04.01	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.											Bapelitbang/ EKO
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA											
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yg mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. Perekonomian	SKPD	4					48.760.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. SDA	SKPD	3					30.023.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											Bapelitbang/ EKO
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA											
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yg mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. Perekonomian	SKPD	4					48.760.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. SDA	SKPD	3					30.023.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
08.04.02	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).											Bapelitbang/ EkoSDA DKUKMP Setda/ Bag PBJ DPMTSPTK
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA											
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yg mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. Perekonomian	SKPD	4					48.760.000	APBD	Bukittinggi	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. SDA	SKPD	3					30.023.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.											Bapelitbang/ EKO DPMTSPTK
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA											
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yg mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. Perekonomian	SKPD	4					48.760.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. SDA	SKPD	3					30.023.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.											Bapelitbang/ EKO DPMTSPTK
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA											
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yg mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. Perekonomian	SKPD	4					48.760.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. SDA	SKPD	3					30.023.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.											Bapelitbang/ EKO DPMTSPTK
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA											
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yg mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. Perekonomian	SKPD	4					48.760.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. SDA	SKPD	3					30.023.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporanhasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).											DPMPTSP TK DKUKMP
08.07.01	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).											Dinas PMPTSP
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur											Dinas PMPTSP
08.08.01	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.											Dinas PMPTSP
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.											Dinas PMPTSP
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.											Dinas PMPTSP
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.											Bapelitbang/ EkoSDA Disparpora
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA											
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yg mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. Perekonomian	SKPD	4					48.760.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. SDA	SKPD	3					30.023.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporanhasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.											Disparpora
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.											Disparpora
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.											Disparpora
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											Bapelitbang/ EkoSDA
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA											
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yg mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. Perekonomian	SKPD	4					48.760.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. SDA	SKPD	3					30.023.000	APBD	Bukittinggi	

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.											Dinas PUPR
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.											
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.											
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	0	0	0	0	0	0	0	0			Dishub
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.											
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.											
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.											
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.											Bapelitbang/ EkoSDA DPMPTSPK
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10						APBD	Bukittinggi	
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.											Bapelitbang/ EkoSDA DPMPTSPK
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10						APBD	Bukittinggi	
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.											Bapelitbang/ EkoSDA DPMPTSPK
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporanhasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.											Bapelitbang/ EkoSDA DPMTSPTK
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporanhasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.											Bapelitbang/ EkoSDA DPMTSPTK
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporanhasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.											Bapelitbang/ EkoSDA
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporanhasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.											Bapelitbang/ EkoSDA
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporanhasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.											Bapelitbang/ EkoSDA
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporanhasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.											Bapelitbang/ Litbang
	Program: Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan strategis berdasarkan hasil riset	Persentase	80								
		Indeks inovasi daerah										
	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil riset internal dan eksternal yang diinventarisasi	Riset									
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yg terkelola dg baik	Dokumen	1					46.680.000	APBD	Bukittinggi	
	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian yg dilakukan sendiri Bapelitbang										
		Jumlah penelitian bekerjasama dg perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya	Dokumen	1								
	Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen						147.500.000	APBD	Bukittinggi	
	Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yg dimanfaatkan	Persentase	100								
	Sub Kegiatan: Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bid. Teknologi & Inovasi	Laporan	1					199.901.000	APBD	Bukittinggi	
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa,dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinoai per satu juta penduduk .											BKPSDM

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).											BKPSDM
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.											Bapelitbang/ EkoSDA
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10						APBD	Bukittinggi	
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporanhasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.											Bapelitbang/ EkoSDA
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10						APBD	Bukittinggi	
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporanhasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi.											Bapelitbang/ EkoSDA
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10						APBD	Bukittinggi	
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporanhasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .											Bapelitbang/ EkoSDA
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10						APBD	Bukittinggi	

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/ berkembang dengan tarif nol persen.											
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).											
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.											
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN												
11.01.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.											Dinas Perkim
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											Dinas Perkim
11.02.01	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	Tingkat pelayanan angkutan umum yang nyaman menurut jenis kelamin, kelompok usia dan penyandang disabilitas	%	25	30	35	40	45	750.000.000	APBN	Bukittinggi	Dishub
	Program: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan											
	Kegiatan: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orangdan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota											
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Tingkat pelayanan angkutan umum yang nyaman	%	25	30	35	40	45	750.000.000	APBN	Bukittinggi	Dishub
	Program: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan											
	Kegiatan: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orangdan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota											
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan	%	25	30	35	40	45	750.000.000	APBN	Bukittinggi	Dishub
	Program: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan											
	Kegiatan: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orangdan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota											
11.03.01	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk											Dinas PUPR
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk											Dinas PUPR
11.03.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis											Bapelitbang/ EkoSDA DPUPR
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								Bapelitbang
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10								

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
11.06.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota											Dinas LH
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya											Dinas LH
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola											Dinas LH
11.06.02	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)											Dinas LH
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10											Dinas LH
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara											Dinas LH
11.07.01	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.											Dinas LH
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua											Dinas LH
11.07.02	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)											Dinas LH
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											Kesbangpol
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.											Bapelitbang/ EkoSDA DPUPR
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								Bapelitbang
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS											Bapelitbang/ EkoSDA Dinas PUPR
	Program: Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yg sesuai dengan rencana tata ruang										DPUPR
	Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang yg sesuai dengan rencana tata ruang										
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah rencana tata ruang yg dilegalkan	rekomendasi, dokumen, ranperda	1 rekomendasi	1 dok & 1 ranperda	1 dok & 1 ranperda	1 dok & 1 ranperda	1 dok & 1 ranperda	1.250.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								Bapelitbang
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk.Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											Bapelitbang/ EkoSDA Dinas PUPR/ BPBD
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								Bapelitbang
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk. Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana											Bapelitbang/ EkoSDA Dinas PUPR/ BPBD
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persentase	100								
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	10								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk. Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	7								
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Perekonomian	Laporan	8					58.915.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bid. SDA yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	0					34.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. SDA	Laporan	6					46.840.000	APBD	Bukittinggi	
11.c.1	-											
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal											Bapelitbang/ EkoSDA Dinas PUPR
	Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											Bapelitbang
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah analisis tematik yg dilaksanakan	Dokumen	4								
		Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan tk. Provinsi/Pusat yg ditindaklanjuti	Rekomendasi	6								
	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yg mendapatkan asistensi dim penyusunan Renstra/Renja Bid. Infrastruktur	SKPD	4					52.899.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bid. Infrastruktur	Laporan	8					144.613.000	APBD	Bukittinggi	

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
12.c.1*	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.											
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA												
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang											BPBD Dinas Sosial
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											BPBD
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana											BPBD
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications											Dinas LH
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun											Dinas LH
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)											Dinas LH
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)											Dinas LH
13.03.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.											Disdikbud
	Program : Pengembangan Kurikulum	persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	80,00%				
	Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan		1 Kurikulum	1 Kurikulum	1 Kurikulum	1 Kurikulum	1 Kurikulum				
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun	Naskah	9 naskah	9 naskah	9 naskah	9 naskah	9 naskah	655.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jumlah Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Naskah	9 naskah	9 naskah	9 naskah	9 naskah	9 naskah	655.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sekolah	80 sekolah	80 sekolah	80 sekolah	80 sekolah	80 sekolah	860.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jumlah pelatihan kemampuan guru dalam Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Sekolah	80 sekolah	80 sekolah	80 sekolah	80 sekolah	80 sekolah	1.362.147.000	APBD	Bukittinggi	
	Program : Pengembangan Kurikulum	persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	80,00%				
	Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan		1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum	1 kurikulum				
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang disusun	Lembaga	107 Lembaga	107 Lembaga	107 Lembaga	107 Lembaga	107 Lembaga	117.000.000	APBD	Bukittinggi	

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
13.a.1	Jumlah dana yang disediakan dan mobilisasinya dalam USD per tahun terkait dengan keberlanjutan mobilisasi dana untuk mencapai komitmen 100 milyar USD sampai tahun 2025											
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (<i>budget tagging</i>) untuk pendanaan perubahan iklim											Dinas LH
13.b.1	Jumlah negara- negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan <i>nationally determined contributions</i> , strategi jangka panjang, rencana nasional adaptasi, dan strategi yang dilaporkan dalam adaptation communications dan national communications											
TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN												
14.01.01	(a) Indeks eutrofikasi pesisir dan (b) kepadatan sampah plastik terapung											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut											
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan											
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan											
14.03.01	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai											
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman											
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut											
14.06.01	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha											
14.07.01	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)											
14.a.1	Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan											
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil											
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan											
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi											
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)											
TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI												
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan											Bapelitbang/ EkoSDA DPUPR Dinas LH
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											Bapelitbang
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA											
	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dlm penyusunan Renstra/Renja Bid. SDA	SKPD	3					30.023.000	APBD	Bukittinggi	

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan											Dinas LH
15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap											Dinas LH
15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											Dinas LH
TUJUAN 16. MENGOATKAN MASYARAKAT ANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN												
16.01.01	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.											Kesbangpol
	Program :.....											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :.....											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya dan juga pada Indikator Kinerja SDGs lainnya)											
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.											Kesbangpol
16.01.02	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.											Kesbangpol
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.											Kesbangpol
16.01.03	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.											Kesbangpol
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.											Kesbangpol
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.											Kesbangpol Pol PP
16.02.01	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir											DP3APPKB
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.											DP3APPKB
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya											DP3APPKB
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.											DP3APPKB
16.02.03	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											DP3APPKB
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											DP3APPKB
16.03.01	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.											Kesbangpol
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.											Kesbangpol
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi											Kesbangpol
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.											Kesbangpol
16.03.02	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.											Kesbangpol
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.											Kesbangpol
16.03.03	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.											Kesbangpol
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)											Kesbangpol

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
16.04.01	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).											Kesbangpol
16.04.02	Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.											Kesbangpol
16.05.01	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.											Kesbangpol
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).											Inspektorat
16.05.02	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.											Kesbangpol
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.											Badan Keuangan
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.											Badan Keuangan
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B											Setda/ Bag Org Inspektorat
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B											Setda/ Bag Org Inspektorat
16.06.02	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.											Setda/ Bag Org DPMPSTPTK Disdukcapil Dinas Kesehatan Kecamatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	93	94	95	96	97	430.000.000	APBD	Bukittinggi	Kec. ABTB
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.											Setda/ Bag Organisasi/ DPMPSTPTK Disdukcapil Dinas Kesehatan Kecamatan
		Jumlah Instansi	Kantor	1	1	1	1	1	70.000.000.000	APBD	Bukittinggi	Kec. ABTB
16.07.01	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.											DP3APPB
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).											DP3APPB
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).											DP3APPB
16.07.02	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.											DP3APPB
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi											Kesbangpol
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan											Kesbangpol
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan											
16.08.01	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara- negara berkembang di Organisasi Internasional.											
16.8.1.(a.)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.											Disdukcapil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.											Disdukcapil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran penduduk 0-17 tahun	%	100	100	100	100	100	1 825 370 876	APBD	Bukittinggi	Disdukcapil

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)											Dinas Kominfo
17.07.01	Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.											Dinas Kominfo
17.8.1*	Persentase pengguna internet											Dinas Kominfo
17.09.01	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara- Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang											
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST											
17.9.1.(b)	Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular											
17.10.01	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).											
17.10.1(a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati											
17.11.01	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.											
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas											
17.12.01	Rata-rata tarif terbobot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.											
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.											
17.14.01	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.											
17.15.01	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.											
17.16.01	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektivitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.											
17.17.01	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).											
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.											
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).											
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.											
17.18.01	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs											Bapelitbang/ P2EPD
	Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah											
	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1						APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2					398.914.400	APBD	Bukittinggi	
	Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan data perencanaan pembangunan	Persentase	82					21.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yg dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Orang	28					95.537.600	APBD	Bukittinggi	
	Kegiatan: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persen	82								
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Laporan	7					65.649.600	APBD	Bukittinggi	
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											Bapelitbang/ P2EPD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah											
	Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan data perencanaan pembangunan	Persentase	82					21.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yg dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Orang	28					95.537.600	APBD	Bukittinggi	
	Kegiatan: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase target kinerja RPJMD yg terpenuhi	Persen	82								
	Sub Kegiatan: Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Laporan	7					65.649.600	APBD	Bukittinggi	
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											Dinas Kominfo
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.											
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.											
17.19.01	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.											
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.											Bapelitbang/ P2EPD
	Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah											
	Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan data perencanaan pembangunan	Persentase	82					21.000.000	APBD	Bukittinggi	
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yg dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Orang	28					95.537.600	APBD	Bukittinggi	
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.											Diskominfo
17.19.02	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan											Dinas Perkim
	b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.											Disdukcapil
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.											Dinas Perkim
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Persentase penerbitan register akte kelahiran dan register akte kematian	%	100	100	100	100	100	Catt: alokasi anggaran utk kode rek.ini juga terliputi sebagaimana alokasi untuk kode rek.16.9.1 (b)	APBD	Bukittinggi	Disdukcapil

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
1.06.04.2.01	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial										
1.06.04.2.01.01	Penyediaan permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standat gizi minimal kewenangan kabupaten	Orang	25	25	25	25	150.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.04.2.01.03	Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten	Orang	10	10	10	10	60.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.04.2.01.04	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	10	10	50.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.04.2.01.05	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah peserta bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten	Orang	20	20	20	20		APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.04.2.01.10	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten	Orang	5	5	5	5	100.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.04.2.01.13	Pemberian layanan rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten	Orang	5	5	5	5	100.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.04.2.02	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza diluar panti social										
1.06.04.2.02.02	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten	Orang	5	5	5	5	65.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.04.2.02.05	Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten	Orang	10	10	10	10	100.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.06.04.2.02.13	Pemberian layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten	Orang	10	10	10	10	100.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
1.06.05.2.01	Pemeliharaan anak-anak terlantar										
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten	Orang	32	32	32	32	125.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.06.2.02.02	Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten	Orang	32	32	32	32	125.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.06.2.02.03	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau kewenangan kabupaten	Orang	32	32	32	32	125.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.05.2.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota										
1.06.05.2.02.01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten	Orang	60,128	60,128	60,128	60,128	500.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten	Keluarga	21.475	21.475	21.475	21.475	150.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan social kesejahteraan keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten	Keluarga	21.475	21.475	21.475	21.475	300.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten	Orang	60,128	60,128	60,128	60,128	300.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.										
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											
2.14.04.201.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan	Kelompok	12 Kelompok	11 Kelompok	10 Kelompok	9 Kelompok	180.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.14.04.201.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah unit sarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Unit	12 Unit	11 Unit	10 Unit	9 Unit	#####	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.04.201.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan	Laporan	24 Laporan	23 Laporan	22 Laporan	21 Laporan	220.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.04.201.04	Orientasi/pelatihan teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader Pelaksan kelompok ketahanan dan yang dilatih	Orang	36 Orang	26 Orang	16 Orang	6 Orang	450.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.04.201.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mendapat	Orang	12 Orang	11 Orang	10 Orang	9 Orang	350.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.04.201.06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Jumlah Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga yang	Kelompok	14 Kelompok	13 Kelompok	12 Kelompok	11 Kelompok	#####	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.04.201.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	Laporan	10 Laporan	9 Laporan	8 Laporan	7 Laporan	#####	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.04.201.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#####	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
1.01.02 PROGRAM PENGELOLA PENDIDIKAN											
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1.01.02.2.01.0 1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terbangunnya USB Sekolah Dasar Di Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengantisipasi meningkatnya jumlah peserta Didik 5 tahun yang akan	unit	1	1	1	1	7.200.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0 2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terbangunnya Ruang Kelas Baru seiring meningkatnya jumlah peserta didik dalam kurun waktu 5 tahun kedepan	ruang	10	10	10	10	12.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0 3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunnya Ruang Guru seiring meningkatnya jumlah Tenaga kependidikan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan	unit	15	15	15	15	22.125.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0 4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terbangunnya Ruang UKS di Seluruh Sekolah SD yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai	unit	10	10	10	10	7.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0 5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya Ruang Perpustakaan di Seluruh Sekolah SD yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum memiliki ruang tersebut	unit	11	11	11	11	15.675.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terbangunnya USB Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengantisipasi meningkatnya jumlah peserta Didik 5 tahun yang akan datang	Unit	2	1	1	1	21.000.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terbangunnya Ruang Kelas Baru seiring meningkatnya jumlah peserta didik dalam kurun waktu 5 tahun kedepan	Unit	9	9	9	9	11.250.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunnya Ruang Guru seiring meningkatnya jumlah Tenaga kependidikan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan	Unit	4	4	4	4	12.000.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya Ruang Perpustakaan di Seluruh Sekolah SMP yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang	Unit	2	2	2	2	6.000.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Terbangunnya Ruang Laboratorium di Seluruh Sekolah SMP yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum memiliki ruang tersebut	Unit	4	4	4	4	9.600.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Terbangunnya Ruang Serba Guna/Aula di Sekolah SMP yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum memiliki ruang tersebut	Unit	4	4	4	4	15.000.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.08	Pembangunan Asrama Sekolah	Terbangunnya Rumah Asrama Sekolah SMP yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Unit	2	2	2	2	7.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terbangunnya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SMP yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Unit	3	3	3	3	7.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sekolah SMP yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Unit	3	3	3	3	3.000.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Tersedianya meubeler sekolah di kabupaten Kepulauan Mentawai	Unit	1	1	1	1	3.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terpeliharanya ruang Kelas sekolah dan menambah usia pakai bangunan tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Unit	9	9	9	9	7.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru	Terpeliharanya ruang Guru sekolah dan menambah usia pakai bangunan tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Unit	1	1	1	1	2.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terpeliharanya ruang Perpustakaan sekolah dan menambah usia pakai bangunan tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Unit	2	2	2	2	2.400.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terpeliharanya ruang Laboratorium sekolah dan menambah usia pakai bangunan tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Unit	2	2	2	2	2.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/ Aula	Terpeliharanya ruang Ruang Serba Guna/ Aula sekolah dan menambah usia pakai bangunan tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Unit	2	2	2	2	2.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Terpeliharanya ruang Asrama sekolah dan menambah usia pakai bangunan tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Unit						DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terpeliharanya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah dan menambah usia pakai bangunan tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Unit	2	2	2	2	2.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya meubeler sekolah di kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekolah	10	10	10	10	2.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	siswa	5755	5755	5755	5755	40.000.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP untuk evaluasi dan Tindak Lanjut Pendidikan Menengah Pertama	Sekolah	34	34	34	34	1.600.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Guru Kontrak SD dan Insentif Tenaga Pendidikan Dasar	Guru	200	200	200	200	27.000.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah Terlaksananya Sertifikasi Guru	Guru	100	100	100	100	2.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terkelolanya Aneka Tunjangan Guru, Pengawas, Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar	Guru	34	34	34	34	1.250.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya biaya Operasional Sekolah jenjang SD	Sekolah	34	34	34	34	1.250.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOK ASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini										
1.01.02.2.03.0 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terbangunnya Gedung/Ruang Kelas/ ruang Guru Di Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengantisipasi meningkatnya jumlah peserta Didik 5 tahun yang akan datang	unit	3	3	3	3	5.000.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terbangunnya Sarana dan prasarana Belajar Paud	unit	3	3	3	3	3.750.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0 9	Pengadaan Perlengkapan	Terpenuhinya Perlengkapan APE PAUD	PAUD	10	10	10	10	1.375.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.1 1	Pengadaan Biaya Personil Peserta Didik Paud	Tersaluranya Bantuan Untuk Kesejahteraan Peserta Didik paud	siswa	300	300	300	300	5.000.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.1 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Paud	Jumlah Lembaga Paud yang Di evaluasi	PAUD	20	20	20	20	750.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.1 5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah PTK yang Menerima Insentif	Guru	25	20	20	30	1.250.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.1 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah PTK yang Mengikuti Pelatihan	Guru	150	150	150	150	1.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD	PAUD	50	50	50	50	875.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM											
1.01.03.2.01.0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										
1.01.03.2.01.0 1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunya Kompetensi muatan Lokal Budaya Mentawai untuk Jenjang PAUD dan pendidikan Non Formal	Paket	1	1	1	1	750.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.0 2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersusunya SILABUS Muatan Lokal Budaya Mentawai untuk jenjang PAUD	Paket	1	1	1	1	1.000.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.0 3	Penyediaan Buku Teks muatan Lokal Budaya PAUD dan Pendidikan Non Formal	Tersusunya Buku Teks Muatan Lokal Budaya Mentawai untuk jenjang PAUD	Paket	1	1	1	1	1.000.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.01.04.2.01	pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penilaian Kenaikan Pangkat Guru, Pengawas dan Kepala sekolah	Guru	1110	1110	1110	1110	750.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	1	0	150.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi dan edukasi bencana secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	100	100	100	100	1.400.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen RPB yang dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1	150.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	100	100	100	100	2.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	12	12	2.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	50	50	50	50	1.200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	300.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2	2	2	2	2.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kab/ Kota	Jumlah Masyarakat, aparaturnya yang mengikuti pelatihan JituPasna	Orang	50	50	50	50	1.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	100	100	100	100	1.600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	2	2	2	2	800.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	2	2	2	2	600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	KK	50	50	50	50	600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
1.1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	1	1	1	600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	3	3	3	3	2.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.03.03	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	500	500	500	500	1.800.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	500	500	500	500	1.600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	3	3	3	3	400.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1	1	1	1	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										
1.1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	2	2	2	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	2	2	2	2	400.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	2	2	2	2	400.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1	1	1	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kab/ Kota melalui Jitupasna melalui R3P	Orang	50	50	50	50	1.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha										
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen	1	2	3	4	#####	APBD	Kabupaten Kepulauan mentawai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha										
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	392	784	1.176	1.568	#####	APBD/APBN /DAK	Kabupaten Kepulauan mentawai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.04.03.2.03.03	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	1	2	3	4	#####	APBD	Kabupaten Kepulauan mentawai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang terverifikasi.	Dokumen	1	2	3	4	850.000.000,00	APBD	Kabupaten Kepulauan mentawai	Dinas Perumahan dan Kawasan
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan										
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	10	10	10	10	#####	APBD/APBN /DAK	Kabupaten Kepulauan mentawai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen	1	2	3	4	250.000.000,00	APBD	Kabupaten Kepulauan mentawai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah										
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Rupiah	#####	-	-	-	89.637.000	DAU	Kabupaten Kepulauan mentawai	Satpol PP dan Damkar
1 05 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Rupiah	#####	-	-	-	85.000.000	DAU	Kabupaten Kepulauan mentawai	Satpol PP dan Damkar
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS										
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rupiah	#####	-	-	-	75.000.000	DAU	Tuapejat	Satpol PP dan Damkar

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN											
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan										
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	Rupiah	#####				55.000.000	DAU	Tuapejat	Satpol PP dan Damkar
1.05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rupiah	#####	-	-	-	55.000.000	DAU	Tuapejat	Satpol PP dan Damkar
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat PenanggulanganKebakaran dan Non Kebakaran	Rupiah	#####	-	-	-	55.000.000	DAU	Tuapejat	Satpol PP dan Damkar
1 05 04 2.01 04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rupiah	#####	-	-	-	40.000.000	DAU	Tuapejat	Satpol PP dan Damkar
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran										
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Rupiah	#####	-	-	-	66.499.000	DAU	Tuapejat	Satpol PP dan Damkar
1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran										
1 05 04 2.03 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Rupiah	#####	-	-	-	178.079.492	DAU	Tuapejat	Satpol PP dan Damkar

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat										
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Rupiah	#####	-	-	-	75.000.000	DAU	Tuapejat	Satpol PP dan Damkar
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Rupiah	#####	-	-	-	75.000.000	DAU	Tuapejat	Satpol PP dan Damkar
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah										
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kerjasama Dengan BPN dalam Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah	Sertifikat	25	25	25	25	350.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekretariat Daerah
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota										
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan kabupaten	Orang	100	100	100	100	125.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.06.2.01.03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten	unit	1	1	1	1	125.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.06.2.01.04	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten	Orang	100	100	100	100	125.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
1.06.06.2.01.05	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten	Orang	100	100	100	100	125.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.										
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030										
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap ke siap siagaan bencana Kab/Kota										
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten	Kampung	1	1	1	1	1	125,00	APBD	10 Kecamatan
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna siaga bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, dan sosialisasi pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten	Orang	20	20	20	20	20	125,00	APBD	10 Kecamatan
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELLAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN											
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.										
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota										
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	5	5	5	450.000.000,00	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).										
*2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi										
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	10	10	10	10	#####	DAK dan APBD	10 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	1	1	1	120.000.000,00	APBD	4 Kecamatan (Kec. Sipora Utara, Kec.	Dinas Ketahanan Pangan dan
2 09 03 1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota										
2 09 03 1.02 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	1	1	1	400.000.000,00	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.										
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian										
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	1	1	#####	APBD	10 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain										
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	80	80	80	80	#####	APBD	10 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 02 2.06 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	2	2	2	2	130.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian										

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
3 27 03 2.01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	0	0	0	0	400.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 03 2.01 04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen	1	1	0	0	500.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian										
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit	2	2	2	2	#####	DAK dan APBD	10 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan
3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	1	1	1	700.000.000,00	DAK dan APBD	10 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	2	2	2	700.000.000,00	DAK dan APBD	10 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	2	2	2	#####	DAK dan APBD	5 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota										
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	4	4	4	0	#####	APBD	10 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 05 2.01 04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	4	4	4	0	#####	APBD	10 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	5	5	5	5	#####	APBD	5 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	15	15	15	15	#####	APBD	10 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.										
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).										
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1.02.02.2.01	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.08)	Jumlah gedung / Instalasi yang dilakukan pemeliharaan	unit	5	5	5	5	6.000.000.000	DAK/APBD	Sipora Utara	RSUD
1.02.02.2.01	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.12)	Persentase Kelengkapan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	60	65	70	75	8.000.000.000	DAK/APBD	Sipora Utara	RSUD
1.02.02.2.01	(1.02.02.2.02.13)	Persentase Kelengkapan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	70	75	80	85	10.000.000.000	DAK/APBD	Sipora Utara	RSUD
1.02.02.2.01	(1.02.02.2.02.14)	Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	50	55	60	65	10.000.000.000	DAK/APBD	Sipora Utara	RSUD
1.02.02.2.01	(1.02.02.2.02.16)	Persentase Ketersediaan obat dan vaksin esensial pada rumah sakit	Persen	90	90	90	90	3.600.000.000	APBD	Sipora Utara	RSUD
1.02.02.2.01	(1.02.02.2.02.17)	Persentase Ketersediaan Bahan Habis Pakai pada rumah sakit	Persen	90	90	90	90	4.800.000.000	APBD	Sipora Utara	RSUD
1.02.02.2.01	(1.02.02.2.02.20)	Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara	Persen	50	55	60	65	1.200.000.000	APBD	Sipora Utara	RSUD
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.01)	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	1.493.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.01)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	4.777.600.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.32)	Jumlah RS yang beroperasi	unit	1	1	1	1	4.000.000.000	APBD	Sipora Utara	RSUD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.35)	Jumlah RS yang beroperasi	unit	1			1	800.000.000	APBD	Sipora Utara	RSUD
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.										
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.12)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	597.200.000	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.										
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.11)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	3.135.300.000	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.										
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.25)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	1	1	2.090.200.000	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.										
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.25)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	1	1	2.090.200.000	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.										
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.08)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	597.200.000	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.14.02.202.02	Penyediaan dan pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.14.02.202.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.14.02.202.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	976.888.322,00	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).										

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

2.14.03.201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian										
2.14.03.201.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana	Organisasi	8 Organisasi	7 Organisasi	6 Organisasi	5 Organisasi	150.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.201.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga	Dokumen	43 Dokumen	33 Dokumen	23 Dokumen	13 Dokumen	61.509.375,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.201.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga	Unit	8 Unit	7 Unit	6 Unit	5 Unit	550.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.201.04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	501.319.701,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.201.05	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Jumlah kegiatan Harganas	Kegiatan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	275.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.201.06	Penggunaan Media Massa Cetak, elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya	Jumlah Penggunaan Media Massa Cetak, elektronik dan Media Lainnya	Media	5 Media	4 Media	3 Media	2 Media	275.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.201.07	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	#####	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.201.08	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai penyuluhan KKBPK	umlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Laporan	10 Laporan	9 Laporan	8 Laporan	7 Laporan	#####	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.201.09	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	265.116.013,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.202.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksannya pembinaan IMP	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	440.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.202.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Unit	10 Unit	9 Unit	8 Unit	7 Unit		APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.202.03	Penguatan Pelaksanaan penyuluhan pergerakan pelayanan dan pengembangan	Jumlah laporan Penguatan Pelaksanaan penyuluhan pergerakan pelayanan dan	Dokumen	43 Dokumen	33 Dokumen	23 Dokumen	13 Dokumen	600.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.202.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksanya Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	#####	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.14.03.203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota										
2.14.03.203.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat	Laporan	10 Laporan	9 Laporan	8 Laporan	7 Laporan	95.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.203.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah pegelola logistik alat dan obat kontrasepsi yang berkompeten	Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.203.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Penggunaan MKJP	Orang	20 Orang	15 Orang	10 Orang	5 Orang	#####	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.203.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit sarana penunjang pelayanan KB	Unit	10 Unit	9 Unit	8 Unit	7 Unit	600.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.203.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	Jumlah laporan hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	39.631.427,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.203.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak Hak reproduksi di	Jumlah Laporan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak Hak	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.203.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Jumlah tenaga Pelayanan KB dan Kespro yang kompeten	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	200.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.203.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Laporan	10 Laporan	9 Laporan	8 Laporan	7 Laporan	#####	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.203.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan	Orang	65 Orang	60 Orang	55 Orang	50 Orang	200.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.203.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	80.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.204	Pemberdayaan dan Peningkatn Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat										
2.14.03.204.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi	Organisasi	5 Organisasi	4 Organisasi	3 Organisasi	2 Organisasi	200.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.204.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen ntegrasi Pembangunan Lintas Sektor di	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.204.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan program KKBPK	Kampung	10 Kampung	9 Kampung	8 Kampung	7 Kampung	#####	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
2.14.03.204.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan kampung KB yang dibina	Laporan	21 Laporan	20 Laporan	19 Laporan	18 Laporan	490.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan	Kabupaten Kepulauan	DPMDP2KB
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.										
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1.02.02.2.01	1.02.02.2.01.14	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persen	100	100	100	100	53.748.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.02.02.2.01	1.02.02.2.01.16	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	100	100	100	100	32.856.500.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01	1.02.02.2.01.17	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	100	100	100	100	11.602.500.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.01)	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	1.493.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.02)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	4.777.600.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.03)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	5.240.200.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.02.04)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	3.526.808.028	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.02.05)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	597.200.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.02.06)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	597.200.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.02.07)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	597.200.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.02.08)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	597.200.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.02.09)	Jumlah Penderita Diabetes mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	597.200.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.02.11)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	3.135.300.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.02.12)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	597.200.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.02.13)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	1.567.650.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.02.15)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1.194.400.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.02.21)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	1.567.650.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (1.02.02.2.02.25)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	100	100	100	100	2.090.200.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
3.8.2.[a	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).										
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (1.02.02.2.01.14)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	47.776.000.000	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA											
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.										
2.23 Program Pembinaan Perpustakaan											
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten										
2.23.02.2.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Layanan peprustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Managemen Layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM:Information Technology Service Management)	Layanan	-	-	1	1	300.000.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaa n

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.23.02.2.01.02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai	Perpustakaan	-	-	1	1	375.000.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
2.23.02.2.01.03	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Koleksi Peprustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Exemplar	-	-	-	1	100.000.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
2.23.02.2.01.05	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah peprustakaan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	40	40	40	40	418.631.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
2.23.02.2.01.06	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Peprustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1	1	-	1	146.738.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
2.23.02.2.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Bahan Perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	Eksemplar	-	2.500	-	-	200.000.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Bahan perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaan	Eksemplar	-	2.500	-	-	34.631.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
2.23.02.2.01.10	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	-	80.000.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten										
2.23.02.2.02.01	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	20	20	25	25	960.000.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
2.23.02.2.02.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1	1	1	1	250.000.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
2.23.02.2.02.03	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	2	-	2	-	210.000.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
2.23.02.2.02.04	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Perpustakaan Berbasis Insklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	5	-	5	-	250.000.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.01.02.2.04.09	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya fasilitas kantor dan mengajar pada satuan PKBM	Paket	11	11	11	11	1.250.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya BOP Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan serta terlaksananya ujian kependidikan Kesetaraan	Paket	4	4	4	4	2.000.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.13	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah Lembaga PKBM yang Di evaluasi	lembaga	11	11	11	11	750.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.14	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang Menerima Intesif	Guru	25	25	25	25	1.250.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.15	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang Mengikuti Pelatihan	Guru	80	80	80	80	750.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.16	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PKBM	lembaga	11	11	11	11	750.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	tersedianya BOP Pendidikan Kesetaraan	lembaga	11	11	11	11	2.500.000.000	DAK/DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN											
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.										
2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											
2.08.02.1.01	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintahan kewenangan kabupaten/kota										
2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenanga kabupaten	Dokumen	1	1	1	1	80.000.000	APBD	10 Kecamatan	DSP3A

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten /kotaterhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	150.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.03.1.01.02	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD	36	36	36	36	120.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.03.1.02	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota										
2.08.03.1.02.01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingka kabupaten yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang	5	5	5	5	80.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	1	1	1	1	80.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.03.1.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota										
2.08.03.1.03.02	Peningkatan kapsitas sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	5	5	5	5	80.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.03.1.03.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten	Dokumen	1	1	1	1	80.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.										

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Perangkat daerah	18	18	18	18	200.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabuapten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten	Dokumen	1	1	1	1	200.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.07.2.02	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota										
2.08.07.2.02.01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten	Orang	21	10	10	10	60.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	1	1	1	1	80.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.07.2.02.03	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan khusus kewenangan kabupaten	Dokumen	1	1	1	1	40.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.07.2.02.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten	Dokumen	1	1	1	1	50.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.07.2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota										
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Laporan	1	1	1	1	100.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.08.02.1.03.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	1	1	1	60.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.02.1.03.02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	30	30	30	30	60.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.02.1.03.03	Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1	80.000.000,00	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.										
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota										
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	4	5	6	7	500.000.000	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	3	4	5	208.000.000	APBD	10 Kecamatan	DSP3A
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota										
2.08.06.2.02.01	Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten	Orang	10	10	10	10	75.000.000	APBD	10 Kecamatan	DSP3A

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	6	0	0	0	990.000.000	APBD	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsulatnsi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/P perbaikan SPAM	Dokumen	3	2	3	4	2.000.000.000	APBD	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik	40	40	40	40	8.000.000.000	APBD	Kab. Kep. Mentawai	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	50	50	50	50	2.400.000.000	APBD	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang terlayani Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	1700	1900	2164	2455	18.000.000.000	APBD	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Terpeliharanya SPAM Jaringan Perpipaan	Unit	10	10	10	10	6.000.000.000	APBD	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman										
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam daerah Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	490.000.000	APBD	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki tangki Septik	Rumah Tangga	50	50	50	50	1.600.000.000	APBD	Kab. Kep. Mentawai	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.17.05 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian											
08.04.01	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.										
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	40	80	120	160	1.680.000.000	DAK NON FISIK	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
'2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi										
'2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	20	30	40	50	800.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian
'2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)										
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan										
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	unit Usaha	500	600	700	800	600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	unit Usaha	120	130	140	150	1.200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.										
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.										
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)										
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Tenaga Kerja Makro	Buku	1	0	0	1	500.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											
2.7.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										
2.7.03.2.01.01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	orang	32	32	32	32	2.500.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.7.03.2.01.02	Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan struktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimalisasi kapasitas Instruktur dan Peningkatan sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan	lembaga	1	1	1	1	750.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.7.03.2.01.03	Pengadaan sarana Pelatihan Kerja Kabupaten Kota	Jumlah Pengadaan da Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	jenis	25	25	25	50	856.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.7.03.2.02	Pembinaan Pelatihan Kerja swasta										
2.7.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan kerja swasta yang Dibina	persen	50	55	60	60	760.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.7.03.2.04	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil										
2.7.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	persen	35	40	50	55	450.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.7.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota										
2.7.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya Saing Tenaga Kerja di tingkat Daerah	persen	60	65	68	70	450.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota										
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	persen	5	7	26	20	475.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	persen	5	7	10	15	500.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	persen	5	7	10	15	425.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.07.04.2.01.05	Penyelenggaraan Unit Layanan disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas layanan ULD	persen	5	28	10	15	475.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.07.04.2.01.06	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Dierdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	persen	5	7	10	15	475.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
02.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten										
02.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	persen	5	28	10	15	475.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
02.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	persen	5	7	10	15	525.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.7.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja										
02.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	persen	5	28	10	15	475.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
02.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	persen	5	7	10	15	525.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.7.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja										
2.7.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional aplikasi Informasi pasar kerja Online	jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	persen	5	7	10	15	425.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.7.04.2.03.02	Pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar kerja Online	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	persen	5	7	10	15	475.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.7.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	persen	5	7	10	15	425.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.7.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota										
2.7.04.2.04.01	Peningkatan Perlindungan dan kompetensi calon pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	persen	5	7	10	15	525.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.7.04.2.04.02	Penyediaan layanan Terpadu pada calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI/PMI yang terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	persen	5	7	10	15	425.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.7.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	persen	5	7	10	15	475.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL											
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota										
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	Dokumen	5	5	5	5	220.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Penjajian Kerja bersama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	Dokumen	10	10	10	10	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur skala upah, dan LKKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek	Dokumen	10	10	10	10	250.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah/kabupaten										
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Dokumen	30	28	26	20	150.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Dokumen	30	28	26	20	220.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	Dokumen	30	28	26	20	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/kota	Jumlah LKS tripartit yang dibina	Dokumen	30	28	26	20	250.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasiitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasiitas Kesejahteraan Pekerja	Dokumen	30	28	26	20	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMPTSP
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.										
2.19.03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan										
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Tingkat daerah Kabupaten/Kota										
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event Tingkat kabupaten kota	Terselenggaranya kejuaraan Surfing Internasional di kabupaten	Paket	1	1	1	1	12.000.000.000	APBD /DAK/BKK	Kabupaten Kepulauan mentawai	DISPARPORA
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
3.26.02.	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata										
3.26.02.2.02	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Tingkat daerah Kabupaten/Kota										
2.19.03.2.02.01	Pengadaan /pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata Strategis pariwisata kabupaten/kota	Terbangunnya berbagai sarana dan prasarana pariwisata	Paket	1	1	1	0	30.000.000.000	DAK/APBD	Kabupaten Kepulauan mentawai	DISPARPORA
3.26.02.2.02	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota										
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten /kota	Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Orang	20,0	20	20	20	2.500.000.000	DAK/APBD	Kabupaten Kepulauan mentawai	DISPARPORA
		Meningkatnya jumlah tenaga tatakelola homestay yg terlatih	Orang	50	50	0	50	750.000.000	DAK/APBD	Kabupaten Kepulauan mentawai	DISPARPORA
		Meningkatnya kapasitas tenaga usaha perjalanan wisata yang berdaya saing	Orang	25	25	25	25	500.000.000	DAK/APBD	Kabupaten Kepulauan mentawai	DISPARPORA
		Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kemitraaan pariwisata	kelompok	5	5	5	5	1.000.000.000	DAK/APBD	Kabupaten Kepulauan mentawai	DISPARPORA

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										
5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BAPPEDA
5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BAPPEDA
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BAPPEDA
5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BAPPEDA
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.										
3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan											
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit	4	5	6	7	1.400.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah Fasilitasi pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	unit	4	5	6	7	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang	Adanya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang	dokumen	1				300.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Gedung Terminal	unit		1		1	5.500.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	orang		20			150.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	unit			1	1	6.000.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Kendaraan Bermotor	Terdaptarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	unit		100			100.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.05	sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen	1				150.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	dokumen	1		1	1	400.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	unit		1	1	1	300.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen	1	1			150.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen		1	1	1	450.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten Kota										
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Ditetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	dokumen		1			350.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07.07	Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah lahan yang dibebaskan	ha	1	1	1	1	4.845.599.555	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang Antar Kota dalam satu Daerah Kabupaten / Kota										
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar Kota dalam satu Kabupaten	Adanya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar Kota dalam satu Kabupaten	unit		1			36.000.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.15.02.2.16.0 1	Facilitasi Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dala satu Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksanya analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam satu daerah kabupaten / kota	dokumen	1				400.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.16.0 2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam satu daerah kabupaten / kota	Tersedianya data dan informasi tarif kelas ekonomi dan angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam satu daerah kabupaten / kota	dokumen		1			50.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.16.0 3	Pengendalian Dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam satu daerah kabupaten / kota	Terkendalnya dan terawasinya tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam satu daerah kabupaten / kota	dokumen	1				150.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											
2.15.03.2.07.0 1	Penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam satu daerah kabupaten / kota										
2.15.03.2.07.0 1	Data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal	Tersedianya data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal	dokumen			1	1	150.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.03.2.07.0 2	Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	Terkendalnya dan terawasinya Jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	dokumen	1	1	1	1	47.109.816.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.03.2.09.0 1	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota										
2.15.03.2.09.0 1	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	Terlaksananya analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	dokumen	1				150.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.03.2.09.0 2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	Tersedianya data dan informasi tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	dokumen			1	1	100.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.15.03.2.09.03	Pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten / kota	Terkendalinya dan terawasinya tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten / kota	dokumen			1	1	100.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.03.2.10.01	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah										
2.15.03.2.10.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	Adanya Kebijakan dan Sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	dokumen			1	1	200.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.03.2.10.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)	dokumen			1	1	200.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.03.2.12.01	Pembangunan, Penerbitan ijin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal										
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perijinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpenuhinya Persyaratan Perijinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	dokumen		1			500.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	unit			1	1	30.000.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	unit			1	1	400.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	unit				10	100.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	dokumen		1	1	1	350.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.15.03.2.13.07	Pengawasan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Terpeliharanya Dermaga Sungai dan Danau	dokumen		1	1	1	700.000.000	DAU	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan
2.21.02.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi dokumen Persandian	Dokumen	3	3	3	3	850.000.000	DAU / DAK	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dianalisis	OPD	36	36	36	36	500.000.000	DAU / DAK	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang tersedia layanan keamanan informasi pemerintah daerah yang berbasis elektronik dan non elektronik	OPD	36	36	36	36	1.500.000.000	DAU / DAK	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang tersedia layanan keamanan informasi pemerintah daerah	OPD	36	36	36	36	1.500.000.000	DAU / DAK	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	PROGRAM APLIKASI PEMERINTAH DAERAH	persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik , mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah							DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.02	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah Dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	Dokumen	1	1	1	1	2.500.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan media komunikasi publik	Dokumen	1	1	1	1	2.000.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Dokumen	1	1	1	1	2.400.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan media komunikasi publik	Dokumen	1	1	1	1	1.900.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan media	Layanan	10	10	10	10	2.250.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan komunitas kemitraan	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat , media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Dokumen	1	1	1	1	2.500.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.13	penyediaan / pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	Jumlah sarana dan prasana pendukung informasi dan komunikasi publik	Unit link pemancar radio	2	2	2	2	2.250.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
02.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE OPD YANG TERHUBUNG DENGAN LAYANAN AKSES INTERNET YANG DI SEDIAKAN OLEH DISKOMINFO	Persen	80	88	100	100	16.585.396.352	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
		PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DI SELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Persen	20	25	30	30	2.617.418.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah Domain yang di kelola	OPD	36	36	36	36	750.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah	Jumlah Domain dan sub domain yang di daftarkan	OPD	36	36	36	36	750.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah domain dan sub domain yang di tata dan di awasi	OPD	36	36	36	36	1.000.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan system jaringan intra pemerntah daerah	Jumlah OPD yang menyelenggarakan sistem jaringan intra pemerintah daerah	OPD	36	36	36	36	15.500.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten / kota	Dokumen	2	2	2	2	625.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik	Dokumen	2	2	2	2	625.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat data yang di kelola	Server	1	1	1	1	250.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Dokumen	26	26	26	26	850.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan elektronik	jumlah dokumen hasil kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Dokumen	26	26	26	26	675.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.06	koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sikronisasi data dan informasi elektronik	Dokumen	26	26	26	26	625.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis eletronik yang di kembangkan	OPD	2	2	2	2	4.000.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan sistem perhubungan pemerintah daerah	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	OPD	26	26	26	26	1.250.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten / kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang di implementasikan sesuai dengan master plan smart city	OPD	26	26	26	26	2.500.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah kordinasi dan fasilitasi pembangunan BTS dan akses internet	kali	26	27	28	29	1.500.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan government chief information officer (GCIO)	Jumlah OPD yang dikelola Government Chief Information Officer (GCIO)	OPD	28	28	28	28	750.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral								Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Dokumen	1	1	1	1	750.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Orang	18	18	18	18	1.000.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.03	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	Dokumen	1	1	1	1	1.250.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.04	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	Orang	9	9	9	9	1.000.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.05	Pengembangan infrastruktur	Jumlah infstruktur statistik	unit	1	1	1	1	6.750.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral daerah	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Dokumen	1	1	1	1	750.000.000	DAU	Kab.Kep.Mentawai	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordfinasi Hukum										
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Prtoduk Hukum Daerah Berupa Perda,Perbup dan Keputusan yang difasilitasi	Produk Hukum	400	400	400	#####	300.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekretariat Daerah

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus terselesaikan dan Jumlah Permohonan Masyarakat yang difasilitasi	Kasus	15	15	15	1,5E+07	602.149.900	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk Hukum Daerah yang dapat di Akses Oleh Masyarakat dan Jumlah Produk Hukum yang Diundangkan	Produk Hukum	400	400	400	4E+07	100.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekretariat Daerah
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN											
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.										
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA											
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa										
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Desa	12 Desa	11 Desa	10 Desa	9 Desa	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.02.201.02	Fasilitasi tata wilayah desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	43 Desa	33 Desa	23 Desa	13 Desa	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.02.201.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	43 Desa	33 Desa	23 Desa	13 Desa	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.02.201.04	Fasilitasi penamaan kode desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	43 Desa	33 Desa	23 Desa	13 Desa	870.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.02.201.05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Mandiri	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.02.201.05	Penyediaan prasarana dan sarana transportasi antar wilayah	Jumlah Desa Mandiri	Desa	43 Desa	33 Desa	23 Desa	13 Desa	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.02.201.06	Fasilitasi sarana dan prasarana desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	10 Desa	9 Desa	8 Desa	7 Desa	730.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.02.201.07	Penyediaan dana operasional, Penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Desa	43 Desa	33 Desa	23 Desa	13 Desa	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											
2.13.04.201	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa										
2.13.04.201.01	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Desa Mandiri	Dokumen	43 Dokumen	33 Dokumen	23 Dokumen	13 Dokumen	550.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.04.201.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	43 Dokumen	33 Dokumen	23 Dokumen	13 Dokumen	830.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.13.04.201.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Dokumen	43 Dokumen	33 Dokumen	23 Dokumen	13 Dokumen	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.04.201.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	43 Dokumen	33 Dokumen	23 Dokumen	13 Dokumen	760.927.399,00	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.04.201.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	129 Orang	119 Orang	109 Orang	99 Orang	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.04.201.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah desa	Jumlah laporan Musyawarah desa	Laporan	43 Laporan	33 Laporan	23 Laporan	13 Laporan	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.04.201.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	43 Dokumen	33 Dokumen	23 Dokumen	13 Dokumen	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.04.201.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Dokumen	43 Dokumen	33 Dokumen	23 Dokumen	13 Dokumen	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.04.201.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Laporan	43 Laporan	33 Laporan	23 Laporan	13 Laporan	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.04.201.10	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah laporan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Laporan	43 Laporan	33 Laporan	23 Laporan	13 Laporan	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.04.201.11	Fasilitasi Penyusunan Profil desa dan evaluasi perkembangan desa	Jumlah dokumen profil desa	Dokumen	35 Dokumen	30 Dokumen	25 Dokumen	20 Dokumen	950.000.000,00	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.04.201.12	Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah dokumen Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Dokumen	43 Dokumen	33 Dokumen	23 Dokumen	13 Dokumen	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.04.201.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang	86 Orang	76 Orang	66 Orang	56 Orang	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB
2.13.04.201.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	15 Desa	14 Desa	13 Desa	12 Desa	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB

10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.										
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											
2.13.05.201	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2.13.05.201.01	Identifikasi inventarisasi Masyarakat Hukum adat	Jumlah dokumen hasil inventarisasi Masyarakat Hukum adat	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	#####	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DPMDP2KB

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah										
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Indikator Subkegiatan: Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	696.150.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DLHK
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilihan,Pengumpulan,Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota	Indikator Subkegiatan: Jumlah sampah yang Dipilah,Dikumpulkan, Diangkut,Diolah, Diproses Akhir Di TPA,TPST/SPA/Kabupaten/Kota	Ton	13.969,24	14.247,46	14.637,23	#####	991.472.957	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DLHK
2.11.11.2.01.04	Nama Subkegiatan:Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Indikator Subkegiatan: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para pihak Lainnya yang terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	3	5	5	7	470.587.097	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DLHK
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Indikator Subkegiatan: Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	1.160.250.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DLHK
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota	Indikator Subkegiatan: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolaha n, dan Pemrosesan Akhir	Unit	Betor 6 unit, Truk 2 unit, Container 6 unit	Betor 6 unit, Truk 2 unit, Container 6 unit	Betor 6 unit, Truk 2 unit, Container 6 unit	Betor 6 unit, Truk 2 unit, Container 6 unit	5.315.884.474	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DLHK
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta										
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Indikator Subkegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	laporan	1	1	1	1	464.100.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DLHK
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi										
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											
4.01.03.2.03	Pengadaan Barang dan Jasa										
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang -Barang Jasa Pemerintahan yang dikelola	Paket	400	400	400	400	800.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ysang Masuk dalam Layanan SPSE	Paket	400	400	400	400	800.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekretariat Daerah

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa	Jumlah Aparsatur yang Mengikuti Bimtek dan ujian Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Jumlah Pokja Mengikuti Seleksi untuk jabatan Fungsional Tertentu	Orang	42	42	42	42	250.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekretariat Daerah
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA											
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang										
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	1	0	150.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi dan edukasi bencana secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	100	100	100	100	1.400.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen RPB yang dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1	150.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	100	100	100	100	2.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	12	12	2.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	50	50	50	50	1.200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	300.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2	2	2	2	2.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kab/ Kota	Jumlah Masyarakat, aparatur yang mengikuti pelatihan JituPasna	Orang	50	50	50	50	1.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	100	100	100	100	1.600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	2	2	2	2	800.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	2	2	2	2	600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	KK	50	50	50	50	600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>										
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana										
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	1	0	150.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi dan edukasi bencana secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	100	100	100	100	1.400.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen RPB yang dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1	150.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	100	100	100	100	2.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	12	12	2.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	50	50	50	50	1.200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	300.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2	2	2	2	2.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kab/ Kota	Jumlah Masyarakat, aparaturnya yang mengikuti pelatihan JituPasna	Orang	50	50	50	50	1.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	100	100	100	100	1.600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	2	2	2	2	800.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	2	2	2	2	600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	KK	50	50	50	50	600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
1.1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	1	1	1	600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	3	3	3	3	2.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.03.03	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	500	500	500	500	1.800.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	500	500	500	500	1.600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana umlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	3	3	3	3	400.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1	1	1	1	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										
1.1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	2	2	2	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	2	2	2	2	400.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	2	2	2	2	400.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1	1	1	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kab/ Kota melalui Jitupasna melalui R3P	Orang	50	50	50	50	1.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN											
1.1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										
1.1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	1	1	1	600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD
1.1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	12	12	1.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	BPBD

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	5	5	5	1.180,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil										
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	kelompok	10	12	14	16	7.800,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	kelompok	10	12	14	16	260,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	kelompok	5	5	5	5	360,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, Serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	kelompok	7	7	7	7	1.460,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
3.25.04.2.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	rekomendasi	3	3	3	3	200,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	rekomendasi	3	3	3	3	200,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan										
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	200,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	4	5	6	7	4.800,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	20	5	5	20	6.250,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	dokumen	1	1	1	1	1.100,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	orang	20	25	30	35	550,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	0	100	100	100	1.050,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	orang	15	15	15	15	460,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil										
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	dokumen	1	1	1	1	250,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil										
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	44	44	44	44	4.425,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota										
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	93	103	110	125	325,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	2	1	0	0	15.000,00	DANA ALOKASI UMUM	KAB. KEP. MENTAWAI	DINAS PERIKANAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELLOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGGURUNAN, MEMULIHKAN											
15.01.02	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya										
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	25610	25610	25610	25610	6.578.963.438	DBH	Kabupaten Kepulauan Mentawai	DLHK
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT ANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBNAGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF,											
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.										
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								6.150.000.000	APBD/APBN	Kab.Mentawai	Kesbangpolin mas
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rekomendasi terkait Pemantapan Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial	Rekomendasi	5	5	5	5	6.150.000.000	APBD/APBN	Kab.Mentawai	Kesbangpolin mas
8.01.06.1.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Masyarakat yang diberikan desimenasi pencegahan paham radikalisme dan potensi aksi terorisme	Orang	200	250	250	250	950.000.000	APBD/APBN	Kab.Mentawai	Kesbangpolin mas
8.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Koordinasi tim Forkopimda yang dilaksanakan	kali	6	6	6	6	1.200.000.000	APBD/APBN	Kab.Mentawai	Kesbangpolin mas
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.										
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal										
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	20	24	24	24	550.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	16	16	16	16	550.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	108	108	108	108	550.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	37	37	37	37	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	20	20	20	20	1.000.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	2	2	2	2	600.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	2	2	2	2	450.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	2	2	2	300.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	12	32	32	550.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan										
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	4	4	200.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
6.01.03.2.02.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rekomendasi	2	2	2	2	300.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi								APBD		
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	6	6	6	6	450.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
6.01.03.2.02.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	26	26	26	26	250.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	5	5	5	5	450.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD	5	5	5	5	250.000.000	APBD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Inspektorat
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	281.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	233.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	2	2	2.890.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2	2	2.934.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Dokumen	2	2	2	2	318.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/ kota	Orang	72	72	72	72	503.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Dokumen	4	4	4	4	228.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Dokumen	3	3	3	3	552.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	3	3	3	3	536.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	12	12	12	708.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	9	9	9	9	739.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	2	2	2	682.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	2	2	2	283.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	2	2	2	2	531.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	72	72	72	72	1.011.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah										
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	4	4	182.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	36	36	36	36	460.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	10	10	10	10	945.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	30	30	30	30	606.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	2	2	283.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
2.24.02.2.01.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten	Jumlah naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	Berkas	10	11	12	13	900.000.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
2.24.02.2.03.02	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	54	54	54	54	650.000.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
2.24.03	Program perlindungan dan Penyelamatan Arsip										
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun										
2.24.03.2.01.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	Arsip	1	2	2	2	775.000.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
2.24.03.2.01.02	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	Berkas	1	2	2	2	775.000.000,00	DAU	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Kearsipan dan Peprustakaan
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.										
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas Pendaftaran Penduduk	jumlah dokumen hasil pencatatan ,penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	5000	5000	5000	5000	1.900.000.000	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	43 desa	Dinas Dukcapil
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk										
2.12.02.2.02.02	Pengadaan dokumen kependudukan selain blano ktp-el ,formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	tersedianya dokumen kependudukan selain blangko, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	dokumen	6.000	6.000	7.000	7.000	220.000.000	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	kab kep mentawai	Dinas Dukcapil
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	laporan								
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	laporan	10	43			450.000.000	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	kab kep mentawai	Dinas Dukcapil
2.12.02.2.03.07	komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk	jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang mendapat komunikasi informasi dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	orang	seluruh masyarakat kep mentawai	seluruh masyarakat kep mentawai	seluruh masyarakat kep mentawai	seluruh masyarakat kep mentawai	75.000.000	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	kab kep mentawai	Dinas Dukcapil

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/UB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN					INDIKATIFALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (RP)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2023	2024	2025	2026				
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											
5.02.04.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	1.566.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	18	18	18	18	716.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	Objek Pajak	1	1	1	1	1.541.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelakanaan Penagihan Pajak	Dokumen	1	1	1	1	486.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Julah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	500.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	4	4	4	3.000.000.000	APBD	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	BKD
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).										
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFILE KEPENDUDUKAN											
2.12.05.2.01	Penyusunan Profile Kependudukan										
2.12.05.2.01.01	Penyediaan data Kependudukan kabupaten/kota	jumlah data kependudukan kabupaten/kota	dokumen	5	5	5	5	543.000.000	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	kab kep mentawai	Dinas Dukcapil
2.12.05.2.01.02	penyusunan profile data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	jumlah dokumen profile data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	dokumen	1	1	1	1	116.000.000	APBD Kab. Kepulauan Mentawai	kab kep mentawai	Dinas Dukcapil

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA : KOTA PARIAMAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN												
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja,kelompok miskin dan rentan											
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan											
	Program : Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang melindungi Tenaga Kerja	%	15	20	25	30	35	500.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	15	20	25	30	35	500.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perusahaan	Perusahaan	20	20	20	20	20	250.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Dokumen Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	1	1	1	250.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar											
	Program : Program Pengelolaan Pendidikan											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa SD yang menerima KPP	Siswa	400	400	400	400	400	3.000.000.000		Kota Pariaman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
	Sub Kegaiaitan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa SMP yang menerima KPP	Siswa	100	100	100	100	100	2.500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	726	726	726	726	726	2.400.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	726	726	726	726	726	2.400.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	1.000.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
	Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah											
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	400	400	400	400	400	12.250.000.000		Kota Pariaman	DPUPRP
	Program : Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kondisi aman dan tertib pada desa dan kelurahan se Kota Pariaman	Bulan	12	12	12	12	12	100.000.000		Kota Pariaman	Dinas Satpol PP dan Damkar
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan											
	Program : Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan											
	Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	75.000.000		Kota Pariaman	DPUPRP
	Sub Kegiatan : Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	2	2	2	250.000.000		Kota Pariaman	DPUPRP
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
	Program : Program Penanggulangan Bencana											
	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											
	Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah operasional pencegahan dan penanggulangan bencana	Bulan	12	12	12	12	12	3.000.000.000		Kota Pariaman	BPBD
	Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bahan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	12	12	12	1.500.000.000		Kota Pariaman	BPBD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Program Penegakan Perundang-undangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan : Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Bulan	12	12	12	12	12	125.000.000		Kota Pariaman	Dinas Satpol PP dan Damkar
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP											
	Program : Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam											
	Kegiatan : Identifikasi jumlah korban, kerusakan, kerugian, penyebab dan dampak bencana		Laporan	24	24	-	-	-	150.000.000		Kota Pariaman	BPBD
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											
	Program : Program Penanggulangan Bencana											
	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana											
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Database Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Dokumen	1	1	1	1	1	500.000.000		Kota Pariaman	BPBD
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen perencanaan penanggulangan bencana	Dokumen	1	1	1	1	1	500.000.000		Kota Pariaman	BPBD
	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah desa tangguh bencana	Desa	3	3	3	3	3	1.421.710.350		Kota Pariaman	BPBD
	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana											
	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan jambore yang terlaksana	Kecamatan	4	4	4	4	4	1.331.541.350		Kota Pariaman	BPBD
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana											
	Program : Program Penanggulangan Bencana											
	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana											
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Database Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Dokumen	1	1	1	1	1	500.000.000		Kota Pariaman	BPBD
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen perencanaan penanggulangan bencana	Dokumen	1	1	1	1	1	500.000.000		Kota Pariaman	BPBD
	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah desa tangguh bencana	Desa	3	3	3	3	3	1.421.710.350		Kota Pariaman	BPBD

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana											
	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan jambore yang terlaksana	Kecamatan	4	4	4	4	4	1.331.541.350		Kota Pariaman	BPBD
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah											
	Program : Program Pengelolaan Pendidikan											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa SD yang menerima KPP	Siswa	400	400	400	400	400	3.000.000.000		Kota Pariaman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa SMP yang menerima KPP	Siswa	100	100	100	100	100	2.500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	726	726	726	726	726	2.400.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	726	726	726	726	726	2.400.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	1.000.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
	Program : Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kondisi aman dan tertib pada desa dan kelurahan se Kota Pariaman	Bulan	12	12	12	12	12	100.000.000		Kota Pariaman	Dinas Satpol PP dan Damkar
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan											
	Program : Program Perlindungan Perempuan											
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan, pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan	Orang	80	80	80	80	80	350.000.000	APBD	Kota Pariaman	DP3AKB
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan perempuan korban kekerasan	Kasus	50	50	50	50	50	200.000.000	APBD	Kota Pariaman	DP3AKB
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang dilatih	Orang	40	40	40	40	40	175.000.000	APBD	Kota Pariaman	DP3AKB
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN												
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)											
	Program : Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat											
	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	175.000.000		Kota Pariaman	DPPP
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok	20	20	20	20	20	3.500.000.000		Kota Pariaman	DPPP
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kali	2	2	2	2	2	175.000.000		Kota Pariaman	DPPP
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan											
	Program : Program Penanganan Kerawanan Pangan											
	Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan											
	Sub Kegiatan : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	2	2	2	2	2	350.000.000		Kota Pariaman	DPPP
	Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kali	2	2	2	2	2	300.000.000		Kota Pariaman	DPPP

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket	60	60	60	60	60	375.000.000		Kota Pariaman	DPPP
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	640	640	640	640	640	250.000.000		Kota Pariaman	DINKES
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe			NA	NA	NA	NA	NA	NA			
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)											
	Program : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat											
	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	180.000.000		Kota Pariaman	DPPP
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok	20	20	20	20	20	3.750.000.000		Kota Pariaman	DPPP
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kali	2	2	2	2	2	175.000.000		Kota Pariaman	DPPP
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	726	726	726	726	726	3.000.000.000		Kota Pariaman	DINKES

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan											
	Sub Kegiatan : Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jenis	9	9	9	9	9	180.000.000		Kota Pariaman	DPPP
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA												
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	726	726	726	726	726	2.400.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	726	726	726	726	726	2.400.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	726	726	726	726	726	2.400.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	608	608	608	608	608	1.000.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelola, terintegrasi dengan RS dalam satu Satu Sistem Penanganan Gawat Daryrat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	1	1	1	2.500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan											
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	12	12	12	12	60.000.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan											
	Program : Program Pemenuha Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	1	1	1	1	3.000.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan											
	Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan											
	Kegiatan : Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilyah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Perencanaan dan distribusi serta pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	200.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	50	50	50	50	50	200.000.000		Kota Pariaman	Dinas Kesehatan

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti ujian paket A, B dan C	Orang	200	200	200	200	200	1.000.000.000		Kota Pariaman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)											
	Program : Program Pengelolaan Pendidikan											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	Sekolah	10	10	10	10	10	4.334.748.850		Kota Pariaman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	Sekolah	2	2	2	2	2	2.500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN												
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin											
	Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan											
	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah peserta mengikuti pelatihan PPRG	Orang	200	200	200	200	200	375.000.000		Kota Pariaman	DP3AKB
	Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pelaksanaan kegiatan DW dan GOW	Kali	12	12	12	12	12	750.000.000		Kota Pariaman	DP3AKB
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pelaksanaan pelatihan KPPI	Kali	4	4	4	4	4	375.000.000		Kota Pariaman	DP3AKB
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir											
	Program : Program Perlindungan Perempuan											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus perempuan korban kekerasan	Kasus	15	15	15	15	15	250.000.000		Kota Pariaman	DP3AKB

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja terdaftar, dan tersedianya data ketenagakerjaan pada aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan)	Dokumen	1	1	1	1	1	250.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah lowongan kerja dan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	100	150	200	250	250	600.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
8.4.1 (a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											
	Program : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan											
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kali	4	4	4	4	4	400.000.000		Kota Pariaman	DPPP
	Kegiatan : Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi											
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kali	4	4	4	4	4	400.000.000		Kota Pariaman	DPPP
	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	200.000.000		Kota Pariaman	DPPP
	Program : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan											
	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Pasar	2	2	2	2	2	2.000.000.000		Kota Pariaman	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri											
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	1	200.000.000		Kota Pariaman	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	200.000.000		Kota Pariaman	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur											
	Program : Program Penempatan Tenaga Kerja											
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja											
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja terdaftar, dan tersedianya data ketenagakerjaan pada aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan)	Dokumen	1	1	1	1	1	250.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah lowongan kerja dan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	100	150	200	250	250	600.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
8.5.2 (a)	Persentase setengah pengangguran											
	Program : Program Penempatan Tenaga Kerja											
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja											
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja terdaftar, dan tersedianya data ketenagakerjaan pada aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan)	Dokumen	1	1	1	1	1	250.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)											
	Program : Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja											
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi											
	Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jenis	5	6	6	8	10	1.250.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
	Program : Program Penempatan Tenaga Kerja											
	Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang diberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Orang	1500	1600	1700	1800	1800	1.500.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non_x0002_fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran											
	Program : Program Penempatan Tenaga Kerja											
	Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	Orang	40	40	40	40	40	500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3											
	Program : Program Hubungan Industrial											
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Dokumen Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	1	1	1	250.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait											
	Program : Program Hubungan Industrial											
	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	20	20	20	20	20	250.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
	Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan monitoring mengenai kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan	Perusahaan	50	50	50	50	50	500.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
	Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	Kasus	1	1	1	1	1	200.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB											
	Program : Program Pemasaran Pariwisata											
	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi yang dilakukan	Tahun	1	1	1	1	1	1.500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran yang dilakukan	Tahun	1	1	1	1	1	1.500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Kabupaten Kota											
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Jaringan Internet dan Intranet OPD Pemko Pariaman	Tahun	1	1	1	1	1	7.500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Komunikasi dan Informatika
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGERA												
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur											
	Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial											
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	2000	2000	2000	2000	2000	1.500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	2000	2000	2000	2000	2000	200.000.000		Kota Pariaman	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bansos kesejahteraan keluarga kewenangan kab/kota yg dimonev	Keluarga	2000	2000	2000	2000	2000	200.000.000		Kota Pariaman	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100	100	100	1.500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Sosial
10.1.1 (c)	Jumlah Desa Mandiri											
	Program : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat											
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	1	1	1	1.000.000.000		Kota Pariaman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1	200.000.000		Kota Pariaman	Dinas Perhubungan
11.2.1 (a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik											
	Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)											
	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	10	10	10	10	10	4.500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Perhubungan
11.2.1 (b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum											
	Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)											
	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	10	10	10	10	10	4.500.000.000		Kota Pariaman	Dinas Perhubungan
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
	Program : Program Penanggulangan Bencana											
	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											
	Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah operasional pencegahan dan penanggulangan bencana	Bulan	12	12	12	12	12	3.000.000.000		Kota Pariaman	BPBD
	Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bahan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bulan	12	12	12	12	12	1.500.000.000		Kota Pariaman	BPBD
	Program : Program Penegakan Perundang-undangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan : Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Bulan	12	12	12	12	12	125.000.000		Kota Pariaman	Dinas Satpol PP dan Damkar

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen perencanaan penanggulangan bencana	Dokumen	1	1	1	1	1	500.000.000		Kota Pariaman	BPBD
	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah desa tangguh bencana	Desa	3	3	3	3	3	1.421.710.350		Kota Pariaman	BPBD
	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana											
	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan jambore yang terlaksana	Kecamatan	4	4	4	4	4	1.331.541.350		Kota Pariaman	BPBD
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN												
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											
	Program : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat											
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan											
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kali	4	4	4	4	4	400.000.000		Kota Pariaman	DPPP
	Kegiatan : Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi											
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kali	4	4	4	4	4	400.000.000		Kota Pariaman	DPPP
	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	200.000.000		Kota Pariaman	DPPP
	Program : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan											
	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											
	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Pasar	2	2	2	2	2	2.000.000.000		Kota Pariaman	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri											
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	1	200.000.000		Kota Pariaman	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana											
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Database Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Dokumen	1	1	1	1	1	500.000.000		Kota Pariaman	BPBD
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen perencanaan penanggulangan bencana	Dokumen	1	1	1	1	1	500.000.000		Kota Pariaman	BPBD
	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah desa tangguh bencana	Desa	3	3	3	3	3	1.421.710.350		Kota Pariaman	BPBD
	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana											
	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan jambore yang terlaksana	Kecamatan	4	4	4	4	4	1.331.541.350		Kota Pariaman	BPBD
TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN												
14.6.1 (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha											
	Program : Program Pelayanan Penanaman Modal											
	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	10	10	10	10	10	1.000.000.000		Kota Pariaman	Dinas PM, PTSP & Tenaga Kerja
14.b.1 (a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan											
	Program : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap											
	Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	3	3	3	3	3	500.000.000		Kota Pariaman	DPPP
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi											
	Program : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap											
	Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	3	3	3	3	3	500.000.000		Kota Pariaman	DPPP
TUJUAN 15. MELINDUNGI, MELESTARIKAN DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGUSIRAN, MEMULUTKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI												

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	20	20	20	20	20	3.000.000.000		Kota Pariaman	Sekretariat DPRD
16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).											
	Program : Program Kepegawaian Daerah											
	Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN											
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	12	12	12	12	12	3.000.000.000		Kota Pariaman	BKPSDM
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur											
16.9.1 (b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun											
	Program : Program Pencatatan Sipil											
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil											
	Sub Kegiatan : Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	2	2	2	2	2	100.000.000		Kota Pariaman	DISDUKCAPIL
16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir											
16.10.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan											
	Program : Program Perlindungan Perempuan											
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus perempuan korban kekerasan	Kasus	15	15	15	15	15	250.000.000		Kota Pariaman	DP3AKB
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITAISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN												
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya											
	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah											
	Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	375.000.000		Kota Pariaman	BPKPD
17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB											
	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah											
	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah											
	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	775.000.000		Kota Pariaman	BPKPD

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah pelaksanaan rakor data perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	500.000.000		Kota Pariaman	BAPPEDA
	Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah pelaksanaan koordinasi litbang kota pariaman	Kegiatan	1	1	1	1	1	750.000.000		Kota Pariaman	BAPPEDA
17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)											
	Program : Program Pencatatan Sipil											
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil											
	Sub Kegiatan : Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	2	2	2	2	2	100.000.000		Kota Pariaman	DISDUKCAPIL

KOTA : SOLOK

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN												
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.											
	Program :											
	Kegiatan :											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
	Program : Program Pemberdayaan Sosial	% Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	324.198.750			DINAS SOSIAL
	Kegiatan : Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah izin pengumpulan sumbangan yang dikeluarkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	24.997.500			DINAS SOSIAL
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	persentase Kelompok KUBE yang aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	299.201.250			DINAS SOSIAL
	Program : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota	%	1,04 %	1,03 %	1,02 %	1,01 %	1 %	4.062.901.000			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Program : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umun (PSU)		91,5 %	92 %	92,5 %	93 %	93,5 %	15.065.117.315			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi											
	Program : PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya							5.570.981.172			DINAS SOSIAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KOTA : SOLOK

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan)											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat								4.415.313.693			
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Balita yang berat badannya (D/S)	%	75%	80%	85%	90%	90%	4.415.313.693			
		Persentase balita ditimbang naik berat badannya (N/D)	%	84%	86%	88%	90%	90%				
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).											
	Program : Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Bahan Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi	%	90%	90,5 %	91%	91,5 %	92%	483.712.200			DINAS PANGAN
	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan	sampel	10 sampel	15 sampel	20 sampel	25 sampel	30 sampel	483.712.200			DINAS PANGAN
		Jumlah Registrasi PSAT yang Diterbitkan	register	5 register	7 register	9 register	11 register	13 register				
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat								4.415.313.693			
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ibu hamil anemia	%	9%	9%	8%	8%	7%	4.415.313.693			
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan											
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/											
	Program : Cakupan Bina Kelompok Tani Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani Persentase Peningkatan Petani Milenial								4.063.455.212			DINAS PERTANIAN
	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Yang Dapat Mendiseminasikan Informasi Teknologi Pertanian	%	85%	90%	95%	100%	100%	4.063.455.212			DINAS PERTANIAN
		Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi Oleh Kelompok Tani	%	65%	70%	75%	80%	85%				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Persentase Anggota Kelembagaan Petani Yang Aktif	%	82%	85%	88%	92%	96%				
		Persentase Kelembagaan Petani Yang Aktif	%	96%	97%	98%	99%	100%				
	Program : Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Benih Berkualitas Yang Digunakan							2.092.039.450			
		Jumlah Produksi Perikanan										
	Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pelaku Perikanan Yang Menerapkan CBIB	Kelompok	3 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	1.669.105.002			DINAS PERTANIAN
	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan Yang Dibina	Kelompok	45 Kelompok	47 Kelompok	49 Kelompok	51 Kelompok	51 Kelompok	422.934.448			DINAS PERTANIAN
		Jumlah Akses Informasi dan Teknologi Budidaya Perikanan	Orang	10 Orang	16 Orang	9 Orang	6 Orang	3 Orang				
	Program : Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	80%	83%	85%	86%	87%	1.938.385.800			
	Kegiatan : Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	paket	7 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	1.938.385.800			
		Jumlah Prasarana Yang Dipelihara	paket	7 Paket	12 Paket	17 Paket	22 Paket	27 Paket				
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.											
02.04.01	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.											
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan											
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan											
	Program : Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian								3.591.057.300			
	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Lahan Yang Ditanami Benih Unggul Yang Bersertifikat (Padi)	Ha	219 Ha	219 Ha	263 Ha	306 Ha	352 Ha	3.591.057.300			
		Luas Lahan Yang Ditanami Benih Unggul Yang Bersertifikat (Serai Wangi)	Ha	42.433 Ha	46.433 Ha	50.433 Ha	52.433 Ha	56.433 Ha				
		Luas Lahan Yang Ditanami Benih Unggul Yang Bersertifikat (Kopi)	Ha	33 Ha	36 Ha	40 Ha	45 Ha	50 Ha				

[illegible]

KOTA : SOLOK

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Keluarga Yang Aktif Dalam Kelompok Kegiatan (Tribina, UPPKA) Persentase Tenaga Teknis Yang Terampil	%						3.584.670.000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Kegiata n : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peningkatan Pemahaman Kelompok Tribina, PIK-R dan UPPKS/UPPKA dalam Program Ketahanna dan Kesejahteraan Keluarga	%	85 %	85,5 %	85,6 %	85,7 %	85,9 %	2.997.878.500			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Kegiata n : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Persentase Keluarga Yang Menjadi Anggota Kelompok Tribina dan UPPKA	%	46,04 %	46,67 %	47,29 %	47,91 %	48,57 %	586.791.500			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).											
	Program : PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Masyarakat Yang Aktif dalam Program Bangga Kencana Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)										DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Kegiata n : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Ketepatan Data dan Pelaporan Database KKBPK										DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Kegiata n : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Aktif Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)										DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.											
3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	- Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang - Persentase Peserta KB							1.602.265.470			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
	Kegiata n : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alokon Sesuai Kebutuhan		100%	100%	100%	100%	100%	1.602.265.470			
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.											
3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan										
	Kegiata n : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%		94.800.500.297			
03.09.01	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.											
03.09.02	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.											
	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Kegiata n : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase akses jamban sehat	%	100%	100%	100%	100%	100%	4.835.806.123			DINAS KESEHATAN
		Persentase akses air minum sehat	%	97%	97%	97%	97%	97%				
03.09.03	Angka kematian akibat keracunan.											

[illegible]

KOTA : SOLOK

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA												
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											
	Program : PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	% Satuan Pendidikan dasar yang menerapkan Kurikulum muatan lokal % Satuan Pendidikan Usia Dini yang menerapkan Kurikulum muatan lokal										DINAS PENDIDIKAN
	Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	% SMP Memiliki Dokumen Kurikulum Muatan Lokal		90%	90%	95%	100 %	100 %	120.750.000			DINAS PENDIDIKAN
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	% Satuan Pendidikan Usia Dini yang menerapkan Kurikulum muatan lokal		30%	35%	40%	40 %	45 %	236.125.000			DINAS PENDIDIKAN
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran											
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/											
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.											
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang											
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang											
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam											
4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).											
04.04.01	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada											DINAS PENDIDIKAN

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (3-6 th) APK SD APK SMP APM SD APM SMP Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan							#####			DINAS PENDIDIKAN
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	% Pendidik Memenuhi Kualifikasi		98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %				
		% sekolah yang merealisasikan BOS Diatas 80		85 %	90 %	95 %	95 %	100 %				
		% Sekolah dasar negeri yang memiliki guru pendamping Anak Berkebutuhan Khusus		5 %	5 %	5 %	5 %	5 %				
		Rasio ketersediaan sekolah		56 Rasio	56.5 Rasio	57 Rasio	57.5 Rasio	57.5 Rasio				
		Rasio Kelas/Siswa		423 Rasio	425 Rasio	430 Rasio	435 Rasio	435 Rasio				
		Rasio Guru/Siswa		317 Rasio	320 Rasio	322 Rasio	325 Rasio	325 Rasio				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	% Pendidik yang memenuhi kualifikasi		95 %	96 %	96 %	96 %	97 %	#####			DINAS PENDIDIKAN
		% Sekolah yang merealisasikan BOS Diatas 80		85 %	90 %	95 %	95 %	100 %				
		Sekolah dasar Negeri yang memiliki guru pendamping anak berkebutuhan khusus		5 %	5 %	5 %	5 %	10 %				
		Rasio ketersediaan sekolah		24 Rasio	25 Rasio	26 Rasio	27 Rasio	27 Rasio				
		Rasio Kelas/siswa		436 Rasio	438 Rasio	440 Rasio	442 Rasio	442 Rasio				
		Rasio Guru/Siswa		882 Rasio	884 Rasio	886 Rasio	888 Rasio	888 Rasio				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Belajar		50 Orang	60 Orang	70 Orang	80 Orang	95 Orang	3.734.541.628			DINAS PENDIDIKAN
04.06.01	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.											
04.07.01	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan											
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua											
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.											
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.											
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.											
	Program : PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	% Pendidik SD Memiliki Sertifikat % Pendidik SMP Memiliki Sertifikat										DINAS PENDIDIKAN
	Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik SD memiliki Sertifikat		336 orang	350 orang	350 orang	375 orang	375 orang	1.581.244.000			DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Pendidik SMP Memiliki Sertifikat		181 Orang	220 Orang	220 Orang	275 Orang	275 Orang				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		% Guru mapel PNS SMP yang memenuhi jam minimal sertifikasi		0,73	0,73	0,73	0,73	0,73				
		% GUru yang dinilai angka kreditnya		0,85	0,85	0,85	0,85	0,85				
		% Guru PNS SD yang memenuhi jam minimal sertifikasi		0,73	0,73	0,73	0,73	0,73				

KOTA :

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN												
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis											
	Program : PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase anggaran responsif gender pada belanja non gaji Persentase OPD yang sudah melaksanakan PUG melalui PPRG Persentase organisasi perempuan yang aktif							833.561.500			
	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Masyarakat/Perusahaa n yang paham tentang PUG	%	40 %	40 %	50 %	50 %	60 %	833.561.500			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%	80 %	80 %	90 %	90 %	100 %				
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perempuan yang Dibina	%	40 %	40 %	50 %	50 %	60 %	5.253.430.600			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan ketahanan keluarga										
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Diberikan Pelatihan Keterampilan		35 %	35 %	45 %	45 %	55 %	436.933.150			
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA												
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.											
	Program : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap	%	86,9 %	86,95 %	87 %	87%	87%	12.720.610.000			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan air bersih	%	87,60 %	89,30 %	91,80 %	94%	96%	12.720.610.000			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman,termasuk fasilitas cuci tangan dengan air											
	Program :											
	Kegiatan :											
06.03.01	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman											
	Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	85,41 %	85,51 %	85,61 %	85,71 %	85,71 %	6.924.410.000			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan sistem air limbah	%	91,20 %	92,00 %	93,80 %	94,50 %	95,20 %	6.924.410.000			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman											
	Program : PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan LB3 yang dibina	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH	
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026					
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA													
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.												
	Program :												
	Kegiatan :												
	Sub :												
	Kegiatan												
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.												
07.01.02	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama												
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.												
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.												
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.												
7.3.1*	Intensitas energi primer.												
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara- negara berkembang												
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan												
TUJUAN 8. MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA													
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.												
	Program :												
	Kegiatan :												
	Sub :												
	Kegiatan												
8.1.1.(a)	PDB per kapita.												
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan												
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis												
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil,												
	Program : Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	60	70	80	85	90	2.245.000.000	APBD	Kota Solok	Dinas Perdagangan & KUKM	
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang difasilitasi akses permodalan dan legalitas	UMKM	5	5	5	5	5	2.245.000.000				
08.04.01	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun												
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola												
08.04.02	<i>Konsumsi material domestik (domestic material consumption).</i>												
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.												
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan												
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.												
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak												
08.07.01	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja,												
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja,												
08.08.01	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-												
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.												
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan												
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi												
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.												
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.												
	Program : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	1	0,08	0,45	0,81	0,99	4.640.831.000	APBD	Kota Solok	Dinas Pariwisata	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	139000	150000	200000	250000	275000	4.640.831.000			
				0	0	0	0	0				
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.											
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.											
8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan											
8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang											
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI												
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam											
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.											
	Program : Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	79,9	81,4	82,9	84,4	85,9	45.448.650.000	APBD	Kota Solok	Dinas PUPR
	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan mantap	%	79,9	81,4	82,9	84,4	85,9	45.448.650.000			
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.											
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.											
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan											
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.											
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.											
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.											
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB											
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.											
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.											
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah											
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.											
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah											
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.											
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.											
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.											
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan											
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan											
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan											
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap											
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi											
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile</i>											
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGERA												
10.1.1*	Rasio Gini.											
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan											
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.											
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.											
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.											
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah											
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.											
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median											
10.03.01	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi											
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.											
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia											
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia											
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu											

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
10.04.01	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial											
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan											
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang											
10.04.02	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.											
10.05.01	<i>Financial Soundness Indicator.</i>											
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.											
10.06.01	Proporsi anggota dan hak suara negara- negara berkembang di											
10.07.01	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung											
10.07.02	Jumlah negara yang mengimplementa- sikan											
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan											
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN											
10.07.03	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam											
10.07.04	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.											
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari											
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan,											
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang											
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN												
11.01.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses											
	Program : Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni yang tersedia	%	92,85	92,95	93,05	93,15	93,25	3.050.000.000			
	Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota											
11.02.01	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada											
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada											
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum											
11.03.01	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan											
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap											
11.03.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat											
11.04.01	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk											
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan											
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana											
	Program : Program Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat layanan penanggulangan bencana	%	95	100	100	100	100	918.600.000	APBD	Kota Solok	BPBD
	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana <24 jam	%	95	100	100	100	100	918.600.000			
11.05.02	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP,											
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif											
11.06.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara											
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang											
	Program : Program Pengelolaan Persampahan	persentase timbulan sampah yang ditangani		88	89	90	91	91	37.367.514.350	APBD	Kota Solok	DLH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN												
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Program :											
	Kegiatan :											
	Sub Kegiatan :											
	Dst (untuk dapat dilanjutkan pada Program/Kegiatan dan Sub											
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.											
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.											
17.02.01	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada											
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB											
17.03.01	Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment/ FDI</i>),											
	Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan											
17.03.02	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai											
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (<i>dalam US</i>											
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt</i>											
17.05.01	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim											
17.06.01	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut											
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap											
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau											
17.07.01	Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk											
17.8.1*	Persentase pengguna internet											
17.09.01	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk											
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama											
17.9.1.(b)	Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan- Selatan dan											
17.10.01	Rata-rata tarif terbotot dunia <i>Free Trade Agreement (FTA)</i> .											
17.10.1(a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati											
17.11.01	Bagian negara berkembang dan kurang											
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas											
17.12.01	Rata-rata tarif terbotot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan negara berkembang pulau kecil.											
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.											
17.14.01	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme											
17.15.01	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan											
17.16.01	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja											
17.17.01	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta											
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang											
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan											
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan											
17.18.01	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs											
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS											
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi											

[illegible]

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG				2022	2023	2024	2025	2026				
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN													
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ektrim.												Dinas Sosial
	Program : Pengelolaan Pendidikan	- APK PAUD - APK SD/MI/Paket A - APM SMP/MTs/Paket B	%	76,30 132,75 162,10	65,00 112,00 94,00	67,00 114,00 97,00	69,00 115,00 98,00	71,00 116,50 100,00	48.714.202.139	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD/SMP terakreditasi A	%(Tahun 2022 satuan sekolah)	2	73,26	74,26	75,26	76,24	17.691.424.471	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta didik	Jumlah sekolah yang dilakukan assesment	sekolah	82	83	84	85	86	400.399.450	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan insentif	orang	262	250	240	230	220	12.824.536.500	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD yg mendapatkan dana BOS	sekolah	82	83	84	85	86	76.942.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan siswa	Jumlah siswa SD yang mendapatkan bantuan alat tulis	orang	1750	2000	2250	2500	2750	982.437.500	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SD/SMP terakreditasi A	%(Tahun 2022 satuan sekolah)	2	73,26	74,26	75,26	76,24	6.881.965.346	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta didik	Jumlah sekolah yang dilakukan assesment;	sekolah	20	21	22	23	24	171.500.500	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan insentif	orang	140	130	120	110	105	5.007.621.400	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang mendptkn dana BOS	sekolah	20	21	22	23	24	10.499.600.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa SMP yg mendapatkan bantuan alat tulis	orang	1500	1750	2000	2250	2500	994.005.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD Terakreditasi A	%(Tahun 2022 satuan lembaga)	12	7,14	8,57	8,57	9,28	12.887.408.002	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan siswa PAUD	Jumlah siswa PAUD yg diberikan bantuan alat tulis	orang	250	300	350	400	450	150.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan proses belajar PAUD								174.998.950	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Jumlah tenaga pendidik PAUD yang diberi insentif	orang	335	350	375	400	425	13.569.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD yg mendptkn dana BOP	satuan PAUD	139	142	144	146	147	16.590.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Dikmas Terakreditasi B	%(Tahun 2022 satuan lembaga)	4	60,00	60,00	60,00	60,00	11.253.404.320	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah siswa kesetaraan yang mendapatkan bantuan alat tils	orang	60	70	80	90	100	50.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah siswa kesetaraan yg mendapatkan pelatihan keterampilan	orang	30	50	70	90	110	269.999.250	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah lembaga kesetaraan yg menyelenggarakan proses belajar mengajar	lembaga	5	6	7	8	9	824.999.100	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah pendidik pada jalur non formal yang mendapatkan insentif	orang	495	500	505	510	515	11.498.448.600	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan yang mendapatkan dana BOP	lembaga	5	6	7	8	9	4.097.500.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pendidikan	
	Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.531.967.570	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial	
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.531.967.570	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial	
	Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.688.282.600	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial	
	Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.531.967.570	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial	
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.531.967.570	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	jiwa	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	821.201.480	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial	
	Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.531.967.570	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial	
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.531.967.570	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial	

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	2	2	2	2	2	22.483.490	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	IKM Kelurahan	Indek	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	6.065.024.444	APBD	17 Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Barat	Kecamatan Payakumbuh Barat
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	6.065.024.444	APBD	17 Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Barat	Kecamatan Payakumbuh Barat
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun	unit	1	1	1	1	1		APBD	17 Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Barat	Kecamatan Payakumbuh Barat
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	IKM Kelurahan	Indek	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	6.065.024.444	APBD	17 Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Barat	Kecamatan Payakumbuh Barat
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi Baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.065.024.444	APBD	17 Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Barat	Kecamatan Payakumbuh Barat
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	lembaga/ ormas	3	3	3	3	3		APBD	17 Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Barat	Kecamatan Payakumbuh Barat
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. IKM Kelurahan	Indeks	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00		APBD	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
		2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Rp 2.403.945.174	APBD	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
		2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Sub Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	1	1	1	1	1		APBD	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. IKM Kelurahan	Indeks	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00		APBD	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
		2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Rp 2.403.945.174	APBD	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
		2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas	3	3	3	3	3		APBD	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. IKM	Indeks	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00		APBD	Kecamatan Payakumbuh Timur	Kecamatan Payakumbuh Timur
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		APBD	Kecamatan Payakumbuh Timur	Kecamatan Payakumbuh Timur
		2. Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas	3	3	3	3	3	Rp 3.070.618.539	APBD	Kecamatan Payakumbuh Timur	Kecamatan Payakumbuh Timur

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. IKM	Indeks	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00		APBD	Kecamatan Payakumbuh Utara	Kecamatan Payakumbuh Utara
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			Kecamatan Payakumbuh Utara	
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		APBD	Kecamatan Payakumbuh Utara	Kecamatan Payakumbuh Utara
		2. Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			Kecamatan Payakumbuh Utara	
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas	3	3	3	3	3	Rp 5.769.960.736	APBD	Kecamatan Payakumbuh Utara	Kecamatan Payakumbuh Utara
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. IKM Kelurahan	Indeks	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		APBD	Kecamatan Payakumbuh Selatan	Kecamatan Payakumbuh Selatan
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW yang Aktif)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			Kecamatan Payakumbuh Selatan	
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	2.337.462.752,00	APBD	Kecamatan Payakumbuh Selatan	Kecamatan Payakumbuh Selatan
		2. Persentase Lembaga KemasyarakatanTingkat Kelurahan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			Kecamatan Payakumbuh Selatan	
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		APBD	Kecamatan Payakumbuh	Kecamatan Payakumbuh Selatan
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. IKM Kelurahan	Indeks	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		APBD	Kecamatan Payakumbuh Selatan	Kecamatan Payakumbuh Selatan
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW yang Aktif)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			Kecamatan Payakumbuh Selatan	
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	2.337.462.752,00	APBD	Kecamatan Payakumbuh Selatan	Kecamatan Payakumbuh Selatan
		2. Persentase Lembaga KemasyarakatanTingkat Kelurahan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			Kecamatan Payakumbuh Selatan	
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas/ lembaga	3	3	3	3	3		APBD	Kecamatan Payakumbuh Selatan	Kecamatan Payakumbuh Selatan
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											Dinas Sosial
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											Dinas Sosial
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Tidak Ada dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian										Dinas Sosial
	Program : Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	238.096.150	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	238.096.150	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	kejadian	25	25	25	25	25	238.096.150	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu (BDT)	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.279.855.200	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1.279.855.200	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	246	246	246	246	246	1.155.467.350	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu (BDT)	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.279.855.200	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1.279.855.200	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	20	20	20	20	85.596.450	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu (BDT)	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.279.855.200	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1.279.855.200	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	5	5	5	5	38.791.400	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.											Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak Ada dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian										Dinas Sosial/Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.											Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas Sosial
	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum	Persentase	100,00	90,00	91,00	92,00	93,00	4.825.183.530	APBD	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sambungan Rumah Pengguna Air Bersih	Persentase	100,00	90,21	90,41	90,61	90,81	4.825.183.530	APBD	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Sambungan Rumah Terpasang	SR	34.107	28.760	29.110	29.460	29.810				
	Sub Kegiatan : Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik		194.100		196.000		860.000.000	APBD	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum Yang Disusun	Dokumen		1	1						
	Sub Kegiatan : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan	Panjang Perpipaan yang Dibangun	Meter	3.066	550	800	550		2.247.473.230	APBD	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik	SR		50	70	80	50	750.000.000	APBD	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Angka Backlog	Indeks	-	6.361	5.761	5.161	4.561	2.563.917.160	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.540.456.680	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	7.999.800	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Angka Backlog	Indeks	-	6.361	5.761	5.161	4.561	2.563.917.160	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.540.456.680	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	1	1	1	1	28.002.240	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Angka Backlog	Indeks	-	6.361	5.761	5.161	4.561	2.563.917.160	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.540.456.680	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	1	1	1	1	39.999.560	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Angka Backlog	Indeks	-	6.361	5.761	5.161	4.561	2.563.917.160	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.540.456.680	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1	1	1	1	1	107.224.120	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Angka Backlog	Indeks	-	6.361	5.761	5.161	4.561	2.563.917.160	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.540.456.680	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1.297.232.840	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Angka Backlog	Indeks	-	6.361	5.761	5.161	4.561	2.563.917.160	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.540.456.680	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	1	1	1	1	59.998.120	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Angka Backlog	Indeks	-	6.361	5.761	5.161	4.561	2.563.917.160	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait SPM Perumahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	191.018.760	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	50	50	50	50	50	44.219.800	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Angka Backlog	Indeks	-	6.361	5.761	5.161	4.561	2.563.917.160	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait SPM Perumahan	%	100,00	24,27	36,41	48,54	60,68	191.018.760	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	50	50	50	50	50	51.198.320	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Angka Backlog	Indeks	-	6.361	5.761	5.161	4.561	2.563.917.160	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait SPM Perumahan	%	100,00	24,27	36,41	48,54	60,68	191.018.760	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	1	1	1	1	1	95.600.640	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Angka Backlog	Indeks	-	6.361	5.761	5.161	4.561	2.563.917.160	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang ditingkatkan Kualitasnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Tahun	1	1	1	1	1	800.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Angka Backlog	Indeks	-	6.361	5.761	5.161	4.561	2.563.917.160	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Rumah Swadaya	%	100,00	76,53	81,19	84,31	86,54	32.441.720	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tahun	1	1	1	1	1	32.441.720	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,27	96,95	97,24	97,53	97,81	4.987.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan Kualitasnya	%	11	76,53	81,19	84,31	86,54	4.987.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	15	1	1	1	1	100.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,27	6361	5761	5161	4561	4.987.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan Kualitasnya	%	11	76,53	81,19	84,31	86,54	4.987.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	15	100	100	100	100	4.887.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum (Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik)									APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Per	%	-	22,55	23,98	25,41	26,84	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman	%	-	7,53	15,06	22,58	30,11	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	126.999.720	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Per	%	-	22,55	23,98	25,41	26,84	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman	%	-	7,53	15,06	22,58	30,11	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	119.999.920	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Per	%	-	22,55	23,98	25,41	26,84	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman	%	-	7,53	15,06	22,58	30,11	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah tangga yang terlayani penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	1000	900	900	950	1000	1.790.940.732	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Per	%	-	22,55	23,98	25,41	26,84	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman	%	-	7,53	15,06	22,58	30,11	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	633	500	500	500	500	5.854.593.680	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasarkan oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.											Dinas Sosial/Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program : PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.500.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap koban bencana	Persentase warga kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana	dokumen	1					225.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Apartur dan siswa yang ikut pelatihan	orang	200	200	200	200	200	300.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	orang		200	200	200	200	200.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sub Kegiatan : Pencarian pertolongan dan Evakuasi korban bencana	Jumlah Petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	orang	250	250	250	250	250	720.000.000	APBD	KOTA PAYAKUMBUH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sub Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana	dokumen (tahun 2022 satuan kali)	40	1	1	1	1	100.000.000	APBD	KOTA PAYAKUMBUH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Resiko Bencana	Jumlah aksi pengurangan resiko bencana	dokumen (tahun 2022 satuan kali)	40	1	1	1	1	250.000.000	APBD	KOTA PAYAKUMBUH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.											Dinas Sosial/Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Bagian Perekonomian
	Program: Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Perekonomian (Sekretariat Daerah)
	Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Perekonomian (Sekretariat Daerah)
	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Perekonomian (Sekretariat Daerah)
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.											Dinas Sosial/Bagian Perekonomian/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program : Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	1.717.808.590	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.717.808.590	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	137	137	137	137	137	559.785.400	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Program : Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	1.717.808.590	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.717.808.590	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	5	5	5	5	42.526.550	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Program : Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	1.717.808.590	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.717.808.590	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	892.453.450	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Program : Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.717.808.590	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.717.808.590	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	54	54	54	54	54	223.043.190	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Sosial
	program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	
	kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.											Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan/Dinas Sosial
	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap Program (RPJMD) RPD	%	98,80	100,00	100,00	100,00	100,00	1.685.840.400	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase hasil koordinasi pengendalian tindaklanjut bidang sosial budaya	%	44,17	100,00	100,00	100,00	100,00	1.685.840.400	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
		Persentase PD yagn telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang sosial budaya		n/a	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan	kali rapat		4	4	4	4	1.685.840.400	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana/Dinas Sosial
TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELLAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN												
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	- Angka Kecukupan Energi - Angka Kecukupan Protein	%	90,00 90,00	91,00 91,00	92,00 92,00	93,00 93,00	94,00 94,00	30.249.800	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
	Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Persentase masyarakat yg mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	%	60,00 56,00	61,00 57,00	61,50 57,50	62,00 58,00	62,50 58,50	1.841.707.480	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	- Persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - Persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	%	40,00 15,00	42,00 20,00	43,00 21,00	44,00 22,00	45,00 23,00	1385673652	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Jumlah dokumen Target konsumsi pangan per kapita per tahun	dokumen	1	1	1	1	1	30.249.800	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. Program : Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah kelurahan dengan tingkat kerawanan pangan berat Skor PPH Ketersediaan	kelurahan nilai	4 89,00	4 89,00	3 89,10	3 89,20	2 89,30	87.924.630 306.752.098	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
	Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	87.924.630	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	dokumen	1	1	1	1	1	87.924.630	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana/Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi - Persentase masyarakat yg mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	Nilai %	85,00 60,00 56,00	85,10 61,00 57,00	85,20 61,50 57,50	85,30 62,00 58,00	85,40 62,50 58,50	1.385.673.652 1.841.707.480	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
	Kegiatan : Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	- Persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - Persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	%	40,00 15,00	42,00 20,00	43,00 21,00	44,00 22,00	45,00 23,00	1.385.673.652	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Jumlah dokumen Target konsumsi pangan per kapita per tahun	dokumen	1	1	1	1	1	30.249.800	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	laporan	1	1	1	1	1	1.055.099.512	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	laporan	1	1	1	1	1	300.324.340	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun											Dinas Kesehatan
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan											Dinas Pertanian
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan											Dinas Pertanian
	Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Jumlah Produksi ikan konsumsi - Persentase Kelompok Pembudidaya yang Menerapkan Teknologi Anjuran	ton %	560 40,00	560 40,00	560 42,00	560 45,00	560 50,00	528.125.439	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian
	Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	- Persentase pemanfaatan lahan budidaya - Jumlah pembudidaya yang mendapat akses permodalan - Jumlah peningkatan kelas kelompok pembudidaya	% orang kelompok	50,00 5 1	50,00 5 1	55,00 6 1	63,00 7 1	65,00 8 1	88.219.372	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	- Pelatihan Pakan Alternatif bagi petugas dan Pembudidaya - Praktek Pembuatan Pakan Alternatif - Jumlah Pokdakan yang dibantu sarana dan prasarana pembudidayaan	Orang Orang Kelompok	25 25 1					165.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Peternakan	%	16,58 90,00	16,50 75,00	17,45 80,00	18,35 85,00	19,21 90,00	3.794.611.373	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	- Persentase pemanfaatan SDG padi bersertifikat sesuai target tanam - Indeks Pertanaman - Persentase pemenuhan layanan sarana pendukung pertanian	% indeks %	62,00 2,80 90,00	62,00 2,80 90,00	62,00 2,80 90,00	62,00 2,80 90,00	62,00 2,80 90,00	371.309.744	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan : Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	- Pengembangan Padi - Pengembangan Jagung - Pengembangan Bawang - Jumlah BST	Ha Ha Ha henis	400 15 4 3	400 15 4 3	400 15 4 3	400 15 4 3	400 15 4 3	371.309.744	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian
	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten / Kota	- Tersedianya bibit temak - Pelatihan Budidaya ternak/ pengolahan pakan - Tersedianya Pakan Ternak	dosis kali ton	2000 1 20	500 1 20	500 1 20	500 1 20	500 1 20	313.079.065	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan : Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Fasilitasi IB	dosis	2000	500	500	500	500	313.079.065	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.											Dinas Pertanian
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.											Dinas Pertanian
	Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sungai yang Berfungsi Baik Persentase Irigasi dengan Kondisi Baik Persentase Debit Air Baku yang Tersedia	Persen Persen Persen	89.59 89.49 56.98	90.67 90.48 57.32	91.75 91.03 57.89	92.85 91.87 58.63	93.97 92.65 59.45	88.813.022.004	DAU	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha. Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Debit Air Irigasi Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif	Persen Persen	90.59 90.67	92.00 90.38	93.33 91.29	94.46 92.20	96.00 93.12	49.984.432.603	DAU	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang Direhab Jumlah Pintu Air yang Dibangun	KM unit	6171.65 1.00	3.1 1.00	2.50 1.00	2.50 1.00	1.70 1.00	9.549.354.710	DAU	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang Dipelihara Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan Dipelihara Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara	DAS km m	42.00 150.000	38.00 116.00 	40.00 117.50 	42.00 119.00 	44.00 200.00 	1.767.524.922	DAU	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Kelompok Petani Pemakai Air (P3A) dan GP3A yang Dibina	Kelompok	7.00	69.00	69.00	69.00	69.00	260.000.000	DAU	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.											Dinas Pertanian
	Program : Penyediaan dan Pengembangan PRasaran Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	58,50	58,50	59,00	59,20	59,70	9.695.947.677	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian
	Kegiatan : Pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Rekomendasi Lahan Pertanian Berkelanjutan	laporan	12	12	12	12	12	543.681.303	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ CP2B	Jumlah Pemataan LP2B Skala 1:5000	kecamatan	1	1	1	1	1	543.681.303	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan ertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.											Dinas Pertanian
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.											Dinas Pertanian
	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat VETERINER	-Persentase angka kematian ternak - Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan	% 	0,30 35,00	0,30 35,00	0,30 35,00	0,30 35,00	0,30 35,00	3.998.896.025	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian
	Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan pematangan betina produktif	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100.000.000,00	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian
	Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Sosialisasi Yang Dilaksanakan	kegiatan	2	2	2	2	2	100.000.000,00	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pertanian
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah											Dinas Pertanian
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian											Dinas Pertanian
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian											Dinas Pertanian
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	- Stabilitas harga beras - Stabilitas harga cabe - Stabilitas harga bawang	% 	≤ 10 ≤ 25 ≤ 25	≤ 10 ≤ 25 ≤ 25	≤ 10 ≤ 25 ≤ 25	≤ 10 ≤ 25 ≤ 25	≤ 10 ≤ 25 ≤ 25	251.534.008	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
	Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	% 	60,00 56,00	61,00 57,00	61,50 57,50	62,00 58,00	62,50 58,50	1.841.707.480	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	- Persentase pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan - Persentase informasi harga yang up to date	%	15,00 100,00	16,00 100,00	17,00 100,00	18,00 100,00	19,00 100,00	320.732.396	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	'- Jumlah laporan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	laporan	2	2	2	2	2	127.068.120	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pemantauan stok,pasokan dan harga pangan	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	dokumen	1	1	1	1	1	137.249.616	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	unit	2	2	2	2	2	29.374.410	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
	Sub Kegiatan : Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	'Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani yang dikembangkan	unit	5	5	5	5	5	27.040.250	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Ketahanan Pangan
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA												
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).											Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase kegiatan pelayanan kesehatan bumil sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	962.297.950	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase persalinan dengan nakes di faskes; Cakupan pelayanan nifas sesuai standar Dinas Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	296.774.275	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.999.920	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup											Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase kegiatan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	527.706.600	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.											Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	289.384.600	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.											Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase kegiatan pengelolaan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Dinas Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	398.653.950	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.											Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar Dinas Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	385.314.100	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.											Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan penanganan kasus diare; Insident rate DBD per 100.000 penduduk; Cakupan penanganan kasus DBD Dinas Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.350.055.950	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.											Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan penanganan kasus diare; Insident rate DBD per 100.000 penduduk; Cakupan penanganan kasus DBD Dinas Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	962.297.950	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase sosialisasi tim reaksi cepat bencana, sosialisasi tanggap bencana Dinas Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.091.209.450	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.											Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan penanganan kasus diare; Insident rate DBD per 100.000 penduduk; Cakupan penanganan kasus DBD Dinas Kesehatan	%							APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.											Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan penanganan kasus diare; Insident rate DBD per 100.000 penduduk; Cakupan penanganan kasus DBD Dinas Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.350.055.950	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.											Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan penanganan kasus diare; Insident rate DBD per 100.000 penduduk; Cakupan penanganan kasus DBD Dinas Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.350.055.950	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.											Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan penanganan kasus diare; Insident rate DBD per 100.000 penduduk; Cakupan penanganan kasus DBD Dinas Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.											Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.											Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	14.999.600	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.											Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase penanganan balita gizi buruk; Cakupan balita gizi buruk Dinas Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.051.976.500	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
03.04.02	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.											Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan penanganan kasus diare; Insident rate DBD per 100.000 penduduk; Cakupan penanganan kasus DBD Dinas Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.350.055.950	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
03.05.01	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.											Dinas Kesehatan
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Dinas Kesehatan/Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah sosialisasi kesehatan jiwa dan Napza Dinas Kesehatan							192.899.450	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Dinas Kesehatan/Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
	Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Antar Agama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.268.338.700	APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi FKUB, Pakem Dan Tim Narkoba yang dikeluarkan	rekomendasi	11	11	11	11	11	1.268.338.700	APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rapat Tim FKUB, Narkoba dan PAKEM	kali	10	10	10	10	10	1.268.338.700	APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
		Jumlah Sosialisasi narkoba dan Pakem	kali	2	4	4	4	4				
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah sosialisasi kesehatan jiwa dan Napza Dinas Kesehatan								APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.											Dinas Kesehatan/Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	14.999.600	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
03.06.01	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.											
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.											
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	14.999.600	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Unmetneed (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00	1.176.800.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	39,60	40,60	41,60	42,60	43,60				
	Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi/KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah pembinnan KB sesuai dengan kearifan lokal	jumlah	2	2	2	2	2	100.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan mitrakerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	jumlah	2	2	2	2	2	100.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.014.441.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	jumlah	280	280	280	280	280	1.014.441.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan sarana-prasarana program KB lainnya sesuai perencanaan/ pedoman	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	62.359.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	orang	200	200	200	200	200	62.359.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.											
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	14.999.600	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera		Rata- rata Usia Perkawinan	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	92.077.800	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kader yang mendapatkan pembinaan sebagai kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase	80	80	80	80	80	92.077.800	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	jumlah	30	244	244	244	244	92.077.800	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).											
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	289.384.600	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Unmetneed (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Persentase	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00	1.178.798.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	Persentase	39,60	40,60	41,60	42,60	43,60				
	Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi/KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah pembinaan KB sesuai dengan kearifan lokal	jumlah	2	2	2	2	2	100.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	jumlah	2	2	2	2	2	100.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB	Persentase	100	100	100	100	100	1.014.441.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	jumlah	280	280	280	280	280	1.014.441.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan sarana-prasarana program KB lainnya sesuai perencanaan/ pedoman	Persentase	0	100	100	100	100	64.357.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
		Jumlah Faskes KB yang mendapatkan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	jumlah	30	30	30	30	30	-	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	jumlah	200	200	200	200	200	64.357.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.											
3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.											
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.											
3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).											
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88.693.690.400	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
03.09.01	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.											
03.09.02	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.											
03.09.03	Angka kematian akibat keracunan.											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.											
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan germas dan monev promkes yang dilaksanakan Dinas Kesehatan							3.356.415.200	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.											
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan UKP dan UKM sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107.708.965.758	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.012.331.820	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	289.384.600	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase kegiatan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	527.706.600	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.											
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.											
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.											
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.700.891.284	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Kegiatan : Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabupaten / kota	Jumlah dokumen SDM Kesehatan yang tersedia	dokumen	2	2	2	2	2	814.351.040	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga THL yang digaji Puskesmas dan IFK	orang	32	32	32	32	32	4.076.568.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya	orang	5	5	5	5	5	100.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
	Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	5	5	5	5	5	347.946.200	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kesehatan
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.											
3.d.2	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.											
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA												
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4 (b) tingkat akhir SD/kelas 6 (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											Dinas Pendidikan
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8 (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											Dinas Pendidikan
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.											Dinas Pendidikan
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.											Dinas Pendidikan
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.											Dnas Kesehatan/Dinas Pendidikan
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.											Dinas Pendidikan
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.											Dinas Pendidikan
4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).											Dinas Pendidikan
04.04.01	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).			N I H I L								Dinas Komunikasi dan Informatika
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).			N I H I L								Dinas Komunikasi dan Informatika
4.5.1*	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.											Dinas Pendidikan
04.06.01	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan/Dinas Pendidikan
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan/Dinas Pendidikan
04.07.01	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan (i) pendidikan kewarganegaraan dunia (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.											Dinas Pendidikan
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran (c) komputer untuk tujuan pengajaran (d) air minum layak (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).											Dinas Pendidikan
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.											Dinas Pendidikan
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.											Dinas Pendidikan
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.											Dinas Pendidikan
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN												
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,72	3,82	3,92	4,02	4,12	49.887.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang memahami konsep gender dan PPRG	jumlah	40	40	40	40	40	49.887.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
		Persentase pemenuhan dokumen untuk evaluasi PUG	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Advokasi Kebijakan dan pendamping pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah	31	31	31	31	31	49.887.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Nilai LPPD - Indeks Reformasi Hukum	nilai	3,1600 -	3,1700 72,00	3,1800 73,00	3,1900 74,00	3,2000 75,00	10.083.091.820	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Hukum
	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	- Persentase Rancangan Produk Hukum yang di harmonisasi - Persentase Koordinasi yang Difasilitasi	%	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	2.547.999.280	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Hukum
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang diharmonisasi dan difasilitasi	Produk Hukum	3	3	3	3	3	399.999.280	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Hukum
	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Nilai LPPD - Indeks Reformasi Hukum	nilai	3,1600 -	3,1700 72,00	3,1800 73,00	3,1900 74,00	3,2000 75,00	10.083.091.820	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Hukum
	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	- Persentase Rancangan Produk Hukum yang di harmonisasi - Persentase Koordinasi yang Difasilitasi	%	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	2.547.999.280	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Hukum
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara Hukum yang ditangani	perkara	2	2	2	2	2	1.648.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Hukum
	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Nilai LPPD - Indeks Reformasi Hukum	nilai	3,1600 -	3,1700 72,00	3,1800 73,00	3,1900 74,00	3,2000 75,00	10.083.091.820	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Hukum
	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	- Persentase Rancangan Produk Hukum yang di harmonisasi - Persentase Koordinasi yang Difasilitasi	%	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	2.547.999.280	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Hukum
	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Peraturan Perundang- Undangan yang dipublikasikan	dokumen	3	3	3	3	3	500.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Hukum
	Program : PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.440.430.162	APBD	Kota Payakumbuh	Satpol PP dan Damkar
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.440.430.162	APBD	Kota Payakumbuh	Satpol PP dan Damkar
	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	50 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	3.440.430.162	APBD	Kota Payakumbuh	Satpol PP dan Damkar
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
	Program perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	134.086.500	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	rasio	0,250	0,250	0,249	0,248	0,247				
	Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Persentase layanan korban kekerasan perempuan yang dilayani melalui Mediko Legal	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	34.087.500	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah	14	14	14	14	14	34.087.500	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persentase layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99.999.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	jumlah	40	40	40	40	40	99.999.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	134.086.500	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	rasio	0,250	0,250	0,249	0,248	0,247				
	Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Persentase layanan korban kekerasan perempuan yang dilayani melalui Mediko Legal	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	34.087.500	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah	14	14	14	14	14	34.087.500	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persentase layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99.999.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	jumlah	40	40	40	40	40	99.999.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
05.03.02	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGMC, menurut kelompok umur.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
05.04.01	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat (b) pemerintah daerah.											Sekretariat DPRD/Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,72	3,82	3,92	4,02	4,12	186.552.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang memahami konsep gender dan PPRG	jumlah	40	40	40	40	40	186.552.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah	12	12	12	12	12	186.552.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	- Nilai IKM - Nilai AKIP oleh Inspektorat.	Nilai	84,00 A	84,00 A	84,00 A	85,00 A	85,00 A	40,544,284,275	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat DPRD
	Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16.858,751,901	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat DPRD
	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD.	laporan	18	17	17	17	17	11,075,868,000	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat DPRD
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perwako, himbuan, MoU terkait perlindungan anak	jumlah	2	1	1	1	1	46.953.750	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Persentase pemanfaatan data gender dan anak oleh satuan kerja terkait	%	83,00	85,00	85,00	90,00	95,00	46.953.750	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Jumlah updating data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA)	jumlah	12	12	12	12	12				
	Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	jumlah		2	2	2	2	36.723.750	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah		20	20	20	20	10.230.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.											Dinas Pertanian
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana/Bagian Hukum
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.			N I L A I								Dinas Komunikasi dan Informatika
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,72	3,82	3,92	4,02	4,12	49.887.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang memahami konsep gender dan PPRG	jumlah	40	40	40	40	40	49.887.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
		Persentase pemenuhan dokumen untuk evaluasi PUG	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Advokasi Kebijakan dan pendamping pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah	31	31	31	31	31	49.887.250	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perwako, himbuan, MoU terkait perlindungan anak	jumlah	2	1	1	1	1	46.953.750	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Persentase pemanfaatan data gender dan anak oleh satuan kerja terkait	%	83,00	85,00	85,00	90,00	95,00	46.953.750	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
		Jumlah updating data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA)	jumlah	12	12	12	12	12				
	Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	jumlah	2	2	2	2	2	36.723.750	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam	jumlah	20	20	20	20	20	10.230.000	APBD	Kota Payakumbuh	DP3AP2KB
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA												
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum	%	100,00	90,00	91,00	92,00	93,00	4.825.183.530	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupten/ Kota	Persentase Sambungan Rumah Pengguna Air Bersih	%	100,00	90,21	90,41	90,61	90,81	4.825.183.530	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Sambungan Rumah Terpasang	SR	34.107	28.760	29.110	29.460	29.810				
	Sub Kegiatan : Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik		194,10		196,00		860.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum Yang Disusun	Dokumen		1.00	1.00						
	Sub Kegiatan : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan	Panjang Perpipaan yang Dibangun	Meter	3066,00	550,00	800,00	550,00			APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik	SR		50	70	80	50	750.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
06.03.01	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Lingkungan Hidup
06.03.02	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.											Dinas Lingkungan Hidup
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Lingkungan Hidup
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Lingkungan Hidup
06.04.01	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
06.04.02	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediaannya.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Lingkungan Hidup
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Dinas Lingkungan Hidup
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.b.1.	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA												
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Bidang Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa			75	76	77	78	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan : pemantauan kebijakan sumber daya alam	jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang di susun		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub Kegiatan : koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Bidang Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan : pemantauan kebijakan sumber daya alam	jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang di susun	Dokumen	1	1	1	1	1	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub Kegiatan : koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air	Dokumen	4	4	4	4	4	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
07.01.02	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.											Bidang Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan : pemantauan kebijakan sumber daya alam	jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang di susun	Dokumen	1	1	1	1	1	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub Kegiatan : koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air	Dokumen	4	4	4	4	4	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Bidang Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : pemantauan kebijakan sumber daya alam	jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang di susun	Dokumen	1	1	1	1	1	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub Kegiatan : koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air	Dokumen	4	4	4	4	4	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Bidang Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan : pemantauan kebijakan sumber daya alam	jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang di susun	Dokumen	1	1	1	1	1	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub Kegiatan : koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air	Dokumen	4	4	4	4	4	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.											Dinas Lingkungan Hidup/Bidang Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan : pemantauan kebijakan sumber daya alam	jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang di susun	Dokumen	1	1	1	1	1	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub Kegiatan : koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air	Dokumen	4	4	4	4	4	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
7.3.1*	Intensitas energi primer.											Dinas Lingkungan Hidup/Bidang Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan : pemantauan kebijakan sumber daya alam	jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang di susun	Dokumen	1	1	1	1	1	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub Kegiatan : koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air	Dokumen	4	4	4	4	4	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara- negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.											Dinas Lingkungan Hidup/Bidang Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan : pemantauan kebijakan sumber daya alam	jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang di susun	Dokumen	1	1	1	1	1	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub Kegiatan : koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air	Dokumen	4	4	4	4	4	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)											Dinas Lingkungan Hidup/Bidang Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan : pemantauan kebijakan sumber daya alam	jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang di susun	Dokumen	1	1	1	1	1	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub Kegiatan : koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air	Dokumen	4	4	4	4	4	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
TUJUAN 8. MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA												
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.											Bidang Perekonomian
	Program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub kegiatan: koordinasi, sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah pembinaan pengawasan dan monitoring BUMD dan BLUD	kali	10	10	10	10	10	399.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
8.1.1.(a)	PDB per kapita.											Bidang Perekonomian
	Program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub kegiatan: koordinasi, sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah pembinaan pengawasan dan monitoring BUMD dan BLUD	kali	10	10	10	10	10	399.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Tidak ada dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian										Bidang Perekonomian
	Program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub kegiatan: koordinasi, sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah pembinaan pengawasan dan monitoring BUMD dan BLUD	kali	10	10	10	10	10	399.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin											Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	46,30	46,35	46,45	46,50	46,60	348.553.888	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	348.553.888	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang	3	3	3	3	3	348.553.888	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan											Dinas Koperasi dan UKM
	Program : Pengembangan UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	n/a	0,20	0,20	0,20	0,20	163.383.014	APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Kegiatan : Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi perluasan jaringan pasarnya	%	n/a	0,10	0,10	0,10	0,10	163.383.014	APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	unit usaha	80	570	80	80	80	163.383.014	APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya status usaha mikro dari non formal menjadi formal (legalitas usaha)	%	n/a	0,30	0,30	0,30	0,30	62.845.340	APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase usaha mikro yang difasilitasi legalitas usaha	%	n/a	0,20	0,20	0,20	0,20	62.845.340	APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha kewenangan kabupaten/kota	unit usaha (nb : Tahun 2022 menggunakan satuan dokumen)	1	50	50	50	50	62.845.340	APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	unit usaha	-	50	50	50	50		APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	unit usaha	-	30	30	30	30		APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
08.04.01	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.											Bidang Perekonomian/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Berkinerja Baik	%	85,00	90,50	91,00	91,50	92,00	2.357.573.304	DAU	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen HSBGN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	703.476.540	DAU	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Dokumen HSBGN yang Diterbitkan	Dokumen	4					6.630.984	DAU	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											Bidang Perekonomian
	Program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
08.04.02	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).											Bidang Perekonomian
	Program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.											Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian/Bidang Perekonomian
	Program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,23	4,03	4,03	4,03	4,03	94.153.200	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	94.153.200	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara	-	7	8	9	7	94.153.200	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tidak ada dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian										Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Tidak ada dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian										Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian/Bidang Perekonomian
	Program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Program : Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Berkualitas Baik	%	85,00	90,50	91,00	91,50	92,00	2.357.573.304	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	%	96,00					180.198.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Dibina (Disertifikasi)								APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	108.198.250	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta lomba literasi	Orang	16	120	120	120	120	108.198.250	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Sub Kegiatan : Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	38	38	40	40	42	108.198.250	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).											Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	3,98	3,92	3,95	3,97	4,00	348.000.000	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	348.000.000	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	48	116	16	16	16	348.000.000	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
08.07.01	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Tidak ada dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian										Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tidak ada dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian										Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
08.08.01	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non- fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Tidak ada dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian										Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.									APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program : Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Berkinerja Baik	Persentase	85.00	90.5	91.00	91.50	92.00	2.357.573.304	APBD	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase	96.00					180.198.000	APBD	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kali	24.00	18.00	18.00	18.00	18.00	85.000.000	APBD	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,23	4,03	4,03	4,03	4,03	94.153.200	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	94.153.200	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara		7	8	9	7	94.153.200	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait											Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,23	4,03	4,03	4,03	4,03	94.153.200	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	94.153.200			
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara		7	8	9	7	94.153.200			
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.											Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.											Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	%	80,00	80,00	80,00	80,00	81,00	251.996.280	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Rata rata lama tinggal wisatawan	hari	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata	kerjasama	7	7	7	7	7		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event kepariwisataan yang dilaksanakan	event	3	3	3	3	4	251.996.280	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	1	1	1	1	2	51.741.280	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	event	3	3	3	3	4	200.255.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	laporan	3	3	3	3	4		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.											Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	%	80,00	80,00	80,00	80,00	81,00	251.996.280	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Rata rata lama tinggal wisatawan	hari	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata	kerjasama	7	7	7	7	7		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event kepariwisataan yang dilaksanakan	event	3	3	3	3	4	251.996.280	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	1	1	1	1	2	51.741.280	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	event	3	3	3	3	4	200.255.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	laporan	3	3	3	3	4		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.											Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											Bidang Perekonomian
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.											Dinas Koperasi dan UKM/Bidang Perekonomian
	Program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Program : Pengembangan UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	%	n/a	0,20	0,20	0,20	0,20	163.383.014	APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Kegiatan : Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi perluasan jaringan pasarnya	%	n/a	0,10	0,10	0,10	0,10	163.383.014	APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Sub Kegiatan : Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	unit usaha	80	570	80	80	80		APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya status usaha mikro dari non formal menjadi formal (legalitas usaha)	%	n/a	0,30	0,30	0,30	0,30		APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase usaha mikro yang difasilitasi legalitas usaha	%	n/a	0,20	0,20	0,20	0,20	-	APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha kewenangan kabupaten/kota	unit usaha	-	50	50	50	50		APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	unit usaha	-	50	50	50	50		APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	unit usaha	-	30	30	30	30		APBD	Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.			NIHIL								Dinas Koperasi dan UKM/Bidang Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa			75	76	77	78	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub kegiatan: koordinasi, sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah pembinaan pengawasan dan monitoring BUMD dan BLUD		10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	399.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.											Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI												
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kota yang Memenuhi Standar Konstruksi dan Fungsi	%	53,68	53,56	53,93	54,31	54,68	157.078.094.696	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Jalan Kota Sesuai Kebutuhan	%	100,51	99,77	99,85	99,92	100,00	157.078.094.696	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU)	%	41,46	43,60	45,56	47,53	49,49				
		Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar	%	7,94	8,00	8,06	8,12	8,17				
		Persentase Panjang jalan yang dipelihara	%	25,4	27,37	29,33	31,29	33,26				
	Sub Kegiatan : Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah ruas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Persil	6	10	10	7	7	20.799.167.160	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Luas Lahan yang tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m ²		30,00	20,00	10,00	10,00				
	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	km		0,500	0,500	0,500	0,500	28.590.835.788	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Lampu Jalan yang Terpasang Berdasarkan Kebutuhan	%	35,81	36,88	37,95	39,02	40,09				
		Jumlah Pengadaan Lampu Jalan yang Dilaksanakan	Unit	165	60	60	60	60				
		Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Dipelihara	Unit	650	650	650	650	650				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Panjang Trotoar yang Dibangun	m	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00				
		Panjang Trotoar yang Dipelihara	m	64,00	65,00	65,00	65,00	65,00				
	Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Baru yang Dibangun	km	0,323	0,250	0,200	0,200	0,200	7.714.679.580	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	km		1,10	0,95	0,95	0,95	18.811.209.350	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Bahu Jalan yang Ditingkatkan	km	1,973								
		Panjang Pelebaran Jalan yang Dilakukan	km	1,296								
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	km	3,717	3,50	3,50	3,50	3,50	54.433.999.720	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	km	14,42	14,00	14,00	14,00	14,00	10.569.999.890	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan yang Disusun	Dokumen	3					11.073.486.170	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Jembatan yang Dibangun	Unit	2	1	1	1					
			m			50,00	50					
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Unit	4	4	4	4	4	1.058.199.780	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			m		32,00	32,00	32,00	32,00				
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kota yang Memenuhi Standar Konstruksi dan Fungsi	%	53,68	53,56	53,93	54,31	54,68	157.078.094.696	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Jalan Kota Sesuai Kebutuhan	%	100,51	97,77	99,85	99,92	100,00	157.078.094.696	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU)	%	41,46	43,60	45,56	47,53	49,49				
		Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar	%	7,94	8,00	8,06	8,12	8,17				
		Persentase Panjang jalan yang dipelihara	%	25,40	27,37	29,33	31,29	33,26				
	Sub Kegiatan : Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/ Jembatan	dokumen		2	2	2	2	1.133.038.680	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Jalan yang Dilakukan Survey Kondisi	km	254,678								
		Jumlah Jembatan yang Dilakukan Survey Kondisi	unit	73								
	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	Persentase Jalan Lingkung Kondisi Baik	Persentase	45.00	45.28	46.79	48.27	49.67	32.624.456.243	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jalan Lingkung Sesuai Kebutuhan	Persentase	74.86	76.48	78.72	80.65	82.56	32.624.456.243	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan		5.00	5.00	5.00	5.00	46.365.461.270	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Jalan Lingkung yang Dibangun	Meter	5342.00	4000.00	3800.00	3900.00	3850.00				
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.											Dinas Perhubungan
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.											Dinas Perhubungan
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.											Dinas Perhubungan
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.											Dinas Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.											Dinas Perhubungan
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.											Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	%	3,35	0,10	0,10	0,10	0,10	2.943.265.196	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata	%	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	%	83,33	66,67	66,67	66,67	66,67	2.943.265.196	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri yang menerapkan Standardisasi Mutu Produk	%	2,75	2,40	2,50	2,60	2,70	104.919.080	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang difasilitasi	IKM	6	6	6	6	6	104.919.080	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	1	1	1	104.919.080	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.											Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program : Perekonomian Dan Pembangunan	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	nilai		75,00	76,00	77,00	78,00		APBD	Kota Payakumbuh	Dalminbang (Sekretariat Daerah)
	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		APBD	Kota Payakumbuh	Dalminbang (Sekretariat Daerah)
		Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan	kali	2	4	4	4	4				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	1	1	1	1	1.125.249.820,00	APBD	Kota Payakumbuh	Dalminbang (Sekretariat Daerah)
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	%	3,35	0,10	0,10	0,10	0,10	2.943.265.196	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata	%	60,00	20	20	20	20				
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	%	83,33	66,67	66,67	66,67	66,67	2.943.265.196	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri yang menerapkan Standardisasi Mutu Produk	%	2,75	2,4	2,5	2,6	2,7	104.919.080	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang difasilitasi	IKM	6	6	6	6	6	104.919.080	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	1	1	1	104.919.080	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.											Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	%	3,35	0,10	0,10	0,10	0,10	2.943.265.196	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata	%	60,00	20	20	20	20				
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	%	83,33	66,67	66,67	66,67	66,67	2.943.265.196	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.											Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	%	3,35	0,10	0,10	0,10	0,10	2.943.265.196	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata	%	60,00	20	20	20	20				
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	%	83,33	66,67	66,67	66,67	66,67	2.943.265.196	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri yang menerapkan Standardisasi Mutu Produk	%	2,75	2,4	2,5	2,6	2,7	104.919.080	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang difasilitasi	IKM	6	6	6	6	6	104.919.080	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	1	1	1	104.919.080	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit											
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	%	3,35	0,10	0,10	0,10	0,10	2.943.265.196	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata	%	60,00	20	20	20	20				
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	%	83,33	66,67	66,67	66,67	66,67	2.943.265.196	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri yang menerapkan Standardisasi Mutu Produk	%	2,75	2,4	2,5	2,6	2,7	104.919.080	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang difasilitasi	IKM	6	6	6	6	6	104.919.080	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	1	1	1	104.919.080	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur											
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri yang menerapkan Standardisasi Mutu Produk	%	2,75	2,4	2,5	2,6	2,7	104.919.080	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang difasilitasi	IKM	6	6	6	6	6	104.919.080	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	1	1	1	104.919.080	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.											Dinas Lingkungan Hidup
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.											Dinas Lingkungan Hidup
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	1.004.216.562	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	652.990.050	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen penelitian bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	652.990.050	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa,dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.											
	Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	1.004.216.562	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian bidang sosial dan kependudukan yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	432.999.500	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	dokumen	1	1	1	1	1	432.999.500	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Dinas Pendidikan
	Program : Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88		APBD	Kota	BKPSDM
	Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		APBD	Kota Payakumbuh	BKPSDM
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	1	1	1	1	1	24.997.800	APBD	Kota Payakumbuh	BKPSDM
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.											Bidang Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	kegiatan : pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	sub kegiatan: koordinasi, sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah pembinaan pengawasan dan monitoring BUMD dan BLUD	kali	10	10	10	10	10	399.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi											Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	%	3,35	0,10	0,10	0,10	0,10	2.943.265.196	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata	%	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		83,33	66,67	66,67	66,67	66,67	2.943.265.196	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1		APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri yang menerapkan Standardisasi Mutu Produk	%	2,75	2,40	2,50	2,60	2,70	104.919.080	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang difasilitasi	IKM	6	6	6	6	6	104.919.080	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	1	1	1	1	104.919.080	APBD	Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	N I L A I										Dinas Komunikasi dan Informatika
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGERA												
10.1.1*	Rasio Gini.											Bidang Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa			75	76	77	78	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	sub kegiatan: koordinasi, sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah pembinaan pengawasan dan monitoring BUMD dan BLUD		10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	399.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											Dinas Sosial
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.											Dinas Sosial
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.											Dinas Sosial
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.											Dinas Sosial
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.											Bidang Perekonomian/Dinas Sosial
	program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.											Dinas Sosial
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.											Dinas Sosial
10.03.01	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.											Bagian Hukum
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).											Bagian Hukum

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/ berkembang dengan tarif nol persen.											Bidang Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	sub kegiatan: koordinasi, sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah pembinaan pengawasan dan monitoring BUMD dan BLUD	kali	10	10	10	10	10	399.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).											Badan Keuangan Daerah
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.											Badan Keuangan Daerah/Bidang Perekonomian
	program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN												
11.01.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,27	96,95	97,24	97,53	97,81	4.987.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan Kualitasnya	%	11	76,53	81,19	84,31	86,54	4.987.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	1	1	1	1	1	100.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,27	6361	5761	5161	4561	4.987.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan Kualitasnya	%	11,00	76,53	81,19	84,31	86,54	4.987.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	15	100	100	100	100	4.887.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Per	%	-	22,55	23,98	25,41	26,84	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman	%	-	7,53	15,06	22,58	30,11	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	126.999.720	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Per	%	-	22,55	23,98	25,41	26,84	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman	%	-	7,53	15,06	22,58	30,11	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	119.999.920	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Per	%	-	22,55	23,98	25,41	26,84	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman	%	-	7,53	15,06	22,58	30,11	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah tangga yang terlayani penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	1000	900	900	950	1000	1.790.940.732	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Per	%	-	22,55	23,98	25,41	26,84	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman	%	-	7,53	15,06	22,58	30,11	7.892.534.052	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	633	500	500	500	500	5.854.593.680	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau									APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum	%	100,00	90,00	91,00	92,00	93,00	4.825.183.530	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabuapten/ Kota	Persentase Sambungan Rumah Pengguna Air Bersih	%	100,00	90,21	90,41	90,61	90,81	4.825.183.530	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Sambungan Rumah Terpasang	SR	34.107	28.760	29.110	29.460	29.810				

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Sub Kegiatan : Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik		194,10		196,00		860.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum Yang Disusun	Dokumen		1	1						
	Sub Kegiatan : Peningaktan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan	Panjang Perpipaan yang Dibangun	m	3066,00	550,00	800,00	550,00		2.247.473.230	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik	SR		50	70	80	50	750.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,27	96,95	97,24	97,53	97,81	4.987.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan Kualitasnya	%	11,00	76,53	81,19	84,31	86,54	4.987.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	1	1	1	1	1	100.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program : Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,27	6361	5761	5161	4561	4.987.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan Kualitasnya	%	11,00	76,53	81,19	84,31	86,54	4.987.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	15	100	100	100	100	4.887.332.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11.02.01	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas											Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/Dinas Perhubungan
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik											Dinas Perhubungan
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum											Dinas Perhubungan
	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	-	82%	84%	86%	88%	1.430.850.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perhubungan
	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	%	-	70%	72%	74%	76%	300.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perhubungan
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah laporan masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	laporan	-	6	6	6	6	300.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perhubungan
11.03.01	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk											Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk											Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.03.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase	36.18	8.89	18.89	26.67	36.18	8.007.459.116	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang ditetapkan dan dievaluasi	Persentase	100.00	33.33	50.00	66.67	83.33	1.455.702.840	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen		3	3	3	3	484.992.540	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Media Informasi yang Digunakan sebagai Sarana Sosialisasi		3								Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Aturan dan Kebijakan Penataan Ruang yang Disampaikan		3								Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen RTR yang Disusun	%		0,00	50,00	0,00	100,00	1.872.679.804	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Penerbitan KRK/AP yang sesuai dengan Permohonan										Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Ketersediaan Dokumen dan Regulasi Penataan Bangunan dan Lingkungan										Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Peningaktan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Advice Planning yang Diterbitkan		450.00					103.377.314	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten / kota	berita acara	1	1	1	1	1	751.057.450	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
11.04.01	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)											Bagian Perekonomian
	program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)											Bagian Perekonomian
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.05.02	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.06.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota											Dinas Lingkungan Hidup/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya											Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	-	95,34	-	-	-	25.841.394.797	APBD	Kota Payakumbuh	DLH
	Kegiatan :Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	-	95,34	-	-	-	25.841.394.797	APBD	Kota Payakumbuh	DLH
	Sub Kegiatan : Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	- Terpeliharanya sarana dan prasarana Bank Sampah - Terpeliharanya sarana dan prasarana TPST	Bank Sampah TPST	2 6	2 6	2 6	2 6	2 6	100.895.425	APBD	Kota Payakumbuh	DLH
	Sub Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi program pengelolaan persampahan, berfungsinya TPST dan berjalannya program Zero Waste di Kota Payakumbuh	Kelurahan	10	10	10	10	10	515.512.700	APBD	Kota Payakumbuh	DLH
	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang disediakan	Unit		1					APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Prasarana Pengolahan Persampahan	Persentase		66,67	88,89	88,89	100,00	3.115.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Pengembangna Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabuapten/ Kota	Persentase Penyediaan Prasarana Tempat Pengolahan Akhir Sampah	Persen		33,00	45,00	100	75,00	3.115.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah Sementara	Persen		75,00	88,00	88	100				
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola									APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	-	95,34	-	-	-	25.841.394.797	APBD	Kota Payakumbuh	DLH
	Kegiatan :Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	-	95,34	-	-	-	25.841.394.797	APBD	Kota Payakumbuh	DLH
	Sub Kegiatan : Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	- Terpeliharanya sarana dan prasarana Bank Sampah - Terpeliharanya sarana dan prasarana TPST	Bank Sampah TPST	2 6	2 6	2 6	2 6	2 6	100.895.425	APBD	Kota Payakumbuh	DLH
	Sub Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi program pengelolaan persampahan, berfungsinya TPST dan berjalannya program Zero Waste di Kota Payakumbuh	Kelurahan	10	10	10	10	10	515.512.700	APBD	Kota Payakumbuh	DLH
11.06.02	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)											Dinas Lingkungan Hidup
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10											Dinas Lingkungan Hidup
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara											Dinas Lingkungan Hidup
11.07.01	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.											Dinas Lingkungan Hidup
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua											Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH Publik	%	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	7.509.211.680	APBD	Kota Payakumbuh	DLH

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	- Persentase jenis spesies tanaman (flora) lokal yang dikelola - Persentase RTH Kota yang dipelihara dan ditata	%	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	7.509.211.680	APBD	Kota Payakumbuh	DLH
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- Jumlah penataan dan pemeliharaan RTH dan taman kota - Jumlah penataan dan pemeliharaan RTH dan taman kota/RTH jalur hijau jalan - Jumlah penataan dan pemeliharaan ruas jalan	Taman kota orag THL ruas jalan	8 55 10	8 55 10	8 55 10	8 55 10	8 55 10	7.509.211.680	APBD	Kota Payakumbuh	DLH
11.07.02	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
	Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH Publik	%	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	7.509.211.680	APBD	Kota Payakumbuh	DLH
	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	- Persentase jenis spesies tanaman (flora) lokal yang dikelola - Persentase RTH Kota yang dipelihara dan ditata	%	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87	7.509.211.680	APBD	Kota Payakumbuh	DLH
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- Jumlah penataan dan pemeliharaan RTH dan taman kota - Jumlah penataan dan pemeliharaan RTH dan taman kota/RTH jalur hijau jalan - Jumlah penataan dan pemeliharaan ruas jalan	Taman kota orag THL ruas jalan	8 55 10	8 55 10	8 55 10	8 55 10	8 55 10	7.509.211.680	APBD	Kota Payakumbuh	DLH
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai Rencana Tata Ruang	%	36,18	8,89	18,89	26,67	36,18	8.007.459.116	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang ditetapkan dan dievaluasi	%	100,00	33,33	50,00	66,67	83,33	1.455.702.840	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen		3	3	3	3	484.992.540	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Media Informasi yang Digunakan sebagai Sarana Sosialisasi										
		Jumlah Aturan dan Kebijakan Penataan Ruang yang Disampaikan	Dokumen	3								
	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen RTR yang Disusun	%		-	50,00	-	100,00	1.872.679.804	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Penerbitan KRK/AP yang sesuai dengan Permohonan										
		Persentase Ketersediaan Dokumen dan Regulasi Penataan Bangunan dan Lingkungan										
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Dokumen		-	3	-	3	1.900.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Aturan Hukum yang Mengatur Perencanaan Tata Ruang										
		Jumlah Blad RTRK yang dimutakhirkan										
		Jumlah Dokumen RTBL yang Disusun										
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana											Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.c.1	-											
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Penataan Banguann Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Representatif	%	79,38	84,18	85,15	86,08	87,02	30.778.201.639	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Penyediaan Sarana Perkantoran Tertentu yang Representatif	%	83,15	80,14	81,02	81,9	82,84				
	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendidikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Permohonan Izin Bangunan yang Diterbitkan	%	92	98,55	98,6	98,65	98,65	30.778.201.639	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase IMB yang direkomendasikan	%									
		Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memiliki SLF	%	4	0,74	0,74	1,04	1,04				
		Persentase Pelaksanaan Pembangunan Sarana Ibadah Skala Kota	%	20,00								
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pera n Tenaga Ahli i Bangunan (TABG), Pendataa n Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen		600	600	600	600	3.254.813.598	DAU	Payakumbuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Pertimbangan Teknis Perencanaan Bangunan Yang Dikeluarkan (Leges Gambar)	rekomendasi	350								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Rekomendasi IMB yang Diberikan										Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Rekomendasi Perencanaan Bangunan Gedung yang Dikeluarkan TABG										Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN												
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											Bagian Perekonomian
	program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
12.02.01	Jejak material (material footprint)											Bagian Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	sub kegiatan: koordinasi, sinkroniasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah pembinaan pengawasan dan monitoring BUMD dan BLUD	kali	10	10	10	10	10	399.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
12.02.02	Konsumsi material domestik (domestic material consumption)											Bagian Perekonomian
	program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
12.03.01	(a) Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b) Indeks sampah makanan (Food waste index)											Bagian Perekonomian/Dinas Lingkungan Hidup
	program: perekonomian dan pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	kegiatan: pelaksanaan kebijakan perekonomian	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	849.998.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	sub kegiatan: pengendalian dan distribusi perekonomian	jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	laporan	1	1	1	1	1	450.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan											Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.											Dinas Lingkungan Hidup
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri											Dinas Lingkungan Hidup
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline											Dinas Lingkungan Hidup
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.											Dinas Lingkungan Hidup
12.05.01	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang											Dinas Lingkungan Hidup
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.											Dinas Lingkungan Hidup
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya											Dinas Lingkungan Hidup
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.											Dinas Lingkungan Hidup
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi											Dinas Lingkungan Hidup
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah											Bagian PBJ dan Dalbang/Dinas Lingkungan Hidup
12.7.1(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa											Bagian PBJ dan Dalbang/Dinas Lingkungan Hidup
12.08.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru (d) asesmen siswa.											Dinas Pendidikan
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga/Dinas Lingkungan Hidup/Dinas Pendidikan
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)											Bagian Perekonomian
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	indeks		75,00	76,00	77,00	78,00	899.997.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Kegiatan : pemantauan kebijakan sumber daya alam	Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang di susun	dokumen	1	1	1	1	1	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
	Sub Kegiatan : koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air	Dokumen	4	4	4	4	4	49.999.850	APBD	Kota Payakumbuh	Setdako Bagian Perekonomian
12.b.1	Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan											Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga/Dinas Lingkungan Hidup
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development											Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga/Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik	%	50,00	50,00	50,00	50,00	55,00	3.797.334.588	APBD	Kota Payakumbuh	
		Jumlah pengembangan destinasi pariwisata	ow	1	1	1	1	1				
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pariwisata unggulan yang dikembangkan - Persentase pemeliharaan objek wisata sesuai standar kelayakan	ow %	4 80,00	4 80,00	4 80,00	4 80,00	4 80,00	3.797.334.588	APBD	Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh
	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,	lokasi	10	10	10	10	10	376.401.400	APBD	Kota Payakumbuh	
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	unit	3	3	3	3	3	3.420.933.188	APBD	Kota Payakumbuh	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi	fasilitasi	1	1	1	1	1	366.722.760	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1	1	1	366.722.760	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	orang	30	30	30	50	50	84.017.960	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
14.06.01	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha											Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian/Dinas Koperasi dan UKM
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Data Perusahaan IKM yang masuk SIINAS	IKM	1	1	1	1	1	4.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan informasi industri	%	-	33,33	33,33	33,33	33,33	4.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Dokumen	-	1	1	1	1	4.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program : Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Usaha Perdagangan yang Memiliki Izin Usaha	%	25,00	27,00	29,00	31,00	31,00	75.041.106	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Kegiatan : Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IU TM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	n/a	35,00	45,00	55,00	65,00	75.041.106	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Sub Kegiatan : Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	lapran		1					APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Mematuhi SOP	%	90,00	90,00	91,00	92,00	0,93	3.022.757.352	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase Sarana dan Prasaranan Pasar/Pertokoan dalam Kondisi Baik	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan	unit	4	4	4	4	4	3.022.747.352	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	unit	4	4	4	4	4	3.022.747.352	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat diwilayah Kerjanya	Persentase Pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Pasar	%	5,00	5,00	4,00	3,00	2,00	873.946.840	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase Pelanggaran Perda No. 13 Tahun 2016 Tentang Pasar Tradisional	%	5,00	5,00	4,00	3,00	2,00				
		Persentase Pelanggaran Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	%	5,00	5,00	4,00	3,00	2,00				
		Persentase Pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima	%	5,00	5,00	4,00	3,00	2,00				
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan dan dibina	orang	60	60	60	60	60	873.946.840	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Program : Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	%	20,00	20,00	25,00	27,00	30,00	237.621.119	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Potensi Alat UTTP yang dilakukan Tera Ulang	Unit	1.750	1.750	1.760	1.780	1.800	237.621.119	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	%	80,00	80,00	80	80	80	237.621.119	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Koperasi dan UKM
14.07.01	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)											Dinas Pertanian
14.a.1	Proporsi dari total pengeluaran untuk penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbanan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	1.004.216.562	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	652.990.050	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen penelitian bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disusun	dokumen	1	1	1	1	1	652.990.050	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil											Bagian Hukum
	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Nilai LPPD - Indeks Reformasi Hukum	nilai	3,1600 -	3,1700 72,00	3,1800 73,00	3,1900 74,00	3,2000 75,00	12.603.864.775	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Hukum

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	- Persentase Rancangan Produk Hukum yang di harmonisasi - Persentase Koordinasi yang Difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.184.999.010	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Hukum
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang diharmonisasi dan difasilitasi	Produk Hukum	3	3	3	3	3	399.999.280	APBD	Kota Payakumbuh	Bagian Hukum
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan											
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi											
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)											Bagian Hukum
TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELLOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEJARAGAMAN HAYATI												
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan											
15.01.02	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya											
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)											
15.02.01	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari											
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju											
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan											
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi											
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan											
15.5.1*	Indeks Daftar Merah (Red-list index)											
15.6.1*	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata											
15.07.01	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal											
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											
15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)											
15.09.01	(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis (b) integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi											
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis											
15.a.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati											
15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatisecara berkelanjutan											
15.b.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati											
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan											
15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap											
15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT ANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBAGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN												
16.01.01	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16.01.02	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16.01.03	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
16.02.01	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
16.02.03	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18- 29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18- 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
16.03.01	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi											Bagian Hukum
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.											Bagian Hukum
16.03.02	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Persentase masyarakat yang mendapat sosialisasi kebangsaan	%	25,06	100,00	100,00	100,00	100,00	5.387.330.140	APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di bidang ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang diberikan sosialisasi wawasan kebangsaan	orang	100	120	120	120	120	5.387.330.140	APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Selarrah Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi, Forum Pembauran dan Bela Negara yang dilaksanakan	kali	3	3	3	3	3		APBD	Kota Payakumbuh	
	Program :Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan konflik yang terjadi ditengah masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.976.628.252	APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti	kasus	10	10	10	10	10	1.976.628.252	APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rapat Tim PKS, Pengamanan Lebaran dan Akhir Tahun	kali	20	20	20	20	20		APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rapat tim FKDM dan TKDD	kali	2	6	6	6	6		APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/Kota	jumlah fasilitasi kegiatan forkopimda	kali	12	12	12	12	12		APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
16.03.03	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.											
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)											Bagian Hukum
16.04.01	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
16.04.02	Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang kompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
16.05.01	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/ Inspektorat
	Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Gratifikasi yang ditindaklanjuti di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	387.200.000	APBD	Kota Payakumbuh	Inspektorat
	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Gratifikasi yang ditindaklanjuti di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	387.200.000	APBD	Kota Payakumbuh	Inspektorat
	Sub kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Persentase Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	257.200.000	APBD	Kota Payakumbuh	Inspektorat
16.05.02	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.											Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.											Badan Keuangan Daerah
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.											Badan Keuangan Daerah
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bagian Organisasi
	Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Gratifikasi yang ditindaklanjuti di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	387.200.000	APBD	OTA PAYAKUMBUH	INSPEKTORAT
	kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Gratifikasi yang ditindaklanjuti di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	387.200.000	APBD	OTA PAYAKUMBUH	INSPEKTORAT
	sub kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	31	31	31	31	31	130.000.000	APBD	KOTA PAYAKUMBUH	INSPEKTORAT
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,85	83,35	83,85	84,35	84,85	699.804.900	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat Daerah
		Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A				
	Kegiatan : Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai	39,09%	39,09%	39,09%	39,09%	39,09%	699.804.900	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	2	2	2	2	2	699.804.900	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	5	5	5	5	5	61.468.000	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	6	6	6	6	6	579.844.750	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B											Bagian Organisasi/Inspektorat
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,85	83,35	83,85	84,35	84,85	699.804.900	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat Daerah
		Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A				
	Kegiatan : Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai	39,09%	39,09%	39,09%	39,09%	39,09%	699.804.900	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	2	2	2	2	2	699.804.900	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat Daerah
16.06.02	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.											Bagian Organisasi
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,85	83,35	83,85	84,35	84,85	1.000.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat Daerah

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
		Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A				
	Kegiatan : Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai	39,09%	39,09%	39,09%	39,09%	39,09%	1.000.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	laporan	1	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat Daerah
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.											Bagian Organisasi
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,85	83,35	83,85	84,35	84,85	1.000.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat Daerah
		Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A				
	Kegiatan : Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai	39,09%	39,09%	39,09%	39,09%	39,09%	1.000.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	laporan	1	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Sekretariat Daerah
16.07.01	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.											Bagian Pemerintah/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program : Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88		APBD	Kota Payakumbuh	BKPSDM
	Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		APBD	Kota Payakumbuh	BKPSDM
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	1	1	1	1	1	24.997.800	APBD	Kota Payakumbuh	BKPSDM
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
16.07.02	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase parpol yang aktif	%	90,64	90,64	90,64	90,64	90,64	4.879.060.042	APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah laporan parpol yang dievaluasi dan terverifikasi sesuai aturan yang berlaku	laporan	10	10	10	10	10	4.879.060.042	APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah bantuan kepada partai politik	partai	10	10	10	10	10		APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
		jumlah sosialisasi peraturan tentang politik	kali	2	2	2	2	2				
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah monitoring yang dilakukan	indeks	15	12	12	12	12		APBD	Kota Payakumbuh	Kesbangpol
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
16.08.01	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara- negara berkembang di Organisasi Internasional.											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
16.8.1.(a.)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.											Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program : Pelayanan Pencatatan Sipil	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	%	95,00	98,00	99,00	99,00	99,00	1.046.543.264	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	%	95,00	98,00	99,00	99,00	99,00	1.046.543.264	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	jumlah akte yang diterbitkan	dokumen	4	4	4	4	4	1.046.543.264	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[illegible]

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
17.02.01	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara- negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/ Komite Bantuan Pembangunan.											Badan Keuangan Daerah
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB											Badan Keuangan Daerah
17.03.01	Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment/ FDI</i>), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.											Badan Keuangan Daerah/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.03.02	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.											Badan Keuangan Daerah/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	milyar	203,8	220	225	230	240	1.200.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan pemberian fasilitas/insentif yang diberikan	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	700.000.000		Kota Payakumbuh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen	1	1	1	1	1	500.000.000		Kota Payakumbuh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	kegiatan usaha	1	1	1	1	1	200.000.000		Kota Payakumbuh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase pembuatan peta potensi investasi yang telah divalidasi	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	500.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	500.000.000		Kota Payakumbuh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (<i>dalam US dollars</i>) terhadap PDB.											Badan Keuangan Daerah/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.											Badan Keuangan Daerah
17.05.01	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara- negara berkembang termasuk negara- negara kurang berkembang											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Jumlah Investor	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	250.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	250.000.000		Kota Payakumbuh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	250.000.000		Kota Payakumbuh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.06.01	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya			N I H I L								Dinas Komunikasi dan Informatika
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) terhadap total rumah tangga			N I H I L								Dinas Komunikasi dan Informatika
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Kecamatan yang terjangkau jaringan serat optik	Kecamatan	5	5	5	5	5	20.000.000			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program : Aplikasi Informatika	Persentase pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik							11.399.652.955			
	kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	85,00	87,00	90,00	92,00	93,00	7.966.440.003			
	sub kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9.129.242.000			
17.07.01	Total jumlah dana untuk negara-negara berkembang untuk empromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.			N I H I L								Dinas Komunikasi dan Informatika
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Jumlah OPD	OPD	31	31	31	31	31	20.000.000			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program : Aplikasi Informatika	Persentase pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik							11.399.652.955			
	kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	85,00	87,00	90,00	92,00	93,00	7.966.440.003			

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	sub kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9.129.242.000			
17.09.01	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara- Selatan, Selatan- Selatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang											
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST											
17.9.1.(b)	Jumlah program/ kegiatan Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular											
17.10.01	Rata-rata tarif terbobot dunia <i>Free Trade Agreement (FTA)</i> .											
17.10.1 (a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati											
17.11.01	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.											
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas											
17.12.01	Rata-rata tarif terbobot yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.											
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.											
17.14.01	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.											
17.15.01	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.											
17.16.01	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.											
17.17.01	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).											
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.											
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).											
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.											
17.18.01	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs											Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program : Penyelenggaraan Statistik Sekotral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	180.350.403			
	kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	180.350.403			
	sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	5	5	5	5	5	180.350.403			
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Jumlah OPD yang menggunakan data BPS sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	256.529.500			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Dinas Komunikasi dan Informatika
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	N I L A I										Dinas Komunikasi dan Informatika
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisa data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	masukan	21	21	21	21	21	90.000.000	APBD	Kota Payakumbuh	Bappeda
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.											
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.											
17.19.01	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.											
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.											
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.											
17.19.02	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.											
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.											
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (vital Statistics Register)											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN TPB/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG			2022	2023	2024	2025	2026				
	Program : Pelayanan Pencatatan Sipil	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	%	95,00	98,00	99,00	99,00	99,00	1.046.543.264	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	%	95,00	98,00	99,00	99,00	99,00	1.374.851.718	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Kegiatan : Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen Pelaporan peristiwa penting	jumlah akte yang diarsipkan	dokumen	4	4	4	4	4	91.615.000	APBD	Kota Payakumbuh	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Kegiatan untuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) LUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DI											
	1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim.											
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS ditingkatkan kapasitas	%	25	30	40	50	55	2.222	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan	%	100	100	100	100	100	2.191	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	24,00	25,00	30,00	34,00	35,00	2.071	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	32	32	32	48	48	1560	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang telah dibina	Lembaga	3	3	3	4	4	175,5	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terdaftar	Lembaga	2	2	2	2	2	80	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang dibina	Perusahaan	15	20	20	30	30	145,5	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat produktifitas tenaga kerja daerah	Nilai	4	4	4	4	4	110	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga	%	82,00	85,00	90,00	95,00	100	1.661	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen yang diterbitkan	Dokumen	1	1	0	0	0	210	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen perencanaan kawasan permukiman yang disusun	Dokumen	1	2	2	2	1	216	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah didalam kawasan kumuh yang ditangani	Unit	5	20	20	20	20	1235	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	2.250	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyaluran bantuan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti		100	100	100	100	100	1.315	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial		20	20	20	20	20	903,9	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	76,999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	100	100	100	100		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	skor	81,50	82,50	82,50	84,50	84,50	3.462	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
		Kegiatan :											
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	koefesien of varian harga pangan pokok di tigkat konsumen kecil	%	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	488	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	ton	2	2	2	2	2	450	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi pangan per kapita per tahun	kg/kap/th	2150	2150	2150	2150	2150	3.370	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Nagari/Desa yang aktif dalam melakukan pemuktahiran DTKS	%	85	90	100	100	100	1,804	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang terpelihara	%	5,8	5,8	6	6	6	110	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang dikelola	%	100	100	100	100	100	1.670			
			Persentase Peningkatan Keberfungsian sosial PPKS	%	40	40	45	45	50		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, pemberdayaan serta perlindungan dan jaminan sosial	%	40	45	45	50	50				
1	1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
		Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga		82,00	85,00	90,00	95,00	100	1,661	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen yang diterbitkan	Dokumen	1	1	0	0	0	210	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen perencanaan kawasan permukiman yang disusun	Dokumen	1	2	2	2	1	216	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah didalam kawasan kumuh yang ditangani	Unit	5	20	20	20	20	1235	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS ditingkatkan kapasitas	%	25	30	40	50	55	2,222	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan	%	100	100	100	100	100		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	2.250	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			Persentase PPKS lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar panti yang mendapat jaminan sosial	%	58,00	63,00	66,00	70,00	75,00			Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyaluran bantuan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti		100	100	100	100	100	1315,1	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial		20	20	20	20	20	903,9	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Nagari/Desa yang aktif dalam melakukan pemuktahiran DTKS	%	85	90	100	100	100	1,804	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang terpelihara	%	5,8	5,8	6	6	6	110	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang dikelola	%	100	100	100	100	100	1.670			
			Persentase Peningkatan Keberfungsian sosial PPKS	%	40	40	45	45	50		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, pemberdayaan serta perlindungan dan jaminan sosial	%	40	45	45	50	50				
		Program Penataan Desa	Persentase peningkatan sta-tus Nagari/Desa mandiri	%	1	2	2	2	2	2,034	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
			Jumlah desa mandiri	Jmlh	12	15	18	21	24		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
			Persentase Nagari/Desa ya-ng dilaksanakan penataan	%	40	50	60	70	80		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
		Kegiatan :											
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Nag/Desa yang Menyelenggarakan Penataan Desa	Nagari	9	18	36	0	0	2.034	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
			Tingkat penurunan sengketa adat	%	16	13	10	7	5		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
			Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	%	10	10	10	10	10		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju	%	5	5	5	5	5	1.600	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Kecamatan
		Kegiatan :											
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan nagari/desa	%	85	90	95	95	100	271.674.300	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Kec. Kamang Baru
			Nilai INdek Kepuasan Masyarakat	%	87	89	90	93	95	0			
			1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	50	30	20	10	10	0			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan nagari	%	100	100	100	100	100	281	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Kec. Tanjung Gadang
			Persentase Peningkatan Nilai IKM	%	76	78	80	83	85				
			Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100				
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan nagari	%	100	100	100	100	100	295	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Kec. Lubuk Tarok
			persentase peningkatan nilai IKM	%	82	82	82	82	82	-			
			. Persentase penurunan potensi konflik	%	4	3	2	1	0	-			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan nagari	%	90	95	96	98	100	634	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Kec. Sijunjung
			persentase peningkatan nilai IKM	%	75	80	85	90	95	-			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan	1	1	1	1	1	302	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Kec. IV Nagari
			Persentase Peningkatan Nilai IKM	%	25	20	15	10	5	0			
			Persentase Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	25	20	15	10	5	0			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan nagari	%	100	100	100	100	100	512	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Kec. Koto VII
			Persentase Peningkatan Nilai IKM	%	87	89	90	93	95	-			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan nagari	%	85	90	90	95	100	641			Kec. Sumpur Kudus
			persentase peningkatan nilai IKM	%	83	85	88	89	90	-			

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan nagari	%	80	85	90	95	97	903			Kec. Kupitan
			persentase peningkatan nilai IKM	%	75	80	85	90	100	-			
2	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	76,999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	%	100	100	100	100	100				Dinas Kesehatan
			Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100				Dinas Kesehatan
			Cakupan layanan keseha-tan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	100	100	100				Dinas Kesehatan
			Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun menda-ptakan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100				Dinas Kesehatan
			Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100				Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100				Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar	%	100	100	100	100	100				Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kese-hatan penderita TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100				Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kese-hatan penderita ODGJ sesuai standar	%	100	100	100	100	100				Dinas Kesehatan
			Persentase fasilitas kese-hatan yang sarana dan prasarana sesuai standar	%	88	95	98	100	100				Dinas Kesehatan
			Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	%	81,00	85,00	90,00	100	100				Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
3	1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.											
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan ya-ng mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Kete-nagakerjaan	%	100	100	100	100	100	849	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan		4 PP	5 PP	5 PP	5 PP	6 PP	320	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perselisihan hubungan industrial		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	270	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	270	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
			Tingkat pengangguran terbuka		5,00 %	4,86 %	4,74 %	4,58 %	4,00 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
			Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi		0 Nilai	0 Nilai	25 Nilai	30 Nilai	30 Nilai	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
4	1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.											
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	2.250	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyaluran bantuan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti		100	100	100	100	100	1.315	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial		20	20	20	20	20	904	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
5	1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.											
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Nagari/Desa yang aktif dalam melakukan pemuktahiran DTKS	%	85	90	100	100	100	1.804	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang terpelihara	%	5,8	5,8	6	6	6	110.200.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang dikelola	%	100	100	100	100	100	1.669.810.000			
			Persentase Peningkatan Keberfungsian sosial PPKS	%	40	40	45	45	50		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, pemberdayaan serta perlindungan dan jaminan sosial	%	40	45	45	50	50				
6	1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	76,999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
7	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	76,999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
8	1.4.1 (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	%	75,24	76,63	78,02	79,41	80,8	4,355	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
			Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,5	20,75	21	21,75	22	22	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan KIE Program Bangsa Kencana	Orang	6000	6200	6300	6500	6700	1.047	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pencapaian Kinerja PKB/PLKB	%	82	86	88	90	95	812	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	%	100	100	100	100	100	1.740	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Tingkat Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	%	100	100	100	100	100	768	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
9	1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.											
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum	%	75,00	90	100	100	100	3,742	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Kegiatan :											
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan air minum	%	75	90	100	100	100	3.742	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
10	1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.											
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan sanitasi yang layak	%	80	90	100	100	100	710	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sanitasi yang layak	%	80	90	100	100	100	710	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase penanganan kawasan kumuh	%	17,06	17,79	18,53	18,51	17,07	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase penanganan kawasan kumuh	%	17,06	17,79	18,53	18,51	17,07	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
11	1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Penduduk usia 7-12 jenjang pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	173,996	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	%	20	20	35	50	65	123.416	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SD	%	20	20	35	50	65	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SD	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SD	Sekolah	208	209	209	209	209	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SD	Sekolah	76	80	82	85	89	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SD	Sekolah	37	67	97	117	127	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	%	45	60	70	75	80	54.178	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SMP	%	50	65	75	80	85	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SMP	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SMP	Sekolah	54	54	54	54	54	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SMP	Sekolah	10	15	17	20	24	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SMP	Sekolah	4	5	7	9	12	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi	%	58,93	60,12	61,31	62,5	63,89	54.455	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Persentase peningkatan kepemilikan Ijazah pendidikan Non Formal/Kesetaraan	%	30	35	40	45	50	9.327	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2. Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	%	73	81,82	90,91	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
12	1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.											
		Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Penduduk usia 13-15 jenjang pendidikan menengah pertama	%	87,00	89,00	92,00	95,00	98,00	173,996	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	%	20	20	35	50	65	123.416	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SD	%	20	20	35	50	65	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SD	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SD	Sekolah	208	209	209	209	209	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SD	Sekolah	76	80	82	85	89	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SD	Sekolah	37	67	97	117	127	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	%	45	60	70	75	80	54.178	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SMP	%	50	65	75	80	85	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SMP	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SMP	Sekolah	54	54	54	54	54	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SMP	Sekolah	10	15	17	20	24	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SMP	Sekolah	4	5	7	9	12	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi	%	59	60	61	63	64	54.455	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Persentase peningkatan kepemilikan Ijazah pendidikan Non Formal/Kesetaraan	%	30	35	40	45	50	9.327	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2. Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	%	73	82	91	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
13	1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.											
		Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak pada anak usia 0-17 tahun	%	98	100	100	100	100	2.803	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Kegiatan :											
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Efektifitas waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil	Jam	1	1	1	1	1	1.070	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	%	100	100	100	100	100	165	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
14	1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan uta-manya listrik baik dari PLN dan non PLN.											
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio Elektrifikasi	%	68,00	72,00	75,00	78,00	80,00	3,893	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terfasilitasinya koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.580	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	persentase terfasilitasinya koordinasi kebijakan di bidang sumber daya alam	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.450	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			Nilai Sakip Pemda	nilai	68-69 nilai	70-75 nilai	76-79 nilai	80-83 nilai	84-87 nilai	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			Persentase pencapaian IKU Pemda bidang administrasi umum							-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
15	1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.											
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	25	25	30	30	30	7,881	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Kegiatan :											
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Orang	31500	32000	32500	33000	33500	1000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	200	200	200	200	4	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	200	200	200	200	200	3125	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan dasar penanggulangan bencana	%	0	25	25	25	25	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
16	1.5.1(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.											
		Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Nagari/Destana Minimal Destana Madya	Jumlah	10	10	10	10	10	7,781	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Kegiatan :											
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Orang	31500	32000	32500	33000	33500	1000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	200	200	200	200	4	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	200	200	200	200	200	3125	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan dasar penanggulangan bencana	%	0	25	25	25	25	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
17	1.5.1(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.											
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	2,167	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	1.408	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	100	100	100	729	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			Persentase Peningkatan Keberfungsian sosial PPKS	%	40	40	45	45	50	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase rehabilitasi ru-mah layak huni korban bencana	%	65	75	85	95	100	2,466	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (dokumen)	Data	5	5 Data	5 Data	5 Data	5 Data	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase rehabilitasi/pembangunan rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (%)	%	100	100 %	100 %	100 %	100 %	2.246	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang diserahkan	Unit	12	14	14	15	17	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			1. Indeks Kualitas Air	Nilai	52,7	52,80	52,90	53,2	53,8	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			2. Indeks Kualitas Udara	Nilai	89,45	89,55	89,65	90,00	90,2	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH

No. Uru t	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
			3. Indeks Tutupan Lahan	Nilai	67,33	68,77	70,20	70,50	71,00	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			1. Indeks Kualitas Air	Nilai	52,70	52,80	52,90	53,20	53,8	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			2. Indeks Kualitas Udara	Nilai	89,45	89,55	89,65	90,00	90,20	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	67,73	68,77	70,20	70,50	71,00	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%								Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			· Tanaman Pangan	%	95	95	95	95	95	1,944	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			· Hortikultura	%	90	90	90	90	90				
			· Perkebunan	%	80	80	80	80	80		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Kegiatan :											
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase bencana pertanian yang terkendali/tertanggulangi	%	85	85	85	85	85	1.944	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			PDRB per Kapita	Rp	42,03	44,92	47,47	50,46	54	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Persentase peningkatan pendapatan petani	%	5	5	5	5	5	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
	1.5.1(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.											
		Program Rehabilitasi Sosial									APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyaluran bantuan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti		100	100	100	100	100	1.315	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial		20	20	20	20	20	904	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
	1.5.1 (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana).											
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	45	55	65	75	85	7,881	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Orang	31500	32000	32500	33000	33500	1000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	200	200	200	200	3,9	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	200	200	200	200	200	3125	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan dasar penanggulangan bencana	%	0	25	25	25	25	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
19	1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.											
20		Program Penanggulangan Bencana	Indek resiko bencana	Skor	102,0	100,0	98,0	95,0	92,0	92,0		Kab.Sijunjung	BPBD
		Kegiatan :											
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Orang	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500	1.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	200	200	200	200	3,9	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	200	200	200	200	200	3.125	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan dasar penanggulangan bencana	%	0	25	25	25	25	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
	1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.											
21		Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana	%	80	90	100	100	100	7,781		Kab.Sijunjung	BPBD
		Kegiatan :											
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Orang	31500	32000	32500	33000	33500	1000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	200	200	200	200	3,9	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	200	200	200	200	200	3125	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan dasar penanggulangan bencana	%	0	25	25	25	25	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
22	1.5.3	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.											
		Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Nagari/Destana Minimal Destana Madya	%	10	10	10	10	10	7,781		Kab.Sijunjung	BPBD
		Kegiatan :											
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Orang	31500	32000	32500	33000	33500	1000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	200	200	200	200	3,9	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	200	200	200	200	200	3125	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan dasar penanggulangan bencana	%	0	25	25	25	25	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
23	1.a.1	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.											
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS ditingkat-kan kapasitas	%	25	30	40	50	55	2,222	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan	%	100	100	100	100	100	2.191	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
	1.a.2	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.											
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran be-lanja daerah	%	95	100	100	100	100	852,964	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
		Kegiatan :											
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan dan anggaran daerah	%	85	85	85	90	90	8.601	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyaluran belanja daerah	%	100	100	100	100	100	3.335	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD

[illegible]

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	0	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	DINAS KESEHATAN
			Indeks Pelayanan Publik	%	10	15	20	25	35	0	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82	83	84	85	86	0	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	DINAS KESEHATAN
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase remaja, ibu hamil dan ibu baduta yang mendapatkan KIE Stunting	%	33,71	36,52	36,52	39,33	42,13	3,478	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapatkan KIE tentang ketahanan, kesejahteraan, dan karakter keluarga		30,90 %	33,71 %	36,52 %	39,33 %	42,13 %	2.676	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Masyarakat yang berperan serta dalam Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		4 Ormas	4 Ormas	4 Ormas	4 Ormas	4 Ormas	802	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
			Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)		2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,15 Nilai	2,15 Nilai	-	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
27	2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.											
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan		13	12	11	10	10	102	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Paperi
		Kegiatan :											
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen kerentanan dan kerawanan pangan	Dokumen	3	3	3	3	3	430	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Paperi
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kerawanan pangan	Kejadian	20	20	20	20	20	500	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Paperi
28	2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan

No. Uru t	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
29	2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting	%	45	50	65	75	90	75,902	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.348	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	%	83,00	88,00	93,00	98,00	100	1,538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang diadvokasi pembentukan nagari siaga aktif	%	100	100	100	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			1. Prevalensi balita stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			2. Prevalensi balita gizi buruk	%	45	50	65	75	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun/baduta.											
30		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Cakupan ASI Eksklusif	%	90	95	100	100	100	75,902	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapatkan KIE tentang ketahanan, kesejahteraan, dan karakter keluarga		30,90 %	33,71 %	36,52 %	39,33 %	42,13 %	2.676	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Masyarakat yang berperan serta dalam Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		4 Ormas	4 Ormas	4 Ormas	4 Ormas	4 Ormas	802	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
			Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)		2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,15 Nilai	2,15 Nilai	-	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
			Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)		2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,15 Nilai	2,15 Nilai	-	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
	2.2.2	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.											
31		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita wasting	%	45	50	65	75	90	75,902	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.348	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
32	2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	76,999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
33	2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ASI Eksklusif	%	90	95	100	100	100	75,902	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.348	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	%	83,00	88,00	93,00	98,00	100	1,538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang diadvokasi pembentukan nagari siaga aktif	%	100	100	100	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			1. Prevalensi balita stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			2. Prevalensi balita gizi buruk	%	45	50	65	75	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
34	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.											
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	81,50	82,50	82,50	84,50	84,50	3,462	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
		Kegiatan :											
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	koefesien of varian harga pangan pokok di tigkat konsumen kecil	%	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	488	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	ton	2	2	2	2	2	450	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi pangan per kapita per tahun	kg/kap/th	2150	2150	2150	2150	2150	3.370	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
35	2.3.1	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).											
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	31	32	33	34	35	2,311	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang difasilitasi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.853	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang difasilitasi		0 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	80	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja yang disebarakan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	175	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang dilindungi		0 orang	23 orang	25 orang	27 orang	27 orang	160	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	43	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		35,00 %	38,00 %	41,00 %	43,00 %	45,00 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN													
39	3.2.1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan Balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	76.999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
40	3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	76.999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
41	3.2.1 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	76.999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Cakupan ASI Eksklusif	%	90	95	100	100	100		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
	3.2.1 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	76.999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan

No. Uru t	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
	3.1.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	%	100	100	100	100	100	76.999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
	3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	76.999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
	3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	%	100	100	100	100	100	76.999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
42		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
44	3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan) yang mencapai eliminasi malaria. (jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)											
45		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	%	100	100	100	100	100	76.999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	14.298	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	30.589	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%	100	100	100	100	100	1.268	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	20.294	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
47	3.3.4 (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.(Nagari= 37)											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan yang sarana dan prasarana sesuai standar Persentase	%	88	95	98	100	100	76.999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar RS Tipe C	%	100	100	100	100	100	274	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	641	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Paket	1	1	1	1	1	1.165	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Mutu Pelayanan dan pengelolaan rumah sakit	Rp/Jt	22 Jt	25	28	30	35	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	

No. Uru t	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
			Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD	Rp/Jt	18	22	25	28	30	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	
48	3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan yang sarana dan prasarana sesuai standar Persentase	%	88	95	98	100	100	76.999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar RS Tipe C	%	100	100	100	100	100	274	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	641	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Paket	1	1	1	1	1	1.165	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Mutu Pelayanan dan pengelolaan rumah sakit	Rp/Jt	22 Jt	25	28	30	35	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	
			Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD	Rp/Jt	18	22	25	28	30	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	
49	3.3.5 (a)	Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan yang sarana dan prasarana sesuai standar Persentase	%	88	95	98	100	100	76.999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Kegiatan :											
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar RS Tipe C	%	100	100	100	100	100	274	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	641	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Paket	1	1	1	1	1	1.165	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Mutu Pelayanan dan pengelolaan rumah sakit	Rp/Jt	22 Jt	25	28	30	35	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	
			Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD	Rp/Jt	18	22	25	28	30	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	
50	3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).											
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan yang sarana dan prasarana sesuai standar Persentase	%	88	95	98	100	100	76.999	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar RS Tipe C	%	100	100	100	100	100	274	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	641	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Paket	1	1	1	1	1	1.165	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Mutu Pelayanan dan pengelolaan rumah sakit	Rp/Jt	22 Jt	25	28	30	35	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	
			Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD	Rp/Jt	18	22	25	28	30	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	
51	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.											
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	%	83,00	93,00	98	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang diadvokasi pembentukan nagari siaga aktif	%	100	100	100	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			1. Prevalensi balita stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			2. Prevalensi balita gizi buruk	%	45	50	65	75	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
52	3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.											
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	%	83,00	93,00	98	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang diadvokasi pembentukan nagari siaga aktif	%	100	100	100	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			1. Prevalensi balita stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			2. Prevalensi balita gizi buruk	%	45	50	65	75	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
53	3.4.1 (b)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.											
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	%	83,00	93,00	98	100	100	1,538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang diadvokasi pembentukan nagari siaga aktif	%	100	100	100	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			1. Prevalensi balita stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			2. Prevalensi balita gizi buruk	%	45	50	65	75	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
54	3.4.2	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.											
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	%	83,00	93,00	98	100	100	1,538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang diadvokasi pembentukan nagari siaga aktif	%	100	100	100	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			1. Prevalensi balita stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			2. Prevalensi balita gizi buruk	%	45	50	65	75	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
55	3.4.2 (a)	Jumlah kabupaten/kota (Kelurahan) yang memiliki puskesmas yang menye-lenggarakan upaya kesehatan jiwa.											
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan									APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Indeks Pelayanan Publik	%	10	15	20	25	35	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) IUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82	83	84	85	86	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
56	3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.											
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	%	83,00	93,00	98	100	100	1,538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Indeks Pelayanan Publik	%	10	15	20	25	35	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82	83	84	85	86	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
57	3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.											
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	%	83,00	93,00	98	100	100	1,538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang diadvokasi pembentukan nagari siaga aktif	%	100	100	100	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			1. Prevalensi balita stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			2. Prevalensi balita gizi buruk	%	45	50	65	75	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
58	3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.											
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	%	75,24	76,63	78,02	79,41	80,8	4.355	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan KIE Program Bangsa Kencana	Orang	6000	6200	6300	6500	6700	1.047	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pencapaian Kinerja PKB/PLKB	%	82	86	88	90	95	812	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	%	100	100	100	100	100	1.740	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Tingkat Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	%	100	100	100	100	100	768	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
59	3.7.1(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.											
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	%	75,24	76,63	78,02	79,41	80,8	4.355	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan KIE Program Bangsa Kencana	Orang	6000	6200	6300	6500	6700	1.047	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pencapaian Kinerja PKB/PLKB	%	82	86	88	90	95	812	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	%	100	100	100	100	100	1.740	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Tingkat Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	%	100	100	100	100	100	768	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
60	3.7.1(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.											
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,5	20,75	21	21,75	22	4.355	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan KIE Program Bangsa Kencana	Orang	6000	6200	6300	6500	6700	1.047	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pencapaian Kinerja PKB/PLKB	%	82	86	88	90	95	812	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	%	100	100	100	100	100	1.740	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Tingkat Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	%	100	100	100	100	100	768	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
61	3.7.2	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).											
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)									APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan KIE Program Bangsa Kencana	Orang	6000	6200	6300	6500	6700	1.047	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pencapaian Kinerja PKB/PLKB	%	82	86	88	90	95	812	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	%	100	100	100	100	100	1.740	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Tingkat Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	%	100	100	100	100	100	768	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
62	3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR).											
		Program Pengendalian Penduduk	Total Fertlity Rate (TFR) Indeks		2,22	2,22	2,22	2,22	2,15	4.449	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	100	100	100	100	100	1.160	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	%	93	94	95	96	97	3.289	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
63	3.8.1 (a)	Unmet need pelayanan kesehatan.											
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,76	11,52	11,28	11	10,08	4.355	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan KIE Program Bangsa Kencana	Orang	6000	6200	6300	6500	6700	1.047	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pencapaian Kinerja PKB/PLKB	%	82	86	88	90	95	812	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	%	100	100	100	100	100	1.740	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Tingkat Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	%	100	100	100	100	100	768	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
66	3.9.3 (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.											
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase nagari siaga aktif	%	83,00	93,00	98	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang diadvokasi pembentukan nagari siaga aktif	%	100	100	100	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
			Prevalensi Balita Stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			1. Prevalensi balita stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			2. Prevalensi balita gizi buruk	%	45	50	65	75	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
67	3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.											
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan									APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang diadvokasi pembentukan nagari siaga aktif	%	100	100	100	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			1. Prevalensi balita stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			2. Prevalensi balita gizi buruk	%	45	50	65	75	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
68	3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.											
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	%	100	100	100	100	100	556	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi yang diberikan untuk penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	%	100	100	100	100	100	556	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diberikan	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan

No. Uru t	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) ILUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
69	3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.											
		Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	10	15	20	25	35	1.665	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan memiliki izin praktek sesuai standar	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan tenaga kesehatan	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang dilatih sesuai kompetensi	%	100	100	100	100	100	1.665	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF											
70	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca,											
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompe- tensi minimum							173.996	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
			□ SD/MI	n.a	20	35	50	65	80				Dinas Pendidikan
			□ SMP/MTs	n.a	65	75	80	85	85				Dinas Pendidikan
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	%	20	20	35	50	65	123.416	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SD	%	20	20	35	50	65	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SD	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SD	Sekolah	208	209	209	209	209	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SD	Sekolah	76	80	82	85	89	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SD	Sekolah	37	67	97	117	127	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	%	45	60	70	75	80	54.178	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SMP	%	50	65	75	80	85	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SMP	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SMP	Sekolah	54	54	54	54	54	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SMP	Sekolah	10	15	17	20	24	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SMP	Sekolah	4	5	7	9	12	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi	%	59	60	61	63	64	54.455	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Persentase peningkatan kepemilikan Ijazah pendidikan Non Formal/Kesetaraan	%	30	35	40	45	50	9.327	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2. Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	%	73	82	91	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
71	4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.											
		Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah sekolah terakreditasi	Jmlh	208	209	209	209	209		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	%	20	20	35	50	65	123.416	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SD	%	20	20	35	50	65	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SD	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SD	Sekolah	208	209	209	209	209	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SD	Sekolah	76	80	82	85	89	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SD	Sekolah	37	67	97	117	127	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	%	45	60	70	75	80	54.178	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SMP	%	50	65	75	80	85	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SMP	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SMP	Sekolah	54	54	54	54	54	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SMP	Sekolah	10	15	17	20	24	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SMP	Sekolah	4	5	7	9	12	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi	%	59	60	61	63	64	54.455	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Persentase peningkatan kepemilikan Ijazah pendidikan Non Formal/Kesetaraan	%	30	35	40	45	50	9.327	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2. Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	%	73	82	91	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
72	4.1.1(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.											
		Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah sekolah terakreditasi	Jmlh	54	54	54	54	54		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	%	20	20	35	50	65	123.416	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SD	%	20	20	35	50	65	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SD	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SD	Sekolah	208	209	209	209	209	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SD	Sekolah	76	80	82	85	89	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SD	Sekolah	37	67	97	117	127	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	%	45	60	70	75	80	54.178	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SMP	%	50	65	75	80	85	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SMP	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SMP	Sekolah	54	54	54	54	54	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SMP	Sekolah	10	15	17	20	24	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SMP	Sekolah	4	5	7	9	12	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi	%	59	60	61	63	64	54.455	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Persentase peningkatan kepemilikan Ijazah pendidikan Non Formal/Kesetaraan	%	30	35	40	45	50	9.327	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2. Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	%	73	82	91	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
73	4.1.1(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.											
		Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/ sederajat.	%	114,81	114,81	114,81	114,81	114,81		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	%	20	20	35	50	65	123.416	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SD	%	20	20	35	50	65	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SD	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SD	Sekolah	208	209	209	209	209	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SD	Sekolah	76	80	82	85	89	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SD	Sekolah	37	67	97	117	127	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	%	45	60	70	75	80	54.178	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SMP	%	50	65	75	80	85	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SMP	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SMP	Sekolah	54	54	54	54	54	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SMP	Sekolah	10	15	17	20	24	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SMP	Sekolah	4	5	7	9	12	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi	%	59	60	61	63	64	54.455	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Persentase peningkatan kepemilikan Ijazah pendidikan Non Formal/Kesetaraan	%	30	35	40	45	50	9.327	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2. Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	%	73	82	91	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
74	4.1.1(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.											
		Program Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/MTS/Paket B	%	109,83	109,83	109,83	109,83	109,83		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	%	20	20	35	50	65	123.416	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SD	%	20	20	35	50	65	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SD	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SD	Sekolah	208	209	209	209	209	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SD	Sekolah	76	80	82	85	89	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SD	Sekolah	37	67	97	117	127	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	%	45	60	70	75	80	54.178	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SMP	%	50	65	75	80	85	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SMP	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SMP	Sekolah	54	54	54	54	54	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SMP	Sekolah	10	15	17	20	24	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SMP	Sekolah	4	5	7	9	12	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi	%	59	60	61	63	64	54.455	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Persentase peningkatan kepemilikan Ijazah pendidikan Non Formal/Kesetaraan	%	30	35	40	45	50	9.327	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2. Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	%	73	82	91	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
75	4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.											
		Program Pengelolaan Pendidikan	Ra-rata lama sekolah	thn	8,19	8,23	8,62	8,91	9,00		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	%	20	20	35	50	65	123.416	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SD	%	20	20	35	50	65	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SD	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SD	Sekolah	208	209	209	209	209	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SD	Sekolah	76	80	82	85	89	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SD	Sekolah	37	67	97	117	127	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	%	45	60	70	75	80	54.178	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SMP	%	50	65	75	80	85	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SMP	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SMP	Sekolah	54	54	54	54	54	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SMP	Sekolah	10	15	17	20	24	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SMP	Sekolah	4	5	7	9	12	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi	%	59	60	61	63	64	54.455	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Persentase peningkatan kepemilikan Ijazah pendidikan Non Formal/Kesetaraan	%	30	35	40	45	50	9.327	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2. Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	%	73	82	91	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
76	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).											
		Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	%	50	53	56	60	65		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	%	20	20	35	50	65	123.416	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SD	%	20	20	35	50	65	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik Jenjang SD	%	70	75	80	85	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4. Jumlah sekolah terakreditasi Jenjang SD	Sekolah	208	209	209	209	209	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5. Jumlah sekolah yang memenuhi SNP Jenjang SD	Sekolah	76	80	82	85	89	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6. Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi Jenjang SD	Sekolah	37	67	97	117	127	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	%	45	60	70	75	80	54.178	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dikbud

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
			IPG, IDG		95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
84	5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak	%	100	100	100	100	100	850	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			Persentase nilai indikator KLA yang terpenuhi	%	82	84	86	88	92	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
85	5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.											
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan	%	0,2	0,2	0,15	0,12	0,10	425	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan korban kekerasan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	128,83	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan korban kekerasan yang diberikan Rujukan Lanjutan	%	100	100	100	100	100	667,30	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			Nilai SAKIP		72	72	73	73	74	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas		72	72	73	73	74	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
86	5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak	%	100	100	100	100	100	850	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			Persentase nilai indikator KLA yang terpenuhi	%	82	84	86	88	92	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
87	5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.											
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan	%	0,2	0,2	0,15	0,12	0,10	425	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Kegiatan :											
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan korban kekerasan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	128,83	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan korban kekerasan yang diberikan Rujukan Lanjutan	%	100	100	100	100	100	667,30	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			Nilai SAKIP		72	72	73	73	74	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas		72	72	73	73	74	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
88	5.3.1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.											
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase remaja, ibu hamil dan ibu baduta yang mendapatkan KIE Stunting	%	33,71	36,52	36,52	39,33	42,13	3,478	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapatkan KIE tentang ketahanan, kesejahteraan, dan karakter keluarga		30,90 %	33,71 %	36,52 %	39,33 %	42,13 %	2.676	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Masyarakat yang berperan serta dalam Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		4 Ormas	4 Ormas	4 Ormas	4 Ormas	4 Ormas	802	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
			Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)		2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,15 Nilai	2,15 Nilai	-	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
			Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)		2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,15 Nilai	2,15 Nilai	-	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
89	5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.											
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase remaja, ibu hamil dan ibu baduta yang mendapatkan KIE Stunting	%	33,71	36,52	36,52	39,33	42,13	3,478	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapatkan KIE tentang ketahanan, kesejahteraan, dan karakter keluarga		30,90 %	33,71 %	36,52 %	39,33 %	42,13 %	2.676	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Masyarakat yang berperan serta dalam Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		4 Ormas	4 Ormas	4 Ormas	4 Ormas	4 Ormas	802	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
			Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)		2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,15 Nilai	2,15 Nilai	-	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
			Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)		2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,22 Nilai	2,15 Nilai	2,15 Nilai	-	APBD I.II dan APBN	APBD I.II dan APBN	Dinas Dalduk & KB
90	5.3.1 (a)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	11,76	11,52	11,28	10	10,08		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan KIE Program Bangsa Kencana	Orang	6000	6200	6300	6500	6700	1.047	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pencapaian Kinerja PKB/PLKB	%	82	86	88	90	95	812	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	%	100	100	100	100	100	1.740	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Tingkat Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	%	100	100	100	100	100	768	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
91	5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.											
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelembagaan perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	85	90	90	100	100	521		1	20
		Kegiatan :											
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan randa PUG	%	100	100	100	100	100	271	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat	%	15	15	15	15	15	114	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	%	70	70	70	70	70	135	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			IPG, IDG dan Capaian Kategori KLA		94,00; 63,00;Pratama (501-600)	95,00; 65,00;Madya (601-700)	96,00; 67,00;Madya (601-700)	97,00; 69,00;Nindya (701-800)	98,00; 71,00;Utama (801-900)	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			IPG, IDG		95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
92	5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.											
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelembagaan perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	85	90	90	100	100	521	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan randa PUG	%	100	100	100	100	100	271	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat	%	15	15	15	15	15	114	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA

No. Uru t	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	%	70	70	70	70	70	135	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			IPG, IDG dan Capaian Kategori KLA		94,00; 63,00;Prata ma (501- 600)	95,00; 65,00;Madya (601-700)	96,00; 67,00;Madya (601-700)	97,00; 69,00;Nindy a (701-800)	98,00; 71,00;Utama (801-900)	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			IPG, IDG		95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
93	5.6.1	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.											
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelembagaan perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	85	90	90	100	100	521	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan randa PUG	%	100	100	100	100	100	271	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	%	15	15	15	15	15	114	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	%	70	70	70	70	70	135	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			IPG, IDG dan Capaian Kategori KLA		94,00; 63,00;Prata ma (501- 600)	95,00; 65,00;Madya (601-700)	96,00; 67,00;Madya (601-700)	97,00; 69,00;Nindy a (701-800)	98,00; 71,00;Utama (801-900)	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			IPG, IDG		95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
94	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).											
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,76	11,52	11,28	10	10,08		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan KIE Program Bangsa Kencana	Orang	6000	6200	6300	6500	6700	1.047	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pencapaian Kinerja PKB/PLKB	%	82	86	88	90	95	812	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	%	100	100	100	100	100	1.740	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Tingkat Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	%	100	100	100	100	100	768	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
95	5.6.1	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.											
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	%	75,24	76,63	78,02	79,41	80,8	4,355	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan KIE Program Bangsa Kencana	Orang	6000	6200	6300	6500	6700	1.047	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pencapaian Kinerja PKB/PLKB	%	82	86	88	90	95	812	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	%	100	100	100	100	100	1.740	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Tingkat Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	%	100	100	100	100	100	768	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dalduk & KB
		TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR											
97	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.											
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	%	75,00	90	100	100	100	3,742	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan air minum	%	75	90	100	100	100	3.742	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
98	6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.											
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	%	75,00	90	100	100	100	3,742	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan air minum	%	75	90	100	100	100	3.742	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
99	6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.											
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	%	75,00	90	100	100	100	3,742	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan air minum	%	75	90	100	100	100	3.742	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
100	6.2.1 (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.											
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	%	75,00	90	100	100	100	3,742	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan air minum	%	75	90	100	100	100	3.742	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
101	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.											
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan sanitasi yang layak	%	80	90	100	100	100	710	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sanitasi yang layak	%	80	90	100	100	100	710	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase penanganan kawasan kumuh	%	17,06	17,79	18,53	18,51	17,07	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase penanganan kawasan kumuh	%	17,06	17,79	18,53	18,51	17,07	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
102	6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).											
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan STBM		53,00	58	63,00	68	73	1,538	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang diadvokasi pembentukan nagari siaga aktif	%	100	100	100	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			1. Prevalensi balita stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
			2. Prevalensi balita gizi buruk	%	45	50	65	75	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
103	6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).											
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS Rumah Tangga		83,00	88,00	93,00	98,00	100	1,538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :											
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang diadvokasi pembentukan nagari siaga aktif	%	100	100	100	100	100	1.538	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			1. Prevalensi balita stunting	%	17	15	14	10	7	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
			2. Prevalensi balita gizi buruk	%	45	50	65	75	90	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
104	6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.											
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan sanitasi yang layak	%	80	90	100	100	100	710	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sanitasi yang layak	%	80	90	100	100	100	710	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase penanganan kawasan kumuh	%	17,06	17,79	18,53	18,51	17,07	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase penanganan kawasan kumuh	%	17,06	17,79	18,53	18,51	17,07	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
105	6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.											
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan sanitasi yang layak	%	80	90	100	100	100	710	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sanitasi yang layak	%	80	90	100	100	100	710	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
			Persentase penanganan kawasan kumuh	%	17,06	17,79	18,53	18,51	17,07	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase penanganan kawasan kumuh	%	17,06	17,79	18,53	18,51	17,07	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
106	6.3.1 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).											
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan sanitasi yang layak	%	80	90	100	100	100	710	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sanitasi yang layak	%	80	90	100	100	100	710	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase penanganan kawasan kumuh	%	17,06	17,79	18,53	18,51	17,07	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase penanganan kawasan kumuh	%	17,06	17,79	18,53	18,51	17,07	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
107	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.											
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan sanitasi yang layak	%	80	90	100	100	100	710	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sanitasi yang layak	%	80	90	100	100	100	710	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase penanganan kawasan kumuh	%	17,06	17,79	18,53	18,51	17,07	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase penanganan kawasan kumuh	%	17,06	17,79	18,53	18,51	17,07	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
108	6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.											
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	%	75,00	90	100	100	100	3,742	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan air minum	%	75	90	100	100	100	3.742	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
109	6.4.1 (a)	Insentif penghematan air pertanian perkebunan dan industri.											
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan jenis usaha dan kegiatan lainnya terhadap izin lingkungan	%	100	100	100	100	100	166	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan pemegang izin lingkungan terhadap izin PPLH yang diterbitkan	%	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %	165	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			1. Persentase sampah yang dikelola	%	55 %	61 %	70 %	95 %	100 %	-			
110	6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW).											
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan									APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang diuji	%	100	100	100	100	100	528	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persentase penanggulangan pencemaran lingkungan	%	0	100	100	100	100	313	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan kerusakan lingkungan	%	0	100	100	100	100	314	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
111	6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.											
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio jaringan irigasi	%	50,00	55,00	65,00	75,00	85,00	110,205	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) yang aktif		70	75	80	85	85	2.400	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) yang aktif		70	75	80	85	85	2.400	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi		61	63	65	66	66	352.150	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata - Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi		61	63	65	66	66	352.150	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
			Persentase Gedung Pemerintah yang sesuai standar	%	85,29	88,24	91,18	94,12	97,06	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	%	73,21	73,21	74,21	75,21	76,21	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
			Persentase Gedung Pemerintah yang sesuai standar	%	85,29	88,24	91,18	94,12	97,06	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
112	6.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau											
		Kegiatan :											
113	6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.											
		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan prestasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	%	5	5	5	5	5	413	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup diraih	Penghargaan	2	2	3	3	3	413	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU.													
		Rasio elektrifikasi.											
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio Elektrifikasi	%	68,00	72,00	75,00	78,00	80,00	17,506	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang di selesaikan	%	100	100	100	100	100	2.775	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			Rasio Elektrifikasi	%	68,00	72,00	75,00	78,00	80,00				
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Poin	3200- 3400	3400- 3500	3500- 3700	3700- 3800	3800- 4000		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			Persentase Perda ditetapkan	%	100	100	100	100	100				
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase terfasilitasinya pelayanan terkait kegiatan keagamaan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan msyarakat	%	100	100	100	100	100	33.786	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
TUJUAN 8. MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG													
114	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita.											
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	%	25	30	35	40	45	16,738	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Kegiatan :											
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani pengguna sarana pertanian yang terawasi dan terdampingi	%	62,5	65	67,5	70	72,5	5.940	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG hewan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkelola	komoditas	4	4	4	4	4	6.163	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase benih/bibit ternak dan bahan pakan/pakan & benih/bibit hijauan pakan ternak yang terawasi	%	50	50	50	50	50	568	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan di tingkat pengecer yang terawasi	%	2	2	3	3	4	190	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak beredar yang terawasi	%	10	15	20	25	30	690	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase peningkatan populasi ternak	%	1	1	1	1	1	3.187	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5	4	3	2	1	4.584	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Kegiatan :											
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular dan zoonosis	%	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	2.175	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	%	3	4	5	6	7	370	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang dikelola	%	75	75	75	75	75	1.113	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase persyaratan teknis kesejahteraan hewan yang terpenuhi Persentase persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terpenuhi	%	45	50	55	60	65	756	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase persyaratan teknis kesejahteraan hewan yang terpenuhi	%	30	50	55	75	85	170	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluh pertanian yang memiliki nilai evaluasi kinerja baik	%	75	80	80	90	90	19.016	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluh yang berkinerja baik	%	75	80	80	90	90	19.016	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya	%	1	1	1	1	1	19.016	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	28,5	30	30,5	31,5	32,5	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Produktivitas padi	Ton/Ha	4,64	4,71	4,78	4,85	4,92	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Produksi Jagung	Ton	5.674	5.731	5.788	5.846	5.905	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Produksi Manggis	Ton	4.112	4.133	4.153	4.174	4.195	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Produksi Karet	Ton	65.219	66.197	67.150	68.198	69.221	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Produksi Telur Ayam Ras	Ton	1.388	1.402	1.416	1.430	1.444	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Populasi Sapi	Ekor	16.655	16.882	16.990	17.160	17.160	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Populasi Kerbau	Ekor	12.152	12.271	12.397	12.521	12.521	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton/tahun	15	18	21	24	27	540,84	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pokmaswas perikanan yang difasilitasi	%	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	400	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	ton/tahun	263	288	313	338	363	4,577	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		Kegiatan :											
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas izin usaha perikanan	Dok	2	2	2	2	2	150	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	540	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidayaan Ikan	Pokdakan	5	5	5	5	5	500	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan lahan perikanan yang layak	%	5	5	5	5	5	92	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
		Kegiatan :											
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah lahan perikanan yang diawasi	Kelompok	18	18	18	18	18	300	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pengembangan destinasi pariwisata	%	13,00	15,00	20,00	22,00	25,00	6,971	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis yang dikembangkan	Kawasan	3	5	7	7	7	5.716	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana dan destinasi pariwisata yang dibangun dan dipelihara	Sapras	5	10	10	7	8	1.255	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investasi pariwisata yang difasilitasi	Investasi	2	2	2	2	2	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	ribu org	84,34	85,19	86,04	100	150	7.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Kegiatan :											
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	84.340	85.190	86.040	100.000	150.000	7.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang sesuai standar	%	1	2	3	4	5	1,082	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualifikasi	Orang	86	86	84	81	81	1.082	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	28,5	30	30.05.00	31.05.00	32,5	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Produktivitas padi	Ton/Ha	4,64	4,71	4,78	4,85	4,92	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Produksi Jagung	Ton	5.674	5.731	5.788	5.846	5.905	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
			Produksi Manggis	Ton	4.112	4.133	4.153	4.174	4.195	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Produksi Karet	Ton	65.219	66.197	67.150	68.198	69.221	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Populasi Sapi	Ekor	16.655	16.882	16.990	17.160	17.160	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Populasi Kerbau	Ekor	12.152	12.271	12.397	12.521	12.521	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Produksi Telur Ayam Ras	Ton	1.388	1.402	1.416	1.430	1.444	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HKI	Jumlah	0	1	2	3	5	1,15	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Kegiatan :											
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang di hasilkan	Produk	0	1	2	3	5	1.150	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase produk yang bersertifikasi	%	37	51	64	82	100	1,916	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan in-dustri yang ditetapkan RIPIK	%	90	95	100	100	100		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Kegiatan :											
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase produk IKM yg tersertifikasi.	%	37 %	51 %	64 %	82 %	100 %	1.916	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang memiliki izin	%	14,5	19	23	27	32	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Menerapkan Managemen Pengendalian Mutu Terpadu	IKM	30 IKM	40 IKM	50 IKM	50 IKM	60 IKM	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Jumlah IKM yang masuk SIINas	%	20	30	40	50	60	848	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang masuk SIINas	IKM	20 IKM	30 IKM	40 IKM	50 IKM	60 IKM	815	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	72,00 nilai	73,00 nilai	75,00 nilai	77,00 nilai	80,00 nilai	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) IUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam	%	27,2	45,4	63,6	81,8	100	250	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
114		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	3,2	4,3	5,4	6,5	8,7	473	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	4,5 %	5,0 %	5,5 %	6,0 %	6,5 %	832	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	55,26 %	61,48 %	68,42 %	75,00 %	81,57 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Persentase Peningkatan Usaha Kecil/Mikro Menjadi Wirausaha	%	0,20 %	0,25 %	0,30 %	0,35 %	0,40 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	55,26 %	61,48 %	68,42 %	75,00 %	81,57 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Persentase Peningkatan Usaha Kecil/Mikro menjadi Wirausaha	%	0,20 %	0,25 %	0,30 %	0,35 %	0,40 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan om-set usaha mikro	%	4,5	5	5,5	6	6,5	832	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yg meningkat permodalannya	%	4,50 %	5,00 %	5,50 %	6,00 %	6,50 %	832	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,10 %	12,50 %	12,80 %	13,10 %	13,50 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Persentase kenaikan omset perdagangan	%	5,00 %	5,50 %	6,00 %	6,50 %	7,00 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penurunan Pengaduan Pelaku Usaha	%	0	0	0	0	0	721	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMPTSP
		Kegiatan :											
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investasi PMDN dan PMA	%	3	3	3	3	3	1.900	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMPTSP
		Kegiatan :											
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi investasi PMDN	Rp Triliun	11,42	13,13	15,75	19,69	24,62	2,584	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMPTSP
			Realisasi investasi PMA	(US\$ Ribu	197,43	201,38	207,42	217,79	233,04		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMPTSP
		Kegiatan :											
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMPTSP
		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Indeks Kepuasan Layanan data dan Informasi Penanaman Modal		81	82	83	84	85	1.689,15	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMPTSP
		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang valid	Paket Data	1 Paket Data	1 Paket Data	1 Paket Data	1 Paket Data	1 Paket Data	1.620	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMPTSP
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten		69,89	71,57	73,25	74,93	76,61	219.054	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kemantapan jalan Kabupaten	%	69.89	71.57	73.25	74.93	76.61	270.470	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
			Persentase Kesesuaian Ruang	%	60	75	80	85	95	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
115	8.1.1 (a)	PDB per kapita.											
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	%	25	30	35	40	45	16,738	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Kegiatan :											
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian	Dokumen	2	2	2	2	2	1.079	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang layak	%	69,6	73,08	76,73	80,57	84,6	24.565	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam kabupaten yang dikelola	%	1	1	1	1	1	1.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase pengembangan lahan penggembalaan umum	%	0	10	10	10	10	1.005	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Presentase penyuluh pertanian yang memiliki nilai evaluasi kinerja baik	%	75	80	80	90	90	19,016	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluh yang berkinerja baik	%	75	80	80	90	90	19.016	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya	%	1	1	1	1	1	19.016	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	28,5	30	30,5	31,5	32,5	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Produktivitas padi	Ton/Ha	4,64	4,71	4,78	4,85	4,92	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Produksi Jagung	Ton	5.674	5.731	5.788	5.846	5.905	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Produksi Manggis	Ton	4.112	4.133	4.153	4.174	4.195	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Produksi Karet	Ton	65.219	66.197	67.150	68.198	69.221	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Produksi Telur Ayam Ras	Ton	1.388	1.402	1.416	1.430	1.444	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Populasi Sapi	Ekor	16.655	16.882	16.990	17.160	17.160	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
			Populasi Kerbau	Ekor	12.152	12.271	12.397	12.521	12.521	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan usulan izin usaha pertanian	%	3	4	6	7	10	500	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi teknis izin usaha pertanian yang diterbitkan	%	75	80	80	80	80	500	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan yang memiliki izin usaha	%	0	5	5	5	5	45	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase usaha pengecer obat hewan yang memiliki izin usaha	%	0	0	0	0	0	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Pertanian
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pendapatan pelaku usaha perikanan	Rp juta/thn	12,20	12,40	12,60	12,80	12,80	450	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
		Kegiatan :											
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Usahan Pengolahan Hasil Perikanan	Rekomendasi	5	5	5	5	5	270	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaksanaan pembinaan SKP (standar kelayakan pengolahan) olahan ikan	Dok	2	2	2	2	2	275	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan	Paket	1	1	1	1	1	980	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Paperi
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rata-rata omset Koperasi aktif	Rp Juta	158,70	166,89	174,90	183,82	192,74	329	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dibina	KSP/USP	55	55	55	55	55	329	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	KSP/USP	55	55	55	55	55	329	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	32,7	40	47	54	68	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Sehat	%	32,7	40	47	54	68	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	%	83,3	88,5	93,7	96,8	100	556	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus dan Pengawas yang dilatih	Orang	80	80	100	120	130	556	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	%	55,26	61,48	68,42	75	81,57	151	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Modal Sendiri	%	2,19	2,39	2,59	2,79	2,99	7.997	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Jumlah Permodalan Koperasi yg di Fasilitas(rupiah)	%	4,54	0	4,34	8,33	15,38	6.300	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	3,2	4,3	5,4	6,5	8,7	473	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Persentase peningkatan omset usaha mikro	4,1	4,5	5	5,5	6	6,5	832	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yg meningkat permodalannya	%	4,50 %	5,00 %	5,50 %	6,00 %	6,50 %	832	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,10 %	12,50 %	12,80 %	13,10 %	13,50 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Persentase kenaikan omset perdagangan	%	5,00 %	5,50 %	6,00 %	6,50 %	7,00 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana & prasarana perdagangan yang representatif	%	25,48	29,4	33,32	37,28	41,16	1.472	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun dan direvitalisasi	%	25,48	29,4	33,32	37,28	41,16	1.282	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana pemasaran	bulan	12	12	12	12	12	365	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola yang dibina	pasar	54	54	55	55	55	190	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	7	7	7	7	7	527	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Utama (Beras, Gula, Minyak)	%	7	7	7	7	7	103	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar	Pasar	52	52	52	52	52	240	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pasar murah	Kali	2	2	2	2	2	50	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran harga bahan Penting yang melebihi HET (gas bersubsidi dan pupuk bersubsidi).	%	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	134	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku	32,02	37,02	55,54	66,64	74,05	81,45	944	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) yg ditera /tera ulang	%	37,02	55,54	66,64	74,05	81,45	944	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran Persentase produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi	%	40 42,8	45 57	60 71,4	75 78,6	85 85,7	277	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk yang dipromosikan	%	40	45,00	60,00	75,00	85,00	277	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pedagang yang dibina	%	42,80	57,00	71,40	78,60	85,70	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	%	3,20	4,50	5,00	5,20	5,40	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Persentase Kenaikan Omset IKM	%	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) berkembang	%	10	10	10	10	10	12.690	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
		Kegiatan :											
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	%	13	14	15	16	18	12.689	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
116	8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun											
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja	%	0	40	50	55	60	800	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Dokumen	0	1	1	1	1	800	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
117	8.3.1	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin											
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja	%	0	40	50	55	60	800	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Dok	0	1	1	1	1	800	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
118	8.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal											
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	2.311	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Dok	0	1	1	1	1	800	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
119	8.3.1 (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja	%	0	40	50	55	60	800	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Dok	0	1	1	1	1	800	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
120	8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.											
		Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omset usaha mikro	%	4,5	5	5,5	6	6,5	832	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yg meningkat permodalannya	%	4,50 %	5,00 %	5,50 %	6,00 %	6,50 %	832	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,10 %	12,50 %	12,80 %	13,10 %	13,50 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Persentase kenaikan omset perdagangan	%	5,00 %	5,50 %	6,00 %	6,50 %	7,00 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
121	8.3.1 (a)	Upah rata-rata per jam pekerja.											
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan	%	100	100	100	100	100	849	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan	Peraturan	4	5	5	5	6	320	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perselisihan hubungan industrial	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	270	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	270	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
			Tingkat pengangguran terbuka	%	5,00 %	4,86 %	4,74 %	4,58 %	4,00 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
			Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi	Nilai	0	0	25	30	30	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
122	8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.											
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja	%	0	40	50	55	60	800	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Dok	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	800	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	24,00	25,00	30,00	34,00	35,00	2.071	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	32	32	32	48	48	1.560	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang telah dibina	Lembaga	3	3	3	4	4	176	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terdaftar	Lembaga	2	2	2	2	2	80	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang dibina	Perusahaan	15	20	20	30	30	146	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat produktivitas tenaga kerja daerah	Nilai	4	4	4	4	4	110	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	2.311	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Dok	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang	%	100	100	100	100	100	849	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan	Peraturan	4	5	5	5	6	320	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perselisihan hubungan industrial	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	270	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	270	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
			Tingkat pengangguran terbuka	%	5,00 %	4,86 %	4,74 %	4,58 %	4,00 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
			Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi	Nilai	0	0	25	30	30	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun	0	20	30	35	40	45	1.820	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah satuan permukiman yang dibangun	SP	1	1	1	1	1	1.820	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri	72,48	73,00	75,00	80,00	85,00	90,00	2.831	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan	SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	1 SP	2.831.000.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
			Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	71,00 nilai	72,00 nilai	73,00 nilai	73,00 nilai	74,00 nilai	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
			Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	71,00 nilai	72,00 nilai	73,00 nilai	73,00 nilai	74,00 nilai	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
123	8.5.2 (a)	Tingkat setengah pengangguran.											
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	2.311	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Dok	0	1	1	1	1	800	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
124	8.5.2 (b)	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).											
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	24,00	25,00	30,00	34,00	35,00	2.071	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	32	32	32	48	48	1.560	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang telah dibina	Lembaga	3	3	3	4	4	176	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terdaftar	Lembaga	2	2	2	2	2	80	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang dibina	Perusahaan	15	20	20	30	30	146	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat produktifitas tenaga kerja daerah	Nilai	4	4	4	4	4	110	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
125	8.9.1	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.											
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pengembangan destinasi pariwisata	%	13,00	15,00	20,00	22,00	25,00	6.971	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis yang dikembangkan	Kawasan	3	5	7	7	7	5.716	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana dan destinasi pariwisata yang dibangun dan dipelihara	Sapras	5	10	10	7	8	1.255	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investasi pariwisata yang difasilitasi	Investasi	2	2	2	2	2	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	%	84,34	85,19	86,04	100	150	7.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Kegiatan :											
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	84.340	85.190	86.040	100.000	150.000	7.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
126	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.											
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	%	84,34	85,19	86,04	100	150	7.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Kegiatan :											
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	84.340	85.190	86.040	100.000	150.000	7.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
127	8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.											
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	%	84,34	85,19	86,04	100	150	7.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Kegiatan :											
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	84.340	85.190	86.040	100.000	150.000	7.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
128	8.9.1 (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.											
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	%	84,34	85,19	86,04	100	150	7.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Kegiatan :											
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	84.340	85.190	86.040	100.000	150.000	7.000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
129	8.9.1 (d)	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.											
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang sesuai standar	%	1	2	3	4	5	1.068	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualifikasi	Orang	86	86	84	81	81	1.082	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	28,5	30	30.05.00	31.05.00	32,5	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Produktivitas padi	Ton/Ha	4,64	4,71	4,78	4,85	4,92	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Produksi Jagung	Ton	5.674	5.731	5.788	5.846	5.905	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Produksi Manggis	Ton	4.112	4.133	4.153	4.174	4.195	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Produksi Karet	Ton	65.219	66.197	67.150	68.198	69.221	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Populasi Sapi	Ekor	16.655	16.882	16.990	17.160	17.160	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Populasi Kerbau	Ekor	12.152	12.271	12.397	12.521	12.521	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
			Produksi Telur Ayam Ras	Ton	1.388	1.402	1.416	1.430	1.444	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Parpora
130	8,10.1	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi investasi PMDN (Rp Triliun) Realisasi investasi PMA (US\$ Ribu)	9,02 193,56	11,42 197,43	13,13 201,38	15,75 207,42	19,69 217,79	24,62 233,04	2.584	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMPTSP
		Kegiatan :											
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMPTSP

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) MILIAR	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
131	8.10.1 (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).											
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi investasi PMDN (Rp Triliun) Realisasi investasi PMA (US\$ Ribu)	%	11,42 197,43	13,13 201,38	15,75 207,42	19,69 217,79	24,62 233,04	2.584	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMPTSP
		Kegiatan :											
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0	0	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMPTSP
132	8.10.1 (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. (b)											
		Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omset usaha mikro	%	4,5	5	5,5	6	6,5	832	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :									APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yg meningkat permodalannya	%	4,50 %	5,00 %	5,50 %	6,00 %	6,50 %	832	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,10 %	12,50 %	12,80 %	13,10 %	13,50 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Persentase kenaikan omset perdagangan	%	5,00 %	5,50 %	6,00 %	6,50 %	7,00 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH,											
133	9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.											
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase produk yang bersertifikasi Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	%	37 90	51 95	64 100	82 100	100 100	1.916	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase produk IKM yg tersertifikasi.	%	37 %	51 %	64 %	82 %	100 %	1.916	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang memiliki izin	%	14,5	19	23	27	32	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Menerapkan Managemen Pengendalian Mutu Terpadu	IKM	30 IKM	40 IKM	50 IKM	50 IKM	60 IKM	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Jumlah IKM yg masuk SIINas	1	20	30	40	50	60	848	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang masuk SIINas	IKM	20 IKM	30 IKM	40 IKM	50 IKM	60 IKM	815	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	72,00 nilai	73,00 nilai	75,00 nilai	77,00 nilai	80,00 nilai	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
134	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.											
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase produk yang bersertifikasi Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	15 75	37 90	51 95	64 100	82 100	100 100	1.916	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase produk IKM yg tersertifikasi.	%	37 %	51 %	64 %	82 %	100 %	1.916	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang memiliki izin	%	14,5	19	23	27	32	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Menerapkan Manajemen Pengendalian Mutu Terpadu	IKM	30 IKM	40 IKM	50 IKM	50 IKM	60 IKM	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota											
		Kegiatan :											
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Menerapkan Manajemen Pengendalian Mutu Terpadu	IKM	30 IKM	40 IKM	50 IKM	50 IKM	60 IKM	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase IKM yang memiliki izin	%	14,5	19	23	27	32	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang masuk SIINas	IKM	20 IKM	30 IKM	40 IKM	50 IKM	60 IKM	815	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	72,00 nilai	73,00 nilai	75,00 nilai	77,00 nilai	80,00 nilai	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional											
		Kegiatan :											
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang masuk SIINas	IKM	20 IKM	30 IKM	40 IKM	50 IKM	60 IKM	815	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	72,00 nilai	73,00 nilai	75,00 nilai	77,00 nilai	80,00 nilai	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
135	9.2.2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.											
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	2.311	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang difasilitasi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.853	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang difasilitasi		0 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	80	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja yang disebarakan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	175	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang dilindungi		0 orang	23 orang	25 orang	27 orang	27 orang	160	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	43	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		35,00 %	38,00 %	41,00 %	43,00 %	45,00 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
136	9.3.1	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.											
		Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang memiliki izin	%	14,5	19	23	27	32	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Menerapkan Manajemen Pengendalian Mutu Terpadu	IKM	30 IKM	40 IKM	50 IKM	50 IKM	60 IKM	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
137	9.3.2	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.											
		Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang memiliki izin	%	14,5	19	23	27	32	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
		Kegiatan :											
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Menerapkan Manajemen Pengendalian Mutu Terpadu	IKM	30 IKM	40 IKM	50 IKM	50 IKM	60 IKM	333	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dagperinkop & UKM
138	9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.											
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah									APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Bappedda
		Kegiatan :											
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun sesuai dengan dokumen perencanaan	%	82	84	86	88	90	1.127	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Bappedda

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang disusun sesuai dengan dokumen perencanaan	%	82	84	86	88	90	1.310	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Bappedda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan dokumen perencanaan	%	82	84	86	88	90	1.686	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Bappedda
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi yang diterapkan	%	57	63	68	71	74	1.630	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Bappedda
			Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Poin	75	78	81	83	85	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Bappedda
139	9.c.1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.											
		Persentase produk yang bersertifikasi Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	Persentase produk yang bersertifikasi Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	15 75	37 90	51 95	64 100	82 100	100 100	1.916	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
140	9.c.1 (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam											
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase produk yang bersertifikasi Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	%	37 90	51 95	64 100	82 100	100 100	1.916	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terfasilitasinya koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.580	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	persentase terfasilitasinya koordinasi kebijakan di bidang sumber daya alam	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.450	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			Nilai Sakip Pemda	nilai	68-69 nilai	70-75 nilai	76-79 nilai	80-83 nilai	84-87 nilai	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			Persentase pencapaian IKU Pemda bidang administrasi umum							-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
141	9.c.1 (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet											
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase produk yang bersertifikasi Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	%	37 90	51 95	64 100	82 100	100 100	1.916	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terfasilitasinya koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.580	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab

[illegible]

No. Uru t	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	2.250	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr& PA
			Persentase PPKS lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar panti yang mendapat jaminan sosial	%	58,00	63,00	66,00	70,00	75,00			Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr& PA
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase PPKS lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar panti yang mendapat jaminan sosial	9,23 52,73	15,00 58,00	20,00 63,00	25,00 66,00	30,00 70,00	35,00 75,00	2.250	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyaluran bantuan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti		100	100	100	100	100	1.315	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial		20	20	20	20	20	904	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Nagari/Desa yang aktif dalam melakukan pemuktahiran DTKS	75	85	90	100	100	100	1.804	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang terpelihara	%	5,8	5,8	6	6	6	110	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang dikelola	%	100	100	100	100	100	1.670			
			Persentase Peningkatan Keberfungsian sosial PPKS	%	40	40	45	45	50		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, pemberdayaan serta perlindungan dan jaminan sosial	%	40	45	45	50	50				
		Program Penataan Desa	Persentase peningkatan sta- tus Nagari/Desa mandiri Jumlah desa mandiri Persentase Nagari/Desa ya- ng dilaksanakan penataan	%	2 18 40	2 36 50	2 62 60	2 62 70	2 62 80	2.034	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Nag/Desa yang Menyelenggarakan Penataan Desa	Nagari	9	18	36	0	0	2.034	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
			Tingkat penurunan sengketa adat	%	16	13	10	7	5		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
			Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	%	10	10	10	10	10		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
144	10.1.1 (d)	Jumlah Desa Mandiri											
		Program Penataan Desa	Persentase peningkatan status Nagari/Desa mandiri Jumlah desa mandiri Persentase Nagari/Desa yang dilaksanakan penataan	%	2 18 40	2 36 50	2 62 60	2 62 70	2 62 80	2.034	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
		Kegiatan :											
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Nag/Desa yang Menyelenggarakan Penataan Desa	Nagari	9	18	36	0	0	2.034	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
			Tingkat penurunan sengketa adat	%	16	13	10	7	5		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
			Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	%	10	10	10	10	10		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa									APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN Kecamatan
		Kegiatan :	Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju	10	5	5	5	5	5	1.600	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan nagari	%	90 %	95 %	96 %	98 %	100 %	634	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
			persentase peningkatan nilai IKM	%	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
			Persentase penurunan potensi konflik	%	9 %	7 %	5 %	4 %	3 %	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PMN
145	10.2.1	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.											
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Nagari/Desa yang aktif dalam melakukan pemuktahiran DTKS	%	85	90	100	100	100	1.804	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang terpelihara	%	5,8	5,8	6	6	6	110	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang dikelola	%	100	100	100	100	100	1.670			
			Persentase Peningkatan Keberfungsian sosial PPKS	%	40	40	45	45	50		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, pemberdayaan serta perlindungan dan jaminan sosial	%	40	45	45	50	50				
146	10.3.1 (a)	Indeks Kebebasan Sipil.											
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	20	20	20	20	20		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Kantor Kesbangpol

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Kegiatan :											
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	6.200	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Kantor Kesbangpol
		Kegiatan :											
147	10.3.1 (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan fasilitas lambaga keaga- maan dan kemasyarakatan	%	15	18	20	23	25	17.260	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4.975	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase terfasilitasinya pelayanan terkait kegiatan keagamaan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan msyarakat	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33.786	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan dan pelayanan hukum yang terintegrasi terhadappenyusunan peraturan daerah dan bantuan hukum bagi aparat pemerintah serta masyarakat	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	7.015	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	persentase terfasilitasinya koordinasi dalampenyelenggaraan kerja sama daerah	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.400	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			Persentase pencapaian IKU Pemda Bidang perekonomian dan pembangunan							-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
148	10.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.											
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang	%	100	100	100	100	100	849	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Kegiatan :											
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan	Peraturan	4	5	5	5	6	320	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perselisihan hubungan industrial	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	270	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	270	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
			Tingkat pengangguran terbuka	%	5,00 %	4,86 %	4,74 %	4,58 %	4,00 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans
			Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi	Nilai	0	0	25	30	30	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Nakertrans

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) IUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN,											
149	11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.											
		Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%	82,00 17,06	85,00 17,79	90,00 18,53	95,00 18,51	100 17,07	849	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen yang diterbitkan	Dok	1	1	0	0	0	210	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen perencanaan kawasan permukiman yang disusun	Dok	1	2	2	2	1	216	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah didalam kawasan kumuh yang ditangani	Unit	5	20	20	20	20	1.235	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			1. Cakupan layanan air bersih	%	75,00 %	90,00 %	100 %	100 %	100 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			2. Cakupan sanitasi yang layak	%	80,00 %	90,00 %	100 %	100 %	100 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			3. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			4. Persentase permukiman yang dikembangkan	%	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			1. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			2. persentase permukiman yang dikembangkan	%	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
150	11.1.1 (b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.											
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran belanja daerah	%	97,00	100	100	100	100	852.964	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
		Kegiatan :											
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan dan anggaran daerah	%	85	85	85	90	90	8.601	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyaluran belanja daerah	%	100	100	100	100	100	3.335	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	Dokumen	35	35	35	35	35	5.494	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	1.024.911	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan data dan sistem sesuai prosedur	%	100	100	100	100	100	977	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
			1. Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD sesuai dengan aturan	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
151	11.2.1 (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.											
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung pemerintah sesuai standar	%	82,35	85,29	88,24	91,18	97,06	41.410	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rekomendasi Perizinan Bangunan yang diterbitkan		200	250	300	350	400	76.288	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
			Persentase Sarana Publik (RTH) yang tersedia		30 %	50 %	60 %	65 %	70 %	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas PUPR
152	11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.											
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	20	20	30	30	30	7,781	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Kegiatan :											
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Orang	31500	32000	32500	33000	33500	1000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	200	200	200	200	3876845	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	200	200	200	200	200	3125	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan dasar penanggulangan bencana	%	0	25	25	25	25	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
153	11.5.1 (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).											
		Program Penanggulangan Bencana	Indeks risiko bencana	Skor	102,0	100,0	98,0	95,0	92,0	7,781	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Kegiatan :											
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Orang	31500	32000	32500	33000	33500	1000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	200	200	200	200	3876845	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	200	200	200	200	200	3125	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan dasar penanggulangan bencana	%	0	25	25	25	25	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
154	11.5.1 (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	45	55	65	75	85	7,781	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BPBD
		Kegiatan :											
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Orang	31500	32000	32500	33000	33500	1000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	200	200	200	200	3876845	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	200	200	200	200	200	3125	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan dasar penanggulangan bencana	%	0	25	25	25	25	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
155	11.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.											
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana	%	10	10	10	10	10	7,781	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BPBD
		Kegiatan :											
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Orang	31500	32000	32500	33000	33500	1000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	200	200	200	200	3876845	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	200	200	200	200	200	3125	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan dasar penanggulangan bencana	%	0	25	25	25	25	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
156	11.6.1 (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.											
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	%	20,00	23,00	30,00	40,00	50,00	13.536	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Sampah	1. Jumlah sampah yang tertangani	Ton	9.570,15 Ton	10.105,14 Ton	10.655,46 Ton	11.608,36 Ton	11.658,36 Ton	13.536	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Sampah	2. Jumlah sampah yang dikurangi	Ton	26.869,18 Ton	26.947,04 Ton	27.019,20 Ton	27.086,18 Ton	27.186,18 Ton	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	70,54 Nilai	70,55 Nilai	70,56 Nilai	70,57 Nilai	70,58 Nilai	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	70,54 Nilai	70,55 Nilai	70,56 Nilai	70,57 Nilai	70,57 Nilai	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
157	11.b.2	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.											
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	45	55	65	75	85	7,781	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BPBD
		Kegiatan :											
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Orang	31500	32000	32500	33000	33500	1000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	200	200	200	200	3876845	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	200	200	200	200	200	3125	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan dasar penanggulangan bencana	%	0	25	25	25	25	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG													
158	12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)											
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian B3 dan Limbah B3	%	10	20	30	40	50	60	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pengumpulan Limbah B3	%	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
159	12.5.1	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (a)											
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah	%	35,00	38,00	40,00	45,00	50,00	13.536	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Sampah	1. Jumlah sampah yang tertangani	Ton	9.570,15 Ton	10.105,14 Ton	10.655,46 Ton	11.608,36 Ton	11.658,36 Ton	13.536	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Pengelolaan Sampah	2. Jumlah sampah yang dikurangi	Ton	26.869,18 Ton	26.947,04 Ton	27.019,20 Ton	27.086,18 Ton	27.186,18 Ton	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	70,54 Nilai	70,55 Nilai	70,56 Nilai	70,57 Nilai	70,58 Nilai	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai	70,54 Nilai	70,55 Nilai	70,56 Nilai	70,57 Nilai	70,57 Nilai	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
160	12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.											
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan jenis usaha dan kegiatan lainnya terhadap izin lingkungan	%	100	100	100	100	100	168	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan pemegang izin lingkungan terhadap izin PPLH yang diterbitkan	%	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %	165	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			1. Persentase sampah yang terkelola	%	55 %	61 %	70 %	95 %	100 %	-			
161	12.7.1 (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.											
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan jenis usaha dan kegiatan lainnya terhadap izin lingkungan	%	100	100	100	100	100	168	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan pemegang izin lingkungan terhadap izin PPLH yang diterbitkan	%	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %	165	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
			1. Persentase sampah yang terkelola	%	55 %	61 %	70 %	95 %	100 %	-			
162	12.8.1(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.											
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase sarana publik (RTH) yang tersedia	%	30	50	60	65	70	24.853	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas PUPR
		Kegiatan :											
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Utilitas dan Pemeliharaan Gedung yang dilaksanakan tepat waktu		55	65	75	85	95	35.254	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas PUPR
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI													
163	13.1.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.											
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	45	55	65	75	85	7,781	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BPBD
		Kegiatan :											
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Orang	31500	32000	32500	33000	33500	1000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	200	200	200	200	3876845	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	200	200	200	200	200	3125	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan dasar penanggulangan bencana	%	0	25	25	25	25	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
164	13.1.2	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.											
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	20	20	30	30	30	7,781	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BPBD
		Kegiatan :											
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Orang	31500	32000	32500	33000	33500	1000	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	200	200	200	200	200	3876845	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	200	200	200	200	200	3125	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	persentase penataan dasar penanggulangan bencana	%	0	25	25	25	25	100	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Angka Indeks	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	0	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BPBD
TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA													
		Indeks eutrofikasi pesisir dan (b) kepadatan sampah plastik terapung											
		Program :											
		Kegiatan :											
TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN													
165	15.1.1 (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahankeseluruhan.											
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Tutupan lahan	%	67,33	68,77	70,20	70,50	71,00	1.155	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang diuji	%	100	100	100	100	100	528	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persentase penanggulangan pencemaran lingkungan	%	0	100	100	100	100	313	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan kerusakan lingkungan	%	0	100	100	100	100	314	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
166	15.1.1 (b)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.											
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Tutupan lahan	%	67,33	68,77	70,20	70,50	71,00	1.155	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang diuji	%	100	100	100	100	100				

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran lingkungan	%	0	100	100	100	100				
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan kerusakan lingkungan	%	0	100	100	100	100				
167	15.6.1	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.											
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS (%) Penetapan APBD dan APBD-P	%	100	100	100	100	100	852.964	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Kegiatan :											
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan dan anggaran daerah	%	85	85	85	90	90	8.601	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyaluran belanja daerah	%	100	100	100	100	100	3.335	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	Dokumen	35	35	35	35	35	5.494	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	1.024.911	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan data dan sistem sesuai prosedur	%	100	100	100	100	100	977	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
			1. Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD sesuai dengan aturan	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	BKAD
168	15.9.1(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.											
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	%	65	70	75	80	85	1.850	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Kegiatan :											
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perda RPPLH Kabupaten		0	1	1	0	0	742	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun	Dokumen	1	0	0	0	1	738	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Perkim & LH
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN													
169	16.1.1 (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.											
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase menurunnya gangguan ketenteraman ketertiban umum	%	1	1	1	1	0	13.452	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
		Kegiatan :											
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan/potensi gangguan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	19.775	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perda yang ditegakan	Perda	7	8	9	10	10	2.475	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan PPNS	%	60	70	80	90	100	425	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
			Peningkatan peringkat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
			Nilai akuntabilitas kinerja organisasi	Poin	73	75	77	79	81	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar

No. Uru t	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
170	16.1.2 (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.											
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan petugas perlindungan masyarakat per 1000 penduduk	%	0,75	0,90	1	1	1	13.452	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
		Kegiatan :											
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan/potensi gangguan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	19.775	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perda yang ditegakan	Perda	7	8	9	10	10	2.475	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan PPNS	%	60	70	80	90	100	425	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
			Peningkatan peringkat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
			Nilai akuntabilitas kinerja organisasi	Poin	73	75	77	79	81	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
171	16.1.3 (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.											
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan petugas perlindungan masyarakat per 1000 penduduk	%	0,75	0,90	1	1	1	13.452	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
		Kegiatan :											
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan/potensi gangguan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	19.775	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perda yang ditegakan	Perda	7	8	9	10	10	2.475	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan PPNS	%	60	70	80	90	100	425	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
			Peningkatan peringkat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
			Nilai akuntabilitas kinerja organisasi	Poin	73	75	77	79	81	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
172	16.1.4	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.											
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan petugas perlindungan masyarakat per 1000 penduduk	%	0,75	0,90	1	1	1	13.452	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
		Kegiatan :											
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan/potensi gangguan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	19.775	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perda yang ditegakan	Perda	7	8	9	10	10	2.475	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan PPNS	%	60	70	80	90	100	425	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
			Peningkatan peringkat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar
			Nilai akuntabilitas kinerja organisasi	Poin	73	75	77	79	81	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Satpol PP & Damkar

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
173	16.2.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.											
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	1.195	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditangani	%	100	100	100	100	100	468	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	100	100	100	100	100	711	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
174	16.2.1 (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.											
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	1.195	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditangani	%	100	100	100	100	100	468	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	100	100	100	100	100	711	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
175	16.2.3 (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	1.195	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditangani	%	100	100	100	100	100	468	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	100	100	100	100	100	711	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
176	16.5.1 (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).											
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	18	10	5	3	0	0	4.316		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Inspektorat Daerah
		Kegiatan :											
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	Laporan	417	426	435	444	453	3.324	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								-			
177	16.6.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.											
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS (%) Penetapan APBD dan APBD-P	%	100	100	100	100	100	852.964	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Kegiatan :											
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan dan anggaran daerah	%	85	85	90	90	90	8.601	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyaluran belanja daerah	%	100	100	100	100	100	3.335	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	Dokumen	35	35	35	35	35	5.494	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	1.024.911	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
178	16.6.1 (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupa-ten/Kota).											
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyampaian laporan tepat waktu	%	100	100	100	100	100		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Kegiatan :											
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan dan anggaran daerah	%	85	85	90	90	90	8.601	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyaluran belanja daerah	%	100	100	100	100	100	3.335	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	Dokumen	35	35	35	35	35	5.494	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	1.024.911	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
179	16.6.1 (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).											
		Program Administrasi Umum	Nilai komponen Pelaporan Kinerja terhadap evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	%	12-13	13-14	13-14	14-15	14-15	94.196	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP								APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	DPPr & PA
		Kegiatan :											
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	72	72	73	73	74		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	DPPr & PA
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN											
		Kegiatan :											
		Penyusunan Profil Kependudukan	Nilai SAKIP	Nilai	73	75,82	77	80,32	82,84		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN											
		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	68,69 Nilai	70,75 Nilai	76,79 Nilai	80,83 Nilai	84,87 Nilai		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	DPMN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Kegiatan :											
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Pemda	Nilai	68-69 nilai	70-75 nilai	76-79 nilai	80-83 nilai	84-87 nilai		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											
		Kegiatan :											
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Nilai Sakip Pemda		68-69 nilai	70-75 nilai	76-79 nilai	80-83 nilai	84-87 nilai		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
		Kegiatan :											
		Fasilitasi Tugas DPRD	Nilai SAKIP		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Sekretariat DPRD
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
		Kegiatan :											
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		72 %	75 %	77 %	80 %	82 %		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKPSDM
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja terhadap evaluasi AKIP	20,21	21-22	23-25	26-28	29-30	30		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda
		Kegiatan :											
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	6.073	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data IKU dan IKD yang tersedia	%	100	100	100	100	100	2.700	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	1.415	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda
		Indeks Inovasi Daerah		Poin	2000	2500	3000	3500	4000	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda
		Persentase kebijakan inovasi yang dikembangkan di daerah		%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan	80	90	100	100	100	100	15.645	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda
		Kegiatan :											
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Persentase PD yang melaksanakan forum OPD lingkup PPM	%	100	100	100	100	100	6.892	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2. Persentase keselarasan kegiatan antara renstra dengan renja lingkup PPM	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappeda
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.Persentase PD Yang Melaksanakan forum OPD lingkup PSDA	%	100	100	100	100	100	3.119	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappeda
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2. Persentase Keselarasan Kegiatan Antara Renstra dengan Renja Lingkup PSDA	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappeda
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Persentase PD yang Melaksanakan Forum OPD lingkup IK	%	100	100	100	100	100	4.108	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappeda
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2. Persentase Keselarasan Kegiatan Antara Renstra dengan Renja Lingkup IK	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappeda
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase UKPP yang berzona integritas	%	25	20	40	66	100	4.251	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kominfo
		Kegiatan :											
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu	Dokumen	2	2	2	2	2	165	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Inspektorat Daerah
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	PD	34	34	34	34	34	2.441	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Inspektorat Daerah
		Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60	70	80	90	100	13.094			
			Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	%	97	100	100	100	100	14.993			
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	%	97	100	100	100	100	-			
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain dan sub domain pemerintah daerah	%	80	85	90	95	100	1.181			
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan infrastruktur jaringan LAN/WAN	%	29	56	82	82	100	1.181			
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem informasi dan terintegrasi sesuai kebutuhan	%	40	50	60	75	80	13.812			
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sekolah yang telah mendapat sosialisasi internet sehat dan aman (insan)		15	20	25	30	35	560			
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik		30	40	50	60	70				
180	16.6.1(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan											
		Program ekonomi dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	%	10	50	80	100	100		APBD I.II dan APBN		Setdakab
		Kegiatan :											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang di selesaikan	%	100	100	100	100	100	2.775	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			Rasio Elektrifikasi	Nilai	68	72	75	78	80	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			2.Persentase pencapaian IKU Pemda Bidang perekonomian dan pembangunan	%	0	0	0	0	0	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
181	16.6.1 (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).											
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase UKPP yang berzona integritas	%	25	20	40	66	100	4.251	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Inspektorat Daerah
		Kegiatan :											
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu	Dokumen	2	2	2	2	2	165	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Inspektorat Daerah
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	PD	34	34	34	34	34	2.441	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Inspektorat Daerah
182	16.6.2 (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kab upaten/Kota). Indikator Lokal ; Indeks kepatuhan pelayanan publik											
		Program Administrasi Umum	Indeks Pelayanan Publik		3,01-3,50	3,51-4,00	4,01-4,50	4,51-5,00	100	92.943	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Pelayanan Publik RSUD	Skor	2,71	2,9	3,20	3,7	4,2		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	RSUD
			Indeks Pelayanan Publik Perizinan	Nilai	85,5	86	86,5	87	87,5		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	DPMPSTP
183	16.7.1 (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).											
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelembagaan perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	85	90	90	100	100	521	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan randa PUG	%	100	100	100	100	100	271	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	%	15	15	15	15	15	114	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	%	70	70	70	70	70	135	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			IPG, IDG dan Capaian Kategori KLA		94,00; 63,00;Pratama (501-600)	95,00; 65,00;Madya (601-700)	96,00; 67,00;Madya (601-700)	97,00; 69,00;Nindya (701-800)	98,00; 71,00;Utama (801-900)	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
			IPG, IDG		95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
184	16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).											
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan									APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan randa PUG	%	100	100	100	100	100	271	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	%	15	15	15	15	15	114	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	%	70	70	70	70	70	135	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			IPG, IDG dan Capaian Kategori KLA		94,00; 63,00;Pratama (501-600)	95,00; 65,00;Madya (601-700)	96,00; 67,00;Madya (601-700)	97,00; 69,00;Nindya (701-800)	98,00; 71,00;Utama (801-900)	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
			IPG, IDG		95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	95,00; 65,00	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Sosial, PPr & PA
185	16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.											
		Program Pencatatan Sipil									APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Kegiatan :	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak	%	98,00	100	100	100	100	1.336	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Efektifitas waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil	Jam	1	1	1	1	1		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	%	100	100	100	100	100		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
186	16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.											
		Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak	%	98,00	100	100	100	100	1.336	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Kegiatan :	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak	%	98,00	100	100	100	100		APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Efektifitas waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil	Jam	1	1	1	1	1	1.070	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	%	100	100	100	100	100	165	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
187	1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KK	%	98,00	100	100	100	100		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Kegiatan :											
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Efektifitas waktu pelayanan pendaftaran penduduk	Jam	1	1	1	1	1	1.487	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase terpenuhinya dokumen kependudukan	%	0	0	100	100	100	90	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	%	100	100	100	100	100	595	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	%	0	0	100	100	100	132	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
188	16.10.1 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan.											
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	%	50	100	100	100	100	11.504	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kominfo
		Kegiatan :											
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberitaan pemerintah daerah melalui media	Berita	350	400	450	500	550	8.555	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kominfo
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kominfo
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama pemberitaan pemda dengan media	Media	22	24	26	28	30		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kominfo
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permintaan informasi dan dokumentasi publik yang terlayani	%	100	100	100	100	100		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kominfo
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyebaran informasi melalui media kelompok informasi masyarakat	%	55	60	65	70	75		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kominfo
			Persentase peningkatan pemanfaatan data statistik sektoral	%	55	65	75	85	95		APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kominfo
189	16.b.1 (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran dis- kriminasi menurut hukum HAM Internasional.											

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) LUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan fasilitas lambaga keaga- maan dan kemasyarakatan	%	15	18	20	23	25	17.260	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan	%	100	100	100	100	100	4.975	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Setdakab
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terfasilitasinya pelayanan terkait kegiatan keagamaan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan msyarakat	%	100	100	100	100	100	33.786	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Setdakab
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan dan pelayanan hukum yang terintegrasi terhadappenyusunan peraturan daerah dan bantuan hukum bagi aparat pemerintah serta masyarakat	%	100	100	100	100	100	7.015	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Setdakab
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase terfasilitasinya koordinasi dalampenyelenggaraan kerja sama daerah	%	100	100	100	100	100	2.400	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Setdakab
			Persentase pencapaian IKU Pemda Bidang perekonomian dan pembangunan	%	0	0	0	0	0	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Setdakab
		TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN											
190	17.1.1	total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.											
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Deviasi realiasi PAD ter- hadap anggaran	9,94 107,71	12,00 110	14,00 110	16,00 115	18,00 115	20,00 120	5.137	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Kegiatan :											
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan asli Daerah dalam APBD	%	100	100	100	100	100	5.137	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
191	17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.											
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Deviasi realiasi PAD ter- hadap anggaran	9,94 107,71	12,00 110	14,00 110	16,00 115	18,00 115	20,00 120	5.137	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Kegiatan :											
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan asli Daerah dalam APBD	%	100	100	100	100	100	5.137	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
192	17.1.2	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.											
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS (%) Penetapan APBD dan APBD-P	%	100	100	100	100	100	852.964	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Kegiatan :											
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan dan anggaran daerah	%	85	85	90	90	90	8.601	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyaluran belanja daerah	%	100	100	100	100	100	3.335	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	Dokumen	35	35	35	35	35	5.494	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	1.024.911	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan data dan sistem sesuai prosedur	%	100	100	100	100	100	977	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
			1. Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD sesuai dengan aturan	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
193	17.1.2 (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.											
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio layanan 4G LTE	%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	17.506	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	1.526	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang di selesaikan	%	100	100	100	100	100	2.775	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			Rasio Elektrifikasi	Nilai	68	72	75	78	80	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			2.Persentase pencapaian IKU Pemda Bidang perekonomian dan pembangunan	%	0	0	0	0	0	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
194	17.6.2 (c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband											
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio layanan 4G LTE	%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	17.506	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	1.526	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang di selesaikan	%	100	100	100	100	100	2.775	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			Rasio Elektrifikasi	Nilai	68	72	75	78	80	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			2.Persentase pencapaian IKU Pemda Bidang perekonomian dan pembangunan	%	0	0	0	0	0	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
195	17.8.1	Proporsi individu yang menggunakan internet											
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio layanan 4G LTE	%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	17.506	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Kegiatan :											
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terfasilitasinya koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian	%	100	100	100	100	100	1.580	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terfasilitasinya koordinasi kebijakan di bidang sumber daya alam	%	100	100	100	100	100	2.450	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			Nilai Sakip Pemda	Nilai	68-69	70-75	76-79	80-83	84-87	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab
			Persentase pencapaian IKU Pemda bidang administrasi umum	%	0	0	0	0	0	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Setdakab

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) JUTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
196	17.17.1 (a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).											
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS (%) Penetapan APBD dan APBD-P	%	100	100	100	100	100	852.964	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Kegiatan :											
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan dan anggaran daerah	%	85	85	90	90	90	8.601	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyaluran belanja daerah	%	100	100	100	100	100	3.335	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	Dokumen	35	35	35	35	35	5.494	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	1.024.911	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan data dan sistem sesuai prosedur	%	100	100	100	100	100	977	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
			1. Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD sesuai dengan aturan	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
197	17.17.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapa proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)											
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS (%) Penetapan APBD dan APBD-P	%	100	100	100	100	100	852.964	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Kegiatan :											
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan dan anggaran daerah	%	85	85	90	90	90	8.601	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyaluran belanja daerah	%	100	100	100	100	100	3.335	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	Dokumen	35	35	35	35	35	5.494	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	1.024.911	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan data dan sistem sesuai prosedur	%	100	100	100	100	100	977	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
			1. Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD sesuai dengan aturan	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	BKAD
198	17.19.2 (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.											
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan dalam hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Insta-	Nilai	21-22	23-25	26-28	29-30	30	10.188	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda
		Kegiatan :											
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	6.073	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data IKU dan IKD yang tersedia	%	100	100	100	100	100	2.700	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda

No. Urut	KODE REK	INDIKATOR SDG/PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN (Rp) ILTA	SUMBER DANA	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026				
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	1.415	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda
			Indeks Inovasi Daerah	Poin	2000	2500	3000	3500	4000	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda
			Persentase kebijakan inovasi yang dikembangkan di daerah	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Bappedda
199	17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)											
		Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak pada anak usia 0-17 tahun		98	100	100	100	100	2,803	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Kegiatan :											
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Efektifitas waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil	Jam	1	1	1	1	1	1.070	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	%	100	100	100	100	100	165	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	-	APBD I.II dan APBN	Kab.Sijunjung	Dinas Dukcapil
200	17.19.2 (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.											
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	56	70	85	95	100	779	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kominfo
		Kegiatan :											
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	%	56	70	85	95	100	1.265	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kominfo
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pengelola statistik sektoral yang berkualitas	Orang	5	5	5	5	5	1.265	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kominfo
			Jumlah aplikasi yang terintegrasi	Nilai	20	21	22	23	24	-	APBD I.II dan APBN	kab.Sijunjung	Dinas Kominfo


 Muaro Sijunjung, 31 Oktober 2022
 Kepala Bappedda Kabupaten Sijunjung

 Dra. Yuni Elviza, MT
 NIP. 19670615 199403 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN
2023-2026.

**Lampiran 3 : Rencana Kerja Program/Kegiatan Non
Pemerintah Tahun 2022-2026**

Lampiran 1.



TUJUAN 1.
MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrim.											
Nama Program 1: Program Ekonomi											
Nama Kegiatan 1: Pemberdayaan Petani Kopi Di Nagari Sirukam Kab. Solok.	Output : 1. Pendapatan petani binaan naik 20% dari sebelum Intervensi program. 2. Pengetahuan petani meningkat. 3. Terbentuknya lembaga koperasi petani. 4. Terbukanya akses pasar terhadap hasil produk petani.	Orang Petani Kopi	39	100	400	700	1000	3.000	1. ZISWAF (Zakat, Infak,Sedekah dan wakaf). 2. Dana sosial perusahaan lainnya.	1. Kab. Solok, 2. Kab.Tanah Datar	1. Dompet Dhuafa Singgalang, 2. NGO CO2 Rimbo Pangan Lestasri, Unand, 3. UIN IB, 4. YBM BRILiAN, 5. Dinas Pertanian Sumbar, 6. Kementrian Perindustrian 7. Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar
Nama Kegiatan 2 : DD Farm Ternak Sapi.	Output : 1. Meningkatkan pendapatan peternak binaan sebesar 20% dari pendapatan sebelum adanya intervensi program. 2. Meningkatkan pengetahuan	Orang Peternak Sapi	15	25		30		2.000	1. ZISWAF (Zakat, Infak,Sedekah dan wakaf). 2. Dana sosial perusahaan lainnya.	1. Kab. Pesisir Selatan 2. Kab. Solok	1. Dompet Dhuafa Singgalang, 2. YBM BRILiAN, 3. YBM PLN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dalam beternak secara tepat guna kepada peternak binaan. 3. Terbentuknya lembaga lokal yang mandiri. 4. Terbukanya akses pasar terhadap hasil ternak.										
Nama Kegiatan 3 : Kampung Nilai (Nilai Jaya Berkah).	Output : 1. Meningkatkan pendapatan Pembudidaya ikan nila sebesar 20% dari pendapatan sebelum adanya intervensi program. 2. Meningkatkan pengetahuan dalam budidaya ikan nila secara tepat guna kepada pembudidaya ikan nila binaan. 3. Terbentuknya lembaga lokal yang mandiri Terbukanya akses pasar terhadap hasil budidaya ikan nila.	Orang Pembudidaya Ikan Nila	10	15				150	1. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) 2. Dana sosial perusahaan lainnya	Kota Padang	1. Dompet Dhuafa Singgalang. 2. Dinas Pangan dan Perikanan Kota Padang
Nama Kegiatan 4 : DD Farm Domba.	Output : 1. Meningkatkan pendapatan peternak domba sebesar 20% dari pendapatan	Orang Peternak Domba	4	7	10	15	20	500	1. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) 2. Dana sosial perusahaan	Kab. Padang Pariaman	1. Dompet Dhuafa Singgalang 2. YBM PLN 3. Dinas Peternakan Kab. Padang

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	sebelum adanya intervensi program. 2. Meningkatkan pengetahuan dalam beternak domba secara tepat guna kepada peternak binaan. 3. Terbentuknya lembaga lokal yang mandiri. 4. Terbukanya akses pasar terhadap hasil peternakan.								lainnya		Pariaman
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 1.3.1*. Proporsi Penduduk Yang Menerima Program Perlindungan Sosial, Menurut Jenis Kelamin, Untuk Kategori Kelompok Semua Anak, Pengangguran, Lansia, Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil/Melahirkan, Korban Kecelakaan Kerja, Kelompok Miskin Dan Rentan.											
Nama Program 1: Survei Program Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas											
Nama Kegiatan 1: Pendataan Disabilitas Dalam Perlindungan Sosial.	Output: Mengetahui presentase jumlah penduduk penyandang disabilitas yang mendapat atau belum mendapat dalam program perlindungan sosial	Kali		1	1	1	1	100	1. CSR 2. APBD	1. Kab. Tanah Datar 2. Kab. Limapuluh Kota 3. Kota Solok 4. Kota Padang	HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)
Nama Kegiatan 2: Advokasi Pada Lembaga Pemerintah Yang Menjalani Program Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.	Output: Lembaga pemerintah memahami penyaluran bantuan tepat sasaran	Pertemuan		1	1	1	1	50	1. CSR 2. APBD	1. Kab. Tanah Datar 2. Kab. Limapuluh Kota 3. Kota Solok 4. Kota Padang	(Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)
Nama Kegiatan 3:	Output: 1. Perempuan	Orang		30	30	30	30	150	1. CSR	Kota Padang	(Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pelatihan Membuat Tas Kain Sebagai Pengganti Kantong Plastik Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Perempuan Penyandang Disabilitas.	penyandang disabilitas memiliki keterampilan membuat tas kain sebagai sumber penghasilan 2. Perempuan penyandang disabilitas menghasilkan tas kain untuk mengurangi limbah plastik.								2. APBD		
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 1.4.1*. Proporsi Penduduk/ Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Pelayanan Dasar.											
Nama Program 1: Layan Air Bersih Untuk Semua											
Nama Kegiatan 1: Dukungan Fasilitas Layanan Air Bersih	Output: 1. Jumlah RT mendapaLayanan Air Bersih	Orang		25	25	25	25	500	Internal & Mitra	Kab. Kep. Mentawai	Yayasan Senarai
	2. Kegiatan Merawat & Melestarikan Sumber Air	ha		5	5	5	5	750	Internal & Mitra	Kab. Kep. Mentawai	Yayasan Senarai
Nama Kegiatan 2: Pelatihan & Pelembagaan Tata kelola Air Bersih	Output: 1. Kegiatan Keberlanjutan Kelembagaan	Unit		2	2	2	2	750	Internal & Mitra	Kab. Kep. Mentawai	Yayasan Senarai

Lampiran 1.



TUJUAN 2.
MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA
MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2.1.1*. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).											
Nama Program 1: Program Kesehatan											
Nama Kegiatan 1: GO-GINA (Gerakan Optimalisasi Gizi Anak)	Output: Perbaikan prilaku dan perbaikan pertumbuhan balita yaitu peningkatan terjadinya berat badan.	Balita usia 6-59 bulan	45	60	90	90	90	250	1. ZISWAF (Zakat, Infak,Sedekah dan wakaf) 2. Dana sosial perusahaan lainnya	1. Kota Padang, 2. Kab. Pesisir Selatan 3. Kab. Dharmasraya, 4. Kab. Padang Pariaman	1. Dompet Dhuafa Singgalang, 2. AIMI Sumbar 3. Dinas Kesehatan
Nama Program 2: Konseling Keluarga Bagi Pasangan Muda Dalam Rangka Mengurangi Angka Stunting Di Kota Padang											
Nama Kegiatan 1: Meningkatkan Pengetahuan Pasangan Muda Terkait Peran Dan Tanggung Jawab Dalam Berumah Tangga	Output: 1. Pasangan muda memiliki pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab dalam berumah tangga 2. Pasangan muda mampu menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.	Pasangan	-	40	40	40	40	60	1. APBD 2. DAK	1. Kecamatan Padang Barat 2. Kecamatan Padang Timur Kota Padang	WCC Nurani Perempuan
Nama Kegiatan 2: Meningkatkan	Output: Pasangan muda mampu mengelola emosi dan	Orang	-	40	40	40	40	60	1. APBD 2. DAK	1. Kecamatan Padang Barat 2. Kecamatan	WCC Nurani Perempuan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengetahuan Dan Keterampilan Pasangan Muda Dalam Mengelola Emosi Dan Berbagi Peran Di Rumah Tangga	berbagi peran di rumah tangga									Padang Timur Kota Padang	
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2.2.1*. Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/ Balita.											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1: Edukasi dan Pendampingan Menyusui dan PMBA	Output: Kelas Menyusui & MPASI	Orang	50	75	100	100	100	45.000.000	Donasi Peserta	Kota Padang	AIMI SUMBAR
	Output: GO GINA (Gerakan Optimalisasi Gizi Anak)	Orang (Anak)	45	60	90	90	90	130.200.000	Donasi Kolaborasi dengan DDS	Kota Padang	1. AIMI SUMBAR 2. Dompet Dhuafa Singgalang
	Output: DEBUR EMAS (Pendampingan Kelompok Ibu untuk Generasi Emas)	Orang (Ibu)	-	20	20	20	20	100.000.000	Sponsor/Hibah/ Donasi	Kota Padang	AIMI SUMBAR
	Output: Seminar/Webinar terkait menyusui dan bencana, menyusui dan stunting dan topik lainnya yang relevan	Orang	100	100	100	100	100	200.000.000	Sponsor/Hibah/ Donasi	Kota Padang	AIMI SUMBAR & Kolaborator
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2.3.1.(A). Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga Kerja Menurut Kelas Usaha Tani Tanaman/ Peternakan/ Perikanan/ Kehutanan.											
Nama Program 1: Inisiatif Ekonomi Hijau Melalui Peningkatan Peran Perempuan Petani Dan Petani Muda Di Sektor Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Padang Pariaman											
Nama Kegiatan 1: Fasilitasi Untuk Pembuatan Demplot Percontohan & Pusat Pembelajaran Di Tingkat Kecamatan Untuk Pengenalan Model Praktik Pertanian Ramah Lingkungan.	Output: Jumlah demplot percontohan & pusat pembelajaran pengenalan model praktik pertanian ramah lingkungan	Unit	6	-	-	-	-	16.000.000	EU	Kab. Padang Pariaman: (Kec. Lubuk Alung, Kec. Batang Anai, Kec. Ulakan Tapakih)	LP2M

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2.3.2*. Rata-Rata Pendapatan Produsen Pertanian Skala Kecil Menurut Subsektor.											
Nama Program 1: Inisiatif Ekonomi Hijau Melalui Peningkatan Peran Perempuan Petani Dan Petani Muda Di Sektor Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Padang Pariaman.											
Nama Kegiatan 1: Memperkuat Motivasi Dan Keterampilan Perempuan Tani Dan Petani Muda Untuk Penerapan Pertanian Berkelanjutan/Ramah Lingkungan.	Output: 1. Jumlah perempuan tani dan petani muda dalam menerapkan pertanian berkelanjutan/ramah lingkungan di lahan sendiri.	Persentase	22	25	-	-	-	250.000.000	EU	Kab. Padang Pariaman (Nagari/desa)	LP2M
	2. Peningkatan tingkat pendapatan perempuan petani dan petani muda yang menerapkan pertanian berkelanjutan/ramah lingkungan.	Persentase	27	35	-	-	-	250.000.000	EU	Kab. Padang Pariaman (Nagari/desa)	LP2M
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2.4.1.(A). Proporsi Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.											
Nama Program 1: Nagari Lestari Berkelanjutan.											
Nama Kegiatan 1: Dukungan Fasilitasi Regulasi Kaasan Pangan Tingkat Nagari	Output: 1. Jumlah Luas Kawasan Pertanian	ha		5	5	5	5	300	Internal & Mitra	Kab. Pasaman Barat	Yayasan Senarai
	2. Keberlanjutan Pertanian Berbasis Organik	Kelompok		2	2	3	3	300	Internal & Mitra	Kab. Pasaman Barat	Yayasan Senarai
Nama Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitasn & Keberlanjutan Kelembagaan.	Output: Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian Berlanjutan	Kelompok		2	2	3	3	900	Internal & Mitra	Kab. Pasaman Barat	Yayasan Senarai
Nama Program 1: Kebun Pangan Keluarga											
Nama Kegiatan 1: Kebun Pangan Keluarga	Output: Terbentuknya 470 Kebun pangan di Keluarga	Keluarga	470	470				94 (Juta Rupiah)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nama Kegiatan 2: Pelatihan Penanaman	Output: Terlaksananya beberapa pelatihan untuk penguatan Kapasitas keluarga dalam penanaman tanaman pangan	Pelatihan	3	3				60 (Juta Rupiah)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia
Nama Kegiatan 3: Monitoring dan Evaluasi.	Output: Termonitoringnya kebun pangan keluarga.	Pertemuan	4	4				16 (Juta Rupiah)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia

Lampiran 1.



TUJUAN 3.
MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 3.1.1*. Angka Kematian Ibu (AKI).											
Nama Program 1: Program Kesehatan											
Nama Kegiatan 1: Pos Ibu Hamil GO-GINA Nama Kegiatan	Output: Kelahiran anak dengan sehat	Ibu Hamil usia 15 – 49 Tahun	40	40	40	40	40	200	1. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) 2. Dana sosial perusahaan lainnya	1. Kota Padang 2. Kab. Pesisir Selatan 3. Kab. Dharmasraya 4. Kab. Padang Pariaman	1. Dompot Dhuafa Singgalang 2. AIMI Sumbar 3. Dinas Kesehatan
Nama Kegiatan 2: ALS (Aksi Layanan Sehat)	Output: Intervensi layanan kesehatan berupa promotif, kuratif dan preventif di daerah pedalaman di Sumatera Barat.	Orang	250	250	400	400	400	250	1. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) 2. Dana sosial perusahaan lainnya	19 Kab/Kota di Sumatera Barat	1. Dompot Dhuafa Singgalang 2. Dinas Kesehatan
Nama Program 2: Program Respon & HIV											
Nama Kegiatan 1: Peningkatan Layanan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi Pada Masyarakat Dan Pasien Klinik Cemara PKBI.	Output: 1. Mengurangi angka kematian ibu dan bayi, melalui layanan mobile klinik.	Orang/Layanan	500	750				550	IPPF (International Planned Parenthood Federation)	Kota Padang	PKBI SUMBAR
	2. Meningkatnya	Orang/ layanan	500	250					IPPF (International	Provinsi Sumatera	PKBI SUMBAR

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pemahaman kesehatan reproduksi remaja yang inklusif.								Planned Parenthood Federation)	Barat	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 3.2.1*. (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup.											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1: Peningkatan Layanan Konseling Menyusui	Output: 1. Konseling Menyusui	Orang	10	24	24	24	24	15.900.000	Donasi Klien	Kota Padang	AIMI Sumbar
	2. Pelatihan Konselor MEnyusui Modul 40 jam WHO Unicef.	Orang		20	-	20		300.000.000	1. Fee Peserta 2. Sponsor Hibah	Kota Padang	AIMI Sumbar
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 3.3.1*. Jumlah Infeksi Baru HIV per 1000 Penduduk Tidak Terinfeksi.											
Nama Program 1: HIV& TB											
Nama Kegiatan 1: Penjangkauan Populasi Kunci Untuk Pemeriksaan HIV/AIDS	Output: 1. Adanya peningkatan tes HIV dari populasi kunci kelompok berisiko	Orang	200	300	-	-	-	500	Global Fund	Kota Padang	PKBI SUMBAR
	2. Tersedianya layanan pendampingan obat bagi ODHA	Orang	300	200	-	-	-		Global Fund	Kota Padang	PKBI SUMBAR
Nama Kegiatan 2: TB	Output: Penemuan pasien yang terneveksi TB baik pada dewasa dan anak	Orang	1500	450	-	-	-	150	Yayasan Penabuluh	Kota Padang	PKBI SUMBAR
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 3.7.1*. Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) Yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi Menurut Metode Kontrasepsi Modern.											
Nama Program 1: Sosialisasi Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Kontrasepsi											
Nama	Output:			30	30	40	50	50	1. APBD	Kota Padang	1. HWDI

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan 1: Edukasi Dan Sosialisasi Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi.	Meningkatnya pengetahuan perempuan disabilitas tentang kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi	Orang							2. CSR		2. PKBI
Nama Kegiatan 2: Sosialisasi Tentang bahaya HIV	Output: Kegiatan Meningkatnya Pengetahuan perempuan disabilitas tentang bahaya HIV	Orang		35	45	40	60	150	1. POKIR 2. APBD 3. CSR	Kota Padang	1. HWDI 2. PKBI
Nama Program 2:											
Nama Kegiatan I: Layanan Klinik Pemasangan Alat Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur	Output: Meningkatnya akses layanan dan edukasi penggunaan alat kontrasepsi	Orang	150	200	-	-	-	70	Fundraising Lembaga	Kota Padang	PKBI SUMBAR
Nama Program 3: Pasangan (Suami Istri) Sadar KB											
Nama Kegiatan 2: Meningkatkan Pemahaman Pasangan Suami Istri Terkait Manfaat Dan Fungsi Alat Kontrasepsi	Output: 1. Pasangan suami istri memahami terkait manfaat dan fungsi alat kontrasepsi 2. Pasangan suami istri sadar akan manfaat alat kontrasepsi dan mau ikut menggunakan	orang	0	30	30	30	30	50	1. APBD 2. DAK	Kota Padang	WCC Nurani Perempuan
Nama Program 4: Berkontribusi untuk Penurunan Angka Perkawinan Anak											
Nama Kegiatan 1: Peningkatan	Output: Peningkatan Pengetahuan Remaja	Orang	180					90 (Juta Rupiah)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi	Terkait Kesehatan Reproduksi										
Nama Kegiatan 2: Peningkatan Pengetahuan Orang Tua terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja	Output: Meningkatnya Pengetahuan orang tua terhadap kesehatan reproduksi Remaja	Orang	180					90 (Juta Rupiah)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia
Nama Kegiatan : Peningkatan Pengetahuan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Terhadap Dampak Negative Perkawinan Anak	Output: Meningkatannya pengetahuan dan dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menekan angka perkawinan anak	Orang	60					90 (Juta Rupiah)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 3.8.1*. Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial.											
Nama Program 1: Generasi Berkualitas											
Nama Kegiatan 1: Cegah Stunting Itu Penting	Output: Peran Keluarga terlibat dan berperan dalam pencegahan stunting	Orang		25	25	50	50	500	Internal & Mitra	Kab. Kep. Mentawai	Yayasan Senarai
	Output: Penguatan Kapasitas semua pihak Memahami pentingnya mencegah stunting untuk generasi yang lebih baik	Orang		25	25	50	50	500	Internal & Mitra	Kab. Kep. Mentawai	Yayasan Senarai
Nama Kegiatan 2: Perencanaan Penganggaran Program Stunting	Output: Pembiayaan di tingkat basis untuk program pencegahan stunting	Desa/Nagari		2	3	5	5	500	Internal & Mitra	Kab. Kep. Mentawai	Yayasan Senarai

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nama Program 1: Pemeriksaan Kesehatan Kepada Anak Dukungan GNI (Gugah Nurani Indonesia)											
Nama Kegiatan 1: Pemeriksaan Kegiatan Rutin Kepada Anak Dukungan	Output: Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan kepada 264 Anak Dukungan	Orang	264	228	190	160	130	85 (Juta Rupiah)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia
Nama Kegiatan 2: Distribusi Media Promosi Kesehatan	Output: Terlaksananya beberapa pelatihan untuk penguatan Kelompok Usaha	Pelatihan	264	228	190	160	130	3 (Juta Rupian	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia
Nama Kegiatan : Distribusi Hygine Kit	Output : Terbentuknya Koperasi sebagai wadah yang memayungi kegiatan kelompok Usaha.	Lembaga Koperasi	264	228	190	160	130	25 (Juta Rupiah)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia

Lampiran 1.



TUJUAN 4.
MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 4.1.2*. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ Sederajat, SMP/Sederajat, Dan SMA/Sederajat.											
Nama Program 1: Program Pendidikan											
Nama Kegiatan 1: Beasiswa Sekolah SMART Ekselensia	Output: Beasiswa Full Funded kepada anak lulusan SD untuk menyelesaikan pendidikan SMP-SMA akselerasi 5 tahun dengan system pesantren di Bogor.	Anak lulusan SD	14	14	14	14	14	500	1. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) 2. Dana sosial perusahaan lainnya	Sumatera Barat	Dompot Dhuafa Singgalang,
Nama Kegiatan 2: YES (Yatim Ekselensia Scholarship)	Output: Mewujudkan siswa yang cerdas, berakhlak mulia, hafiz, terampil dan memiliki jiwa kepemimpinan dengan menerapkan kurikulum pendampingan intensif dan memberikan bantuan biaya pendidikan untuk masuk ke perguruan tinggi.	SMA kelas 3	10	10	15	20	20	500	1. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) 2. Dana sosial perusahaan lainnya	Sumatera Barat	Dompot Dhuafa Singgalang,
Nama Kegiatan 3: Bantuan Pendidikan Tunggalan Biaya Sekolah SD, SMP,	Output: Memberikan santunan pendidikan bagi siswa dhuafa yang menunggak dalam hal	SD, SMP, SMA	60	60	100	100	100	250	1. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) 2. Dana sosial perusahaan	Sumatera Barat	Dompot Dhuafa Singgalang,

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SMA.	biaya sekolah								lainnya		
Nama Program 1: Pemberian Dukungan Perlengkapan Sekolah Kepada Anak Dukungan GNI (Gugah Nurani Indonesia)											
Nama Kegiatan 1: Distribusi Perlengkapan Sekolah	Output: Terlaksananya Distribusi perlengkapan Sekolah untuk Anak Dukungan	Orang	264	228	190	160	130	132 (Juta Rupiah)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia
Nama Kegiatan 2: Dukungan Untuk Anak Yang Bermasalah Dibidang Pendidikan Melalui Child Case Management.	Output: Terdampingi anak yang mengalami hambatan/kasus untuk sekolah	Orang/Kasus	12	12	12	12	12	60 (Juta Rupiah)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia
Nama Kegiatan 3 : Gift Money.	Output: Terdistribusinya hadiah dari Donatur untuk dukungan anak dibidang pendidikan.	Orang	15	12	12	12	12	30 (Juta Rupiah)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 4.3.1*. Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.											
Nama Program 1: Peningkatan Jumlah Lulusan SMA Yang Melanjutkan Ke PT											
Nama Kegiatan 1: Pemberian Beasiswa 80% Bagi Keluarga Terdampak Pandemi Covid 19 Selama 8 Semester	Output: 1. Bertambahnya akses perguruan tinggi yang terjangkau dan berkualitas. 2. Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa berhasil lulus dari PT	Orang	13					208	Internal Universitas		FISIPOL UM Sumbar
Nama Kegiatan 2:	Output: Bertambahnya jumlah	Orang	20	30	40	50	60	25	Internal Universitas		FISIPOL UM Sumbar

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Jumlah Lulusan SMA Yang Melanjutkan Perguruan Tinggi.	mahasiswa baru terutama dalam PTS										
Nama Program 1: Peningkatan keterampilan Bahasa Inggris dan perluasan wawasan kesempatan berbasis Bahasa Inggris untuk siswa sekolah menengah atas											
Nama Kegiatan 1: Amcor goes to School	Output: 1. Peningkatan wawasan siswa SMA terkait kesempatan pendidikan dan non formal berhubungan dengan negara Amerika Serikat dan bahasa Inggris. 2. Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa berhasil lulus dari PT 3. Modul digital Amcor Goes to School	Kegiatan	1	3	5	6	7	60	Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta	SMA di Sumatera Barat	American Corner Universitas Andalas
Nama Kegiatan 2: English Club	Output: 1. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris peserta English Club. 2. Modul digital English Club selama setahun	Kegiatan	12	16	18	20	22	-	American Corner Universitas Andalas	Universitas Andalas	American Corner Universitas Andalas
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 4.3.1.[a]. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).											
Nama Program 1: Pengajaran Bahasa Inggris Untuk Anak Berusia Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama											

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nama Kegiatan 1: English with Langkah Kami untuk Kita Tahap 1 di Tarantang dan Baringin (Pilot project untuk kelas Bahasa Inggris)	Output: 1. Terbentuknya kelas Bahasa Inggris untuk anak umur sekolah dasar di Kelurahan Tarantang dan Baringin. 2. Kemampuan Bahasa Inggris anak kelas berada pada level 'beginner'.	Orang	55	-	-	-	-	15	Langkah Kami untuk Kita	Kelurahan Tarantang dan Baringin Kota Padang, Sumatera Barat	Langkah Kami untuk Kita
Nama Kegiatan 2: English with Langkah Kami untuk Kita Kelas Pemula 1 di Tarantang dan Baringin (bagi siswa yang sudah ikut kelas Tahap 1 namun belum mampu naik ke kelas Lanjutan 1)	Output: Kemampuan Bahasa Inggris anak kelas berada pada level 'beginner'.	Orang	-	25	25	25	25	15	Langkah Kami untuk Kita	Kelurahan Tarantang dan Baringin Kota Padang, Sumatera Barat	Langkah Kami untuk Kita
Nama Kegiatan 3: English with Langkah Kami untuk Kita Kelas Lanjutan 1 di Tarantang dan Baringin (bagi siswa kelas Tahap 1 dan mampu naik ke kelas Lanjutan 1)	Output: Kemampuan Bahasa Inggris anak kelas berada pada level 'beginner' ke 'pre-intermediate'.	Orang	-	30	30	30	30	25	Langkah Kami untuk Kita	Kelurahan Tarantang dan Baringin, Kota Padang, Sumatera Barat	Langkah Kami untuk Kita
Nama Kegiatan 4: English with Langkah Kami untuk Kita Kelas	Output: Kemampuan Bahasa Inggris anak kelas berada pada level	Orang	9	15	20	20	20	15	Langkah Kami untuk Kita	Sekretariat FIM, Jl. Pulai, Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang	Langkah Kami untuk Kita

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pemula 1 di Sawahan, Kec. Padang Timur	'beginner'.								Sumatera Barat		
Nama Program 2:											
Nama Kegiatan 1: Penggalangan Dana Alumni	Output: 1. Bantuan Beasiswa untuk mahasiswa HMI yang kurang mampu	Orang	5	5	5	5	5	625	Swadaya alumni	Kota Payakumbuh	Kahmi Kabupaten 50 Kota
	2. Bantuan sewa sekretariat HMI	HMI	1	1	1	1	1	55	Swadaya alumni	Kota Payakumbuh	Kahmi Kabupaten 50 Kota
Nama Program 3:											
Nama Kegiatan 1: Penggalangan Dana Alumni	Output: Beasiswa untuk mahasiswa HMI yang kurang mampu.	Orang	5	5	5	5	5	625	Swadaya alumni	Kota Payakumbuh	Kahmi Kota Payakumbuh
	Bantuan sewa sekretariat HMI	HMI	1	1	1	1	1	55	Swadaya alumni	Kota Payakumbuh	Kahmi Kota Payakumbuh
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 4.4.1. Proporsi Remaja Dan Dewasa Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK).											
Nama Program 1: Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penggunaan Laptop Dan Perangkat Lunak Untuk Remaja Perempuan											
Nama Kegiatan 1: Peningkatan Literasi Digital Untuk Remaja Perempuan Di Tarantang, Baringin Dan Batu Gadang	Output: 1. Peningkatan kemampuan remaja dalam menggunakan Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft Power Point, Canva.	Orang	4	5	5	5	5	10	Langkah Kami untuk Kita	Kantor PBT, Batu Gadang Kota Padang Sumatera Barat	1. Langkah Kami untuk Kita 2. Pambangkik Batang Tarandam (PBT)
	2. Modul digital pelatihan komputer dalam bentuk slide dan video pelatihan										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	di Youtube lembaga untuk perangkat lunak Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft Power Point, Canva.										
Nama Program 2: Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penggunaan Laptop Dan Perangkat Lunak Untuk Kelompok Perempuan											
Nama Kegiatan 1: Peningkatan Keterampilan Literasi Digital Untuk Anggota Pengurus Kelompok Perempuan Nusantara Di Tarantang, Baringin Dan Batu Gadang	Output: 1. Peningkatan jumlah anggota pengurus Kelompok Perempuan Nusantara yang mampu menggunakan Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft Power Point dan email. 2. Modul digital pelatihan komputer dalam bentuk slide dan video pelatihan di Youtube lembaga untuk perangkat lunak Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft Power Point dan penggunaan email. 3. Akun G-mail masing-masing peserta dari Kelompok Perempuan Nusantara.	orang	9	10	10	10	10	10	Langkah Kami untuk Kita	Kantor PBT, Batu Gadang Kota Padang Sumatera Barat	1. Langkah Kami untuk Kita 2. Pambangkik Batang Tarandam (PBT)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 4.5.1*. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Tingkat SD/Sederajat, Dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Pada Tingkat SMP/Sederajat, SMA/ SMK/Sederajat, Dan Perguruan Tinggi untuk (a) Perempuan/ Laki-Laki, (b) Pedesaan/Perkotaan, (c) Kuintil Terendah/Teratas, (d) Disabilitas/Tanpa Disabilitas.											
Nama Program 1: Membangun Kampus Yang Inklusi Dan Berkemajuan											
Nama Kegiatan 1: Akses Kampus Yang Ramah Terhadap Kelompok Minoritas Dan Disabilitas	Output: Adanya mahasiswa dari berbagai latar belakang identitas, Kampus hadir sebagai perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam peningkatan angka partisipasi kasar (APK) PT.	Orang	5	5	6	6	7		Internal Universitas		FISIPOL UM Sumbar
Nama Kegiatan 2: Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Output: KKN Tematik	Orang	15	15	20	20	25		Internal Universitas		FISIPOL UM Sumbar
Nama Kegiatan 3: Memfasilitasi Ketersediaan Perangkat Kurikulum Yang Sesuai Dengan Perkembangan IPTEKS Dan Kebutuhan Masyarakat,Serta Mendorong Berkembangnya Proses Pembelajaran Dan Terciptanya Suasana Akademik Yang Kondusif, Inklusi Dan Berkemajuan	Output: Dokumen pembelajaran yang interaktif, integratif, saintifik, inklusi dan berkeadilan	Paket	1						Internal Universitas		FISIPOL UM Sumbar
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 4.7.1. Pengarusutamaan Pada Semua Jenjang Pendidikan, (i) Pendidikan Kewargaan Dunia, (ii) Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Termasuk Kesetaraan Gender Dan Hak Asasi Manusia Pada (a) Kebijakan Pendidikan Nasional, (b) Kurikulum, (c) Pendidikan Guru, (d) Penilaian Siswa.											
Nama Program 1: Pelatihan Persiapan Memasuki Dunia Kerja Untuk Remaja Perempuan Berusia Sekolah Menengah Atas Dan Level Universitas											
Nama	Output:	orang	4	5	5	5	5	5	Langkah Kami untuk Kita	Universitas Andalas	Langkah Kami untuk Kita

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan I: Pelatihan Pembuatan CV Dan Pembuatan Akun Pada Situs Lowongan Kerja.	1. Peningkatan kemampuan remaja perempuan dalam membuat CV yang kompetitif serta mengunggahnya pada situs lowongan kerja.										
	2. Akun masing-masing peserta di situs Jobstreet dan/atau Glints. 3. Modul pelatihan dalam bentuk digital.										
Nama Program 2: Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah											
Nama Kegiatan 1: Menyusun Kurikulum Pendidikan Seksualitas Bagi Anak SD Dan SMP Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual	Output: 1. Adanya kurikulum pendidikan seksualitas untuk anak SD dan SMP yang bisa dipraktekkan di Sekolah	kurikulum	-	2	2	2	2	200	1. APBD 2. DAK	Kota Padang	WCC Nurani Perempuan
	2. Anak SD dan SMP mendapatkan pengetahuan tentang mencegah terjadinya kekerasan seksual.										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 4.a.1*. Proporsi Sekolah Dengan Akses Terhadap: (a) Listrik (b) Internet Untuk Tujuan Pengajaran, (c) Komputer Untuk Tujuan Pengajaran, (d) Air Minum Layak, (e) Fasilitas Sanitasi Dasar Per Jenis Kelamin, (f) Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, Dan Higienis Bagi Semua (WASH)).											
Nama Program 1: Program Remaja											
Nama	Output:	Orang/Layanan	10	10	-	-	-	20	UPTD PPA	Provinsi	PKBI SUMBAR

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan 1: Advokasi Dan Pendampingan Siswa Hamil Yang Tidak Diinginkan	Terpenuhinya hak pendidikan bagi siswa korban kekerasan seksual									Sumatera Barat	
Nama Program 2: Local Project (Global NETizen)											
Nama Kegiatan 1: Pengembangan Pemuda Dalam Program 4 Minggu Virtual Volunteer Dalam Sebuah proyek yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).	Output: 1. Meningkatkan kesadaran pemuda-pemudi Indonesia akan keberadaban digital, seperti bagaimana menghindari miss informasi di internet, menghindari dan menghadapi ujaran kebencian, hingga membahas efek penggunaan internet dan media sosial terhadap kesehatan mental. 2. Mengajar kepada siswa/i sekolah, kegiatan diskusi, dan workshop perkembangan diri mengenai keberadaban digital.	Orang	50					Rp4.663.000 -	1. Uang pendaftaran 2. Kemitraan	Daring (Seluruh Indonesia)	AIESEC Universitas Andalas

Lampiran 1.



TUJUAN 5.
MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUN PEREMPUAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 5.2.1*. Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15- 64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Atau Emosional) Oleh Pasangan Atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir.											
Nama Program 1: Peningkatan Kesadaran (Awareness) Terhadap Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan											
Nama Kegiatan 1: 16 Days Of Activism Against Gender-Based Violence	Output: 1. Terbentuk jaringan perempuan aktivis American Corner. 2. Peningkatan kesadaran terhadap diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.	Kegiatan	1	1	1	1	1	25	Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta	American Corner Universitas Andalas	American Corner Universitas Andalas
Nama Program 2: Membangun Kelompok Muda Untuk Pencegahan Kekerasan Seksual											
Nama Kegiatan 1: Membentuk Kelompok Muda Dan Meningkatkan Kapasitas Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual	Output: 1. Terbentuknya kelompok muda untuk pencegahan kekerasan seksual dimasing-masing kelurahan di kota Padang. 2. Kelompok muda menjadi agen perubahan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual.	Kelompok	10	10	20	20	20	250	1. Australian Volunteer Internasional 2. APBD 3. DAK	Kota Padang	WCC Nurani Perempuan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 5.3.1*. Proporsi Perempuan Umur 20 - 24 Tahun Yang Usia Kawin Pertama Atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 15 Tahun Dan Sebelum Umur 18 Tahun.											
Nama Program 1: Pembinaan Kelompok Remaja Perempuan											
Nama Kegiatan 1: Bina Remaja Perempuan Untuk Mencegah Pernikahan Dini.	Output: 1. Terbentuknya kelompok binaan remaja perempuan. 2. Rekam data pemetaan akar masalah pendorong pernikahan dini anggota binaan kelompok remaja 3. Modul pelatihan dalam bentuk digital.	Orang	-	5	10	15	20	10	Langkah Kami untuk Kita	Mobile	Langkah Kami untuk Kita
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 5.4.1. Proporsi Waktu Yang Dhabiskan Untuk Pekerjaan Rumah Tangga Dan Perawatan, Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Dan Lokasi.											
Nama Program 1: Penguatan Kelompok Perempuan Di Tingkat Nagari/Desa Dan Jaringan Perempuan Akar Rumput Di Tingkat Kabupaten/Kota											
Nama Kegiatan 1: Fasilitasi Peningkatan Kesadaran Kritis Dan Sensitifitas Gender Terhadap Kelompok Perempuan.	Output: Jumlah anggota kelompok perempuan yang telah menerapkan pembagian kerja dalam keluarga antara suami, anak perempuan, anak laki-laki.	Persentase	50%	55%	60%	65%	70%	324.000.000	LP2M	Kab. Padang Pariaman (Nagari/desa)	LP2M
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 5.5.1*. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.											
Nama Program 1: Mendorong peningkatan partisipasi pemilih perempuan & orang muda untuk memilih calon legislative perempuan pada Pemilu Legislatif 2024 tingkat kabupaten/kota											
Nama Kegiatan 1: Penguatan Calon Legislative Perempuan Untuk Pemilu Legislatif 2024.	Output: Jumlah calon legislative perempuan menjadi anggota legislative dalam Pemilu 2024.	Orang	-	30	30	-	-	100.000.000	Kolaborasi dengan pihak lain	Kabupaten/kota	LP2M
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 5.5.2*. Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Managerial.											
Nama Program 1: BUNDO (Bangkit Perempuan Indonesia)											
Nama Kegiatan 1:	Output: 1. Peningkatan Kapasitas	Orang		15	20	25	30	600	Internal & Mitra		Yayasan Senarai

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penguatan Kapasitas Perempuan	Kemampuan Kepemimpinan Perempuan										
	2. Meningkatnya pemahaman dari perempuan untuk berperan	Orang		15	20	25	30	700	Internal & Mitra		Yayasan Senarai
Nama Kegiatan 2: Pendampingan Kelompok Perempuan.	Output: Terbangun Kelembagaan perempuan yang berkualitas	Kelompok		2	2	3	3	700	Internal & Mitra		Yayasan Senarai
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 5.6.1*. Proporsi Perempuan Usia Reproduksi 15-49 Tahun Yang Membuat Keputusan Sendiri Terkait Hubungan Seksual, Penggunaan Kontrasepsi, Dan Layanan Kesehatan.											
Nama Program 1: Peningkatan Pemahaman Signifikansi Kesehatan Alat Reproduksi Perempuan											
Nama Kegiatan 1: Sosialisasi 'Menstrual Movement' Kepada Remaja Dan Dewasa Perempuan.	Output: 1. Peningkatan jumlah perempuan yang memahami Kesehatan reproduksi, terkhusus pada 'menstrual movement'. 2. Modul digital sosialisasi.	orang	-	25	50	75	100	20	Langkah Kami untuk Kita	1. Universitas Andalas 2. Kelurahan Tarantang, Baringin dan Batu Gadang	Langkah Kami untuk Kita
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 5.A.1*. (1) Proporsi Penduduk Pertanian Yang Memiliki Hak Atas Tanah Pertanian; (2) Proporsi Perempuan Penduduk Pertanian Sebagai Pemilik Atau Yang Memiliki Hak Atas Tanah Pertanian, Menurut Jenis Kepemilikan.											
Nama Program 1: Peningkatan Kapasitas Dan Kemandirian Ekonomi Melalui Usaha Pertanian Rumahan											
Nama Kegiatan 1: Pelatihan Pembuatan Perkebunan Vertikal Rumahan .	Output: 1. Peningkatan jumlah perempuan dewasa yang memahami budidaya taman vertikal rumahan. 2. Taman vertikal masing-masing peserta.	orang	-	10	15	20	25	20	Langkah Kami untuk Kita	Kelurahan Tarantang, Baringin dan Batu Gadang, Kota Padang	Langkah Kami untuk Kita

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 5.B.1*. Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam.											
Nama Program 1: Penguatan Kelompok Perempuan Di Tingkat Nigari/Desa Dan Jaringan Perempuan Akar Rumput Di Tingkat Kabupaten/Kota											
Nama Kegiatan 1: Fasilitasi Pelatihan Dan Kegiatan Lainnya Untuk Penguatan Kepemimpinan Dan Pemberdayaan Perempuan Akar Rumput Melalui Online Dan Atau Hybrid.	Output: Jumlah anggota kelompok perempuan tingkat nagari/desa dan jaringan perempuan akar rumput di tingkat kabupaten/kota yang menggunakan Zoom Cloud & WhatsApp Group.	Orang	100	150	200	250	300	162.000.000	LP2M	Nagari & kabupaten/ kota: 1. Kab. Tanah Datar 2. Kota Sawahlunto, 3. Kota Padang 4. Kab. Padang Pariaman 5. Kab. Pesisir Selatan)	LP2M
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 5.C.1*. Ketersediaan Sistem Untuk Melacak Dan Membuat Alokasi Umum Untuk Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.											
Nama Program 1: Program Pendidikan											
Nama Kegiatan 1: Advokasi Dukungan Menyusui	Output: 1. Kegiatan: Sosialisasi Pentingnya Ruang Laktasi dan Dukungan bagi Ibu Menyusui	Orang	-	50	50	50	50	160.000.000	Sponsor/Hibah/Donasi	Kota Padang	AIMI Sumbar
	2. Lomba RuangLaktasi	Kali	-	1	1	1	1	200.000.000	Sponsor/Hibah/Donasi	Kota Padang	AIMI Sumbar
	3. Perayaan Pekan Menyusui Dunia dengan Kolanorasi Intraprofesi.	Kali	1	1	1	1	1	50.000.000	Sponsor/Hibah/Donasi	Kota Padang	AIMI Sumbar
	4. WorkshopUstadz Ustazah.	Kali	-	1	-	1	-	100.000.000	Sponsor/Hibah/Donasi	Kota Padang	AIMI Sumbar

Lampiran 1.



TUJUAN 6.
MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.1.1*. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.2.1*. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 06.03.01. Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.3.1.(a). Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 06.03.02. Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.3.2.(a). Kualitas air permukaan sebagai air baku.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.3.2.(b). Kualitas air tanah sebagai air baku										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 06.04.01. Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 06.04.02. Tingkat water stress: proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediannya.											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:										
	1.2 Output Kegiatan										
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.4.2.(a). Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:										
	1.2 Output Kegiatan										
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.4.2.(b). Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:										
	1.2 Output Kegiatan										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.5.1*. Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:										
	1.2 Output Kegiatan										
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.5.2*. Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:										
	1.2 Output Kegiatan										
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.6.1*. Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.a.1. Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.b.1. Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										

Lampiran 1.



TUJUAN 7.
MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 7.1.1*. Rasio Elektrifikasi.											
Nama Program 1: Memperbarui Jaringan Untuk Pasokan Energi Listrik Dan Gas Di Desa OVOP											
Nama Kegiatan 1: Perbaikan Jaringan Listrik Di Desa OVOP	Output: Pemasangan instalasi listrik bawah tanah	Desa (40 Unit Rumah) (Rp.400rb/meter x 300 meter)		1 (120)	1 (120)	1 (120)	1 (120)	480	1. APBD 2. DANA POKIR 3. CSR 4. BADAN AMIL ZAKAT	Kota Padang	ISMI (Ikatan Saudagar Muslim Indonesia) Sumbar dan Mitra
Nama Kegiatan 2: Membangun Jaringan Gas Di Desa OVOP	Output: Membangun kebutuhan energi seperti jaringan gas	Desa (40 Unit Rumah) (Rp.293rb/meter x 400 meter)		1 (117)	1 (117)	1 (117)	1 (117)	468	1. APBD 2. DANA POKIR 3. CSR 4. BADAN AMIL ZAKAT	Kota Padang	ISMI (Ikatan Saudagar Muslim Indonesia) Sumbar dan Mitra

Lampiran 1.



TUJUAN 8.
MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PERODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 8.3.1*. Proporsi Lapangan Kerja Informal, Berdasarkan Sektor Dan Jenis Kelamin											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1: Peningkatkan Kualitas SDM HMI Kota Payakumbuh.	Output: Meningkatnya jumlah alumni HMI yang mendapatkan pekerjaan yang layak berdasarkan kapasitas bidang formal dan informal.	Orang	20	25	30	35	40	412,5	Swadaya alumni	Kota Payakumbuh	Kahmi Kota Payakumbuh
Nama Program 2:											
Nama Kegiatan 2: Peningkatkan Kualitas SDM HMI Kota Payakumbuh	Output: Meningkatnya jumlah alumni HMI yang mendapatkan pekerjaan yang layak berdasarkan kapasitas bidang formal dan informal	Orang	27	34	45	50	70	565	Swadaya alumni	Kota Payakumbuh	Kahmi Kab. 50 Kota
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 8.3.1.(A). Persentase Akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Ke Layanan Keuangan											
Nama Program 1: Pendampingan UMKM Di Kota Padang											
Nama Kegiatan 1: Pelatihan Perencanaan Usaha dengan BMC.	Output: Pelaku UMKM memiliki perencanaan usaha dengan BMC	20 Pelaku UMKM	4	4	4	4	4	20	KMDM dan Mitra	Kota Padang	Koperasi Mandiri Dan Merdeka (KMDM)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nama Kegiatan 2: Pelatihan Pendaftaran dan Penerbitan NIB Sistem OSS.	Output: Pelaku UMKM memiliki NIB Sistem OSS	20 Pelaku UMKM	4	4	4	4	4	20	KMDM dan Mitra	Kota Padang	Koperasi Mandiri Dan Merdeka (KMDM)
Nama Kegiatan 3: Pelatihan Peningkatan Kapasitas Produksi	Output: Pelaku UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi	20 Pelaku UMKM	4	4	4	4	4	20	KMDM dan Mitra	Kota Padang	Koperasi Mandiri Dan Merdeka (KMDM)
Nama Kegiatan 4: Pelatihan Pemasaran Digital	Output: Kegiatan: Pelaku UMKM memiliki instrumen pemasaran digital.	20 Pelaku UMKM	4	4	4	4	4	20	KMDM dan Mitra	Kota Padang	Koperasi Mandiri Dan Merdeka (KMDM)
Nama Program 1: Mendirikan Atau Meningkatkan Fungsi Koperasi Di Setiap Desa Wisata OVOP											
Nama Kegiatan 1: Menjadikan Koperasi Central Pengelolaan Desa Wisata OVOP.	Output: Meng-upgrade koperasi yang telah ada di desa OVOP	Desa (1 Koperasi)	0	1	1	1	1	80	1. APBD 2. DANA POKIR 3. CSR 4. BADAN AMIL ZAKAT	Kota Padang	1. ISMI (Ikatan Saudagar Muslim Indonesia) Sumbar 2. Mitra
Nama Kegiatan 2: Meningkatkan Produktivitas Dan Pendapatan Desa Wisata OVOP.	Output: Meningkatkan kompetensi agar produksi berkualitas dan memenuhi izin edar nasional.	Desa (40 UMKM)	0	20	20	20	20	80	1. APBD 2. DANA POKIR 3. CSR 4. BADAN AMIL ZAKAT	Kota Padang	1. ISMI (Ikatan Saudagar Muslim Indonesia) Sumbar 2. Mitra
Nama Program 1: Kelompok Usaha Dan Koperasi yang Berkelanjutan											
Nama Kegiatan 1: Memfasilitasi terbentuknya kelompok Usaha di Komunitas.	Output: Terbentuknya 5 Kelompok usaha di Komunitas	Kelompok	5					5 (Juta Rupiah)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nama Kegiatan 2: Pelatihan Untuk Kelompok Usaha	Output: Terlaksananya beberapa pelatihan untuk penguatan Kelompok Usaha	Pelatihan	3					60 (Juta Rupian)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia
Nama Kegiatan 3: Pembentukan Koperasi Mutiara Tigo Pasie	Output: Terbentuknya Koperasi sebagai wadah yang memayungi kegiatan Kelompok Usaha	Lembaga Koperasi	1					70 (Juta Rupiah)	Gugah Nurani Indonesia	Kec. Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat	Gugah Nurani Indonesia

Lampiran 1.



TUJUAN 9.
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 9.2.1.(a). Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1: Membangun Irigasi dan Jalan.	Output: Transportasi lancar dan mencegah banjir	Desa (145rb/meter x 200 meter jalan/ 815rb/m x 400 meter irigasi)	0	600	600	600	600	1.400	1. APBD 2. DANA POKIR 3. CSR 4. BADAN AMIL ZAKAT	Kota Padang	1. ISMI (IKatan Saudagar Muslim Indonesia) Sumbar 2. Mitra
Nama Kegiatan 2: Membangun Sarana Dan Prasarana Lingkungan Desa Wisata OVOP	Output: 1. Membangun dapur produksi OVOP yang memenuhi standar SNI dan HACP, serta membuat outlet penjualan	Desa (1 Dapur Produksi & 1 outlet penjualan)	0	1	1	1	1	2000	1. APBD 2. DANA POKIR 3. CSR 4. BADAN AMIL ZAKAT	Kota Padanvg	1. ISMI (IKatan Saudagar Muslim Indonesia) Sumbar 2. Mitra
	2. Pemanfaatan shelter tsunami untuk kegiatan masyarakat	Kecamatan (1 shelter)	0	1	1	1	1	400	1. APBD 2. DANA POKIR 3. CSR 4. BADAN AMIL ZAKAT	Kota Padanvg	1. ISMI (IKatan Saudagar Muslim Indonesia) Sumbar 2. Mitra

Lampiran 1.



TUJUAN 10.
MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 10.1.1.(A). Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.											
Nama Program 1: Pendampingan Koperasi di Kota Padang											
Nama Kegiatan 1: Pelatihan Perencanaan Berkoperasi.	Output: Kegiatan: terbentuknya komunitas sadar koperasi	Komunitas	1	1	1	1	1	5	KMDM dan Mitra	Kota Padang	KMDM dan Mitra
Nama Kegiatan 2: Pelatihan Pendirian Koperasi.	Output: terbentuknya koperasi baru	Komunitas	1	1	1	1	1	5	KMDM dan Mitra	Kota Padang	KMDM dan Mitra
Nama Kegiatan 3: Pelatihan Manajemen Koperasi.	Output: Terbentuknya koperasi dengan tata kelola yang baik.	Koperasi	1	1	1	1	1	5	KMDM dan Mitra	Kota Padang	KMDM dan Mitra

Lampiran 1.



TUJUAN 11.
MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 11.4.1.(a). Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP).										
Nama Program 1: : Local Project (For Our Home)										
Nama Kegiatan 1: Pelestarian Budaya Dan Potensi Pariwisata Di Kota Padang, Serta. Kampanye Yang Terkait Dengan Tema Proyek Ini Dan Akan Dibagikan Di Sosial Media Peserta.	Output: Berkontribusi dalam melestarikan budaya serta mengembangkan potensi pariwisata kota Padang sehingga semakin dikenal dan memiliki keberlangsungan yang lebih lama lagi.	Orang	30				Rp6.200.000	1. Uang Pendaftaran 2. Kemitraan	Kota Padang	AIESEC Universitas Andalas

Lampiran 1.



TUJUAN 12.
MEMJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.1.1*. Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.02.01. Jejak material (material footprint)										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.02.02. Konsumsi material domestik (domestic material consumption)										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.03.01. Indeks kehilangan makanan (<i>Food loss index</i>); dan (b) Indeks sampah makanan (<i>Food waste index</i>).										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.3.1.(a). Persentase sisa makanan										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.4.1*. Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.4.1.(a). Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.4.1.(b). Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.4.2*. Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:										
	1.2 Output Kegiatan										
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.05.01. Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:										
	1.2 Output Kegiatan										
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.5.1.(a). Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:										
	1.2 Output Kegiatan										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.6.1*. Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:										
	1.2 Output Kegiatan										
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.6.1(a). Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:										
	1.2 Output Kegiatan										
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.7.1*. Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.7.1(a). Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.7.1(b). Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.08.01. Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.8.1.(a). Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.8.1.(b). Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.										
Nama Program 1:										

[illegible]

Nama Program 1:

[illegible]

Nama Program 1:

[illegible]

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.b.1(a). Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 12.c.1*. (a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									

Lampiran 1.



TUJUAN 13.
MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 13.1.2*. Rencana Dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Bencana Yang Selaras Dengan The Sendai Framework For Disaster Risk Reduction 2015–2030											
Nama Program 1: Manajemen Pengetahuan Dan Pengembangan Kapasitas											
Nama Kegiatan 1 : Melaksanakan Sharing Knowledge Ke Daerah Memiliki FPRB Yang Aktif Dan Memiliki Potensi Ancaman Yang Sama.	Output: Terlaksananya <i>sharing knowledge</i> ke daerah memiliki FPRB yang aktif dan memiliki potensi ancaman yang sama	Orang		1	1	1	1	10	1. FPRB 2. Mitra	Sumatera Barat	1. FPRB 2. Mitra
Nama Kegiatan 2 : Melaksanakan Dan Atau Memfasilitasi Akses Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota FPRB.	Output: 1. Kegiatan terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas anggota FPRB. 2. Bertambahnya jumlah Anggota FPRB yang memiliki Pengetahuan Kebencanaan	Orang		1	1	1	1	20	1. FPRB 2. Mitra	Sumatera Barat	1. FPRB 2. Mitra
Nama Kegiatan 3 : Mengadakan Forum Berbagi Ilmu Antar Anggota FPRB	Output: 1. Terlaksananya forum berbagi ilmu antar anggota FPRB dan	Orang		1	1	1	1	10	1. FPRB 2. Mitra	Sumatera Barat	1. FPRB 2. Mitra

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dan Penggiat PRB		penggiat PRB. 2. Bertambahnya jumlah Anggota FPRB yang memiliki Pengetahuan Kebencanaan									
Nama Program 2: Partisipasi Dan Pelembagaan											
Nama Kegiatan 1: Pengintegrasian Rencana Kerja FPRB Dengan Lembaga Anggota Dan Pihak Terkait Pengurangan Risiko Bencana.	Output: Terintegrasiannya Rencana Kerja FPRB dengan lembaga anggota dan pihak terkait pengurangan risiko bencana.	Kegiatan		1	1	1	1	20	1. FPRB 2. Mitra	Sumatera Barat	1. FPRB 2. Mitra
Nama Kegiatan 2: Mendorong Pembentukan Dan Aktivasi FPRB Kabupaten/Kota.	Output: Terbetuknya dan aktivasi FPRB Kabupaten/Kota	Kepengurusan		1	1	1	1	25	1. FPRB 2. Mitra	Sumatera Barat	1. FPRB 2. Mitra
Nama Kegiatan 3 : Mendorong Dan Atau Memfasilitasi Rapat Koordinasi Para Pihak.	Output: Terlaksananya Rapat Koordinasi para pihak	Pertemuan		1	1	1	1	20	1. FPRB 2. Mitra	Sumatera Barat	1. FPRB 2. Mitra
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 13.1.3*. Persentase Pemerintah Daerah Yang Mengadopsi Dan Menerapkan Strategi Penanggulangan Bencana Daerah Yang Selaras Dengan Rencana/ Strategi Nasional Penanggulangan Bencana.											
Nama Program 1: Regulasi dan Advokasi Kebijakan (PRB)											
Nama Kegiatan 1: Mendorong Dan Atau Fasilitas Penyusunan Dan Revisi Kebijakan Terkait Penanggulangan Bencana	Output: 1. Tersedianya Revisi kebijakan terkait penanggulangan bencana.	Kebijakan		1	1	1	1	50	1. FPRB 2. Mitra	Sumatera Barat	1. FPRB 2. Mitra

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Asistensi dan Pendampingan Penyusunan Revisi Kebijakan.									
Nama Program 2: Monev, Litbang, Data											
Nama Program 3: Humas, Publikasi, Kampanye PRB											
Nama Kegiatan 1: Kampanye PRB melalui media massa dan media sosial (leaflet, brosur)	Output: Publikasi media PRB di semua platfom (leaflet, brosur)	Publikasi		1	1	1	1	10	1. FPRB 2. Mitra	Sumatera Barat	1. FPRB 2. Mitra
Nama Kegiatan 2: Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Upaya-Upaya PRB Di Sumatera Barat.	Output: Terlaksananya Monitoring dan evaluasi upaya-upaya PRB di Sumatera Barat	Kegiatan		1	1	1	1	5	1. FPRB 2. Mitra	Sumatera Barat	1. FPRB 2. Mitra
Nama Kegiatan 3 : Mengadakan Seminar, Pameran Dan Kompetisi.	Output:	Kegiatan		1	1	1	1	5	1. FPRB 2. Mitra	Sumatera Barat	1. FPRB 2. Mitra
Kode Dan Nama Indikator TPB/Sdgs : 13.2.1*. Terwujudnya Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), Serta Monitoring, Pelaporan Dan Verifikasi Emisi GRK Yang Dilaporkan Dalam Dokumen <i>Biennial Update Report (BUR)</i> Dan <i>National Communications</i>											
Nama Program 1: Regulasi dan Advokasi Kebijakan (PRB)											
Nama Kegiatan 1: Sosialisasi Ecological Fiscal Transfer (EFT)	Output: Tersosialisasikan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT).	Orang	30	30	30			100	JEMARI Sakato - TAF	Sumatera Barat	1. JEMARI Sakato 2. Mitra
Nama Kegiatan 2:	Output : Terbentukanya kelompok	Kelompok Kerja Wilayah	2	2	2			100	JEMARI Sakato - TAF	Sumatera Barat	1. JEMARI Sakato

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembentukan Kelompok Kerja Wilayah.	Kerja Wilayah	(Pokja)									2. Mitra
Nama Kegiatan 3: Pelatihan Kelompok Kerja Wilayah Skema Ecological Fiscal Transfer (EFT)	Output: Kelompok Kerja Wilayah memahami skema Ecological Fiscal Transfer (EFT)	Orang	30	30	30			100	JEMARI Sakato - TAF	Sumatera Barat	1. JEMARI Sakato 2. Mitra
Nama Kegiatan 4: Perencanaan Kebijakan Skema Ecological Fiscal Transfer (EFT).	Output: Addanya rencana Kebijakan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT)	Draf konsep kebijakan	2	2	2			200	JEMARI Sakato - TAF	Sumatera Barat	1. JEMARI Sakato 2. Mitra
Nama Kegiatan 5: Kebijakan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT).	Output: Kebijakan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT)	Kebijakan	2	2	2			250	JEMARI Sakato - TAF	Sumatera Barat	1. JEMARI Sakato 2. Mitra
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 13.3.1.(a). Jumlah Satuan Pendidikan Formal Dan Lembaga/ Komunitas Masyarakat Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup.											
Nama Program 1: BERKAH											
Nama Kegiatan 1: Edukakasi & Peningkatan Kapasitas Kepada Sekolah & Generasi Muda	Output: 1. Jumlah Pelajar meningkat terhadap kesadran Penangan perubahan Iklim	Orang		100	150	150	250	800	Internal & Mitra		Yayasan Senarai
	2. Kegiatan Kelompok Muda ikut terlibat dalam gerakan Penganan Perubahan Iklim	Orang		100	150	150	250	800	Internal & Mitra		Yayasan Senarai
Nama Kegiatan 2: BERKAH (Bersih Dari Kawasan Sampah)	Output: Meningkatnya Kelurahan, Desa, Nagari bebas sampah	Titik		2	3	5	5	400	Internal & Mitra		Yayasan Senarai

[illegible]

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 14.2.1*. Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 14.2.1.(a). Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 14.03.01. Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 14.4.1*. Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.										

[illegible]

[illegible]

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 14.b.1*. Jumlah negara- negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dengan <i>nationally determined contributions</i> , strategi jangka panjang, rencana nasional adaptasi, dan strategi yang dilaporkan dalam adaptation communications dan national communications.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 14.b.1.(a). Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 14.b.1.(b). Jumlah nelayan yang terlindungi.										
Nama Program 1:										

[illegible]

MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

[illegible]

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 15.1.2.(a). Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 15.02.01. Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 15.2.1.(a). Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju.										
Nama Program 1:										
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 15.3.1*. Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 15.a.1.(a). Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:										
	1.2 Output Kegiatan										
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 15.b.1. (a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati.											
Nama Program 1:											
Nama Kegiatan 1:	1.1 Output Kegiatan:										
	1.2 Output Kegiatan										
Nama Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 15.b.1.(a). Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.											
Nama Program 1:											

[illegible]

[illegible]

Lampiran 1.



TUJUAN 16.
MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 16.5.1.(a). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).											
Nama Program 1: Pendidikan Anti Korupsi											
Nama Kegiatan 1: Memasukkan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pembelajaran.	Output: Mata kuliah pendidikan anti korupsi	Orang	10	15	20	20	20		Internal Universitas		FISIPOL UM Sumbar
Nama Kegiatan 2: Kerjasama Penelitian Dan Pengabdian Dalam Penguatan Isu Anti Korupsi	Output: Adanya Riset kolaborasi terkait penguatan isu anti korupsi	Paket	1	2	2	3	3		Internal Universitas		FISIPOL UM Sumbar

Lampiran 1.



TUJUAN 17.
MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (Jumlah total dari 2022-2026)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA											
Kode Dan Nama Indikator TPB/SDGs : 17.11.1.(A) Pertumbuhan Ekspor Produk Non Migas											
Nama Program 1: Pelatihan Ekspor Impor bagi UMKM di Kota Padang											
Nama Kegiatan 1: Edukasi tentang Ekspor Impor	Output: Meningkatnya pengetahuan Pelaku UMKM tentang ekspor impor	20 Pelaku UMKM	4	4	4	4	4	20	KMDM dan Mitra	Kota Padang	KMDM dan Mitra
Nama Kegiatan 2: Pelatihan Ekonomi Digital	Output: Meningkatnya pengetahuan Pelaku UMKM tentang digital ekonomi	20 Pelaku UMKM	4	4	4	4	4	20	KMDM dan Mitra	Kota Padang	KMDM dan Mitra
Nama Kegiatan 3: Pelatihan Ekspor Impor.	Output: Meningkatnya kemampuan Pelaku UMKM tentang ekspor impor.	20 Pelaku UMKM	4	4	4	4	4	20	KMDM dan Mitra	Kota Padang	KMDM dan Mitra